



RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023

PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Laporan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana APBD pada tahun mendatang yang akan dibahas dan disahkan menjadi APBD.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
 - b. acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Penyusunan RAPBD Tahun 2023, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.

- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

Pasal 6

- (1) Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pagu anggaran dalam RKPD menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Jika terjadi perbedaan dalam pembahasan RAPBD Tahun 2023 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD Tahun 2023 dan semua aspek yang mempengaruhi penetapan RAPBD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 Juni 2022



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan dari RPJMD 2021-2026 tahun kedua dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain: 1) pendekatan partisipatif; 2) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; 3) Pendekatan holistik-tematik; 4) Pendekatan integratif; dan 5) Pendekatan spasial.

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 maka dijadikan sebagai a) pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah provinsi; b) pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; c) pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) provinsi; dan d) Alat atau instrumen pengendalian kinerja bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda serta penilaian keberhasilan pemerintahan daerah.

Tanjungpinang, Juni 2022
Gubernur Kepulauan Riau,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-28
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-58
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-220
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-229
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-270
2.3.1 Bidang Ekonomi	II-270
2.3.2 Bidang Kemaritiman dan Lingkungan Hidup	II-277
2.3.3 Bidang Sosial	II-278
2.3.4 Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	II-279
2.3.5 Bidang Tata Kelola Pemerintahan	II-283
2.3.6 Bidang Kebudayaan	II-284
2.3.7 Bidang Infrastruktur	II-286
2.3.8 Permasalahan Pembangunan Per Urusan	II-288
2.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-334
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional	III-1
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	III-7



3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-19
3.2.1.	Kebijakan Pendapatan Daerah	III-19
3.2.2.	Kebijakan Belanja Daerah	III-26
3.2.3.	Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-30
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1.	Tinjauan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-1
4.1.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	IV-4
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	IV-16
4.2.1.	Telaahan Tema dan Prioritas Nasional Tahun 2023	IV-16
4.2.2.	Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	IV-20
4.2.3.	Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	IV-35
4.2.4.	Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-38
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	V-1
5.1	Arah Kebijakan Indikator Sasaran Pembangunan	V-1
5.2	Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten/Kota	V-3
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	VI-1
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023	VI-1
6.2	Sinergi Program RKPD Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023	VI-11
6.3	Dukungan Program RKPD Tahun 2023 Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VI-20
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	II-2
Tabel 2.2	Letak Geografis Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	II-2
Tabel 2.3	Tinggi Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	II-3
Tabel 2.4	Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020	II-4
Tabel 2.5	Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota	II-4
Tabel 2.6	Daftar DAS di WS Kepulauan Riau	II-5
Tabel 2.7	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2020	II-8
Tabel 2.8	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau	II-20
Tabel 2.9	Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau	II-21
Tabel 2.10	Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau	II-21
Tabel 2.11	Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau	II-22
Tabel 2.12	Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau	II-22
Tabel 2.13	Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau	II-23
Tabel 2.14	Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau	II-23
Tabel 2.15	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau	II-24
Tabel 2.16	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau	II-24
Tabel 2.17	Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit	II-25
Tabel 2.18	Potensi Bahaya Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau	II-25
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	II-26
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk dan LPP Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-26
Tabel 2.21	Komposisi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Usia Tahun 2021	II-27
Tabel 2.22	Indikator Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-27



Tabel 2.23	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-29
Tabel 2.24	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-31
Tabel 2.25	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-34
Tabel 2.26	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Persentase Kontribusi terhadap Jumlah PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-37
Tabel 2.27	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-39
Tabel 2.28	Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau per Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	II-40
Tabel 2.29	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau, 2017-2021	II-40
Tabel 2.30	Komoditi Penyumbang Inflasi Kumulatif Terbesar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	II-41
Tabel 2.31	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau per Maret 2018-2020	II-43
Tabel 2.32	IPM Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	II-46
Tabel 2.33	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera Tahun 2017-2021	II-46
Tabel 2.34	Perkembangan Unsur Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	II-47
Tabel 2.35	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-48
Tabel 2.36	Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	II-49
Tabel 2.37	Rata-Rata Lama Sekolah Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	II-51
Tabel 2.38	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	II-52
Tabel 2.39	Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau September 2017-2021	II-53
Tabel 2.40	Profil Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2021	II-53
Tabel 2.41	Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-54



Tabel 2.42	Perkembangan Jumlah Sanggar Seni dan Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-57
Tabel 2.43	Indikator Fokus Seni dan Budaya Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-57
Tabel 2.44	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-58
Tabel 2.45	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Murni di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-59
Tabel 2.46	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-60
Tabel 2.47	Rasio Murid Terhadap Jumlah Gedung Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-60
Tabel 2.48	Jumlah Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019/2020 dan 2020/2021	II-61
Tabel 2.49	Jumlah Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019/2020 dan 2020/2021	II-61
Tabel 2.50	Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019/2020 dan 2020/2021	II-61
Tabel 2.51	Indikator Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-62
Tabel 2.52	Indikator Kompetensi Lulusan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-63
Tabel 2.53	Indikator Kualitas Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.54	Capaian Sasaran Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-65
Tabel 2.55	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2017-2020	II-71
Tabel 2.56	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	II-91
Tabel 2.57	Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	II-92
Tabel 2.58	Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	II-93
Tabel 2.59	Panjang Jalan dan Panjang Jalan Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-94
Tabel 2.60	Persentase Jalan Berkondisi Baik Tahun 2017-2021	II-95



Tabel 2.61	Realisasi Indikator Kinerja Konektivitas Tahun 2017 - 2021 per Kabupaten/Kota	II-96
Tabel 2.62	Jembatan Berkondisi Baik di Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2021	II-97
Tabel 2.63	Ketersediaan Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2021	II-99
Tabel 2.64	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Bagi Penduduk Tahun 2017 – 2021	II-100
Tabel 2.65	Ketersediaan Sumber Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2021	II-101
Tabel 2.66	Jumlah Titik Rawan Banjir di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-102
Tabel 2.67	Jumlah Titik Rawan Banjir Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2021	II-102
Tabel 2.68	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017–2020	II-103
Tabel 2.69	Status PK dan Revisi Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	II-104
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2017-2021	II-105
Tabel 2.71	Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-106
Tabel 2.72	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dan Penanganan Demo	II-108
Tabel 2.73	Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat	II-109
Tabel 2.74	Kebutuhan Ideal Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	II-109
Tabel 2.75	Kondisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	II-109
Tabel 2.76	Kebutuhan Ideal Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	II-110
Tabel 2.77	Realisasi Capaian Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-111
Tabel 2.78	Gap Expectation Indikator Urusan Sosial Tahun 2020	II-112
Tabel 2.79	Data Keluarga Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	II-113
Tabel 2.80	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Dalam Panti Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-114



Tabel 2.81	Jumlah PMKS Yang Direhabilitasi Di Dalam Pantii-114
	Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017–2020
Tabel 2.82	Capaian Kumulatif yang Dikonversi Jumlah PMKSii-115
	yang Direhabilitasi Di Dalam Pantii-115
	Kepulauan Riau Tahun 2016–2020
Tabel 2.83	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anakii-115
	Tahun 2017–2020
Tabel 2.84	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usaii-115
	Tahun 2017–2020
Tabel 2.85	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosialii-116
	Penyandang Disabilitas Tahun 2017–2020
Tabel 2.86	Populasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosialii-116
	(PSKS) Berbasis Kelembagaan Tahun 2021
Tabel 2.87	Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin yangii-117
	Diverifikasi Menurut Kabupaten di Provinsi
	Kepulauan Riau Pada Tahun 2018-2020
Tabel 2.88	Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsiii-118
	Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.89	Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Pendudukii-118
	Bekerja, dan Pengangguran di Provinsi Kepulauan
	Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.90	Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja dan TPAKii-119
	Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.91	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurutii-120
	Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
	Tahun 2017-2021
Tabel 2.92	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Indikatorii-123
	Hubungan Industrial
Tabel 2.93	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan danii-125
	Perlindungan Anak Tahun 2017-2021
Tabel 2.94	IDG dan Komposit IDG Provinsi Kepulauan Riauii-126
	Tahun 2017-2021
Tabel 2.95	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurutii-127
	Jenis Kelamin Per Kabupaten/Kota
Tabel 2.96	Pejabat Eselon II, III dan IV di Provinsi Kepulauanii-128
	Riau
Tabel 2.97	Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsiii-130
	Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Tabel 2.98	Kekerasan yang Terjadi Pada Anak Tahun 2017-ii-131
	2021
Tabel 2.99	Lokasi Lembaga Layanan Perlindunganii-134
	Perempuan di Provinsi Kepulauan Riau
Tabel 2.100	Produksi, Kebutuhan, dan Ketersediaan Panganii-136
	Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Tabel 2.101	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017-ii-138
	2021
Tabel 2.102	Luas Tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riauii-139
	yang Bersertifikat Tahun 2017-2020



Tabel 2.103	Kinerja Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-140
Tabel 2.104	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-143
Tabel 2.105	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-143
Tabel 2.106	Uji Pencemaran Air Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-143
Tabel 2.107	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-144
Tabel 2.108	Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Telah Aktif Tahun 2017-2021	II-145
Tabel 2.109	Data Jumlah PKK Aktif Tahun 2017-2020	II-146
Tabel 2.110	Data Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2017-2020	II-146
Tabel 2.111	Data Jumlah BUMDes dan BUMDes Aktif Tahun 2017-2021	II-146
Tabel 2.112	Data BUM Desa Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2021	II-147
Tabel 2.113	Data Prestasi Yang Diraih Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-148
Tabel 2.114	Data Persentase TTG Yang Dimanfaatkan Masyarakat Tahun 2017-2021	II-149
Tabel 2.115	Perkembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2020	II-149
Tabel 2.116	Data Status Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-150
Tabel 2.117	Data Klasifikasi Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	II-150
Tabel 2.118	Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-151
Tabel 2.119	Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2020	II-151
Tabel 2.120	Data Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2021	II-152
Tabel 2.121	Data Jumlah RT/RW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	II-152
Tabel 2.122	Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-153
Tabel 2.123	Jumlah Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-155
Tabel 2.124	Data Lokasi dan Rencana Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Kepulauan Riau	II-156



Tabel 2.125	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di II-156 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020
Tabel 2.126	Jumlah Ijin Trayek dikeluarkan di Provinsi II-157 Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020
Tabel 2.127	Jumlah Barang Terangkut oleh Angkutan Umum II-158 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020
Tabel 2.128	Jumlah Bandara dan Ketersediaan Prasarana Sisi II-159 Darat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020
Tabel 2.129	Ketersediaan Alat Perlengkapan Jalan di Provinsi II-159 Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.130	Kondisi Fasilitas Alat Perlengkapan Jalan pada II-160 Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020
Tabel 2.131	Jumlah Bandar Udara/Pelabuhan/Terminal II-160 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Tabel 2.132	Jumlah Armada Angkutan Umum Provinsi II-160 Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Tabel 2.133	Jumlah Trayek Angkutan Umum Provinsi II-161 Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Tabel 2.134	Jumlah Arus Barang Angkutan Umum Provinsi II-161 Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Tabel 2.135	Jumlah Pendapatan Retribusi Bidang II-161 Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Tabel 2.136	Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika II-162 Tahun 2017-2021
Tabel 2.137	Koperasi Aktif di Provinsi Kepulauan Riau Tahun II-164 2017-2021
Tabel 2.138	Capaian Kinerja Urusan Koperasi Provinsi II-165 Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.139	Capaian Kinerja Urusan UKM Provinsi Kepulauan II-166 Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.140	Persebaran Investasi PMDN di Provinsi Kepri II-168 berdasarkan wilayah Tahun 2017-2020 (%)
Tabel 2.141	Persebaran Investasi PMA di Provinsi Kepri II-169 berdasarkan wilayah Tahun 2017-2020 (%)
Tabel 2.142	Sebaran Investasi Dalam Negeri di Provinsi Kepri II-169 Berdasarkan Sektor Tahun 2017 – 2020 (%)
Tabel 2.143	Sebaran Investasi Asing di Provinsi Kepri II-170 Berdasarkan Sektor Tahun 2017-2020 (%)
Tabel 2.144	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal II-170 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.145	Organisasi Pemuda dan Olahraga Provinsi II-171 Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Tabel 2.146	Kinerja Statistik Pemerintah Provinsi Kepulauan II-172 Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.147	Jumlah SDM di Bidang Statistik II-173



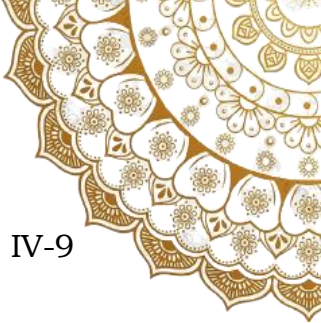
Tabel 2.148	Pendidikan SDM di Bidang Statistik	II-173
Tabel 2.149	Kinerja Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-174
Tabel 2.150	Data Pelatihan, Sosialiasi, dan Bimbingan Teknis terkait Persandian dan Keamanan Informasi	II-174
Tabel 2.151	Jumlah SDM Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	II-175
Tabel 2.152	Data Infrastruktur Persandian dan Keamanan Informasi	II-175
Tabel 2.153	Dimensi-Dimensi IPK Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2019	II-176
Tabel 2.154	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-177
Tabel 2.155	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	II-178
Tabel 2.156	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu Tahun 2017-2020	II-179
Tabel 2.157	Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan Tahun 2017-2021	II-180
Tabel 2.158	Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan Tahun 2017-2021	II-181
Tabel 2.159	Nilai Tukar Nelayan Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2017-2021	II-184
Tabel 2.160	Kinerja Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	II-184
Tabel 2.161	Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 2019-2021	II-185
Tabel 2.162	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kepulauan Riau terhadap PDRB	II-187
Tabel 2.163	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-190
Tabel 2.164	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor dan Subsektor Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019	II-191
Tabel 2.165	Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam Pertanian Tahun 2017-2021	II-195
Tabel 2.166	Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-196
Tabel 2.167	Lahan Kritis Tahun 2020 Wilayah Kerja BPDASHL Sei Jang Duriangkang Provinsi Kepulauan Riau	II-197
Tabel 2.168	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-201
Tabel 2.169	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-203
Tabel 2.170	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-205



Tabel 2.171	Capaian Indikator Kinerja Transmigrasi Tahun II-206 2017-2021
Tabel 2.172	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi II-207 Kepulauan Riau Tahun 2020
Tabel 2.173	Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018- II-208 2021
Tabel 2.174	Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi II-209 Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.175	Kinerja Sekretariat Dewan di Provinsi Kepulauan II-210 Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.176	Kesesuaian Dokumen Perencanaan di Provinsi II-212 Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.177	Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan II-213 Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.178	Kinerja Pendapatan Daerah di Provinsi Kepulauan II-213 Riau
Tabel 2.179	Indeks Profesional ASN Provinsi Kepulauan Riau II-215 Tahun 2020
Tabel 2.180	Realisasi Kinerja Urusan Penelitian dan II-217 Pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.181	Kinerja Pengawasan di Provinsi Kepulauan Riau II-218 Tahun 2017-2021
Tabel 2.182	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir II-222 Rumah Tangga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.183	Persentase Konsumsi Rumah Tangga Nonpangan II-222 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Tabel 2.184	Persentase Luas Wilayah Produktif Provinsi II-223 Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.185	Persentase Luas Wilayah Produktif Menurut II-224 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020
Tabel 2.186	Jumlah Hotel dan Kamar Hotel di Provinsi II-224 Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Tabel 2.187	Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut II-225 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Tabel 2.188	Pelayanan Perizinan DPMPSTSP Provinsi Kepulauan II-225 Riau Tahun 2017-2020
Tabel 2.189	Rata-rata Lama Perizinan di Provinsi Kepulauan II-227 Riau
Tabel 2.190	Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 Provinsi Kepulauan II-228 Riau
Tabel 2.191	Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Riau II-229 Tahun 2017-2021
Tabel 2.192	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran II-232 RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2017-2021



Tabel 2.193	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I 2022	II-237
Tabel 2.194	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan 2022	II-239
Tabel 2.195	Realisasi Capaian Target SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021	II-335
Tabel 2.196	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021	II-337
Tabel 2.197	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	II-339
Tabel 2.198	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	II-340
Tabel 2.199	Alokasi anggaran pendukung pelayanan dasar Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota bersumber dari APBD Tahun 2021	II-340
Tabel 2.200	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	II-342
Tabel 2.201	Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2021	II-343
Tabel 2.202	Alokasi Anggaran Pendukung SPM Perumahan Rakyat	II-343
Tabel 2.203	Target Pencapaian SPM Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2021	II-344
Tabel 2.204	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	II-345
Tabel 2.205	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021	II-347
Tabel 2.206	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021	II-347
Tabel 3.1	Kerangka Fiskal Jangka Menengah Tahun 2020-2025 (% PDB)	III-4
Tabel 3.2	Komoditi Penyumbang Inflasi Kumulatif Terbesar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	III-9
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023	III-17
Tabel 3.4	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	III-25
Tabel 3.5	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	III-29
Tabel 3.6	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	III-31
Tabel 3.7	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	III-33
Tabel 4.1	Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2023	IV-2
Tabel 4.2	Keselaran Misi RPJMD 2021–2026 dan RPJMN 2020-2024	IV-7



Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	IV-9
Tabel 4.4	Strategi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	IV-12
Tabel 4.5	Rekapitulasi Permasalahan/Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada RKPD Tahun 2023	IV-39
Tabel 5.1	Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	V-1
Tabel 5.2	Realisasi Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dan 2021	V-2
Tabel 6.1	Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pagu RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Berdasarkan Perangkat Daerah	VI-2
Tabel 6.2	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Daerah Tahun 2023	VI-8
Tabel 6.3	Rekapitulasi Hasil Pembahasan Desk Musrenbangnas Tahun 2022 untuk Pembangunan Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Riau	VI-12
Tabel 6.4	Hasil Kesepakatan Terhadap Daftar Usulan Daerah Yang Dibahas Dalam Musrenbangnas 2022 Provinsi Kepulauan Riau	VI-13
Tabel 6.5	Rekapitulasi Program RKPD Tahun 2023 Pendukung Penerapan SPM	VI-21
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Makro Daerah Tahun 2023	VII-1
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	VII-2
Tabel 7.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	VII-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antardokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	I-5
Gambar 2.1	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Riau	II-1
Gambar 2.2	Peta WS Kepulauan Riau	II-7
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-32
Gambar 2.4	Tingkat Inflasi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau	II-41
Gambar 2.5	Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2021	II-42
Gambar 2.6	Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Per September Tahun 2017-2021	II-43
Gambar 2.7	Ketimpangan Pendapatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Bank Dunia	II-44
Gambar 2.8	Kontribusi Sektor dan Penduduk yang Bekerja Berdasar Sektor Tahun 2019	II-45
Gambar 2.9	Perbandingan Perkembangan IPM Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-46
Gambar 2.10	Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-48
Gambar 2.11	Perbandingan Perkembangan Lama Harapan Sekolah antara Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-50
Gambar 2.12	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	II-55
Gambar 2.13	Indeks Kedalaman Kemiskinan Per Maret 2020 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (P1) (%)	II-55
Gambar 2.14	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	II-56
Gambar 2.15	Indeks Keparahan Kemiskinan Per Maret 2020 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (P2) (%)	II-56
Gambar 2.16	Angka Kematian Bayi Tahun 2017-2021	II-68
Gambar 2.17	Angka Kematian Balita Tahun 2017-2020	II-68
Gambar 2.18	Angka Kematian Ibu Tahun 2017-2021	II-69
Gambar 2.19	Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-70
Gambar 2.20	Prevalensi Stunting di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-71
Gambar 2.21	Rasio Posyandu per Satuan Balita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-72



Gambar 2.22	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2017-2020	II-72
Gambar 2.23	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-73
Gambar 2.24	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-73
Gambar 2.25	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-74
Gambar 2.26	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-75
Gambar 2.27	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-76
Gambar 2.28	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-77
Gambar 2.29	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-77
Gambar 2.30	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-78
Gambar 2.31	Non-Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-79
Gambar 2.32	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017- 2020	II-79
Gambar 2.33	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-80
Gambar 2.34	Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019	II-80
Gambar 2.35	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019	II-81
Gambar 2.36	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-81
Gambar 2.37	Penderita Diare Yang Ditangani Tahun 2017-2020	II-82
Gambar 2.38	Angka Kejadian Malaria Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-83
Gambar 2.39	Cakupan Kunjungan Bayi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-84
Gambar 2.40	Cakupan Puskesmas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-85
Gambar 2.41	Cakupan Puskesmas Pembantu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-85
Gambar 2.42	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-86



Gambar 2.43	Cakupan Pelayanan Nifas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-87
Gambar 2.44	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-88
Gambar 2.45	Cakupan Pelayanan Anak Balita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-88
Gambar 2.46	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-89
Gambar 2.47	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-90
Gambar 2.48	Cakupan Desa/Keluarga Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-91
Gambar 2.49	Angka Kriminalitas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-108
Gambar 2.50	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-120
Gambar 2.51	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau, Februari 2018 - Februari 2020 Pengangguran pada Kelompok Usia Muda	II-121
Gambar 2.52	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Umur Muda di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-121
Gambar 2.53	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2017 – 2020	II-123
Gambar 2.54	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2017-2021	II-125
Gambar 2.55	Komposisi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-128
Gambar 2.56	Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-129
Gambar 2.57	Grafik Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO Tahun 2017-2021	II-130
Gambar 2.58	Rasio Kekerasan Pada Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2021	II-131
Gambar 2.59	Pernikahan Usia Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017–2019	II-132
Gambar 2.60	Perkembangan PATBM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2021	II-135
Gambar 2.61	Skor PPH Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2017-2021	II-137
Gambar 2.62	Tingkat Keamanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-137
Gambar 2.63	Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-154



Gambar 2.64	Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-154
Gambar 2.65	Unmet Need Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-155
Gambar 2.66	Nilai IP-TIK Indonesia menurut Provinsi Tahun 2019	II-163
Gambar 2.67	Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2017-2021 di Provinsi Kepulauan Riau	II-168
Gambar 2.68	Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton) Tahun 2017-2021	II-182
Gambar 2.69	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (dalam USD)	II-183
Gambar 2.70	Jumlah Ekspor Ikan Segar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	II-183
Gambar 2.71	Perbandingan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara 2017-2021 (Juta Orang)	II-188
Gambar 2.72	Jumlah Wisatawan Mancanegara melalui Empat Pintu 2017-2021	II-188
Gambar 2.73	Rata-rata Lama Menginap (hari) Tahun 2017-2021	II-190
Gambar 2.74	Perbandingan Jumlah Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, dan Perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau 2017-2021	II-192
Gambar 2.75	Perbandingan Produksi Hasil Produk Peternakan (kg) Tahun 2020	II-193
Gambar 2.76	Jumlah Produksi Padi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	II-193
Gambar 2.77	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-206
Gambar 2.78	Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	II-208
Gambar 2.79	Nilai LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-209
Gambar 2.80	Kontribusi Unsur-Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 (%)	II-213
Gambar 2.81	Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-214
Gambar 2.82	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-223
Gambar 3.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2017-2021	III-8
Gambar 3.2	Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Di Wilayah Sumatera Tahun 2021	III-8
Gambar 3.3	Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	III-9
Gambar 3.4	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 (%)	III-10



Gambar 3.5	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2021 September (%)	III-10
Gambar 3.6	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Maret (%)	III-11
Gambar 3.7	Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 (Maret)	III-12
Gambar 3.8	Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2021 September	III-12
Gambar 3.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	III-13
Gambar 3.10	Perbandingan IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2021	III-13
Gambar 3.12	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	III-14
Gambar 4.1	Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	IV-1
Gambar 4.2	Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2023	IV-38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari RPJMD tahun kedua. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain: 1) pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; 2) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang; 3). Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; 4) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan 5) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam pelaksanaanya, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan



Pelaksanaan penyusunan RKPD dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan; meliputi penyusunan rancangan keputusan Gubernur tentang pembentukan tim penyusun RKPD provinsi; b. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; c. orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- b. Penyusunan Rancangan Awal; meliputi penyusunan Rancangan Awal RKPD berdasarkan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun berkenaan; pelaksanaan konsultasi publik; penyempurnaan Rancangan Awal RKPD dengan hasil pra forum perangkat daerah dan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
- c. Penyusunan Rancangan; meliputi penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan masukan dari seluruh Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi, pokok-pokok pikiran DPRD, dan usulan dari kabupaten/kota.
- d. Pelaksanaan Musrenbang; dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memberi masukan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD.
- e. Perumusan Rancangan Akhir; meliputi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir berdasarkan berita acara Musrenbang RKPD, dan hasil reviu APIP. Selain itu, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023 diintegrasikan dengan hasil Rakortekrenbang, Rakor Gubernur dan Musrenbangnas.
- f. Penetapan; RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, setelah disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dijadikan sebagai a). pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah provinsi; b). pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; c). pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) provinsi; dan d). Alat atau instrumen pengendalian kinerja bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda serta penilaian keberhasilan pemerintahan daerah.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

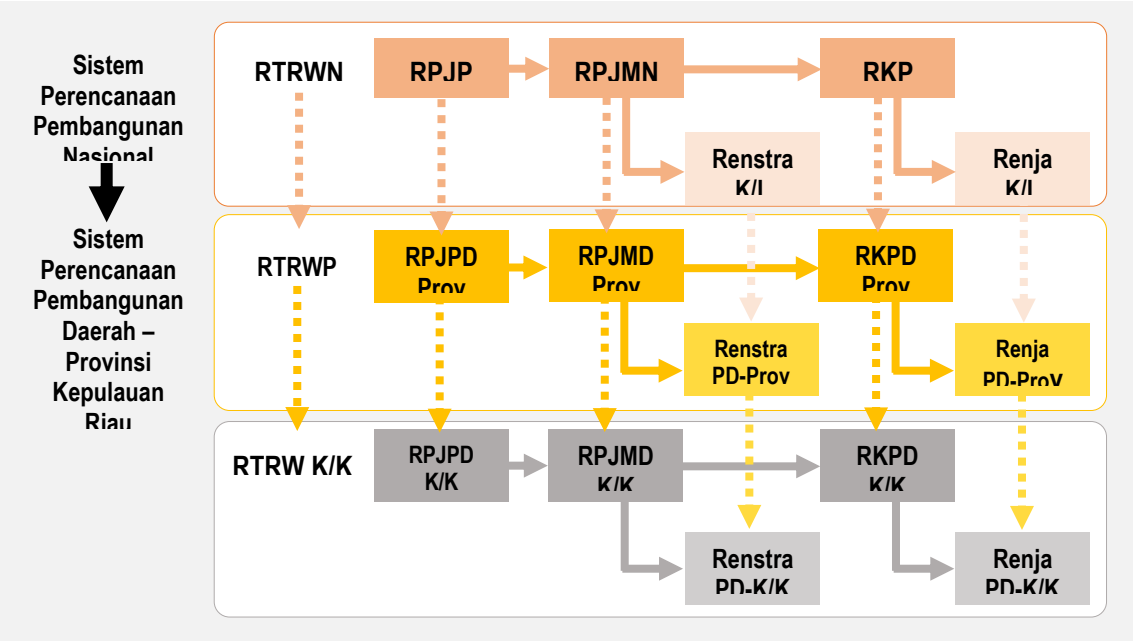


- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1); dan
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3).



1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hubungan antardokumen pembangunan tersebut, dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Hubungan Antardokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD)

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun. Berpedoman pada RPJMD yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi. RKPD merupakan pelaksanaan RPJMD setiap tahun untuk mewujudkan target pembangunan guna mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Penyusunan RKPD mempedomani RKP sebagai bentuk sinergi perencanaan pusat dan daerah. Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional dilakukan dengan penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan



tema, prioritas nasional dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

3. **Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)**

Selain mempedomani RPJMD, penyusunan RKPD juga mempedomani Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana operasional RPJMD yang memuat kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran dari program perangkat daerah dalam RPJMD.

4. **Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)**

Renja PD merupakan pelaksanaan Renstra PD setiap tahun, untuk itu penyusunannya berpedoman pada Renstra PD. Selain itu, penyusunan Renja PD juga mempedomani Rancangan Awal RKPD sebab dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKPD setiap tahun. Peraturan Gubernur tentang RKPD dijadikan sebagai pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

5. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota**

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun RKPD berpedoman pada RKPD provinsi. Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

6. **Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada merupakan dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD. Sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah menyediakan pedoman perencanaan pembangunan tahunan sebagai pelaksanaan tahun kedua RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, prioritas pembangunan daerah serta program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023.
- b. Mensinergikan rencana pemerintah daerah dengan pokok-pokok pikiran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk pembangunan tahun 2023.



- c. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.
- d. Menjadi instrument pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan daerah.
- e. Menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota se-Kepulauan Riau.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD; hubungan RKPD dengan dokumen lainnya; dan sistematika penyajian RKPD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menyajikan capaian pembangunan Provinsi Kepulauan Riau selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, disajikan juga kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu sampai tahun berjalan. Berdasarkan capaian pembangunan dan kinerja program dan kegiatan yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Pada bab ini disajikan kondisi ekonomi nasional dan daerah melalui beberapa indikator makro ekonomi. Kondisi perekonomian tahun lalu menjadi dasar untuk melakukan proyeksi target indikator makro ekonomi tahun 2023. Ekonomi daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan proyeksi keuangan daerah. Pada bagian ini dimuat proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2023.

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai target untuk tahun 2023. Penentuan target ini mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, isu strategis provinsi maupun evaluasi hasil pembangunan tahun lalu. Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan mendukung prioritas nasional, maka ditetapkan prioritas pembangunan provinsi tahun 2023. Pada bab ini dimuat juga pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan bagi perumusan kebijakan tahun 2023.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Bab ini menyajikan arahan target sasaran pembangunan kabupaten/kota tahun 2023 yang sekaligus mendukung pencapaian target



pembangunan provinsi. Selain itu dimuat juga kebijakan pembangunan kewilayahan untuk masing-masing kabupaten/kota.

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini memuat rencana kerja berupa program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2023 yang disertai target dan pagu indikatif. Pada subbab ini dimuat juga indikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung penerapan standar pelayanan minimal (SPM), dan sinergi program pembangunan provinsi dengan prioritas nasional.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada bab ini dimuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan tahun kedua RPJMD. Indikator kinerja disertai dengan target yang akan dicapai pada tahun 2023.

Bab VIII. Penutup

Bab ini memuat hal-hal yang dianggap penting untuk pelaksanaan RKPD tahun 2023.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

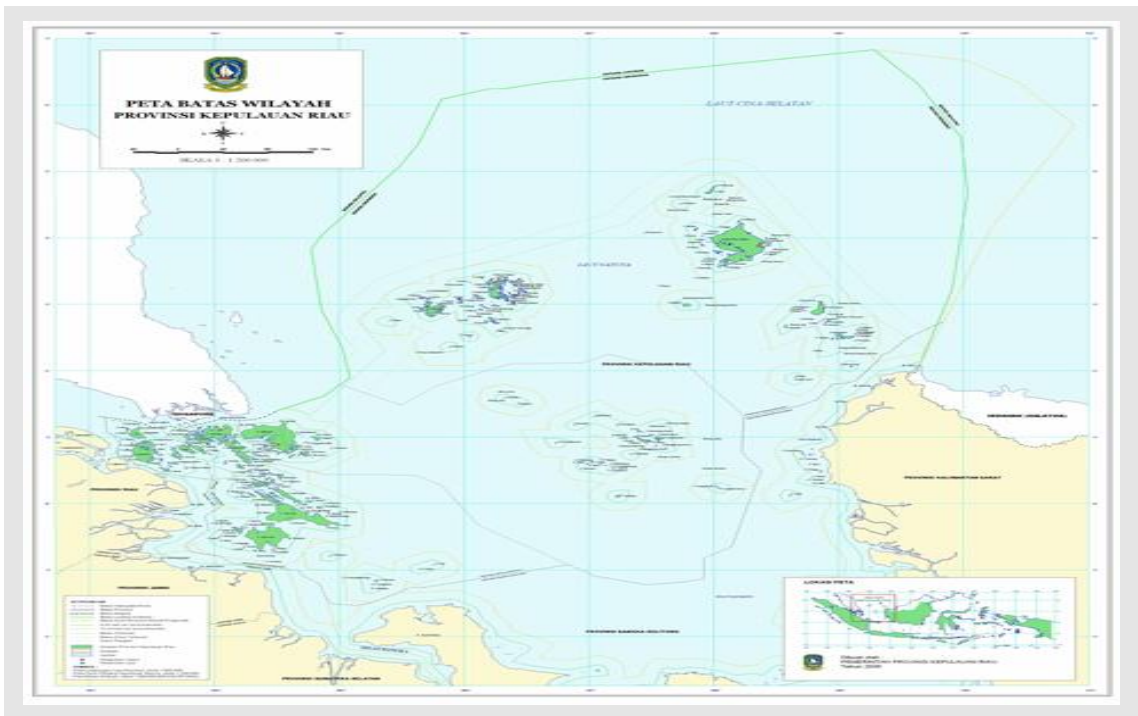
2.1.1.1. Luas dan Batas Administrasi

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Cina Selatan
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Kondisi saat ini batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau



Gambar 2.1
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Riau



Secara administratif Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 (dua) kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, serta memiliki 5 (lima) kabupaten yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Jarak antara ibukota provinsi ke daerah kabupaten/kota terjauh ditempuh sejauh 440 km dari Natuna-Tanjungpinang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.273,87 km². Rincian luas wilayah beserta jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Data Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah		
		Kecamatan	Kelurahan	Desa
Kabupaten Bintan	1.320,84	10	15	36
Kabupaten Karimun	930,45	12	29	42
Kabupaten Natuna	1.999,18	15	7	70
Kabupaten Lingga	2.214,63	13	7	75
Kabupaten Kepulauan Anambas	626,98	10	2	52
Kota Batam	1.034,76	12	64	0
Kota Tanjungpinang	147,03	4	18	0
Total	8.273,87	76	142	275

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada 0°29 LS 04°40LU dan 103°22'109".40"BT. Berdasarkan publikasi BPS, letak geografis masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.2
Letak Geografis Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Letak Geografis	
	Lintang	Bujur
Kabupaten Bintan	1°01'58".93"LU	103°22'32".84"BT
Kabupaten Karimun	1°01'03".94"LU	104°28'56".23"BT
Kabupaten Natuna	3°56'28".62"LU	108°22'38".53"BT
Kabupaten Lingga	0°12'36".24"LS	104°36'18".79"BT
Kabupaten Kepulauan Anambas	3°12'54".00"LU	106°13'04".80"BT
Kota Batam	1°07'40".01"LU	104°03'18".84"BT
Kota Tanjungpinang	0°57'56".48"LU	104°26'27".62"BT
Kepulauan Riau	0°29 LS 04°40LU	103°22'109".40"BT

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022



Berdasarkan tinggi wilayah, Kota Tanjungpinang merupakan daerah dengan posisi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Rincian tinggi wilayah masing-masing kabupaten/kota disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Tinggi Wilayah (mdpl)
Kabupaten Bintan	5 m
Kabupaten Karimun	6 m
Kabupaten Natuna	14 m
Kabupaten Lingga	6 m
Kabupaten Kepulauan Anambas	6 m
Kota Batam	8 m
Kota Tanjungpinang	65 m
Kepulauan Riau	110 m

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

2.1.1.3. Topografi

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggian wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.



4. Kelompok Pulau Batam, Rempang, dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Mengenai ketinggian wilayah menurut kabupaten/kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1: 50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah (surat terlampir), diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Kota Tanjungpinang	65 m
2	Kabupaten Bintan	6 m
3	Kota Batam	8 m
4	Kabupaten Karimun	5 m
5	Kabupaten Lingga	6 m
6	Kabupaten Natuna	14 m
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	6 m

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, gunung tertinggi adalah Gunung Daik di Kabupaten Lingga dengan ketinggian 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Kabupaten Bintan	Gunung Bintan	380
2	Kabupaten Karimun	Gunung Jantan	478
3	Kabupaten Lingga	Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
4	Kabupaten Natuna	Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	Gunung Punjang	443
		Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan (Kepulauan Riau Dalam Angka 2017)



2.1.1.4. Geologi dan Tanah

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama "Paparan Sunda" atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau di antaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.

2.1.1.5. Hidrologi

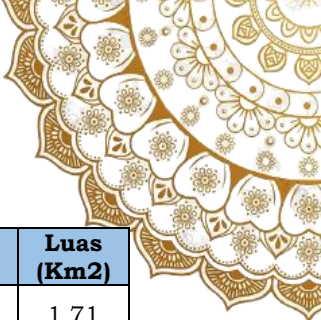
Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. WS Kepulauan Riau mencakup 2.408 pulau pembentuk Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

WS Kepulauan Riau terdiri dari 117 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

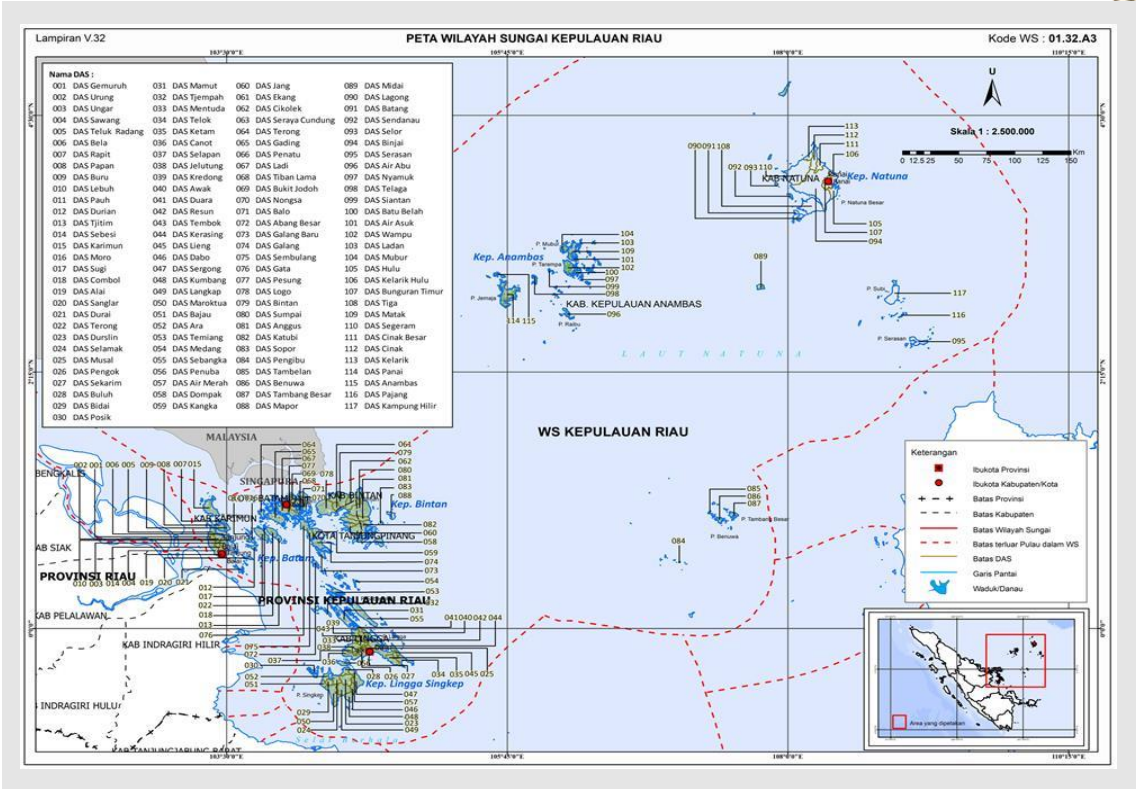
Tabel 2.6
Daftar DAS di WS Kepulauan Riau

No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)
1.	DAS Abang Besar	0,29	41.	DAS Jelutung	0,43	81.	DAS Posik	0,44
2.	DAS Air Abu	0,49	42.	DAS Kampung Hilir	1,57	82.	DAS Rapit	0,17
3.	DAS Air Asuk	0,08	43.	DAS Kangka	0,49	83.	DAS Resun	0,18
4.	DAS Air Merah	0,27	44.	DAS Karimun	1,36	84.	DAS Sanglar	0,18
5.	DAS Alai	0,33	45.	DAS Katubi	1,02	85.	DAS Sawang	1,03



No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)
6.	DAS Anggus	0,89	46.	DAS Kelarik	0,39	86.	DAS Sebangka	1,71
7.	DAS Ara	0,42	47.	DAS Kelarik Hulu	0,67	87.	DAS Sebesi	0,47
8.	DAS Awak	0,28	48.	DAS Kerasing	1,89	88.	DAS Segeram	4,04
9.	DAS Bajau	0,25	49.	DAS Ketam	0,73	89.	DAS Sekarim	0,23
10.	DAS Balo	0,34	50.	DAS Durai	0,20	90.	DAS Selamak	0,60
11.	DAS Batang	0,18	51.	DAS Durian	0,24	91.	DAS Selapan	0,55
12.	DAS Batu Belah	0,51	52.	DAS Kredong	0,50	92.	DAS Selor	0,07
13.	DAS Bela	0,57	53.	DAS Kumbang	0,57	93.	DAS Sembulang	0,43
14.	DAS Benuwa	0,21	54.	DAS Ladan	0,21	94.	DAS Sendanau	0,10
15.	DAS Bidai	0,34	55.	DAS Ladi	0,49	95.	DAS Serasan	0,69
16.	DAS Binjai	6,57	56.	DAS Lagong	0,21	96.	DAS Seraya Cundung	0,16
17.	DAS Bintan	1,79	57.	DAS Langkap	0,21	97.	DAS Sergong	0,90
18.	DAS Bukit Jodoh	0,51	58.	DAS Lebuh	0,10	98.	DAS Siantan	0,10
19.	DAS Buluh	0,41	59.	DAS Lieng	0,35	99.	DAS Sopor	0,04
20.	DAS Bunguran Timur	0,77	60.	DAS Logo	1,87	100.	DAS Sugi	0,98
21.	DAS Buru	0,20	61.	DAS Mamut	1,43	101.	DAS Sumpai	2,27
22.	DAS Canot	0,78	62.	DAS Mapor	0,29	102.	DAS Tambang Besar	0,32
23.	DAS Cikolek	1,78	63.	DAS Maroktua	1,50	103.	DAS Tambelan	0,02
24.	DAS Cinak	1,04	64.	DAS Matak	0,86	104.	DAS Telaga	0,18
25.	DAS Cinak Besar	0,60	65.	DAS Medang	0,36	105.	DAS Telok	0,62
26.	DAS Combol	0,59	66.	DAS Mentuda	0,21	106.	DAS Teluk Radang	0,39
27.	DAS Dabo	0,44	67.	DAS Midai	0,27	107.	DAS Tembok	0,58
28.	DAS Dompok	1,33	68.	DAS Moro	0,23	108.	DAS Temiang	0,86
29.	DAS Duara	0,65	69.	DAS Mubur	0,41	109.	DAS Terong	0,32
30.	DAS Durai	0,20	70.	DAS Musal	0,27	110.	DAS Terong	0,01
31.	DAS Durian	0,24	71.	DAS Nongsa	0,75	111.	DAS Tiban Lama	0,75
32.	DAS Durslin	0,97	72.	DAS Nyamuk	0,14	112.	DAS Tiga	2,06
33.	DAS Ekang	0,48	73.	DAS Panai	2,34	113.	DAS Tjempah	0,32
34.	DAS Gading	1,16	74.	DAS Papan	0,53	114.	DAS Tjitim	0,25
35.	DAS Galang	0,87	75.	DAS Pauh	0,06	115.	DAS Ungar	0,58
36.	DAS Galang Baru	0,33	76.	DAS Penatu	0,72	116.	DAS Urung	0,48
37.	DAS Gata	0,65	77.	DAS Pengibu	0,01	117.	DAS Wampu	1,06
38.	DAS Gemuruh	0,25	78.	DAS Pengok	0,57			
39.	DAS Hulu	0,73	79.	DAS Penuba	0,43			
40.	DAS Jang	0,38	80.	DAS Pesung	0,50			

Sumber: Hasil Analisis Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015



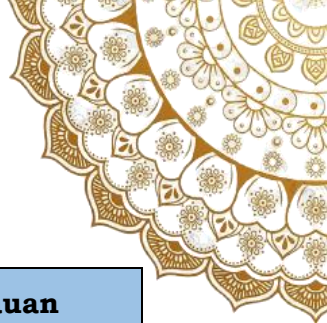
Gambar 2.2
Peta WS Kepulauan Riau

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015

2.1.1.6. Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar 28,80C dan rata-rata terendah di Dabo (Lingga) 26,80C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Bintan, Dabo (Lingga) dan Ranai (Natuna) sebesar 86%, sedangkan rata-rata terendah di Hang Nadim (Batam) dan Karimun sebesar 82%. Jumlah hari hujan tertinggi di Batam sebanyak 233 hari sedangkan hari hujan terendah di Tarempa (Kepulauan Anambas) 182 hari. Tekanan udara tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 1.011,6 mb, sedangkan tekanan udara terendah di Karimun sebesar 1.009,3 mb. Kecepatan angin tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 3,0 knot, terendah di Kepulauan Anambas sebesar 1,0 knot. Penyinaran matahari tertinggi di Kepulauan Anambas sebesar 65%, terendah di Karimun sebesar 39%.

Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di 7 stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.7
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2020

No	Uraian	Tanjung pinang	Bintan	Hang Nadim (Batam)	Karimun	Dabo (Lingga)	Ranai (Natuna)	Terempa (Kepulauan Anambas)
1	Suhu (°C)							
	Maksimum	33,9	33,9	35,3	34,7	31,5	34,9	36,1
	Minimum	21,9	21,9	20,7	21,6	23,8	22,0	21,0
	Rata-Rata	27,38	27,1	28,08	28,8	26,8	27,9	28,28
2	Kelembaban Udara (%)							
	Maksimum	94	98	100	100	93	98	100
	Minimum	43	75	46	44	75	58	45
	Rata-Rata	79	86	82	82	86	86	83
3	Tekanan Udara (mb)	1011,0	1011,0	1011,6	1009,3	1010,1	1010,4	1009,9
4	Kecepatan Angin (knot)	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0
5	Jumlah hari Hujan (hari)	214	210	233	203	227	213	182
6	Penyinaran Matahari (%)	50	50	42	39	51	65	52

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2021)



2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 76/MenLHK-II/2015 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm$ 207.569 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas $\pm$ 60.299 Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas $\pm$ 536 Hektar di Provinsi Kepulauan Riau, dengan Rincian Kawasan Hutan Produksi terbagi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 79.259 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 120.490 Hektar, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 74.367 Hektar.

Namun di tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Kepmen Nomor: SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm$ 330 Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang Seluas $\pm$ 7.560 Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

Dengan diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tersebut terdapat perubahan luasan Kawasan Hutan Produksi Konversi menjadi (HPK) seluas 81.927 ha. Selain itu kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 16.012 hektar dengan perhitungan setelah diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 221.707 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.



a. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kawasan budidaya tanaman pangan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dan lahan kering dimana pengairan dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis dan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija dan hortikultura. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, dan irigasi sederhana).

Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem dan potensi Ketinggian < 1000 m dpl dan Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.

b. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pengusahaan ternak. Kawasan peternakan dapat dilakukan secara terpadu sebagai bagian dari komponen usaha tani lainnya (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung atau suaka alam). Pengembangan kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk membangun peternakan yang berwawasan agribisnis berdasarkan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kecukupan daging secara berkelanjutan. Kawasan agribisnis berbasis peternakan merupakan kawasan peternakan yang berorientasi ekonomi dan memiliki sistem agribisnis berkelanjutan dimulai dari industri hulu hingga industri hilir.

Kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan berdasarkan pendekatan berbasis pulau dan terintegrasi dengan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan. Kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (backyard farming). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten

Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah hinterland. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan morfologi dan ukuran ternak, maka ternak besar (sapi dan kerbau) dikembangkan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Untuk ternak kecil (kambing, domba dan babi) diarahkan di



Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Sedangkan ternak unggas diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, peremajaan areal tanaman perkebunan serta pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan. Perkebunan yang menjadi komoditas favorit di Provinsi Kepulauan Riau adalah kelapa, sagu, karet, lada, cengkeh, coklat, gambir dan kopi. Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan mempertimbangkan faktor-faktor:

- 1) Ketinggian < 2.000 m dpl;
- 2) Kelerengan 40%;
- 3) Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kriteria kawasan peruntukan perikanan adalah:

- a. Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan.
- b. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan memuat zonasi kawasan yang terdiri dari:

1. Zona Inti

Zona inti diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian, dan pendidikan.

2. Zona Perikanan Berkelanjutan

Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.



3. Zona Pemanfaatan

Zona pemanfaatan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.

4. Zona Lainnya

Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu, yakni antara lain zona perlindungan, zona rehabilitasi dan sebagainya.

Sedangkan pengembangan pola ruang untuk kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi:

a. **Kawasan Perikanan Tangkap**

Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.

Potensi perikanan berupa ikan kecil (pelagis) dengan potensi sekitar 513.000 ton namun pemanfaatannya baru sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton, dimana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%.

Rencana pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau yaitu tersebar pada seluruh wilayah pesisir dan kelautan Provinsi Kepulauan Riau terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain.

b. **Kawasan Perikanan Budidaya**

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.

c. **Kawasan Minapolitan**

Kawasan minapolitan merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi,



pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan minapolitan tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

d. **Pelabuhan Perikanan**

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dikembangkan di Kabupaten Natuna dan Kota Batam.

2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas B. Pelabuhan perikanan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT. Pelabuhan ini dapat menampung sekurang-kurangnya 75 buah kapal atau 2250 GT sekaligus dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di laut teritorial dan ZEE Indonesia. Selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang dikembangkan di Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas C. Pelabuhan ini dapat melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT dan menampung 30 buah kapal atau 300 GT. Pelabuhan ini melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan di Antang Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas D, melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT dan menampung 20 buah kapal atau 60 GT kapal perikanan sekaligus. Pelabuhan ini melayani kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Pelabuhan Perikanan



Pantai yang dikembangkan berada di Tanjung Batu Sawah Kota Tanjungpinang; Berakit, Tambelan, Batu Duyung, Kawal dan Berek Motor Kabupaten Bintan; Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Galang Kota Batam; Moro Kabupaten Karimun; Kecamatan Senayang, Singkep, Selayar, Lingga Utara dan Singkep Barat Kabupaten Lingga; Serasan, Selat Lempa, Pulau Laut, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Bunguran Utara, Subi, Midai dan Bunguran Timur Kabupaten Natuna serta Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Timur, Siantan Tengah dan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kawasan peruntukan pertambangan memiliki kriteria antara lain:

- a. Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data potensi mineral dan analisa geologi. Kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.
- b. Kawasan tersebut merupakan bagian proses upaya merubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 12.343 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasiskan potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Adapun kriteria kawasan peruntukan industri yakni sebagai berikut;



- a. Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri;
- b. Tersedia sistem air baku yang cukup;
- c. Adanya sistem pembuangan limbah;
- d. Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat;
- e. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi.

Kawasan industri yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau tersebut sesuai dengan kompetensi inti daerah. Adapun peruntukan kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di:

- a. Kota Tanjungpinang (kawasan industri Air Raja, Kawasan Industri Dompok Darat dan kawasan industri Dompok Seberang)
- b. Kabupaten Bintan (kawasan industri di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang)
- c. Kota Batam (kawasan industri Kabil, Telaga Punggur, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan Batu Besar di Kecamatan Nongsa, Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Sekupang di Kecamatan Sekupang, gugusan Pulau Janda Berhias di Kecamatan Sekupang, Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji, Muka Kuning di Kecamatan Sungai Beduk, Sagulung dan Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, Pulau Kepala Jeri di Kecamatan Belakang Padang, Sembulang di Kecamatan Galang, Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Pulau Dangsi, Pulau Ladi, dan Pulau Belakang Sidi di Kecamatan Bulang)
- d. Kabupaten Karimun (kawasan industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup)
- e. Kabupaten Lingga (kawasan industri di Sungai Tenam di Kecamatan Lingga dan kawasan industri Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat)
- f. Kabupaten Natuna (Kawasan Industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kawasan Industri perikanan di Kecamatan Pulau Tiga).
- g. Kabupaten Kepulauan Anambas (kawasan industri di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja).

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Adapun arahan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan komparatif terdiri dari:



- a. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
- b. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- c. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
- d. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
- e. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
- f. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
- g. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

Geopark merupakan sebuah konsep manajemen pengembangan suatu kawasan (dengan luas tertentu) secara berkelanjutan yang memadukan serasikan tiga keanekaragaman alam, yaitu geologi (*geodiversity*), hayati (*biodiversity*) dan budaya (*cultural diversity*). Dalam pengembangannya, konsep ini berpilar pada aspek Konservasi, Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penumbuhan Nilai Ekonomi Lokal melalui geowisata. Berdasarkan keputusan Komite Nasional Geopark Indonesia di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, November 2018, Natuna resmi termasuk sebagai kawasan Geopark Nasional. Setidaknya, ada 9 geosite yang masuk dalam Geopark Natuna yaitu Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Senua, Pulau Setanau, Senubing, Tanjung Datuk serta Taman Batu Alif.

Sebagai wujud keseriusannya, Kabupaten Natuna sedang menyusun Rencana Induk Pengembangan Geopark Natuna dan juga sudah diusulkan untuk masuk sebagai salah satu prioritas RPJMN 2020-2024. Seiring dengan hal tersebut, sebagaimana Program Kerja Badan Pengelola Geopark Natuna, pada saat ini dalam tahap persiapan menuju UNESCO Global Geopark dengan langkah yang telah dilakukan yaitu penelitian keragaman geologi Kabupaten Natuna dalam rangka perluasan geopark oleh Tim dari UNPAD Bandung.

Selain itu, pada tanggal 18 Desember 2019, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan



Program Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) di Natuna. Pada rapat tersebut disepakati bahwa Geopark Natuna memiliki kekhususan dibandingkan dengan geopark lainnya karena mendukung Rencana Strategis Pertahanan dan Keamanan sebagai bagian dari beranda terdepan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mendorong konservasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pariwisata.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat diluar kawasan;
- c. Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

Masalah permukiman penduduk berkaitan erat dengan kebutuhan penduduk akan perumahan. Peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah akan memberikan konsekuensi dalam penyediaan perumahan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota juga menambah permasalahan di dalam penyediaan rumah. Tingkat urbanisasi semakin pesat akibat terjadinya perubahan yang sangat pesat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Lahan siap bangun bagi pengembangan rumah perorangan perlu dikendalikan dari waktu ke waktu, hal ini mengingat keterbatasan lahan yang tidak mencukupi jika semua kawasan dibangun untuk perumahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Orientasi pengembangan perumahan khususnya di kawasan perkotaan dan cepat tumbuh diarahkan bagi “rumah tumbuh” atau vertikal. Dengan demikian akan mengurangi tekanan bagi penyempitan lahan untuk aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 85.605 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

8. Pemanfaatan Ruang Laut

Pola perencanaan pembangunan hendaknya memasukkan unsur lingkungan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya yang ada bagi kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu perencanaan



pembangunan dan penataan ruang wilayah haruslah didasarkan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Jika dihubungkan dengan karakteristik negara kepulauan (yang dominan adalah perairan laut dan berfungsi sebagai jembatan dan jalan yang menyatukan wilayah kepulauan) maka tentunya beberapa perencanaan pembangunan yang disusun serta arahan penataan ruang wilayah yang dibuat haruslah berkarakteristik wilayah khususnya pada wilayah kepulauan, begitu juga dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi bentang wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah 425.214,676 Km² didominasi oleh perairan laut, terdiri dari 2.408 pulau, baik berpenghuni dan belum berpenghuni, bernama maupun belum bernama. Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi dan permasalahan sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki *comparative advantage* yang tinggi karena posisi geografisnya. Selain itu perairan laut Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral. Berbagai aspek yang terdapat pada perairan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di laut, seperti terganggunya ekosistem yang sangat dilindungi oleh kegiatan pertambangan pasir timah maupun oleh limbah dari alur pelayaran. Hal ini ditambah lagi dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang terletak di kawasan perbatasan wilayah negara, sehingga aspek pengelolaannya perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat potensi dan masalah yang dapat muncul di kawasan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan pengembangan kawasan laut, termasuk juga didalamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang yang berkelanjutan.

Rencana pengembangan kawasan laut Provinsi Kepulauan Riau merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya laut melalui pembagian kawasan laut yang meliputi:

a. Kawasan pemanfaatan umum

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata, permukiman yang telah ada, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, kawasan khusus parkir kapal (Anchorage Area), kawasan alih muat muatan kapal Ship to Ship (STS) Transfer), infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan



karakteristik biofisik lingkungannya

b. Kawasan konservasi

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau sempadan pantai.

c. Kawasan strategis nasional

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai zona pertahanan dan keamanan, situs warisan dunia, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan, termasuk 22 pulau kecil terdepan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

d. Alur laut

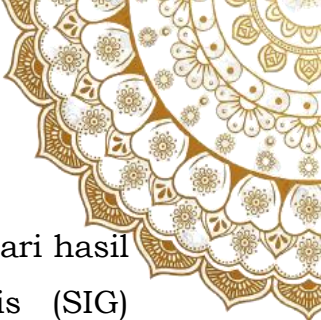
Meliputi alur pelayaran internasional, nasional dan regional, alur sarana umum, alur migrasi ikan, serta jaringan kabel dan pipa gas bawah laut.

Aspek wilayah perencanaan pengembangan kawasan laut meliputi seluruh wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, aspek pengelolaan wilayah laut tetap mengikuti aturan pembagian kewenangan daerah provinsi di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut. Sementara itu penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana alam di Provinsi Kepulauan Riau diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana dan data hasil kajian bencana serta kejadian bencana yang sedang berlangsung dan tidak tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 hingga saat disusunnya dokumen ini, dan masih berpotensi besar terus berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan.

Dari catatan kejadian bencana DIBI, diketahui bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi terjadi 5 (lima) jenis bencana,



yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil analisis menggunakan pendekatan sistem informasi geografis (SIG) teridentifikasi adanya potensi jenis bencana lainnya.

Potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, dan yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana serta menjadi subjek kajian dalam Dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan di Provinsi Kepulauan Riau ini meliputi 11 (sebelas) jenis bencana.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kerawanan bencana, meliputi sebagai berikut:

1. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 820.450,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.8
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	15.050	Sedang
2	Kabupaten Bintan	131.177	Tinggi
3	Kota Batam	102.362	Sedang
4	Kabupaten Karimun	92.591	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	219.949	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	197.083	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	62.238	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		820.450	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

2. Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi

Potensi bahaya kegagalan teknologi memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kegagalan teknologi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak kegagalan teknologi. Di Provinsi Kepulauan Riau diperoleh total



luas bahaya kegagalan teknologi seluas 26.909,00 Ha dan berada pada kelas Rendah.

Tabel 2.9
Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	942	Rendah
2	Kabupaten Bintan	8.674	Rendah
3	Kota Batam	10.893	Rendah
4	Kabupaten Karimun	4.014	Rendah
5	Kabupaten Lingga	378	Rendah
6	Kabupaten Natuna	1.485	Rendah
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	523	Rendah
Provinsi Kepulauan Riau		26.909	Rendah

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

3. Potensi Bahaya Tanah Longsor

Potensi luas bahaya tanah longsor merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Potensi luas bahaya tanah longsor adalah 122.325,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	-	-
2	Kabupaten Bintan	6.419	Rendah
3	Kota Batam	1.978	Sedang
4	Kabupaten Karimun	8.551	Sedang
5	Kabupaten Lingga	36.344	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	22.101	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	46.932	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		122.325	Tinggi

Sumber: Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

4. Potensi Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan banjir terutama terdapat di kawasan tangkapan air yang daerah resapan airnya sudah mengalami kerusakan lingkungan (berubah fungsi lahan) seperti reklamasi dan wilayah dengan drainase yang kurang berfungsi secara baik,



sehingga sungai tidak mampu lagi menampung jumlah aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Total luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 573.425,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Potensi luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau menurut kabupaten/kota dapat dilihat lebih lanjut pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.11
Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	11.104	Tinggi
2	Kabupaten Bintan	106.477	Tinggi
3	Kota Batam	78.136	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	71.488	Sedang
5	Kabupaten Lingga	160.476	Sedang
6	Kabupaten Natuna	134.704	Sedang
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	11.080	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		573.425	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Sementara itu, potensi luas bahaya banjir bandang merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang berdasarkan kajian bahaya banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bahaya banjir bandang. Potensi luas bahaya banjir bandang adalah 12.145,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.12
Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	2.601	Tinggi
2	Kabupaten Bintan	-	-
3	Kota Batam	5.675	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	-	-
5	Kabupaten Lingga	2.442	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	-	-
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	1.427	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		12.145	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

5. Potensi Bahaya Gempa Bumi

Potensi bahaya gempa bumi merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan



total luas bahaya per kabupaten. Sedangkan kelas bahaya gempa bumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdampak bahaya gempa bumi. Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 821.513,00 Ha dan berada pada kelas rendah.

Tabel 2.13
Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	15.016	Rendah
2	Kabupaten Bintan	131.049	Rendah
3	Kota Batam	102.165	Rendah
4	Kabupaten Karimun	92.269	Rendah
5	Kabupaten Lingga	219.493	Rendah
6	Kabupaten Natuna	199.193	Rendah
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	62.328	Rendah
Provinsi Kepulauan Riau		821.513	Rendah

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

6. Potensi Bahaya Kekeringan

Potensi bahaya kekeringan memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten. Kelas bahaya kekeringan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak kekeringan. Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 816.627,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.14
Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	15.003	Sedang
2	Kabupaten Bintan	130.383	Tinggi
3	Kota Batam	101.363	Sedang
4	Kabupaten Karimun	91.726	Sedang
5	Kabupaten Lingga	218.158	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	198.569	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	61.425	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		816.627	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

7. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi



Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Adapun total luas wilayah yang memiliki potensi bahaya gelombang ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau seluas 108.958 ha dengan status kelas bahaya yang tinggi. Adapun rincian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi per kabupaten/kota dapat dilihat lebih lanjut di tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	1.515	Rendah
2	Kabupaten Bintan	13.837	Tinggi
3	Kota Batam	18.947	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	14.495	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	30.497	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	12.776	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	16.891	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		108.958	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

8. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim

Potensi bahaya cuaca ekstrim merupakan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya per kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 153.636,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.16
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	-	-
2	Kabupaten Bintan	511	Sedang
3	Kota Batam	-	-
4	Kabupaten Karimun	-	-
5	Kabupaten Lingga	97	Sedang
6	Kabupaten Natuna	153.028	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-
Provinsi Kepulauan Riau		153.636	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024



9. Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit

Kawasan potensi bahaya epidemi dan wabah penyakit memperlihatkan potensi luas bahaya terdampak epidemi dan wabah penyakit tiap kabupaten/kota. Tabel di bawah menyajikan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana epidemi dan wabah penyakit berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya epidemi dan wabah penyakit ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak epidemi dan wabah penyakit. Potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit secara keseluruhan adalah 798.499,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.17
Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	14.711	Tinggi
2	Kabupaten Bintan	128.705	Tinggi
3	Kota Batam	96.958	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	89.528	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	214.051	Sedang
6	Kabupaten Natuna	195.646	Sedang
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	58.900	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		798.499	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

10. Potensi Bahaya Pandemi Covid-19

Potensi luas bahaya pandemi COVID-19 merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana pandemi COVID-19 berdasarkan kajian bahaya pandemi COVID-19. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak pandemi COVID-19, sedangkan kelas bahaya pandemi COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bahaya pandemi COVID-19. Potensi luas bahaya pandemi COVID-19 adalah 789.558,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.18
Potensi Bahaya Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	14.773	Sedang
2	Kabupaten Bintan	128.608	Rendah
3	Kota Batam	86.609	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	89.497	Sedang
5	Kabupaten Lingga	212.855	Rendah
6	Kabupaten Natuna	195.566	Rendah
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	59.650	Rendah
Provinsi Kepulauan Riau		789.558	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024



2.1.1.9. Kondisi Demografi

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau yang tersebar luas, dimana hanya sebanyak 385 pulau yang berpenghuni, sisanya sebagai pulau tidak berpenghuni. Provinsi Kepulauan Riau sebagai suatu provinsi kepulauan dengan pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan pulau, sehingga dalam pengaturan tata ruang, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat didasarkan kepada konsepsi gugus pulau.

Secara rinci, jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Tanjungpinang	207.057	209.280	211.583	227.663	233.370
Kabupaten Bintan	156.313	157.927	159.403	159.518	162.560
Kota Batam	1.282.196	1.329.773	1.376.009	1.196.396	1.230.100
Kabupaten Karimun	229.194	231.145	232.797	253.457	259.450
Kabupaten Lingga	89.330	89.501	89.781	98.633	100.660
Kabupaten Natuna	76.192	76.968	77.771	81.495	83.360
Kabupaten Kepulauan Anambas	41.412	41.927	42.309	47.402	48.740
Provinsi Kepulauan Riau	2.082.694	2.136.521	2.189.653	2.064.564	2.118.240

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)
2. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar) yang dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk dan LPP Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2021	LPP Tahun 2021
Kota Tanjungpinang	233.370	1.87
Kabupaten Bintan	162.560	1.43
Kota Batam	1.230.100	2.11
Kabupaten Karimun	259.450	1.77
Kabupaten Lingga	100.660	1.54
Kabupaten Natuna	83.360	1.72
Kabupaten Kepulauan Anambas	48.740	2.10
Provinsi Kepulauan Riau	2.118.240	1.94

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

Sementara itu, distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin untuk tahun 2021 dapat dilihat lebih lanjut dalam tabel berikut.



Tabel 2.21
Komposisi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Usia Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	98.376	93.612	191.988
5 - 9	98.677	94.009	192.686
10 - 14	90.224	85.446	175.670
15 - 19	89.495	84.615	174.110
20 - 24	94.676	92.943	187.619
25 - 29	92.180	91.318	183.498
30 - 34	94.187	93.320	187.507
35 - 39	89.784	89.988	179.772
40 - 44	84.985	82.765	167.750
45 - 49	74.900	71.138	146.038
50 - 54	58.649	53.477	112.126
55 - 59	44.509	39.538	84.047
60 - 64	29.969	26.750	56.719
65 - 69	18.874	17.300	36.174
70 - 74	11.330	10.853	22.183
75+	9.902	10.450	20.352
Provinsi Kepulauan Riau	1.080.717	1.037.522	2.118.239

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

Struktur umur penduduk Kepulauan Riau didominasi oleh penduduk muda dan penduduk umur 30-39 tahun. Frekuensi terbesar penduduk laki-laki berada pada kelompok umur 0-9 tahun. Sedangkan frekuensi terbesar penduduk perempuan berada pada kelompok umur 0-9 tahun.

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan disesuaikan dengan potensi dan kondisi kependudukan di suatu daerah. Arah kebijakan pembangunan manusia berorientasi pada penyiapan SDM unggul selaras dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Maju. SDM unggul yaitu SDM yang memiliki kompetensi, *soft skill*, dan berkarakter.

Tabel 2.22
Indikator Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk	2.082.694	2.136.521	2.189.653	2.064.564	2.118.240
Laki-Laki	1.062.692	1.089.442	1.115.765	1.053.296	1.080.717
Perempuan	1.020.002	1.047.079	1.073.888	1.011.268	1.037.522
Pertumbuhan penduduk (%)	2,69	2,58	2,49	-5,7	
Kepadatan wilayah/km ²	254	260	267	-	258.27
Rasio Jenis Kelamin	104,19	104,05	103,90	104,15	104.16

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)
2. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, aspek kesejahteraan sosial, aspek seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau selama lima tahun terakhir adalah 2,18 persen per tahun.

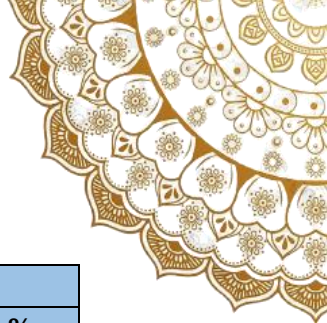
Meningkat dari tahun 2017-2019 dari 166.081,68 milyar rupiah pada tahun 2017 meningkat menjadi 181.895,86 milyar rupiah pada tahun 2019, namun karena pandemi covid-19, nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga konstan 2010 mengalami penurunan menjadi 174.976,70 milyar rupiah pada tahun 2020. Selanjutnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 180.952,44 milyar. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 ekonomi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 3,43 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai -3,80 persen. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan IV-2021 memberikan kontribusi sebesar 7,58 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera.

Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada kategori Jasa Perusahaan sebesar 14,14 persen; kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,30 persen; dan kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,59 persen. Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau tahun 2021 secara c-to-c, Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,63 persen; diikuti kategori konstruksi sebesar 0,86 persen; dan kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 0,30 persen.



Tabel 2.23
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.945,61	3,58	5.757,78	3,32	5.717,73	3,14	5.466,78	3,12	5.322,05	2,94
B	Pertambangan dan Penggalian	25.648,83	15,44	25.995,36	14,98	26.037,64	14,31	24.951,04	14,26	24.748,82	13,68
C	Industri Pengolahan	62.436,28	37,59	65.018,04	37,47	69.079,81	37,98	71.325,79	40,76	75.925,35	41,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.621,70	0,98	1.600,28	0,92	1.653,05	0,91	1.580,66	0,90	1.648,93	0,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	222,66	0,13	225,03	0,13	224,90	0,12	218,65	0,12	218,68	0,12
F	Konstruksi	29.042,76	17,49	31.345,83	18,07	33.924,66	18,65	31.752,17	18,15	33.256,03	18,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.665,03	8,23	14.523,51	8,37	15.408,88	8,47	13.449,61	7,69	13.592,98	7,51
H	Transportasi dan Pergudangan	4.654,49	2,80	4.696,77	2,71	4.280,15	2,35	2.558,45	1,46	2.514,94	1,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.536,02	2,13	3.895,60	2,25	4.283,34	2,35	2.526,91	1,44	2.357,95	1,30
J	Informasi dan Komunikasi	3.736,38	2,25	4.136,74	2,38	4.626,51	2,54	5.392,39	3,08	5.909,45	3,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.466,53	2,69	4.724,11	2,72	4.951,67	2,72	4.798,29	2,74	4.833,25	2,67
L	Real Estate	2.549,27	1,53	2.539,78	1,46	2.542,82	1,40	2.330,97	1,33	2.247,92	1,24
M,N	Jasa Perusahaan	8,88	0,01	9,49	0,01	8,65	0,00	5,03	0,00	5,74	0,00



Kategori	Lapangan usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.750,53	2,26	4.013,02	2,31	4.073,85	2,24	4.398,45	2,51	4.028,29	2,23
P	Jasa Pendidikan	2.418,96	1,46	2.450,78	1,41	2.461,46	1,35	2.259,58	1,29	2.183,17	1,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.618,90	0,97	1.668,14	0,96	1.714,54	0,94	1.679,46	0,96	1.886,04	1,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya	758,86	0,46	898,50	0,52	906,21	0,50	282,47	0,16	272,86	0,15
PDRB		166.081,68	100	173.498,75	100	181.895,86	100	174.976,70	100	180.952,44	100

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021 (diolah)
2. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

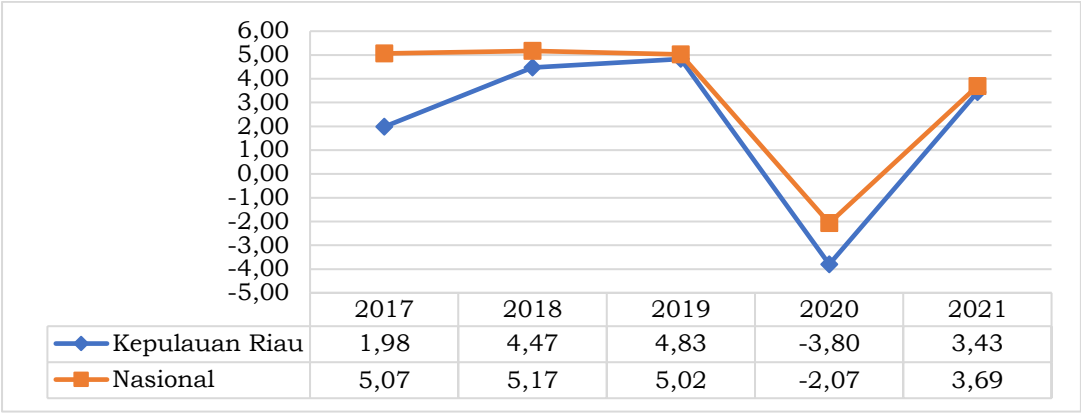


Tabel 2.24
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,21	-3,16	-0,7	-4,39	-2,65
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,59	1,35	0,16	-4,17	-0,74
C	Industri Pengolahan	1,53	4,14	6,25	3,25	6,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,47	-1,32	3,3	-4,38	4,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,54	1,07	-0,06	-2,78	0,01
F	Konstruksi	3,45	7,93	8,23	-6,4	4,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,27	6,28	6,1	-12,72	1,07
H	Transportasi dan Pergudangan	5,45	0,91	-8,87	-40,23	-1,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,93	10,17	9,95	-41,01	-6,69
J	Informasi dan Komunikasi	7,69	10,71	11,84	16,55	9,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,03	5,77	4,82	-3,1	0,73
L	Real Estate	4,33	-0,37	0,12	-8,33	-3,56
M,N	Jasa Perusahaan	7,25	6,84	-8,82	-41,88	14,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,67	7	1,52	7,97	-8,42
P	Jasa Pendidikan	9,88	1,32	0,44	-8,2	-3,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,29	3,04	2,78	-2,05	12,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,43	18,4	0,86	-68,83	-3,40
PDRB		1,98	4,47	4,84	-3,80	3,43

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021 (diolah)
2. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tercatat fluktuatif, sejalan dengan yang terjadi pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,84 persen. Selanjutnya Perekonomian Kepulauan Riau pada tahun 2021 (c-to-c) tumbuh sebesar 3,43 persen, setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,80 persen hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2022 (diolah)

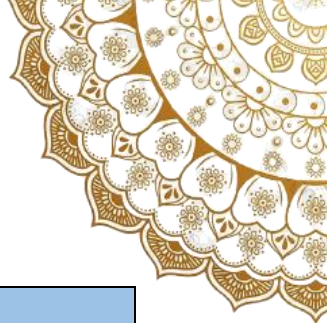
Dengan mengeluarkan sektor migas, perekonomian Kepulauan Riau juga masih mengalami kontraksi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tanpa migas selama lima tahun terakhir adalah sebesar 2,79 persen per tahun. Pada tahun 2021 perekonomian Kepulauan Riau (PDRB non migas) tumbuh sebesar 4,05 persen, naik dari tahun lalu yang tumbuh - 3,78 persen. Kategori Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 14,14 persen pada tahun 2021. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif, kecuali kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (- 8,42 persen); kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-6,69 persen); kategori Real Estate (-3,56 persen); kategori Jasa Lainnya (-3,40 persen); kategori Jasa Pendidikan (-3,38 persen); Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (-2,65 persen); kategori Transportasi dan Pergudangan (-1,70 persen) dan kategori Pertambangan dan Penggalan (-0,74 persen).

Perkembangan nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 dari 227.706,88 milyar rupiah pada tahun 2017 meningkat menjadi 267.658,24 milyar rupiah pada tahun 2019 tetapi karena pandemi covid-19, nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga berlaku mengalami penurunan menjadi 254.253,28 milyar rupiah pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 275.636,33 milyar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 21,41 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 254,23 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan terjadinya inflasi secara agregat.

Selama lima tahun terakhir (2017- 2021) struktur perekonomian Kepulauan Riau didominasi oleh lima lapangan usaha, diantaranya:



Industri Pengolahan; Kontruksi; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kepulauan Riau. Pada tahun 2021, perekonomian Kepulauan Riau masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 42,03 persen terhadap total PDRB. Pada tahun 2020 peranan Industri Pengolahan sebesar 41,66 persen dan terus meningkat menjadi 42,03 persen pada tahun 2021. Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah Konstruksi. Selama lima tahun terakhir, peranan kategori Konstruksi mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 peranan kategori Konstruksi mengalami penurunan, peranannya menjadi sebesar 19,29 persen. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah Kontruksi. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian pertumbuhannya juga terlihat fluktuatif sejak lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 peranannya mencapai 12,59 persen. Angka ini turun dari 14,08 persen di tahun 2017. Selanjutnya, di urutan keempat, ditempati oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,15 persen lebih rendah dari tahun 2017 sebesar 8,63 persen, diikuti oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,07 persen, turun dari 3,51 persen di tahun 2017. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun.



Tabel 2.25
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

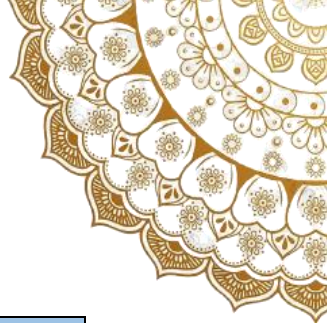
Kategori	Lapangan usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.981,53	3,51	8.100,22	3,26	8.223,77	3,07	8.061,29	3,17	8.471,01	3,07
B	Pertambangan dan Penggalian	32.061,78	14,08	35.148,52	14,13	34.964,44	13,06	28.391,33	11,17	34.696,08	12,59
C	Industri Pengolahan	84.404,23	37,07	91.792,57	36,89	100.705,38	37,62	105.899,71	41,65	115.852,49	42,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.689,97	1,18	2.644,61	1,06	2.763,73	1,03	2.603,10	1,02	2.733,33	0,99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	282,71	0,12	288,74	0,12	291,29	0,11	281,46	0,11	279,64	0,10
F	Konstruksi	41.409,19	18,19	46.628,25	18,74	52.239,25	19,52	49.317,72	19,4	53.159,16	19,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.653,11	8,63	22.074,79	8,87	24.314,35	9,08	21.561,95	8,48	22.474,87	8,15
H	Transportasi dan Pergudangan	7.471,82	3,28	7.648,63	3,07	7.219,02	2,7	4.111,95	1,62	3.826,97	1,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.061,47	2,22	5.585,88	2,24	6.208,87	2,32	3.391,34	1,33	3.171,66	1,15
J	Informasi dan Komunikasi	4.485,79	1,97	5.016,21	2,02	5.603,09	2,09	6.483,54	2,55	7.078,07	2,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.254,65	2,75	6.781,34	2,73	7.271,53	2,72	6.991,38	2,75	7.191,82	2,61
L	Real Estate	3.415,73	1,50	3.467,24	1,39	3.563,18	1,33	3.195,11	1,26	3.116,42	1,13
M,N	Jasa Perusahaan	11,34	-	12,48	0,01	11,38	-	5,82	-	6,63	-

Kategori	Lapangan usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.914,07	2,60	6.385,00	2,57	6.791,47	2,54	7.347,30	2,89	6.697,96	2,43
P	Jasa Pendidikan	3.415,20	1,50	3.708,43	1,49	3.849,23	1,44	3.896,18	1,53	3.878,48	1,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.119,21	0,93	2.228,24	0,9	2.305,97	0,86	2.277,84	0,9	2.571,77	0,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.075,07	0,47	1.311,08	0,53	1.332,30	0,5	436,25	0,17	429,97	0,16
PDRB		227.706,88	100	248.822,23	100	267.658,24	100	254.253,29	100	275.636,33	100,00

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021 (diolah)
2. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022



Dilihat dari persebarannya, maka Kota Batam adalah wilayah dengan kontribusi PDRB tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 60,99 persen pada tahun 2017 dan meningkat 63,91 persen pada tahun 2021. Selanjutnya Kabupaten Bintan sebesar 7,95 persen pada tahun 2017 dan mengalami kenaikan menjadi 8,22 persen pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 7,86 persen. Sedangkan kontribusi terendah adalah Kabupaten Lingga yaitu pada tahun 2017 hanya sebesar 1,62 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 1,70 persen dan turun kembali di tahun 2021 menjadi hanya 1,66 persen. Hal ini bisa dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.



Tabel 2.26
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Persentase Kontribusi terhadap Jumlah PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017		2018		2019		2020		2021	
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
Kota Tanjungpinang	18.088,95	8	19.078,15	7,80	20.167,98	7,67	19.665,01	7,80	20.099,37	7,43
Kabupaten Bintan	17.982,66	7,95	19.597,81	8,01	21.303,01	8,10	20.743,70	8,22	21.251,13	7,86
Kota Batam	137.925,34	60,99	151.285,14	61,87	164.490,12	62,55	161.364,18	63,97	172.843,90	63,91
Kabupaten Karimun	11.618,49	5,14	12.628,78	5,16	13.544,17	5,15	13.310,63	5,28	14.195,74	5,25
Kabupaten Lingga	3.659,73	1,62	3.969,33	1,62	4.274,27	1,62	4.292,43	1,70	4.499,27	1,66
Kabupaten Natuna	19.604,96	8,67	21.123,65	8,64	21.795,5	8,29	18.405,91	7,30	20.870,16	7,72
Kabupaten Kepulauan Anambas	17.256,61	7,63	16.849,27	6,89	17.439,77	6,63	14.453,58	5,73	16.697,53	6,17
Provinsi Kepulauan Riau	227.706,88	100	248.822,23	100	267.658,24	100	254.253,29	100	270.457,10	100

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021 (diolah)
2. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022



PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencerminkan perubahan PDRB tanpa dipengaruhi oleh harga yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu jika dilihat berdasarkan Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengeluarkan inflasi maka Kabupaten Natuna merupakan kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah akibat dampak Covid-19 sebesar 0,02% pada tahun 2021. Selanjutnya, Kota Batam merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 4,75%. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.



Tabel 2.27
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017		2018		2019		2020		2021	
	PDRB ADHK (miliar Rp)	LPE (%)	PDRB ADHK (miliar Rp)	LPE (%)	PDRB ADHK (miliar Rp)	LPE (%)	PDRB ADHK (miliar Rp)	LPE (%)	PDRB ADHK (miliar Rp)	LPE (%)
Kota Tanjungpinang	13.544,58	2,63	13.979,22	3,21	14.436,94	3,27	13.938,24	-3.45	14.020,21	0,59
Kabupaten Bintan	13.244,04	4,94	13.886,09	4,85	14.540,07	4,71	13.917,80	-4.28	13.933,49	0,23
Kota Batam	97.862,56	2,61	102.718,60	4,96	108.800,35	5,92	106.029,65	-2.55	111.068,95	4,75
Kabupaten Karimun	8.583,14	5,29	9.016,34	5,05	9.456,92	4,89	9.117,12	-3.59	9.332,77	2,37
Kabupaten Lingga	2.682,78	6,08	2.790,12	4,00	2.934,66	5,18	2.914,60	-0.68	2.971,55	1,95
Kabupaten Natuna	14.665,42	0,87	15.036,09	2,53	15.299,36	1,75	14.642,75	-4.29	14.645,40	0,02
Kabupaten Kepulauan Anambas	13.142,46	-0,1	12.063,35	-8,21	12.047,35	-0,13	11.104,45	-7.83	11.108,49	0,04
Prov. Kepulauan Riau	166.081,68	1,98	173.498,75	4,47	181.895,86	4,84	174.976,7	-3,80	177.080,86	3,43

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2022
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, 2022
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, 2022
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga, 2022
5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2022
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, 2022
7. Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2022
8. Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2022



Hampir seluruh sektor perekonomian di kabupaten/kota pada Provinsi Kepulauan Riau terdampak akibat pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021, sektor yang mengalami dampak paling besar terjadi pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi.

Tabel 2.28
Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau per Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Tanjungpinang	2,63	3,21	3,27	-3.45	0,59
Kab. Bintan	4,94	4,85	4,71	-4.28	0,23
Kota Batam	2,61	4,96	5,92	-2.55	4,75
Kab. Karimun	5,29	5,05	4,89	-3.59	2,37
Kab. Lingga	6,08	4,00	5,18	-0.68	1,95
Kab. Natuna	0,87	2,53	1,75	-4.29	0,02
Kab. Kepulauan Anambas	-0,10	-8,21	-0,13	-7.83	0,04
Provinsi Kepulauan Riau	1,98	4,47	4,84	-3,80	3,43

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021 (diolah)
2. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 109,33 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 130,13 juta per kapita. Peningkatan angka PDRB per kapita ini disebabkan peningkatan produksi dan inflasi yang terjadi. Sama halnya, dengan mengeluarkan faktor inflasi, tercatat bahwa PDRB per kapita Kepulauan Riau pada tahun 2021 mengalami peningkatan. PDRB per kapita Kepulauan Riau atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2021 adalah sebesar 85,43 juta rupiah, lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 85,01 juta rupiah.

Tabel 2.29
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Provinsi Kepulauan Riau, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
ADHB	227.706,88	248.822,23	267.631,48	254.227,86	275.636,33
ADHK 2010	166.081,68	173.498,75	181.877,67	174.959,21	180.952,44
PDRB per kapita (Ribu Rp)					
ADHB	109.332,85	116.461,40	119.394,66	123.529,17	130.125,23
ADHK 2010	79.743,68	81.206,20	81.138,52	85.012,58	85.425,89
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (%)	(0,69)	1,83	-0,08	4,77	0,49
Jumlah penduduk (000 org)	2.082,69	2.136,52	2.241,57	2.058,04	2.118,24
Pertumbuhan (%)	2,69	2,58	4,92	-8,19	2,93

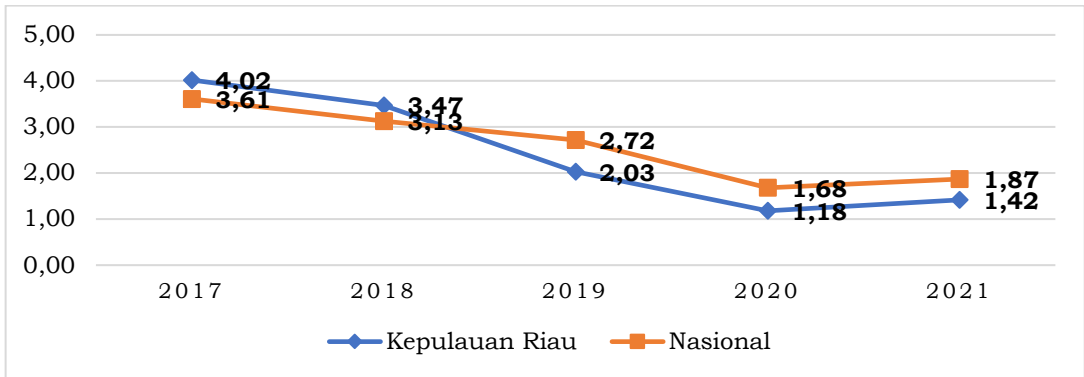
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022.
* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara



10. Inflasi

Tingkat inflasi sedikit banyak menunjukkan efisiensi kerja ekonomi dan tingkat keseimbangan ketersediaan barang dan jasa di sebuah wilayah. Secara makro tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional, namun tren-nya sejalan dengan angka inflasi nasional. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dalam jangka waktu tertentu. Jika harga barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka akan terjadi kenaikan inflasi. Walaupun inflasi secara umum menurun, namun inflasi pada kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian. Karena komoditas makanan adalah penyumbang terbesar yang membentuk Indeks Harga Konsumen (IHK) dan berpengaruh terhadap Garis Kemiskinan.

Selama kurun waktu 2017 hingga 2021 laju inflasi tahunan menunjukkan peningkatan dari sebesar 1,42% dan tahun 2020 menjadi sebesar 1,18%, sedangkan di tahun 2021 terjadi deflasi sebesar 1,42%.



Gambar 2.4
Tingkat Inflasi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: Diolah dari Data BPS Nasional dan BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Pada tahun 2021 sebanyak 10 komoditas yang memberikan andil terbesar sumbangan inflasi adalah minyak goreng, selanjutnya rokok kretek, beras, daging ayam ras, rokok putih, akademi/perguruan tinggi, nasi dengan lauk, ikan laying/ikan benggol, ikan mujair, dan ikan kembung. Perincian perubahan harga dan sumbangan inflasi komoditas tersebut tercantum pada tabel berikut ini.

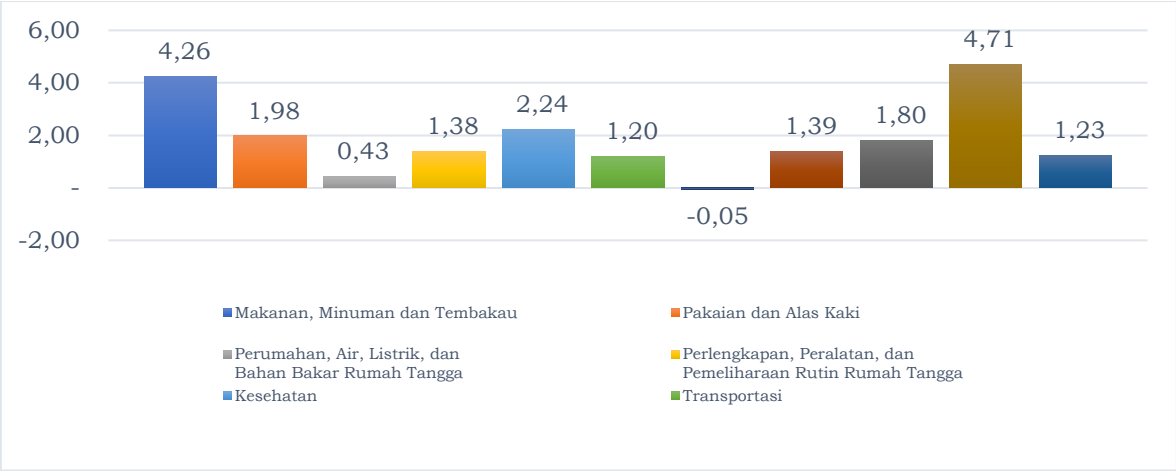
Tabel 2.30
Komoditi Penyumbang Inflasi Kumulatif Terbesar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Jenis Komoditas	% Perubahan Harga	Sumbangan Inflasi Jan-Des
1.	Minyak Goreng	49,4100	0,5820
2.	Rokok Kretek Filter	7,1700	0,1565
3.	Beras	4,4700	0,1346
4.	Daging Ayam Ras	6,9500	0,1162
5.	Rokok Putih	10,3700	0,0868
6.	Akademi/Perguruan Tinggi	5,3500	0,0865

No	Jenis Komoditas	% Perubahan Harga	Sumbangan Inflasi Jan-Des
7.	Nasi dengan Lauk	4,8400	0,0855
8.	Ikan Layang/ Ikan Benggol	31,9900	0,0823
9.	Ikan Mujair	28,3700	0,0723
10.	Ikan Kembung	30,6400	0,0651

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Ada 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang menjadi sumber inflasi yaitu: (1) Makanan, Minuman, dan Tembakau; (2) Pakaian dan Alas Kaki; (3) Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; (4) Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; (5) Kesehatan; (6) Transportasi; (7) Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; (8) Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; (9) Pendidikan; (10) Penyediaan Makanan dan Minuman; dan (11) Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

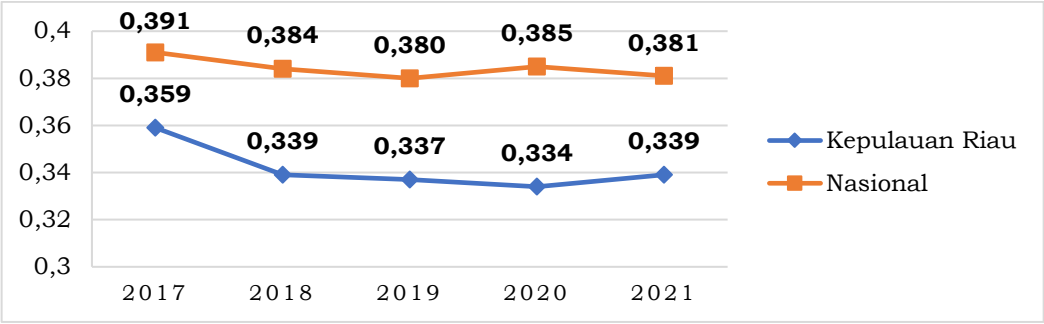


Gambar 2.5
Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2021

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka, 2022

11. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini merupakan suatu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antarkelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “sedang” bila Indeks Gini antara 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan “tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau antara tahun 2017-2021 berfluktuasi dari sebesar 0,359 pada tahun 2017 turun menjadi 0,334 pada tahun 2020, namun kembali naik ditahun 2021 menjadi 0,339.



Gambar 2.6
Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Per September
Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 berada dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu 0,339. Tingkat ketimpangan secara nasional lebih besar dibandingkan tingkat ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu, jika melihat tren Indeks Gini untuk Kabupaten/Kota maka Kota Tanjungpinang memiliki indeks tertinggi di tahun 2020 dan terendah berada di Kabupaten Lingga. Untuk tahun 2019 Indeks Gini tertinggi terjadi di Kota Batam dan Tahun 2018 terjadi di Kabupaten Karimun. Sementara itu, untuk yang terendah di tahun 2019 dan 2018 terjadi pada Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
per Maret 2018-2020

Wilayah Kepri	Gini Rasio		
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Kepulauan Riau	0,33	0,34	0,34
Tanjungpinang	0,32	0,31	0,35
Bintan	0,33	0,30	0,31
Batam	0,31	0,33	0,32
Karimun	0,35	0,30	0,32
Lingga	0,29	0,28	0,28
Natuna	0,33	0,30	0,34
Kep. Anambas	0,29	0,28	0,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

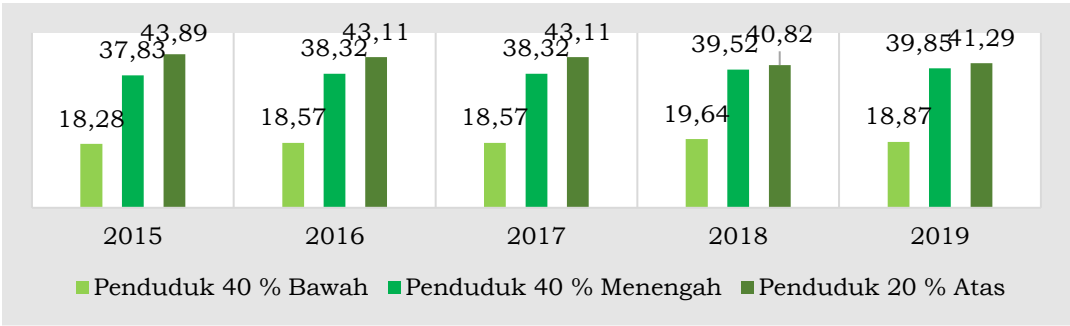
Selain Indeks Gini, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah Pendekatan Bank Dunia dengan cara mengelompokkan persentase pengeluaran pada kelompok penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan, yaitu 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Pengkategorian



proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk sebagai berikut:

- a. Ketimpangan pendapatan tinggi (kurang dari 12 persen).
- b. Ketimpangan pendapatan sedang/menengah (12-17 persen).
- c. Ketimpangan pendapatan rendah (lebih dari 17 persen).

Dengan menggunakan kriteria Bank Dunia maka diketahui ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah selama lima tahun (2015-2019) menunjukkan dalam kategori ketimpangan rendah. Meskipun persentase pengeluaran penduduk 40 persen terbawah sempat naik sebesar 19,64 pada tahun 2018, namun tahun 2019 turun menjadi 18,87.



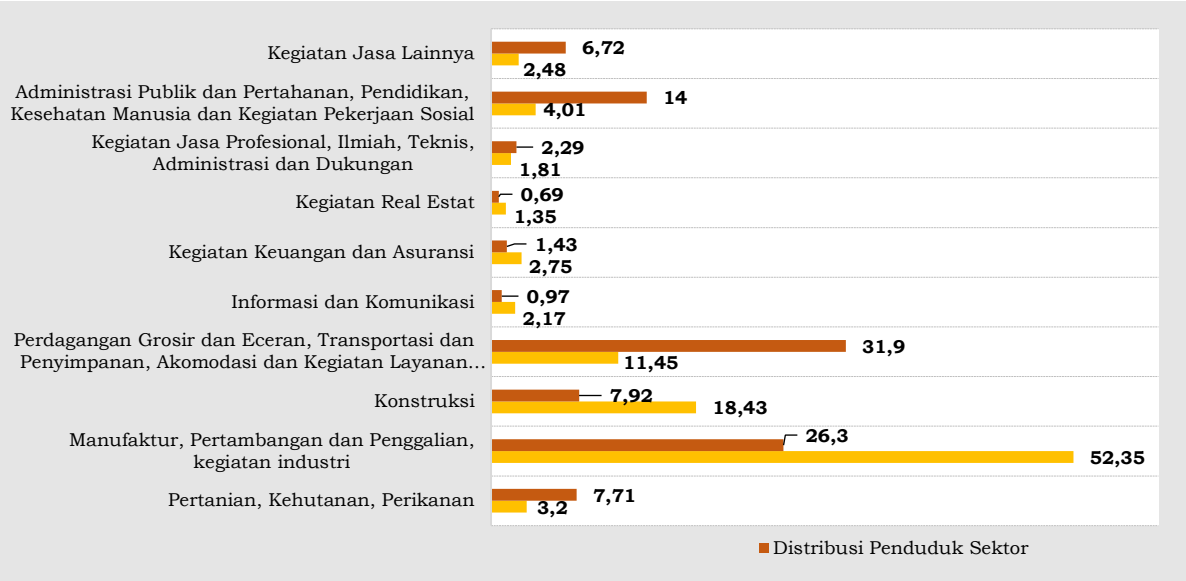
Gambar 2.7
Ketimpangan Pendapatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Bank Dunia

Sumber: BPS, 2020; diolah.

Aspek lain yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah membandingkan kontribusi sektor dan penduduk yang terlibat dalam sektor bersangkutan. Sebagai salah satu kawasan industri nasional, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan sangat bercorak industri. Namun demikian jika dilihat dari aspek penduduk yang terlibat, terlihat bahwa penduduk tersebar pada berbagai sektor ekonomi, utamanya sektor pertanian, industri manufaktur, pertambangan dan penggalian, perdagangan, dan administrasi publik. Lebih jauh dapat dilihat bahwa proporsi kontribusi sektor dan proporsi penduduk cukup timpang. Sektor pertanian dengan kontribusi yang sangat kecil harus menghidupi penduduk yang cukup banyak, hal yang sama terjadi juga pada sektor perdagangan dan administrasi publik. Sementara itu pada sektor industri manufaktur, pertambangan dan penggalian serta konstruksi terjadi hal yang sebaliknya, dengan kontribusi yang besar hanya menghidupi relatif sedikit



penduduk. Implikasi dari hal ini adalah bahwa kantong penduduk miskin akan berada pada sektor pertanian dan perdagangan.



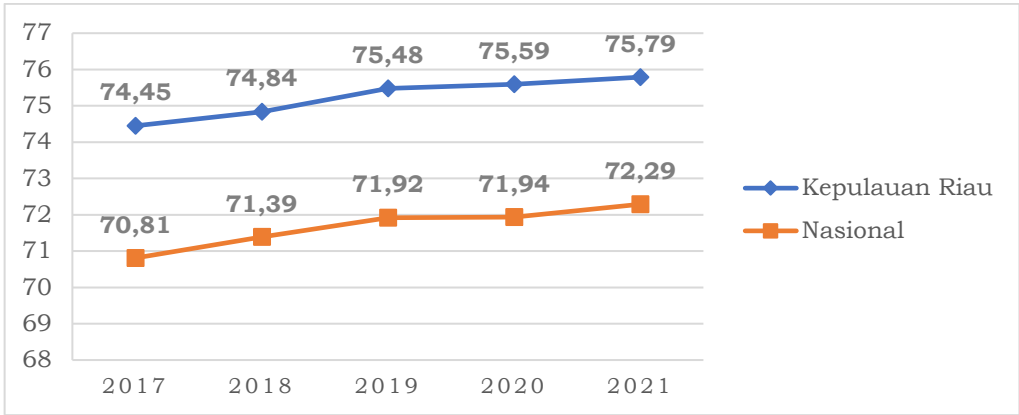
Gambar 2.8
Kontribusi Sektor dan Penduduk yang Bekerja Berdasar Sektor Tahun 2019
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam Laporan Tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Secara umum, dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2017-2021), IPM di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, seperti ditunjukkan pada grafik pada gambar dibawah ini. Berdasarkan grafik tersebut, perkembangan tiap tahunnya menunjukkan bahwa IPM Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibanding IPM Nasional.



Gambar 2.9
Perbandingan Perkembangan IPM Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022; diolah

Data menunjukkan bahwa rata-rata IPM dalam lima tahun terakhir yang diperoleh/dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau, yakni 75,23, lebih tinggi daripada capaian rata-rata IPM secara nasional, yakni 71,67. Artinya, IPM Provinsi Kepulauan Riau lebih baik karena di atas rata-rata capaian IPM secara nasional. Meskipun demikian, dari rata-rata capaian IPM diketahui pula bahwa ada perbedaan capaian IPM antar-kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.32
IPM Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

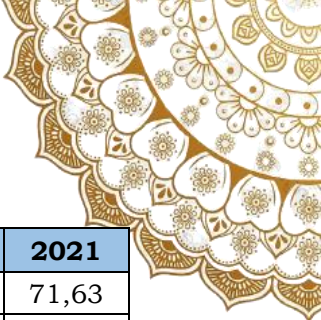
	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata 2017-2021
Indonesia (Nasional)	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	71,67
Provinsi Kepulauan Riau	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	75,23
Kota Tanjungpinang	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93	78,58
Kabupaten Bintan	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	73,80
Kota Batam	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	80,82
Kabupaten Karimun	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70	71,01
Kabupaten Lingga	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	64,72
Kabupaten Natuna	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09	72,41
Kabupaten Kepulauan Anambas	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23	68,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021; diolah

Peringkat IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 berada pada peringkat ke-3 seluruh Indonesia. Perbandingan IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan provinsi lain di wilayah Sumatera dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.33
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera Tahun 2017-2021

No	Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aceh	70,6	71,19	71,9	71,99	72,18
2	Sumatera Utara	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00
3	Sumatera Barat	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65
4	Riau	71,79	72,44	73	72,71	72,94



No	Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
5	Jambi	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63
6	Sumatera Selatan	68,86	69,39	70,02	70,01	70,24
7	Bengkulu	69,95	70,64	71,21	71,40	71,64
8	Lampung	68,25	69,02	69,57	69,69	69,90
9	Kepulauan Bangka Belitung	69,99	70,67	71,3	71,47	71,69
10	Kepulauan Riau	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79
	Indonesia	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: Badan Statistik Indonesia, 2022

Meskipun IPM Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan Nasional, namun laju pertumbuhannya lebih lambat dibanding dengan laju pertumbuhan IPM Nasional. Hal ini kemungkinan karena laju pertumbuhan IPM kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tidak merata.

Kemajuan pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau bervariasi. Variasi tersebut tentunya disebabkan oleh faktor sumber daya (alam dan manusia) dan kebijakan pemerintah daerah yang berbeda. Capaian pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM perlu terus ditingkatkan dan diawasi agar pembangunan manusia dapat terlaksana dengan baik dan merata. Kota Batam menempati peringkat pertama se-Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Kabupaten Lingga menempati peringkat terbawah. Peringkat kedua sampai peringkat keenam berturut-turut diduduki oleh Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehingga, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu ditingkatkan baik dari sisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel 2.34
Perkembangan Unsur Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran Per kapita (ribu rupiah)	IPM
1	Kota Tanjungpinang	72,18	14,13	10,26	15,439	78,93
2	Kabupaten Bintan	70,46	13,26	8,67	14,393	74,57
3	Kota Batam	73,36	13,17	11,15	18,034	81,12
4	Kabupaten Karimun	71,11	12,57	8,18	11,879	71,70
5	Kabupaten Lingga	62,39	12,59	6,88	11,938	65,83
6	Kabupaten Natuna	65,31	13,91	8,92	14,711	73,09
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	67,36	12,88	7,34	11,950	69,23
Provinsi Kepulauan Riau		70,12	12,98	10,18	14,122	75,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022



Rata-rata pencapaian masing-masing komponen IPM dalam lima tahun secara berurutan adalah Angka Harapan Hidup sebesar 69,80 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 9,98 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,86 tahun, dan Pengeluaran Perkapita sebesar 14,068.

Tabel 2.35
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No	Komponen	Tahun					Rata-Rata 2017-2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Harapan Hidup	69,48	69,64	69,80	69,96	70,12	69,80
2	Rata-Rata Lama Sekolah	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	9,98
3	Angka Harapan Lama Sekolah	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,86
4	Pengeluaran Perkapita (Rp ribu)	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.068
	IPM	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	75,23

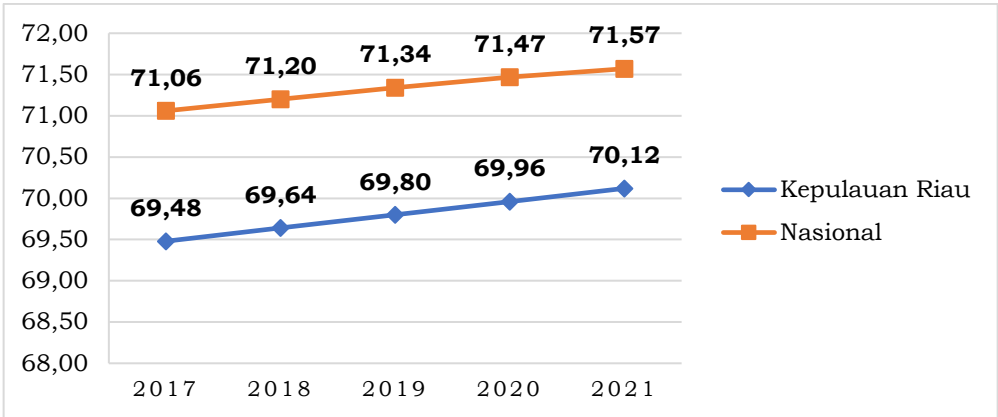
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri, 2022

Masing-masing komponen IPM akan diuraikan sebagai berikut:

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Sementara itu, selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa nilai UHH Provinsi Kepulauan Riau berada di bawah level nasional meskipun nilai UHH Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar berikut.



Gambar 2.10
Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022



b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang (BPS, 2020). HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota tahun 2017-2021 ditunjukkan pada tabel dibawah.

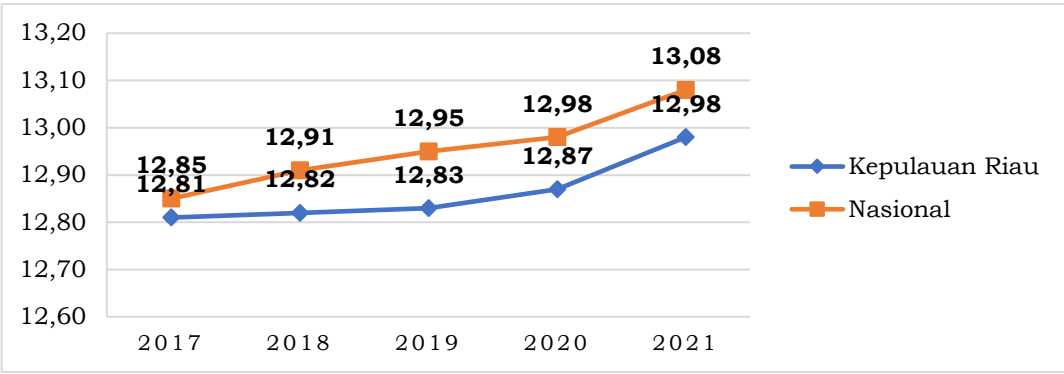
Berdasarkan data pada tabel di bawah, dalam tujuh tahun terakhir (2015-2021), angka Harapan Lama Sekolah yang ditunjukkan nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya. Perkembangan Harapan Lama Sekolah menjadi indikasi positif dalam sektor pendidikan, sebab semakin lama seseorang mengenyam sekolah, artinya semakin tinggi jenjang pendidikan yang dilaluinya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Dari data ini, angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah daripada angka Harapan Lama Sekolah secara nasional. Dari tahun 2017-2021, rata-rata angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan angka sebesar 12,86. Angka tersebut lebih rendah bila dibanding Rata-Rata Angka Harapan Lama Sekolah secara nasional, yakni 12,95. Data perbandingan ini menunjukkan bahwa angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau belum bisa dikatakan baik karena masih di bawah rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah secara nasional. Secara sederhana, perbandingan perkembangan Lama Harapan Sekolah antara nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Tabel 2.36
Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2017-2021
Indonesia (Nasional)	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	12,95
Provinsi Kepulauan Riau	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,86
Kota Tanjungpinang	14,07	14,08	14,09	14,12	14,13	14,10
Kabupaten Bintan	12,60	12,75	12,95	13,10	13,26	12,93
Kota Batam	12,94	12,95	13,15	13,16	13,17	13,07
Kabupaten Karimun	12,15	12,16	12,30	12,42	12,57	12,32
Kabupaten Lingga	12,42	12,43	12,44	12,45	12,59	12,47
Kabupaten Natuna	13,87	13,88	13,89	13,90	13,91	13,89
Kabupaten Kepulauan Anambas	12,14	12,32	12,75	12,81	12,88	12,58

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022



Gambar 2.11
Perbandingan Perkembangan Lama Harapan Sekolah antara Nasional
dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah (BPS, 2020). Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 5 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak (BPS, 2020). Manfaat dari evaluasi Rata-rata Lama Sekolah, yaitu (1) untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun, dan seterusnya; dan (2) untuk perencanaan dan evaluasi capaian Program Wajib Belajar (BPS, 2020). Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah (BPS, 2020). Rata-rata Lama Sekolah tingkat nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota tahun 2017-2021 ditunjukkan pada tabel dibawah.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dalam lima tahun terakhir (2017-2021), Rata-rata Lama Sekolah yang ditunjukkan nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya. Artinya bahwa perkembangan Rata-rata Lama Sekolah semakin baik kualitasnya dari tahun ke tahun. Sebab, semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin



tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk akan linier dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah, dalam hal ini, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021), rata-rata pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau mencapai 9,98 untuk Rata-rata Lama Sekolah. Rata-rata pertumbuhan lama sekolah tersebut lebih tinggi daripada capaian rata-rata pertumbuhan yang diperoleh secara nasional, yakni 8.33.

Tabel 2.37
Rata-Rata Lama Sekolah Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2017-2021
Indonesia (Nasional)	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54	8,33
Provinsi Kepulauan Riau	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	9,98
Kota Tanjungpinang	9,97	9,98	9,99	10,25	10,26	10,09
Kabupaten Bintan	8,34	8,35	8,36	8,44	8,67	8,43
Kota Batam	11,11	11,12	11,13	11,14	11,15	11,13
Kabupaten Karimun	7,80	7,81	7,92	8,17	8,18	7,98
Kabupaten Lingga	5,97	6,27	6,51	6,67	6,88	6,46
Kabupaten Natuna	8,47	8,71	8,72	8,73	8,92	8,71
Kabupaten Kepulauan Anambas	6,69	6,70	6,91	7,17	7,34	6,96

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

d. Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan

Dimensi standar hidup layak menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Secara series terlihat bahwa ada kecenderungan kesenjangan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang semakin melebar. Namun, di tahun 2021 menunjukkan sedikit perbaikan dimana disparitas menjadi 6,16 dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,22. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar Rp 14.122.000, menurun 87 ribu rupiah dibandingkan tahun 2020.

Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan tertinggi di Kepulauan Riau berada di Kota Batam yakni sebesar Rp 18,03 juta per tahun, sedangkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan terendah berada di Kabupaten Karimun sebesar Rp 11,88 juta per tahun. Kesenjangan pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kepulauan Riau disebabkan oleh bertumpunya kegiatan ekonomi di Kota Batam sehingga kegiatan ekonomi di Batam lebih bervariasi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Tercatat bahwa PDRB yang mencerminkan tingkat pendapatan di suatu wilayah antarkabupaten/kota di Kepulauan Riau tahun 2021, lebih dari 60 persen ekonomi Provinsi Kepulauan Riau



ditopang oleh Kota Batam. Artinya, peranan Kota Batam terhadap Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengatur kebijakan ekonomi sedemikian rupa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka pemerataan ekonomi antara Batam dengan kabupaten/kota lainnya.

Selanjutnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan Nasional selalu berada diatas atau lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, dimana pengeluaran per kapita yang disesuaikan tertinggi di Kepulauan Riau dengan rata-rata 14,06 juta per tahun sedangkan nasional dengan rata-rata 11,03 juta per tahun.

Tabel 2.38
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Tahun					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2017-2021
Indonesia (Nasional)	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156	11.038
Provinsi Kepulauan Riau	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.068
Kota Tanjungpinang	14.881	15.292	15.838	15.498	15.439	15.390
Kabupaten Bintan	13.828	14.256	14.730	14.482	14.393	14.338
Kota Batam	17.131	17.560	18.146	18.095	18.034	17.793
Kabupaten Karimun	11.713	11.945	12.136	11.885	11.879	11.912
Kabupaten Lingga	11.421	11.499	12.091	11.998	11.938	11.789
Kabupaten Natuna	13.970	14.217	14.821	14.705	14.711	14.485
Kabupaten Kepulauan Anambas	11.654	11.894	12.065	11.875	11.950	11.888

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

2. Kemiskinan

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi di antaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. pendapatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendekatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Sementara, jumlah penduduk miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Khusus untuk pendapatan perkapita tidak akan diulas mendalam pada bagian ini karena akan diulas Bidang Ekonomi. Pada bagian ini berfokus pada penduduk miskin.

Kemiskinan sudah menjadi permasalahan dan isu global. Dalam menjamin pembangunan yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui



tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun pada tahun 2030.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, 2018). Jumlah penduduk yang tergolong miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan untuk tahun 2020 jika dibanding tahun 2019. Meski demikian, secara umum, tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

Tabel 2.39
Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau
September 2017-2021

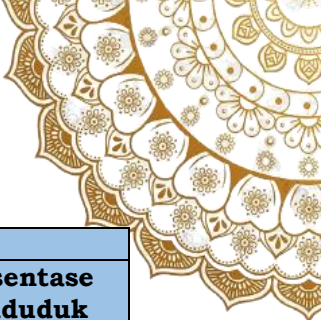
Profil Kemiskinan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	128.430	125.360	127.760	142.610	137.750
Persentase Penduduk Miskin (persen)	6,13	5,83	5,80	6,13	5,75
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	536.027	567.972	602.038	617.532	655.506
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (persen)	1,18	0,59	0,90	1,21	0,95
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (persen)	0,31	0,11	0,18	0,42	0,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Data BPS tentang Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa berdasarkan tempat tinggal, pada periode Maret 2018 - September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebanyak 99.057 orang sedangkan daerah perdesaan berkurang sebanyak 32.462 orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 5,45 persen menjadi 5,37 persen. Sedangkan di perdesaan turun dari sebesar 10,77 persen menjadi 10,45 persen.

Tabel 2.40
Profil Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018-2021

Periode	Perkotaan		Perdesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
Maret 2018	99.195	5,45	32.480	10,77
September 2018	98.459	5,15	26.903	11,26
Maret 2019	104.207	5,33	24.254	11,04
September 2019	104,230	5,26	23,520	10,67



Periode	Perkotaan		Perdesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
Maret 2020	108,860	5,42	23,110	10,43
September 2020	121,820	5,69	20,790	11,25
Maret 2021	144,46	5,72	19,570	11,10
September 2021	137,75	5,37	18,440	10,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

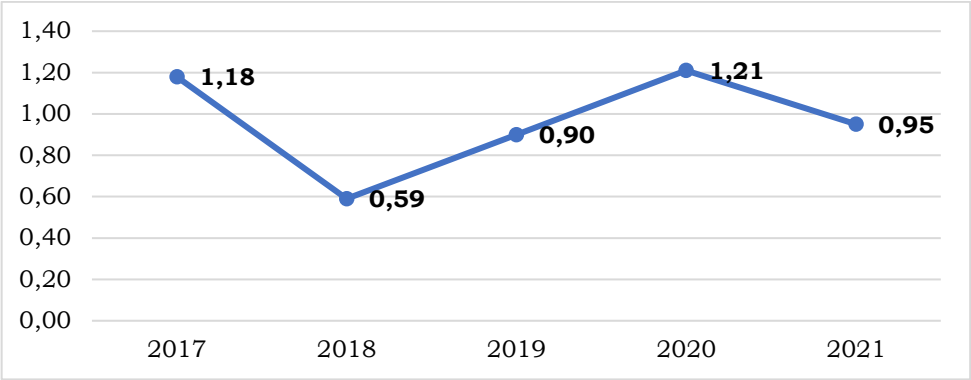
Sebaran data penduduk miskin yang berada di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk miskin berada di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna memiliki jumlah penduduk miskin yang paling rendah dibandingkan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Wilayah	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%
Kepulauan Riau	128,43	6,13	125,36	5,83	127,76	5,80	142,61	6,13	137,75	5,75
Tanjungpinang	19,19	9,29	19,30	9,24	19,05	9,03	19,98	9,37	20,85	9,57
Bintan	9,37	6,01	10,42	6,61	10,14	6,37	10,21	6,36	10,54	6,42
Batam	61,16	4,81	67,41	5,11	66,21	4,85	67,06	4,75	77,17	5,05
Karimun	16,94	7,41	15,93	6,90	15,36	6,61	15,99	6,83	16,28	6,85
Lingga	12,35	13,84	12,13	13,55	11,56	12,88	12,45	13,85	12,58	13,93
Natuna	3,53	4,64	3,60	4,68	3,43	4,42	3,47	4,43	3,98	4,95
Kepulauan Anambas	2,84	6,87	2,90	6,93	2,72	6,44	2,80	6,56	3,08	7,09

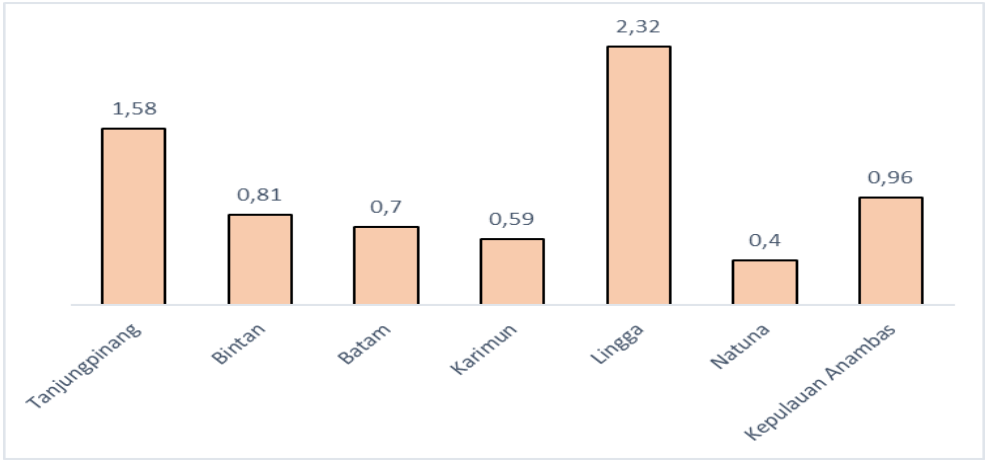
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2022, diolah

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan dari kemiskinan. Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan berkaitan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan (P1) terukur sebesar sebesar 1,18. Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan tren meningkat pada tahun 2018 adalah 0,59 dan 2019 sebesar 0,90. Meskipun di September tahun 2020 indeks ini mengalami penurunan dalam yang mencapai 1,21. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami sedikit peningkatan hingga menjadi 0,95.



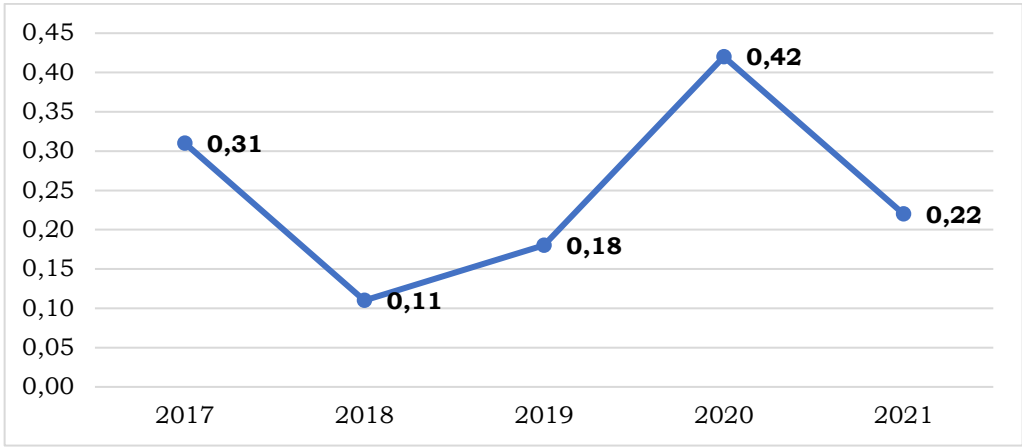
Gambar 2.12
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Sementara itu, jika melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan per Maret 2020 untuk masing-masing kabupaten/kota maka Kabupaten Lingga memiliki nilai indeks tertinggi dan yang terendah di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada gambar berikut:



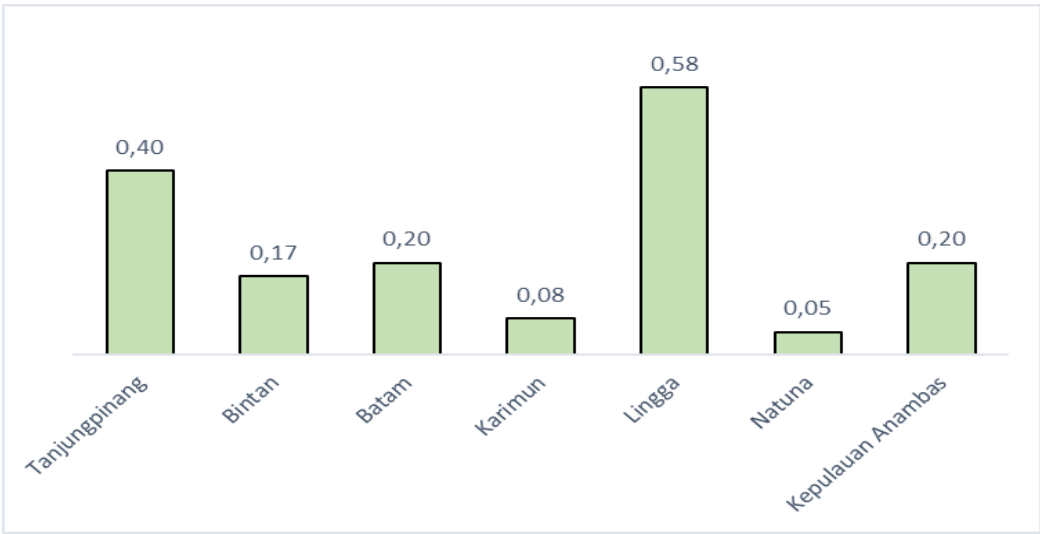
Gambar 2.13
Indeks Kedalaman Kemiskinan Per Maret 2020 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (P1) (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin sebesar 0,31, tahun 2018 menurun menjadi 0,11, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 0,18. Pada September tahun 2020, indeks ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang mencapai 0,42. Namun pada tahun 2021 kembali menurun hingga menjadi 0,22.



Gambar 2.14
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Sementara itu, jika melihat Indeks Keparahan Kemiskinan per Maret 2020 untuk masing-masing kabupaten/kota maka Kabupaten Lingga memiliki nilai indeks tertinggi dan yang terendah di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada gambar berikut:



Gambar 2.15
Indeks Keparahan Kemiskinan Per Maret 2020 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (P2) (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2.1.2.3. Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga

Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap pelestarian pelestarian kesenian, budaya, serta olahraga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan merupakan penanda jati diri yang menjadi kekhasan dan karakter suatu daerah. Kekayaan budaya seharusnya dikelola dengan baik agar menjadi penggerak dan modal pembangunan manusia.



1. Fokus Seni dan Budaya

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan salah satu faktor pendukung upaya pembangunan manusia. Oleh karena itu, indikator tersebut menjadi penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk di Provinsi Kepulauan Riau.

Pengembangan seni dan budaya di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dalam beberapa hal yaitu dengan pelestarian kesenian sesuai dengan tradisi lokal pada sanggar kesenian. Persentase sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal dengan target capaian pada tahun 2021 sebesar 72,03 persen, pada tahun 2020 sudah mencapai 78,48 persen. Data sanggar seni yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 sebesar 206 sanggar dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 209 sanggar.

Tabel 2.42
Perkembangan Jumlah Sanggar Seni dan Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Sanggar	Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal
2017	206	13
2018	207	27
2019	208	136
2020	209	164

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dengan demikian, grup kesenian per 10.000 penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar 0,92 grup. Indikator grup kesenian ini menurun jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 0,94 grup. Sementara, gedung kesenian dari tahun 2017-2020 tidak ada unit gedung kesenian yang dibangun. Pemerintah daerah belum memiliki gedung kesenian khusus yang representatif untuk pengembangan kesenian.

Tabel 2.43
Indikator Fokus Seni dan Budaya Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	0,99	0,96	0,94	0,92

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga menjadi hal yang penting dilakukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan kepemudaan melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan, pengembangan prestasi kepemudaan, pelatihan kewirausahaan kepada



pemuda dan kegiatan lain yang dapat mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Peningkatan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat akan mendorong tumbuhnya klub-klub olahraga. Keberadaan klub ini dapat menjadi cikal bakal tumbuhnya prestasi olahraga secara lokal maupun nasional. Munculnya klub olahraga di Provinsi Kepulauan Riau baru dimulai tahun 2020 sebesar 0,09. Sementara, belum ada gedung olahraga yang dibangun. Padahal, pengembangan prestasi olahraga yang didukung oleh pemerintah dengan penyediaan sarana dan prasarana dan pembinaan terhadap klub olahraga salah satu Sarpras yang dibangun adalah gedung olahraga yang dapat digunakan oleh masyarakat dan klub olahraga dalam Latihan rutin untuk mendukung tumbuhnya bibit-bibit atlit daerah.

Tabel 2.44
Jumlah Klub Olahraga per 10.000 Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah Klub Olahraga per 10.000 Penduduk	-	-	0,09	0,09

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek ini memuat kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Penyajian dibuat dalam beberapa fokus yang menggambarkan urusan maupun unsur pemerintahan daerah.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan berikut ini.

1. Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Negeri dan Swasta

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (Kemendikbud, 2020). APK dapat menggambarkan perbandingan



antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan dan untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang terlambat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (BPS, 2020).

b. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Negeri dan Swasta

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu SMA sederajat. Nilai APM maksimal adalah 100 persen. APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat (Kemendikbud, 2020). Secara rinci Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Murni
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APK					
	SMA/SMK/MA/Paket C	87,11	92,12	94,92	96,02	111,97
	Sekolah Luar Biasa (SLB)	70,12	72,00	72,00	82,49	92,32
2.	APM					
	SMA/SMK/MA/Paket C	75,87	77,30	76,7	77,20	89,69

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2022.



c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Negeri dan Swasta

Sementara itu, data Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs cenderung mengalami fluktuasi meskipun secara keseluruhan di tahun 2020 nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini juga berlaku sama dengan nilai APS SMA/MA/SMK untuk tahun 2020 dimana nilainya menjadi yang tertinggi selama 4 tahun terakhir.

Tabel 2.46
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020
1.	APS SD/MI	99,32	99,52	99,34	99,55
2.	APS SMP/MTs	99,08	99,20	98,50	98.82
3.	APS SMA/MA/SMK	82,80	83,78	82,87	84,62

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

d. Rasio Murid Terhadap Gedung Sekolah

Rasio murid terhadap jumlah gedung sekolah di Provinsi Kepulauan Riau dari berfluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan kewenangannya, rasio murid terhadap jumlah gedung sekolah SMA/SMK di Kepulauan Riau juga mengalami fluktuasi pada periode tahun 2017-2020.

Tabel 2.47
Rasio Murid Terhadap Jumlah Gedung Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020
1	Rasio murid per gedung sekolah SD/MI				
	Sekolah Dasar	1: 246	1: 244	1: 241	1: 229
	Madrasah Ibtidaiyah	1: 202	1: 195	1: 199	
2	Rasio murid per gedung sekolah SMP/MTs				
	SMP	1: 256	1: 249	1: 244	1:238
	MTs	1: 146	1: 12	1: 13	
3	Rasio murid per gedung sekolah SMA/SMK/MA				
	SMA/ SMK	1: 304	1: 307	1: 318	1: 308
	MA	1: 118	1: 99	1: 118	1: 136

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Jumlah sekolah SMA pada periode tahun ajaran 2019/2020 di bawah Kemenetrian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 148 unit. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun ajaran 2020/2021 menjadi 143. Penurunan ini terjadi pada sekolah swasta di Kota Batam dan Tanjungpinang. Kemungkinan besar tutupnya sekolah tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Penerapan pembelajaran jarak jauh selama pandemi sejak 2020 membuat aktivitas pendidikan berkurang. Rincian jumlah sekolah SMA pada 2 (dua) tahun ajaran tersebut disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.48
Jumlah Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA)
di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019/2020 dan 2020/2021

No.	Kab/Kota	Sekolah					
		Negeri		Swasta		Jumlah	
		2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
1	Karimun	15	15	3	3	18	18
2	Bintan	10	10	3	3	13	13
3	Natuna	14	14	1	1	15	15
4	Lingga	14	14	1	1	15	15
5	Kep. Anambas	5	5	-	-	5	5
6	Batam	26	26	43	40	69	66
7	Tanjungpinang	7	7	6	4	13	11
Kepulauan Riau		91	91	57	52	148	143

Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2022

Selain SMA, kewenangan pemerintah provinsi pada urusan pendidikan adalah terkait pendidikan kejuruan. Pada periode 2019/2020 jumlah sekolah SMK di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kepulauan Riau berjumlah 113 unit. Jumlah ini turun menjadi 109 unit pada periode 2020/2021. Sama halnya dengan penurunan jumlah SMA, penyebab utama penurunan jumlah SMK adalah proses belajar mengajar jarak jauh dan pembatasan mobilitas orang selama pandemi Covid-19. Penurunan jumlah sekolah juga terjadi pada Madrasah Aliyah (MA), yang berkurang dari 40 unit menjadi 37 dari periode 201/2020 ke 2020/2021.

Tabel 2.49
Jumlah Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019/2020 dan 2020/2021

No.	Kab/Kota	Sekolah					
		Negeri		Swasta		Jumlah	
		2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
1	Karimun	5	5	5	4	10	9
2	Bintan	4	4	4	3	8	7
3	Natuna	5	5	3	2	8	7
4	Lingga	4	4	1	1	5	5
5	Kep. Anambas	4	4	-	-	4	4
6	Batam	8	8	60	59	68	67
7	Tanjungpinang	5	5	5	5	10	10
Kepulauan Riau		35	35	78	74	113	109

Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2022

Tabel 2.50
Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019/2020 dan 2020/2021

No.	Kab/Kota	Sekolah					
		Negeri		Swasta		Jumlah	
		2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
1	Karimun	1	1	5	5	6	6
2	Bintan	1	1	3	3	4	4
3	Natuna	2	2	3	3	5	5
4	Lingga	-	-	3	3	3	3
5	Kep. Anambas	-	-	3	-	3	-
6	Batam	2	2	15	15	17	17
7	Tanjungpinang	1	1	1	1	2	2
Kepulauan Riau		7	7	33	30	40	37

Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2022



e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tujuan pendidikan menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan jaman. Guru merupakan bagian penting dalam pendidikan, sehingga perannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kualitas pendidikan. Sebagai pelaksana pendidikan, guru harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dan kompetensi akademik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Capaian indikator terkait tenaga kependidikan dan mutu pendidikan yang juga menjadi kunci utama dalam keberhasilan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.51
Indikator Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja Kunci	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kualifikasi Guru					
	Persentase Guru SMA/SMK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	89,27	95,99	96,11	95,63	96,59
2	Kompetensi Guru					
	Persentase Guru yang sudah sertifikasi	35	38,69	37,00	39,09	38,69
	Persentase Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	62	65,30	62,00	65,54	65,54

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Untuk indikator pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) dan Lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, persentase guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau dengan kualifikasi S1/D4 terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 96,59 persen guru sekolah menengah memiliki ijazah S1 sederajat.

Untuk indikator kedua yaitu kompetensi guru, persentase guru yang sudah sertifikasi setiap tahun memang meningkat, namun peningkatannya sangat kecil. Hal ini dikarenakan hanya sedikit guru yang bisa dilatih untuk mengikuti TPG setiap tahunnya karena program ini dari pusat dan sudah dialokasikan kuotanya untuk masing-masing kabupaten/kota. Tahun 2020 baru sekitar 39,09 persen guru SMA/SMK/SLB yang sudah sertifikasi dan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 38,69 persen. Sedangkan, untuk persentase kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan juga telah mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2017 mencapai 62 persen, meningkat menjadi 65,30 persen pada tahun 2018, namun turun pada



tahun 2019 menjadi 62,00 persen. Pada tahun 2020 dan 2021 kembali meningkat menjadi 65,54 persen.

f. Peningkatan Mutu Pendidikan

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari sisi kompetensi lulusan baik SMA maupun SMK. Kompetensi lulusan SMA/MA diukur dari persentase lulusan SMA/MA yang diterima di perguruan tinggi. Kompetensi lulusan SMK diukur dari persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha dan persentase peserta didik yang memiliki kompetensi non akademik (minat, bakat, prestasi). Kompetensi lulusan SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.52
Indikator Kompetensi Lulusan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lulusan SMA					
	Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di PT	35,42	43	56,30	58,50	45,12
2	Lulusan SMK					
	Persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha	50	50	56,87	60,10	38,24
	Persentase peserta didik yang memiliki kompetensi non-akademik (minat, bakat dan prestasi)	44,44	42,00	8,27	24,28	11,81

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Lulusan SMA yang diterima di PT meningkat setiap tahunnya, mulai tahun 2017 diterima sebanyak 35,42 persen dari siswa yang tamat, kemudian meningkat menjadi 58,50 persen pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 45,12 persen. sementara pada lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha. Tahun 2017 yaitu sebesar 50 persen dan di tahun 2020 meningkat mencapai 60,1 persen, namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 38,24 persen. Untuk itu, kompetensi lulusan SMK masih perlu ditingkatkan lagi supaya lulusan SMK ini dapat lebih diterima lagi di dunia industri atau dapat berwirausaha.

Sementara itu, untuk indikator persentase Peserta Didik yang memiliki kompetensi non-akademik (minat, bakat dan prestasi) cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 meskipun di tahun 2020 kembali mengalami kenaikan jika dibandingkan untuk tahun 2019 akan tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan terjadi di tahun 2019 dimana ditargetkan 37% dan hanya terealisasi sebesar 8,27%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2019 Dinas Pendidikan mengirimkan 145 peserta untuk mengikuti Lomba di tingkat Nasional untuk semua cabang lomba dari Jenjang SMA/SMK dan SLB, dari 145 peserta yang dikirim hanya 12 peserta yang mampu meraih peringkat 1,2



dan 3. Hal ini berdampak pada persentase kinerja yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 capaiannya sebesar 42,00 persen. Belum mampunya siswa SMA/SMK/SLB yang ada di Kepri bersaing dalam lomba tingkat nasional secara optimal disebabkan beberapa hal: di antaranya adalah Besarnya biaya pelatihan yang dibutuhkan oleh siswa dalam latihan praktek untuk persiapan lomba sehingga pelatihan yang disiapkan tidak maksimal hanya dilakukan beberapa hari menjelang hari perlombaan, kekurangan sarana prasarana dan tidak sesuai alat praktek yang dimiliki sekolah dengan alat praktek yang dimiliki tim pusat untuk perlombaan juga menjadi penyebab rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti perlombaan.

g. Kualitas Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi

Di samping layanan yang dilakukan Dinas Pendidikan secara umum juga ada layanan yang dilakukan dengan tujuan mencapai kualitas layanan pendidikan berbasis teknologi informasi yang difokuskan pada Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi yang dimiliki Dinas Pendidikan. Layanan berupa siaran televisi pendidikan dan pelatihan guru dan siswa yang berbasis teknologi informasi. Walaupun dalam pengembangan Baltekkomdik ini terkendala dengan dana, namun sumber daya di Balai Tekkomdik ini terus berusaha untuk memajukan kualitas pendidikan melalui jaringan telekomunikasi dan informasi. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator yang Baltekkomdik yang meningkat setiap tahun walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2018 memang terjadi defisit besar-besaran sehingga capaian indikatornya menurun drastis dari 63,35% pada tahun 2017 menjadi 28,57% di tahun 2018, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kembali mengalami kenaikan hingga menjadi 84,75% di tahun 2021.

Tabel 2.53
Indikator Kualitas Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase SMA/SMK yang memiliki sistem informasi manajemen berbasis IT	63.35	28,57	71,14	78	84,75
2	Persentase kabupaten/kota yang sudah terlayani akses siaran TV Pendidikan	28.57	60	85	71,42	100

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2. Urusan Kesehatan

Realisasi kinerja indikator program pembangunan urusan kesehatan disajikan lebih lanjut pada tabel di bawah.



Tabel 2.54
Capaian Sasaran Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

NO	PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Kesehatan Masyarakat						
-	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	131	130	98	92	241
-	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	18	15	13	11,1	15
-	Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	%	16,4	13	11,9	5,6	13,4
-	Cakupan kabupaten/kota sehat	%	57	71	100	100	100
2	Program Pencegahan dan pengendalian penyakit						
-	Prevalensi HIV	%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,05	<0,5
-	<i>Case Notification Rate</i> (CNR) Semua kasus TB	per 100.000 penduduk	181	177	316	164	195
-	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	88	81	87,7	90,5	86
-	<i>Incidence rate</i> DBD	per 100.000 penduduk	38,2	56	91	76,15	74,8
-	API (<i>Annual Paracite Incidence</i>)	per 100.000 penduduk	0,2	0,14	0,1	0.09	0,003
-	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	94	91	96,9	89,6	80,8
-	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	27	27,4	28,2	26,28	26,3
3	Program Pelayanan Kesehatan						
-	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	71,4	100	100	100	100
-	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	19,48	79,3	96,5	96,51	96,51
-	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	71,49	82,58	86,1	89,65	91,54
-	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna



NO	PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN				
			2017	2018	2019	2020	2021
-	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan						
-	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang	%	78	80.42	80.6	78,24	78,76
-	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban	%	76.5	80	85.5	81,5	83,5
5	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan						
-	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	50	56.32	77	49,43	56
-	Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	%	58	73.68	73.7	51,72	50
-	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang	%	70.2	84.04	85.7	85,71	85,98
-	Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	26.7	53.33	93.3	100	100
6	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan						
-	Persentase Ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar	%	88.5	93.1	92	93,18	89,7
7	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya						
-	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan	%	100	100	100	100	100
-	Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2022



a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi perlu mendapatkan perhatian pemangku kebijakan. AKB mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakat. Angka ini digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi program serta kebijakan kependudukan dan kesehatan suatu negara di seluruh dunia. AKB adalah banyaknya kematian bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup (KH) di wilayah dan kurun waktu yang sama. Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kematian bayi jika terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri.

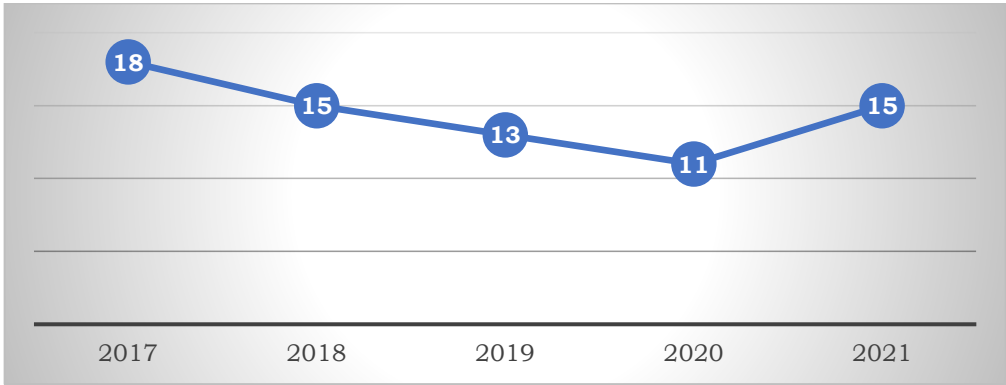
Secara absolut, jumlah kematian bayi sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 jumlah kematian bayi di Provinsi Kepulauan Riau terus menurun, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga menjadi 15. Jika dibandingkan dengan target AKB Tahun 2021 pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (30 per 1.000 kelahiran hidup), capaian AKB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 termasuk dalam kategori sangat baik dimana diperoleh nilai 15 per 1.000 kelahiran penduduk.

Penyebab terbesar kematian bayi pada tahun 2021 adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yaitu berat bayi kurang dari 2,5 kilogram dan asfiksia (gangguan dalam pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh) pada bayi usia 0 – 28 hari (neonatal), sedangkan kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan (post neonatal) didominasi oleh penyebab lain, kelainan saluran cerna, dan diare. Angka kematian neonatal di Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap Angka Kematian Bayi. Kematian neonatal banyak disebabkan akibat adanya gangguan fungsi paru-paru, pembuluh darah, atau jaringan tubuh (asfiksia) pada bayi usia 0 – 28 hari (neonatal).

Upaya penurunan AKB ditunjang dengan pelaksanaan antenatal yang berkualitas dan terpadu, kelas ibu hamil, persalinan yang aman serta pemantauan kasus kematian ibu dan bayi yang akurat sehingga dapat menggambarkan penyebab kematian yang nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran. Secara garis besar ada beberapa hal yang mendukung terjadinya penurunan AKB di Provinsi Kepulauan Riau yaitu adanya pembiayaan Jampersal, peningkatan pelayanan ANC (Antenatal Care/pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil), ketersediaan SDM yang berkompeten, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), pelaksanaan Kelas Ibu Hamil di puskesmas pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang



melibatkan lintas-sektor, membaiknya sistem rujukan di beberapa kabupaten/kota, dan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang rutin setiap tahunnya. AMP merupakan kegiatan yang menelusuri kembali sebab kesakitan dan kematian ibu dan bayi dengan tujuan mencegah kesakitan dan kematian yang akan datang serta dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

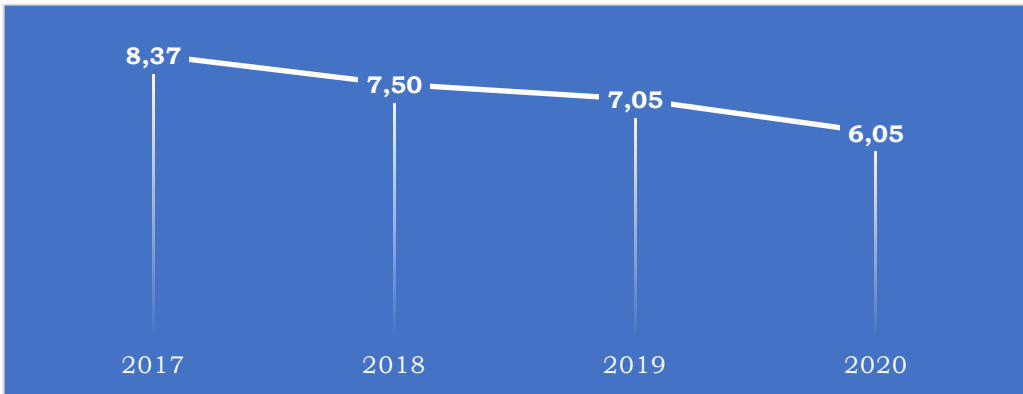


Gambar 2.16
Angka Kematian Bayi Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

b. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah kematian anak balita (12-59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita mempunyai manfaat untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA, tingkat keberhasilan program KIA dan menilai kondisi sanitasi lingkungan.

Angka Kematian Balita di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan turunnya tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA, tingkat keberhasilan program KIA dan menilai kondisi sanitasi lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 2.17
Angka Kematian Balita Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



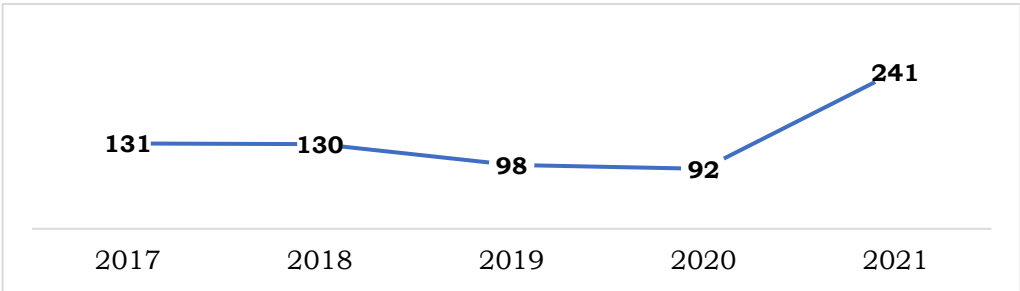
c. Angka Kematian Ibu (AKI)

Peran ibu sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Sosok seorang ibu yang melahirkan dan mengantarkan generasi penerus menjadi manusia yang kelak berguna bagi negara. Indikator kesehatan ibu yang utama bisa dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) di suatu wilayah.

AKI adalah banyaknya kematian ibu yang dinyatakan dalam per 100.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun yang sama. Suatu kematian bisa dikategorikan sebagai kasus kematian ibu jika terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.

Berdasarkan kematian ibu yang dilaporkan, Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yaitu sebesar 92 per 100.000 KH (38 kematian Ibu/41.292 kelahiran hidup dikali konstanta 100.000). Capaian AKI Tahun 2020 lebih baik jika dibandingkan dengan AKI pada tahun 2019 yang sebesar 98 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan jumlah kasus kematian ibu, juga terdapat penurunan dari 41 kasus kematian ibu ditahun 2019, turun menjadi 38 kasus di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu hingga mencapai 241 per 100.000 kelahiran hidup atau mengalami kenaikan sebesar 149 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020.

Penyebab kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 masih didominasi oleh penyebab langsung yaitu pendarahan dan hipertensi dalam kehamilan. Selain itu, persentase penyebab lainnya yang merupakan penyebab tidak langsung juga cukup besar, contohnya kondisi penyakit malaria, HIV, edema paru (suatu kondisi yang ditandai dengan gejala sulit bernapas akibat terjadinya penumpukan cairan di dalam kantong paru-paru (alveoli), gagal ginjal, batu empedu atau penyakit lain yang diderita ibu.



Gambar 2.18
Angka Kematian Ibu Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

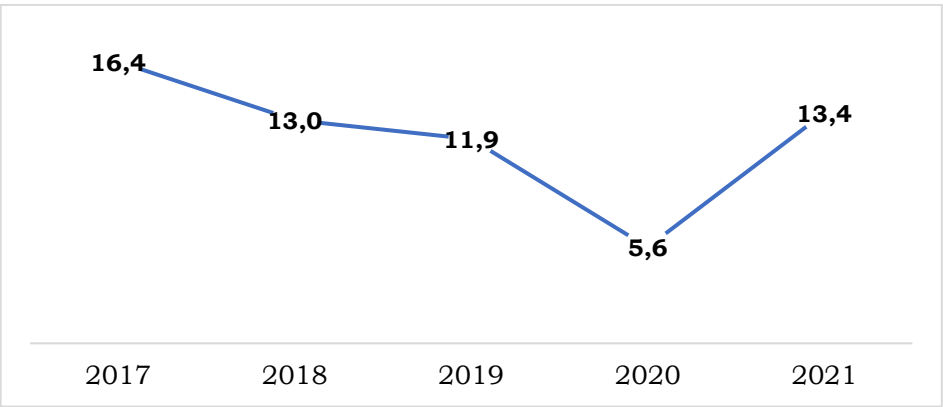


d. Status Gizi Balita

Pengukuran status gizi didasarkan atas Standar World Health Organization (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/ SK/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh gizi yang didapatkan. Gizi yang seimbang dapat menunjang proses tumbuh kembang anak dan akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas gizi yang diterima dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang saling terkait, seperti kesehatan buruk, kualitas SDM yang rendah, hingga daya saing di pasar tenaga kerja yang kurang memadai (Indeks Pembangunan Manusia, 2018).

Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,6. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga menjadi 13,4.

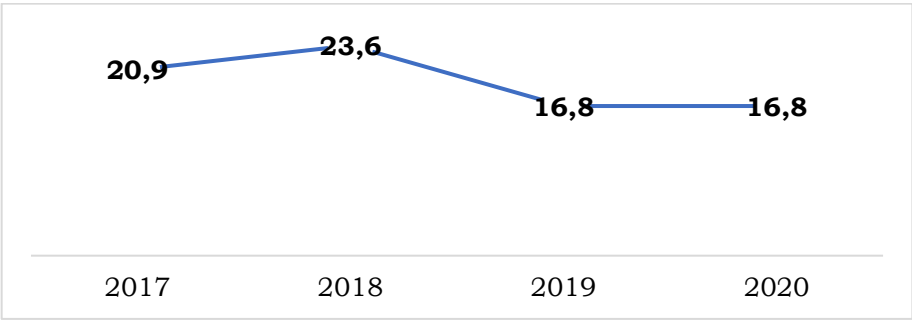
Mengingat pentingnya status gizi bagi kesehatan penduduk, pemerintah telah menetapkan gizi menjadi salah satu tujuan utama dalam RPJMN 2015-2020, khususnya gizi ibu dan balita. Dalam rencana pembangunan tersebut, pemerintah memonitor perkembangan kualitas gizi melalui dua indikator yaitu prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita dan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (*baduta*).



Gambar 2.19
Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2022



Data prevalensi kekurangan gizi dan prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 sampai dengan 2020 menunjukkan kecenderungan penurunan. Hal ini menunjukkan semakin baiknya upaya perbaikan gizi bagi anak.



Gambar 2.20
Prevalensi Stunting di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

e. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada.

Berdasarkan data pada tabel dibawah ini diketahui bahwa Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun diangkat 43,90% pada tahun 2020.

Tabel 2.55
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2017-2020

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Karimun	48,61	49,09	55,91	37,68
Kabupaten Bintan	53,09	57,69	56,27	43,88
Kabupaten Natuna	49,10	57,76	48,42	37,26
Kabupaten Lingga	66,02	56,56	54,76	56,24
Kabupaten Kepulauan Anambas	41,92	66,28	52,64	36,56
Kota Batam	40,91	41,57	47,84	45,54
Kota Tanjungpinang	34,18	44,95	51,15	40,86
Provinsi Kepulauan Riau	42,83	46,17	50,37	43,90

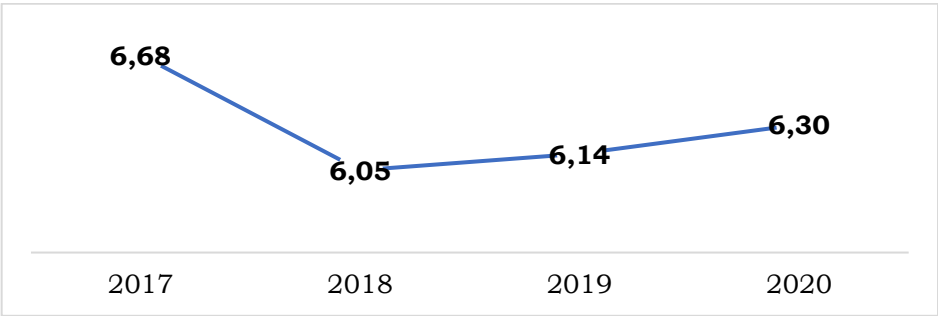
Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

f. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio Posyandu per Satuan Balita merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari/oleh/untuk, dan bersama masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan



masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri Rasio Posyandu per Satuan Balita dari tahun ke tahun fluktuatif. Pencapaian tahun 2017 sebesar 6,68 per 1000 balita, menurun di tahun 2018 menjadi 6,05 per 1000 balita. Namun data 2019 dan 2020 menunjukkan peningkatan sampai 6,30 per 1.000 balita.

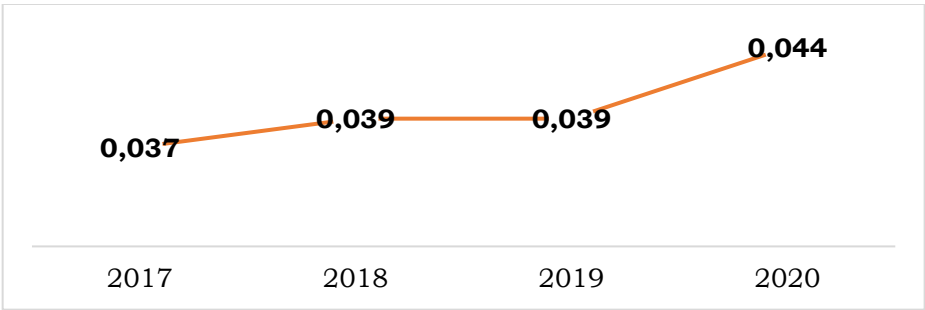


Gambar 2.21
Rasio Posyandu per Satuan Balita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

g. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 mencapai 0,037 dan meningkat pada tahun 2018 sampai tahun 2019 di angka 0,039 dan di tahun 2020 mengalami peningkatan 0,044. Hal ini menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer yang semakin meningkat.



Gambar 2.22
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2017-2020

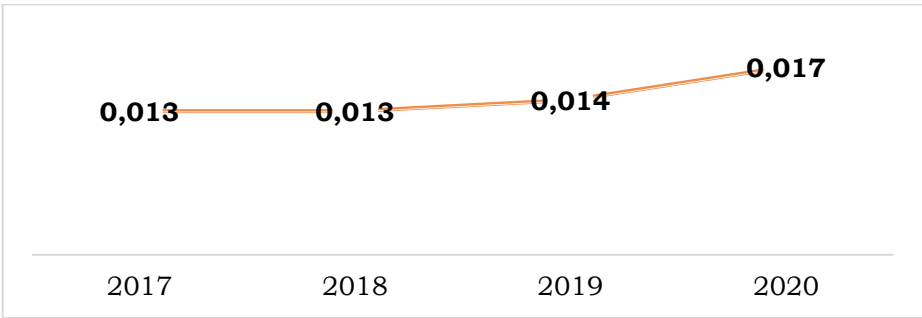
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

h. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio Rumah Sakit per Satuan



Penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Dilihat dari capaian Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 sampai tahun terhitung konstan di angka 0,013 per 1000 penduduk sampai tahun 2018 dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 (0,017 per 1000 penduduk), hal ini terjadi karena jumlah rumah sakit bertambah beriringan dengan pertambahan jumlah pertumbuhan penduduknya.

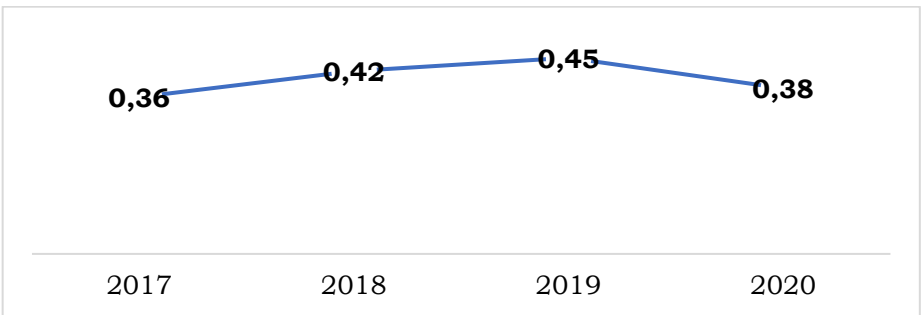


Gambar 2.23
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

i. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Berdasarkan data profil kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, rasio dokter per 1000 penduduk bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020, rasio dokter per 1000 penduduk di Indonesia sebesar 0,4. Sedangkan rasio dokter per 1.000 penduduk di Provinsi Kepulauan Riau adalah 0,38. Artinya Provinsi Kepulauan Riau memiliki 38 dokter untuk melayani 100.000 penduduk. Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan yang ada, demi terlaksananya pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan di Kepulauan Riau. Salah satu terobosan yang dilakukan dengan pengangkatan tenaga medis (dokter dan dokter gigi) dan tenaga paramedis (bidan) dengan status non-PNS. Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 dengan sumber pembiayaan dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 2.24
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

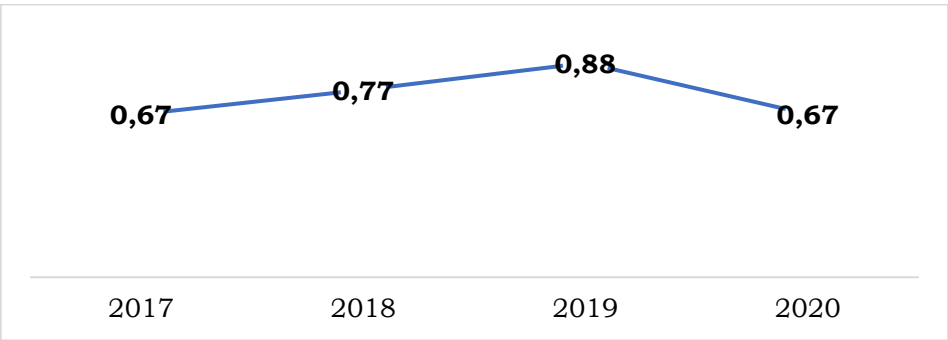


j. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis) memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 0,67. Dengan kata lain, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 67 tenaga medis untuk melayani 100.000 penduduk. Rasio tenaga medis ini dari tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk menjaga agar pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan secara optimal, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau juga menyelenggarakan pendidikan yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan ini dilaksanakan dengan pembiayaan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun pihak lain.

Jenis pendidikan yang berkelanjutan yaitu Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS), Program Tugas Belajar Pusat, Program Tugas Belajar Daerah, dan Izin Belajar.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan strategi penguatan kuantitas tenaga kesehatan melalui program pengangkatan dokter/dokter gigi non-PNS, dan bidan non-PNS Provinsi Kepulauan Riau, yang pendayagunaannya di Puskesmas, Pustu, Polindes, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah. Dukungan pendayagunaan tenaga kesehatan juga diperkuat dengan adanya program Penugasan Khusus Nusantara Sehat (NS) serta Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang pengadaan dan pembiayaan oleh Kementerian Kesehatan RI.



Gambar 2.25
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2020

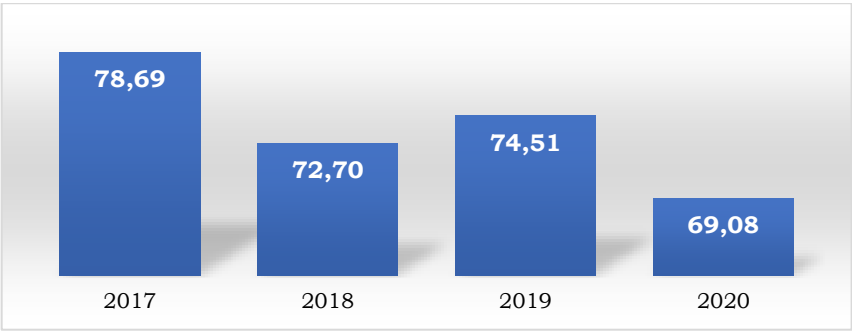
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



k. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan adalah masalah kesehatan yang melibatkan ibu, bayi, atau keduanya. Komplikasi kebidanan bisa dialami bahkan oleh perempuan yang sudah sehat sebelumnya dan mereka yang pernah mengalami masalah sebelumnya berisiko lebih tinggi untuk mengalaminya. Selain itu komplikasi kebidanan dapat membuat kehamilan berisiko tinggi yang membutuhkan perawatan dan pemantauan rutin. Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani bersifat fluktuatif. Tiga tahun terakhir cakupan sudah berada di atas 71% namun di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 69,08%.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain peningkatan kapasitas tenaga kesehatan seperti pelatihan APN, pelatihan MTBS, orientasi SDIDTK.



Gambar 2.26
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

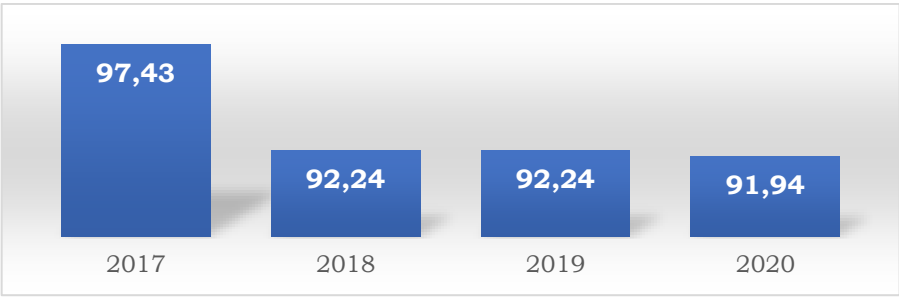
1. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar ialah persalinan yang dilakukan oleh bidan/dokter/dokter spesialis kebidanan yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan, baik persalinan normal atau persalinan dengan komplikasi. Terkait pelayanan ini, indikator yang biasa digunakan ialah cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan (PN) dan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF). Cakupan PN di Kepulauan Riau memang menunjukkan capaian yang baik, namun jika ditilik lebih lanjut diketahui bahwa masih banyak persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang dilakukan di non-faskes (misalnya di rumah). Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan, geografis, jarak rumah dan faskes, dan kebiasaan masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan capaian, antara lain: peningkatan



kapasitas tenaga kesehatan seperti pelatihan APN, pelatihan MTBS dan orientasi SDIDTK.



Gambar 2.27
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

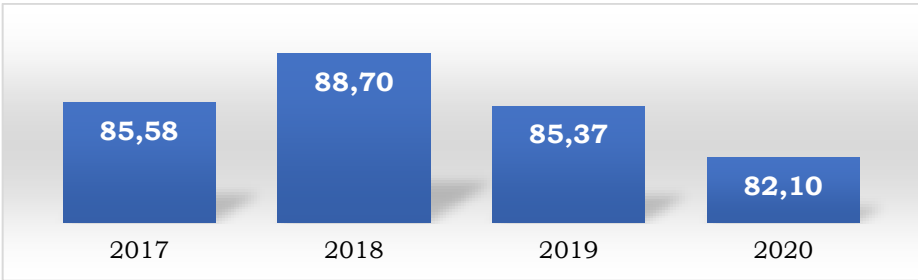
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

m. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Imunisasi merupakan intervensi kesehatan yang paling cost effective dalam mencegah terjadinya penyakit menular dan menurunkan angka kematian pada anak khususnya akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Cakupan imunisasi harus dipertahankan tinggi dan merata di seluruh wilayah, yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, cakupan desa UCI (Universal Child Immunization) dari tahun 2017 bersifat fluktuatif dengan capaian rata-rata di atas 86%.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan capaian indikator adalah:

- 1) Memberi edukasi ke ibu tentang pentingnya pemberian imunisasi lengkap untuk bayi dalam rangka mencegah PD3I termasuk Campak/MR
- 2) Petugas mengingatkan jadwal imunisasi pada tiap ibu melalui kader di wilayah kerja masing-masing
- 3) Melaksanakan sweeping dan DOFU (Drop Out Follow Up) untuk bayi/baduta yang tidak diimunisasi
- 4) Monitoring Evaluasi secara berjenjang dalam pelaksanaan imunisasi dalam rangka mencapai target IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Supervisi suportif kepada pengelola imunisasi secara berjenjang dalam pelaksanaan imunisasi.

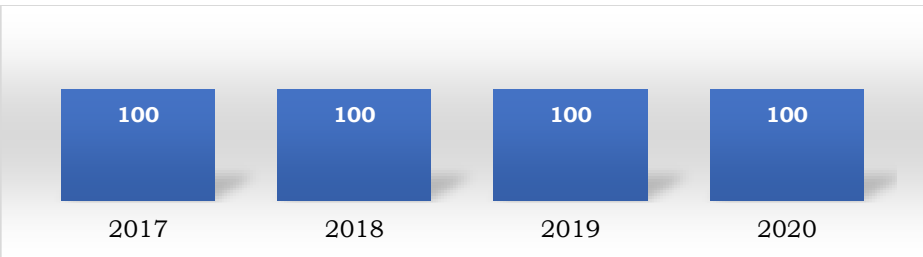


Gambar 2.28
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

n. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Masa pertumbuhan merupakan masa esensial bagi anak-anak untuk mendapatkan asupan nutrisi dan gizi yang cukup. Asupan nutrisi dan gizi yang cukup dapat mencegah pertumbuhan tidak sempurna, seperti stunting dan wasting. Namun, gizi buruk masih menjadi masalah utama kesehatan di Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan stakeholder dan lintas-sektor untuk mengatasi masalah gizi buruk. Di Provinsi Kepulauan Riau khususnya, masih ada balita dengan status gizi buruk. Berkat kerjasama yang baik antarstakeholder, setiap tahun cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sudah mencapai 100%. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

- 1) Pemberian Makanan Tambahan
- 2) Pelacakan kasus gizi buruk
- 3) Penanganan kasus gizi buruk sesuai tata laksana balita gizi buruk
- 4) Konseling PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak)



Gambar 2.29
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

o. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

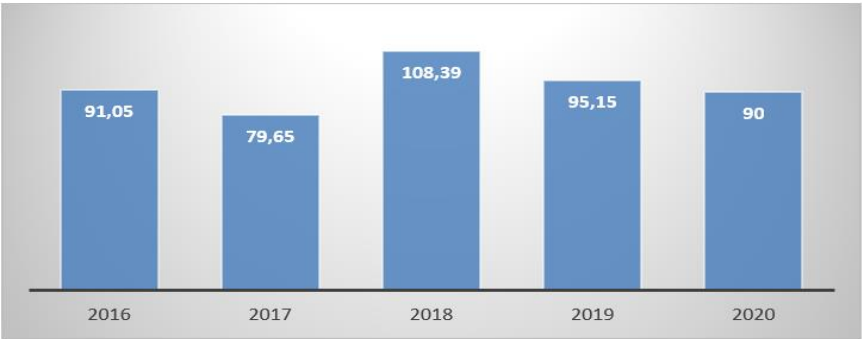
Vaksin campak adalah vaksin untuk mencegah penyakit campak, yang mulai diberikan pada anak usia 9 bulan. Pemberian vaksin ini masuk ke dalam program imunisasi rutin lengkap yang dianjurkan oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, persentase imunisasi campak anak usia 1 tahun



mengalami fluktuasi. Salah satunya dikarenakan status vaksin MR yang belum ada sertifikat halal sehingga banyak orangtua yang tidak bersedia anaknya untuk divaksin.

Namun demikian Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya untuk meningkatkan capaian jumlah anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak. Beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) Memberi edukasi ke ibu tentang pentingnya pemberian imunisasi lengkap untuk bayi dalam rangka mencegah PD3I termasuk campak/MR.
- 2) Petugas mengingatkan mengenai jadwal imunisasi pada tiap ibu melalui kader di wilayah kerja masing-masing.
- 3) Melaksanakan sweeping dan DOFU (Drop Out Follow Up) untuk bayi/baduta yang tidak diimunisasi.

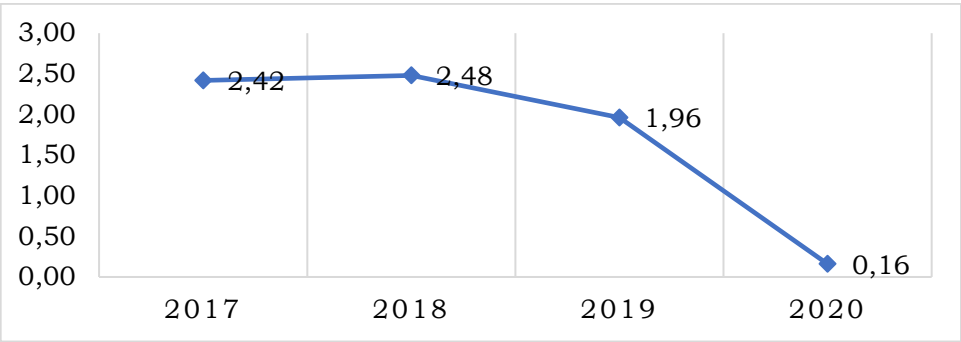


Gambar 2.30
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017- 2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

p. Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio bersama negara-negara South East Asia Region (SEARO) pada tanggal 27 Maret 2014. Setelah Indonesia dinyatakan bebas polio, bukan berarti Indonesia menurunkan upaya imunisasi dan surveilans AFP atau kasus lumpuh layu akut. Pemantauan terhadap kasus lumpuh layu adalah upaya pencegahan harus terus ditingkatkan hingga seluruh dunia benar-benar terbebas dari polio. Dalam rentang waktu 2017 - 2020, Non-Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Provinsi Kepulauan Riau sudah baik. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan terobosan, antara lain:

- 1) Meningkatkan capaian vaksin polio yang tinggi dan merata di seluruh kabupaten/ kota.
- 2) Melakukan surveilans aktif AFP di seluruh kabupaten/kota.

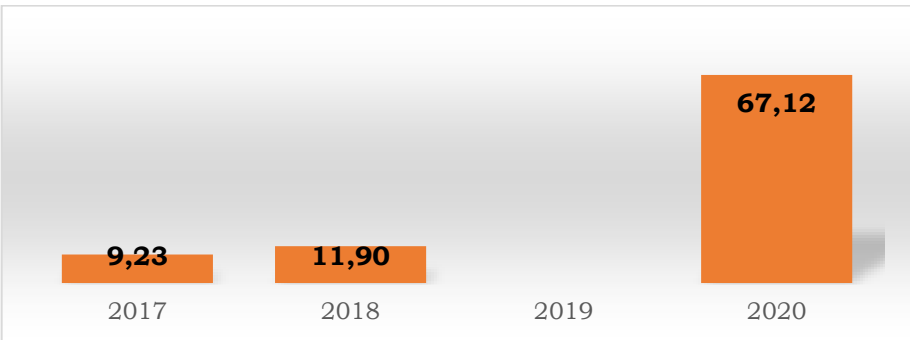


Gambar 2.31
Non-Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

q. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Cakupan penanganan pneumonia balita tahun 2020 (67,12) mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Belum optimalnya persentase penemuan pneumonia yang ditangani menunjukkan bahwa belum maksimalnya deteksi terhadap kasus pneumonia dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda pneumonia pada balita serta bahayanya bila tidak segera ditangani.

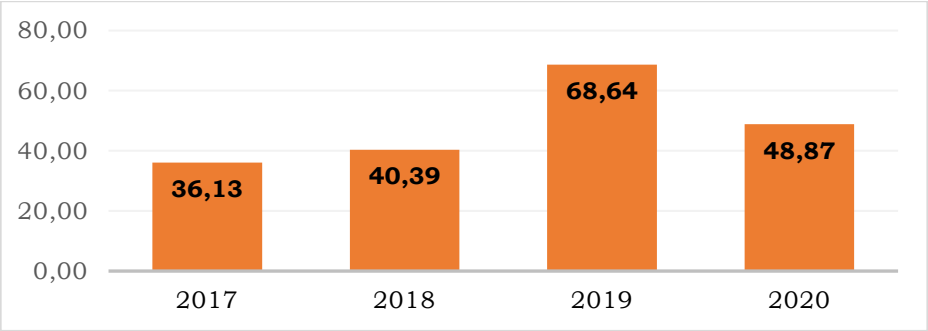


Gambar 2.32
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2017- 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

r. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

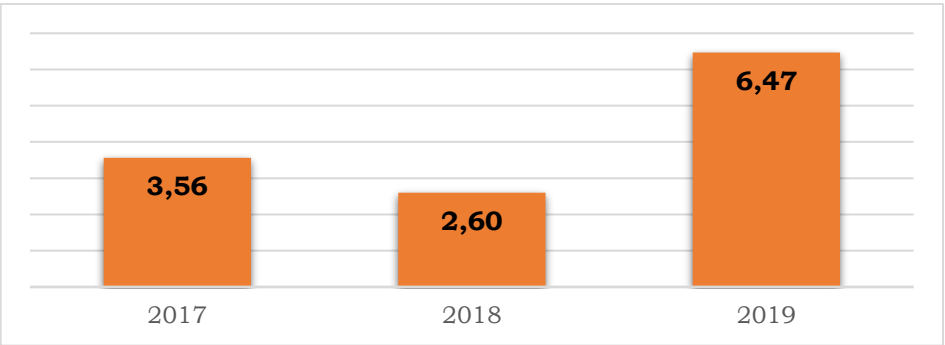
Jumlah cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 sebanyak (36,13%), Sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 4.353 kasus dengan jumlah kasus baru BTA Positif sebanyak 1.758 kasus (40,39%), pada tahun 2019 terdapat sebanyak 3648 kasus dengan jumlah kasus baru BTA Positif sebanyak 2504 kasus (68,64%) dan tahun 2020 mengalami penurunan (48,87%). Menurunnya jumlah kasus disebabkan adanya Kegiatan Ketuk Pintu dalam rangka penemuan kasus TB di rumah-rumah yang dilakukan oleh kader-kader TB di kabupaten/ kota.



Gambar 2.33
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

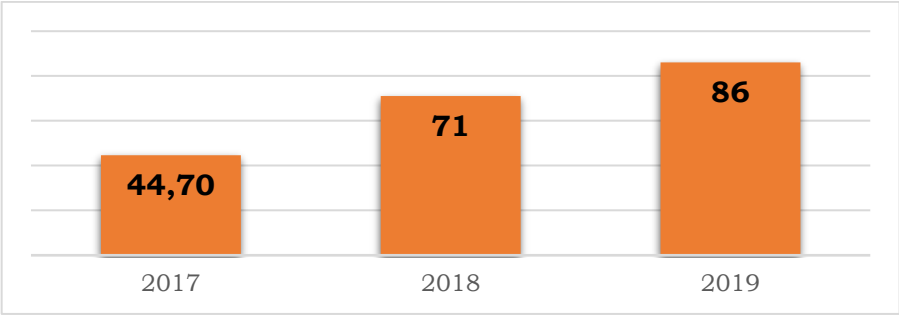
s. Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh serta Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis

Tingkat kematian akibat tuberkulosis pada tahun 2017 sebesar 3,56 per 100.000 penduduk, pada tahun 2018 menurun menjadi 2,60 per 100.000 penduduk dan kembali meningkat menjadi 6,71 per 100.000 penduduk di tahun 2019. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu terdapat kasus drop out atau putus obat, gagal, dan adanya kasus pasien pindah ke fasilitas kesehatan lain yang tidak diketahui hasil akhir pengobatannya.



Gambar 2.34
Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018. Angka kesembuhan TB tahun 2017 sebanyak (44,70%), 2018 (71%) dan pada tahun 2019 mengalami naik kembali menjadi (86%).



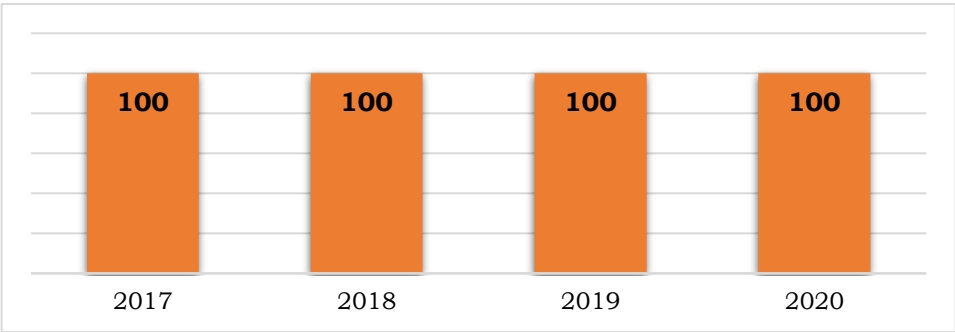
Gambar 2.35
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

t. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

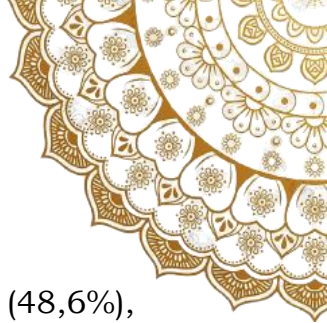
Siklus epidemik DBD biasanya terjadi setiap 9 – 10 tahun, dengan kata lain setiap 9 – 10 tahun akan terjadi peningkatan kasus DBD secara drastis berbanding tahun sebelumnya. Jumlah kasus DBD di Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya yaitu 2017 (837 kasus), 2018 (1.134 kasus) dan 2019 (1.862 kasus). Meskipun jumlah kasus terus meningkat, penanganan penderita DBD dilakukan secara menyeluruh (100%) sampai dengan tahun 2020.

Tingginya penemuan kasus DBD dapat terjadi karena adanya perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kehidupan vektor, diluar faktor-faktor lain yang memengaruhinya. Perubahan iklim menyebabkan perubahan curah hujan, suhu, kelembaban, arah udara sehingga berefek terhadap ekosistem daratan dan lautan serta berpengaruh terhadap kesehatan terutama terhadap perkembangbiakan vektor penyakit seperti nyamuk aedes, malaria, dan lainnya. Selain itu, faktor perilaku dan partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta faktor pertambahan jumlah penduduk dan faktor peningkatan mobilitas penduduk yang sejalan dengan semakin membaiknya sarana transportasi menyebabkan penyebaran virus DBD semakin mudah dan semakin luas.



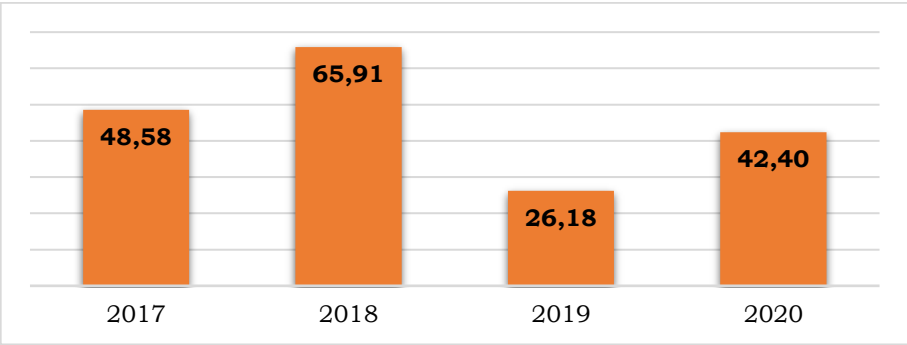
Gambar 2.36
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



u. Penderita Diare yang Ditangani

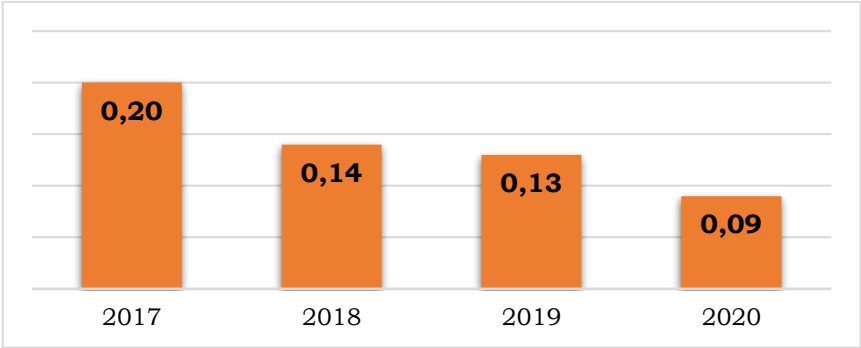
Penanganan kasus diare pada tahun 2017 yaitu sebesar (48,6%), meningkat di tahun 2018 menjadi (65,9%), namun terjadi penurunan pada 2019 dengan capaian (26,2%) dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan (42,4%). Penanggulangan yang telah dilakukan meliputi peningkatan pengetahuan masyarakat (hygiene kesehatan, berperilaku hidup bersih dan sehat), penyediaan air bersih dan jamban sehat. Dari segi masyarakat, diharapkan untuk waspada dan melakukan tindakan pencegahan dengan menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan mengkonsumsi air minum yang sudah direbus.



Gambar 2.37
Penderita Diare Yang Ditangani Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

v. Angka Kejadian Malaria

API adalah jumlah kasus positif malaria per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. API Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 sebesar 0,20 per 1.000 penduduk dan tahun 2018 sebesar 0,14 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2019 API Provinsi Kepulauan Riau kembali terjadi penurunan sebesar 0,13 per 1.000 penduduk berisiko dengan jumlah kasus malaria positif sebesar 265 kasus berbanding 1.999.000 penduduk berisiko dikali konstanta 1.000 sementara untuk tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 0,09 per 1.000 penduduk. Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan sertifikat pembebasan/eliminasi malaria di Provinsi Kepulauan Riau, adalah: Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kabupaten Karimun; Kabupaten Natuna dalam proses persiapan sejak 2019; Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Bintan dalam status “pra-eliminasi malaria” menuju indikator program kasus indigenous 0 (nol) dan API <1‰ (diprediksi tahun 2023).



Gambar 2.38
Angka Kejadian Malaria Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

w. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 Tentang “Eliminasi Malaria di Indonesia” dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota Nomor 443.41/465/SJ tanggal 8 Februari 2010 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia” yang harus dicapai secara bertahap mulai dari tahun 2010 sampai seluruh wilayah Indonesia bebas malaria selambat-lambatnya tahun 2030, maka program malaria di Indonesia bertujuan untuk mencapai eliminasi.

Eliminasi malaria diimplementasikan melalui penguatan sistem kesehatan di daerah yang terintegrasi berdasarkan prinsip Pelayanan Kesehatan Dasar. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab penuh untuk mencapai eliminasi malaria mengingat sifat dari eliminasi malaria adalah public goods (komoditas umum). Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang telah mampu mencapai eliminasi/ bebas malaria adalah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun. Kabupaten Natuna dalam proses persiapan eliminasi malaria di tahun 2019. Untuk Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence/API) di Provinsi Kepulauan Riau dari sejak tahun 2016 - 2020 cenderung menurun. Hal ini juga berdampak pada penanganan dan penanggulangan kasus malaria. Selama tahun 2016 - 2017, tidak ada ditemukan kasus pasien malaria meninggal dunia, sehingga CFR (Case Fatality Rate) malaria di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0%. Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Bintan dalam status “pra-eliminasi malaria” menuju indikator program kasus indigenous 0 (nol) dan API <1‰ (diprediksi tahun 2023).



x. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

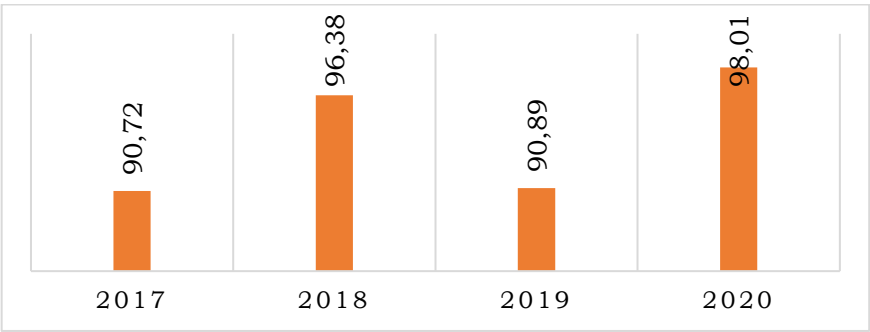
Angka prevalensi HIV (Human Immunodeficiency Virus) Provinsi Kepulauan Riau merujuk kepada angka prevalensi pusat dengan capaian tahun 2016 - 2019 sebesar <0,05%. Untuk menurunkan angka prevalensi HIV/AIDS, beberapa strategi telah diterapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, di antaranya pengembangan klinik layanan sukarela bagi masyarakat yang ingin mengetahui status HIV dan akselerasi klinik perawatan dukungan pengobatan (PDP) bagi pasien yang positif HIV dan harus memulai pengobatan ARV.

y. Cakupan Kunjungan Bayi

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi:

- 1) Kunjungan bayi satu kali pada umur 29 hari – 2 bulan
- 2) Kunjungan bayi satu kali pada umur 3 – 5 bulan
- 3) Kunjungan bayi satu kali pada umur 6 – 8 bulan
- 4) Kunjungan bayi satu kali pada umur 9 – 11 bulan

Kunjungan bayi bertujuan untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemantauan pertumbuhan, imunisasi, serta peningkatan kualitas hidup bayi dengan stimulus tumbuh kembang. Berdasarkan capaian realisasi kunjungan bayi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020, terlihat pencapaian bersifat fluktuatif. Tahun 2017 - 2018, terjadi peningkatan capaian kunjungan bayi yaitu dari tahun 2017 sebesar 90,72%, meningkat di tahun 2018 menjadi 96,4%, mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 90,9% serta mengalami peningkatan kembali di tahun 2020 menjadi 98,01%.

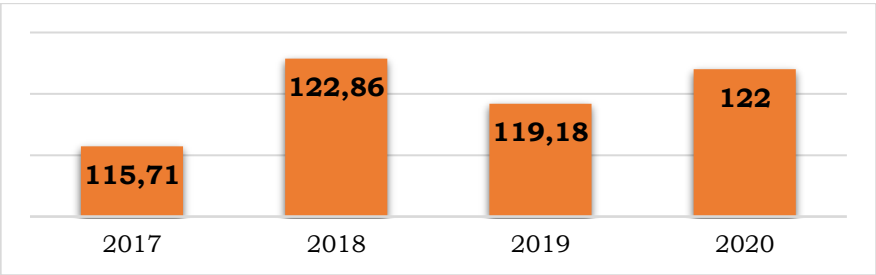


Gambar 2.39
Cakupan Kunjungan Bayi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



z. Cakupan Puskesmas

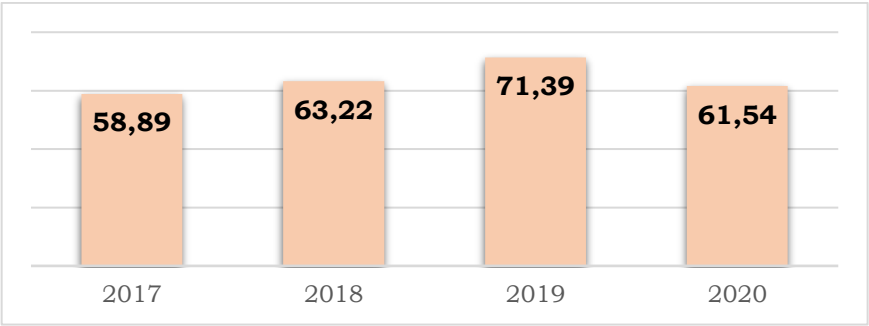
Cakupan Puskesmas berdasarkan definisi operasional Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu cakupan jumlah Puskesmas per kecamatan. Pada tahun 2016 jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 81 Puskesmas meningkat menjadi 87 Puskesmas di Tahun 2019. Secara realisasi cakupan Puskesmas dari 110% di tahun 2018 menjadi 122% di tahun 2020. Pusat mengalokasikan anggaran pembangunan Puskesmas melalui anggaran Dana Alokasi Khusus, sehingga saat ini Puskesmas-puskesmas khususnya di wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK) telah memiliki Puskesmas dengan bentuk bangunan modern.



Gambar 2.40
Cakupan Puskesmas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

aa. Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) dihitung berdasarkan perbandingan jumlah Pustu dengan jumlah kelurahan/desa. Hasil pencapaian cakupan Pustu di tahun 2017 sebesar 58,89%, 2018 meningkat menjadi 63,22%, 2019 menjadi 71,39%, dan 2020 sebesar 61,54%. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka jaringan Puskesmas termasuk Pustu, Posyandu, dan lain-lain menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

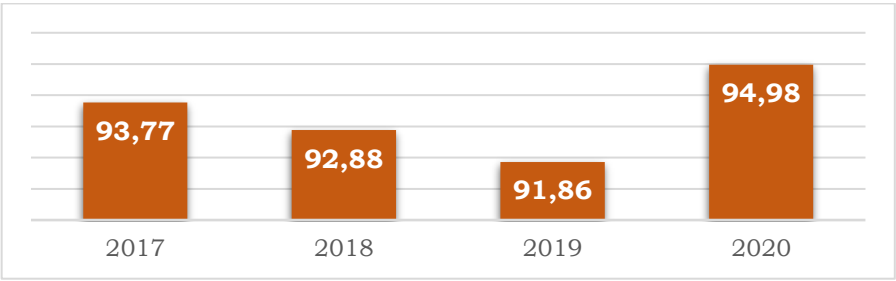


Gambar 2.41
Cakupan Puskesmas Pembantu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



bb. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan minimal 4 kali, sesuai dengan ketentuan waktu kunjungan. Di samping itu, indikator ini menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah, melalui kegiatan ini diharapkan ibu hamil dapat dideteksi secara dini adanya masalah atau gangguan atau kelainan dalam kehamilannya dan dilakukan penanganan secara cepat dan tepat.



Gambar 2.42
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

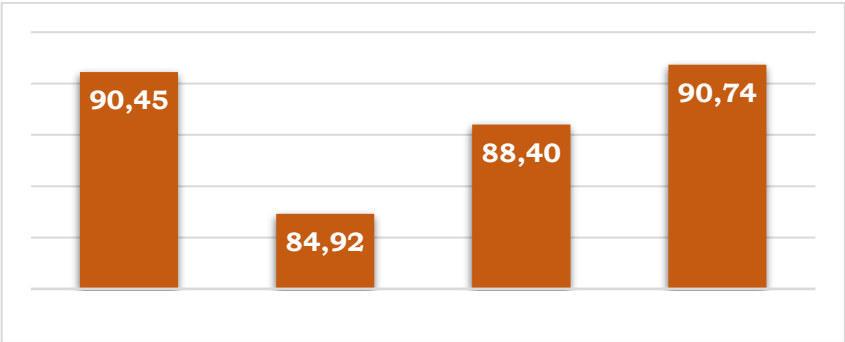
Berdasarkan capaian cakupan kunjungan ibu hamil (K4) di tahun 2017 sebesar 93,77%, menurun di dua tahun selanjutnya 2018 (92,88%), 2019 (91,86%) dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 (94,98%). Salah satu penghambat capaian indikator ini oleh karena banyak ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya di trimester I ataupun juga masih terdapat ibu hamil yang tidak tercatat pada kunjungan trimester 3 (drop out). Selain itu, penurunan angka kunjungan K4 ini disebabkan ibu hamil yang bermigrasi untuk melahirkan di kota yang berbeda.

cc. Cakupan Pelayanan Nifas

Masa nifas adalah masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya. Masa nifas ini berlangsung sekitar 6-8 minggu pasca persalinan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat masa nifas antara lain, suhu, pengeluaran lochea, payudara, traktur urinarius, dan sistem kardiovaskuler. Selain dari segi klinik ibu, kondisi kejiwaan ibu pasca persalinan juga harus selalu dipantau dan diberi dukungan. Dalam masa nifas ini tidak sedikit ibu yang mengalami problem kesehatan seperti nyeri, bengkak pada kaki, ketidakmampuan menyusui, dan nutrisi. Budaya dan mitos yang kadang kurang menguntungkan kesehatan ibu di masa nifas masih menjadi masalah.



Kasus kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh kematian pada ibu nifas (49%). Ibu nifas rentan untuk mendapatkan komplikasi setelah melahirkan, maka dari itu seorang ibu yang baru bersalin harus mendapatkan kunjungan dan pemantauan oleh tenaga kesehatan terlatih. Pada minggu-minggu pertama setelah persalinan adalah periode kritis bagi seorang ibu baru dan bayi yang baru lahir. Selama periode inilah, seorang wanita harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang dialami pasca melahirkan, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Berdasarkan cakupan pelayanan nifas di tahun tahun 2017 sebesar 90,45%. Untuk 2018 dan 2019 mengalami penurunan menjadi 84,92% namun meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 88,4% dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 90,74%. Penghambat pencapaian ini dikarenakan banyak pemeriksaan nifas tidak mencapai 3 kali (drop out).



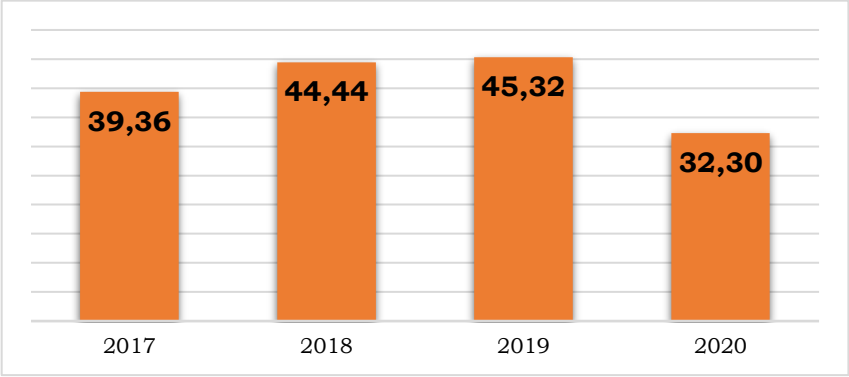
Gambar 2.43
Cakupan Pelayanan Nifas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

dd. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penanganan definitif adalah pemberian tindakan akhir pada setiap kasus komplikasi neonatus yang pelaporannya dihitung 1 kali pada masa neonatal. Kasus komplikasi yang ditangani adalah seluruh kasus yang ditangani tanpa melihat hasilnya hidup atau mati. Indikator ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus-kasus kegawatdaruratan neonatal, yang kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya, atau dapat dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Perkiraan neonatal komplikasi dihitung berdasarkan 15% dari jumlah sasaran bayi pada periode yang sama. Hasil cakupan penanganan neonatus komplikasi di tahun 2017 sebesar 39,36%, meningkat menjadi 44,4% di tahun 2018 dan meningkat menjadi 45,3% di tahun 2019 namun di tahun 2020



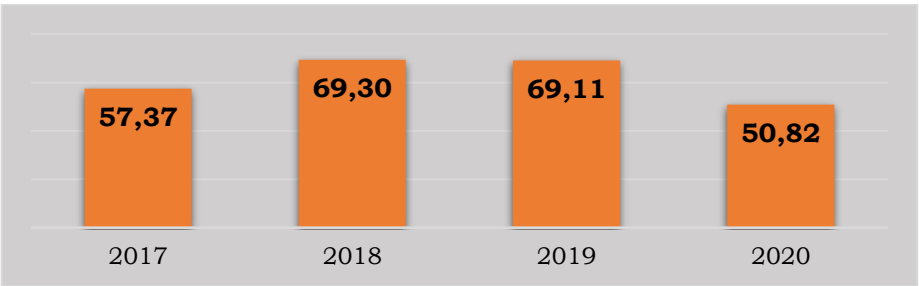
kembali mengalami penurunan menjadi 32,3%. Hambatan yang ditemui terkait pencapaian indikator ini yaitu banyak ditemui perbedaan pemahaman tenaga kesehatan akan definisi operasional neonatus komplikasi, sehingga banyak kasus tidak dianggap sebagai komplikasi, tidak terekamnya pencatatan komplikasi (data missing).



Gambar 2.44
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

ee. Cakupan pelayanan anak balita

Pelayanan kesehatan anak balita ialah pelayanan yang diberikan kepada anak usia 12 – 59 bulan yang dilakukan sesuai standar, yaitu meliputi pemantauan pertumbuhan minimal delapan kali setahun, pemantauan perkembangan minimal dua kali setahun, pemberian Vitamin A dua kali setahun. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kepulauan Riau masih berada di angka yang rendah (di bawah 60%). Permasalahan yang terjadi di lapangan harus diidentifikasi sehingga dapat dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan cakupan secara optimal. Salah satu penyebabnya yaitu kesibukan orang tua dan juga balita yang sudah mulai bersekolah (PAUD). Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, cakupan pelayanan anak balita selama 2017 - 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun di tahun 2020 menjadi 50,82%, tetapi masih rendah karena masih di bawah 70%. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajak orangtua untuk membawa balita ke Posyandu.



Gambar 2.45
Cakupan Pelayanan Anak Balita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

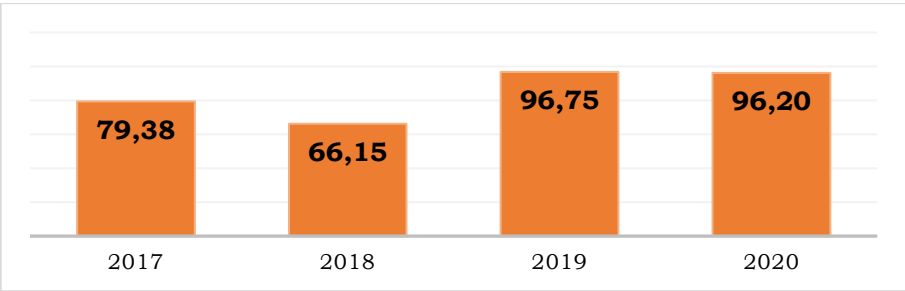


ff. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Setiap anak usia sekolah harus diberikan pelayanan Kesehatan, salah satunya melalui penjaringan kesehatan yang dilaksanakan melalui koordinasi antara Puskesmas dan sekolah dan biasanya dilaksanakan setahun sekali. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain: a) pengukuran tinggi dan berat badan; b) pemeriksaan gigi dan mulut; c) pemeriksaan penglihatan; d) pemeriksaan pendengaran; e) pemeriksaan kebugaran; dan f) kuesioner intelegensia, mental, kesehatan reproduksi, dan gaya hidup.

Jumlah cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat pada tahun 2017 sebesar (79,38%) dan 2018 sebesar (66,15%), namun untuk tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 96,75% dan 96,2%. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat yaitu:

- 1) Penguatan koordinasi dengan TIM Pembina UKS/M melalui Orientasi Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja.
- 2) Berkoordinasi dengan lintas-sektor terkait dalam hal bimbingan teknis dan supervisi pembinaan dan pelaksanaan UKS.



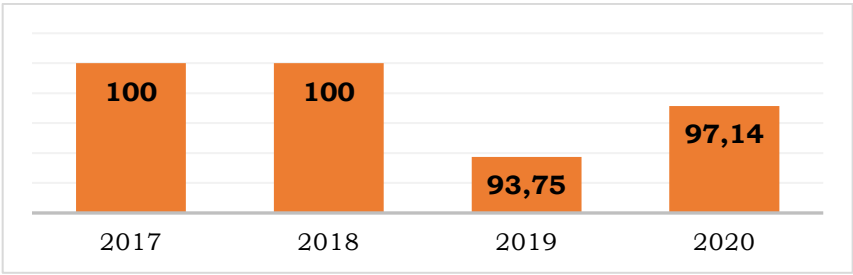
Gambar 2.46
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

gg. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota yaitu pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum on site (berada di tempat) 24 jam dengan kualifikasi General Emergency Life Support (GELS) dan/atau Advance Trauma Life Support (ATLS) + Advance Cardiac Life Support (ACLS), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Cakupan indikator ini tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 100%, namun menurun di tahun 2019 menjadi 93,75% dan kembali naik di tahun 2020 sebesar 97,14%. Hambatan yang dihadapi terkait pencapaian indikator ini adalah



terdapatnya tenaga IGD yang belum tersertifikasi BTCLS + GELS terutama pada rumah sakit di wilayah Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas.

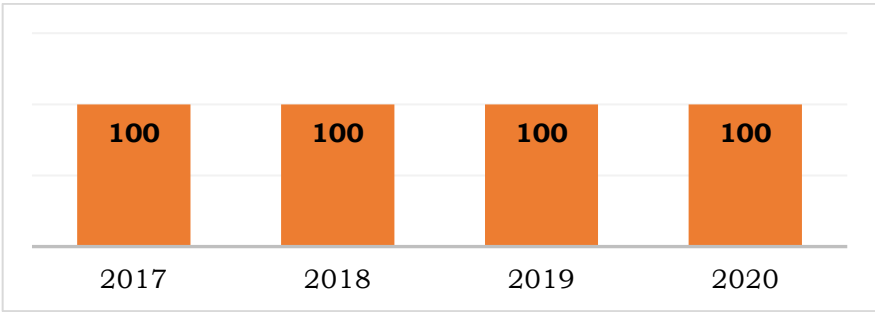


Gambar 2.47
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

hh. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam tahun 2017 - 2020 telah mampu dicapai dengan capaian 100%. Indikator ini juga menjadi salah satu poin dalam pencapaian indikator SPM Provinsi Bidang Kesehatan sesuai yang tertuang dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Melalui aplikasi SKDR (Sistem Kewaspadaan Dan Respon), mampu memberikan sinyal kewaspadaan dari 22 penyakit yang dilaporkan oleh Puskesmas. SKDR sebagai upaya mewujudkan tindakan atau respon cepat terhadap adanya potensi atau munculnya KLB.

Sistem ini bekerja dengan cara memantau perkembangan tren suatu penyakit menular potensial wabah/KLB dari waktu ke waktu dalam periode mingguan. Sistem didasarkan pada pelaporan kasus di lapangan. Para petugas kesehatan seperti bidan, mantri dan Puskesmas Pembantu (Pustu) melakukan pelaporan kepada petugas surveilans di Puskesmas melalui SMS/HT. Petugas surveilans Puskesmas akan mengirimkan data yang diterima ke kabupaten juga melalui SMS. Data akan dientry dan dianalisis oleh kabupaten, lalu dikirim melalui e-mail ke provinsi dan pusat dengan menggunakan software khusus yang dapat menghasilkan peringatan dini (sinyal kewaspadaan) menurut tempat, waktu dan jenis penyakitnya. Bila dalam analisis muncul alert atau signal maka kabupaten segera lakukan respons (verifikasi data, penyelidikan epidemiologi, konfirmasi laboratorium dan penanggulangan) sesuai dengan situasi dan kondisi. Respon juga dapat dilakukan secara bersama dengan Puskesmas.



Gambar 2.48
Cakupan Desa/Keluarga Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

ii. Fasilitas Kesehatan

Angka harapan hidup yang bergantung pada sarana kesehatan yang tersedia merupakan salah satu indikator untuk pembangunan non fisik. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi tingkat pelayanan kesehatan yang terselenggara secara terintegrasi yang menyangkut aspek promotif, aspek preventif, aspek kuratif dan aspek rehabilitatif. Semua aspek pelayanan kesehatan tersebut sangat membutuhkan sarana pendukung. Sebagai gambaran jenis sarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu berupa rumah sakit umum dan khusus, puskesmas, klinik/balai kesehatan dan posyandu.

Faktor ketersediaan sarana kesehatan dapat dilihat dari jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data BPS diketahui bahwa fasilitas kesehatan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau meliputi 35 rumah sakit umum, 93 puskesmas, 222 klinik/Balai Kesehatan dan 1.428 posyandu.

Pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau ini didukung oleh ketersediaan tenaga medis, yaitu dokter umum yang meliputi 647 orang dokter, 3.604 orang perawat, dan 1.775 orang bidan. Sedangkan jumlah ahli farmasi dan ahli gizi masing-masing sebanyak 443 orang, dan 136 orang. Jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum	Puskesmas	Klinik/Balai Kesehatan	Posyandu
Tanjungpinang	3	7	42	138
Bintan	2	15	13	165
Batam	20	21	138	522
Karimun	3	13	17	227
Lingga	2	13	4	188
Natuna	2	14	7	120
Kepulauan Anambas	3	10	1	68
Kepulauan Riau	35	93	222	1.428

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022



Sementara itu, terkait upaya pengendalian pandemi COVID-19, sangat diperlukan penyiapan sarana dan prasarana untuk penatalaksanaan kasus yang dinyatakan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Penatalaksanaan PDP membutuhkan ruangan isolasi yang memenuhi syarat pengendalian penyakit infeksi. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/ MENKES/169/ 2020, pemerintah telah menetapkan 132 Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Indonesia. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan 4 rumah sakit sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.57
Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Nama Rumah Sakit	Alamat
1	RSUD Embung Fatimah	Jl. R. Soeprapto. Blok D 1 - 9 Batu Aji Kota Batam Telepon: (0778-364446) Fax: (0778-361363) Email: rsud_batam@yahoo.co.id
2	RSBP Batam	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.1, Sekupang,Batam Telepon: (0778-322046, 322121) Fax: (0778-322165, 324391) Email: rsbp.official@gmail.com
3	RSUD Muhammad Sani (Kabupaten Karimun)	Jl. Soekarno - Hatta No. 1 Tanjung Balai Karimun Telepon: (0777-327808) Fax: (0777-327818) Email: karimunhospital@yahoo.com
4	RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang	JL. W.R Supratman No. 100 Km. 8 Tanjungpinang Kepulauan Riau Telepon: (0771-7335203) Fax: (0771-7335203) Email: rsudkepritanjungpinang@yahoo.co.id

Sumber: Permenkes No. HK.01.07/ MENKES/169/ 2020

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Minimal yang menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM mencakup pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Target pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 belum ditetapkan, karena Kedua jenis urusan pelayanan tersebut di tahun 2020 masih dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, di bidang Cipta Karya sebagai pengampu SPM



tersebut. Direncanakan pada tahun 2021 bidang Cipta Karya Baru akan berada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sehingga kedua pelayanan dasar tersebut baru dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Belum adanya penganggaran khusus terkait penerapan SPM, namun merujuk pada target dan indikator pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 yaitu sebesar 100%. Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Realisasi
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota	Persentase Pelayanan Akses Air Bersih/ Air Minum yang aman	100%	92,68%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah	96,36%	83,84%

Sumber: Laporan SPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Pada tabel pencapaian target SPM tersebut pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota pada tahun 2020 terealisasi sebesar 92,68% dari target 100%. Hal ini mengalami kenaikan jika dilihat pada Laporan SPM Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan bahwa realisasi pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota pada tahun 2019 sebesar 41,38% dari target 96,79%.

b. Sarana dan Prasarana Umum

1) Jalan dan Jembatan

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, jalan yang baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Jalan berkondisi baik adalah jalan dengan permukaan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan jalan. Persentase jalan provinsi berkondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi berkondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Namun demikian, kondisi jalan baik pada tahun 2020 menurun menjadi 60,25% yang mana target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun tersebut sebesar 73,24%. Selanjutnya meskipun kondisi jalan dalam kondisi baik pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 66,27%, namun kondisi tersebut dinilai masih rendah. Secara rinci hal tersebut dapat terlihat pada tabel berikut.



Tabel 2.59
Panjang Jalan dan Panjang Jalan Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jalan Berkondisi Baik (km)	Panjang Jalan (km)	Jalan Berkondisi Baik (km)	Panjang Jalan (km)	Jalan Berkondisi Baik (km)	Panjang Jalan (km)	Jalan Berkondisi Baik (km)	Panjang Jalan (km)	Jalan Berkondisi Baik (km)	Panjang Jalan (km)
1	Kota Tanjungpinang	49,15	70,23	50,10	70,23	51,56	70.23	49,38	70,23	55,30	70,23
2	Kabupaten Bintan	128,61	139,10	129,93	139,10	130,71	139.10	121,20	139,10	119,30	139,10
3	Kota Batam	91,96	112,35	104,82	112,35	110,63	112.35	65,95	112,35	83,35	112,35
4	Kabupaten Karimun	105,35	143,72	109,03	143,72	112,31	143.72	84,94	143,72	119,22	143,72
5	Kabupaten Lingga	128,47	236,72	128,62	236,72	138,35	236.72	124,45	236,72	135,15	236,72
6	Kabupaten Natuna	75,18	143,33	82,26	143,33	87,86	143.33	63,52	143,33	57,76	143,33
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	24,58	51,00	25,51	51,00	28,76	51.00	30,67	51,00	24,81	51,00
Total		603.31	896,45	630,27	896,45	660,17	896,45	540,11	896,45	594,89	896,45

Sumber: 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021
2. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022



Berdasarkan tabel di atas, kondisi ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diperbaiki, ditingkatkan, dan dibangun melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Sejak tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah memperbaiki ruas jalan provinsi menjadi berkondisi baik sepanjang 66.38 km.

Pada tabel di atas, persentase jalan yang berkondisi baik pada Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 hanya sebesar 67,30% dan pada tahun 2019 naik menjadi 73,64%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 60,25%. Hal ini banyak dipengaruhi oleh kebijakan refocusing dan ralisasi anggaran akibat pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat kebijakan pembatasan mobilitas manusia untuk mencegah penyebaran Covid-19. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi akibat pandemi Covid-19, dan mulai pulihnya kondisi perekonomian maka tahun 2021 persentase jalan yang berkondisi baik meningkat menjadi 66,36%.

Tabel 2.60
Persentase Jalan Berkondisi Baik Tahun 2017-2021

Prov/ Kab/ Kota	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Prov Kepulauan Riau	67,30%	70,31%	73,64%	60,25%	66,36%
Tanjungpinang	69,98%	71,34%	73,42%	70,31%	78,74%
Bintan	92,46%	93,41%	93,97%	87,13%	85,77%
Batam	81,85%	93,30%	98,47%	58,70%	74,19%
Karimun	73,30%	75,86%	78,15%	59,10%	82,95%
Lingga	54,27%	54,33%	58,44%	52,57%	57,09%
Natuna	52,45%	57,39%	61,30%	44,32%	40,30%
Kep. Anambas	48,20%	50,02%	56,39%	60,14%	48,65%

Sumber: 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021; 2. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

Kabupaten Natuna memiliki persentase jalan berkondisi baik paling rendah jika dibandingkan kabupaten/kota yang lain di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 40,30% pada tahun 2021. Kabupaten Bintan memiliki realisasi persentase kondisi jalan baik paling tinggi diantara kabupaten/kota yang lain.

Sementara itu, tingkat konektivitas antar wilayah strategis Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sepanjang 34,94 km, pada Kabupaten Karimun sepanjang 12,372 km. Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km) cukup dekat yakni pada Kota Tanjung Pinang sepanjang 0,85 km, Kabupaten Bintan sepanjang 1,7 km, Kota Batam sepanjang 6,28 km, Kabupaten Lingga sepanjang 2,15 km, Kabupaten Natuna sepanjang 6,99



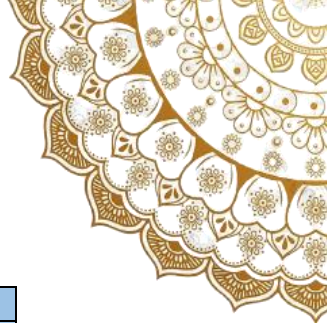
km dan Kabupaten Kepulauan Anambas sepanjang 4,6 km. Lebih lengkap
dapaian indikator kinerja konektivitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Realisasi Indikator Kinerja Konektivitas
Tahun 2017-2021 per Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Provinsi/ Kab/ Kota	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km)	Provinsi Kepulauan Riau	6,97	16,20	25,96	32,34	34,94
	Tanjungpinang	0	0.00	0.25	0.85	0.85
	Bintan	0	0.80	1.70	1.7	1.7
	Batam	1,5	2.98	5.08	5.08	6,28
	Karimun	1,5	3.46	6.20	10.973	12.373
	Lingga	0	0.80	1.15	2.15	2.15
	Natuna	2,62	6.81	6.99	6.99	6.99
	Kep. Anambas	1,35	1.35	4.60	4.6	4.6

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Jembatan berfungsi sebagai penunjang untuk menjangkau daerah yang satu dengan yang lain agar lebih efisien dan efektif. Jembatan dalam kondisi baik adalah jembatan yang ditentukan dari segi baiknya kondisi struktur. Persentase jembatan berkondisi baik merupakan perbandingan dari panjang jembatan berkondisi baik dengan panjang jembatan provinsi. Evaluasi terhadap persentase jembatan berkondisi baik tahun 2021 dapat digambarkan panjang jembatan berkondisi baik yakni 3.621,91 m dibagi dengan panjang jembatan provinsi yakni 4.145.70 m dengan persentase 87.35%. Adapun jembatan berkondisi baik pada setiap kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam tabel di bawah.



Tabel 2.62
Jembatan Berkondisi Baik di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Panjang Jembatan (m)	Jembatan Berkondisi Baik (m)	Jembatan Berkondisi Baik (%)	Panjang Jembatan (m)	Jembatan Berkondisi Baik (m)	Jembatan Berkondisi Baik (%)	Panjang Jembatan (m)	Jembatan Berkondisi Baik (m)	Jembatan Berkondisi Baik (%)
1	Kota Tanjungpinang	1.925,3	1.597,61	82.98%	1.925,3	1.597,61	82.98%	1.925,3	1.597,61	82.98%
2	Kabupaten Bintan	105,10	35,02	33.33%	105,10	35,02	33.33%	105,10	35,02	33.33%
3	Kota Batam	385,4	365,67	94.88%	385,4	365,67	94.88%	385,4	365,67	94.88%
4	Kabupaten Karimun	396,20	346,68	87.50%	396,20	346,68	87.50%	396,20	346,68	87.50%
5	Kabupaten Lingga	660,70	498,63	75.47%	660,70	498,63	75.47%	660,70	498,63	75.47%
6	Kabupaten Natuna	445	350,92	78.86%	445	350,92	78.86%	445	350,92	78.86%
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	228	126,68	55.56%	228	126,68	55.56%	228	126,68	55.56%
Total		4.145,70	3.321,12	80.11%	4.145,70	3.321,12	80.11%	4.145,70	3.321,12	80.11%

No	Kabupaten/Kota	2020			2021		
		Panjang Jembatan (m)	Jembatan Berkondisi Baik (m)	Jembatan Berkondisi Baik (%)	Panjang Jembatan (m)	Jembatan Berkondisi Baik (m)	Jembatan Berkondisi Baik (%)
1	Kota Tanjungpinang	1.925,3	1.897,61	98.56%	1.925,3	1.897,61	98.56%
2	Kabupaten Bintan	105,10	35,02	33.33%	105,10	35,02	33.32%
3	Kota Batam	385,4	365,67	94.88%	385,4	365,67	94.88%
4	Kabupaten Karimun	396,20	346,68	87.50%	396,20	346,68	87.50%
5	Kabupaten Lingga	660,70	498,63	75.47%	660,70	498,63	75.47%
6	Kabupaten Natuna	445	350,92	78.86%	445	350,92	78.86%
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	228	126,68	55.56%	228	127,38	55.56%
Total		4.145,70	3.621,12	87.34%	4.145,70	3.621,91	87.35%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Sebagaimana tabel diatas, kinerja pencapaian jalan, jembatan, dll masih perlu untuk lebih dioptimalkan dukungan pembangunannya baik terhadap sektor pariwisata ataupun pendidikan terutama terkait isu sinergitas dengan OPD terkait

2) Irigasi

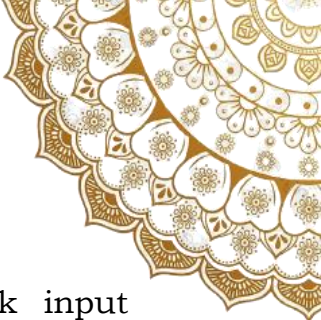
Indikator kinerja persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada merupakan ketersediaan air irigasi (ltr/dtk) pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi (ltr/dtk) berdasarkan rencana tata tanam. Adapun kondisi awal tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi telah tercapai 39,83% pada tahun 2017. Lebih lanjut pada tahun 2018 sampai 2021 tercapai sebanyak 46,50% yang dalam artian pada empat tahun tersebut tidak ada peningkatan. Data ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat lebih detail terdapat pada tabel di bawah.



Tabel 2.63
Ketersediaan Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017 – 2021

No	Daerah Irigasi (DI)	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Ketersediaan Air Tahun 2021	Total Kebutuhan Air Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
						(liter/dt)	(liter/dt)	(%)
1	D.I Jemaja	38.86%	38.86%	38.86%	38.86%	180	463	38.86%
2	D.I Kawasan Pertanian Terpadu	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	334	334	100.00%
3	D.I Air Raya	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	48	48	100.00%
4	D.I Batubi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	280	280	100.00%
5	D.I Kelarik	47.20%	47.20%	47.20%	47.20%	708	1,500	47.20%
6	D.I Meliah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	48	48	100.00%
7	D.I Payak	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	127	127	100.00%
8	D.I Tapau	34.55%	46.71%	46.71%	46.71%	844	1,806	46.71%
9	D.I Bintang Buyu	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	12	120	10.00%
10	D.I Bukit Langkap	0.00%	14.60%	14.60%	14.60%	175	1,200	14.60%
		39.83%	46.50%	46.50%	46.50%	2,755	5,926	46.50%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2022



3) Air Baku

Air baku merupakan air yang akan digunakan untuk input pengolahan air minum yang memenuhi baku mutu air baku. Air baku yang diolah menjadi air minum dapat berasal dari sumber air bawah tanah yaitu dari lapisan yang mengandung air di bawah permukaan tanah dangkal atau dalam, sumber air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan mata air serta air laut. Evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.64
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Bagi Penduduk Tahun 2017-2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	64.82	70.42	73.13	74,96	74,96
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	35.05	46.50	46.50	46.50	46,50

Sumber: Laporan SPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

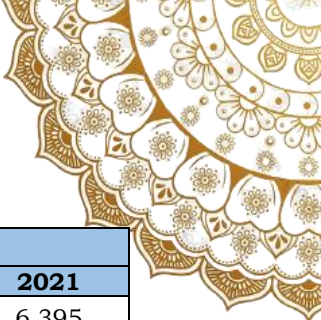
Ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk terbesar di Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2017-2021 terbesar adalah pada Kota Batam dengan kondisi pemenuhan di tahun 2021 sebesar 90.56% sedangkan Ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk terkecil di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun sejak tahun 2017-2021 adalah pada Kabupaten Natuna dengan kondisi akhir tahun sebesar 23.68%. Dengan adanya evaluasi dan upaya peningkatan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk, pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam pemerataan pelayanan khususnya untuk tahun-tahun yang akan datang dan daerah-daerah yang memiliki ketersediaan air baku yang cukup rendah.

Adapun kondisi persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk sejak tahun 2017-2021 per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat lebih jelas pada tabel di bawah.



Tabel 2.65
Ketersediaan Sumber Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan
Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kota Tanjungpinang					
	Debit andalan (liter/detik)	502	502	502	509	509
	Debit terpasang (liter/detik)	387	387	387	393,10	393,10
	Jumlah penduduk (jiwa)	207.286	209.870	212.485	227.663	227.663
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	440	440	440	440	440
	Nilai outcome (persen)	87,84%	87,84%	87,84%	89,34%	89,34%
2	Kota Batam					
	Debit andalan (liter/detik)	4,723	4,763	4,763	4784,00	4784,00
	Debit terpasang (liter/detik)	4,531	4,571	4,571	4.591,50	4.591,50
	Jumlah penduduk (jiwa)	1.285.704	1.336.975	1.390.290	1.196.396	1.193.088
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	5,062	5,070	5,070	5.070	5.070
	Nilai outcome (persen)	89,50%	90,15%	90,15%	90,56%	90,56%
3	Kabupaten Bintan					
	Debit andalan (liter/detik)	515	515	570	720,00	720,00
	Debit terpasang (liter/detik)	515	515	570	720,00	720,00
	Jumlah penduduk (jiwa)	156.164	157.760	159.373	159.518	168.754
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	1,731	1,731	1,731	1.731	1.731
	Nilai outcome (persen)	29,75%	29,75%	32,93%	41,59%	41,59%
4	Kabupaten Karimun					
	Debit andalan (liter/detik)	230	390	440	440	440
	Debit terpasang (liter/detik)	230	390	440	440	440
	Jumlah penduduk (jiwa)	229.273	231.287	233.319	253.457	260.620
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	625	625	625	625	625
	Nilai outcome (persen)	36,80%	62,40%	70,40%	70,40%	70,40%
5	Kabupaten Lingga					
	Debit andalan (liter/detik)	90	90	110	110	110
	Debit terpasang (liter/detik)	90	90	110	110	110
	Jumlah penduduk (jiwa)	89.353	89.736	90.121	98.633	101.994
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	185	190	190	190	190
	Nilai outcome (persen)	48,75%	47,37%	57,89%	57,89%	57,89%
6	Kabupaten Natuna					
	Debit andalan (liter/detik)	35	35	90	90	90
	Debit terpasang (liter/detik)	35	35	90	90	90
	Jumlah penduduk (jiwa)	76.052	76.829	77.615	81.495	82.656
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	380	380	380	380	380
	Nilai outcome (persen)	9,21%	9,21%	23,68%	23,68%	23,68%
7	Kabupaten Kepulauan Anambas					
	Debit andalan (liter/detik)	20	20	50	50	50
	Debit terpasang (liter/detik)	20	20	50	50	50
	Jumlah penduduk (jiwa)	41.434	41.954	42.480	47.402	47.916
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	82	94	94	94	94
	Nilai outcome (persen)	24,45%	21,21%	53,02%	53,02%	53,02%
Total						
	Debit andalan (liter/detik)	6,115	6.315	6.548	6.703	6.703



No	Indikator	Capaian Kinerja Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Debit terpasang (liter/detik)	5.807	6.007	6.238	6.395	6.395
	Jumlah penduduk (jiwa)	2.085.266	2.144.411	2.202.961	2.064.564	2.082.785
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	8.504	8.530	8.530	8.530	8.530
	Nilai outcome (persen)	68,28%	70,42%	73,13%	74,96%	74,96%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

4) Banjir

Jumlah titik rawan banjir adalah jumlah kawasan rawan banjir di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan, dimana jumlah titik rawan banjir pada tahun 2017 sebanyak 28 lokasi dan di tahun 2021 hanya 11 lokasi.

Tabel 2.66
Jumlah Titik Rawan Banjir di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

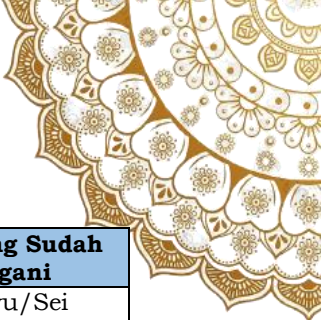
Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah titik rawan banjir	Lokasi	28	28	22	20	11

Sumber: LKPJ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Adapun titik rawan banjir yang sudah tertangani hingga tahun 2021 adalah sebanyak 9 titik yaitu di Kota tanjungpinang (Kawasan Kijang Kencana III, Kawasan Panglima Dompok Lembah Asri dan Kawasan batu 14 Bandara RHF), Kabupaten Bintan (Kawasan Toapaya, Kawasan Km 23-24 Kijang dan RT 06 RW 03 Desa Berakit), Kota Batam (Kawasan Sebelah Hotel Pacific Sei Jodoh dan Kawasan Tanjungpiayu/Sei beduk) dan Kabupaten Lingga (Kawasan Budus).

Tabel 2.67
Jumlah Titik Rawan Banjir Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2021

Kabupaten /Kota	Realisasi				Lokasi Yang Belum Di Tangani	Lokasi Yang Sudah di Tangani
	2018	2019	2020	2021		
Kota Tanjungpinang	9	6	5	2	5 Kawasan Jl Kunai Kp Sidodadi RT 02 RW 09 Kel Batu 9, Kaw. Sido Makmur Kel Batu 9, Kaw. Taman Harapan Indah, Kaw. Suka Berenang, Kawasan Hang tuah Galaxy Batu 14)	7 Kawasan Kaw Kijang Kencana III, Panglima Dompok Lembah asri, Kawasan Bandara RHF, Kaw. Andana, Kaw. Pasopati, Kampung Kolam, Kawasan Rawasari
Kabupaten Bintan	5	5	5	2	5 Kawasan (Kaw. KM. 18 - KM. 20 Kel. Sei Lekop, Sungai Kangboi Km 38, Kaw. Kota Tanjung Uban, Kaw. Jl. Merdeka Tanjung Uban, dan Kaw. Jl. Pasar Berdikari Tanjung Uban)	3 Kawasan Toapaya, Km 23-24 Kijang dan RT 06 RW 03 Berakit
Kota Batam	5	3	3	1	2 Kawasan (Sungai Sagulung, dan Sungai Bengkong)	4 Kawasan (Sebelah hotel pacific sei jodoh, Kaw. Sei Tering, Kawasan Baloi, Kawasan



Kabupaten / Kota	Realisasi				Lokasi Yang Belum Di Tangani	Lokasi Yang Sudah di Tangani
	2018	2019	2020	2021		
						Tanjungpiayu/ Sei beduk)
Kabupaten Karimun	3	2	2	2	2 Kawasan (Kaw. Badang Perkasa, Sungai Raya Karimun)	1 Kawasan (Sungai Kundur)
Kabupaten Lingga	4	4	3	2	3 Kawasan (Sungai Bukit Langkap, Sungai Resang, dan Sungai Nerekeh)	2 Kawasan (Sungai Tande, Kawasan Budus)
Kabupaten Natuna	1	1	1	1	1 Kawasan (Sungai Air Kubang Kec. Bunguran Timur)	
Kabupaten Kepulauan Anambas	1	1	1	1	1 Kawasan (Sungai Dapit menuju Kuala Maras)	
Kepulauan Riau	28	22	20	11		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

5) Sanitasi (air limbah perkotaan, drainase, dan persampahan)

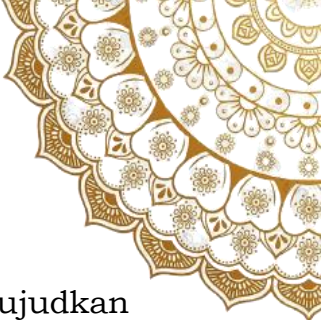
Realisasi indikator Cakupan pelayanan sanitasi (air limbah perkotaan, drainase, dan persampahan) pada tahun 2021 di Kepulauan Riau mencapai 88,49 persen. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2021 sebesar 83,48 persen. Walaupun telah melampaui target, namun pelayanan air limbah, drainase dan persampahan masih perlu terus ditingkatkan dengan menjangkau seluruh wilayah.

Pada kurun waktu 2017 sampai 2020, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kepulauan Riau cenderung meningkat. Walau meningkat selama kurun waktu 4 (empat) tahun, namun pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan dari 86,31 persen pada tahun 2017 menjadi 85,87 persen. Pada tahun 2020, rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak mencapai 89,19 persen, dengan posisi terbanyak di Kota Batam (95,99 persen) dan yang terendah di Kepulauan Anambas (23,95 persen).

Tabel 2.68
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017–2020

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020
Karimun	85,4	88,65	95,10	89,56
Bintan	76,74	76,07	81,10	77,36
Natuna	63,22	70,45	63,14	66,15
Lingga	47,06	62,41	60,41	58,51
Kep. Anambas	17,66	23,73	25,95	23,95
Batam	93,89	91,73	94,81	95,99
Tanjungpinang	84,41	80,50	86,71	85,59
Kepulauan Riau	86,31	85,87	89,13	89,19

Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2022



c. Penataan Ruang

Penataan ruang di daerah sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota, keserasian dengan wilayah di sekitarnya, dasar perizinan pembangunan, maupun administrasi pertanahan. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017. Urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Dinas PU, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah rencana tata ruang wilayah daratan sesuai pelaksanaan tugas, pokok, fungsi organisasi.

Sebanyak 6 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki Peraturan Daerah tentang RTRW, sedangkan Kota Batam sampai saat ini belum ditetapkan dengan Perda. Pada tahun 2020 ini, dari 7 kabupaten/kota terdapat 4 kabupaten yang sedang melaksanakan PK dan revisi RTRW Kabupaten Status proses PK dan Revisi RTRW Kabupaten/Kota disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.69
Status PK dan Revisi Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Peraturan Daerah	Keterangan
1	Perda Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Bintan	Sudah selesai dilakukan peninjauan kembali dan revisi.
2	Perda Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Natuna	Penyusunan Kajian PK telah selesai dilaksanakan pada tahun 2017. Saat ini sedang memasuki tahapan penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Natuna.
3	Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karimun	Penyusunan Kajian PK dan Revisi Ranperda telah selesai dilaksanakan. Ranperda (Revisi) RTRW Kabupaten Karimun akan disampaikan kepada TKPRD Provinsi untuk dibahas pada minggu kedua Agustus 2018
4	Perda Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Lingga	Penyusunan Kajian PK telah selesai dilaksanakan pada tahun 2017. Saat ini sedang memasuki tahapan Laporan Antara (Revisi) RTRW Kabupaten Lingga.
5	Perda Kabupaten Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Anambas	Sedang melaksanakan kajian PK RTRW Kabupaten Anambas, memasuki tahapan FGD.
6	Perda Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2011-2031	Akan diusulkan PK dan Revisi Perda RTRW Kota Tanjungpinang pada tahun 2021.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Secara rinci kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah.



Tabel 2.70
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2020	2019	2020	2021
1	Persentase kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya	%	14,28	28,57	57,14	85,71	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa persentase kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya setiap tahun menunjukkan tren peningkatan. Dari semula hanya 14,28% ditahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2021.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

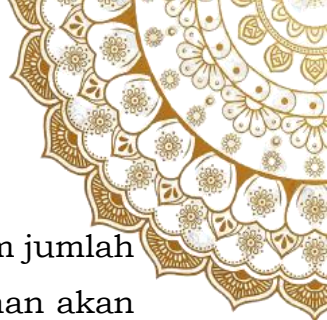
a. Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018, tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Target pencapaian SPM Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau masih dalam kategori N/A (not available) yang memuat jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Sehingga target capaian SPM Perumahan Rakyat belum diakomodir pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

b. Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni (livable), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk



memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tentram, dan sejahtera.

Permasalahan perumahan yang terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seperti backlog, rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh banyak dipengaruhi oleh regulasi perumahan yang ada dalam mendukung penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR. Regulasi dalam hal pembiayaan merupakan salah satu contoh regulasi yang memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi MBR.

Tabel 2.71
Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Rasio rumah layak huni	37.61 %	34.09 %	44.09 %	47.35 %
2	Rasio permukiman layak huni	95 %	98 %	97 %	97 %
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	33 %	21 %	19 %	13 %
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0.09 %	0.08 %	0.07 %	0.05 %
5	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	27.81 %	37.81 %	47.81 %	57.81 %
6	Capaian luasan penanganan kawasan permukiman kumuh	244,95 ha	128,89 ha	103,01 ha	476,85 ha

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Secara umum permasalahan di kawasan kumuh adalah keterbatasan infrastruktur dasar permukiman dengan mengukur 7+1 indikator kumuh yaitu: keteraturan bangunan, akses jalan, drainase, akses air minum layak, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, dan ruang terbuka hijau (RTH). Dari 7+1 indikator tersebut yang dominan menjadi sumber permasalahan di kawasan kumuh secara umum yaitu: aspek pengelolaan persampahan, akses air minum, pengelolaan sampah dan akses jalan. Tipologi permukiman kumuh yaitu permukiman di atas air dan tepi air sehingga memengaruhi sumber permasalahan utama kawasan.

Kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kepulauan Riau berdasarkan data RPJMD 2016-2021 seluas 832,44 ha, dalam kurun waktu tahun 2016 -2020 penanganan kawasan kumuh di Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020 mencapai 476,85 ha dengan



uraian capaian penanganan kumuh pada tahun 2017 sebesar 244,95 ha, tahun 2018 sebesar 128,89 ha, dan tahun 2019 sebesar 103,01 ha.

Minimnya peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dikarenakan peningkatan pelayanan PSU yang belum memenuhi standar sehingga berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan perumahan. Terlihat dari capaian lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2016 sebesar 10,81 % dan pada tahun 2020 menjadi 57,81%. Hal ini disebabkan karena ketidakteraturan bangunan, kurangnya drainase lingkungan, pelayanan persampahan yang belum optimal, pembuangan limbah yang tidak terkendali, akses jalan lingkungan yang tidak memadai.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

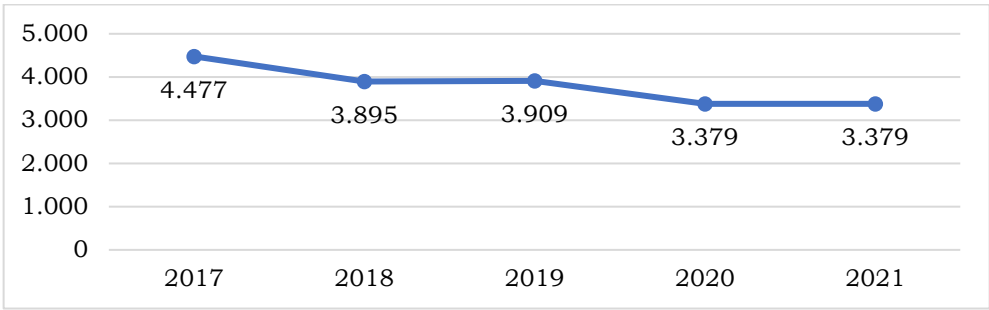
Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

Target capaian SPM Urusan Ketenteraman, dan ketertiban umum belum diakomodir pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu, pencapaian SPM jenis pelayanan dasar urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 belum dapat dilaksanakan.

b. Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi ketenteraman dan ketertiban suatu daerah sangat memengaruhi proses pembangunan daerah. Bahkan ini menjadi salah satu prasyarat untuk investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dapat tercermin dari angka kriminalitas yang terjadi di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa angka kriminalitas di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketenteraman dan

ketertiban di Provinsi Kepulauan Riau relatif cukup kondusif meskipun di situasi pandemi.



Gambar 2.49
Angka Kriminalitas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Sumber: LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kepri Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat kasus kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun penanganan tindak kejahatan merupakan kewenangan kepolisian, namun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki kewajiban untuk membina dan melindungi masyarakatnya. Salah satu faktor penyebab masih adanya berbagai tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum tersebut adalah belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Di samping itu faktor kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi penyebab masih tingginya kasus kriminilitas di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.72
Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dan Penanganan Demo

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase demo yang berjalan aman	92 %	100 %	100 %	100%	100%
2	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	240 Kasus	240 Kasus	235 Kasus	235 Kasus	12.777 Kasus

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Kualitas penataan peraturan perundangan yang masih kurang baik menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penegakan Perda di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, keterbatasan personil juga menjadi faktor penyebab belum optimalnya penegakan Perda di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Persentase anggota satuan perlindungan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian dan kenyamanan lingkungan pada tahun 2021 baru mencapai 43%. Bahkan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari ideal.



Tabel 2.73
Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4: 10.000	4: 10.000	4: 10.000	4: 10.000	
2.	Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan	41 %	42 %	43 %	43%	43%
3	Jumlah Pos Terpadu Se-Provinsi Kepulauan Riau	647 Pos	650 Pos	652 Pos	652 Pos	
4.	Persentase Kabupaten/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran	28,57 %	28,57 %	42,85 %	42,85 %	42,85 %

Sumber: Satuan Polisi pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, 2021 dan 2022

Kebutuhan ideal personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau yang disandingkan dengan jumlah personil yang ada saat ini disajikan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.74
Kebutuhan Ideal Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

No	Kelompok Tugas	Jumlah Personel		
		Ideal	Real	Kurang
1	Pleton 1 (gedung Daerah)	30	17	13
2	Pleton 2 (kantor gubernur)	30	12	18
3	Pleton 3 (kantor DPRD)	30	9	21
4	Pleton Batam	40	40	-
5	Pleton Dalmas	30	-	30
6	Patroli	24	5	19
7	Pengamanan Pos	18	9	9
8	Pos Rumah Jabatan	35	13	22
9	VIP	25	18	7
10	Petugas Tindak Internal	15	10	5
11	Pleton Markas	40	27	13
	Total	317	160	157

Sumber: Satuan Polisi pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel 2.75
Kondisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	OPD	Personil			Total
		PNS	PTT	THL	
1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	72	104	50	226

Sumber: Satuan Polisi pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli dalam rangka pengawasan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur di wilayah Provinsi Kepulauan Riau menjadi faktor penyebab ketiga belum optimalnya penegakan Perda di daerah ini. Wilayah Provinsi



Kepulauan Riau yang hampir 90% daerah perairan membutuhkan sarana dan prasarana tidak hanya kendaraan darat namun juga speedboat.

Tabel 2.76
Kebutuhan Ideal Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis	Jumlah Kendaraan			Keterangan
		Ideal	Real	Kurang	
1	Mobil Dinas Kepala Pol PP	2	2	2	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun
2	Mobil Dinas Sekretaris dan Kabid	5	-	5	
3	Mobil Patwal	2	1	1	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun
4	Mobil Patroli	4	2	2	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun
5	Mobil Dalmas	2	1	1	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun
6	Motor Patwal	6	2	4	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun
7	Minibus	2	-	2	
8	Speedboat	2	1	1	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun
9	Motor Dinas Operasional	15	15	15	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun

Sumber: Satuan Polisi pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau,2021

6. Urusan Sosial

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan lain yang ditangani dalam urusan sosial adalah penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penanganan PPKS didasarkan atas jenis-jenis PPKS yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, untuk menunjang kinerja penanganan PMKS, pemerintah provinsi juga melibatkan lembaga-lembaga penyelenggara pemberdayaan sosial, dan juga tenaga-tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Lembaga/organisasi sosial yang bergerak dalam penanganan PMKS tersebut secara rutin dan berkala selalu mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Frekuensi pembinaan terhadap lembaga tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun. Demikian pula terkait dengan tenaga kesejahteraan sosial kemasayarakatan yang dibina, persentasenya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan sosial di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 13 indikator.



Tabel 2.77
Realisasi Capaian Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan Ekonomi Produktif	0,61	0,61	0,81	1,05	1,35
2	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	51,53	38,09	38,09	53,97	63,15
3	Persentase anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	0,24	0,27	0,29	0,61	0,94
4	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti jompo	4,91	6,03	7,02	8,05	9,53
5	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	23,06	23,76	25,86	27,04	80,85
6	Persentase tunasosial terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	1,3	1,42	1,57	1,69	1,79
7	Persentase WNI Migran Korban Perdagangan Orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	44,76	9,81	15,88	8,44	0,85
8	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	19,33	25,00	25,83	25,00	18,33
9	Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	30,36	39,37	37,71	38,08	42,47
10	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	20,4	28,43	42,81	46,15	53,85
11	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	8,12	32,49	49,24	79,70	100
12	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan	1	1	1	5	5
13	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Dari 13 indikator yang telah rilis pada tahun 2021, terdapat 3 indikator yang belum tercapai targetnya yakni Persentase WNI Migran Korban Perdagangan Orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti, Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi.

Secara rinci realisasi dan gap capaian indikator program pembangunan urusan sosial disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.78
Gap Expectation Indikator Urusan Sosial Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Gap Expectation
Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	1,38	1,05	0,33
		KK	893	680	213
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	0,31	0,47	-0,16
		KK	200	300	-100
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	41,19	53,97	-12,78
		KK	26.573	34.815	-8.242
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,31	0,61	-0,30
		orang	381	756	-375
	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	9,91	8,05	1,85
		orang	2009	1633	376
	Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	28,72	27,04	1,68
		orang	411	387	24
	Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	1,96	1,69	0,27
		orang	204	176	28
	Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	65,41	51,89	13,51
		lembaga	121	96	25
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	51,51	46,15	5,35
		lembaga	154	138	16
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	62,94	79,70	-16,75
		orang	124	157	-33
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan	unit	2	5	-3
	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara	unit	3	1	2



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Gap Expectation
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial	%	10,32	13,91	-3,59
		orang	2300	3101	-801
	Persentase kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendapat monitoring dan evaluasi	%	50,00	50,00	0,00
		kegiatan	7	7	0

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Beberapa indikator akan diuraikan sebagai berikut:

a. Keluarga Miskin

Jumlah rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 yaitu berjumlah 64.506 KK yang dikelompokkan kedalam 3 desil, diantaranya desil 1 yang berjumlah 30.290 KK, desil 2 berjumlah 17.400 KK dan desil 3 berjumlah 16.816 KK.

Tabel 2.79
Data Rumah Tangga Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah
1	Kota Tanjungpinang	4.624	5.163	276	10.063
2	Kabupaten Bintan	178	1.050	2.001	3.229
3	Kota Batam	22.555	6.119	5.303	33.977
4	Kabupaten Karimun	1.173	2.590	5.395	9.158
5	Kabupaten Lingga	1.608	2.171	3.013	6.792
6	Kabupaten Natuna	151	281	626	1.058
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	26	202	229
Jumlah		30.290	17.400	16.816	64.506

Sumber: Lakip Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Keterangan:

- Desil 1 (Sangat Miskin) = Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia
- Desil 2 (Miskin) = Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia
- Desil 3 (Hampir Miskin) = Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia

b. PMKS Lainnya

Upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial menurun yang ditunjukkan dengan jumlah PMKS di dalam panti Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 yang menurun dari jumlah PMKS. PMKS menjadi



sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan yang mengancam tatanan hidup masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu melakukan pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Meskipun peningkatan jumlah PMKS yang dijamin sebagai bentuk pelayanan sosial merupakan capaian yang baik bagi pemerintah, namun di sisi lain, peningkatan jumlah PMKS dapat menjadi indikator kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

Tabel 2.80
Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Dalam Panti Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Jenis PMKS	2017	2018	2019	2020	2021
1	Anak terlantar	1.699	1.707	1.734	1.761	59.740
2	Lanjut usia terlantar	544	528	555	512	20.276
3	Penyandang disabilitas	46	38	65	65	1.431
4	Tunasosial terlantar	45	29	56	50	10.412
5	WNI Migran KPO	25.878	4.324	4.700	2.369	239

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel 2.81
Jumlah PMKS Yang Direhabilitasi Di Dalam Panti Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No	Jenis PMKS	2017	2018	2019	2020
1	Anak terlantar	59	32	24	400
2	Lanjut usia terlantar	570	227	200	210
3	Penyandang disabilitas	310	10	30	17
4	Tunasosial terlantar	47	13	15	13
5	WNI Migran KPO	12.565	2.755	4.457	2.369

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Jika capaian kumulatif dikonversi menjadi capaian rata-rata tahun 2017-2020 dengan jumlah PMKS yang direhabilitasi di dalam panti-panti sosial swasta sebagai angka penyebut, maka capaian rata-rata hingga 2020 menunjukkan masih rendahnya cakupan penanganan anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, tunasosial terlantar, dan WNI Migran Korban Perdagangan Orang.



Tabel 2.82
Capaian Kumulatif yang Dikonversi Jumlah PMKS yang Direhabilitasi Di Dalam Panti Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2020

Jenis PMKS	Jumlah rata-rata PMKS per tahun yang dibantu Pemprov pada tahun 2016–2020 (orang)	Populasi PMKS di dalam panti pada 2020 (orang)	Nilai Capaian Rata-Rata s.d. 2020 (%)
Anak terlantar	127	1.761	7,27
Lanjut usia terlantar	301	512	59,19
Penyandang disabilitas	20	65	39,06
Tunasosial terlantar	16	50	37,47
WNI Migran KPO	8.829	2.369	77,09

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

c. Panti Sosial

Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki UPTD Panti Sosial. Oleh karena itu, agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap menjalankan kewenangan rehabilitasi sosial di dalam panti dan tetap memenuhi target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Pelaksanaan rehabilitasi sosial hanya dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada PMKS di dalam panti swasta, bantuan operasional bagi panti swasta, dan perujukan PMKS ke UPTD panti sosial luar daerah, sementara anggaran tersedia tidak cukup untuk membantu PMKS yang direhabilitasi di 123 panti swasta. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dari tahun 2017-2020, masing-masing untuk anak, dan penyandang disabilitas.

Tabel 2.83
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Tahun 2017–2020

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
1	Kota Tanjungpinang	19	19	17	16
2	Kabupaten Bintan	17	18	14	14
3	Kota Batam	62	64	74	74
4	Kabupaten Karimun	10	10	7	7
5	Kabupaten Lingga	1	1	2	2
6	Kabupaten Natuna	-	-	-	-
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-	-	-
	Provinsi Kepulauan Riau	109	113	114	113

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel 2.84
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tahun 2017–2020

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
1	Kota Tanjungpinang	1	1	1	1
2	Kabupaten Bintan	3	3	3	4
3	Kota Batam	3	3	3	3
4	Kabupaten Karimun	-	-	-	-
5	Kabupaten Lingga	1	1	1	1
6	Kabupaten Natuna	-	-	-	-
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-	-	-
	Provinsi Kepulauan Riau	8	8	8	9

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Tabel 2.85
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
Tahun 2017–2020

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
1	Kota Tanjungpinang	-	-	-	-
2	Kabupaten Bintan	-	-	-	-
3	Kota Batam	1	1	1	2
4	Kabupaten Karimun	-	-	-	-
5	Kabupaten Lingga	-	-	-	-
6	Kabupaten Natuna	-	-	-	-
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-	-	-
	Provinsi Kepulauan Riau	1	1	1	2

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sementara itu, Populasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berbasis Kelembagaan di setiap kabupaten memiliki jumlah yang tidak merata. Sebagai contoh, Forum CSR yang hanya terdapat di Kota Batam dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 2.86
Populasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Berbasis Kelembagaan Tahun 2021

Kabupaten/Kota	BERBASIS KELEMBAGAAN						
	LK3	FCU	LKS	KT	FORUM CSR	WKSBM	TOTAL
Kota Tanjungpinang	2	0	35	9	0	2	48
Kabupaten Bintan	1	1	38	33	0	9	82
Kota Batam	1	27	135	25	5	29	222
Kabupaten Karimun	2	0	30	10	0	6	48
Kabupaten Lingga	1	0	10	12	0	7	30
Kabupaten Natuna	1	0	5	18	0	0	24
Kabupaten Kepulauan Anambas	1	0	8	23	7	0	39
Kepulauan Riau	9	28	261	130	12	53	493
Keterangan:							
LK3	=	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga					
FCU	=	Family Care Unit					
LKS	=	Lembaga Kesejahteraan Sosial					
KT	=	Karang Taruna					
Forum CSR	=	Forum Corporate Social Responsibility					
WKSBM	=	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga					

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Keberadaan PSKS diharapkan dapat membantu menangani masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Riau lebih baik. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dimiliki masih belum cukup untuk menangani keseluruhan masalah sosial yang ada. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2019 di setiap kabupaten/kota. Penurunan jumlah keluarga miskin memang terjadi di Kota Batam dan Tanjungpinang pada tahun 2019, namun tidak terlalu signifikan. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah keluarga miskin mengalami kenaikan di semua kabupaten/kota di Provinsi



Kepulauan Riau selain Kota Batam yang mengalami penurunan. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh dampak dari Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, sinergitas semua stakeholder terkait, dan aksi kolaboratif menjadi salah satu kunci keberhasilan penanganan masalah sosial.

Tabel 2.87
Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diverifikasi Menurut Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Pada Tahun 2018-2020

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1	Kota Tanjungpinang	10.677	10.320	11.499
2	Kabupaten Bintan	-	9.724	10.382
3	Kota Batam	56.388	54.562	53.636
4	Kabupaten Karimun	-	13.929	16.532
5	Kabupaten Lingga	-	8.575	9.311
6	Kabupaten Natuna	-	4.932	6.365
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	2.531	2.551
Provinsi Kepulauan Riau		67.065	104.573	110.276

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non-Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan:

1. Urusan Tenaga Kerja

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian.

Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang memengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi output



produksi. Capaian indikator kinerja pada urusan tenaga kerja secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.88
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

Karakteristik	2017	2018	2019	2020	2021
Angka partisipasi angkatan kerja	966,091	970,132	1.005,161	1.133.776	1.207.014
Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,41	64,72	64,76	67,50	68,27
Pencari kerja yang ditempatkan	66,91%	63,80%	60,81%	64,31%	79,27%
Tingkat pengangguran terbuka	7,16	7,12	6,91	10,34	9,91
Keselamatan dan perlindungan	1,73	2,51	2,74	3,15*	n/a
Persentase Tenaga Kerja Asing yang diawasi (Jumlah Tenaga Asing yang diawasi/Jumlah Tenaga Asing)	n/a **	1,79	11,56	n/a	n/a
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	24,64 %	25,05 %	28,18 %	32,09 %*	n/a
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	3,16 %	4,12 %	2,79 %	2,30 %	n/a
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	52,30	40,53	42,86	4,66
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	0	40	n/a	
Persentase lulusan BLK yang diterima kerja	75 %	86,04 %	70 %	29,17%	29,30%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Keadaan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau secara rinci akan diuraikan sebagai berikut:

a. Angkatan Kerja

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran jika dibanding keadaan Tahun 2020. Jumlah angkatan kerja pada Tahun 2021 sebanyak 1.207.014 mengalami penambahan sebanyak 73.238 orang dibandingkan keadaan 2020. Angkatan kerja yang bekerja sebanyak 1.087.419, sedangkan yang menganggur sebanyak 119.595 orang.

Tabel 2.89
Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja		Pengangguran	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2017	966.091	896.000	92,74	69.160	7,16
2018	970.132	901.019	92,88	69.113	7,12
2019	1.005.160	935.682	93,09	69.478	6,91
2020	1.133.776	1.016.600	89,66	117.176	10,34
2021	1.207.014	1.087.419	90,09	119.595	9,91

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2021

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan



kerja. Secara garis besar jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yang beriringan dengan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang juga bertambah setiap tahunnya.

Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun. Namun, pada tahun 2021 angka tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 1,99 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan nilai ini sangat dipengaruhi oleh dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap dunia kerja. Jumlah angkatan kerja diharapkan untuk ke depannya lebih meningkat agar semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.90
Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja dan TPAK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

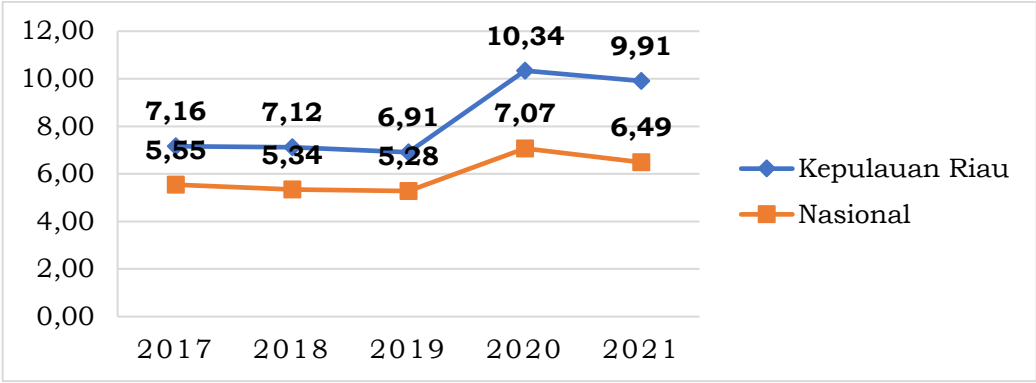
Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Persentase TPAK
2017	966.091	66,41
2018	970.132	64,72
2019	1.005.160	64,76
2020	1.133.776	66,28
2021	1.207.014	68,27

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2022

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang sedang dihadapi Indonesia yaitu peningkatan penawaran tenaga kerja yang tidak diikuti oleh kesempatan kerja. Demikian pula yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, kondisi tersebut tidak jauh berbeda. Sebagai dampak yang dihasilkannya, kelebihan penawaran tenaga kerja tersebut memunculkan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, TPT pada tahun 2017 mencapai 7,16 persen dan mengalami kenaikan serta penurunan pada tahun berikutnya hingga menjadi 9,91 persen di tahun 2021. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan TPT Nasional maka selama kurun waktu tersebut, TPT Provinsi Kepulauan Riau masih berada diatas TPT Nasional.



Gambar 2.50
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah).

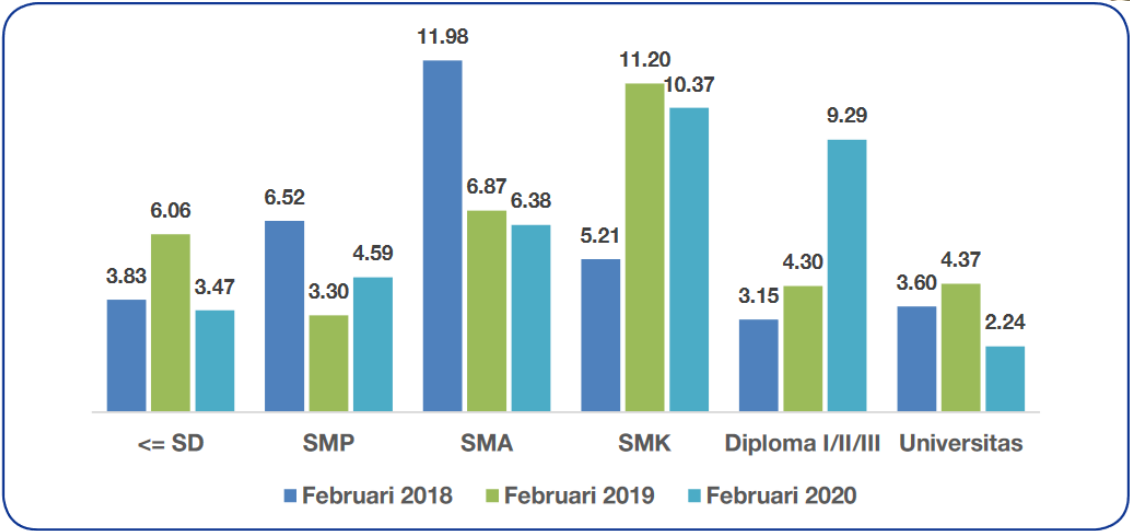
Berdasarkan kabupaten/kota, terdapat satu kota yang memiliki TPT di atas TPT Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam untuk tahun 2020, Kabupaten Bintan untuk Tahun 2019, Kota Batam untuk untuk Tahun 2018, dan Kabupaten Bintan di Tahun 2017.

Tabel 2.91
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Wilayah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kepulauan Riau	7,16	7,12	6,91	10,34	9,91
Tanjungpinang	7,11	5,49	5,64	9,30	6,31
Bintan	8,08	5,89	8,01	8,86	8,62
Batam	7,82	8,93	7,72	11,79	11,64
Karimun	5,7	2,45	5,46	8,36	7,20
Lingga	3,23	3,65	4,01	4,41	4,23
Natuna	4,07	3,52	3,33	4,10	5,15
Kepulauan Anambas	5,18	2,46	2,91	3,44	1,27

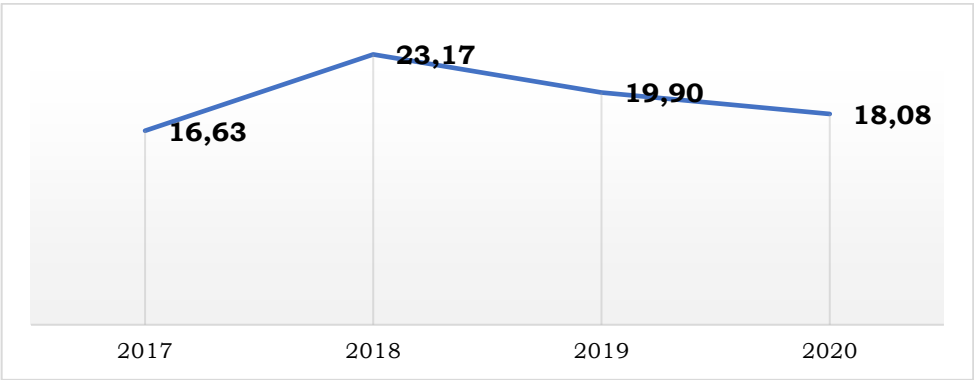
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun, 2022

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2020, TPT untuk SMK masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 10,37 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Diploma I/II/III sebesar 9,29 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan Diploma I/II/III. TPT pada tingkat Universitas, SD dan SMA menunjukkan penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Pada tingkat Universitas, TPT sebesar 2,24 persen, sedangkan pada TPT tingkat SD adalah 3,47 persen dan TPT SMA sebesar 6,38 persen.



Gambar 2.51
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau, Februari 2018 - Februari 2020 Pengangguran pada Kelompok Usia Muda
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Penduduk angkatan kerja usia muda adalah penduduk yang berusia 15-24 tahun, karena usia 25 tahun sudah dianggap sebagai penduduk dewasa. Adapun persentase tingkat pengangguran terbuka umur muda di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar berikut.



Gambar 2.52
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Umur Muda di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Pada tahun 2020, TPT penduduk usia muda sebesar 18,08 persen yang artinya dari 100 penduduk angkatan kerja usia 15-24 tahun terdapat 18 orang pengangguran. Jika dibandingkan dengan kategori sebelumnya, maka didapatkan bahwa TPT penduduk angkatan kerja usia muda lebih rendah dibanding TPT total penduduk angkatan kerja. Meskipun TPT usia muda 2020 naik dibanding tahun sebelumnya, namun secara jumlah pengangguran usia muda jauh lebih tinggi dibanding usia yang lain.



Terdapat 44.208 orang pengangguran usia muda dari 117,176 orang pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau atau sebesar 37,73 persen.

d. Pencari Kerja Yang Sudah Ditempatkan

Indikator pencari kerja yang ditempatkan menggambarkan banyaknya pencari kerja yang memperoleh pekerjaan. Kondisi perekonomian di beberapa kabupaten/kota mulai menunjukkan tren yang positif bagi terserapnya tenaga kerja. Seperti Kota Batam pada tahun 2020 yang masih merupakan pusat aktivitas perekonomian di Kepulauan Riau, menunjukkan bahwa sebanyak 2.860 para pencari kerja telah ditempatkan.

e. Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mengatur berbagai norma yang mencakup norma pelatihan, norma penempatan, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan norma hubungan kerja. Untuk menjaga pelaksanaan aturan ketenagakerjaan, perlu dilakukan pengawasan ketenagakerjaan. Dari tahun 2016 sampai dengan 2019 pengawasan terhadap perusahaan mengalami tren yang meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pengawas dan bertambahnya unit pelayanan teknis pengawasan yang berada di daerah seperti Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Pelaksanaan pengawasan bertujuan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan memberi penerangan teknis serta pembinaan kepada pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tentang hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang luas. Selain itu juga untuk mengumpulkan bahan-bahan guna pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang baru.

Pengawasan ketenagakerjaan penting dilakukan sebagai dasar untuk merancang, mendorong dan berkontribusi pada pengembangan budaya pencegahan yang mencakup semua aspek ketenagakerjaan seperti: hubungan industrial, upah, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

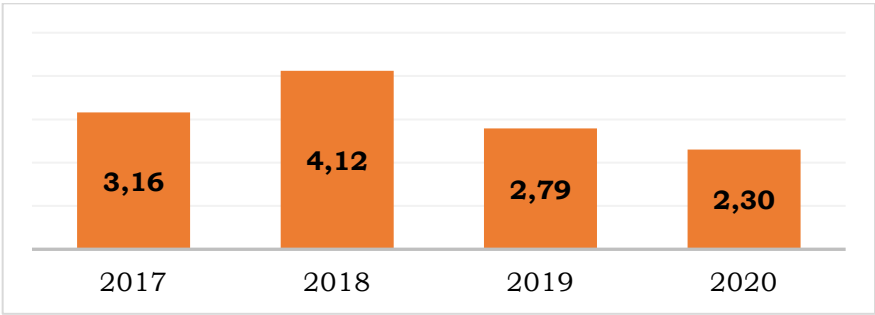
Pengawasan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja dari tahun ke tahun terus meningkat. Seperti Pengawasan SMK3 meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan



kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

f. Hubungan Industrial

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun dalam tiga tahun terakhir di Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun.



Gambar 2.53
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2017 – 2020
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sengketa antara pengusaha-pekerja tidak terlepas dari permasalahan syarat kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti: (1) Peraturan Perusahaan (PP) yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan, (2) Perjanjian Kerja Bersama, yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, (3) PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu)/Pekerja Kontrak yang didasarkan jangka waktu, atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, dan (4) PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)/Pekerja Permanen.

Tabel 2.92
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Indikator Hubungan Industrial

No	Subindikator	Nilai Aktual			
		2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Peraturan Perusahaan yang disahkan	18,41	22,59	10,32	0,37
2	Tingkat PKB yang didaftarkan	2,95	3,28	1,49	0,02
3	Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	26,61	29,38	1,47	0,03
4	Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	0,78	0,65	84,26	22,02

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kondisi hubungan industrial tahun 2017-2020 mengalami tren yang menurun. Hal ini terlihat dari nilai aktual peningkatan Perjanjian Perusahaan yang disahkan mengalami penurunan dari 22,59 pada tahun 2018 menjadi 0,37 pada tahun 2020. Demikian juga Perjanjian Kerja



Bersama yang didaftarkan dari 2.95 persen pada tahun 2017 menjadi 0,02 persen pada tahun 2020. Tingkat LKS Bipartit di perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 26,61 tahun 2017 menjadi 0,03 persen pada tahun 2020. Upaya ini secara signifikan dapat meningkatkan angka perselisihan hubungan industrial dari 0,78 menjadi 22,02 persen.

Berdasarkan data besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif. Perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama selama periode 5 tahun, cukup tinggi pada tahun 2017 dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 sebesar 35,66% dan pada Februari 2020 mengalami kenaikan perselisihan sampai pada 57.14 persen. Salah satu masalah yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan upah yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat sementara upah yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerakan protes kaum pekerja/buruh.

g. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pelatihan kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan data pemerintah, indikator yang digunakan untuk pelatihan kerja ini antara lain: Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, dan Persentase lulusan BLK yang diterima kerja.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul seharusnya memperhatikan kesetaraan gender dan anak. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 6 suburusan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.



Tabel 2.93
Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2017-2021

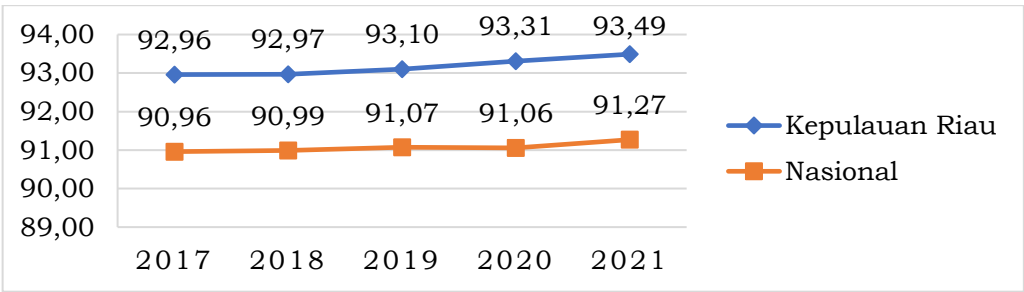
No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	27,77	28,08	30,52	33,42	21,53
2.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	3,39	3,01	3,09	2,90	3,25
3.	Anggaran Responsif Gender (ARG)	6,49	9,32	11,24	5,34	8,83
4.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,96	66,18	61,58	62,02	62,02
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,96	92,97	93,10	93,31	93,49

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Proses pembangunan harus memperhatikan keseimbangan pembangunan berbasis gender, namun kadangkala pembangunan yang dilakukan tidak membawa keberuntungan bagi kaum perempuan. Isu gender menjadi salah satu poin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan kelima SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Untuk melaksanakan SDGSs, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pendapatan. Angka IPG Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan, dari semula 92,96 pada tahun 2017 menjadi 93,49 ditahun 2021. Perkembangan IPG Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir lebih baik dibandingkan IPG Nasional.



Gambar 2.54
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2017-2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021



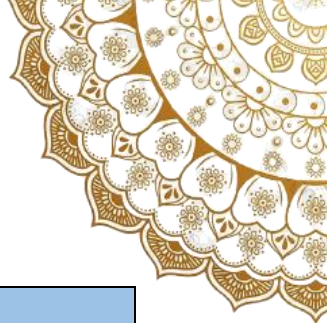
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kepulauan Riau tahun 2021 sebesar 58,97. Nilai IDG di tahun 2019 s.d. 2021 tersebut menjadi nilai IDG yang terendah yang diperoleh Provinsi Kepulauan Riau sejak 4 tahun terakhir Angka pencapaian IDG masih rendah dibanding nasional.

Tabel 2.94				
IDG dan Komposit IDG Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021				
Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
2017	17,78	41,63	28,26	66,96
2018	17,78	37,98	28,37	66,18
2019	11,11	43,16	28,61	61,58
2020	11,11	46,12	28,83	62,02
2021				58,97

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pencapaian masing-masing komposit IDG menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan sangat rendah persentasenya. Hal ini disebabkan karena rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, dari tahun 2017 sebesar 49,96 menurun 3,78 poin menjadi 46,18 pada tahun 2018 begitu juga pada tahun 2019 mengalami penurunan 1,32 poin menjadi 44,86, meskipun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 48,93.



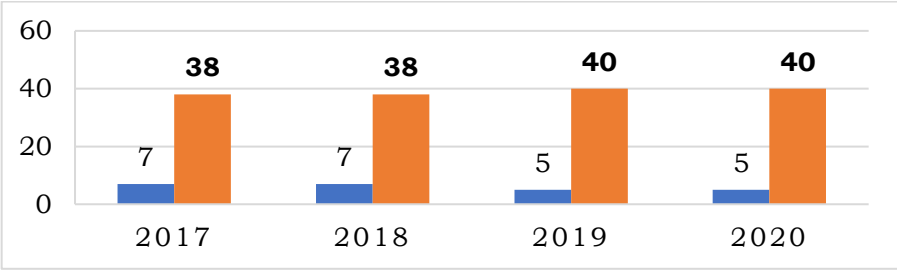
Tabel 2.95
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin Per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2017			2018			2019			2020		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L+P
Kabupaten Karimun	83,66	42,13	63,23	79,67	46,45	63,31	79,53	36,02	58,09	77,80	41,02	59,76
Kabupaten Bintan	83,22	39,83	62,19	81,32	42,16	62,34	80,11	42,69	61,98	82,39	38,36	61,28
Kabupaten Natuna	86,34	55,65	71,55	82,57	51,31	67,48	84,22	49,81	67,59	85,49	52,05	69,39
Kabupaten Lingga	81,08	46,06	63,87	83,17	48,99	66,37	84,37	45,73	65,34	84,12	44,24	64,56
Kabupaten Kepulauan Anambas	82,19	51,21	67,33	84,35	53,57	69,28	82,99	42,88	63,63	85,50	49,90	68,40
Kota Batam	82,16	52,54	67,65	84,28	45,65	65,25	85,91	46,05	66,35	84,25	51,69	68,33
Kota Tanjungpinang	79,19	49,74	64,65	76,59	47,63	62,19	78,84	46,82	62,90	77,36	47,49	62,56
Provinsi Kepulauan Riau	82,21	49,96	66,41	82,68	46,18	64,72	83,92	44,86	64,76	82,86	48,93	66,28

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021



Rendahnya indeks komposit keterlibatan perempuan di parlemen dapat terlihat dari jumlah dan persentase keterwakilan perempuan di legislatif belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Jumlah anggota legislatif perempuan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sejumlah 7 orang atau 15,56 persen, pada tahun 2019 dan 2020 menurun 4,45 persen menjadi 11,11 persen atau sebanyak 5 orang.



Gambar 2.55
Komposisi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sedangkan rendahnya persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Provinsi Kepulauan Riau yang menduduki sebagai pejabat eselon II pada tahun 2017 sebanyak 2 orang dan pada tahun 2018 menjadi 4 orang sampai tahun 2019 dan 2020 jumlahnya tetap dan tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.96
Pejabat Eselon II, III dan IV di Provinsi Kepulauan Riau

Pejabat Eselon	2017			2018			2019			2020		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
II	41	2	43	40	4	44	37	4	41	35	4	39
III	139	51	190	144	51	195	153	56	209	130	50	180
IV	338	189	527	344	204	548	370	215	585	353	211	564

Sumber: BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau, 2021

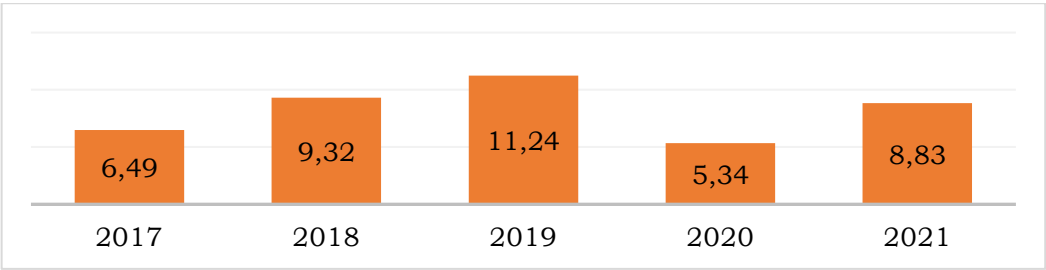
Pembangunan gender selayaknya berasosiasi dengan pemberdayaan gender di suatu wilayah. Pemetaan wilayah berdasarkan capaian IPG dan IDG diperlukan sebagai dasar kebijakan yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut. Ada empat kelompok dalam memetakan provinsi berdasarkan kondisinya. Kelompok kuadran I merupakan provinsi dengan IPG dan IDG di atas angka nasional, kuadran II merupakan provinsi dengan kondisi IPG di atas angka nasional tetapi IDG di bawah angka nasional, kuadran III adalah provinsi dengan IPG dan IDG di bawah angka nasional, sedangkan kuadran IV adalah provinsi dengan kondisi IPG di bawah angka nasional tetapi IDG di atas angka nasional. Dalam lima tahun terakhir, Provinsi Kepulauan Riau selalu berada pada kuadran II.



c. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Anggaran Responsif Gender Kepulauan Riau dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan namun di tahun 2020 ARG mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 5,34 atau turun sebesar 5,9 poin persen dibanding tahun 2019. Turunnya anggaran ini disebabkan oleh refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Namun demikian pada tahun 2021 Anggaran Responsif Gender Kepulauan Riau kembali mengalami kenaikan hingga menjadi 8,83.

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Program-program yang dilaksanakan melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).



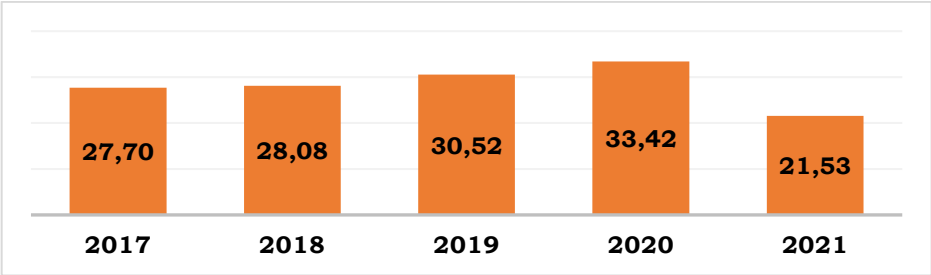
Gambar 2.56
Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

d. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO

Indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO merupakan indikator yang menggambarkan berapa jumlah perempuan yang mengalami kekerasan per 100.000 penduduk perempuan. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah border perbatasan antarnegara, sehingga Kepulauan Riau sebagai daerah transit. Untuk itu perlu memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Berdasarkan gambar dibawah, diketahui bahwa Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 sebesar 27,70 dan terus naik hingga tahun 2020 menjadi 33,42, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan hingga menjadi 21,53.



Gambar 2.57
Grafik Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO
Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

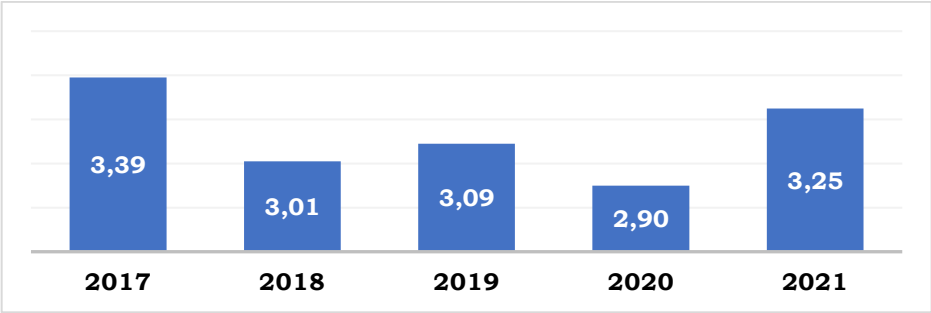
Adapun kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 sampai dengan 2020 meliputi 7 (tujuh) bentuk kekerasan yaitu fisik, psikis, seksual, eksploitasi, TPPO, penelantaran, dan lainnya. Secara umum, setiap tahun bentuk kekerasan terhadap perempuan bervariasi jumlahnya hal ini berkaitan dengan karakteristik kasus kekerasan yang dihadapi dan kompleksitas faktor penyebabnya. Jumlah kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian dapat dipilah menjadi tiga yaitu rumah tangga, tempat kerja, dan lainnya. Pada tahun 2017 sampai dengan 2020 kekerasan terhadap perempuan lebih banyak terjadi di rumah tangga, sedangkan kejadian di tempat kerja cukup sedikit.

Tabel 2.97
Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2020

No	Bentuk Kekerasan	2017	2018	2019	2020
1.	Fisik	72	62	84	78
2.	Psikis	51	49	86	88
3.	Seksual	32	48	59	92
4.	Eksplorasi	9	8	6	10
5.	TPPO	15	43	26	50
6.	Penelantaran	35	36	43	18
7.	Lainnya	54	48	8	16
Jumlah		268	294	312	352

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Untuk rasio kekerasan pada anak pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 juga mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat ditahun terakhir, dimana pada tahun 2017 angkanya sebesar 3,39 dan pada tahun 2020 turun menjadi hanya 2,90, namun pada tahun 2021 naik hingga menjadi 3,25.



Gambar 2.58
Rasio Kekerasan Pada Anak Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017 – 2021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Jenis kekerasan yang paling sering terjadi pada anak pada tahun 2017-2021 adalah kekerasan fisik, eksploitasi, TTPO seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran. Dari jenis kekerasannya, kekerasan seksual masih menjadi kasus terbesar, walau mengalami tren penurunan, diikuti oleh kekerasan fisik. Adapun kekerasan psikis justru mengalami sedikit peningkatan, seperti kasus pengancaman dan perundungan. Untuk kasus anak yang mengalami penelantaran justru meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari Data Simfoni (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian PPPA, komposisi jenis kekerasan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau ini sama dengan yang terjadi di skala nasional.

Tabel 2.98
Kekerasan yang Terjadi Pada Anak Tahun 2017-2021

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Fisik	37	40	29	75	72
2.	Psikis	14	17	57	55	89
3.	Seksual	95	50	55	115	172
4.	Eksploitasi	4	7	5	5	4
5.	TPPO	5	0	13	8	1
6.	Penelantaran	24	35	39	40	28
7.	Lainnya	69	78	42	54	23
Jumlah		248	227	240	232	213

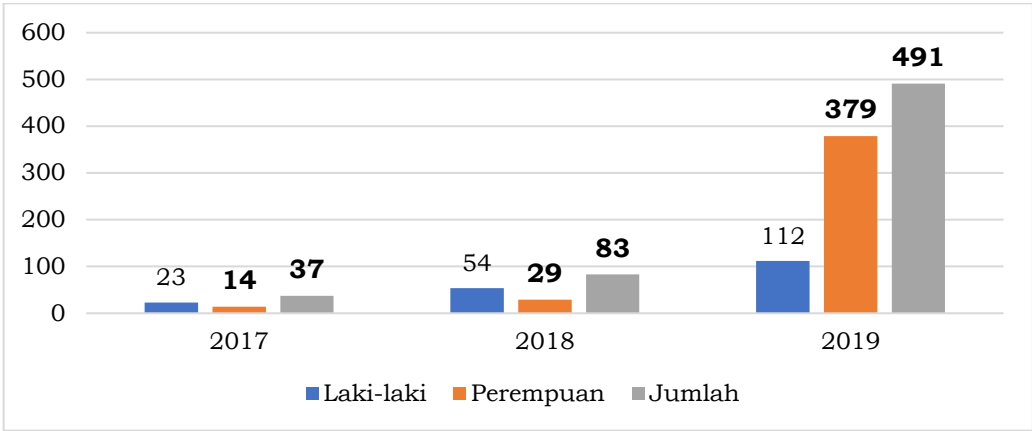
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Bila ditelusuri lebih lanjut, dapat ditemukan beberapa faktor penyebab, antara lain:

- 1) Era globalisasi menyebabkan anak-anak semakin mudah terhubung di dunia maya, hal yang tak terhindari adalah pornografi, kecanduan games, media sosial, dll. Kecanduan pornografi ini tidak saja menimpa orang dewasa tetapi juga anak-anak. Hal ini berdampak pada tingginya kasus kekerasan seksual pada anak yang pada beberapa tahun terakhir selalu menempati posisi teratas kasus kekerasan pada anak.



- 2) Kekerasan fisik dan psikis pada anak di antaranya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua dan lingkungan terhadap pengasuhan anak, serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk melindungi anak di lingkungan masing-masing.
- 3) Kasus penelantaran banyak disebabkan oleh tingginya angka perceraian dan KDRT di masyarakat, serta masalah ekonomi.



Gambar 2.59
Pernikahan Usia Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017–2019
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Program Perlindungan Anak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan. Pemenuhan Hak anak meliputi pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan, Hak Kesehatan dan Kesejahteraan, dan Hak atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, serta Hak Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang. Apabila anak terpenuhi haknya, maka akan semakin kecil anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti anak yang mendapatkan kekerasan dan anak disabilitas.

Untuk menurunkan angka kekerasan seksual pada anak, upaya yang sudah dilakukan pada program perlindungan anak berupa sosialisasi:

- 1) GN AKSA (Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual pada Anak) berupa menyebarkan video edukasi, leaflet, pamflet, spanduk, media sosial, dll.
- 2) Kegiatan pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan membentuk forum aktivis perlindungan anak di tingkat desa/ kelurahan sebagai ujung tombak mensosialisasikan perlindungan anak, mensosialisasikan bahaya gawai, pola pengasuhan yang sesuai dengan usia anak, dll serta respon masyarakat cepat terhadap kasus. Sampai dengan 2019 telah terbentuk 69 Desa/Kelurahan PATBM atau sebesar 16,59% dari



seluruh desa/ kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah aktivis sebanyak 700 orang.

- 3) PUSPAGA melakukan sosialisasi perlindungan terhadap anak berupa materi pengasuhan, perlindungan anak di keluarga, majelis taklim, di organisasi masyarakat, instansi pemerintah dan swasta.
- 4) Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) secara berkesinambungan dilakukan sebagai penguatan bagi perempuan untuk menyadari hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, sehingga muncul keberanian untuk menyampaikan pengaduan terjadinya kekerasan. Layanan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan membentuk UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selain itu, inovasi untuk mendekatkan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat tersedia Aplikasi CeK Dare Kepulauan Riau. Aplikasi ini dapat diakses melalui telepon genggam (gawai). Upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan secara berkesinambungan memberikan jaminan rasa aman bagi perempuan dan anak, dengan demikian diharapkan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau semakin baik.

Jumlah kasus yang meningkat dapat dianggap sebagai keberhasilan yang ditandai dengan keberanian dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasusnya sebagai implikasi atas upaya komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah selama ini, serta implikasi atas tersedianya lembaga layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang memadai. Meski demikian, sisi ini harus tetap disikapi dengan arif, melalui upaya edukasi dan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan, hak-hak perlindungan korban, pelembagaan perlindungan perempuan dan anak terpadu, penguatan kapasitas sumber daya petugas layanan yang terintegrasi, serta penguatan kelembagaan layanan kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah. Lokasi lembaga layanan perlindungan perempuan dapat dilihat pada tabel di bawah.



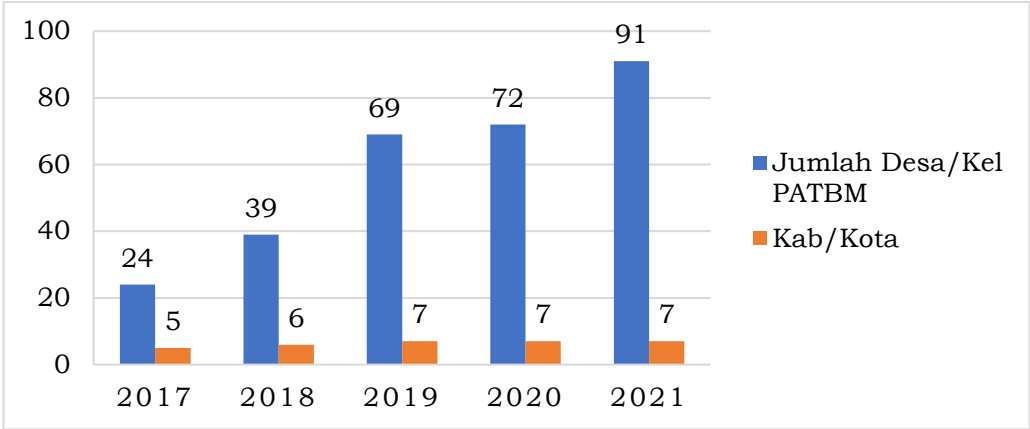
Tabel 2.99
Lokasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan						
		P2TP2A	UPPA	UPTD P2TP2A	RPTC	RPSA	BP2MI	PPT RS
1	Kota Tanjungpinang	1	1	1	1		1	1
2	Kabupaten Bintan	1	1	-	-	-	-	1
3	Kota Batam	1	2	-	-	1	1	1
4	Kabupaten Karimun	1	1	-	-	-	-	1
5	Kabupaten Lingga	1	1	-	-	-	-	1
6	Kabupaten Natuna	1	1	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	1	-	-	-	-	-
	Jumlah	7	8	1	1	1	2	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki lembaga layanan perlindungan perempuan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian. Sedangkan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau lembaga layanan perlindungan perempuan antara lain UPTD P2TP2A Provinsi Kepulauan Riau, RPTC, RPSA, BP2MI, PPT RSUD Provinsi dan UPPA Polda Kepulauan Riau.

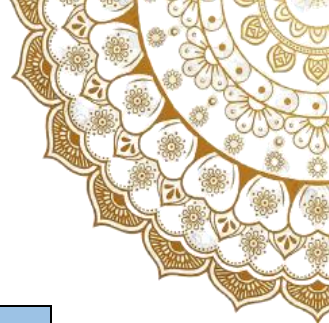
Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) baru digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2015. Kemudian baru dibuat percontohannya di 4 desa/kelurahan di 2 kabupaten/kota di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2016. Program PATBM ini merupakan suatu program terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan peran serta masyarakat untuk turut aktif melindungi anak di lingkungan masing-masing. Berbeda dengan program-program lainnya, PATBM ini melibatkan fasilitator daerah untuk terus membimbing aktivis di wilayah kerjanya, melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Karena melihat dampak yang menggembirakan dari peran serta masyarakat, program ini mendapatkan sambutan baik di berbagai daerah, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah PATBM dari tahun ke tahun. Hingga akhir 2021 sudah terbentuk 91 PATBM di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Perkembangan PATBM ini dikembangkan menggunakan dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota.



Gambar 2.60
Perkembangan PATBM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

3. Urusan Pangan

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pangan, yakni ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, dan keamanan pangan. Ketersediaan pangan mengacu pada pangan utama sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah.



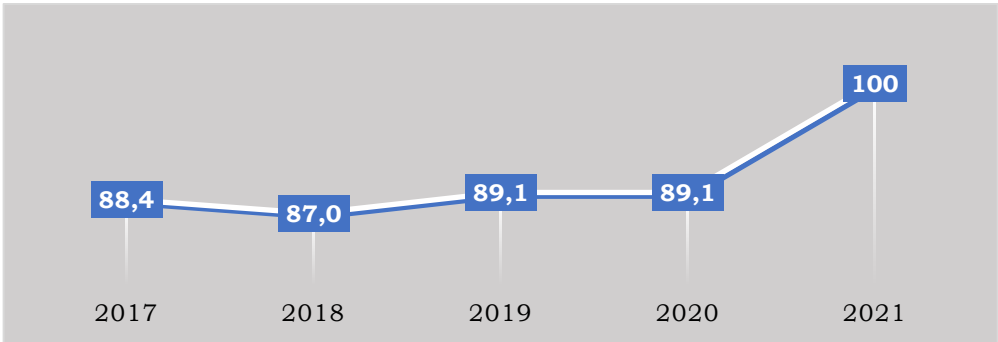
Tabel 2.100
Produksi, Kebutuhan, dan Ketersediaan Pangan Utama
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Jiwa	Kebutuhan Pangan (Ton)	Produksi (ton)	Ketersediaan Pangan Berdasarkan Produksi (ton)	Ketersediaan Pangan dari Luar Daerah (ton)	Ketersediaan Pangan (ton)
2017	2.082.694	186.903	379	-186.524	225.188	219.886
2018	2.136.521	191.732	491	-191.241	191.241	225.567
2019	2.189.653	190.404	491	-189.913	190.404	218.964
2020	2.242.198	194.973	491	-194.482	194.973	224.219

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

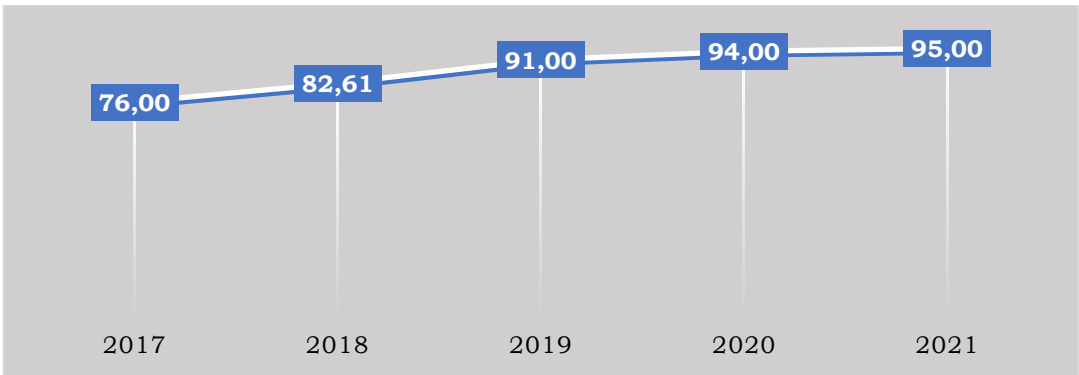


Untuk mengukur keanekaragaman pangan, maka indiaktor yang digunakan adalah skor PPH, berikut disajikan skor PPH Kepulauan Riau.



Gambar 2.61
Skor PPH Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Untuk mengukur tingkat keamanan pangan digunakan ukuran hasil pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan. Berdasarkan data empat tahun terakhir, tingkat keamanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kualitas pangan di wilayah tersebut.



Gambar 2.62
Tingkat Keamanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

4. Urusan Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan dengan tingkat capaian indikator persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kabupaten/Kota yang terfasilitasi, persentase luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan jumlah penyelesaian kasus tanah negara. Adapun capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.101
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/ Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100%	100%
2	Persentase luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	37,77 %	39,33 %	45,06 %	45,06 %	
3	Jumlah penyelesaian kasus tanah negara	1 kasus	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Selama tahun 2017-2021 hanya ada satu kasus tanah negara yaitu pada tahun 2017 terkait dengan gugatan sengketa lahan di Pasir Panjang Tanjung Siambang Desa Dompak Kecamatan Bukit Bestari. Kasus tersebut bermula dari gugatan sengketa lahan dari masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menuntut lahan dengan dasar alas hak atas nama Trimawan Jogo Prijono dengan luas lebih kurang 5 ha yang berlokasi Pasir Panjang Tanjung Siambang RT 01 RW 02 Desa Dompak (Sekarang Kelurahan Dompak) Kecamatan Tanjungpinang Timur (sekarang Kecamatan Bukit Bestari) pada tahun 2016. Kasus tanah negara ini selesai pada tahun 2017 dengan keluarnya keputusan Mahkamah Agung yang mengikuti putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 4 September 2017.

Sementara itu, masih sedikitnya luas lahan pemerintah yang bersertifikat pada tahun 2020 walaupun terdapat peningkatan antara tahun 2017-2020 dikarenakan tidak adanya bukti kepemilikan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga menyulitkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan sertifikat tanah hibah dari Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan penambahan aset lahan pemerintah baik dari Pemerintah Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kota Tanjungpinang rata-rata sudah bersertifikat sehingga mempermudah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam proses sertifikasi tanah.



Tabel 2.102
Luas Tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Bersertifikat
Tahun 2017-2020

Tahun Sertifikat	Luas Tanah Bersertifikat (m ²)	Total Luas Tanah	Persentase Penambahan Luas Tanah Bersertifikat
2017	3.431.456,00	9.732.597,64	35,26
2018	167.587,00	10.769.693,49	1,56
2019	676.234,00	11.811.512,69	5,73
2020	7.690,00	11.819.202,69	0,06
Jumlah	4.507.358,75	11.819.202,69	45,11

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Peningkatan luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan adanya penambahan aset tanah pemerintah. Tahun 2020 terdapat penambahan tanah lagi yang berasal dari rekonsiliasi aset bermasalah antara Kabupaten Bintan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 yang baru dicatat pada tahun 2020 seluas 7.690,00 m² sehingga total aset tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020 seluas 11.819.202,69 m². Jumlah Aset Tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020 yang bersertifikat seluas 4.507.358.75 m² dari jumlah keseluruhan seluas 11.819.202,69 m² sehingga prosentase tanah bersertifikat sebanyak 45,11%. Sedangkan sisanya seluas 7.319.533,94 m² masih dalam tahap pengurusan. Tahap pengurusan yang sedang dilakukan adalah pengajuan perjanjian kerjasama percepatan sertifikasi aset tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang yang nantinya akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2023 sehingga aset tanah Provinsi Kepulauan Riau seluruhnya bersertifikat.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berkaitan dengan menjaga kualitas lingkungan untuk kelestarian pembangunan. Selama 5 tahun belakangan kondisi lingkungan hidup di Kepulauan Riau mengalami fluktuasi. Ukuran kualitas lingkungan hidup menunjukkan angka yang terus menurun, salah satunya dari air serta dari tutupan lahan. Berikut disajikan kinerja urusan lingkungan hidup.



Tabel 2.103
Kinerja Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,19	70,34	67,00	70,51	73,19
2.	Indeks Kualitas Air	80,00	66,67	57,85	54,00	
3.	Indeks Kualitas Udara	78,60	95,47	90,57	90,95	
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56.53	54.24	59,06	58,24	

Sumber: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2021
2. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan mengalami fluktuasi. Meskipun pada tahun 2021 kembali menguat secara komposit hingga menjadi 73,19. Namun demikian, Indeks kualitas air secara konsisten mengalami penurunan sejak tahun 2017-2020 meskipun di saat yang bersamaan indeks kualitas udara juga ikut terus naik secara signifikan.

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Adanya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/sludge oil di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Kejadian ini terjadi pada setiap tahun memasuki musim utara, hal ini diduga disebankan oleh banyaknya kapal-kapal yang labuh jangkar dan melakukan kegiatan tank cleaning secara ilegal dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dari kegiatan tersebut dengan baik di perairan Provinsi Kepulauan Riau sehingga limbah B3 dimaksud menyebabkan kerusakan pada kawasan pesisir di Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Hal ini merupakan ancaman paling nyata atas wilayah laut dan pantai di Kepulauan Riau adalah tumpahan minyak dan bahan-bahan kimia beracun berbahaya (B3) yang sifatnya destruktif terhadap lingkungan hidup perairan. Bahwa pencemaran tumpahan minyak di perairan Kepulauan Riau sudah berlangsung lama dan selalu terjadi setiap tahun terutama pada musim utara, sampai saat ini belum ada pelaku/kapal yang membuang limbah minyak sludge oil tersebut yang ditangkap dan diproses hukum. Akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan ekosistem laut dan pesisir laut yang berada di sekitar Pulau Bintan dan Pulau Batam. Dampak tumpahan minyak juga mencemari pesisir pantai dalam bentuk minyak hitam (sludge oil). Kerugian yang ditimbulkan adalah kerusakan ekosistem pesisir dan sangat merugikan terhadap sektor pariwisata dan nelayan.



- b. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam hal pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pemahaman terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan masih maraknya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/sludge oil di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal yang labuh jangkar dan melakukan kegiatan tank cleaning secara ilegal dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang lain adalah limbah dari Fayankes, untuk itu penanganan limbah B3 perlu menjadi perhatian khusus. Selain itu, sumber kedua dari pencemaran air adalah sampah. Produksi sampah berjalan seiring dengan perekonomian yang tumbuh. Hal di atas disebabkan oleh mahalnya biaya yang akan dikeluarkan oleh Kapal-Kapal maupun Perusahaan dalam Pengelolaan Limbah B3 dan didukung data Perusahaan yang melakukan Pengumpulan, Pengangkutan Limbah B3 di Provinsi Kepulauan Riau s.d Tahun 2021 yakni Limbah Padat sebanyak 3.513.607 Kg, Sludge Oil sebanyak 1.020.867 Kg, Limbah Cair sebanyak 1.244.945 Kg.

- c. Belum optimalnya penanganan limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/ sludge oil yang mencemari di wilayah pesisir khususnya wilayah pantai Kota Batam dan Kabupaten Bintan dikarenakan keterbatasan anggaran. Limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/sludge oil yang mencemari pantai wajib dibersihkan, ditempatkan dalam kemasan drum, diletakkan pada TPS Khusus B3, kemudian diangkut dan dimusnahkan oleh pihak ketiga yang memiliki izin. Hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan amanat Permen LH Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2018 telah dilakukan pengangkutan dan pemusnahan limbah tersebut sebanyak 100 drum oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan amanat Gubernur Kepulauan Riau melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 742 Tahun 2018 Tentang Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan tidak mendapat anggaran. Tim



Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau ini dibentuk oleh Gubernur Kepulauan Riau dengan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dalam menangani tumpahan minyak di laut dan/atau pembuangan limbah minyak hitam/sludge oil ke laut. Tim ini diketuai oleh Gubernur Kepulauan Riau dan Sekretaris Daerah sebagai penerima mandat dari gubernur dan sebagai pelaksana komando di darat. Tim ini beranggotakan: Komandan Lantamal IV, Kapolda Kepulauan Riau, Guskamla, Bakamla Zona Maritim Barat, Kanwil Bea Cukai Provinsi Kepulauan Riau, Syahbandar Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Pangkalan PLP Tanjung Uban, SKK Migas, BP Batam, Universitas Maritim Raja Haji, BMKG Daerah, LAPAN, Lemigas, KTNA, Asosiasi Pengelola Pantai, Porwasmas, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

- e. Minimnya penanganan dan sarana/prasarana/fasilitas pengelolaan limbah B3 (limbah medis yang bersumber dari Fasyankes) di Provinsi Kepulauan Riau. Limbah B3 (limbah medis yang bersumber dari Fasyankes) tersebut tidak dapat dikelola oleh Fasyankes karena tidak memiliki sarana pengelolaan yang berizin, seperti incinerator yang berizin. Selama ini pihak Fasyankes bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengangkutan, pengumpulan, dan pemusnahan limbah B3 (limbah medis) yang ada di Kota Batam. Masalah yang timbul adalah sulitnya mendapat akses penyeberangan untuk mengangkut limbah B3 dari Pulau Bintan ke Pulau Batam.
- f. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga banyak sampah rumah tangga dan sejenisnya yang mencemari laut, khususnya dalam radius 0-12 mil laut yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya, dan juga banyaknya kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi kendaraan.



Tabel 2.104
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sampah yang ditangani (ton)	239.768,72	269.394,77	359.838,29	314.192,80
2.	Jumlah Volume produksi sampah (ton)	614.916,34	635.285,25	656.533,36	678.571,64
3.	Persentase tidak tertangani	46%	40%	24%	32%
4.	Persentase tertangani	54%	60%	76%	68%
5.	Jumlah limbah B3 yang terkelola (100 perusahaan sektor industri) (ton)	1.798.232	1.896.688	2.221.028	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2021

Kemampuan penanganan sampah berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020 tidak terdapat penambahan tempat pembuangan sampah. Pada sisi lain penduduk terus bertambah yang menyebabkan jumlah sampah yang diproduksi terus meningkat.

Tabel 2.105
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah TPS		1.023	1.026	1.026
2.	Daya Tampung TPS (ton)		1,7	1,7	1,7
3.	Jumlah Penduduk	1.540.936	2.203.505	2.269.562	2.337.998
4.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk		1: 845 = 0,00119	1: 868 = 0,00115	1: 893,94 = 0,00112

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2021

Tabel 2.106
Uji Pencemaran Air Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Uji pencemaran air	5	5	4	4

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2021

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat merupakan salah satu target pencapaian dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Kewenangan provinsi pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu penyusunan profil kependudukan provinsi, sehingga kinerja pelayanan pada urusan ini dapat dilihat pada pencapaian beberapa indikator antara lain rasio penduduk ber-KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan berakta



nikah, kepemilikan KTP, kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, ketersediaan database kependudukan skala provinsi, dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Tabel 2.107
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio penduduk ber-KTP	90,7	95,02	98,05	99,96	98,04
2.	Rasio bayi berakta kelahiran	83,19	86,83	88,91	96,61	92,47
3.	Rasio pasangan berakta nikah	44,32	44,51	45,27	51	
4.	Kepemilikan KTP	90,7	95,02	98,05	99,96	98,04
5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	831,9	868,3	903,4	966,1	924,7
6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100	100	100	100	
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	100	100	

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepulauan Riau Tahun 2020
Cat: ** Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II Tahun 2020

a. Rasio Penduduk Ber-KTP

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa rasio penduduk ber-KTP setiap tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya (2017-2020), namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 98,04.

Walaupun belum mencapai 100%, angka tersebut mencerminkan bahwa ada peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya terkait pelayanan administrasi kependudukan disertai dengan kesadaran masyarakat sebagai warga negara dalam mendukung pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kepemilikan KTP dapat dipastikan “masih sulit” tercapai 100% karena penduduk wajib KTP yang berusia 17 tahun terus bertambah setiap hari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kepemilikan KTP belum bisa 100% yaitu:

- 1) Status perekaman yang belum dicetak dikarenakan updating biometrik dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk status Print Ready Ready (PRR) atau status siap cetak;
- 2) Data Anomali (gangguan) yaitu data ganda yang harus diselesaikan oleh penduduk yang bersangkutan secara administrasi;
- 3) Perubahan status penduduk yang belum atau tidak melaporkan seperti status pernikahan dan pindah datang penduduk pada suatu wilayah;



- 4) Mobilitas (perpindahan) penduduk keluar dan masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak/belum melaporkan kepindahannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2017-2021 difokuskan pada pembinaan 4 LK yakni RT, RW, PKK dan Posyandu yang berada di 416 Desa/Kelurahan se-Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga ditargetkan total Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 1.248 LK. Dan pada tahun 2021 LK yang telah aktif sebanyak 682 LK. Realisasi tahun 2021 ini meningkat dibandingkan tahun 2020 dimana LK Desa/Kelurahan yang aktif sebanyak 667 LK atau sebesar 64,48%. Namun masih jauh menurun dari Tahun 2019 dimana LK Desa/Kelurahan yang aktif sebanyak 805 LK Hal ini disebabkan LK di beberapa Desa/ Kelurahan banyak yang vakum akibat pergantian pengurus dan juga faktor pandemi Covid-19, sehingga diperlukan pembinaan kembali baik oleh Kab/ Kota maupun Provinsi. Sedangkan 2 LK yang belum mendapat pembinaan secara intens yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Karang Taruna diharapkan dapat dilakukan pada periode Rencana Strategis selanjutnya dan dilakukan secara bertahap karena besarnya jumlah LK yang tersebar secara geografis maupun kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. Berikut tabel rincian Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Provinsi kepulauan Riau dari tahun 2017-2021.

Tabel 2.108
Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Telah Aktif
Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif
2017	499
2018	582
2019	805
2020	667
2021	682

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepulauan Riau Tahun 2022

Peran PKK sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Jumlah total PKK adalah sebanyak 501 yang terdiri dari 416 desa/kelurahan, 77 kecamatan, 7 kabupaten/kota dan 1 tingkat provinsi.



Tabel 2.109
Data Jumlah PKK Aktif Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah PKK Aktif
2017	495
2018	498
2019	500
2020	501

Sumber: PKK Prov. Kepulauan Riau Tahun 2022

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu ujung tombak kader kesehatan yang paling strategis di bidang kesehatan masyarakat di desa/kelurahan. Posyandu memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi bayi dan ibu hamil terutama dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta pencegahan stunting (kondisi gagal pertumbuhan pada anak). Jumlah Posyandu di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 sebanyak 1.384 dan yang aktif sebanyak 748 (54.05%), tahun 2018 sebanyak 1.407 dan yang aktif sebanyak 761 (54,09%), di tahun 2019 sebanyak 1.437 dan yang aktif sebanyak 861 (59.92%) dan di tahun 2020 sebanya 1.439 dan yang aktif 991 (68,87%). Adapun status Posyandu tersebut terdiri dari Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat mendorong peran aktif Posyandu di masyarakat sehingga akan lebih banyak status Posyandu Purnama dan Mandiri.

Tabel 2.110
Data Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif
2017	1.384	748
2018	1.407	761
2019	1.437	861
2020	1.439	991

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kepulauan Riau Tahun 2021

Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi bertujuan meningkatkan perekonomian di desa di antaranya melalui pemberdayaan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan mendorong dan menggali potensi ekonomi desa dengan inovasi-inovasi terutama memanfaatkan sumber daya alam di desa.

Tabel 2.111
Data Jumlah BUMDes dan BUMDes Aktif Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah BUMDes	BUMDes Aktif	Target BUMDES Aktif di RPJMD
2017	80	35	35
2018	176	80	40
2019	186	108	45
2020	207	154	50
2021	217	129	88

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepulauan Riau Tahun 2022



Saat ini untuk memacu pertumbuhan dan peningkatan BUM Desa maka disusun pengelompokan BUM Desa berdasarkan klasifikasi yakni yaitu BUM Desa Dasar, BUM Desa Tumbuh, BUM Desa Berkembang dan yang paling baik adalah BUM Desa Maju. Berikut tabel data klasifikasi BUM Desa Tahun 2021:

Tabel 2.112
Data BUM Desa Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2021

No	Kabupaten	Jumlah Desa	BUM Desa Yang Terbentuk	Klasifikasi		BUM Desa Yang Belum Terbentuk
				BUM Desa Yang Aktif	BUM Desa Yang Belum Aktif	
1	Bintan	36	36	32	4	0
2	Karimun	42	40	15	25	2
3	Natuna	70	47	26	21	23
4	Lingga	75	58	29	29	17
5	Kepulauan Anambas	52	36	27	9	16
Total	5 Kabupaten	275	217	129	88	58

Sumber: Data Olahan Tenaga Ahli Madya Provinsi Tahun 2022

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari jumlah Desa sebanyak 275 Desa dimana telah terbentuk BUM Desa sebanyak 217 BUM Desa, 58 Desa belum terbentuk BUM Desa. Dengan rincian berada di Kab. Bintan 36 BUM Desa , Kab. Karimun 40 BUM Desa, Kab. Natuna 47 BUM Desa, Kab. Lingga 58 BUM Desa dan terakhir Kab. Kepulauan Anambas sebanyak 36 BUM Desa.

Klasifikasi BUM Desa Yang Aktif sebanyak 129 BUM Desa dan BUM Desa Yang Belum Aktif sebanyak 88 BUM Desa dengan rincian di Kab. Bintan 32 BUM Desa Yang Aktif dan 4 BUM Desa Yang Belum Aktif, Kab. Karimun 15 BUM Desa Yang Aktif dan 25 BUM Desa Yang Belum Aktif, Kab. Natuna 26 BUM Desa Yang Aktif dan 21 BUM Desa Yang Belum Aktif, Kab. Lingga 29 BUM Desa Yang Aktif dan 29 BUM Desa Yang Belum Aktif dan terakhir Kab. Kepulauan Anambas sebanyak 27 BUM Desa Yang Aktif dan 9 BUM Desa Yang Belum Aktif.

Adapun BUM Desa yang aktif tersebut bergerak di berbagai bidang usaha seperti perdagangan dan jasa, pelayanan air bersih, pengelolaan wisata, penyewaan, simpan-pinjam, produk olahan makanan, perikanan, pertanian dan lain-lain.

Sejumlah bidang usaha yang dijalankan oleh BUM Desa secara prinsip mengacu kepada falsafah bisnis yang berorientasi kepada bisnis mencari keuntungan tanpa mengabaikan aspek pelayanan yang berorientasi sosial.

Melihat kondisi tersebut, ke depannya akan terus dilakukan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan, mendorong



masyarakat, pemerintah dan pihak swasta ikut berpartisipasi dan kerjasama baik dalam memberikan ide inovasi, penyertaan modal, bantuan keuangan dan mendorong program kemitraan/CSR, serta mendorong kerjasama BUMDes antardesa.

Pengembangan potensi desa untuk mendorong ekonomi desa salah satunya dilakukan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Inovasi TTG masyarakat sangat baik hal ini dibuktikan seiring tampilnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai juara dalam ajang Gelar TTG Nasional setiap tahunnya. Berbagai kreasi teknologi melalui Lomba Inovasi TTG tingkat provinsi dan nasional dimaksudkan sebagai sarana untuk mengenalkan TTG hasil temuan/inovasi pada masyarakat, mendorong dan mengembangkan kreatifitas masyarakat untuk menciptakan TTG dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam desa melalui TTG sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk percepatan alih teknologi kepada masyarakat, pemasyarakatan dan pemanfaatan hasil TTG.

Tabel 2.113
Data Prestasi Yang Diraih Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No	Kategori	2017	2018	2019	2020	Total
1	Kabupaten/Kota yang Mengikuti Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	7	7	7	0	28
2	Inovasi TTG Tingkat Kabupaten/Kota	87	78	98	17	397
3	Inovasi TTG Tingkat Provinsi	30	30	30	0	120
4	Inovasi TTG Tingkat Nasional	1	1	2	0	5
5	Inovasi TTG Unggulan	1	1	1	0	4

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepulauan Riau Tahun 2021

Sejak tahun 2017 alat TTG yang diikutkan dalam lomba inovasi TTG baik tingkat lokal maupun nasional mulai dimanfaatkan atau digunakan baik oleh masyarakat maupun kalangan dunia usaha. Hal ini tak terlepas dari dorongan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mulai memotivasi para inovator agar mulai mengarah pada “business oriented” dari sekadar pemakaian sendiri. Hal ini sudah mulai terlihat hasilnya dimana inovasi yang meraih juara 1 di tingkat provinsi dan juara 2 di tingkat nasional tahun 2017. Alat TTG tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebanyak 1 alat TTG, tahun 2018 tercapai 2 alat TTG yang telah dimanfaatkan sedangkan tahun 2019 sebanyak 1 alat TTG yang sudah dimanfaatkan. Bahkan Provinsi Kepulauan Riau sudah memfasilitasi pengurusan Hak Paten alat TTG ke lembaga berwenang. Meskipun prosedur pengajuan Hak Paten memakan waktu lebih dari 1 tahun, maka



pada tahun 2019 inovator dari Tanjungpinang berhasil memperoleh Hak Paten alat TTG-nya. Namun demikian, di tahun 2020 hal ini menjadi berkurang akibat dari dampak Covid-19.

Tabel 2.114
Data Persentase TTG Yang Dimanfaatkan Masyarakat
Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah TTG	Persentase
2017	1	16,67
2018	2	33,33
2019	1	16,67
2020	0	0
2021	1	33,33

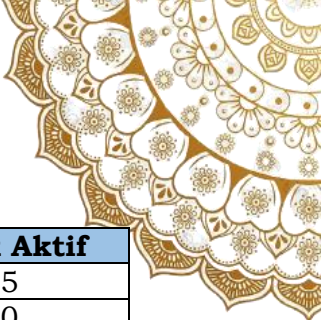
Sumber: Data Olahan Dinas PMD DukCapil Provinsi Kepri Tahun 2021

Salah satu upaya dalam rangka pengembangan TTG di desa/kelurahan maka dibentuk suatu wadah yakni Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) sebagai lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna. Peran Posyantek sangatlah dibutuhkan di dalam masyarakat karena kehadiran Posyantek diharapkan berdampak pada perkembangan inovasi TTG sehingga mampu memberikan nilai tambah suatu inovasi ataupun produk yang dihasilkan. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam rangka mengakselerasi penggunaan produk TTG untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengguna agar dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas produksi yang baik.

Posyantek di Provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk berjumlah 76 Posyantek, di antaranya terdapat 24 Posyantek yang aktif dan 52 Posyantek tidak aktif. Hal ini disebabkan masih minimnya perhatian aparatur kabupaten/kota dan desa terhadap kelembagaan Posyantek, minimnya pendanaan, sarana dan prasarana, kurang aktifnya pengurus Posyantek dalam menjalankan fungsi Posyantek sebagai wadah para inventor/ inovator dalam penyediaan TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk ke depannya akan terus dilakukan pembinaan dan dorongan kepada masyarakat dalam mengembangkan inovasi TTG serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk dapat memberikan perhatian kepada pembentukan dan pemanfaatan lembaga Posyantek.

Tabel 2.115
Perkembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1	Kota Tanjungpinang	1	1	0
2	Kabupaten Bintan	24	10	14
3	Kota Batam	9	3	6
4	Kabupaten Karimun	2	0	2
5	Kabupaten Lingga	5	0	5



No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
6	Kabupaten Natuna	25	10	15
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	10	0	10
	Total	76	24	52

Sumber: Data Olahan Dinas PMD DukCapil Provinsi Kepri Tahun 2021

Pembangunan desa menurut status desa dengan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri salah satunya yakni status Desa Cepat Berkembang. Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 Desa Cepat Berkembang sebanyak 15 desa, tahun 2018 sebanyak 28 desa, tahun 2019 sebanyak 30 desa, tahun 2020 sebanyak 57 desa dan tahun 2021 sebanyak 116 desa. Adapun total desa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 275 desa. Dilihat dari data capaian Desa Cepat Berkembang masih sangat minim setiap tahunnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor penentuan dalam klasifikasi status desa seperti sarana prasarana baik di bidang pemerintahan desa, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang lainnya.

Tabel 2.116
Data Status Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Tahun	Desa Cepat Berkembang	Desa Berkembang
2017	15	260
2018	28	247
2019	30	245
2020	57	218
2021	116	159

Sumber: Data Profil Desa/ Kelurahan Provinsi Kepri Tahun 2021

Untuk mengukur tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap lima tahun dalam klasifikasi desa dan kelurahan swasembada, swakarya, dan swadaya.

Berikut data klasifikasi Desa sesuai rincian sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 2.117
Data Klasifikasi Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Swadaya	Swakarya	Swasembada
1	Bintan	10	70	28	20	3
2	Lingga	13	36	76	1	-
3	Karimun	12	42	48	-	-
4	Natuna	15	75	58	14	3
5	Kepulauan Anambas	10	52	51	1	-
6	Tanjungpinang	4	-	18	-	-
7	Batam	12	-	62	1	-
		76	275	307	82	37

Sumber: Data Profil Desa/ Kelurahan Provinsi Kepri Tahun 2021



Tabel 2.118
Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	40	46,63	64,48	53,45	54,65
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0	0	0	0	
3	LPM Berprestasi	0	0	0	0	
4	PKK aktif	495	498	500	501	
5	Posyandu aktif	1.384	1.407	1.437	991	

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepulauan Riau Tahun 2021

Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepulauan Riau selama 3 tahun terakhir secara komposit mengalami kenaikan. Dimana untuk tahun 2020 nilai IDM Provinsi Kepulauan Riau ialah sebesar 0,6562 atau naik sebesar 0,0258 basis poin. Selain itu, jumlah desa yang mengalami kenaikan status mengalami tren yang positif. Desa yang berstatus maju sampai tahun 2020 naik lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan terdapat 1 desa yang telah masuk ke kategori desa yang mandiri.

Tabel 2.119
Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2020

Tahun	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Nilai IDM	Status
2018	0,6581	0,5062	0,6633	0,6092	Berkembang
2019	0,7261	0,5040	0,6584	0,6304	Berkembang
2020	0,7475	0,5406	0,6805	0,6562	Berkembang

Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Pada tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Riau tidak terdapat Desa yang berstatus Desa Sangat Tertinggal. Sedangkan 28 Desa masih dalam status Desa Tertinggal, sebanyak 176 Desa dengan status Desa Berkembang, 70 Desa masuk kategori Desa Maju sedangkan Desa mandiri hanya 1 Desa.

Adapun hasil perkembangan status desa tersebut dilihat 3 (tiga) indikator indeks ketahanan yakni ketahanan sosial (pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman), ketahanan ekonomi (keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, keterbukaan wilayah dan ketahanan lingkungan (ekologi/ kualitas lingkungan, bencana alam, tanggap bencana). Penyusunan indikator IDM tersebut untuk memudahkan intervensi pembangunan, mencakup aspek infrastruktur, kelembagaan, tatanan ekonomi dan sebagainya.



Dengan adanya Dana Desa memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan di Desa. Peran Tim Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa Provinsi sangat diperlukan dengan tujuan memberikan pendampingan dan pembinaan pengelolaan dana desa tersebut agar sesuai aturan yang ditetapkan. Sehingga diharapkan penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa dapat diminimalisir bahkan zero case.

Tabel 2.120
Data Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2021

Tahun	Status Desa					Total Desa
	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	
2018	6	111	145	13	0	275
2019	1	66	186	22	0	275
2020	0	34	193	47	1	275
2021	0	28	176	70	1	275

Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Untuk data jumlah RT/RW per kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.121
Data Jumlah RT/RW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Tahun	RT	RW	Jumlah RT/ RW
1	Kota Tanjungpinang	680	168	848
2	Kabupaten Bintan	605	198	803
3	Kota Batam	3.433	804	4.237
4	Kabupaten Karimun	1.090	394	1.484
5	Kabupaten Lingga	609	269	878
6	Kabupaten Natuna	761	305	1.066
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	417	177	594
TOTAL		7.595	2.315	9.910

Sumber: Data Laporan Kab/ Kota Tahun 2020

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perubahan struktur penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif serta menurunnya angka ketergantungan penduduk memberikan peluang kepada Kepulauan Riau untuk menikmati bonus demografi pada tahun 2020-2035. Melimpahnya SDM produktif berpotensi menjadi driving force dalam akselerasi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari



peningkatan suplai angkatan kerja (labour supply), peningkatan tabungan (saving) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (human capital).

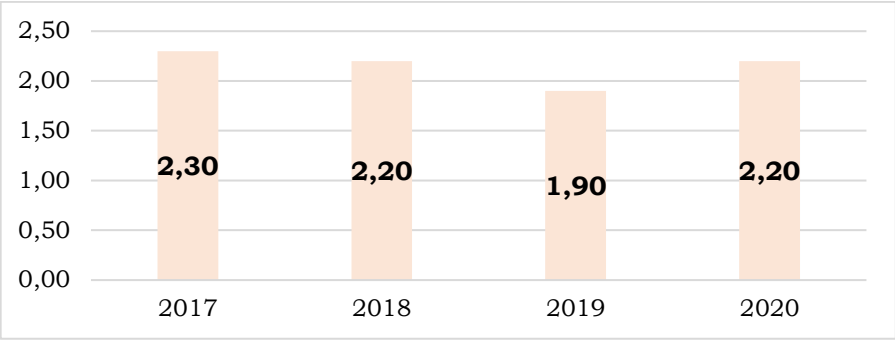
Program Pengendalian penduduk dan KB dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk seimbang, berkualitas, dan berdaya saing untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya program ini tidak dapat berdiri sendiri, namun memerlukan sinergi dengan berbagai program pembangunan pada berbagai sektor lainnya. Program yang diselenggarakan meliputi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera.

Tabel 2.122
Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,69*	2,58*	2,49*	2,85 ****	
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,3*	2,2*	1,9**	2,02 ****	
3.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	81,90	82,37	78,60	83,10	42,26
4.	Unmet need rate	10,06***	9,50***	12,04***	10,14 ****	

Sumber: * BPS Provinsi Kepulauan Riau ** SKAP BKKBN *** Statistik Rutin BKKBN
**** Radalgram Desember Tahun 2020

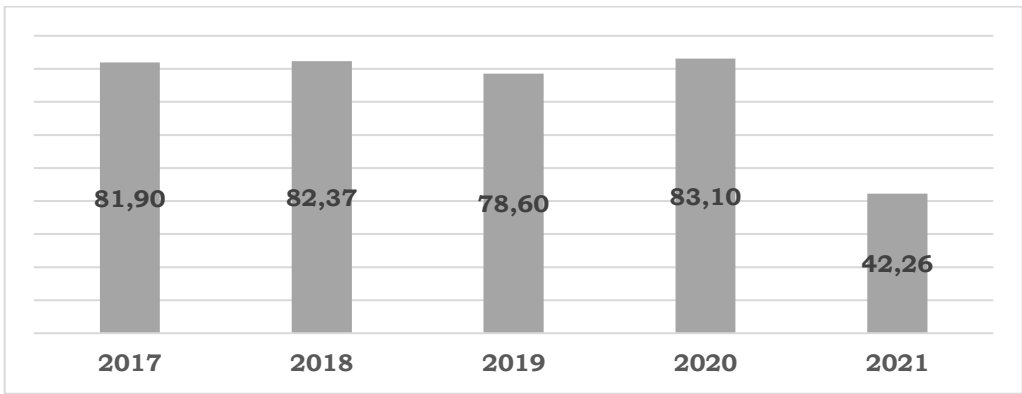
Laju pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur penduduk merupakan variabel yang tdk dapat diabaikan dalam tahapan perencanaan pembangunan. Terdapat 3 (tiga) faktor yang berpengaruh dalam perubahan struktur penduduk suatu wilayah, yaitu: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) serta migrasi (pesebaran) penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Dua faktor dominan yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kepulauan Riau adalah faktor migrasi penduduk serta faktor kelahiran. Keberhasilan Program KB dalam 4 (empat) dekade terakhir berhasil menurunkan Total Fertility Rate/TFR (rata rata perempuan melahirkan di dalam hidupnya) di Provinsi Kepulauan Riau dari 4,68 jiwa pada tahun 1970-an menjadi 2,2 jiwa pada tahun 2020.



Gambar 2.63
Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, maka fertilitas perlu dijaga stabil pada angka 2,1. Tingkat fertilitas 2,1 menjadi syarat penduduk tumbuh seimbang agar besarnya jumlah penduduk usia produktif dapat dipertahankan lebih lama. Rendahnya tingkat fertilitas akan berisiko meningkatkan laju pertumbuhan penduduk lansia serta penambahan penduduk usia produktif (15-64 tahun) melambat. Kekurangan penduduk usia produktif menyebabkan beban penduduk nonproduktif melonjak seperti yang dialami negara maju saat ini.

Contraceptive Prevalence Rate (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) merupakan salah satu indikator kependudukan, yang mencerminkan cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar 83,10% pertahun dan mengalami penurunan menjadi 42,26% pertahun pada tahun 2021.



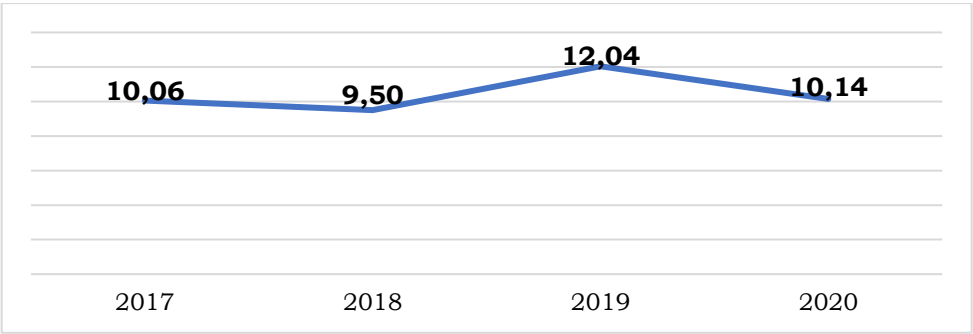
Gambar 2.64
Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Pada tahun 2020 telah terjadi kenaikan di *Contraceptive Prevalence Rate* (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi). Faktor yang memengaruhi naiknya CPR di Provinsi Kepulauan Riau adalah meningkatnya kesadaran



Pasangan Usia Subur (PUS) dalam pemakaian alat kontrasepsi, masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menurun.

Unmet need bermakna kebutuhan yang tidak terpenuhi, kondisi ini mengisyaratkan keinginan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia, sehingga mereka mengambil keputusan untuk tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Unmet need Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2020. Kondisi ini dapat terjadi karena faktor layanan KB atau ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.



Gambar 2.65
Unmet Need Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

9. Urusan Perhubungan

a. Pelabuhan

1) Ketersediaan Pelabuhan

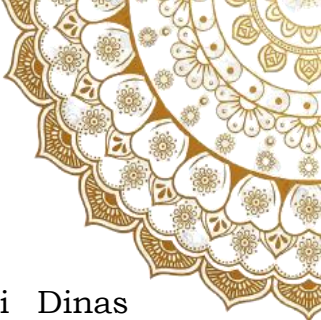
Sebagai provinsi kepulauan yang sebagian wilayahnya adalah perairan, ketersediaan pelabuhan sebagai sarana transportasi utama sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran konektivitas transportasi antarsatu daerah ke daerah lainnya. Saat ini jumlah ketersediaan pelabuhan laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dalam rentang waktu 2017 – 2021 adalah sebanyak 34 pelabuhan.

Tabel 2.123
Jumlah Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pelabuhan Laut	22	25	28	33	34

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Pelaksanaan pembangunan pelabuhan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan mengusulkan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) (untuk pembangunan baru) apabila sudah ada kemudian ada penetapan lokasi kemudian dilakukan pra-feasibility study (FS) dan studi Amdal hingga ke tahap desain dan konstruksi.



2) Rencana Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional

Saat ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan telah mengirimkan usulan kepada Menteri Perhubungan RI Berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 120/834.I/DISHUB-SET/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Perihal Usulan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Review Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dalam usulan tersebut terdapat 6 (enam) pelabuhan yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Tabel 2.124
Data Lokasi dan Rencana Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan
1	Kota Batam	Bengkong
2	Kota Batam	Tanjung Sauh
3	Kabupaten Karimun	Kundur
4	Kabupaten Natuna	Teluk Buton
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	Air Bini (Siantan Selatan)
6	Kabupaten Kepulauan Anambas	Teluk Durian

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

b. Angkutan Pelayaran dan Penerbangan

1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah arus penumpang angkutan umum adalah jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/ keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah. Tren untuk jumlah arus penumpang angkutan umum ditampilkan pada tabel berikut.

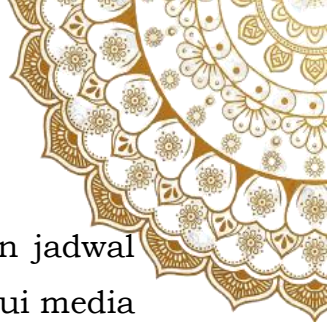
Tabel 2.125
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penumpang Bis	2.028.963	2.398.798	2.650.580	729.551
2	Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan (Roro)	651.735	475.012	590.992	342.863
3	Jumlah Penumpang Angkutan Laut	15.980.784	16.986.652	17.860.415	6.427.808
4	Jumlah Penumpang Angkutan Udara	6.160.343	5.697.422	4.636.867	2.737.851
	Total Jumlah Penumpang	24.821.825	25.557.884	25.738.854	10.238.073

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kenaikan arus penumpang angkutan laut dikarenakan:

- a) Peningkatan sarana dan prasarana angkutan laut yang selalu menjadi perhatian dari segi kualitas dan kuantitas pada transportasi angkutan laut.



- b) Perkembangan dan peningkatan informasi tentang kepastian jadwal kapal yang sudah semakin terbuka dan informatif baik melalui media cetak dan elektronik.
- c) Jumlah lintasan pelayaran yang sudah dapat dijangkau pada wilayah kepulauan yang sejalan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang terus ditingkatkan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- d) Harga tiket kapal yang cenderung relatif stabil dan alternatif angkutan dengan biaya menengah yang menjadi pilihan masyarakat pada umumnya.
- e) Saat ini Kepulauan Riau khususnya angkutan laut menjadi sarana transportasi yang merupakan kebutuhan utama dalam menyatukan wilayah-wilayah kepulauan.
- f) Terbentuknya kawasan-kawasan wisata bahari yang menjadi daya tarik wisatawan domestik, nasional, dan internasional.
- g) Peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Riau baik dari sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam menunjang industri maritim dan non-maritim yang menarik jumlah kebutuhan tenaga kerja selain tenaga kerja lokal.

Penurunan penumpang angkutan udara dikarenakan:

- a) Lokasi Kepulauan Riau yang berada di perbatasan Singapura yang menawarkan harga tiket lebih murah dengan tujuan domestik.
- b) Rute penerbangan yang kurang karena tidak adanya potensi demand ekonomi mengalami penurunan.

2) Ijin Trayek

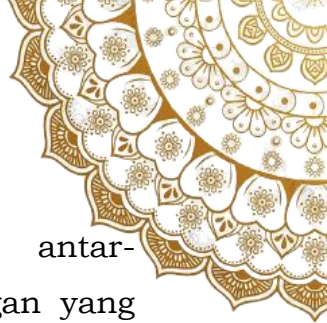
Dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan transportasi, setiap kendaraan yang menyelenggarakan transportasi harus memiliki ijin. Berikut disajikan capaian jumlah ijin trayek yang dikeluarkan.

Tabel 2.126
Jumlah Ijin Trayek dikeluarkan di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin Penyeberangan	1	6	1	3
2	Jumlah Izin Pelayaran Rakyat	350	372	487	342
3	Jumlah Izin Pelayaran Nasional	10	23	15	13

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Ijin trayek yang dikeluarkan terlihat fluktuatif. Ijin trayek yang turun berkaitan dengan adanya perbaikan/docking pada kapal yang melayani trayek yang sudah dikeluarkan izinnya. Sementara naiknya ijin



trayek berkaitan dengan izin lintasan penyeberangan antar-kabupaten/kota dalam provinsi. Berbagai fasilitas penyeberangan yang telah tersedia mampu meningkatkan arus penyeberangan baik barang maupun orang.

Tabel 2.127
Jumlah Barang Terangkut oleh Angkutan Umum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Barang Penyeberangan	12.208	198.521	276.935	117.939
2	Barang Angkutan Laut	31.135.600	15.462.988	30.255.306	10.910.520

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Peningkatan arus penyeberangan berkaitan dengan:

- a) Perkembangan dan peningkatan informasi tentang kepastian jadwal kapal yang sudah semakin terbuka dan informatif baik melalui media cetak dan elektronik.
- b) Jumlah lintasan pelayaran yang sudah dapat dijangkau pada wilayah kepulauan yang sejalan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang terus ditingkatkan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- c) Saat ini Kepulauan Riau khususnya angkutan laut menjadi sarana transportasi yang merupakan kebutuhan utama dalam menyatukan wilayah-wilayah kepulauan
- d) Terbentuknya kawasan-kawasan wisata bahari yang menjadi daya tarik wisatawan domestik, nasional, dan internasional
- e) Peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Riau baik dari sektor pemerintah dan nonpemerintah dalam menunjang industri maritim dan nonmaritim yang menarik jumlah tenaga kerja selain tenaga kerja lokal.

c. Penerbangan

Untuk melayani transportasi udara, Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020 memiliki 8 (delapan) bandar udara. Ada penambahan 2 (dua) bandar udara yaitu: Bandar Udara Letung di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Bandar Udara Tambelan di Kabupaten Bintan. Sementara itu, ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan baru tersedia di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam atau sebanyak 2 dari 8 bandara.



Tabel 2.128
Jumlah Bandara dan Ketersediaan Prasarana Sisi Darat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bandar Udara	7	7	7	8
Ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

d. Lalu Lintas Angkutan Jalan

Ketersediaan fasilitas keselamatan keamanan transportasi di jalan-jalan provinsi Kepulauan Riau belum memadai jumlahnya. Hal ini dikarenakan jumlah fasilitas keselamatan keamanan transportasi yang dibutuhkan sebanyak 319.714 unit sedangkan yang tersedia sebanyak 307.448 unit atau masih terdapat kekurangan 12.266 unit. Selain itu, kondisi prasarana yang tidak dalam kondisi baik (rusak) yakni sebanyak 300.954 unit 30% diantaranya (90.000 an) dalam kondisi perlu perbaikan/penggantian dan perawatan. Jumlah ketersediaan alat perlengkapan jalan yang ada di jalan milik Provinsi Kepulauan Riau yang berada di kabupaten/kota masih terbilang minim. Kondisi ini dapat dijadikan salah satu alasan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tabel 2.129
Ketersediaan Alat Perlengkapan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Alat Perlengkapan Jalan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rambu	buah	2.812	3.211	3.224	3.335	3.335
2	Rambu RPPJ F	buah	90	90	90	90	90
3	Rambu Peringatan	buah	106	106	106	106	106
4	Rambu Ganda	buah	164	164	164	164	164
5	Deliniator	buah	4.443	4.893	4.893	5443	5443
6	Guardril	meter	5.704	5.704	5.704	5.729	5.729
7	Pita Kejut	meter	4.044	4.189	4.235	4.235	4.235
8	Paku Marka	buah	5.297	5.297	5.297	5.297	5.297
9	Zebra Cross	m ²	836	983	1.055	1.055	1.055
10	Marka Jalan	meter	271.593	274.506	275.681	281.431	281.431
11	Warning Light	titik	57	57	57	57	57
12	LPJU	buah	10	20	84	131	155
13	Zoss	titik	20	23	24	24	24
14	Traffic Light	titik	41	43	43	43	48
15	JPO	unit	4	4	4	4	4
16	Halte	unit	2	6	6	6	6

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kondisi alat perlengkapan jalan yang ada saat ini di jalan milik Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel di bawah.



Tabel 2.130
Kondisi Fasilitas Alat Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Alat Perlengkapan Jalan	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Tidak Baik	
1	Rambu	buah	113	420	553
2	Rambu RPPJ F	buah	6	2	8
3	Rambu Peringatan	buah	32	10	42
4	Rambu Ganda	buah	24	3	27
5	Deliniator	buah	2.197	503	2.700
6	Guardril	meter	682	200	882
7	Pita Kejut	meter	1.650	312	1.962
8	Paku Marka	buah	3.770	417	4.187
9	Zebra Cross	m ²	203	32	235
10	Marka Jalan	meter	3.300	1.200	4.500
11	Warning Light	buah	33	24	57
12	LPJU	buah	74	10	84
13	Zoss	titik	1	3	4
14	Traffic Light	titik	5	0	5
15	JPO	unit	1	3	4
16	Halte	unit	6	0	6

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pada tabel di bawah terlihat bahwa 420 dari 553 (75,94%) rambu jalan tidak dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 24,05% rambu lalu lintas yang dapat digunakan dengan baik.

Tabel 2.131
Jumlah Bandar Udara/Pelabuhan/Terminal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Bandar Udara	7	7	7	8
2	Pelabuhan Penyeberangan (Roro)	10	10	10	10
3	Pelabuhan Laut	22	25	28	31
4	Terminal Type B	2	2	2	2
Jumlah		41	44	47	51

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kepulauan Riau pada tahun 2017-2020 memiliki Pelabuhan penyeberangan (roro) sebanyak 10 pelabuhan. Selain itu terminal tipe B berjumlah 2 terminal. Selanjutnya angkutan umum berupa armada penyeberangan berjumlah 12 dan armada perhubungan laut berjumlah 68 pada tahun 2020.

Tabel 2.132
Jumlah Armada Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Armada Penyeberangan (Roro)	9	11	12	12
2	Armada Perhubungan Laut	46	53	60	68
Jumlah		54	64	72	90

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Tabel 2.133
Jumlah Trayek Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Trayek Angkutan Darat	6	8	10	12
2	Trayek Angkutan Penyeberangan (Roro)	10	10	10	14
3	Trayek Angkutan Laut	56	63	63	63
4	Trayek Angkutan Udara	5	7	14	18

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sebagai negara dengan jumlah laut yang dominan, Kepulauan Riau memiliki arus barang yang cukup tinggi. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang melalui angkutan penyeberangan naik menjadi 304.628 kendaraan dari sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 276.935

Tabel 2.134
Jumlah Arus Barang Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus kendaraan melalui Angkutan Penyeberangan (Roro)	12.208	198.521	276.935	304.628
2	Jumlah Barang melalui Angkutan Laut	31.135.600	15.462.988	30.255.306	25.578.647
3	Jumlah arus Barang melalui Angkutan Udara	50.541.314	60.904.841	72.086.740	32.983.840
Jumlah Arus Barang		81.689.122	76.566.350	102.618.981	58.867.115

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tingginya arus barang maupun arus orang pada mode armada angkutan umum perairan, menjadikan retribusi yang tinggi bagi jasa kepelabuhan yakni pada tahun 2020 sebesar Rp.429.718.867. Selain itu retribusi izin bidang perhubungan juga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 yakni menjadi sebesar Rp.689.760.000.

Tabel 2.135
Jumlah Pendapatan Retribusi Bidang Perhubungan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	7.058.500	303.563.680	269.962.310	429.718.867
2	Retribusi Izin Bidang Perhubungan	12.450.000	605.590.000	341.900.000	689.760.000
Jumlah		19.508.500	909.153.680	611.862.310	1.119.478.867

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika menjadi unsur yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan terlebih untuk mewujudkan smart province di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan dengan capaian kinerja indikator nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau, nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau dan nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagaimana yang tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 2.136
Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau	13,03	53,87	43,24	74,18	79,97
2	Nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau/ Nilai Indeks SPBE	2,1	2,1	2,73	2,80	1,96
3	Persentase Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yang telah dimanfaatkan	36,17	47,82	68,08	76,85	71,74

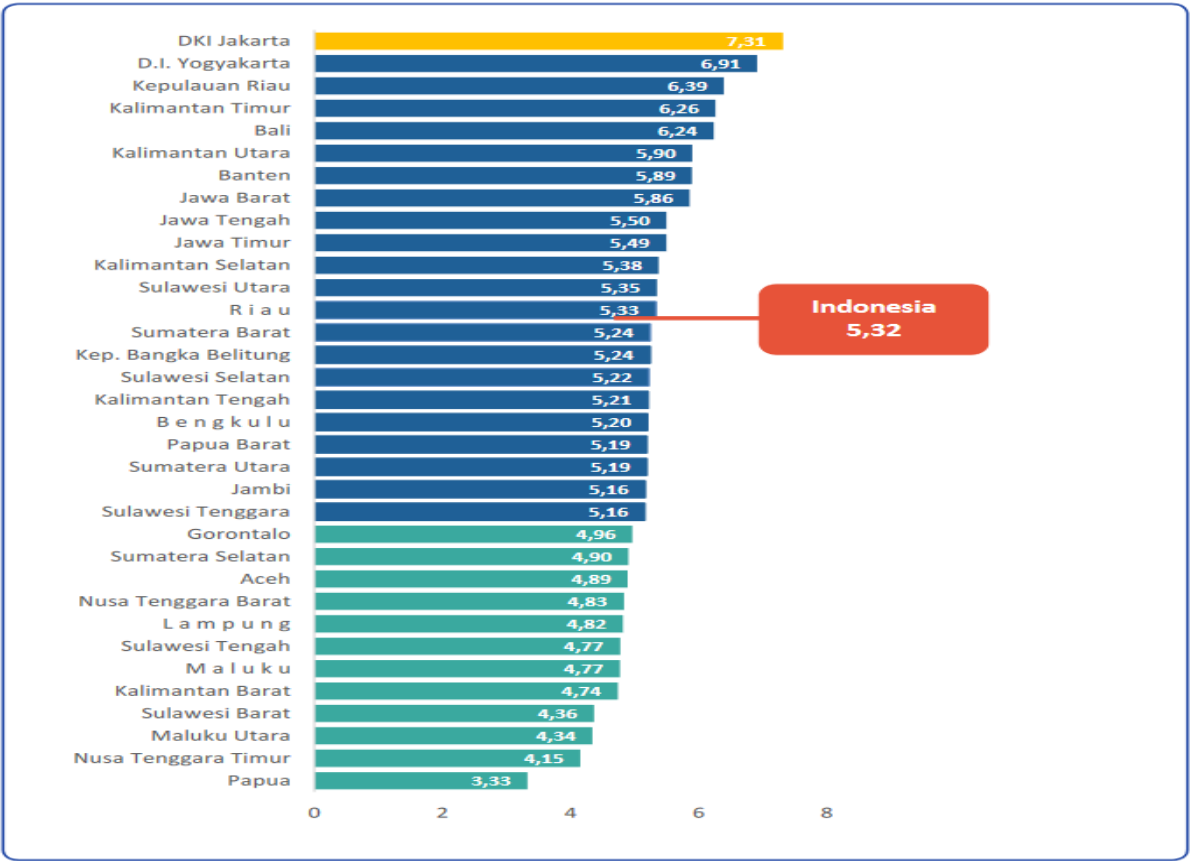
Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017-2021 sangat fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 53,87, namun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 43,24. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan hingga menjadi 74,18 dan kembali naik ditahun 2021 menjadi 79,97. Apabila dilihat capaian nilai keterbukaan informasi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan target yang ada di RPJMD, hal ini disebabkan tingginya pemanfaatan fasilitas aplikasi PPID, keamanan web yang mulai diupgrade, operator perangkat daerah yang mulai terlatih dan peduli terhadap dokumen publik serta semakin baiknya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya pelaksanaan PPID.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan membentuk PPID utama berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, membentuk komisi informasi yang berfungsi membantu menyelesaikan sengketa informasi yang terjadi antara pemohon dan termohon serta membangun sarana komunikasi melalui pemanfaatan teknologi informasi

berupa website pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (www.KepulauanRiauprov.go.id) dan website PPID (www.PPID.KepulauanRiauprov.go.id). Dua sarana komunikasi tersebut merupakan wujud peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun sayangnya dalam website tersebut belum ada domain untuk digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, masih terbatas penyediaan informasi kegiatan pemerintah daerah dan dokumen formal lainnya.

Sementara itu untuk menuju smart province, pemerintah telah mengembangkan e-government dengan membangun berbagai aplikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan walaupun nilainya masih tergolong rendah namun berada di atas target RPJMD, namun pada tahun 2021 angkanya turun hingga menjadi 1,96. Hal ini disebabkan karena masing-masing aplikasi tersebut masih parsial dan belum terintegrasi. Bahkan beberapa aplikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan yang ada. Di sisi lain aplikasi yang berkembang masih pada ranah perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Sedangkan untuk pelayanan publik masih belum banyak dan belum terintegrasi antara satu dengan lainnya.



Gambar 2.66
Nilai IP-TIK Indonesia menurut Provinsi Tahun 2019
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020



Secara keseluruhan kinerja urusan komunikasi dan informatika juga dapat dilihat dari capaian nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai indeks SPBE tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai angka 2,80 dengan predikat Baik. Walaupun mengalami peningkatan namun angka tersebut juga masih tergolong rendah. Namun demikian, secara keseluruhan pembangunan TIK di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 menempati urutan ketiga se-Indonesia setelah DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta dengan nilai 6,39.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan koperasi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau tercatat kontribusi koperasi pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,22% yang menunjukkan bahwa koperasi telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Online Data System (ODS) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau menyajikan data-data terkait jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT, jumlah koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK). Berdasarkan data ODS tersebut juga diketahui volume usaha koperasi di Kepulauan Riau pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp. 503 Milyar. Berikut disampaikan data koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.137
Koperasi Aktif di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kota Tanjungpinang	229	216	117	130	130
2	Kab. Bintan	167	242	142	148	148
3	Kota Batam	571	229	239	242	242
4	Kab. Karimun	52	331	129	143	143
5	Kab. Lingga	75	53	70	59	59
6	Kab. Natuna	45	56	66	61	61
7	Kab. Kepulauan Anambas	28	47	53	52	52
8.	Binaan Provinsi	53	30	35	47	
	Jumlah Koperasi Aktif	1.220	1.204	851	882	835

Sumber: 1. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2021
2. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

Isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau kedepan adalah bagaimana menjadikan koperasi yang maju dan moderen dengan capaian diantaranya digitalisasi koperasi & inovasi usaha koperasi, peningkatan jumlah koperasi aktif dan menyelenggarakan RAT (secara daring), peningkatan



jumlah koperasi yang bersertifikat NIK serta menumbuhkan koperasi milenial di Provinsi Kepulauan Riau.

Pengawasan dan pemeriksaan koperasi merupakan salah satu urusan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau. Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan koperasi yang sehat, kuat, mandiri, tangguh dan akuntabel. Adapun aspek pengawasan yang dilakukan meliputi: penerapan kepatuhan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan koperasi dan penerapan sanksi.

Kinerja urusan koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.138
Capaian Kinerja Urusan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	Unit	2.355	2.191	2.131	2.159	2.078
2	Persentase Koperasi Aktif	jumlah	1.220	1.204	851	882	835
		%	51,80	54,95	39,93	40,85	43,41
3	Persentase Koperasi Sehat	%	8,40	36,11	38,19	41,86	47,18
4	Jumlah koperasi yang dibina	Unit	385	260	660	316	
		%	16,35	11,87	30,97	14,64	
5	Volume usaha per koperasi	Rp juta	178,61	225,06	232,63	233,04	

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pembinaan yang dilakukan terhadap koperasi seiring dengan meningkatkan volume usaha dari koperasi. Omset koperasi yang relatif rendah itu tentu berkaitan dengan jumlah koperasi yang aktif dan yang sehat. Keaktifan dan kesehatan koperasi mestinya sejalan dengan pembinaan yang dilakukan, namun data tidak terlihat hubungan tersebut. Sebagai contoh, tahun 2019 kemampuan pembinaannya naik tapi tetapi koperasi yang sehat dan aktif justru mengalami penurunan. Data ini mengirimkan pesan bahwa terdapat permasalahan yang belum terpecahkan dalam pembinaan koperasi. Untuk meningkatkan kinerja koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dibantu tenaga penyuluh di bidang perkoperasian salah satunya adalah Petugas Penyuluh Koperasi di Lapangan (PPKL) yang selama ini di biyai dengan Dana Dekonsentrasi. Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara umum disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.139
Capaian Kinerja Urusan UKM Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	unit	107.185	107.605	108.055	146.638	146.638
2	Persentase UKM Naik Kelas	%	0,33	0,41	0,55	0,79	1,05
3	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima di pasar modern/ tersertifikasi	%	19,80	19,30	19,85	21,27	22,11
4	Jumlah Usaha kecil menengah (UKM) yang dibina	unit	295	712	530	655	
		%	0,28	0,66	0,49	0,45	
5	Volume usaha per UMKM	Rp juta	510.70	508,73	506,67	493,43	
6	Rasio kewirausahaan	%	-	-	1	1	

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sasaran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap UMKM adalah mewujudkan UMKM yang sehat, mandiri dan berdaya saing. Berbagai upaya dalam rangka mewujudkan UMKM yang sehat, mandiri dan berdaya saing terus dilakukan dengan berbagai strategi. Capain kinerja yang menunjukkan pertumbuhan UMKM, selama 4 (empat) tahun ini meningkat. Dimana ditahun 2017 berjumlah 107.185 UMKM, tahun 2018 naik 107.605 UMKM, tahun 2019 naik 108.055 UMKM dan tahun 2020 serta tahun 2021 naik kembali menjadi 146.638 UMKM. Dari jumlah UMKM naik kelas yang salah satu indiktornya adalah telah memanfaatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 bertambah 0,33%, pada tahun 2018 meningkat 0,41%, pada tahun 2019 menjadi 0,55%, dan pada tahun 2020 sejumlah 0,79% dan pada tahun 2021 kembali meningkat hingga menjadi 1,05%.

Jumlah UMKM yang memiliki karakteristik informal semakin bertambah di Kepulauan Riau, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMKM. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja UMKM adalah untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, bantuan pemasaran, mendorong transformasi Usaha mikro yang sebelumnya informal menjadi formal, dan menumbuhkembangkan start-up dan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMKM sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kinerja outcome yang dicapai UMKM secara nominal lebih tinggi dari koperasi, namun dari aspek kecenderungan, terjadi penurunan omset.



Sementara itu indikator lain dari keberhasilan UMKM dapat dilihat dari naik kelas UMKM maupun pasar yang menerima produk UMKM. Kedua indikator ini menunjukkan capaian yang terus meningkat setiap tahun, walaupun untuk peringkat naik kelas baru dialami oleh kurang dari 1% usaha. Sementara untuk pasar produk memiliki kinerja yang lebih baik. Kinerja UMKM yang masih rendah.

Hal penting lainnya yang akan menjadi fokus pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau adalah terkait kewirausahaan (enterpreneurship), menggali potensi, menumbuhkembangkan jiwa, dan menciptakan iklim dan ekosistem serta pembentukan pusat inkubasi yang baik bagi kewirausahaan di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi tantangan yang harus segera dimulai. Kewirausahaan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran sehingga beban pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan peningkata kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau dapat teratasi. Rasio kewirausahaan di suatu Negara idealnya adalah minimal 4%, data secara nasional rasio kewirausahaan Indonesia berkisar 3,7%, sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Riau masih dibawah 1%.

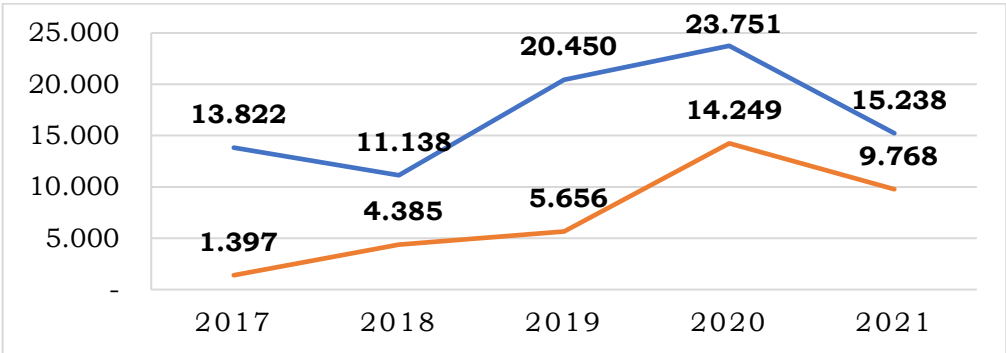
12. Urusan Penanaman Modal

Kewenangan pemerintah provinsi pada urusan penanaman modal mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kerjasama Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Sebagai aset utama untuk mengolah potensi yang ada, Kepulauan Riau memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.242.198 jiwa, Dilihat dari sebarannya, jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kota Batam memiliki jumlah sebaran penduduk yang tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Perbedaan jumlah sebaran penduduk berpotensi menimbulkan disparitas dalam percepatan pembangunan antar wilayah. Wilayah dengan jumlah sebaran tinggi didominasi oleh wilayah yang berlokasi di perkotaan, sedangkan wilayah dengan jumlah sebaran penduduk rendah berada jauh dari lokasi ibu Kota Provinsi.

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021 realisasi Investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 nilainya mencapai Rp. 13.822 (miliar) dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp. 23.751 (miliar), namun pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali hingga menjadi Rp. 15.238 (miliar). Begitu juga dengan



realisasi Investasi PMDN, dimana pada tahun 2017 nilainya hanya sebesar Rp. 1.397 (miliar) dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi Rp. 14.249 (miliar), namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 9.768 (miliar).



Gambar 2.67
Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2017-2021 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dilihat dari persebarannya realisasi investasi kinerja investasi terlihat tidak tersebar secara proporsional, baik antar wilayah maupun antar sektor. Dilihat secara kewilayahan investasi yang masuk baik investasi asing maupun domestik dari tahun ke tahun didominasi hanya oleh wilayah Batam. Sebagaimana diketahui bahwa Batam merupakan pusat industri nasional, maka sebaran investasi ini jelas menunjukkan arah investasi hanya pada setor sektor yang mendukung industri nasional. Hal ini sejalan dengan kajian Tampubolon & Ningsih (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan investasi di Kota Batam ternyata hanya memiliki manfaat pada penyerapan tenaga kerja, namun belum bisa mensejahterkan masyarakat dalam hal ini adalah pelaku UKM.

Tabel 2.140
Persebaran Investasi PMDN di Provinsi Kepri berdasarkan wilayah
Tahun 2017-2020 (%)

Kab/Kota	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Tanjungpinang	5,68	1,09	2,8	1
Bintan	3,37	23,5	4,5	1
Batam	78,07	72,5	86,29	96
Karimun	7,62	2,49	6,1	1
Lingga	0,06	0	0,02	1
Natuna	5,20	0,42	0,21	0
Kepulauan Anambas	0	0	0,08	0
Total	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepri, 2021



Tabel 2.141
Persebaran Investasi PMA di Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Tahun 2017-2020 (%)

Kab/Kota	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Tanjung Pinang	0,002	0,008	0,01	0
Bintan	34,995	28,386	43,4	54
Batam	47	68,82	55,06	39
Karimun	18	1,29	1,38	7
Lingga	0,001	0,001	0	0
Natuna	0,001	0,001	0,01	0
Kepulauan Anambas	0,001	1,494	0,14	0
Total	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Riau, 2021

Sebaran investasi antar wilayah yang berat ke arah indutri nasional didukung oleh fakta bahwa sebagian besar investasi itu terarah ke sektor industri berskala besar yang untuk kebutuhan industri nasional tanpa keterkaitan dengan sumber daya lokal. Hanya satu industri yang mungkin dekat dengan sumber daya lokal yaitu industri karet dan bahan dari karet.

Tabel 2.142
Sebaran Investasi Dalam Negeri di Provinsi Kepri Berdasarkan Sektor Tahun 2017 – 2020 (%)

Sektor Usaha	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia Dasar dan Farmasi	-	31	42	-
Hotel dan Restaurant	-	39	21	-
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	6	-	18	-
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	9	-	11	26
Industri Mesin, elektronik, instrument kedokteran, peralatan listrik, presisi, optic dan jam	-	12	8	-
Pertambangan	-	12	-	21
Tanaman Pangan dan Perkebunan	6	6	-	-
Perdagangan dan Reparasi	-	-	-	8
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	71	-	-	-
Sektor Usaha Lainnya	-	-	-	-
Sektor Jasa Lainnya	8	-	-	-
Kimia Dasar dan Farmasi	-	-	-	33
Konstruksi	-	-	-	12

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dari tabel tersebut terlihat dinamika sektor usaha yang menempati urutan teratas dari tahun 2017 hingga 2020. Dinamika ini terjadi karena adanya perubahan tren dunia usaha yang berimbas pada realisasi investasi di masing-masing sector, di saat Pandemi Covid 19 Sektor usaha Kimia Dasar dan Farmasi menjadi sector yang di memiliki persentase sector terbesar. Sebagaimana PMDN dinamika yang sama juga terjadi pada Penanaman Modal Asing, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.



Tabel 2.143
Sebaran Investasi Asing di Provinsi Kepri Berdasarkan Sektor
Tahun 2017-2020 (%)

Sektor Usaha	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Perdagangan dan Reparasi	4	3	-	
Hotel dan Restaurant	59	43	6	6
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	8	5	12	-
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	20	43	46	56
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	-	-	3	-
Industri Lainnya	-	6	-	-
Jasa Lainnya	9	-	-	-
Industri Makanan	-	-	-	12
Pertambangan	-	-	-	5
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	-	-	33	21

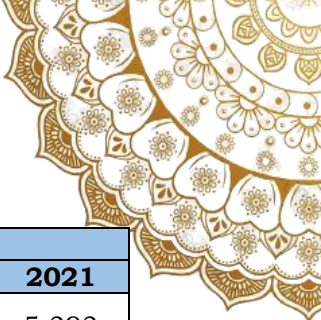
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dari tahun 2017 hingga 2020 investasi asing di Provinsi Kepulauan masih merata di berbagai sektor, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik masih menjadi sektor unggulan dalam PMA. Hal tersebut terletak di Kota Batam sebagai Kota Industri di Kepulauan Riau yang masih memegang peranan penting.

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan investasi antara lain meningkatkan penyediaan infrastruktur, pelayanan perijinan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi. Dengan strategi tersebut, ada tiga program prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepri, yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dari ketiga program tersebut, ada dua dari enam indikator program yang belum tercapai pada tahun 2017 dan 2018. Dua indikator tersebut adalah lain jumlah investasi modal asing dan Indeks Kepuasan masyarakat atas perijinan. Secara rinci kinerja urusan penanaman modal selama kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi Investasi PMA	Miliar	13.822	11.138	20.450	23,751	15.238
2	Realisasi Investasi PMDN	Miliar	1.397	4.185	5.656	14,249	9.768
3	Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	200	119	493	660	580



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
4	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	291	167	4.365	5.054	5.393
5	Pelayanan Sesuai SOP	%	100	100	92,88	95,21	94
6	Nilai IKM PTSP	Nilai	76,61	77,2	82,34	81,93	81,51

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, 2021

13. **Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi; dan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi.

Kinerja terkait dengan kepemudaan terlihat dari jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi yang diberdayakan dan dibina capaiannya sampai dengan tahun 2020 sebanyak 100%. Sementara itu, jumlah atlet berprestasi mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2020 yang pada tahun 2019 sebanyak 35 atlet berprestasi dan menurun menjadi sebanyak 13 atlet berprestasi di tahun 2020 dan pada tahun 2021 tidak terdapat jumlah atlet berprestasi. Selain itu, penurunan lainnya terlihat dari jumlah prestasi olahraga yang diperoleh di tahun 2020 dari yang sebelumnya sebanyak 17 prestasi olahraga yang diperoleh di tahun 2019 menjadi 1 prestasi yang diperoleh di tahun 2020. Minimnya prestasi pemuda di tahun 2020 sangat dipengaruhi dampak dari Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya even-even yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau diikuti.

Tabel 2.145
Organisasi Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	n.a	n.a	100	100	
2.	Persentase wirausaha Muda	48	70	60	60	40
3.	Jumlah organisasi olahraga	n.a	n.a	45	52	
4.	Jumlah prestasi olahraga	n.a	n.a	17	1	
5.	Jumlah atlit berprestasi	21	17	35	13	0

Sumber: Rekapitan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, 2021



14. Urusan Statistik

Ketersediaan data statistik merupakan aspek penting dalam proses perencanaan pembangunan di daerah terlebih untuk mendukung satu data Indonesia. Kinerja urusan statistik ditunjukkan dengan capaian kinerja persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.146
Kinerja Statistik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau	n/a	25	99,67	38,09	35

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa persentase ketersediaan data statistik sektoral di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sebesar 25% dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 99,67%, namun pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terus mengalami penurunan menjadi hanya 35% ditahun 2021.

Beberapa hal yang menjadi kendala capaian tersebut mengalami penurunan dan bahkan belum mencapai 100% yang dapat disebabkan oleh perihal berikut, yaitu:

- a. Produsen data (perangkat daerah) belum bersedia memberikan data sektoral secara terbuka untuk menuju satu data. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman produsen data (perangkat daerah) terhadap pentingnya data sektoral dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah. Data terbuka adalah data yang dapat digunakan secara bebas, dimanfaatkan dan didistribusikan kembali oleh siapapun tanpa syarat. Kriteria data terbuka sebagai berikut:
 - 1) Ketersediaan dan akses.
Data harus tersedia utuh dan bebas biaya. Data juga harus tersedia dalam bentuk yang mudah digunakan dan dapat diolah kembali. Data juga dapat diunduh melalui internet.
 - 2) Penggunaan dan pendistribusian.
Data dapat digunakan dan didistribusikan kembali dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
 - 3) Terbuka untuk umum.
Setiap orang bebas menggunakan dan mendistribusikan kembali dataset serta tidak diperkenankan adanya diskriminasi atas bidang usaha, orang, atau kelompok.



- 4) Dipublikasikan sesuai peraturan yang berlaku sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat jenis data yang dikecualikan dan tidak boleh dirilis.
- b. Keterbatasan SDM di bidang statistik dan database di Provinsi Kepulauan Riau.
- Pelaksanaan urusan statistik sesuai dengan NSPK penyelenggaraan statistik sektoral membutuhkan SDM yang kompeten di bidang statistik baik kuantitas maupun kualitas. Kondisi SDM di bidang statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat digambarkan pada tabel di bawah.

Tabel 2.147
Jumlah SDM di Bidang Statistik

No	Uraian	Tahun				Keterangan
		2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah SDM bidang statistik	2	2	2	4	Dibutuhkan 6 orang (1 orang PNS, 2 orang PNS di BKO kan dari BPS Provinsi dan 3 orang THL)

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel 2.148
Pendidikan SDM di Bidang Statistik

No	Uraian	Status	Pendidikan
1	Kasi Pengelola Data Statistik	PNS	S1/SSTP
2	Staf	THL	SMA

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021

- c. Belum terlaksananya sistim satu data. Prinsip satu data adalah mempunyai standar data, metadata baku, interoperabilitas data dan referensi data. Data masih bersifat parsial di masing-masing sektoral, sehingga menghambat proses pelayanan publik.
- d. Belum adanya regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- e. Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS).

15. Urusan Persandian

Kinerja urusan persandian di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan dengan capaian indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah.



Tabel 2.149
Kinerja Persandian Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

Indikator	Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	2.5 (1 OPD)	20 (8 OPD)	100 (41 OPD)	100 (41 OPD)	69,01

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja persandian sudah 100% ditahun 2020, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali menjadi hanya 69,01%. Oleh sebab itu, banyak hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan persandian dan keamanan informasi yaitu:

- a. Kuantitas dan kualitas SDM bidang persandian dan keamanan informasi dalam menjaga informasi masih kurang. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu:
 - 1) Keterbatasan SDM persandian yang memiliki sertifikat dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
 - 2) Pelaksanaan pelatihan terkait keamanan informasi lembaga masih terbatas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan daerah.

Tabel 2.150
Data Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis terkait Persandian dan Keamanan Informasi

No	Uraian	Jumlah kebutuhan pelaksanaan (2016-2021)	Jumlah yang sudah dilaksanakan (2016-2021)	Keterangan
1	Peningkatan kapasitas SDM untuk admin aplikasi website OPD	5 kali	3 kali	Keterbatasan anggaran
2	Bimbingan teknis penerapan sertifikat elektronik	4 kali	0	Keterbatasan anggaran
3	Bimbingan teknis ISO 27001 (ISMS)	4 kali	1	Keterbatasan anggaran
4	Pelatihan IT <i>security</i> bagi admin aplikasi website tingkat ahli	4 kali	0	Keterbatasan anggaran
5	Pelatihan sandiman	3 kali	1 kali	Mengirimkan peserta ke BSSN selama 2 bulan
6	Pelatihan <i>Computer Security Insident Response Team</i> (CSIRT) bagi tim keamanan informasi	2 kali	0	Tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19
7	Pelatihan persandian pada OPD Pemprov Kepulauan Riau dan Dinas Kominfo kab/kota	3 kali	0	Keterbatasan anggaran
8	Diklat teknis <i>security operational center</i> (SOC)	3 kali	0	Mengirimkan peserta ke BSSN
9	Diklat teknis dasar-dasar keamanan jaringan	2 kali	0	Mengirimkan peserta ke BSSN
10	Diklat teknis disain jaringan komputer	2 kali	0	Mengirimkan peserta ke BSSN

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Tabel 2.151
Jumlah SDM Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

No	Uraian	Tahun				Keterangan
		2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah SDM bidang persandian dan keamanan informasi	1	1	2	2	Dibutuhkan sebanyak 7 orang

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021

- b. Infrastruktur persandian dan keamanan informasi masih kurang karena peralatan persandian yang tersedia baru dari BSSN. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab dalam pengadaan peralatan keamanan informasi. Berikut disajikan data infrastruktur persandian dan keamanan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tabel di bawah.

Tabel 2.152
Data Infrastruktur Persandian dan Keamanan Informasi

No	Nama barang kebutuhan persandian dan keamanan informasi	Jumlah kebutuhan	Jumlah tersedia	Keterangan
1	Jammer	2 unit	1	Pinjam pakai dari BSSN
2	<i>Spectrum analyzer</i> (kontra penginderaan)	2 unit	1	Pinjam pakai dari BSSN
3	Kriptosoft	2 unit	1	Pinjam pakai dari BSSN
4	Komputer	4 unit	2	Pengadaan sendiri
5	Printer	3 unit	1	Pengadaan sendiri
6	CCTV	5 titik	0	Pengadaan sendiri
7	<i>Firewall</i>	2 unit	1	Pengadaan sendiri
8	Server antivirus (<i>software</i>)	1 unit	0	Pengadaan sendiri

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pemahaman terhadap tata kelola terkait persandian dan keamanan informasi masih kurang. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait pemahaman, kesadaran dan tata kelola persandian dan keamanan informasi. Di sisi lain peraturan tersendiri terkait tata kelola persandian dan keamanan informasi belum ada. Saat ini regulasi yang mengatur hal tersebut menjadi satu dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-government.

16. Urusan Kebudayaan

Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Di



samping itu peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan khasanah budaya baik yang bersifat tangible (aset budaya yang kasat mata) maupun intangible (aset budaya yang tidak kasat mata). Mewarisi situs-situs kerajaan, peninggalan sejarah, seperti makam-makam, dan peninggalan budaya Melayu sebagaimana terdapat di Pulau Penyengat dan daerah lainnya. Untuk memajukan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan dalam penerapan nilai-nilai budaya melayu di dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Tabel 2.153
Dimensi-Dimensi IPK Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional
Tahun 2019

Dimensi	Nilai Indeks		Ranking Provinsi Kepulauan Riau
	Indonesia	Provinsi Kepulauan Riau	
Ekonomi Budaya	33.79	27.06	6
Pendidikan	72.49	82.24	
Ketahanan Sosial Budaya	73.55	80.15	
Warisan Budaya	43.89	47.84	
Ekspresi Budaya	37.14	34.24	
Budaya Literasi	59.11	72.13	
Gender	54.57	62.40	
IPK Total	55.91	60.90	6
Peringkat se-Indonesia (34 Provinsi)			

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kewenangan provinsi pada urusan kebudayaan mencakup: kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman. Kinerja terkait kebudayaan bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti: penetapan karya budaya tak benda (intangible) yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan capaian sampai dengan tahun 2019 sebanyak 43 WBTB; jumlah SDM yang bersertifikasi bidang kebudayaan tingkat nasional dengan capaian sebanyak 5 orang; dan pemberian penghargaan bidang kebudayaan tingkat regional dan nasional dilaksanakan sebanyak 4 kali. Guna mendukung pengembangan kebudayaan diperlukan penyusunan peraturan daerah dalam bidang kebudayaan. Saat ini Perda di bidang kebudayaan yang telah disahkan yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu (LAM), Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar



Budaya Provinsi Kepulauan Riau dan Perda Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu.

Tabel 2.154
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pengembangan Nilai Budaya						
	Bangunan yang Berciri Khas Melayu	persen	6,60	13,44	14,32	26,16	28,89
	Nilai Adat dan Tradisi yang Digali, Diaktualisasi dan Direvitalisasi	persen	10,2	19,98	40,64	55,85	85,20
	Warisan Budaya <i>Tangible</i> yang Lestari	persen	19,58	19,93	22,03	22,73	26,22
	Organisasi Budaya Berkategori Maju	persen	14,49	37,68	94,2	98,55	100
	Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	persen	6,49	13,29	66,02	79,61	86,89

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Jumlah festival yang paling banyak dilaksanakan di tahun 2018 sebanyak tiga festival dan tahun 2019 sebanyak enam festival. Dari enam festival hanya satu festival yang memiliki level tingkat regional dan satu festival bertaraf internasional dan memiliki kepesertaan dan pengunjung yang banyak yaitu Parade Tari Daerah dan Nusantara dan Festival Sastra Internasional Gunung Bintan. Peserta parade tari merupakan perwakilan dari 7 kabupaten/kota untuk mewakili Provinsi Kepulauan Riau ke tingkat nasional. Peserta Festival Sastra tingkat regional dari 33 provinsi dan se-Asia Tenggara.

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Keberadaan situs sejarah dan cagar budaya di Provinsi Kepulauan Riau belum dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Jumlah total cagar budaya di 7 kabupaten/kota sebesar 286 cagar budaya, sampai dengan tahun 2020 persentase cagar budaya yang dilestarikan masih sangat rendah, yaitu sebesar 22,72% atau 65 cagar budaya.

Dari 286 keberadaan cagar budaya dan 9.998 benda cagar budaya di Provinsi Kepulauan Riau belum dilakukan pengelolaan secara terpadu. Hal tersebut disebabkan antara lain belum adanya perda pengelolaan cagar budaya, dokumen perencanaan, juklak juknis pengelolaan, belum adanya UPTD pengelola, dan zonasi cagar budaya yang akan dikelola.



Tabel 2.155
Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Warisan Tangible Dalam Kondisi Baik	Warisan Tangible	Persentase
1	Kota Tanjungpinang	4	65	6,15%
2	Kabupaten Bintan	1	45	2,22%
3	Kota Batam	3	20	15%
4	Kabupaten Karimun	3	18	16,67
5	Kabupaten Lingga	54	106	50,94
6	Kabupaten Natuna		13	0
7	Kabupaten Kepulauan Anambas		19	0
Total		65	286	22,72

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

c. Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Sampai dengan tahun 2020 jumlah karya budaya yang sudah dicatat oleh kementerian sebesar 92 karya budaya, dan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Kebudayaan sebanyak 43 karya budaya atau sebesar 40,64%, sedangkan karya budaya yang sudah direvitalisasi sebanyak 6 karya budaya antara lain Gurindam Dua Belas, Tudung Manto, Gazal, Mak Yong Pantun Melayu, Tari Inai. Kurangnya karya ilmiah dan kajian pendukung tentang karya budaya sehingga membuat karya budaya tersebut hanya sebagai pencatatan, tidak bisa diusulkan sebagai penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

d. Bangunan yang Berciri Khas Melayu

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya memperkuat identitas masyarakat Kepulauan Riau dengan menjadikan bangunan berciri khas Melayu sebagai ikon yang merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Namun, persentase bangunan berciri khas Melayu masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain belum ditetapkannya peraturan gubernur tentang bangunan berciri khas Melayu sebagai peraturan turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu. Pada tahun 2020, persentase bangunan yang berciri khas Melayu hanya sebesar 24,47% atau 465 dari total 1.900 bangunan pemerintah dan swasta yang ada di 7 kabupaten/kota.



Tabel 2.156
Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu Tahun 2017-2020

No.	Kabupaten/Kota/ Provinsi	2017		2018		2019		2020		2017-2020	
		Jumlah Bangunan	Bangunan Berciri Khas Melayu	Jumlah Bangunan	Bangunan Berciri Khas Melayu	Jumlah Bangunan	Bangunan Berciri Khas Melayu	Jumlah Bangunan	Bangunan Berciri Khas Melayu	Jumlah Bangunan	Bangunan Berciri Khas Melayu
1	Kota Tanjungpinang	965	20	965	27	965	3	965	83	965	133
2	Kabupaten Bintan	285	3	285	25	285	3	285	37	285	68
3	Kota Batam	214	7	214	8	214	8	214	31	214	54
4	Kabupaten Karimun	143	6	143	9	143	11	143	20	143	46
5	Kabupaten Lingga	148	12	148	3	148	18	148	47	148	80
6	Kabupaten Natuna	62	2	62	14	62	6	62	3	62	25
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	60	5	60	30	60	1	60	4	60	40
8	Provinsi Kepulauan Riau	23	6	23	17	23	0	23	0	23	23
Total		1900	57	1.900	133	1.900	50	1900	225	1900	465

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



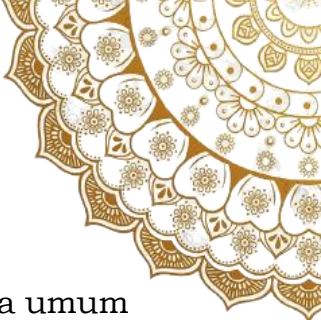
17. **Urusan Perpustakaan**

Kinerja urusan perpustakaan secara umum ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja utama urusan perpustakaan yaitu nilai budaya literasi dan indeks tingkat kepuasan pelayanan perpustakaan. Pada tahun 2019, nilai budaya literasi Provinsi Kepulauan Riau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan nilai yang mencapai 72,13. Sementara itu, indeks tingkat kepuasan pelayanan perpustakaan pada tahun 2021 mencapai angka 88,20. Capaian ini dikategorikan sudah baik, namun masih perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Tabel 2.157
Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Budaya Literasi	n/a	58,83	72,13	n/a	
2.	Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Perpustakaan	81,94	84,35	84,60	88,17	88,20
3.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	38,99	40,14	25,11	56,3	
4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	48,61	n/a	14,45	
5.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,41	0,45	0,52	13,38	
6.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	20.546	21.209	22.424	22.593	24.350
7.	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	2	2	2	
8.	Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (KCKR)	0	0	7	53	
9.	Ketercukupan koleksi perpustakaan dengan jumlah penduduk	14,33	39,55	39,43	0,09	
10.	Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk	0	0,0016	0,0025	0,000014	
11.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	80.672	81.193	81.302	28,247	35.271
12.	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	27,65%	28,00%	28,64%	-65,26%	-44,19%
13.	Rasio Perpustakaan per satuan penduduk	0,0029	0,0031	0,0031	0,0007455	
14.	Peningkatan Pelestarian Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno	n/a	Alih Media = 21 Naskah, Alih Bahasa = 3 Naskah, Perawatan = 1.473 Lembar Naskah dan 189 Buku	Alih Media = 1.027 Naskah, Alih Bahasa = 3 Naskah, Perawatan = 1.004 Lembar Naskah dan 373 Buku	Alih Media = 6 naskah, Alih bahasa = 3 naskah, Perawatan = 634 lembar dan 300 buku	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



18. Urusan Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum ditunjukkan dengan capaian indikator urusan kearsipan yaitu nilai hasil pengawasan kearsipan, persentase SDM kearsipan yang mendapat sertifikasi dan penilaian kinerja, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, indeks ketersediaan arsip, indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan serta indeks tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban sebagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Nilai hasil evaluasi pengawasan yang diukur oleh ANRI terhadap penyelenggara pengelolaan arsip di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan pada tahun 2020 adalah 55,10 atau berkategori “CC” (cukup) yang berarti masih jauh dari harapan. Sedangkan untuk indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan, sampai dengan tahun 2020 belum pernah dilakukan karena pelaksanaan pelayanan belum dapat dilaksanakan dan juga akibat situasi masih dalam kondisi pandemik Covid-19.

Tabel 2.158
Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	42	59,67	54,14	55,10	
2.	Persentase jumlah SDM Kearsipan yang mendapat sertifikasi dan penilaian kinerja	n/a	n/a	n/a	n/a	
3.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara Baku.	63,83 %	74,47 %	85,11%	63,83%	76,6%
4.	Indeks Ketersediaan Arsip	n/a	n/a	52,50	1,01	
5.	Indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan	n/a	n/a	45	18,33	
6.	Indeks Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban sebagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	n/a	n/a	71,39	61,54	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

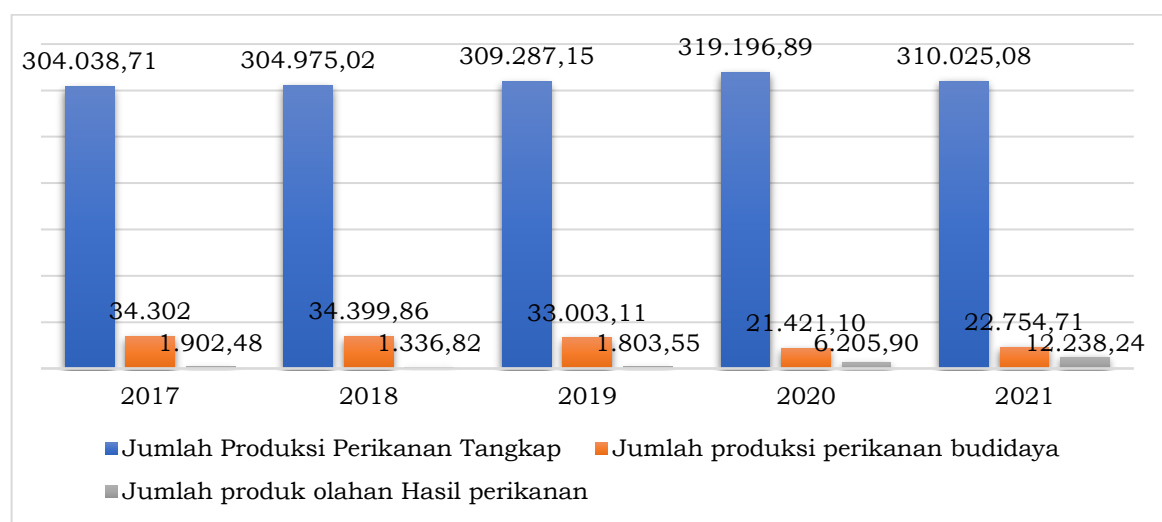
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor pertanian penting lainnya di Provinsi Kepulauan Riau adalah subsektor perikanan. Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan yang sangat besar mengingat lebih dari 96 persen wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah laut. Kawasan perikanan Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh wilayah laut dan perairan yang terdiri dari Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan Perikanan Budidaya. Dari kawasan tersebut, komoditas unggulan terdiri dari rumput laut (seaweed), ikan dan biota laut



bernilai ekonomi tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. Berlimpahnya kekayaan kelautan Provinsi Kepulauan Riau tidak lantas menjadikan sektor perikanan sebagai sektor unggulan daerah. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya. Namun, penurunan jumlah produksi perikanan budidaya justru menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2020 ke-2021 meskipun di saat yang bersamaan jumlah olahan hasil perikanan mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar berikut ini.

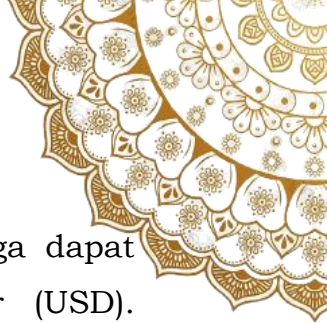


Gambar 2.68
Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton) Tahun 2017-2021

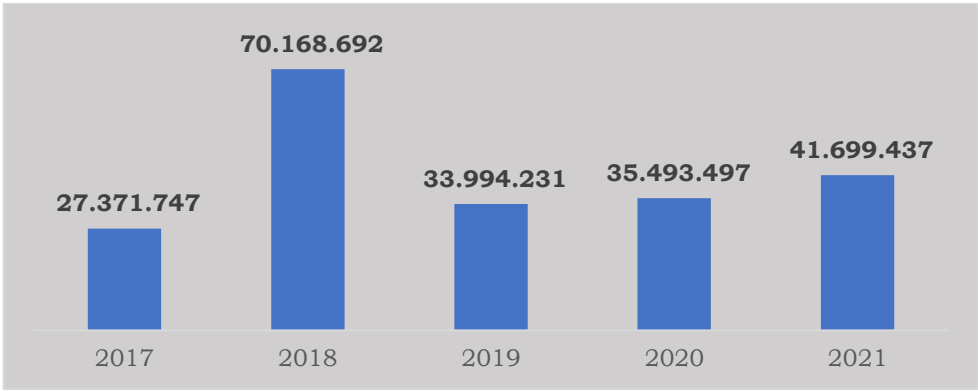
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nirlimbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan market driven atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat high quality, safe, traceable, high value content dan kompetitif.

Peningkatan volume produk olahan hasil perikanan adalah indikator kinerja utama keberhasilan program kegiatan yang dilakukan. Dari data yang disajikan produk olahan perikanan Kepulauan Riau masih belum tampak signifikan dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan. Peningkatan volume produk olahan sangat ditentukan oleh berkembangnya Unit Pengolahan Ikan (UPI), baik skala UMKM maupun skala besar.



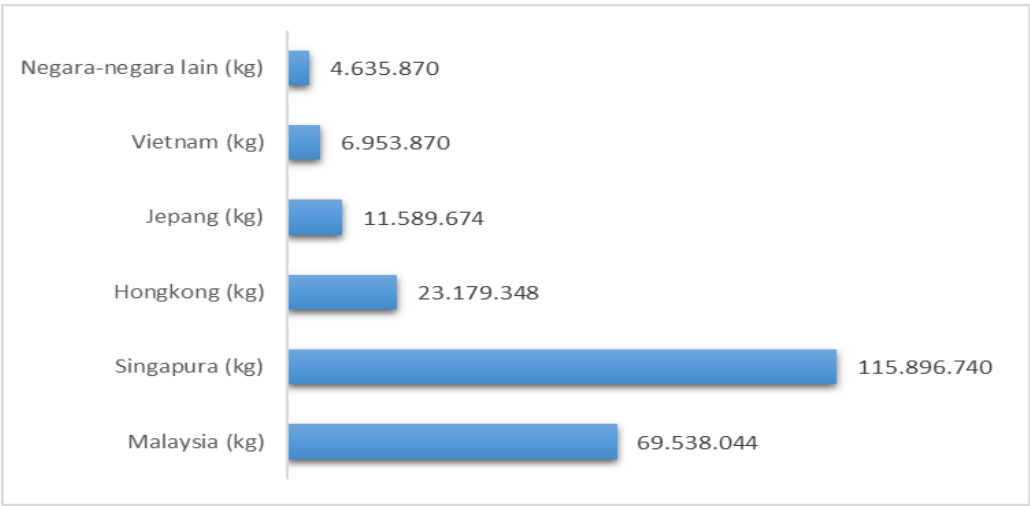
Selain jumlah produksi perikanan, kinerja perikanan juga dapat dilihat dari nilai ekspor perikanan berdasarkan US Dollar (USD). Berdasarkan laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, nilai ekspor perikanan meningkat signifikan pada tahun 2018 namun pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan dan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 kembali meningkat.



Gambar 2.69
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (dalam USD)

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

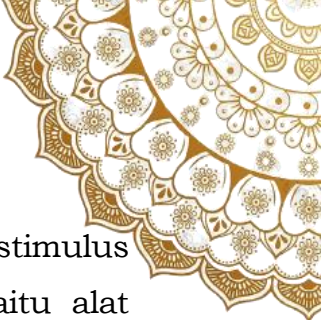
Sementara itu, negara tujuan ekspor produksi ikan terbanyak Provinsi Kepulauan Riau adalah Singapura disusul oleh Malaysia. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada gambar berikut.



Gambar 2.70
Jumlah Ekspor Ikan Segar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Sumber: Statistik Ekspor Provinsi Kepulauan Riau 2019

Menilai kinerja sektor perikanan juga dapat dilihat dari kesejahteraan nelayan, yang dapat dideteksi dari nilai tukarnya. Dibandingkan dengan angka nasional, baik nilai tukar nelayan maupun pembudidaya ikan Kepulauan Riau lebih tinggi dari angka nasional, demikian juga dengan perkembangannya yang juga lebih baik. Pada tingkat konsumsi. Membaiknya kinerja nilai tukar nelayan berkaitan dengan pelaksanaan Program



Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan adanya stimulus berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap skala kecil yaitu alat penangkap ikan dan sampan bermesin. Selain itu juga, pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan budidaya yang menyediakan stimulus terhadap perkembangan budidaya ikan khususnya budidaya ikan laut. Stimulus yang diberikan berupa pakan, benih dan sarana pendukung lainnya. Kemudian, melalui peran UPTD Balai Benih Ikan dilakukan pengujian yang memproduksi benih ikan untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya.

Tabel 2.159
Nilai Tukar Nelayan Kepulauan Riau dan Nasional
Tahun 2017-2021

No	Nilai Tukar	Capaian					Sumber
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Nelayan Kepulauan Riau	110,7	115,26	117,42	115,94	112,67	BPS
2.	Pembudidaya Ikan	107,23	108,20	126,77	101,83	97,70	BPS
3	Nelayan Nasional	102,82	104,05	105,99	107,53		BPS
4	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	56,02	58,58	62,28	65,43		Susenas KKP

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

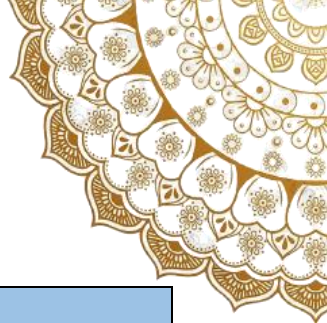
Salah satu indikator lain keberhasilan kinerja bidang perikanan adalah tingkat konsumsi ikan. Saat ini posisi konsumsi ikan Kepulauan Riau jauh lebih tinggi daripada target nasional yang berkisar pada angka 45 kg/kapita/tahun. Sebagai wilayah kepulauan maka konsumsi ikan adalah pola konsumsi yang telah berakar kuat di masyarakat, itulah sebabnya saat rata-rata konsumsi ikan Indonesia baru di angka sekitar 4 kg, Kepulauan Riau sudah mencapai lebih dari 55 kg perkapita per tahun.

Tabel 2.160
Kinerja Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

No.	Uraian	Capaian					Sumber
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Konsumsi Ikan (kg/kapapita/th)	56,02	58,58	62,28	65,43		Susenas KKP
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha	99	99	99	99		-
3	Persentase penanganan pengaduan yang tertangani	100	100	100	100		-
4	Kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola minimum (level 3)	1	1	1	n/a	1	Dinas KP Prov. Kepulauan Riau

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Capaian kinerja perikanan ini didukung oleh program-program yang telah sebagai berikut:



Tabel 2.161
Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 2019-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Pencapaian Target Kinerja Program								
		2019			2020			2021		
		T	R	% R	T	R	% R	T	R	% R
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkp										
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	305.239,05	309.287,15	101,33	305.850,75	319.196,89	104,36	306.463,67	302.108	98,58
Nilai Tukar Nelayan (NTN)		110,08	117,42	106,66	110,32	115,94	98,87	110,57	112,67	101,9
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya										
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	33.784,95	33.003,11	97,68	33.852,65	21.421,10	63,28	33.920,50	22.339	65,86
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		107,99	126,77	117,39	108,23	101,83	93,9	108,47	97,7	90,07
Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan										
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	1.326,22	1.803,55	135,99	1.328,88	6.205,90	467	1.331,54	14.914,39	1120,1
Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan										
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US Dolar	31.779.695	33.994.231	106,97	31.786.051	35.493.497	111,66	31.798.767	41.699.437,44	131,14
Peningkatan Status kawasan konservasi perairan Level III	Kawasan	4	1	0	4	n/a	0	4	1	25
Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Dokumen/Peraturan	1 (Pergub Rencana Pengelolaan WP3K)	0	0	1 (Pergub Rencana Pengelolaan WP3K)	0	0	1 (Pergub Rencana Aksi WP3K)	0	0
Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan										
%Jumlah kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	0	100	100
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan										
Persentase Kelompok (KUB, Pokdakan) yang dibina disuluh	%	13,13	13,13	100	16,95	16,95	100	18,19	18,19	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2022



Kinerja perikanan yang kurang baik itu diidentifikasi disebabkan oleh beberapa permasalahan berikut:

- a. Permasalahan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan perikanan tangkap: (1) Rendahnya persentase penggunaan perahu bermotor dibandingkan perahu tradisional; (2) Masih adanya illegal fishing dan unregulated fishing dan unreported fishing; (3) Kurangnya ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan Kepulauan Riau; (4) Kurangnya akses infrastruktur yang memadai dalam hal ini pelabuhan yang lengkap infrastrukturnya di setiap pulau; (5) Rendahnya tingkat pendidikan; (6) Kebutuhan keakuratan data oseanografi untuk setiap nelayan terkait peralihan musim yang dapat mempengaruhi kegiatan budidaya dan perikanan tangkap; (7) Nelayan kurang menggunakan teknologi dalam penangkapan ikan, misalnya kapal-kapal asing dapat menangkap ikan lebih banyak dikarenakan mereka menggunakan teknologi pencarian ikan termutakhir.
- b. Permasalahan dalam pembangunan dan pengelolaan perikanan budidaya antara lain: (1) Kurang akuratnya data oseanografi terkait peralihan musim yang mempengaruhi kegiatan budidaya dan perikanan; (2) Adanya program pemberdayaan dari pusat maupun daerah yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat dan wilayah geografis kepulauan misalnya program budidaya ikan lele misalnya, program tersebut kurang mendapatkan respon yang baik bagi masyarakat di daerah dengan karakteristik nelayan tangkap; dan (3) belum optimalnya data nelayan penerima manfaat sehingga bantuan pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran.
- c. Permasalahan dalam Program Penguatan daya saing hasil perikanan: Pengusaha mikro, kecil, dan menengah hasil perikanan mengalami kesulitan permodalan, bahan baku, pemasaran, BBM, transportasi, ketrampilan, upah buruh, dan lain sebagainya.
- d. Permasalahan Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan masih perlu ditingkatkan terutama untuk menyelesaikan permasalahan terkait pemasaran.
- e. Permasalahan dalam program Pengelolaan Sumber daya Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau kecil: (1) Masih maraknya alih fungsi hutan mangrove, penambangan, penebangan usaha arang di Tanjungpinang dan Batam yang memang beberapa akar permasalahan tersebut tidak bisa dihindari akibat dampak kawasan industri; (2) Penggunaan alat tangkap berbahaya sehingga merusak padang lamun dan terumbu



- karang; dan (3) Perlunya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi perumusan kebijakan yang komperhensif.
- f. Permasalahan dalam Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan memiliki permasalahan yang kompleks. Ketika mereka tidak hanya dihadapkan permasalahan daerah akan tetapi mereka dihadapkan dengan permasalahan nasional, bahkan internasional dalam illegal fishing, unregulated fishing, unreported fishing dan overfishing.

Permasalahan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan. Masyarakat Kelautan dan Perikanan seharusnya mengarah pada outcome dari pengembangan sumber daya yang berbentuk sebelum dilaksanakan pengembangan dan sesudah dilaksanakan pengembangan. Hal ini dikarenakan permasalahan nelayan yang masih belum menggunakan metode yang tepat masih menjadi permasalahan sampai saat ini.

2. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi makro dapat dideteksi dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

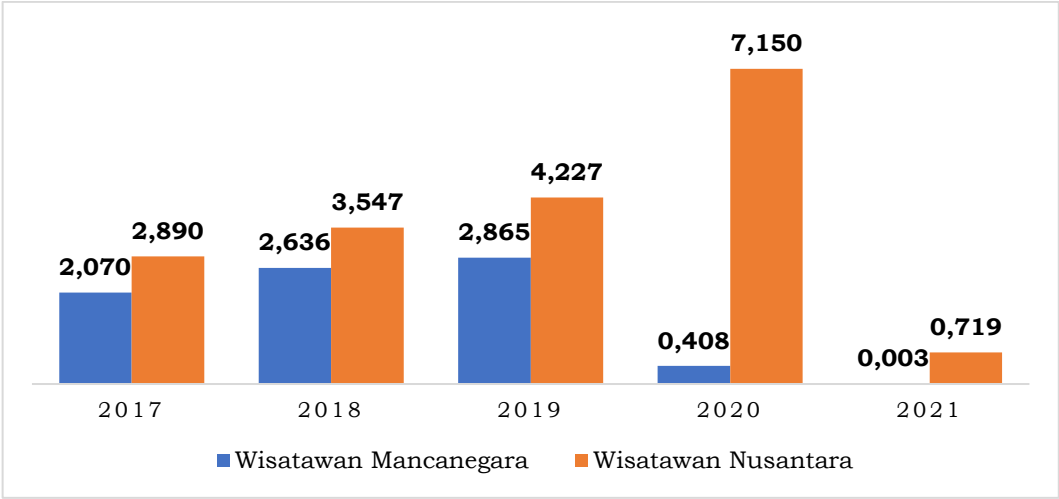
Wisatawan yang datang akan membutuhkan tempat untuk menginap dan tempat untuk berkonsumsi. Namun demikian, sebelum adanya pandemi COVID - 19 kontribusi sektor ini menunjukkan peningkatan, ini sebuah indikasi terus berkembangnya sektor pariwisata.

Tabel 2.162
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kepulauan Riau terhadap PDRB

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,22%	2,24%	2,32%	1,33%	1,15%

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

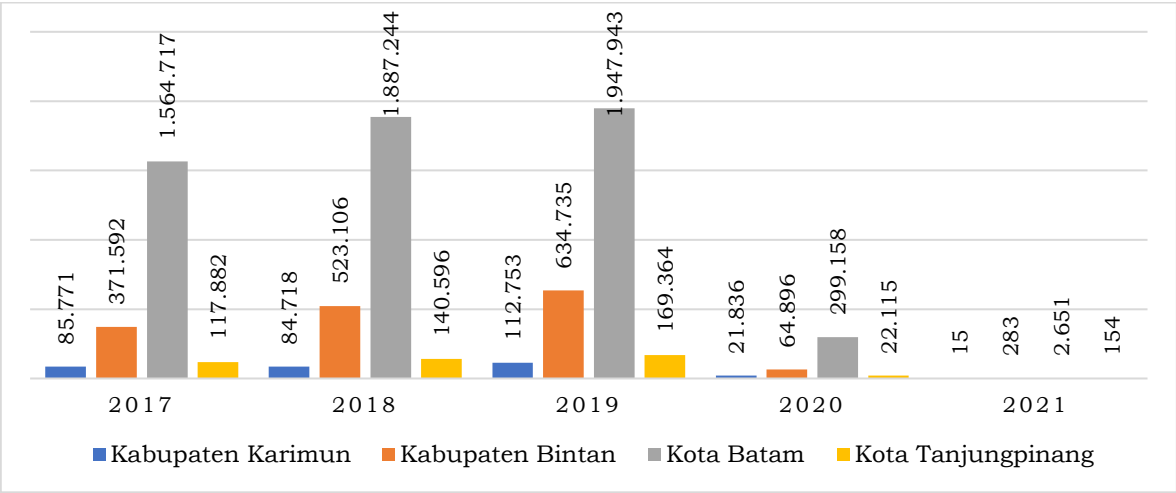
Kinerja pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum bersumber dari jumlah kunjungan wisata yang terus bertambah didukung oleh jumlah kunjungan wisata dan rata rata lama menginap yang semakin tinggi. Jumlah kunjungan wisata ke Kepulauan Riau baik domestik maupun mancanegara terus menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan secara drastis.



Gambar 2.71
Perbandingan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
2017-2021 (Juta Orang)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 paling banyak melewati pintu masuk dari kota Batam yaitu sebanyak 2.651 orang (85,44%), selanjutnya Kabupaten Bintan sebanyak 283 orang (9,12%), pintu masuk Kota Tanjungpinang sebanyak 154 orang (4,96%) dan melewati Kabupaten Karimun sebanyak 15 orang (0,48%).

Dari gambar di bawah dapat dilihat bahwa tahun 2021 kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau mengalami penurunan. Total jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 sebesar 3.103 orang. Dari seluruh kabupaten/ kota pintu masuk wisatawan mancanegara mengalami penurunan kunjungan yang signifikan; Kabupaten Karimun mengalami prosentase penurunan tertinggi sebesar 99,93%, Kabupaten Bintan mengalami prosentase penurunan 99,56%, Kota Tanjungpinang mengalami prosentase penurunan sebesar 99,30%, dan Kota Batam mengalami prosentase penurunan 99,11%.



Gambar 2.72
Jumlah Wisatawan Mancanegara melalui Empat Pintu 2017-2021
Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Tahun 2022

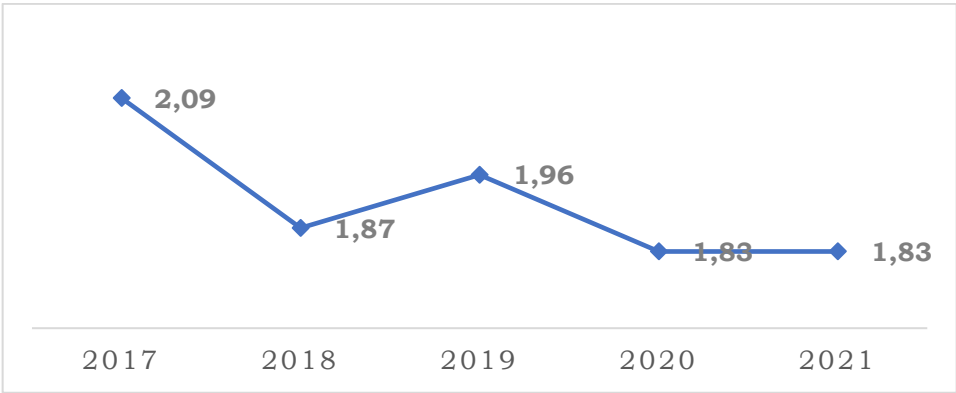


Berdasarkan komposisi asal wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau pada tahun 2021 masih didominasi wisatawan asal Singapura yang menyumbang sebesar 13.63%, Malaysia 7.67%, dan India 1.06%. Selain dari negara tersebut hanya berkontribusi kurang dari 1%.

Rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau dikarenakan adanya Covid-19 yang melanda dunia. Adanya wabah pandemi covid-19 kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat dan ekonomi yaitu larangan masuk atau transit bagi orang asing di Indonesia. Selain itu banyak negara yang melarang warga negaranya untuk bepergian sehingga memberi tekanan terhadap perekonomian terutama pada sektor pariwisata.

Untuk percepatan pemulihan pariwisata, pemerintah melaksanakan program sertifikasi Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keselamatan) & Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) untuk melakukan verifikasi jenis usaha/sektor/fasilitas dan layanan publik serta deklarasi mandiri wilayah bagi para pelaku usaha. Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya sertifikasi CHSE ini tempat wisata dipastikan telah memenuhi standard status kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Label Indonesia Care akan menjadi penanda bahwa lokasi wisata tersebut aman untuk dikunjungi, sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dan masyarakat, yang pada akhirnya akan memutar kembali roda perekonomian khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selain itu, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun di tahun terakhir, dimana rata-rata menginap pada tahun 2017 yaitu 2,09 hari sedangkan tahun 2021 turun menjadi 1,83 hari. Total Rata-rata lama menginap wisatawan dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 2.73
Rata-rata Lama Menginap (hari) Tahun 2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, 2022

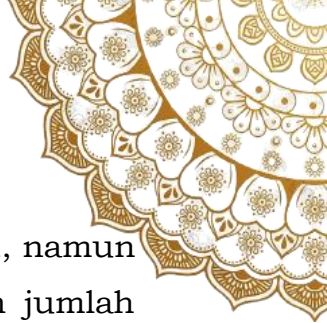
Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan rata-rata lama menginap, telah dilakukan beberapa upaya. Capaian kinerja dari upaya-upaya tersebut secara detail disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.163
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kunjungan wisatawan Mancanegara	juta orang	2,07	2,6	2,8	0,4	0,003
2	Kunjungan wisatawan Nusantara	juta orang	2,89	3,5	4,2	7,15	0,71
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	2.09	1.87	1.99	1.83	1.83
4	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum	%	2,22	2,24	2,32	1,33	1,15
5	Jumlah obyek wisata Unggulan	Unit	16	16	16	16	
6	Jumlah Desa Wisata	Desa	22	25	31	58	
7	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	kelompok	30	51	81	81	
8	Jumlah Pola Perjalanan	paket	n/a	2	4	5	
9	Kapasitas Profesionalisme SDM Pariwisata	orang	75	325	572	1.095	
10	Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Aktif	%	2.73	13.3	24.21	22,15	45,6
11	CEO Kepulauan Riau di CEO Kemenpar	event	3	6	6	4	
12	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	milyar rupiah	n/a	14.299	19.625	14.422	2.139
13	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	52.66	53.75	50.87	22.76	23,88

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Terdapat beberapa kinerja yang menunjukkan adanya fluktuasi, utamanya berkaitan dengan upaya untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal. Sebagai contoh adalah jumlah desa wisata. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong pariwisata



berbasis masyarakat belum berjalan secara baik di semua daerah, namun dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa penambahan jumlah desa wisata di Kepulauan Riau.

Mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pemerintah kabupaten/kota telah mulai dengan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif. Ada 3 kabupaten/kota yang telah memiliki ruang kreatif, seperti Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Kota Tanjungpinang sendiri telah memiliki 6 ruang ekonomi kreatif, perkembangan tiap tahunnya terus meningkat.

Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata tidak dapat berjalan sendiri dan harus ditunjang dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Seperti aksesibilitas jalan, pelabuhan laut maupun udara merupakan kewenangan dari instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Hal ini telah tercantum dalam Grand Design Pariwisata Kepulauan Riau yaitu RIPPPDA Provinsi Kepulauan Riau 2012-2022.

3. Urusan Pertanian

Sektor pertanian di Kepulauan Riau merupakan sektor yang memiliki kontribusi cukup kecil dalam perekonomian dengan pertumbuhan yang negatif, sehingga sektor ini masuk dalam kategori sektor non unggulan. Namun jika dilihat dari penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian, maka sektor ini menjadi sektor unggulan. Sektor yang tumbuh negatif dengan kontribusi kecil ini jelas menjadi sektor yang tertinggal (Background Study Ekonomi, 2020).

Tabel 2.164
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor dan Subsektor Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019

Sektor/Subsektor	2017		2018		2019	
	K	P	K	P	K	P
Pertanian	3,58	-1,21	3,26	-2,85	3,08	-0,7
Tanaman pangan	0,02	-5,60	0,01	-24,37	0,01	-10,31
Hortikultura	0,14	0,39	0,13	5,71	0,15	17,90
Perkebunan	0,68	4,13	0,66	1,35	0,66	6,86
Peternakan	0,35	8,73	0,35	6,90	0,38	12,26
Perikanan	2,28	-3,77	2,07	-5,81	1,84	-6,15

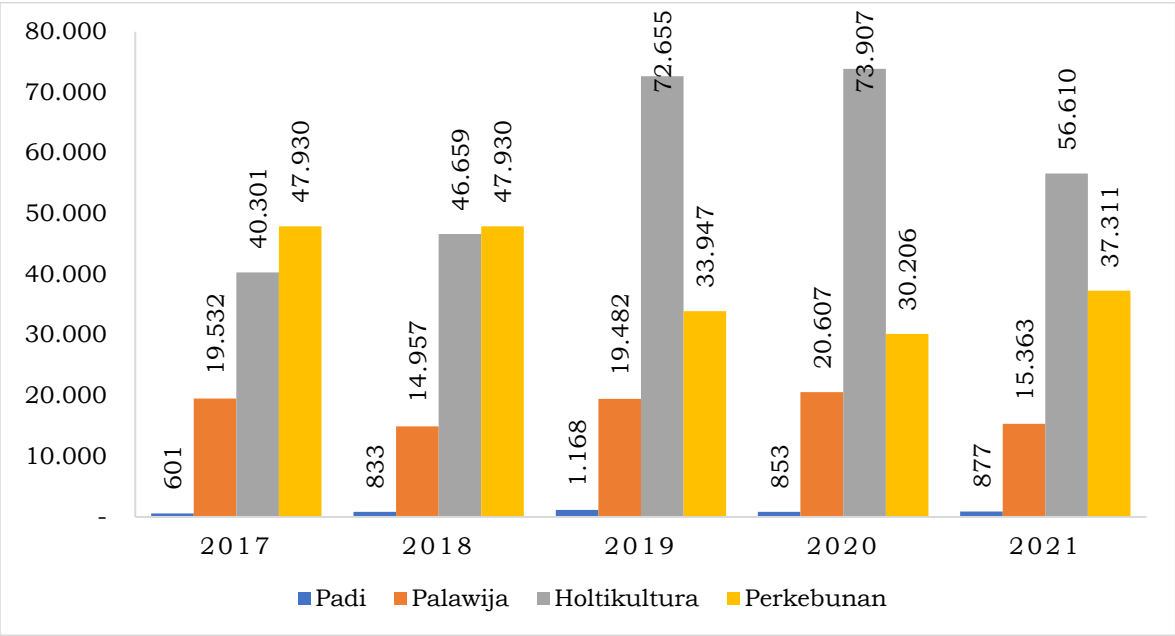
Ket: K= kontribusi ; P = pertumbuhan
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sektor pertanian yang kurang optimal dan bukan unggulan ini tetap harus menjadi perhatian penting, sebab sektor pertanianlah yang menjadi sumber penghasilan penduduk sekaligus sebagai supplier pangan.



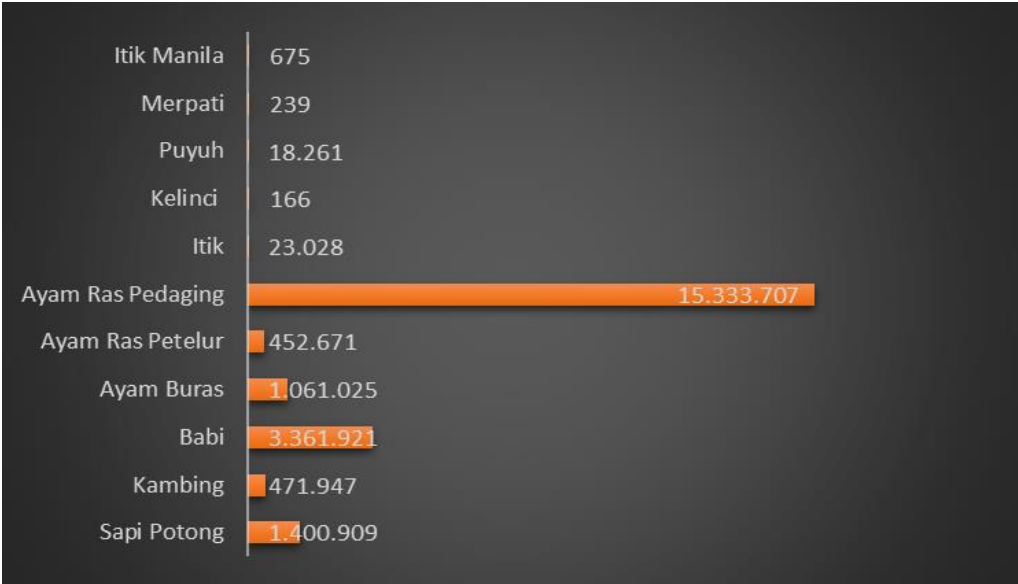
Pertanian dan perkebunan menjadi salah satu sektor unggulan untuk mengurangi ketergantungan terhadap hasil bumi seperti pertambangan dan penggalian. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kawasan peruntukan pertanian seluas 227.682,63 ha. Kawasan tersebut terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pengembangan kawasan budidaya ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan serta pengembangan berorientasi agribisnis pertanian. Lebih lanjut, kawasan peternakan kemudian dibagi menjadi dua peruntukan, meliputi: skala agribisnis dan skala peternakan rakyat. Kawasan agribisnis di Provinsi Kepulauan Riau diprioritaskan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan beberapa pulau lainnya yang memiliki potensi serta kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Sementara itu, pengembangan kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan.

Di antara berbagai produk pertanian itu, produk perkebunan dan hortikultura merupakan produk dominan di Kepulauan Riau, sedangkan produk padi adalah produk pertanian yang paling rendah. Hal ini berkaitan dengan wilayah Kepulauan Riau yang sebagian besar adalah laut. Dilihat dari perkembangan produksinya juga mengalami fluktuasi, terutama untuk perkebunan.



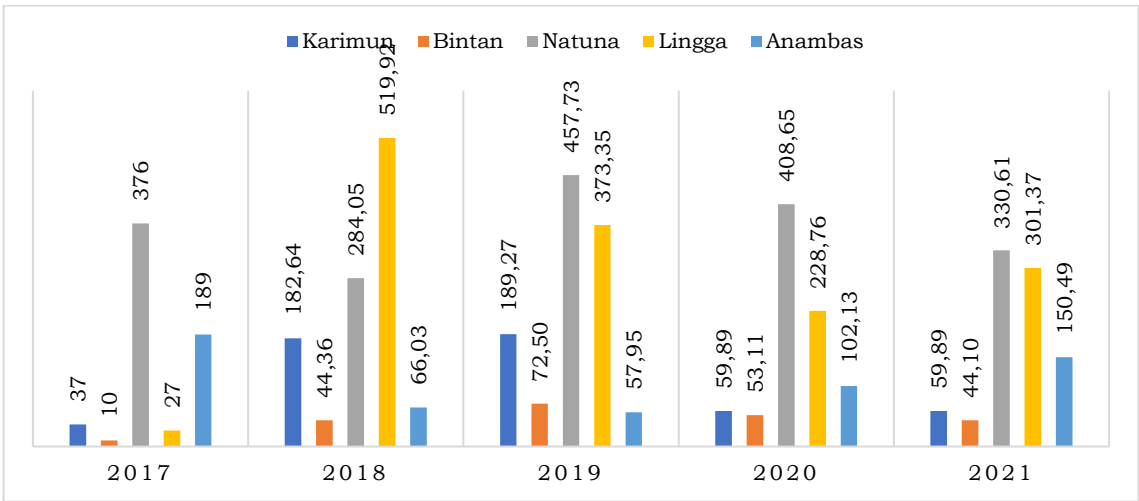
Gambar 2.74
Perbandingan Jumlah Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, dan Perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau 2017-2021
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Meskipun hasil produksi pertanian hortikultura meningkat, namun secara substansi kinerja indikator tersebut masih belum optimal. Hal ini dikarenakan buah dan sayuran masih berasal dari provinsi lain bahkan diimpor. Untuk peternakan, produk peternakan unggas lebih unggul jika dibandingkan dengan ternak besar. Sekali lagi persoalan sempitnya lahan menjadi masalah untuk ternak besar.



Gambar 2.75
Perbandingan Produksi Hasil Produk Peternakan (kg) Tahun 2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dilihat dari persebarannya, maka produk pertanian, utamanya padi tersebar di seluruh kabupaten dengan kontributor terbesar di Kabupaten Natuna, disusul oleh Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan terakhir Kabupaten Anambas.



Gambar 2.76
Jumlah Produksi Padi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2022



Kinerja sektor pertanian yang kurang baik itu disebabkan oleh berbagai aspek. Pertama, sumber daya manusia yang belum siap. Masyarakat baik nelayan belum siap untuk berubah haluan menjadi petani, pada sisi lain para transmigran, juga masih belum mampu dalam pelaksanaan bercocok tanam dengan baik. Kedua, alih fungsi lahan. Ini terjadi di Karimun yang dahulu menjadi kawasan budidaya pangan dan sekarang menjadi kawasan industri. Ketiga, adanya ketergantungan yang tinggi terhadap beras dan mengabaikan potensi pangan lokal. Ketika beras menjadi sumber pangan utama, maka Kepulauan Riau mengalami ketergantungan beras dari luar provinsi, padahal ada sagu yang juga merupakan salah satu pangan pokok di berbagai daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sagu dapat dikembangkan suatu pangan pokok dengan adanya pengembangan teknologi melalui industri pangan lokal di Kabupaten Lingga. Kinerja pertanian ini didukung oleh berbagai program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.



Tabel 2.165
Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam Pertanian Tahun 2017-2021

Jumlah Produksi	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						
Nilai Tukar Petani (NTP)	%	97,98	97,02	101,41	99,84	102,43
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	1,16	1,2	1,2	1,3	1,3
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan						
Jumlah Produksi Padi	Ton	601	833	1.167,80	852,54	877,29
Jumlah ProduksiTanaman Palawija	Ton	19.531,50	14.957	19.482,46	20.606,84	15362,93
Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	Ton	40.301	46.659	72.654,90	73.907,19	56610
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	47930	47.930	33.946,80	30.205,52	37.310,54
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan						
Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	4,67	5,05	5,32	5	2,71
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak						
Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar	%	0,04	0,032	0,04	0,021	0,0153
Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Kecil	%	0,0035	0,003	0,002	0,002	0,0004
Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	78,84	85,71	57,31	67,18	71,6
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan						
Persentase Peternak yang memanfaatkan teknologi tepat guna	%	3	5	5,28	5,56	6,11
Persentase Kelompok Tani menerapkan Teknologi pertanian/perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	%	4,53	4,63	6,85	6,95	4,75

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2022 dan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kepri Tahun 2021



4. Urusan Kehutanan

Sektor Kehutanan memiliki kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2021 sebesar 0,01% dari target 0,05%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tersebut sesuai dengan LKPJ 2021 menunjukkan pada kategori sangat rendah. Selain kontribusinya terhadap PDRB, dibawah menyajikan kinerja urusan kehutanan tahun 2017-2021.

Tabel 2.166
Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No	Uraian	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas Lahan Kritis yang Terehabilitasi	243	386	400	300	145,0
2.	Persentase Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	7,03%	7,39%	7,58%	7,73%	
3.	Persentase kerusakan kawasan hutan	29,21%	29,11%	28,98%	28,925	
4.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	32,59%	32,64%	32,68%	32,71%	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Lahan kritis menjadi satu indikator adanya degradasi lingkungan dan sebagai akibat dari berbagai jenis pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang tepat Lahan kritis akan menyebabkan terganggunya fungsi lahan sebagai media pengatur tata air, perlindungan banjir dan/atau sedimentasi di wilayah hilir. Dampak lahan kritis mengakibatkan penurunan fungsi konservasi, fungsi produksi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dari fungsi konservasi, lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak mampu lagi berfungsi untuk menjaga tata air, sumber daya tanah, serta biodiversitas yang hidup di atas lahan tersebut. Dari fungsi produksi, lahan kritis dipandang tidak mampu lagi sebagai media tumbuh dan berkembang tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pemukiman, industri dan pariwisata. Berdasarkan kondisi tersebut dapat memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut.

Strategi penanganan lahan kritis pada kegiatan RHL dapat dilakukan dengan cara: 1) meningkatkan sinergi antara BPDASHL Sei Jang Duriangkang dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan RHL; 2) membuat RHL menjadi lebih inklusif sehingga kegiatan RHL dapat dilaksanakan oleh aktor-aktor yang tidak terbatas oleh BPDASHL Sei Jang Duriangkang; dan 3) meningkatkan kapasitas partisipasi dalam hal perumusan strategi, pelaksanaan,



monitoring dan evaluasi. Di samping itu, kegiatan RHL dapat dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat berupa Kelompok Tani Hutan.

Berdasarkan data lahan kritis di atas, potensi kegiatan RHL di Provinsi Kepulauan Riau pada lahan kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis seluas ± 346.110 hektar. Kegiatan RHL yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016-2020 dengan pelaksana BPDASHL Sei Jang Duriangkang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau baru seluas ± 1.658 hektar. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan pelaksanaan RHL masih sangat kecil dibanding dengan luas lahan yang perlu direhabilitasi. Tabel berikut menyajikan data lahan kritis di kabupaten/kota.

Tabel 2.167
Lahan Kritis Tahun 2020 Wilayah Kerja BPDASHL Sei Jang Duriangkang Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kekritisan Lahan (Ha)					Total Luas (Ha)
		Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
1	Bintan/Tanjungpinang	52.221	15.744	76.589	2.269	-	146.823
2	Kota Batam	33.120	45.239	19.526	5.481	-	103.367
4	Kabupaten Karimun	30.335	57.343	5.201	288	-	93.167
5	Kabupaten Lingga	42.341	38.570	141.902	20	-	222.833
6	Kabupaten Natuna	122.307	44.036	34.266	337	-	200.946
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	1068	2369	59.675	-	51	63.262
Total		281.474	203.933	337.880	8.179	51	831.517

Sumber: BPDASHL Sei Jang Duriangkang, 2021

Selain lahan kritis, di Kepulauan Riau terdapat permasalahan konflik tenurial Kawasan hutan. Kawasan hutan yang menimbulkan konflik tenurial di wilayah Provinsi Kepulauan Riau antara lain tertuang dalam surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Wakil Ketua DPR RI Nomor: S.91/MenLHK-II/2015 Tanggal 6 Maret 2015 perihal Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dengan Cakupan yang Luas dan Bernilai Strategis (DPCLS) di Provinsi Kepulauan Riau, luas areal DPCLS yang dimohon Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diberikan persetujuan perubahan menjadi bukan kawasan hutan oleh DPR RI adalah seluas ± 23.872 hektar yang berasal dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB) seluas ± 8.620 hektar dan kawasan hutan lindung seluas ± 15.252. Namun hanya sebagian kecil dari permohonan tersebut mendapatkan persetujuan dari DPR RI sehingga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor: 272/MenLHK/Setjen/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 hanya merubah peruntukan kawasan hutan seluas ± 330 hektar dan merubah fungsi Taman Buru menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas ± 7.560



hektar dari total ± 23.872 hektar yang dimohonkan persetujuan sehingga menimbulkan kecemburuan bagi kabupaten/kota yang lain mengingat keputusan tersebut hanya mengubah fungsi dan peruntukkan di wilayah Kota Batam. Dengan terbitnya keputusan tersebut, maka kawasan hutan DPCLS yang belum mendapatkan persetujuan DPR RI di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah seluas ± 16.002 hektar dengan rincian:

- a. Kabupaten Bintan-Kota Tanjungpinang seluas ± 11.005 hektar terdiri dari fungsi kawasan suaka alam/pelestarian alam seluas ± 1.068 hektar dan fungsi hutan lindung seluas ± 9.937 hektar
- b. Kota Batam seluas ± 1.667 hektar, terdiri dari fungsi kawasan suaka alam/ pelestarian alam seluas ± 12 hektar dan fungsi hutan lindung seluas 1.655 hektar
- c. Kabupaten Karimun seluas ± 2.216 hektar dengan fungsi hutan lindung
- d. Kabupaten Lingga seluas ± 966 hektar dengan fungsi hutan lindung.
- e. Kabupaten Natuna seluas ± 148 hektar dengan fungsi hutan lindung.

Pemasangan Pal Batas Kawasan Hutan merupakan rangkaian dari proses pengukuhan kawasan hutan dimana berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses penunjukan, tata batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Pemasangan pal batas kawasan hutan merupakan bukti fisik di lapangan bahwa kawasan hutan telah dilakukan penataan batas. Pemasangan pal batas dilakukan dengan melibatkan unsur Kehutanan baik pusat maupun daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Barenlitbang, Camat, Kepala Desa/Lurah setempat yang ditetapkan sebagai Panitia Tata Batas Kawasan Hutan melalui Surat Keputusan. Pada kegiatan rapat panitia tata batas, dilakukan analisis terhadap hak atas tanah/penguasaan tanah. Apabila kawasan hutan yang akan dipasang Pal Batas Kawasan Hutan terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah berdasarkan peraturan agraria, maka dilakukan enklave untuk melindungi hak-hak keperdataan masyarakat.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kondisi geomorfologinya merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan sebutan nama “Paparan Sunda” atau bagian dari kerak Benua Asia. Dengan kondisi geomorfologi, dapat kita lihat Provinsi Kepulauan Riau tersimpan kekayaan alam yang melimpah baik yang terdapat di permukaan maupun tersembunyi di dalam bumi. Pengelolaan terhadap energi dan sumber daya mineral ini harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara



berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari atas ribuan pulau, sehingga masih banyak daerah yang belum merasakan aliran listrik dari PLN. Banyak daerah-daerah terpencil di Provinsi Kepulauan Riau yang belum teraliri listrik. Penyebab utamanya dikarenakan infrastruktur ketenagalistrikan belum tersedia karena rata-rata wilayah yang belum mendapat pasokan listrik merupakan wilayah perdesaan yang secara geografis berada di pulau-pulau yang sangat jauh dari perkotaan. Merupakan suatu kenyataan bahwa kebutuhan akan energi listrik semakin meningkat ditambah seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan pembangunan di bidang teknologi, industri dan informasi. Namun pelaksanaan penyediaan energi listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), selaku lembaga resmi yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk mengelola masalah kelistrikan di Indonesia, sampai saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik secara keseluruhan.

Kondisi Rasio Elektrifikasi (RE) pada tahun 2020 adalah 93,72 sementara itu, untuk Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Provinsi Kepulauan Riau, Daya Terpasang 132,28 rumah tangga dan Daya Mampu 86,33 rumah tangga. Di Provinsi Kepulauan Riau keluarga yang menggunakan listrik PLN tahun 2020 mencapai angka 621.982 keluarga, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan jumlah keluarga yang menggunakan Listrik Non-PLN mencapai angka 6.614 keluarga, berkurang dari tahun sebelumnya, ini merupakan bukti Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan tugas fungsinya sebagai unsur pelaksana. Kendala keterbatasan infratsruktur ketenagalistrikan dapat diatasi oleh pemerintah secara bertahap dengan membangun perluasan jaringan listrik ke pelosok-pelosok desa. Selain itu terdapatnya kesulitan dalam mengalokasi bantuan pembangkit listrik dalam bentuk genset ke desa terpencil karena adanya desa yang belum memiliki kelembagaan setara BUMDes yang mampu menjamin sustainability pembangkit listrik yang akan dihibahkan oleh pemerintah provinsi, sehingga perlu adanya dorongan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan pembentukan BUMDes/Koperasi agar dapat mengalokasi bantuan pembangkit listrik ke desa sebagai upaya untuk meminimalisir kerusakan mesin genset, sehingga capaian target Rasio Elektrifikasi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2020-2024 dapat tercapai 100%.



Pada sektor energi baru terbarukan (EBT) saat ini belum begitu berkembang. Penyebab harga EBT belum kompetitif yaitu adanya subsidi untuk BBM dan listrik serta masih mahalnyabiaya dari sebagian besar teknologi EBT. Akibatnya hingga tahun 2015 EBT masih kalah bersaing dengan energi fosil, hal ini menyebabkan pengembangan dan pemanfaatan EBT masih terkendala, tidak maksimal dan mengakibatkan ketergantungan yang besar pada energi fosil. Berdasarkan atas validasi dan pengukuran survei secara teknis dalam rangka meningkatkan kualitas data, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi EBT seperti:

- a. Tenaga Surya: dengan potensi sebesar 753 MW dan telah terealisasi melalui dana APBD/ APBN sebesar 1,95 MW (pembangkit).
- b. Biogas: potensi sebesar 4,3 MW.
- c. Energi laut: dengan potensi sebesar 126.567 MW.
- d. Biomassa (PLTBM): terealisasi melalui dana APBD/APBN sebesar 900 KW.
- e. Bayu/angin: dengan potensi sebesar 922 MW.

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penetapan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang bertujuan mengarahkan pengelolaan energi daerah secara optimal dan terpadu, guna terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sumber daya air, termasuk di antaranya air tanah digunakan dalam berbagai kegiatan manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kegiatan industri, pertanian, perikanan, jasa, termasuk di antaranya kegiatan pariwisata. Agar ketersediaan air tanah dapat terus berkelanjutan maka pengelolaan air tanah mulai dari pengambilan kebijakan, penyusunan strategi dan rencana pengelolaan serta pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah harus mengacu pada peta Cekungan Air Tanah (CAT). Sampai saat ini belum ada penetapan CAT di Provinsi Kepulauan Riau, padahal penetapan CAT tersebut dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan, penyusunan strategi dan rencana pengelolaan serta pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

Belum adanya penetapan CAT tersebut karena belum optimalnya kajian/ penelitian potensi air bawah tanah serta terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kajian/penelitian.



Pada sektor sumber daya mineral, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya mineral logam dan non logam dan batuan dengan beberapa kriteria yang didapatkan dari hasil penyelidikan baik dari tingkat penyelidikan berupa prospeksi.

Pemprov Kepulauan Riau melalui Dinas ESDM saat ini tengah menyusun ketentuan hukum terkait dengan tatacara penunjukan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang. Sejak terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020, ke depannya pengelolaan kegiatan usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan berdasarkan undang-undang tersebut saat ini telah tersedia “sanksi yang memaksa” pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan pascatambang yaitu berupa sanksi pidana.

Tabel 2.168
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No.	Kinerja Urusan ESDM	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	91,44	91,50	92,59	93,72	94,50
2.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	n/a	69	71,2	65,27	
	Daya Terpasang	n/a	125,34	127,31	132,28	
	Daya Mampu	n/a	86,49	107,6	86,33	
3.	Jumlah keluarga yang menggunakan listrik PLN	519.604	519.604	551.005	621.982	
4.	Jumlah keluarga yang menggunakan yang menggunakan listrik non-PLN	3.960	4.327	2.796	6.614	
5.	Jumlah keluarga yang belum berlistrik	49.017	48.650	44.341	42.105	
6.	Desa yang menggunakan listrik PLN	327	354	374	380	
7.	Desa yang menggunakan listrik non-PLN	76	52	42	36	
8.	Desa belum berlistrik	13	10	0	0	
9.	Persentase pertambangan tanpa izin	Blm dilakukan Pendataan	Blm dilakukan Pendataan	9,18	16,43	
10.	Potensi Energi Baru Terbarukan					
	Tenaga Surya	n/a	n/a	753 MW	753 MW	
	Biogas	n/a	n/a	4,3 MW	4,3 MW	
	Energi Laut	n/a	n/a	126.567 MW	126.567 MW	
	Biomassa (PLTBM)	n/a	n/a	1 MW	1 MW	
	Bayu/angin	n/a	n/a	922 MW	922 MW	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, 2022



6. Urusan Perdagangan

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi ekonomi yang sangat besar jika mampu dioptimalkan. Provinsi Kepulauan Riau masih bisa meningkatkan kinerja ekonominya terutama di sektor pertanian, kehutanan dan kelautan serta produk olahan selanjutnya. Didukung letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia, maka peluang untuk mengeksport produk-produk unggulan Provinsi Kepulauan Riau tersebut terbuka lebar.

Eksport sebagai salah satu sumber devisa negara saat ini sedang berusaha digalakkan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi dunia dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 2.9% pada tahun 2019, Adalah rekor terendah. Hal ini merupakan tantangan global yang dihadapi yaitu adanya konflik, Ancaman non-tradisional, populisme (sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan rakyat yang sering kali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang di sebut elit), proteksionisme (Kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar Negara melalui cara-cara seperti tarif barang import, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil), bencana alam, rivalitas/persaingan, trade war/perang dagang. Adanya perubahan kondisi ekonomi global dan regulasi yang sangat cepat, tidak diimbangi dengan intensitas (komunikasi, sosialisasi&mediasi) antar pelaku usaha eksportir-importir dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Saat ekonomi global yang sedang mengalami perlambatan saat ini Industri Kecil dan Menengah justru masih dapat tumbuh dan terus berkembang karena masih besarnya potensi untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan nilai ekspor dengan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha, diantaranya adalah dengan memberikan fasilitasi ekspor dan impor. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut diharapkan para pengusaha lebih termotivasi untuk meningkatkan ekspor produk-produk mereka, sehingga devisa yang masuk ke Indonesia akan semakin besar.

Kinerja sektor perdagangan didukung oleh dua sektor, yakni sektor perdagangan luar negeri dan sektor perdagangan dalam negeri. Sektor perdagangan luar negeri dalam tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan luar negeri di daerah dengan peningkatan dan fasilitasi ekspor, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, meningkatkan kerjasama dan promosi, pengembangan dan



peningkatan produk potensial ekspor serta pembinaan pelaku usaha ekspor impor dengan kontribusi PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini, pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2017 sebesar 0,052%; tahun 2018 sebesar 0,027%; tahun 2019 sebesar 0,024% dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 0,030% hal ini disebabkan masih berlangsungnya pemulihan ekonomi Pandemi Covid 19 yang dirasakan oleh pelaku usaha di provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu untuk kontribusi perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017-2019 mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2017 sebesar 8,63%; Tahun 2018 sebesar 8,86%; Tahun 2019 sebesar 9,07%; dan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,8%.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberdayakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai tempat pengaduan kasus yang menyangkut masalah perlindungan konsumen, dimana BPSK terdapat di 2 (dua) kab. Kota yaitu di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, sebagaimana terlampir data pelaporan kasus yang sudah diselesaikan dan data pelaporan konsultasi kasus.

Tabel 2.169
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasar pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi	unit	108	113	119	121	
2	Cakupan pasar yang dilakukan pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi (%)	%	61,00	63,00	64,00	57,14	
3	Jumlah pengaduan kasus sengketa BPSK Kota Batam	kasus	68	10	-	113	
4	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	8.63	8.86	9.07	8,8	8,15
5	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	0,052	0,027	0,024	-0,030	
6	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	USD juta	3.391.46	1.769.48	1.850.91	742,38	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

7. Urusan Perindustrian

Kinerja sektor perindustrian di Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh dua bidang yaitu bidang Industri Agro dan Manufaktur dan Bidang Industri Kecil dan Menengah. Sektor Perindustrian dalam hal ini Industri Pengolahan menjadi salah satu sektor yang dominan dalam pembentukan



PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut bisa dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, yang selama beberapa tahun terakhir selalu menunjukkan kontribusi terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan data BPS, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 mencapai 42,03% mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang sebesar 41,70%. Besarnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan data BPS, jumlah perusahaan besar dan menengah tahun 2017 dengan klasifikasi jumlah tenaga kerja diatas 20 orang sebanyak 444 perusahaan, dimana sebanyak 390 diantaranya berada di kota Batam.

Jumlah industri kecil di Kepulauan Riau mencapai 3.000 unit pada tahun 2021, meningkat jika dibandingkan kondisi tahun 2020 yang jumlahnya 2.500 unit. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku industri kecil, banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku industri kecil dan menengah baik melalui pelatihan, bimtek, sosialisasi, bantuan mesin dan peralatan, fasilitasi klinik kemasan, dan menyertakan pelaku industri serta produk-produk dari pelaku industri kecil ke berbagai kegiatan pameran maupun expo. Hanya saja yang menjadi kendala adalah masih terbatasnya jumlah produk-produk pelaku industri kecil yang bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk mengikuti pameran atau expo. Cakupan IKM yang dibina provinsi sebanyak 11,57%, sedangkan cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk sebanyak 0,05%. Dalam rangka meningkatkan jumlah wirausaha baru di Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah juga melakukan pelatihan terhadap warga masyarakat yang belum memiliki usaha yang diharapkan dapat tumbuh sebagai wirausaha baru.

Dalam rangka meningkatkan kinerja sektor industri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama kabupaten/kota mengembangkan kawasan industri dengan jumlah semakin meningkat dari sejumlah 26 unit pada tahun 2017 menjadi 34 unit pada tahun 2021. Kawasan industri ini akan ditingkatkan jumlahnya pada tahun-tahun mendatang sehingga dapat memicu pertumbuhan industri.



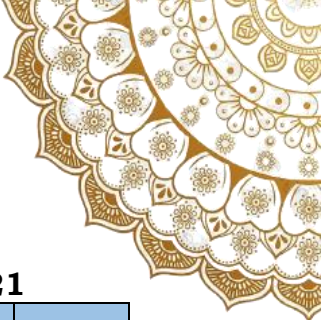
Tabel 2.170
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor perindustrian	%	37,07	36,85	37,57	41,70	42,03
2	Pertumbuhan sektor perindustrian	%	1,53	4,14	6,25	13,84	
3	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	sentra	6	8	8	8	8
4	Jumlah rencana pembangunan industri provinsi.	dokumen	1	2	2	1	
5	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	2.000	2.200	2.400	2.500	3000
6	Rata-rata omset IKM yang dibina	%	0,012	0,021	0,014	n/a	
7	Cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk	IKM	18	20	24	10	12,38
8	Cakupan IKM yang dibina provinsi	IKM	145	175	338	120	
9	Jumlah IKM yang terfasilitas melalui klinik kemasan	IKM	180	180	180	250	
10	Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih	orang	20	20	30	20	
11	Jumlah IKM yang mendapat bantuan mesin dan peralatan	orang	20	60	150	45	
12	Jumlah kawasan industri	kawasan	26	26	26	32	34

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

8. Urusan Transmigrasi

Provinsi Kepulauan Riau sampai saat ini belum memiliki jenis Transmigrasi Swaskarsa, yang ada adalah Transmigrasi Umum sejak tahun 1992 yang berada di Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Lingga. Rencana Transmigrasi Swakarsa berkemungkinan pada Kabupaten Lingga, yang saat ini sudah membuat dokumen teknis Rencana Kawasan Transmigrasi. Rencananya Kabupaten Lingga akan bekerjasama dengan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merujuk pada RPJMD Tahun 2016-2021 bahwasanya transmigrasi untuk pencapaian Indikator Kinerja Daerah berdasarkan atas indikator jumlah warga KK yang ditempatkan sesuai dengan Rencana Penempatan, yang mana tingkat capaiannya sebagai berikut:



Tabel 2.171
Capaian Indikator Kinerja Transmigrasi Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah warga (KK) yang ditempatkan sesuai dengan rencana penempatan	1.471	1.471	1.471	1.845	1.845
2	Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi	2	2	2	2	2

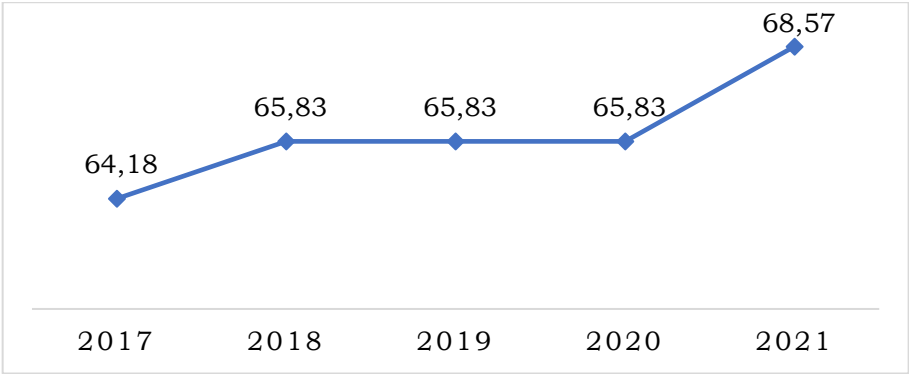
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, 2022

2.1.3.4. Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sekretariat Daerah

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan reorganisasi, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan proses bisnis dan kinerja yang akan diwujudkan, hal ini penting untuk mewujudkan performance-based organization sehingga tercipta organisasi yang efektif dan efisien. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan secara optimal yang tercermin dari pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2021 secara konsisten menunjukkan peningkatan, walaupun nilainya pada tahun 2021 masih rendah yaitu sebesar 68,57 sebagaimana yang tersaji pada Gambar berikut ini.



Gambar 2.77
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Sumber: Data LKPJ Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Rincian penilaian seluruh komponen Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.



Tabel 2.172
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020
A	Komponen Pengungkit		
	I. Komponen	20,00	12,74
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,52
	III. Reform	30,00	16,44
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	35,70
B	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,27
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,75
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,13
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,72
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	32,87
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	68,57

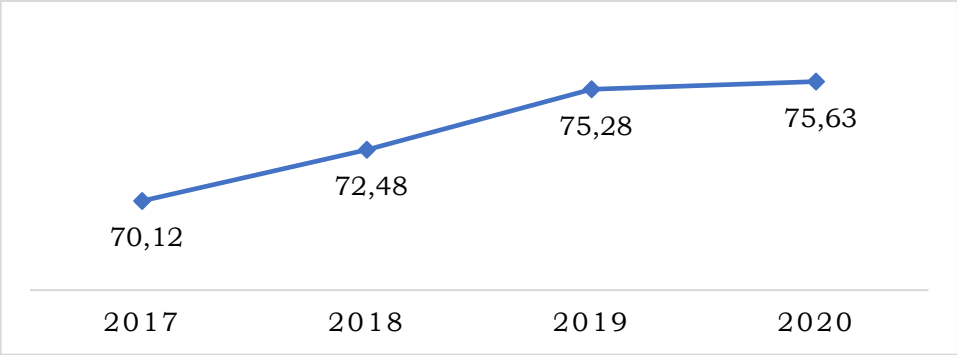
Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang direpresentasikan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi beserta komponen kompositnya tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara optimal. Terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai Reformasi birokrasi yang optimal yang antara lain terkait dengan perlunya komitmen yang kuat dalam pelaksanaan manajemen reformasi birokrasi mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi program-program reformasi birokrasi. Deregulasi kebijakan juga masih belum berjalan secara efektif dimana masih terdapat kebijakan yang tumpang tindih yang menghambat proses pembangunan. Dalam hal pengimplementasian e-government masih belum dilaksanakan secara memadai dimana pelaksanaannya masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi sehingga belum mengungkit perbaikan dan layanan. Selain itu, Peta Proses bisnis yang ada belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi, dan rencana strategis Pemerintah Daerah dan juga belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM. Standar pelayanan formal yang telah dibentuk dan dilaksanakan juga belum sesuai dengan harapan masyarakat.

b. Nilai SAKIP

Sementara itu, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang direpresentasikan dengan nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan meskipun hal ini masih belum terbangun dengan baik. Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan predikat BB dengan nilai 75,63 pada capaian nilai

SAKIP. Hal ini menunjukkan ada peningkatan pada sisi akuntabilitas kinerja pemerintah.



Gambar 2.78
Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
Sumber: Data LKPJ Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Rincian penilaian seluruh komponen nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 -2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

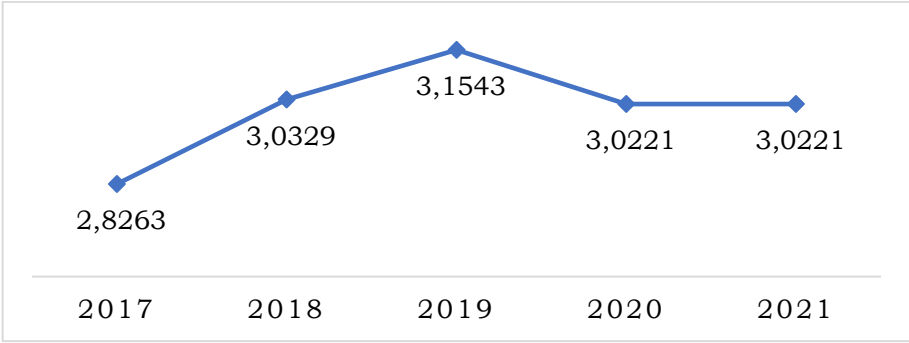
Tabel 2.173
Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2021

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	2018	2019	2020	2021
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,97	24,47	24,95	
2.	Pengukuran Kinerja	25	18,88	18,88	19,49	
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,59	12,01	11,82	
4.	Evaluasi Kinerja	10	6,39	6,95	7,04	
5.	Capaian Kinerja	20	11,65	12,97	12,33	
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72,48	75,28	75,63	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB

*Sumber: - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, 2021
- LAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021*

c. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Nilai LPPD yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017-2019 juga terus mengalami peningkatan meskipun di tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan. LPPD merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Kemendagri untuk menilai Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD) selama satu tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah.



Gambar 2.79
Nilai LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kepulauan Riau, 2022

Peningkatan kinerja instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebut juga didukung dengan capaian kinerja tata kelola pemerintahan lainnya sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini.

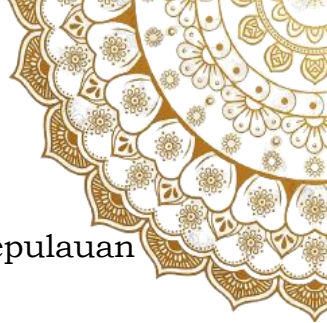
Tabel 2.174
Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Lokasi Prioritas dan PKSN yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	63,41	100	100	20	100
2.	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD sesuai target	Fisik: 84,55 Keuangan: 88,04	Fisik: 97,04 Keuangan: 95,97	Fisik: 97,37 Keuangan: 100,32	Fisik: 99,36 Keuangan: 97,48	Fisik: 100,00 Keuangan: 94,55
3.	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan barang dan jasa di seluruh SKPD	65,26	69,64	75,39	86,57	92,28
4.	Tingkat Kesehatan BUMD	n/a	32	33,33	56,32	49,36
5.	Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	1	5	6	7	8

Sumber: Data LKPJ Provinsi Kepulauan Riau 2017 s/d 2021

d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan LKPJ Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 terlihat adanya tren peningkatan angka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Meskipun pada tahun 2018 tidak dilakukan penilaian dan di tahun 2019 nilai IKM mencapai angka 67,00. Capaian 2019 ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 76,09. Namun di tahun 2020 nilai IKM kembali meningkat mencapai 82,89. Selanjutnya berdasarkan



data LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kepri TA 2021, IKM Provinsi Kepulauan Riau memiliki realisasi dengan kategori B.

e. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Terkait dengan kinerja BUMD, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan akan mendapat keuntungan dari BUMD. Berdasarkan LKPJ Tahun 2021, realisasi pendapatan daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kurang dari target yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Realisasi Pendapatan sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun 2021 sebesar Rp 3.035.620.811,00 atau 5,72% dari target dalam Perubahan APBD yang sebesar Rp 53.035.620.811,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari perolehan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Pelabuhan dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada PT. Bank Riau Kepri. Badan Usaha Pelabuhan dan PT. Bank Riau Kepri merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Sekretariat DPRD

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah memberikan pelayanan dan fasilitasi atas tugas anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, sasaran strategis yang dicapai Sekretariat DPRD adalah meningkatnya pelayanan sekretariat DPRD dan pelayanan anggota DPRD. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan hasil capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.175
Kinerja Sekretariat Dewan di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (ekor)	62	64	66	68	70

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan, yang semula nilainya hanya 62 ditahun 2017, meningkat menjadi 70 pada tahun 2021.



2.1.3.5. Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu daerah. Apabila perencanaannya bagus maka akan menghasilkan pembangunan yang baik juga. Sampai saat ini telah banyak produk dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pertama, RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun dan menetapkan RPJPD Tahun 2005-2025 dengan penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2009.

Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2011 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025. Sebagai lanjutan perencanaan jangka menengah di tahun periode selanjutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2016, dikarenakan terdapat penyesuaian terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah maka dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2018.

Ketiga, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya, RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setiap tahun, akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS). Provinsi telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) dalam Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Gubernur Kepulauan Riau dari tahun 2017 hingga tahun 2021.



Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, bottom up dan top down. Artinya, perencanaan pembangunan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, juga harus konsisten dengan rencana lain yang relevan. Selain itu digunakan juga pendekatan substantif tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS) dan pendekatan *money follow program*. Dengan penerapan *money follow, program* jumlah keselarasan program di RPJMD dengan RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan.

Tabel 2.176
Kesesuaian Dokumen Perencanaan di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	80	96	100	100	100
2.	Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	100	100	100	100
3.	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, 2022

2. Keuangan

Kondisi keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target penerimaan daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui pengeluaran daerah. Secara umum terdapat 2 (dua) penerimaan daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan.

Berdasarkan hasil penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sejak tahun 2010 Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil mendapatkan opini BPK dengan predikat WTP. Bahkan dari tahun 2017-2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil mempertahankan predikat WTP tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif.

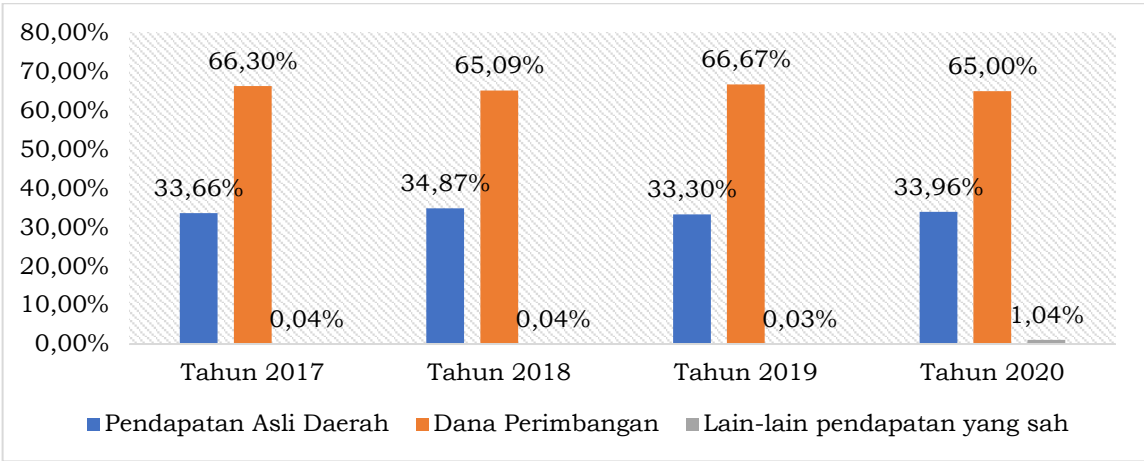


Tabel 2.177
Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sementara itu, kinerja pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Riau masih perlu ditingkatkan. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2017-2020 cukup fluktuatif meskipun pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Mayoritas kontribusi pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan. Pada tahun 2020, kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah mencapai angka 65,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pembiayaan pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kondisi ini disebabkan karena penggalian PAD belum optimal dan adanya berbagai kendala dalam inventarisasi aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya pencatatan aset tanah sebagaimana yang telah dijelaskan pada urusan pertanahan.



Gambar 2.80
Kontribusi Unsur-Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 (%)

Sumber: BP2RD Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambaran kinerja keuangan daerah juga dapat dinilai dari Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas PAD dan Persentase Kenaikan PAD sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.178
Kinerja Pendapatan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata	Kategori
Rasio Kemandirian	59.56%	50.77%	53.59%	49.94%	52,25%	53.47%	Sedang
Rasio Efektivitas PAD	95.24%	90.21%	106.86%	104.09%	102,29%	99.10%	Cukup Efektif
Rasio Efisiensi PAD	6.77%	7.79%	7.27%	7.63%	3,05%	7.37%	Sangat Efisien
Persentase Peningkatan PAD	6.52%	1.43%	11.51%	7.45%	-9,08%	6.73%	Efisien

Sumber: BP2RD Provinsi Kepulauan Riau, 2021

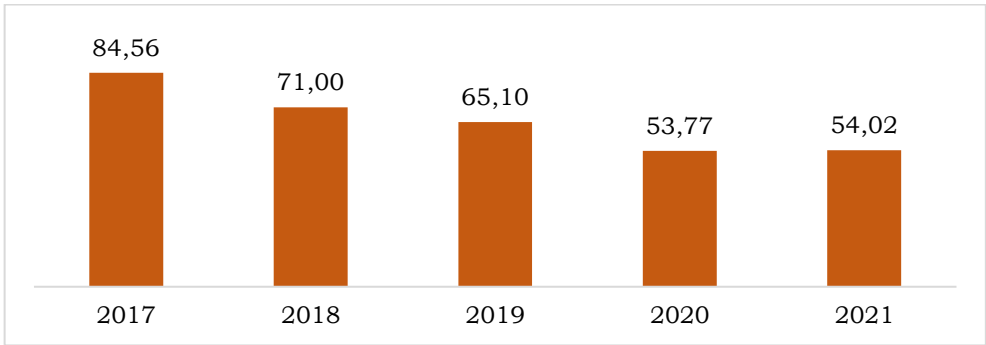


3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. ASN juga menjadi mesin birokrasi yang menggerakkan sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan. Di sisi lain ASN menjadi pelopor dalam mensukseskan pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam visi misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK) bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki 6 (enam) Badan, 21 (dua puluh satu) Dinas, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah yang memiliki 9 (Sembilan) Biro dan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 5.111 orang, dengan jumlah PNS Tenaga Pendidik dan Kependidikan sebanyak 2.321 orang atau sekitar 45,41% dari jumlah PNS di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini terjadi karena tahun 2016 kewewenangan SMA/SMK sederajat dilimpahkan ke provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah diperlukan PNS yang profesional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Adapun Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:



Gambar 2.81
Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Dari data di atas terlihat bahwa indeks profesionalitas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 baru mencapai angka 53,76. Hal ini berarti tingkat profesionalitas ASN (Aparatur



Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih pada kategori rendah. Selanjutnya indeks profesionalitas ASN pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan hingga menjadi 54,02.

Sedangkan rincian nilai komposit dari masing-masing variabel pembentuk indeks profesional ASN Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.179
Indeks Profesional ASN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Komponen	Penilaian	
		Bobot	Nilai
1	Dimensi Pendidikan	25	14,18
2	Dimensi Kompetensi	40	9,29
3	Dimensi Kinerja	30	25,30
4	Dimensi Disiplin	5	4,99
	Total	100	53,76

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tingkat profesionalitas ASN yang rendah mengakibatkan pelayanan umum, pemerintahan dan pembangunan tidak dapat berjalan secara optimal. Adapun indikator penilaian IPP tersebut sebagai berikut:

Indikator pertama, dinilai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal yang dicapai, meliputi Pendidikan S-3; Pendidikan S-2/D-4; Pendidikan S-1; Pendidikan D-3; Pendidikan D-2/D-1/SLTA Sederajat dan Pendidikan di bawah SLTA dengan nilai secara berurutan dari 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Peningkatan penilaian dalam indikator ini dapat dilakukan melalui ijin belajar atau tugas belajar untuk pendidikan formal dengan mengambil jenjang pendidikan setingkat di atasnya.

Indikator kedua, dinilai dari Kompetensi PNS diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi Diklat Kepemimpinan; Diklat Fungsional; Diklat Teknis; dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara dengan nilai jika pernah mengikuti Diklat kepemimpinan 1 jika tidak pernah mengikuti mempunyai nilai 0, demikian seterusnya. Peningkatan nilai dalam indikator ini dapat dilakukan dengan mengirim pegawai untuk mengikuti Diklat. Namun demikian, untuk bisa melaksanakan hal masih belum bisa dilaksanakan secara optimal karena kurangnya kesempatan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2019 Diklat dilaksanakan sebanyak 7 kali sedangkan pada tahun 2018 pelaksanaan Diklat hanya dilaksanakan sekali.

Pengembangan kompetensi PNS diperlukan mengingat tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan



komunikasi, globalisasi, peningkatan daya saing, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, lebih lanjut pengembangan kompetensi merupakan hak setiap PNS. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS disebutkan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Ketiga, perhitungan indikator Kinerja diukur dari Penilaian Prestasi Kerja PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan Perilaku Kerja dengan nilai perhitungan sesuai dengan nilai Gabungan Penilaian Kinerja. Perhitungan indikator Kinerja menjadi hal yang penting dalam mengukur keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS. Saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerapkan penilaian kinerja berbasis elektronik bagi seluruh PNS di luar Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Untuk Pegawai Tidak Tetap serta Tenaga Harian Lepas belum diterapkan penilaian kinerja sehingga kontribusinya kepada instansi belum dapat diukur.

Indikator keempat, yang dinilai adalah Disiplin Pegawai. Penilaian disiplin pegawai ini diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin dan Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin (Ringan, Sedang dan Berat) dengan penilaian 0 (Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin), R (Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan), S (Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang), dan B (Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat).

Upaya meningkatkan disiplin pegawai terus dilaksanakan oleh BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut di antaranya adalah penilaian kerja berbasis teknologi informatika melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMANJA) baru dapat diterapkan pada Pegawai Negeri Sipil non-tenaga pendidik dan kependidikan namun pada pemantauan disiplin kerja telah terpantau seluruh pegawai di luar tenaga pendidik dan kependidikan melalui sistem informasi elektronik disiplin (e-disiplin) dengan rekam sidik jari pegawai ketika masuk dan pulang kerja sesuai jam kerja.

Sementara itu dari sisi kuantitas ASN sesuai dengan analisis jabatan saat ini masih banyak kekurangan. Kebutuhan ASN Provinsi Kepulauan Riau hingga tahun 2024 berdasarkan analisis jabatan sebanyak 12.073. Saat ini jumlah ASN yang ada baru sebesar 5.111 pegawai, sehingga masih kurang sebanyak 6.962 pegawai. Dengan besarnya jumlah pegawai di masa depan maka upaya peningkatan kompetensi ASN juga perlu ditingkatkan. Akan tetapi, pada saat ini sarana prasarana untuk menunjang peningkatan



kompetensi tersebut belum tersedia. Di sisi lain frekuensi rotasi pegawai yang sangat cepat, penempatan ASN tidak sesuai kompetensi dan belum banyaknya tenaga fungsional tertentu yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan menghambat pengembangan kompetensi di beberapa bidang.

4. Penelitian dan Pengembangan

Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilandaskan pada hasil penelitian (riset), atau *planning by research*. Sebelum melakukan tahapan perencanaan maka tahapan penelitian atau kajian seperti pengenalan wilayah, analisis situasi (hasil dan manfaat), analisis zonasi wilayah, analisis kependudukan, analisis daya dukung, dan pemetaan prioritas pembangunan perlu dilakukan sehingga perencanaan yang dihasilkan berorientasi pada kebutuhan dan manfaat jangka panjang. Selain itu, dengan adanya *planning by research* maka diharapkan terciptanya iklim pembangunan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat dan keberlanjutan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, hasil-hasil penelitian terkait pembangunan daerah harus dimanfaatkan dan diterapkan secara optimal, karena hasil riset akan menjadi input dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kinerja penelitian dan pengembangan dapat dilihat dari capaian indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dan persentase jumlah inisiatif inovasi yang sudah terbentuk menjadi inovasi daerah. Berdasarkan data yang ada, persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dari tahun 2017 sampai tahun 2021 nilainya meningkat dari 59% menjadi 70%. Selanjutnya, persentase jumlah inisiatif inovasi yang sudah terbentuk menjadi inovasi daerah menunjukkan tren yang secara konsisten mengalami kenaikan sejak tahun 2018 sampai dengan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah telah mampu diimplementasikan dengan optimal.

Tabel 2.180
Realisasi Kinerja Urusan Penellitian dan Pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	59%	55%	55%	65%	70%
2	Persentase Jumlah Inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah	N/A	0%	5%	20%	30%

Sumber: LKPJ Provinsi Kepulauan Riau, 2022



2.1.3.6. Pengawasan

Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota (pada Bab XIX tentang Pembinaan dan Pengawasan Bagian Kesatu tentang Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 373 ayat (2)) dan Gubernur melakukan pengawasan pada perangkat daerah provinsi dibantu oleh Inspektorat Provinsi (Bagian Kedua tentang Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah Pasal 379 ayat (1) dan (2)). Setiap tahunnya Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perencanaan Pengawasan yang menjadi acuan bagi Gubernur melakukan pengawasan baik terhadap pemerintah kabupaten/kota maupun pengawasan terhadap perangkat daerah.

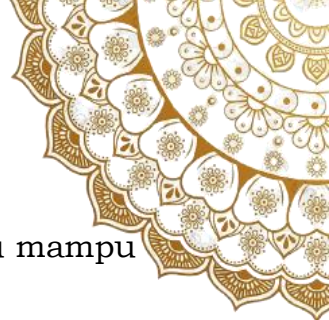
Kinerja pengawasan di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja pengawasan sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.181
Kinerja Pengawasan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Level APIP	2	2	3	2+	2+
2.	Pemenuhan Kebutuhan Auditor	n/a	43%	39%	38%	
3.	Pemenuhan Kebutuhan P2UPD	n/a	79%	79%	79%	
4.	Persentase Auditor yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	n/a	76%	90%	100%	
5.	Persentase P2UPD yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	n/a	44%	93%	100%	
6.	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	76%	77%	68%	68%	
7.	Jumlah Rekomendasi BPK	112	39	41	-	
8.	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	%	82%	85%	85,50%	
9.	Nilai maturitas SPIP	3	3	3	3	3
10.	Zona Kepatuhan Pelayanan Publik	Hijau	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau
11.	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
12.	Kasus Tipikor pada Pemprov Kepulauan Riau	2	2	3	0	

Sumber: Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, 2021 dan 2022

Berdasarkan hasil Quality Assurance BPKP atas penilaian mandiri yang dilakukan Inspektorat Daerah, level kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada pada Level 3 (Dengan Catatan). Dari 6



elemen dan 151 pernyataan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu memenuhi sebanyak 140 pernyataan.

Sementara itu, capaian kinerja tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat belum cukup maksimal. Pada tahun 2020 persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat sebanyak 68%. Hal ini disebabkan oleh sejumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat terbit pada akhir tahun sehingga data pada akhir tahun 2020 terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti. Penyebab lainnya masih rendahnya tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah adalah rendahnya komitmen kepala perangkat daerah atas tindaklanjut. Sedangkan untuk pemeriksaan BPK atas Pemeriksaan Keuangan, kinerja dan dan pemeriksaan tujuan tertentu cukup tinggi yaitu sebesar 85%.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 34 dan Pasal 35, Gubernur melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan internal terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk menjamin kualitas pelayanan publik di daerah. Hasil pengawasan terhadap pelayanan publik pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat kategori “Hijau” pada tahun 2021.

Selain Ombudsman, lembaga pemerintah lainnya yang melaksanakan pengawasan khususnya bidang pencegahan pada pemerintah daerah adalah KPK RI. Sejak tahun 2017, KPK telah melaksanakan program koordinasi dan supervisi yang terintegrasi pada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diberikan penilaian atas capaian indikator rencana aksi pencegahan korupsi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018-2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih zona “hijau”. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong fungsi pengawasan yang efektif baik yang dilaksanakan oleh APIP, pengawas eksternal maupun oleh aparat penegak hukum.

Meskipun penilaian dari lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat penilaian yang cukup baik, namun nyatanya kasus korupsi masih saja terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang dicapai belum terinisialisasi dengan baik pada program-program khususnya pada sektor pelayanan publik. Hal ini disebabkan belum maksimalnya koordinasi yang terintegrasi antara APIP dan APH, sehingga fungsi pencegahan atas tindakan koruptif belum dapat diminimalisir dan indikator pencegahan korupsi belum dapat terinisialisasi pada program dan kegiatan pembangunan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.



2.1.3.7. Pemerintahan Umum

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran kerukunan umat beragama di suatu wilayah. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan yang semula tahun 2020 sebesar 67,46 menjadi sebesar 76,20 pada tahun 2021. Selain itu, berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Agama di Kepulauan Riau, Indeks Kesalehan Umat Beragama juga meningkat dari 82,52 pada tahun 2020 menjadi 83,92 pada tahun 2021.

Dengan indeks KUB tahun 2021 sebesar 76,20 menempatkan Provinsi Kepulauan Riau pada peringkat ke-9 tertinggi se-Indonesia. Indeks KUB Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera dan Jawa. KUB Kepulauan Riau dari tahun ke tahun diharapkan semakin baik, yang dapat mengindikasikan makin terpeliharanya kerukunan umat beragama dan menciptakan kehidupan keagamaan yang toleran dan damai.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Nilai konsumsi rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data BPS menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kepulauan Riau maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam konsumsi akhir PDRB menurut pengeluaran. Dari tabel di bawah, dapat diketahui bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor di Kepulauan Riau digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.



Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2021 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selama periode 2017–2021, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cenderung berfluktuasi, yaitu 40,60 persen (2017); 39,89 persen (2018); 39,95 persen (2019); 42,89 persen (2020) dan 40,76 persen (2021). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 42,88 persen dan terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 39,89 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, pada perkiraan atas dasar harga konstan 2010, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Kepulauan Riau meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita secara “riil” pada tahun 2016-2019 berkisar antara 2,42 s.d 3,89 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan konsumsi per kapita. Terjadi penurunan konsumsi per kapita pada tahun 2021 sebesar -2,09 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.



Tabel 2.182
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a.ADHB (Miliar Rp)	92.444,11	99.260,51	106.928,43	109.034,72	112.349,42
b.ADHK 2010 (Miliar Rp)	64.903,13	68.190,22	71.762,51	72.143,07	72.703,67
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	40,60	39,89	39,95	42,89	40,76
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)					
a.ADHB	44.386,79	46.458,94	47.702,47	52.979,91	53.039,07
b.ADHK 2010	31.163,07	31.916,47	32.014,40	35.054,28	34.322,70
Pertumbuhan (%)					
Total konsumsi RT	6,40	5,06	5,24	0,53	0,78
Per kapita	3,61	2,42	0,31	9,50	-2,09
Jumlah penduduk (000 org)	2.082,69	2.136,52	2.241,57	2.058,04	2.118,24

Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2022

2. Pengeluaran Konsumsi Nonpangan Perkapita (Persentase Konsumsi Rumah Tangga Nonpangan)

Selain dilihat dari nilainya, pola konsumsi rumah tangga juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Persentase pengeluaran untuk pangan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian masyarakat. Persentase konsumsi rumah tangga nonpangan Provinsi Kepulauan Riau dan persentase konsumsi rumah tangga non pangan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.183
Persentase Konsumsi Rumah Tangga Nonpangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Total Pengeluaran Rumah Tangga Nonpangan	805.334	826.448	989.093	n/a
2.	Total Pengeluaran	1.564.877	1.574.392	1.778.150	1.465.121
3.	Rasio	51,5	52,5	55,6	n/a

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.



Pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021, NTP Provinsi Kepulauan Riau umumnya mengalami peningkatan kecuali pada gthahun 2018 menglami penurunan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, NTP mencapai nilai tertinngi pada tahun 2021 yakni 104,37. NTP Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan, dimana NTP tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 107,29 dan terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 103,23. NTP tahun 2021 yang mencapai 104,37 (diatas 100) menunjukkan bahwa petani mengalami surplus. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannnya. Dengan demikian tingkat kesejahteraan petani tahun 2021 lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani tahun sebelumnya.



Gambar 2.82
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

1. Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif adalah lahan yang digunakan untuk budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan. Wilayah produktif terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan perikanan. Persentase wilayah produktif Provinsi Kepulauan Riau dan persentase wilayah produktif Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.184
Persentase Luas Wilayah Produktif Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2020
1.	Luas Wilayah Produktif	226.451	226.451	226.451	226.451	226.451
2.	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	708.172	708.172	708.172	708.172	708.172
3.	Rasio	31,9%	31,9%	31,9%	31,9%	31,9%

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Perda No. 1 Tahun 2017)



Tabel 2.185
Persentase Luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
1	Kota Tanjungpinang	0	13.941	0
2	Kabupaten Bintan	18.864	100.151	18,8 %
3	Kota Batam	9.624	77.999	12,3 %
4	Kabupaten Karimun	39.914	83.868	47,5 %
5	Kabupaten Lingga	92.268	189.620	48,6 %
6	Kabupaten Kepulauan Anambas	24.404	59.528	41,0 %
7	Kabupaten Natuna	41.375	183.062	22,6 %

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Perda No. 1 Tahun 2017)

Wilayah produktif di sini merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dengan satuan luasan hektar di dalam rencana pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Riau, luas kawasan peruntukan pertanian yang direncanakan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau ini adalah 20 tahun sampai dengan sebelum adanya revisi perubahan sebagaimana Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki rentang waktu tahun 2017-2037. RTRW Provinsi Kepulauan Riau di-Perda-kan pada tahun 2017, sehingga data pada tahun 2016 belum dapat dihitung berdasarkan peruntukan ruang pertanian di dalam rencana pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Riau.

2. Jumlah Penginapan/Hotel

Data BPS menunjukkan jumlah hotel di Kepulauan Riau selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat kecuali pada tahun 2021. Pada periode 2017 sampai dengan 2020 jumlah hotel meningkat, namun pada tahun 2021 mengalami oenurunan draftis dari 329 hotel menjadi 296 hotel. Penurunan ini merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19. Namun bila ditinjau dari jumlah kamar, mengalami flukтусi. Penurunan jumlah hotel tidak selalu diikuti dengan penurunan jumlah kamar. Pada tahun 2021, jumlah kamar hotel sebanyak 8.683 kamar, ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 8.390 kamar. Jumlah hotel terbanyak terdapat di Kota Batam beejumlah 124 hotel dan yang paling sedikit di Bintan dan Kepulauan Anambas yakni 14 hotel. Secara rinci jumlah hotel dan jumlah kamar hotel dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.186
Jumlah Hotel dan Kamar Hotel di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/ Kota	Hotel					Kamar Hotel				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Karimun	61	60	61	50	46	883	1.033	1.847	1.412	1.320
2	Bintan	15	16	17	18	14	343	398	398	468	292
3	Natuna	39	42	41	40	43	318	344	590	752	585
4	Lingga	23	22	23	24	22	358	378	548	490	441
5	Kepulauan	16	16	14	15	14	99	109	257	328	258

No	Kabupaten/ Kota	Hotel					Kamar Hotel				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Anambas										
6	Batam	122	129	128	142	124	4.497	4.819	5.027	3.809	4.814
7	Tanjungpinang	27	39	42	40	33	920	1.036	1.465	1.131	973
Provinsi Kepulauan Riau		313	324	326	329	296	7.418	8.1176	10.132	8.390	8.683

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

3. Jumlah Restoran

Jumlah restoran di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, kecuali pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Jumlah restoran terbanyak pada periode 2017-2021 adalah tahun 2018 sebanyak 456 restoran. Pada tahun 2021, jumlah restoran mengalami jumlah terendah yaitu 420 restoran. Penurunan drastis dari tahun sebelumnya disebabkan kondisi perekonomian yang memburuk serta pembatasan mobillitas orang akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, restoran terbanyak terdapat di Kota Batam yaitu 223 unit dan paling sedikit di Natuna sejumlah 4 unit.

Tabel 2.187
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Karimun	68	66	67	54	Belum rilis
2	Kabupaten Bintan	32	42	46	52	Belum rilis
3	Kabupaten Natuna	39	42	41	4	Belum rilis
4	Kabupaten Lingga	23	22	23	20	Belum rilis
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	16	16	14	19	Belum rilis
6	Kota Batam	210	221	213	223	Belum rilis
7	Kota Tanjungpinang	44	45	49	49	Belum rilis
Provinsi Kepulauan Riau		433	456	453	420	Belum rilis

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rentang waktu tahun 2017-2020 DPMPSTSP telah menerbitkan permohonan perizinan seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.188
Pelayanan Perizinan DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	2018	2019	2020
			2017			
1	Jumlah Izin dan Non Perizinan yang dilayani oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Izin	1.011	1.938	1.348	2.505
2	Jumlah Jenis Izin dan Non Izin yang Diterbitkan DPMPSTSP	Jenis	154	154	158	157
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	%	76,61	77,2	82,34	81,93
4	Jumlah Permohonan Izin yang Terlayani melalui Sistem Pelayanan Informasi dan PERizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Permohonan Izin	493	242	NA	NA

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

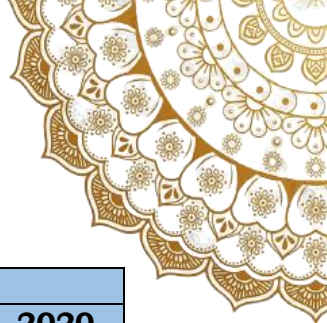


Dari tabel di atas dapat dilihat terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pelayanan perizinan dari tahun 2018 ke tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peralihan sistem pelayanan ke Online Single Submission (OSS). Pelayanan melalui sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan mulai dari izin prinsip, izin prinsip perluasan, izin prinsip alih status, izin prinsip penggabungan dan izin perubahan, yang sebelumnya terdata melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Dengan diberlakukannya system OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission, para investor diharuskan pendaftaran ulang izin usahanya melalui sistem yang baru ini.

Sebagai evaluasi dan perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kepri. pada survey yang dilakukan pada pelayanan tahun 2020, DPMPTSP mendapat kategori sangat baik untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dan juga Persentase Pelayanan Sesuai SOP. Capaian ini memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Responden pada survey pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah para pengguna layanan perizinan dan non perizinan (sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018). Total responden yang diikutsertakan berjumlah 78 orang responden.

Proses pelaksanaan verifikasi dan penerbitan perizinan pada Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk penerbitan pada sektor penanaman modal tahun 2020, DPMPTSP Kepulauan Riau memberi jangka waktu penyelesaian selama 5 hari kerja atau Normatif satu minggu kerja.

Terkait perubahan jangka waktu penyelesaian pada SP dan SOP tahun 2018 dan tahun 2020, Hal tersebut sudah menjadi bahasan dan sudah dilakukan FGD Evaluasi bersama tim ahli. Alasannya, karena pada sektor penanaman modal masih ada beberapa jenis perizinan yang belum sepenuhnya terealisasi dengan maksimal dalam jangka waktu 3 hari tersebut.



Tabel 2.189
Rata-Rata Lama Perizinan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Sektor dan Jenis Perizinan	Tahun					2020
		2015*	2016*	2017**	2018***	2019***	
A	Sektor Penanaman Modal						
1	-Izin Prinsip Penanaman Modal	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
2	-Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
3	-Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
4	-Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
5	-Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
6	-Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
7	-Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
8	-Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
9	-Izin Pembukaan Kantor Cabang	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
10	-Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
11	-Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
12	-Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
13	-Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
14	-Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari

Keterangan

**Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.*

***Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor: 821.2/20 SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.*

****Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 857 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.*



2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung daya saing daerah dan pembangunan daerah. Pembangunan sumber daya manusia merupakan sektor strategis yang harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator Rasio Ketergantungan dan Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 untuk mengetahui potensi sumber daya manusia yang dimiliki.

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3)

Rasio pendidikan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang mengenyam pendidikan tinggi dalam empat tahun menunjukkan perkembangan meskipun masih kecil. Pada tahun 2019 rasio lulusan sebesar 3,63.

Tabel 2.190
Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lulusan S-1	64.271	70.403	72.811	75.826
2.	Jumlah lulusan S-2	2.862	3.192	3.302	3,453
3.	Jumlah lulusan S-3	146	157	167	181
4.	Jumlah lulusan S-1/ S-2/S-3	67.279	73.752	76.280	79.460
5.	Jumlah Penduduk	2.028.169	2.082.694	2,136,521	2,189,653
6.	Rasio Lulusan S-1/S- 2/S-3 (4/5)	3,23	3,54	3,57	3,63

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, 2020

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Struktur penduduk dapat memberikan kontribusi ekonomi pada suatu daerah. Meskipun demikian pemerintah daerah harus tetap mengendalikan laju pertumbuhannya. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka akan menjadi beban bagi pemerintah daerah, termasuk pada ketersediaan pangan dan daya dukung alam serta lingkungan. Rasio ketergantungan merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui bonus demografi yang akan berguna bagi pembangunan di bidang kependudukan. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun.

Berdasarkan data kependudukan dari BPS maka dapat dihitung rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini sangat positif sebab tingkat ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk



produktif semakin berkurang. Tahun 2017 menunjukkan rasio ketergantungan sebesar 48,85 persen dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sampai mencapai 43,20 persen pada tahun 2021. Rasio ketergantungan adalah sebesar 43,20 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.191
Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	640.012	63.2262	644.297	554.899	560.344
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	44.236	51.135	58.986	73.010	78.709
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1 + 2)	684.248	683.397	703.283	627.909	639.053
4	Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 tahun (Usia produktif)	1.398.446	1.399.297	1.486.370	1.436.655	1.479.186
5	Rasio Ketergantungan	48,93	48,85	47,31	43,70	43,20

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau; dan BPS Provinsi Kepulauan Riau, diolah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

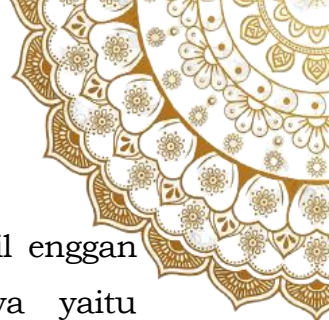
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dimaksudkan untuk mengetahui capaian program, kegiatan dan sub kegiatan, baik capaian indikator kinerja maupun anggaran. Capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disajikan pada subbab ini merupakan realisasi triwulan I 2022. Realisasi tahun-tahun sebelumnya tidak disajikan sebab merupakan kinerja RPJMD periode sebelumnya. Namun untuk keberlanjutan capaian pembangunan, maka di bawah ini disajikan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Pencapaian target kinerja indikator sasaran pada tahun 2021 terhadap target RPJMD tahun 2021 dari sejumlah 50 indikator sasaran diketahui hasil sebagai berikut: sebanyak 35 indikator (70,00%) dengan status kinerja sangat tinggi, sebanyak 4 indikator (8,00%) memiliki status tinggi, sebanyak 6 indikator (12,00%) memiliki status kinerja sedang, dan sebanyak 5 indikator (10,00%) memiliki status sangat rendah. Dengan demikian disimpulkan bahwa indikator sasaran RPJMD yang memiliki kinerja baik (sangat tinggi dan tinggi, dan sedang) sejumlah 45 indikator (90,00%).

Indikator sasaran yang capaiannya sangat rendah sebagai berikut:



1. Persentase bangunan yang berciri khas melayu, disebabkan oleh: Dinas Kebudayaan Provinsi belum optimal melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu ini sehingga masih banyak bangunan di Pemerintah daerah pada khususnya dan pihak swasta dan pihak lainnya pada umumnya di yang belum memahami isi dari Peraturan Daerah tersebut, dikarenakan belum dijabarkan dalam Peraturan Pelaksanaannya melalui Peraturan Gubernur sampai kepada Peraturan Bupati maupun Peraturan Walikota. Selain itu Dinas kebudayaan belum membentuk Tim ahli bangunan berciri khas melayu agar dapat dilakukannya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Bangunan Berciri Khas Melayu sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 5 bab IV pada Peraturan Daerah Bangunan berciri khas melayu nomor 1 tahun 2019 di Tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah dalam mendirikan bangunan yang berciri khas melayu di Provinsi Kepri. Disamping itu juga belum optimal koordinasi antar Provinsi Kepulauan Riau bersama kabupaten/kota dalam hal pemberian penghargaan bagi pihak manapun yang melakukan Pendirian Bangunan Berciri Khas Melayu di wilayah Provinsi Kepri sesuai pada Pasal 22 poin 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu.
2. Persentase santri yang menjadi hafiz tidak mencapai target disebabkan oleh kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator tidak dapat terealisasi karena pandemi Covid-19 yang sedang terjadi mengakibatkan segala kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak (pertemuan tatap muka dalam proses pembelajaran) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tidak mencapai target disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang mengandung sanksi.
4. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH tidak mencapai target disebabkan oleh: Ibu hamil yang mengalami gejala mirip Covid-19 lebih memilih untuk isolasi mandiri di rumahnya. Selain itu, pilihan untuk hanya menjalani isolasi mandiri di rumah juga dikarenakan RS sebagai fasilitas perawatan banyak yang penuh. Padahal seharusnya ibu hamil sebagai masyarakat risiko tinggi harus dirawat di RS jika positif Covid-19 karena perburukan bisa terjadi kapan saja dan ibu hamil cenderung mengalami stress saat menjalani isolasi/perawatan karena Covid-19 yang kemudian memperburuk kondisi kesehatannya. Selain itu kunjungan ibu hamil (K1 dan K4) untuk mendapatkan pelayanan antenatal di fasilitas pelayanan kesehatan menurun selama pandemi Covid-19 terutama saat



kasus aktif Covid-19 melonjak tinggi mengakibatkan ibu hamil enggan memeriksakan kehamilannya ke faskes. Penyebab lainnya yaitu kurangnya ketersediaan sarana prasarana perawatan pasien Covid-19 di RS, salah satunya tabung oksigen dan alat-alat stabilisasi pasien Covid-19. Disamping itu, banyak tenaga kesehatan puskesmas sebagai lini pertama yang memberikan layanan kesehatan pada ibu hamil dan bersalin yang positif Covid-19 sehingga kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini faktor resiko ibu hamil menurun. Dengan demikian pemantauan bagi ibu hamil yang menjalani isolasi mandiri juga kurang bisa dilaksanakan secara maksimal.

5. Kunjungan wisata tidak mencapai target disebabkan oleh tidak terlaksananya Travel Bubble (tidak tercapainya Proposal Membuka Border Singapura dan Malaysia); tidak adanya promosi berskala internasional melalui media internasional yang memiliki jangkauan audiens yang luas dan kredibel sebagai sarana informasi untuk merangsang minat calon wisatawan berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau; dan kurangnya penyelenggaraan event internasional.

Secara rinci Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 dimuat pada tabel di halaman selanjutnya.



Tabel 2.192
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

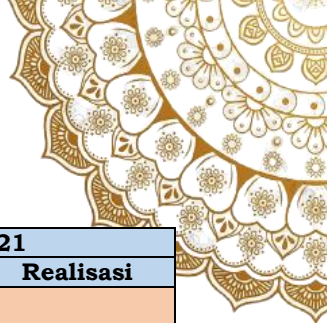
No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2017		2018		2019		2020		2021	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Misi 1: Mengembang kan perikehidupa n masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu													
1	Melestarikan Budaya Melayu dan nilai-nilai agama												
1.1.	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	6,02	8,28	16,54	13,44	32,33	14,32	49,70	26,16	70,75	28,89
		Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	%	19,58	19,58	20,28	19,93	20,98	22,03	21,68	22,38	22,38	26,22
1.2	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	NA	NA	25	25	50	50	80	80	100,00	100,00
		Persentase santri yang menjadi hafiz	%	20	NA	40	NA	60	NA	80	25	100,00	25,00
2	Meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat												
2.1	Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Kasus	250	240	230	240	200	235	185	0	150	12.777
		Angka kriminalitas	Kasus	4.880	NA	4.875	NA	4.870	NA	4.865	3.379	4.860	3.379
Misi 2: Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.													
1	Meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota												
1.1	Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	%	67,97	67,3	69,73	70,31	71,49	73,64	73,24	74,51	75	76,38
1.2	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	71,43	71,43	71,43	71,43	85,71	71,43	92,86	71,43	100,00	71,43
		Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	77,78	77,78	77,78	77,78	88,89	88,89	100	133,33	100,00	133,33
		Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	64,71	58,82	73,53	73,53	82,35	82,35	91,18	97,06	100,00	100,00
		Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	55,56	55,56	66,67	55,56	77,78	55,56	88,89	77,78	100,00	88,89



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2017		2018		2019		2020		2021	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Meningkatkan ketersediaan insfrastruktur pelayanan dasar												
2.1	Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	%	68,48	58,22	73,48	61,01	78,48	61,44	83,48	62,98	72,75	66,54
2.2	Meningkatnya akses pelayanan air bersih	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	%	89,44	89,44	92,19	92,15	96,79	92,47	97,59	92,68	100	92,72
2.3	Berkurangnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh	Ha	752,99	752,62	627,69	529,82	549,53	476,85	379,57	399,8	255,09	31,45
2.4	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	%	89,15	91,44	90,50	91,5	91,50	92,59	92,50	93,72	94,5	94,50
Misi 3: Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.													
1	Meningkatkan kualitas pendidkan dan keterampilan sumber daya manusia												
1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,83	9,69	9,99	9,79	10,15	9,81	10,31	10,12	97,23	10,18
		Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B	%	76,00	72,81	78,00	74	80,00	62,5	82,00	73,76	66,46	66,46
1.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,3	66,41	66,68	64,72	67,05	64,76	67,43	67,50	67,80	68,27
		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	56	48,8	58	60,5	60	60,69	62	64,31	64,00	79,27
Misi 4: Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)													
1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat												
1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	132	131	131	130	130	98	129	92	128	241
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	34	18	33	15	32	13	31	11	30	15
		Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	17,4	16,4	17,1	13	16,8	11,9	16,5	5,6	16,2	13,4
1.2	Angka	Persentase penduduk	%	6,13	6,13	6,07	5,83	5,98	5,8	5,83	5,92	5,68	5,75



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2017		2018		2019		2020		2021	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	kemiskinan menurun	miskin											
2	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan												
2.1	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,75	92,96	94,00	92,97	94,25	NA	94,50	93,10	94,75	93,49
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,5	66,96	61,8	66,18	62,0	NA	62,25	61,58	62,5	62,02
Misi 5: Meneruskan pengembang an ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.													
1	Meningkatkan pengembangan perekonomian pariwisata dan kemaritiman												
1.1	Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	304.019	304.038,71	304.628	304.975,02	305.239	309.287,15	305.850	319.196,89	306.463,00	310.025,08
		Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.649	34.302	33.717	34.399,86	33.785	33.003,11	33.852	21.421,10	33.920,00	22754,71
		Jumlah produk olahan Hasil perikanan	Ton	1.320	1.902,48	1.323	1.336,82	1.326	1.803,55	1.328	6.205,90	1.331,00	12.238,24
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,2	2,07	2,25	2,63	2,3	2,86	2,4	0,41	2,5	0,003103
2	Meningkatkan Produksi Pertanian dan ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat												
2.1	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Ton	39.936	40.301	41.692	46.659	43.239	72.654,9	44.644	57.401	45.822	56610
		Jumlah Produksi Tanaman Palawija	Ton	12.367	19.531,5	12.679	14.957	12.679	14.957	12.742	20.606,84	12.742	15362,93
		Jumlah Produksi Padi	Ton	792	601	850	833	1.020	1167,8	1.020	852,54	1.020	877,29
2.2	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10	9,2	CV < 10	9,2	CV < 10	9,26	CV < 10	11,7	CV < 10	9,01
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	89,00	88,4	90,00	87,0	91,00	89,1	92,00	89,1	93	100



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2017		2018		2019		2020		2021	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Misi 6: Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembang an usaha mikro, kecil dan menengah.													
1	Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif												
1.1	Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp Milyar	7.300	13.823	7.500	11.138	7.700	20.450	7.900	23.751	8.100	15.238
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	500	1.398	600	4.385	700	5.656	800	14.249	900	9.768
		Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	18,5	19,8	19,2	19,3	20,19	19,85	21,22	21,27	22,25	22,11
Misi 7: Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.													
1	Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri memanfaatkan bahan baku lokal												
1.1	Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	Unit	1.720	1.750	1.850	1.850	1.969	1.969	2.117	1.964	2200	2200
		Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Juta US \$	1.258,94	2.915,73	1.332,21	3.034,45	1.405,48	2.727,48	1.478,75	3.065,30	1.550,20	3.065,30
1.2	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,19	7	8,27	8,56	8,35	9,07	8,44	8,50	8,52	8,27
Misi 8: Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.													
1	Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup												
1.1	Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	72,73	80	72,73	66,67	81,82	100	90,91	40,00	100	100,00
		Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	%	10,37	NA	10,52	NA	10,68	NA	10,84	16,27	10,99	16,27



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2017		2018		2019		2020		2021	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Misi 9: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas													
1	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi												
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai	70	NA	72	NA	75	NA	78	53,77	80	54,02
		Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	BB	NA	BB	NA	BB	NA	BB	BB	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A-E	B	NA	B	NA	B	NA	B	82,89	B	B
		Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100	62	13,03	63,5	53,87	65	43,24	65	74,18	67,5	79,97
		Nilai e- government	Skala nilai 1-4	2,1	2,1	2,2	2,1	2,3	2,4	2,4	2,80	2,5	1,96
1.2	Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,213	1.091	1,224	1.229	1,330	1.303	1,457	1,191	1,624	1,347
		Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP (belum ada hasil audit BPK, sehingga masih menggunakan data tahun 2020)
		Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	3	3	6	3	3	3	3	3	2+ (belum ada penilaian oleh BPKP, sehingga masih menggunakan data tahun 2020)

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021



Realisasi pelaksanaan program perangkat daerah pada triwulan I 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran sub kegiatan perangkat daerah pada triwulan I 2022 masih sangat rendah sebab pelaksanaan sub kegiatan masih sedikit.
- b. Lima perangkat daerah dengan rata-rata capaian kinerja sub kegiatan perangkat daerah yang tertinggi meliputi: Dinas Kesehatan (36,09%), Badan Penanggulangan Bencana (26,60%), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (24,26%), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (22,02%), dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (21,05%). Selain itu, RSUD Engku Haji Daud sebagai UPTD Dinas Kesehatan juga memiliki rata-rata capaian kinerja yang lebih tinggi dibanding perangkat daerah lain yakni 29,52%.
- c. Lima perangkat daerah dengan rata-rata capaian anggaran sub kegiatan perangkat daerah yang tertinggi meliputi: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (27,05%), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (25,50%), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (20,31%), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (20,17%), dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (19,66%). Sama halnya dengan rata-rata capaian kinerja, RSUD Engku Haji Daud memiliki rata-rata capaian kinerja yang lebih tinggi dibanding perangkat daerah lain yakni 23,04%.

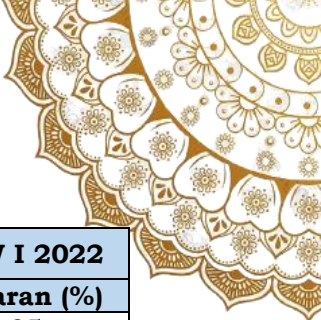
Tindak lanjut untuk pelaksanaan sub kegiatan pada teriwulan berikutnya antara lain:

- 1. Melaksanakan sub kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- 2. Melakukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar unit maupun dengan perangkat daerah lain serta pihak diluar pemda yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 3. Melakukan pemantauan pelaksanaan sub kegiatan secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya sudah sesuai rencana dan output yang akan dihasilkan.

Rincian rata rata-rata capaian kinerja dan anggaran sub kegiatan tirwulan I tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.193
Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I 2022

No.	Perangkat Daerah/Program	Rata-Rata Capaian TW I 2022	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	Dinas Pendidikan	9,54	8,09
2	Dinas Kesehatan	36,09	12,53
	RSUD ENGKU HAJI DAUD	29,52	23,04
	RSUD RAJA AHMAD TABIB	20,39	13,35



No.	Perangkat Daerah/Program	Rata-Rata Capaian TW I 2022	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	10,05	1,25
4	Dinas Perumahan dan Pemukiman	10,79	1,18
5	Satpol PP	12,03	11,30
6	Badan Penanggulangan Bencana	26,60	17,35
7	Dinas Sosial	14,49	14,06
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3,85	10,16
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15,45	6,96
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	16,67	14,94
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11,52	9,87
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16,79	3,62
13	Dinas Perhubungan	12,59	4,11
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	11,60	7,47
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21,05	20,17
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17,66	10,06
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11,48	7,55
18	Dinas Kebudayaan	11,07	16,26
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9,34	19,66
20	Dinas Kelautan Perikanan	14,48	13,48
21	Dinas Pariwisata	14,48	7,75
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	24,26	5,25
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10,63	14,77
24	Sekretariat Daerah:		
a.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	16,15	9,80
b.	Biro Hukum	23,73	9,69
c.	Biro Organisasi	10,56	7,94
d.	Biro Kesejahteraan Rakyat	20,83	7,60
e.	Biro Perekonomian dan Pembangunan	22,78	19,49
f.	Biro Administrasi Pembangunan	19,19	16,99
g.	Biro Pengadaan Barang/Jasa	10,19	11,12
h.	Biro Umum	15,09	7,57
25	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	16,18	4,17
26	Sekretariat DPRD	13,93	12,06
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	17,95	25,50
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset	4,11	20,31
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	19,71	6,26
30	Badan Kepegawaian Daerah	15,61	15,06
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	22,02	9,57
32	Inspektorat	0,00	15,78
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11,00	27,05
34	Badan Penghubung Daerah	4,17	3,73
	Rata-Rata Seluruh Perangkat Daerah	15,25	10,58

Sumber: Evaluasi RKPD Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I 2022

Dalam rangka memberi gambaran perkiraan sejauh mana pencapaian tahun 2022 sebagai tahun pertama RPJMD Tahun 2021-2026, maka dihitung perkiraan realisasi kinerja dan anggaran program tahun 2022. Selanjutnya realisasi tersebut dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD (tahun 2026). Secara rinci perkiraan capaian program tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD disajikan di tabel berikut:



Tabel 2.194
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1 01 1.01.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Pendidikan										
1 01 1.01.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	739.341.658.042	100	477.004.569.687	100	477.004.569.687	100%	64,5%
1 01 1.01.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100,00	85.756.635.526	100,00	354.214.070.179	100,00	354.214.070.179	100%	413,0%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	100,00		98,00		98,00		98%	
		Angka partisipasi kasar (APK) SLB	%	90,00		84,00		84,00		93%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	%	82,00		78,00		78,00		95%	
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,34		0,38		0,38		112%	
		Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	96,60		95,94		95,94		99%	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	100,00		97,43		97,43		97%	
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	33,95		33,75		33,75		99%	
1 01 1.01.0.00.0.00 .01.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	62,00	381.374.124	60,00	19.974.000	60,00	19.974.000	97%	5,2%
		Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	32,00		30,00		30,00		94%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah SMK yang Terevitalisasi	%	35,14		24,32		24,32		69%	
1 01 1.01.0.00.0.00 .01.0000 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	730,00	1.489.175.152	724,76	794.160.700	724,76	794.160.700	99%	53,3%
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1 02 1.02.0.00.0.0 0.02.0000	Dinas Kesehatan										
1 02 1.02.0.00.0.00 .02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100,00	247.832.822.530	100,00	249.164.393.843	100,00	249.164.393.843	100%	100,5%
1 02 1.02.0.00.0.00 .02.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kematian	121	66.690.953.952	125	66.742.050.956	125	66.742.050.956	103%	100,1%
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1.000 Kematian	10		14		14		140%	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,8		15,8		15,8		123%	
		Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100		100		100		100%	
		Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100		100		100		100%	
		Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/Kota	7		2		2		29%	
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	93		90,00		90,00		97%	
		Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	80,00		64,00		64,00		80%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	67,00		43,00		43,00		64%	
		Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	95,50		93,60		93,60		98%	
		Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	71,00		57,00		57,00		80%	
		Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	93,00		89,00		89,00		96%	
		Persentase Puskesmas terakreditasi	%	98,00		96,00		96,00		98%	
		Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	100,00		85,00		85,00		85%	
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	%	96,00		92,00		92,00		96%	
		Status Akreditasi RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib	Status	Internasiona 1		Paripurn a		Paripurn a			
		Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Utama		Satelit		Satelit			
		Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Status	Paripurna		Paripurn a		Paripurn a			
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Indeks	80,00		78,5		78,5		98%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Engku Haji Daud	Indeks	85		81		81		95%	
1 02 1.02.0.00.0.00 .02.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	60	27.706.819.010	52	46.357.342.556	52	46.357.342.556	87%	167,3%
		Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	85		65		65		76%	
		Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	%	60		30		30		50%	
1 02 1.02.0.00.0.00 .02.0000 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	90,00	150.000.000	86,00	18.406.400	86,00	18.406.400	96%	12,3%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 02 1.02.0.00.0.00 .02.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	100,00	1.219.265.427	71,43	1.086.862.000	71,43	1.086.862.000	71%	89,1%
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1 03 1.03.2.10.2.1 0.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataa Ruang dan Pertanahan										
1 03 1.03.2.10.2.10 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						25.108.734.573		25.108.734.573		
1 03 1.03.2.10.2.10 .01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Titik Rawan Banjir	titik	2	17.129.177.564	15	26.650.831.188	15	26.650.831.188	750%	155,6%
		Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	%	37,46		13,53		13,53		36%	
		Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%)	%	65,39		53,69		53,69		82%	
1 03 1.03.2.10.2.10 .01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	%	98,63	24.824.657.339	96,15	2.593.310.790	96,15	2.593.310.790	97%	10,4%
1 03 1.03.2.10.2.10 .01.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	%	35	41.644.607.030	28	863.027.000	28	863.027.000	80%	2,1%
1 03 1.03.2.10.2.10 .01.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	%	100	5.402.978.843	91,32	144.806.125	91,32	144.806.125	91%	2,7%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 1.03.2.10.2.10 .01.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						597.848.500		597.848.500		
1 03 1.03.2.10.2.10 .01.0000 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	%	100	6.033.496.835	100	92.310.644.659	100	92.310.644.659	100%	1530,0%
1 03 1.03.2.10.2.10 .01.0000 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	%	35	41.644.607.030	28	21.467.493.664	28	21.467.493.664	80%	51,5%
1 03 1.03.2.10.2.10 .01.0000 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kondisi baik (%)	%	69,25	277.048.657.033	63,25	261.262.133.495	63,25	261.262.133.495	91%	94,3%
1 03 1.03.2.10.2.10 .01.0000 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%	11,50	1.400.000.000	9,00	1.854.094.365	9,00	1.854.094.365	78%	132,4%
1 03 1.03.2.10.2.10 .01.0000 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	%	100	1.200.000.000	70	3.101.604.560	70	3.101.604.560	70%	258,5%
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1 04 1.04.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1 04 1.04.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	14.500.000.000	100	17.952.334.055	100	17.952.334.055	100%	123,8%
1 04 1.04.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	9.000.000.000	100	674.204.000	100	674.204.000	100%	7,5%
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100		100		100		100%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 04 1.04.0.00.0.00 .01.0000 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase RTLH yang dibenahi	%	30%	35.000.000.000	10%	5.631.060.094	10%	5.631.060.094	33%	16,1%
		Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	100%		15%		15%		15%	
1 04 1.04.0.00.0.00 .01.0000 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Unit	15.000	110.013.567.671	12.000	198.942.619.937	12.000	198.942.619.937	80%	180,8%
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1 05 1.05.0.00.0.0 0.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran										
1 05 1.05.0.00.0.00 .03.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	24.595.007.974	100	19.644.150.804	100	19.644.150.804	100%	79,9%
1 05 1.05.0.00.0.00 .03.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	%	63,33	1.113.963.960	50	3.621.814.726	50	3.621.814.726	79%	325,1%
		Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	%	75		41,67		41,67		56%	
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100		100		100		100%	
1 05 1.05.0.00.0.0 0.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana										
1 05 1.05.0.00.0.00 .04.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	Skor	3,44	1.284.613.758	1,99	8.035.399.118	1,99	8.035.399.118	58%	625,5%
		Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Skor	0,56		0,32		0,32		57%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor	0,80		0,46		0,46		58%	
1 05 1.05.0.00.0.00 .03.0000 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan / atau tindaklanjutnya	%	100	41.467.332	100	669.703.340	100	669.703.340	100%	1615,0%
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1 06 1.06.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Sosial										
1 06 1.06.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100,00	15.768.812.276	100,00	11.935.372.693	100,00	11.935.372.693	100%	75,7%
2 06 1.06.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	19,05	606.754.838	2,98	2.616.417.706	2,98	2.616.417.706	16%	431,2%
		Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	100,00		52,00		52,00		52%	
1 06 1.06.0.00.0.00 .01.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	625.478.913	100,00	2.153.184.447	100,00	2.153.184.447	100%	344,2%
		Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00		100,00		100,00		100%	
		Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	25,00		25,00		25,00		100%	
		Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00		100,00		100,00		100%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00		100,00		100,00		100%	
		Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00		100,00		100,00		100%	
1 06 1.06.0.00.0.00 .01.0000 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,72	980.643.805	0,17	3.395.036.009	0,17	3.395.036.009	24%	346,2%
		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	5,84		0,79		0,79		14%	
		Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63		31,63		31,63		100%	
1 06 1.06.0.00.0.00 .01.0000 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00	406.525.741	100,00	925.760.340	100,00	925.760.340	100%	227,7%
1 06 1.06.0.00.0.00 .01.0000 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						282.861.200		282.861.200		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2 07 2.07.3.32.0.00 .02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi										
2 07 2.07.3.32.0.00 .02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100,00	33.675.419.223	100,00	26.048.879.336	100,00	26.048.879.336	100%	77,4%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 07 2.07.3.32.0.00 .02.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%	100	271.104.083	100	50.000.000	100	50.000.000	100%	18,4%
2 07 2.07.3.32.0.00 .02.0000 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	71,79	4.557.672.727	51,28	4.701.751.700	51,28	4.701.751.700	71%	103,2%
		Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	%	15		6		6		40%	
		Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	57,14		40,00		40,00		70%	
2 07 2.07.3.32.0.00 .02.0000 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	65,00	1.412.176.537	61,00	66.998.500	61,00	66.998.500	94%	4,7%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,65		67,55		67,55		100%	
2 07 2.07.3.32.0.00 .02.0000 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	55	815.958.883	35	45.826.300	35	45.826.300	64%	5,6%
		Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	%	100		100		100		100%	
2 07 2.07.3.32.0.00 .02.0000 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	15,8	1.175.212.285	11,8	842.856.100	11,8	842.856.100	75%	71,7%
		Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	96,25		95,25		95,25		99%	
		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	77,5		75,5		75,5		97%	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 08 2.08.2.14.0.0 0.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana										
2 08 2.08.2.14.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100,00	18.996.740.287	100,00	13.240.153.886	100,00	13.240.153.886	100%	69,7%
2 08 2.08.2.14.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	5,8	369.750.379	5,4	2.326.442.065	5,4	2.326.442.065	93%	629,2%
		Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	29,30		28,75		28,75		98%	
		Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	%	12		11,10		11,10		93%	
2 08 2.08.2.14.0.00 .01.0000 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	%	43,33	338.649.880	44,07	787.294.100	44,07	787.294.100	102%	232,5%
2 08 2.08.2.14.0.00 .01.0000 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	29,3	326.209.680	28,75	1.647.742.469	28,75	1.647.742.469	98%	505,1%
2 08 2.08.2.14.0.00 .01.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	%	66,67	27.644.888	46,15	44.974.300	46,15	44.974.300	69%	162,7%
2 08 2.08.2.14.0.00 .01.0000 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	77,60	131.313.219	73,60	1.009.442.392	73,60	1.009.442.392	95%	768,7%
2 08 2.08.2.14.0.00 .01.0000 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	87,84	69.112.220	86,64	592.358.000	86,64	592.358.000	99%	857,1%
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2 09 2.09.3.27.0.0 0.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 09 2.09.3.27.0.00 .02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	32.586.357.821	100	19.368.228.473	100	19.368.228.473	100%	59,4%
2 09 2.09.3.27.0.00 .02.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	117%	778.248.991	113%	615.000.000	113%	615.000.000	97%	79,0%
		Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	≤11		≤11%		≤11%		100%	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	90,10%		86,90%		86,90%		96%	
2 09 2.09.3.27.0.00 .02.0000 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%	≤10	278.669.732	≤10	48.800.000	≤10	48.800.000	100%	17,5%
2 09 2.09.3.27.0.00 .02.0000 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	100	32.586.357.821	100	200.000.000	100	200.000.000	100%	0,6%
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
1 03 1.03.2.10.2.1 0.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan										
2 10 1.03.2.10.2.10 .01.0000 03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%)	%	100	150.000.000	100	234.076.198	100	234.076.198	100%	156,1%
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2 11 2.11.3.28.0.0 0.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
2 11 2.11.3.28.0.00 .02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	41.428.983.302	100	27.465.399.790	100	27.465.399.790	100%	66,3%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 11 2.11.3.28.0.00 .02.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	100	185.030.639	100	488.502.000	100	488.502.000	100%	264,0%
2 11 2.11.3.28.0.00 .02.0000 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	46,67%	50.580.770	33,33%	444.314.800	33,33%	444.314.800	71%	878,4%
2 11 2.11.3.28.0.00 .02.0000 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100%	47.066.312	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	318,7%
2 11 2.11.3.28.0.00 .02.0000 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	%	30%	75.273.822	26%	75.000.000	26%	75.000.000	87%	99,6%
		Persentase Penanganan Sampah	%	70%		73%		73%		104%	
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2 12 2.12.2.13.0.0 0.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
2 12 2.12.2.13.0.00 .02.0000 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	%	100	320.000.000	100	374.988.500	100	374.988.500	100%	117,2%
2 12 2.12.2.13.0.00 .02.0000 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	%	100	514.195.475	100	65.000.000	100	65.000.000	100%	12,6%
2 12 2.12.2.13.0.00 .02.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	%	100	739.436.185	100	767.959.149	100	767.959.149	100%	103,9%
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 12 2.12.2.13.0.0 0.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
2 13 2.12.2.13.0.00 .02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	13.614.469.331	100	11.236.903.344	100	11.236.903.344	100%	82,5%
2 13 2.12.2.13.0.00 .02.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	61,93	557.847.195	25,68	90.000.000	25,68	90.000.000	41%	16,1%
2 13 2.12.2.13.0.00 .02.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas	%	72,62	1.255.836.642	44,64	20.422.345.900	44,64	20.422.345.900	61%	1626,2%
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2 08 2.08.2.14.0.0 0.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana										
2 14 2.08.2.14.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Contraceptive Prevalence Rate	%	59,75	124.401.997	49,01	49.421.000	49,01	49.421.000	82%	39,7%
2 14 2.08.2.14.0.00 .01.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	61	221.159.105	59,30	413.765.385	59,30	413.765.385	97%	187,1%
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2 15 2.15.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Perhubungan										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 15 2.15.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17.741.265.467		17.741.265.467		
2 15 2.15.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Trayek	10	1.599.841.857		1.627.000.406		1.627.000.406	0%	101,7%
2 15 2.15.0.00.0.00 .01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%		16.353.938.987	20,00	69.333.981.993	20,00	69.333.981.993		424,0%
		Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Lintas			16		16			
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2 16 2.16.2.21.2.2 0.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika										
2 16 2.16.2.21.2.20 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	16.752.754.896	100	11.987.278.570	100	11.987.278.570	100%	71,6%
2 16 2.16.2.21.2.20 .01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	86	3.549.182.323	78	23.733.828.185	78	23.733.828.185	91%	668,7%
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	60%		20%		20%		33%	
2 16 2.16.2.21.2.20 .01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	40%	3.728.549.088	20%	9.249.956.270	20%	9.249.956.270	50%	248,1%
		Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00%		82,93%		82,93%		83%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 16 2.16.2.21.2.20 .01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	40%	3.728.549.088	20%	9.249.956.270	20%	9.249.956.270	50%	248,1%
		Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00%		82,93%		82,93%		83%	
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2 17 2.17.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
2 17 2.17.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	16.574.026.015	100		100		100%	0,0%
2 17 2.17.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PELAYANAN IZINUSAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	31,34%	450.325.856	11,34%	104.000.000	11,34%	104.000.000	36%	23,1%
2 17 2.17.0.00.0.00 .01.0000 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi	%	6,53%	177.760.206	2,53%	104.000.000	2,53%	104.000.000	39%	58,5%
2 17 2.17.0.00.0.00 .01.0000 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	33,80%	674.303.716	13,80%	2.419.964.000	13,80%	2.419.964.000	41%	358,9%
		Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	%	1,24%		0.44 %		0,44%		35%	
2 17 2.17.0.00.0.00 .01.0000 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						2.419.964.000		2.419.964.000		
2 17 2.17.0.00.0.00 .01.0000 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	39%	1.100.160.761	31%	756.078.202	31%	756.078.202	80%	68,7%
2 17 2.17.0.00.0.00 .01.0000 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	Rasio Wirausaha Baru	%	30%	940.944.026	28%	895.521.380	28%	895.521.380	93%	95,2%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DAN USAHA MIKRO (UMKM)										
2 17 2.17.0.00.0.00 .01.0000 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	40%	5.676.475.924	26%	5.183.631.020	26%	5.183.631.020	65%	91,3%
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2 18 2.18.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP										
2 18 2.18.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN EMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	16.923.622.420	100	13.807.380.927	100	13.807.380.927	100%	81,6%
2 18 2.18.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	100	462.176.537	100	255.063.656	100	255.063.656	100%	55,2%
		Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%	100		100		100		100%	
2 18 2.18.0.00.0.00 .01.0000 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	12%	1.422.081.651	7%	352.295.130	7%	352.295.130	58%	24,8%
2 18 2.18.0.00.0.00 .01.0000 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	100	2.180.525.198	80	864.781.877	80	864.781.877	80%	39,7%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	86,1		83,15		83,15		97%	
2 18 2.18.0.00.0.00 .01.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	592.534.021	100	904.936.633	100	904.936.633	100%	152,7%
2 18 2.18.0.00.0.00 .01.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	%	100	213.312.248	100	135.077.260	100	135.077.260	100%	63,3%
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2 19 2.19.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga										
2 19 2.19.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	1	48.287.147.943	100	16.319.976.430	100	16.319.976.430	10000 %	33,8%
2 19 2.19.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,51	1.501.564.377	0,46	2.687.015.600	0,46	2.687.015.600	90%	178,9%
		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	5,80		4,80		4,80		83%	
2 19 2.19.0.00.0.00 .01.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	0,00	12.369.920.437	0,00	17.120.538.412	0,00	17.120.538.412	100%	138,4%
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	0,01		0,01		0,01		74%	
		Cakupan Pembinaan Olahraga	%	0,25		0,19		0,19		77%	
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	0,50		0,38		0,38		77%	
2 19 2.19.0.00.0.00 .01.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	%	9,63	78.669.632	8,43	945.832.600	8,43	945.832.600	88%	1202,3%
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2 16 2.16.2.21.2.2 0.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika										
2 20 2.16.2.21.2.20 .01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	343.669.732	100	114.452.000	100	114.452.000	100%	33,3%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100		100		100		100%	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						99.350.880		99.350.880		
2 16 2.16.2.21.2.2 0.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika						99.350.880		99.350.880		
2 21 2.16.2.21.2.20 .01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks KAMI	83,52	204.874.563	68,13	99.350.880	68,13	99.350.880	82%	48,5%
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						17.335.070.424		17.335.070.424		
2 22 2.22.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Kebudayaan				21.519.738.131		17.335.070.424		17.335.070.424		
2 22 2.22.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100		100	11.065.859.428	100	11.065.859.428	100%	
2 22 2.22.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	20,55%	834.865.784	16,75%	2.415.755.844	16,75%	2.415.755.844	82%	289,4%
		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	%	1,69%		1,49%		1,49%		88%	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	%	66,93%		51,01%		51,01%		76%	
2 22 2.22.0.00.0.00 .01.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	%	28,27%	115.690.636	20,00%	1.276.651.344	20,00%	1.276.651.344	71%	1103,5%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 22 2.22.0.00.0.00 .01.0000 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	%	100	115.690.636	100	1.687.662.364	100	1.687.662.364	100%	1458,8%
2 22 2.22.0.00.0.00 .01.0000 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	49,23%	252.397.540	31,75%	577.307.428	31,75%	577.307.428	64%	228,7%
2 22 2.22.0.00.0.00 .01.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	%	15,06%	169.129.505	12,76%	311.834.016	12,76%	311.834.016	85%	184,4%
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						18.996.084.331		18.996.084.331		
2 23 2.23.2.24.0.0 0.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						18.996.084.331		18.996.084.331		
2 23 2.23.2.24.0.00 .02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	22.780.226.163	100	16.366.635.071	100	16.366.635.071	100%	71,8%
2 23 2.23.2.24.0.00 .02.0000 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	78,4	483.654.416	62,47	2.287.951.220	62,47	2.287.951.220	80%	473,1%
2 23 2.23.2.24.0.00 .02.0000 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,85	136.444.136	14,95	341.498.040	14,95	341.498.040	94%	250,3%
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2 23 2.23.2.24.0.0 0.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan										
2 24 2.23.2.24.0.00 .02.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	29,1	732.992.647	13,98	600.020.978	13,98	600.020.978	48%	81,9%
2 24 2.23.2.24.0.00 .02.0000 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Skor	65,83	213.312.248	27,5	123.381.100	27,5	123.381.100	42%	57,8%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3 25 3.25.0.00.0.00 .01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan						55.187.269.144		55.187.269.144		
3 25 3.25.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	44.340.480.340	100	35.301.379.503	100	35.301.379.503	100%	79,6%
3 25 3.25.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL	Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan	4	4.918.032.377	3	197.330.100	3	197.330.100	75%	4,0%
3 25 3.25.0.00.0.00 .01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	309538,60	8.966.093.860	307076,6 0	9.622.578.538	307076,6 0	9.622.578.538	99%	107,3%
		Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)	%	116,30		115		115		99%	
3 25 3.25.0.00.0.00 .01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	35288,63	8.108.369.934	26491,92	8.247.916.619	26491,92	8.247.916.619	75%	101,7%
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%)	%	112,32		109,55		109,55		98%	
3 25 3.25.0.00.0.00 .01.0000 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90	3.077.982.093	90	736.329.194	90	736.329.194	100%	23,9%
3 25 3.25.0.00.0.00 .01.0000 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	1346,88	477.343.038	1334,88	1.081.735.190	1334,88	1.081.735.190	99%	226,6%
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3 26 3.26.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Pariwisata						25.309.402.425		25.309.402.425		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 26 3.26.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	16.692.572.954	100	12.773.044.033	100	12.773.044.033	100%	76,5%
3 26 3.26.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,7	11.512.936.033	2,3	1.812.990.000	2,3	1.812.990.000	85%	15,7%
		Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	2,1		1,75		1,75		83%	
		Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau.	%	43,00		22,70		22,70		53%	
3 26 3.26.0.00.0.00 .01.0000 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	994.553	4.467.706.520	370.500	9.899.255.692	370.500	9.899.255.692	37%	221,6%
		Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	4.405.414		1.988.600		1.988.600		45%	
		Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rp	11.113,5		3.996,8		3.996,8		36%	
3 26 3.26.0.00.0.00 .01.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	2%	2.180.525.198	2%	330.913.200	2%	330.913.200	100%	15,2%
3 26 3.26.0.00.0.00 .01.0000 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	3%	2.180.525.198	3%	493.199.500	3%	493.199.500	100%	22,6%
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
2 09 2.09.3.27.0.0 0.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan										
3 27 2.09.3.27.0.00 .02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						814.088.836		814.088.836		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 27 2.09.3.27.0.00 .02.0000 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%	1,40%	1.693.462.233	1,20%	5.109.736.500	1,20%	5.109.736.500	86%	301,7%
		Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	76,99%		59,49%		59,49%		77%	
3 27 2.09.3.27.0.00 .02.0000 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1,64%	2.441.240.168	1,35%	2.446.550.000	1,35%	2.446.550.000	82%	100,2%
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	1,03%		0,74%		0,74%		72%	
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	3,8%		2,8%		2,8%		74%	
3 27 2.09.3.27.0.00 .02.0000 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	%	66,00%	765.553.955	62,00%	265.662.800	62,00%	265.662.800	94%	34,7%
		Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	62,00%		58,50%		58,50%		94%	
3 27 2.09.3.27.0.00 .02.0000 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	99,99	523.962.046	99,88	316.500.000	99,88	316.500.000	100%	60,4%
		Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	56%		42%		42%		75%	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
2 11 2.11.3.28.0.0 0.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
3 28 2.11.3.28.0.00 .02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						41.385.000		41.385.000		
3 28 2.11.3.28.0.00 .02.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Miliar Rp	27,5	307.072.326	27,10	480.661.900	27,10	480.661.900	99%	156,5%
		Rehabilitasi Lahan Kritis	ha	50 ha		5 ha		5 ha		100%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 28 2.11.3.28.0.00 .02.0000 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	500	215.990.185	500	100.000.000	500	100.000.000	100%	46,3%
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
3 29 3.29.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral										
3 29 3.29.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	16.577.507.500	100	13.008.938.290	100	13.008.938.290	100%	78,5%
3 29 3.29.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	90,91	391.072.454	36,36	249.999.800	36,36	249.999.800	40%	63,9%
3 29 3.29.0.00.0.00 .01.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	16	10.950.028.713	13	3.091.421.924	13	3.091.421.924	81%	28,2%
3 29 3.29.0.00.0.00 .01.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	4.799.525.572	10	8.898.966.338	10	8.898.966.338	10%	185,4%
		Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	100						0%	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3 31 3.31.3.30.0.0 0.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
3 30 3.31.3.30.0.00 .02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	17.702.474.676	100	13.306.894.463	100	13.306.894.463	100%	75,2%
3 30 3.31.3.30.0.00 .02.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	70	6.340.114.028	70	726.070.850	70	726.070.850	100%	11,5%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 30 3.31.3.30.0.00 .02.0000 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Inflasi	%	2,85+1	876.950.351	3,14+1	3.108.943.097	3,14+1	3.108.943.097		354,5%
3 30 3.31.3.30.0.00 .02.0000 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	3,5	1.327.276.208	3,5	138.371.990	3,5	138.371.990	100%	10,4%
3 30 3.31.3.30.0.00 .02.0000 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%	<20	782.144.908	<20	496.117.350	<20	496.117.350		63,4%
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3 31 3.31.3.30.0.0 0.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
3 31 3.31.3.30.0.00 .02.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Miliar Rp	39,5	1.398.380.290	38,5	4.533.898.558	38,5	4.533.898.558	97%	324,2%
3 31 3.31.3.30.0.00 .02.0000 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri	%	100	165.909.526	100	91.607.700	100	91.607.700	100%	55,2%
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
2 07 2.07.3.32.0.0 0.02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi										
3 32 2.07.3.32.0.00 .02.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	%	33,3	97.402.722	33,3	10.000.000	33,3	10.000.000	100%	10,3%
3 32 2.07.3.32.0.00 .02.0000 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	45,9	73.701.361	25,8	10.000.000	25,8	10.000.000	56%	13,6%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 32 2.07.3.32.0.00 .02.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%	31,25	180.811.769	6,25	242.042.800	6,25	242.042.800	20%	133,9%
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4 01	SEKRETARIAT DAERAH										
4 01 4.01.4.01.4.0 1.01.0000	Sekretariat Daerah										
4 01 4.01.4.01.4.01 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	90	208.215.492.722	86	213.146.503.573	86	213.146.503.573	96%	102,4%
4 01 4.01.4.01.4.01 .01.0000 02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor	44,60	1.385.344.542	38,60	1.054.852.320	38,60	1.054.852.320	87%	76,1%
4 01 4.01.4.01.4.01 .01.0000 03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	3,06	1.161.085.302	3,03	1.345.830.445	3,03	1.345.830.445	99%	115,9%
4 01 4.01.4.01.4.01 .01.0000 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	100	72.730.595.687	20	107.346.789.294	20	107.346.789.294	20%	147,6%
4 01 4.01.4.01.4.01 .01.0000 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100	1.161.085.302	100	2.437.024.200	100	2.437.024.200	100%	209,9%
4 01 4.01.4.01.4.01 .01.0000 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	100%	845.994.952	100%	986.796.540	100%	986.796.540	100%	116,6%
4 01 4.01.4.01.4.01 .01.0000 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	8,6	502.676.237	8,2	602.397.900	8,2	602.397.900	95%	119,8%
4 01 4.01.4.01.4.01 .01.0000 08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	100%	693.264.805	100%	1.222.130.250	100%	1.222.130.250	100%	176,3%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 07 5.07.0.00.0.0 0.01.0000	Badan Penghubung Daerah										
4 01 5.07.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						836.757.000		836.757.000		
4 02	SEKRETARIAT DPRD										
4 02 4.02.0.00.0.0 0.01.0000	Sekretariat DPRD										
4 02 4.02.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	104.517.225.106	100	88.820.518.370	100	88.820.518.370	100%	85,0%
4 02 4.02.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	70.174.076.926	72	70.513.702.000	72	70.513.702.000	90%	100,5%
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	104.517.225.106	100					
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5 01	PERENCANAAN										
5 01 5.01.5.05.0.0 0.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah										
5 01 5.01.5.05.0.00 .02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	35.968.046.082	100	25.480.815.647	100	25.480.815.647	100%	70,8%
5 01 5.01.5.05.0.00 .02.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	%	90%	3.733.584.648	82%	2.944.056.800	82%	2.944.056.800	91%	78,9%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 01 5.01.5.05.0.00 .02.0000 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	%	100%	9.430.724.359	100%	5.333.179.870	100%	5.333.179.870	100%	56,6%
		Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	%	95%		95%		95%		100%	
5 02	KEUANGAN										
5 02 5.02.0.00.0.0 0.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah										
5 02 5.02.0.00.0.00 .02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	%	11,08%	100.673.928.501	11,91%	66.048.946.463	11,91%	66.048.946.463	107%	65,6%
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100		100		100		100%	
5 02 5.02.0.00.0.00 .02.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	100%	4.289.538.287	100%	617.094.750.788	100%	617.094.750.788	100%	14386,0%
		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	%	100%		100%		100%		100%	
5 02 5.02.0.00.0.00 .02.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	%	100%	2.233.204.352	100%	2.186.046.144	100%	2.186.046.144	100%	97,9%
5 02 5.02.0.00.0.0 0.03.0000	Badan Pendapatan Daerah										
5 02 5.02.0.00.0.00 .03.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	90.692.435.330	100	99.783.279.657	100	99.783.279.657	100%	110,0%
5 02 5.02.0.00.0.00 .03.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	93%	165.909.526	91%	850.918.400	91%	850.918.400	98%	512,9%
5 02 5.02.0.00.0.00 .03.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	5,24%	3.928.235.106	4,89%	12.377.949.149	4,89%	12.377.949.149	93%	315,1%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Pelayanan	1		1		1		100%	
		Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi	16.561		15.300		15.300		92%	
		Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	30		22		22		73%	
5 03	KEPEGAWAIAN										
5 03 5.03.0.00.0.0 0.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri										
5 03 5.03.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	30.292.229.165	100	15.383.447.033	100	15.383.447.033	100%	50,8%
5 03 5.03.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%	49,46	3.780.764.396	44,63	2.199.973.700	44,63	2.199.973.700	90%	58,2%
		Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	%	85		73		73		86%	
		Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	%	98		95		95		97%	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5 03 5.03.0.00.0.0 0.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri										
5 04 5.04.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						10.371.220.013		10.371.220.013		
5 04 5.04.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	%	50	1.328.612.630	32	769.274.550	32	769.274.550	64%	57,9%
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						3.819.916.400		3.819.916.400		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 01 5.01.5.05.0.0 0.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah										
5 05 5.01.5.05.0.00 .02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						349.901.000		349.901.000		
5 05 5.01.5.05.0.00 .02.0000 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	95%	3.013.301.183	75%	3.470.015.400	75%	3.470.015.400	79%	115,2%
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	55%		35%		35%		64%	
5 06	PENGELOLAAN PERBATASAN										
5 06 5.06.0.00.0.0 0.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah										
5 06 5.06.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	90	208.215.492.722	86	6.628.890.993	86	6.628.890.993	96%	3,2%
5 06 5.06.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	%	90	1.215.000.000	35	853.030.800	35	853.030.800	39%	70,2%
5 07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG										
5 07 5.07.0.00.0.0 0.01.0000	Badan Penghubung Daerah						3.723.395.366		3.723.395.366		
5 07 5.07.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.866.539.415		2.866.539.415		
5 07 5.07.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	90	2.311.573.258	86	856.855.951	86	856.855.951	96%	37,1%
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6 01	INSPEKTORAT DAERAH										





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 01 6.01.0.00.0.0 0.01.0000	Inspektorat Daerah										
6 01 6.01.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	%	100%	37.062.815.712	60%	28.395.121.505	60%	28.395.121.505	60%	76,6%
		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	84%		80%		80%		95%	
		Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	%	100%		100%		100%		100%	
6 01 6.01.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	<6%	1.896.108.868	<10%	6.068.861.096	<10%	6.068.861.096		320,1%
		Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	85%		80%		80%		94%	
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%	95%		75%		75%		79%	
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas	%	87%		78%		78%		90%	
		Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irbn	%	86%		78%		78%		91%	
6 01 6.01.0.00.0.00 .01.0000 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %	%	100%	711.040.826	100%	2.331.014.196	100%	2.331.014.196	100%	327,8%
		Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	%	100%		100%		100%		100%	
		Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Skor	Hijau		Hijau		Hijau		100%	
		Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	%	35%		7%		7%		20%	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Prakiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Prakiraan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 8.01.0.00.0.0 0.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
8 01 8.01.0.00.0.00 .01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	33.465.360.465	100	10.146.594.980	100	10.146.594.980	100%	30,3%
8 01 8.01.0.00.0.00 .01.0000 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%		483.507.761		537.919.800		537.919.800		111,3%
8 01 8.01.0.00.0.00 .01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	0	1.130.554.913	0	2.918.357.240	0	2.918.357.240		258,1%
		Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%	100%		100%		100%		100%	
8 01 8.01.0.00.0.00 .01.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	93%	1.008.269.687	83%	5.280.267.000	83%	5.280.267.000	89%	523,7%
8 01 8.01.0.00.0.00 .01.0000 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANANEKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama	%	0	486.625.284	0	558.181.200	0	558.181.200		114,7%
8 01 8.01.0.00.0.00 .01.0000 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100%	2.118.901.660	100%	15.853.306.080	100%	15.853.306.080	100%	748,2%

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Roau Tahun 2021-2026; APBD Tahun 2022, diolah, 2022



2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah menjadi satu rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan tersebut memuat prioritas pembangunan jangka menengah dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan RPJMD tersebut dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama lima tahun. Penyajian permasalahan pokok pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yaitu: 1) Ekonomi, 2) Kemaritiman dan lingkungan hidup, 3) Sosial, 4) Pembangunan sumber daya manusia, 5) Tata kelola pemerintahan, 6) Kebudayaan, dan 7) Infrastruktur.

2.3.1. Bidang Ekonomi

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dapat diamati dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tercatat fluktuatif, sejalan dengan yang terjadi pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 4.83 persen. Selanjutnya perekonomian Kepulauan Riau pada tahun 2021 (c-to-c) tumbuh sebesar 3,43 persen, setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,80 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dapat diamati dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi. Meningkat dari tahun 2017-2019 dari 166.081,68 milyar rupiah pada tahun 2017 meningkat menjadi 181.895,86 milyar rupiah pada tahun 2019, namun karena pandemi covid-19, nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga konstan 2010 mengalami penurunan menjadi 174.976,70 milyar rupiah pada tahun 2020. Selanjutnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 180.952,44 milyar.

Hal ini pun terjadi pada perkembangan nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga berlaku yaitu mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 dari 227.706,88 milyar rupiah pada tahun 2017



meningkat menjadi 267.658,24 milyar rupiah pada tahun 2019 tetapi karena pandemi covid-19, nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga berlaku mengalami penurunan menjadi 254.253,28 milyar rupiah pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 275.636,33 milyar.

Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kontribusi yang berada pada kisaran 36,89-42,03 persen selama periode 2017 hingga 2021. Adapun 5 Sektor ekonomi yang menunjukkan kontribusi terbesar sepanjang tahun 2017-2021 baik untuk harga berlaku maupun harga konstan yaitu sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Naik turunnya PDRB Provinsi Kepulauan Riau tersebut berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan sektor penunjang PDRB mengalami pelemahan. Hampir seluruh sektor perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau terdampak akibat pandemik Covid-19. Pada Tahun 2021 Sektor yang mengalami dampak paling besar terjadi pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi.

Selain itu, Tingkat inflasi sedikit banyak menunjukkan efisiensi kerja ekonomi dan tingkat keseimbangan ketersediaan barang dan jasa di sebuah wilayah. Selama kurun waktu 2017 hingga 2021 laju inflasi tahunan menunjukkan peningkatan dari sebesar 1,42% dan tahun 2020 menjadi sebesar 1,18%, sedangkan di tahun 2021 terjadi deflasi sebesar 1,42%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelemahan faktor-faktor penggerak ekonomi Provinsi Kepulauan Riau berdampak pada penurunan pertumbuhan dan penurunan PDRB. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah pada sektor koperasi dan UMKM, industri, penanaman modal, lapangan kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian.

Salah satu penunjang bidang perekonomian adalah sektor koperasi dan UMKM. Permasalahan pada sektor koperasi adalah koperasi belum menjadi kebutuhan masyarakat karena masyarakat belum merasakan manfaat dari pembentukan koperasi. Namun secara umum, kinerja koperasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 mengalami



peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Salah satu indikatornya adalah persentase koperasi yang aktif. Pada tahun 2020, persentase koperasi aktif adalah sebesar 40,85% atau lebih tinggi dari persentase koperasi aktif tahun 2019 yaitu sebesar 39,93%. Namun, kondisi tahun 2020 tersebut masih rendah dari nilai 55,80% yang menjadi target untuk persentase koperasi aktif. Selain itu, terjadi penurunan persentase koperasi aktif pada tahun 2021 hingga menjadi 40,18%.

Permasalahan koperasi lainnya adalah peran koperasi yang belum mampu menjadi pendukung pengembangan ekonomi lokal. Hal ini ditunjukkan dengan volume usaha per koperasi pada tahun 2020 yang naik namun tidak signifikan dari Rp232.630.000,00 pada tahun 2019 menjadi Rp233.040.000,00 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan penurunan persentase koperasi yang dibina dari 30,97% pada tahun 2019 menjadi 14,64% pada tahun 2020. Selain itu, terdapat permasalahan minimnya kegiatan usaha yang dikelola atau hanya dibidang simpan pinjam serta manajemen koperasi masih sederhana.

Pembinaan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau juga masih kecil yaitu sebesar 0,45%. Pembinaan UMKM dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha sebagai penguatan untuk usaha skala mikro yang kekurangan modal serta mengoptimalkan pertumbuhan sektor UMKM. Permasalahan lainnya adalah meningkatkan produk UMKM diterima di pasar modern dan tersertifikasi yang telah mencapai 20,93% pada tahun 2020 serta meningkatkan rasio kewirausahaan di Provinsi Kepulauan Riau yang berkisar 1 % yang idealnya berada pada posisi 4%.

Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB, sektor industri khususnya industri pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kontribusi yang berada pada kisaran 37,56-41,65 persen selama periode 2015 hingga 2020. Selain itu, pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan berdasarkan harga konstan dari tahun 2015-2020 selalu positif meskipun mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 6,25 menjadi 3,25 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan sektor industri merupakan faktor dominan dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk diperlukan upaya penguatan sektor industri antara lain pembukaan wilayah industri baru, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai penyangga pusat pertumbuhan yang telah berkembang, pengembangan kawasan industri kecil sebagai penunjang kegiatan industri utama dan Diperlukan pengembangan industri hilir.

Pada sisi lain, pertumbuhan jumlah industri besar yang belum sesuai target, yakni terealisasi sebanyak 554 unit dari target 785 unit.



Penguatan sektor industri sangat diperlukan yang antara lain berupa penguatan pembangunan industri maritim serta mengembangkan kawasan strategis bagi pertumbuhan industri yang berbasis kelautan. Hal ini dapat dilanjutkan dengan pengembangan pusat industri pengolahan bahan makanan, di antaranya di Kabupaten Bintan. Selain itu, permasalahan agar industri dapat berkembang lebih optimal adalah belum optimalnya pembinaan terhadap industri kecil, menengah, industri kreatif serta peningkatan nilai tambah produk olahan industri. Permasalah selanjutnya adalah penguatan industri harus selaras dengan perdagangan bebas yang ditunjukkan dengan Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Batam-Bintan-Karimun-Tanjungpinang.

Sektor industri tidak bisa lepas dari sektor perdagangan. Kondisi sektor perdagangan tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB tahun 2020 adalah sebesar 8,8% dari 9.07% pada tahun 2019. Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2020 tercatat -0,030 serta Nilai Ekspor Bersih Perdagangan tahun 2020 mengalami penurunan dari US\$ 1.850,91 juta pada tahun 2019 menjadi US\$ 742,38 juta. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi Covid 19 yang berakibat belum optimalnya jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA dan belum optimalnya sektor non migas dengan nilai ekspor non migas USD 7.793.311 ribu dari target sebesar USD 9.100.000 ribu. Selain hal tersebut di atas, kualitas produk unggulan daerah yang belum mampu bersaing dengan produk lain karena belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) harus segera dapat diatasi.

Permasalahan lain di sektor perdagangan adalah diperlukan stabilitas harga kebutuhan pokok serta penurunan harga logistik barang, yang pemasarannya masih dikuasai oleh monopsoni (tengkulak) khususnya produk hortikultura. Hal ini dapat didukung dengan penguatan wilayah distribusi di Provinsi Kepulauan Riau, antara lain revitalisasi Pembangunan Pasar Inpres di Anambas dan mempertahankan Tanjungpinang sebagai Kota Perdagangan.

Tingginya peran sektor industri nasional di Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh kinerja investasi yang terus meningkat. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan realisasi Investasi PMA dan PMDN yang signifikan yaitu Realisasi Investasi PMDN sebesar Rp.14,249 (Miliar) dengan 2.294 Proyek dan Realisasi Investasi PMA sebesar 1.649,4(US\$) atau Rp.23.751 (Milliar) dengan 2.268 Proyek. Namun investasi yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar adalah investasi bidang industri nasional. Sangat sedikit investor yang bersedia berinvestasi pada bidang ekonomi lokal, seperti pertanian maupun pariwisata yang berbasis masyarakat lokal,



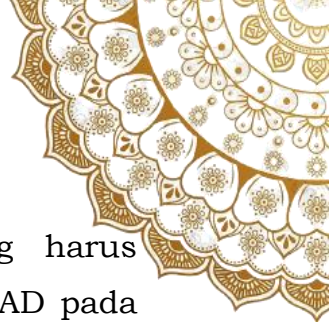
khususnya pelaku UMKM Data ini didukung oleh data persebaran investasi antarwilayah yang belum proporsional serta mengelompok pada wilayah non-pertanian atau 96% berada di Kota Batam pada tahun 2020 dan adanya hambatan investasi karena wilayah Kepulauan Riau didominasi oleh laut. Iklim investasi nasional yang penuh dengan kemudahan, tidak diikuti oleh ketertarikan pihak investor agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.

Kemudahan iklim investasi nasional dapat diikuti dengan kemudahan layanan perizinan berupa *one day service*. Hal ini bertujuan agar jumlah dan nilai investasi dapat meningkat dan selaras dengan iklim investasi nasional serta menghindari semakin panjangnya alur birokrasi perizinan sekaligus untuk mengatasi belum maksimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) yang mencapai 82,34% dari 86,00% yang ditargetkan. Kemudahan iklim investasi dalam suasana pandemi Covid-19 dapat berupa pemberian insentif industri yang terdampak Covid-19, atau dengan insentif investasi berupa pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah, atau fasilitasi peminjaman modal.

Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah terdapat tenaga kerja yang berasal dari luar Batam tetapi tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri. Para tenaga kerja yang mendapatkan peningkatan keterampilan yang berbasis kinerja dan kewirausahaan masih sebesar 40,53% dari target 43,00%. Selain itu, belum optimalnya ketersediaan anggaran pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Para tenaga kerja memerlukan sertifikat kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing pekerja. Hal ini harus didukung oleh peran Balai Latihan Kerja (BLK). Namun saat ini dukungan BLK belum optimal karena pelatihan dan uji kompetensi yang diselenggarakan belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja serta terdapat keterbatasan sarana dan prasarana.

Perlindungan sumber daya tenaga kerja daerah harus menjadi perhatian terkait permasalahan keselamatan dan perlindungan pekerja yang disebabkan perselisihan dan PHK karena hubungan industrial. Hal ini termasuk fasilitasi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berkeadilan serta memperhatikan kondisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang belum maksimal atau sebesar 2,74%.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang harus diperhatikan dalam bidang perekonomian. Hal ini disebabkan PAD pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi ini akan berimbas pada pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain akibat dari pandemi Covid 19, kondisi ini memerlukan optimalisasi pengelolaan PAD melalui peningkatan retribusi serta Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Selain itu, terdapat belum optimalnya inovasi pelayanan pengurusan dan pembayaran pajak berbasis elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan belum maksimalnya minat masyarakat dalam memanfaatkan pembayaran melalui e- Samsat yakni terealisasi sebesar 3% dari target 20% pada tahun 2019.

Kepulauan Riau mempunyai objek dan daya tarik wisata yang beragam berupa alam, manusia, dan kebudayaannya. Pariwisata juga merupakan kegiatan yang strategis jika ditinjau dari segi pengembangan ekonomi dan sosial budaya karena kepariwisataan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas masyarakat dan dapat menambah rasa cinta tanah air terhadap nilai-nilai budaya bangsa sekaligus sebagai instrumen untuk melestarikan lingkungan.

Kinerja sektor pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun adalah relatif baik. Namun adanya pandemi Covid 19 menyebabkan penurunan jumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara. Hal ini merupakan tantangan untuk pengembangan wisata yang ramah kesehatan sebagai implikasi dari masa pandemi Covid 19. Oleh karena itu, perlu dikembangkan destinasi obyek wisata baru untuk menarik minat wisatawan. Obyek wisata tersebut antara lain berupa wisata budaya (sejarah), religi, alam, bahari, kuliner, geopark dan lainnya.

Pengembangan destinasi obyek wisata memerlukan dukungan dari wisata-wisata unggulan kabupaten dan kota atau sebaliknya wisata-wisata unggulan kabupaten dan kota tersebut memerlukan dukungan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut dapat berupa peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata, insentif bagi pelaku industri pariwisata sekaligus peningkatan promosi pariwisata serta *tourism linkage networking* antar kabupaten dan kota untuk menciptakan branding pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, kerjasama dan koordinasi stakeholder dalam penyiapan sarana dan prasarana pendukung daerah pariwisata sangat diperlukan, seperti penginapan dan sarana transportasi.

Kunjungan wisata di Provinsi Kepulauan Riau ternyata tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi kreatif, sebagaimana



industri nasional. Peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat diperlukan untuk pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah wisata. Selain itu, perlunya fasilitasi untuk pelaku ekonomi kreatif untuk bekerjasama dengan pihak perbankan dalam mendukung ekonomi.

Pada sisi lain, pelaku ekonomi kreatif yang berskala kecil (UMKM) memerlukan pengembangan, pendampingan, dan pemasaran. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan fasilitasi dan pendampingan kepada 1.000 pelaku ekonomi kreatif pertahun. Sekaligus perlunya perlindungan hukum terhadap industri kreatif dimaksud.

Sektor pertanian memiliki peranan penting di Provinsi Kepulauan Riau. Namun pada tahun 2019-2020, Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -4,39. Penurunan kondisi pertanian yang didukung oleh tanaman pangan dan hortikultura harus segera diantisipasi. Penyebabnya antara lain adalah belum optimalnya penggunaan teknologi untuk pertanian, perkebunan dan peternakan agar produk hortikultura tersebut bertahan lama. Selain itu, keberlanjutan produksi pertanian dan perikanan harus melibatkan kearifan lokal serta memperhatikan diversifikasi komoditas dan produk pertanian untuk pasar domestik dan ekspor. Ketersediaan obat-obatan hewan juga merupakan hal yang harus diatasi agar Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar yaitu 0,04% mencapai target 0,03%.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat diperlukan untuk penguatan sektor pertanian. Dukungan tersebut antara peningkatan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan; pendampingan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan; serta peningkatan kapasitas petani dan pelaku perkebunan.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan berlanjut terhadap ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ketahanan pangan pada tahun 2021 adalah dalam kondisi baik dengan ditunjukkan Skor PPH sebesar 100. Namun, ketahanan pangan ini sangat dipengaruhi oleh produksi dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan produksi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum mencukupi untuk kebutuhan pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, perlu diwujudkan swasembada pangan daerah dengan memperhatikan kondisi lahan tanaman pangan yang memiliki target sebesar 300 ha. Selain itu, diperlukan peningkatan pada Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat yang tercapai sebesar 57,31% pada tahun 2019.



2.3.2. Bidang Kemaritiman dan Lingkungan Hidup

Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang penting untuk penyedia pangan sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan dan kelautan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ruang laut yang memerlukan pembenahan pada infrastruktur, sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan (tangkap dan budidaya) serta dukungan aspek permodalan maupun pemasaran agar kesejahteraan nelayan dapat maksimal. Industri yang dapat mendukung perikanan dan kelautan adalah industri pengolahan rumput laut maupun pengolahan ikan yang memerlukan data data oseanografi akurat, karena menyangkut estimasi peralihan musim yang mempengaruhi kegiatan budidaya dan perikanan

Selain hal tersebut di atas adalah perlunya peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah. Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah pencegahan adanya *Illegal fishing*, *unregulated fishing* dan *unreported fishing* selain adanya alih fungsi hutan mangrove.

Berkaitan dengan lingkungan hidup, saat ini Provinsi Kepulauan Riau juga menghadapi masalah turunnya kualitas lingkungan hidup. Kontributor terbesar bersumber dari merosotnya kualitas air dan tutupan lahan, namun indeks kualitas udara menunjukkan peningkatan. Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya penanganan pencemaran air yang disebabkan oleh perusahaan, minyak kapal, ataupun pribadi. Pemahaman terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan masih maraknya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil* di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang lain adalah limbah dari fasilitas layanan kesehatan. Selain itu, sumber kedua dari pencemaran air adalah sampah yang semakin bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Bencana yang terjadi seringkali menyebabkan terganggunya kualitas lingkungan hidup. Sebagai daerah kepulauan, Kepulauan Riau memiliki kawasan rawan bencana yang cukup banyak, mulai dari tanah longsor, ancaman gelombang pasang dan abrasi serta banjir. Termasuk di dalamnya adalah kekeringan pada air terjun Temburung.

Penataan ruang di daerah sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota dan keserasian dengan wilayah di sekitarnya. Namun, kualitas lingkungan hidup semakin berkurang dengan berkurangnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka



hijau (RTH). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan regulasi daerah sebagai implementasi kebijakan tata ruang dan sebagai perangkat operasional RTRW.

Permasalahan pembangunan pada sektor kehutanan adalah perlunya optimalisasi dan koordinasi tentang peran hutan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Pada sisi ekonomi, terdapat ketidakselarasan iklim investasi dengan lokasi investasi yang masih berstatus kawasan hutan dan ketidakselarasan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial dan sarana prasana pemerintahan pada areal yang masih berstatus kawasan hutan.

Selain itu, tumpang tindih kawasan hutan dengan pihak ketiga yang menyebabkan perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan. Hal ini akan membuat gejolak masyarakat terkait lahan milik masyarakat yang masih berstatus kawasan hutan.

2.3.3. Bidang Sosial

Kemiskinan menjadi salah satu perhatian di bidang sosial. Jumlah penduduk yang tergolong miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan untuk tahun 2021 jika dibanding tahun 2020. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebanyak 142.610 sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 137.750, meski terjadi penurunan namun jumlah penduduk miskin masih terbilang tinggi. Selain itu, persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 masih terbilang tinggi yaitu sebesar 5,75 persen.

Penanganan Pemerlu Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari tahun ke tahun telah membaik namun belum maksimal. Keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP hanya sebesar 1,05% dari target 1,38% pada tahun 2020. Selain itu keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hanya sebesar 0,47% pada tahun 2020. Sedangkan Keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya hanya sebesar 53,97% pada tahun 2020. Selain itu, terdapat belum optimalnya pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi kepada lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial, belum optimalnya penanganan kepada Pemerlu Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan belum optimalnya tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi. Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kepri belum memiliki UPTD panti sosial. Oleh karena itu, agar Pemerintah



Provinsi Kepri tetap menjalankan kewenangan rehabilitasi sosial di dalam panti dan tetap memenuhi target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, selama ini pelaksanaan rehabilitasi sosial hanya dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada PPKS di dalam panti swasta, bantuan operasional bagi panti swasta, dan perujukan PPKS ke UPTD panti sosial luar daerah, sementara anggaran tersedia tidak cukup untuk membantu PPKS yang direhabilitasi di 56 panti swasta.

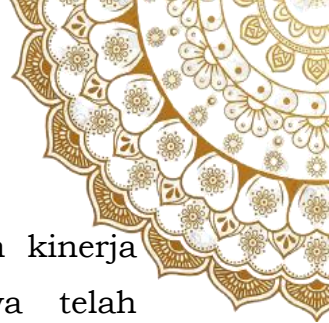
Selain itu, terdapat permasalahan belum optimalnya sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang hanya berjumlah 1 unit dan belum optimalnya korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang hanya sebesar 25,00% pada tahun 2020.

2.3.4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perkembangan suatu daerah dapat diukur dari perkembangan sumber daya manusia (SDM), karena SDM adalah modal utama dalam pembangunan. Pembangunan manusia dan masyarakat meliputi pembangunan kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Pembangunan di berbagai sektor tersebut merupakan rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia guna mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Untuk mencapai kualitas hidup manusia yang baik memerlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas-sektor, serta kapasitas untuk melaksanakannya. Kualitas hidup manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2021, IPM Provinsi Kepulauan Riau mencapai 75,79, lebih tinggi daripada capaian IPM secara nasional yakni 72,29. Artinya, IPM Provinsi Kepulauan Riau lebih baik karena di atas capaian IPM secara nasional. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pencapaian APM dimana angka Anak Tidak Sekolah masih cukup tinggi yaitu 15,38%. Hal ini disebabkan Anak di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), belum dapat mengakses layanan pendidikan formal maupun nonformal karena tantangan geografis dan keterpencilan daerah tempat tinggal mereka, atau karena tidak tersedianya satuan pendidikan atau layanan pendidikan dan pelatihan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap of expectation* atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa



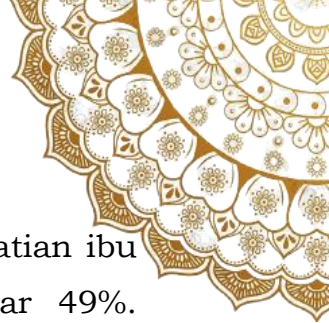
datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah diatasi seoptimalnya. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Aspek penting dalam sumber daya manusia adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Umur Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur Harapan Hidup Saat Lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan Umur Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan. Angka harapan hidup merupakan standar suatu negara maupun daerah untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

UHH penduduk Indonesia pada tahun 2017 adalah 71,06 tahun dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 71,20 tahun. Pada tahun 2018, UHH Provinsi Kepulauan Riau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang diperkirakan anak yang lahir dapat hidup rata-rata sampai usia 69,64 tahun dengan catatan bila diasumsikan bahwa kondisi kesehatan dan kematian yang ada akan berjalan seperti pada saat ini atau tidak berubah. Selanjutnya, UHH Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 tergolong tinggi sebesar 70,12 tahun sementara pada level nasional berada pada 71,57.

Permasalahan utama di sektor kesehatan adalah pandemi Covid-19 yang belum berakhir sehingga perlu terus dilakukan penanganan yang serius dan terukur terhadap pandemi Covid-19. Hal ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang siap dalam menangani berbagai penyakit tersebut.

Selain itu sarana dan prasarana rumah sakit perlu untuk senantiasa ditingkatkan demi menjawab kondisi kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan yang juga semakin meningkat. Hal tersebut di antaranya adalah dengan modernisasi RSUP Ahmad Tabib sehingga menjadi rumah sakit rujukan tertentu, rumah sakit Pendidikan, serta peningkatan pelayanan Rumah Sakit Engku Ahmad Daud Tanjung Uban.



Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah risiko kematian ibu yang didominasi oleh kematian pada ibu nifas yaitu sebesar 49%. Sementara itu cakupan pelayanan nifas baru mencapai angka 90,74% pada tahun 2020 serta Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani menunjukkan angka yang masih rendah yaitu hanya sebesar 45,32%.

Kesehatan anak juga merupakan hal yang perlu menjadi perhatian karena cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang masih rendah yaitu sebesar 50,82% pada tahun 2020. Angka ini turun dari awalnya sebesar 69,11% di tahun 2019. Selain itu, belum optimalnya *Universal Child Immunization* (UCI) menjadi permasalahan yang harus diatasi.

Hal-hal lain yang menjadi permasalahan di bidang kesehatan adalah belum optimalnya penanganan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular, belum optimalnya penanganan ODGJ, belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi orang dengan kecanduan NAPZA, serta belum optimalnya Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS. Pada sisi SPM, belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa merupakan hal yang harus ditangani.

Manusia yang berkualitas yang seharusnya dapat memberikan keuntungan yang besar dalam mengurangi disparitas antarindividu karena berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh pendidikan. Selama tahun 2015-2021, rata-rata angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan angka sebesar 12,80. Angka tersebut lebih rendah bila dibanding Rata-Rata Angka Harapan Lama Sekolah secara nasional, yakni 12,86. Data perbandingan ini menunjukkan bahwa angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau belum bisa dikatakan baik karena masih di bawah rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah secara nasional.

Situasi dan kondisi pendidikan secara umum selama tahun 2015-2020 ditunjukkan tren perkembangan capaian rata-rata APK tingkat Sekolah Menengah Atas atau setaranya di Provinsi Kepulauan Riau yang hanya 96,02 % sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam pendidikan khusus baru sebesar 82,49 %. Situasi dan kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah tidak bisa mengakses atau bersekolah di jenjang Sekolah Menengah Atas atau setaranya.

Permasalahan di bidang pendidikan lainnya adalah rendahnya sinkronisasi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja karena *skill* yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan sesuai dengan potensi daerah. Lulusan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan



banyak yang tidak dapat langsung memasuki dunia kerja karena skill yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan SMK yang diterima di industri hanya sebesar 60,1% pada tahun 2020. Permasalahan ini disebabkan oleh program keahlian yang diselenggarakan di SMK saat ini belum semuanya sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha / Dunia Industri (DU/DI).

Selain itu terdapat kesenjangan mutu dan kualitas pendidikan yang dapat dilihat dari masih rendahnya SMA/SMK/SLB yang memiliki akreditasi B yang hanya sebesar 62,50% dari seluruh SMA/SMK/SLB yang ada. Pada sisi lain sarana dan prasarana pendidikan yang berupa ketersediaan ruang kelas, perpustakaan, musala, fasilitas olahraga, jaringan internet, dan fasilitas ekstrakurikuler di sekolah belum optimal. Kualitas para guru di Provinsi Kepulauan Riau juga perlu diperhatikan khususnya persentase guru yang memiliki sertifikasi dan kompetensi.

Kualitas SDM tidak dapat dipisahkan dengan kualitas pemuda. Kualitas pemuda harus mendapatkan perhatian karena terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut adalah rentannya pemuda terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA. Selain itu, kurang maksimalnya sarana dan prasarana mengakibatkan kurang maksimalnya peningkatan bakat dan minat masyarakat dalam pengembangan kemampuan berolahraga sehingga berakibat terhadap minimnya prestasi olahraga.

Kesempatan dan perlakuan setara dalam bagi perempuan sangat penting untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan SDM. Kemiskinan, isolasi geografis, status minoritas, kecacatan, pernikahan dini dan kehamilan, kekerasan berbasis gender, dan kepercayaan tradisional tentang status dan peran perempuan merupakan beberapa hambatan yang menghalangi hak perempuan dan anak perempuan untuk menjalankan hak mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan haknya dalam segala bidang. Salah satu hal yang memengaruhi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan adalah pemberdayaan perempuan yang rendah. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Pemberdayaan gender di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Namun, data IDG tahun 2018 turun sebesar 0,78 poin dibanding tahun 2017. Bahkan data terbaru tahun 2019 IDG menunjukkan angka 62,03% atau turun dari 66,18% tahun 2018.

Permasalahan di lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal yang dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angka Kerja



(TPAK). TPAK perempuan hanya sebesar 48,93% pada tahun 2020. Selain itu, masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2020 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO mencapai angka 33,42%. Perlindungan terhadap anak tetap dilaksanakan karena kekerasan terhadap anak masih terjadi.

2.3.5. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau dapat direpresentasikan dengan gambaran capaian kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2019 cenderung menunjukkan peningkatan, walaupun nilainya pada tahun 2019 masih tetap rendah yaitu 67,98. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal.

Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat direpresentasikan dengan hasil evaluasi SAKIP. Berdasarkan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP yang diperoleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016-2019 menunjukkan hal yang positif. Pada tahun 2019 nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau memperoleh 75,28 dengan predikat BB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah sudah berjalan dengan baik namun belum optimal.

Pengelolaan keuangan Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan kondisi baik yang ditunjukkan dengan opini BPK WTP dari tahun 2017-2021. Namun masih terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah. Pada sisi perencanaan, perlu ditingkatkan usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir. Dari sisi pengawasan, kualitas pengawasan yang belum optimal. Peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Kepulauan Riau juga masih belum optimal.

Tata Kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh kinerja ASN yang baik. Namun manajemen ASN yang berkualitas dan profesional belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, harus didukung dengan penempatan dan penataan ASN secara transparan, jaminan pengembangan karir bagi ASN, adanya *Assesment Center*, fasilitasi pendidikan bagi ASN, serta pengembangan dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi bagi ASN. Serta diperlukannya sarana dan prasarana pengembangan kepegawaian yang memadai. Pada sisi pelayanan



sekretariat, diperlukan optimalisasi pelayanan kepada anggota DPRD dan optimalisasi fungsi-fungsi sekretariat daerah lainnya

Selain itu, meskipun tata kelola pemerintahan relatif baik, terdapat potensi konflik yang ditunjukkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau relatif masih cukup tinggi yang mana pada tahun 2020 terdapat 235 kasus yang terjadi. Selain itu, kesiapsiagaan terhadap kondisi bencana belum maksimal karena kurangnya data/peta rawan bencana kebakaran dalam menurunkan jumlah potensi kebakaran yang ada.

Tata kelola pemerintahan yang baik juga didukung keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal karena hanya memperoleh nilai sebesar 43,24 dari 65,00 yang ditargetkan serta pemanfaatan aplikasi PPID yang belum optimal. Selain itu sistem manajemen perpustakaan yang belum dikelola secara optimal agar menunjang kemajuan budaya dan peningkatan minat baca. Pada sisi kearsipan, pengelolaannya belum maksimal dengan Nilai Hasil Evaluasi Pengawasan pada tahun 2019 adalah 54,14 atau berkategori “CC.

2.3.6. Bidang Kebudayaan

Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Permasalahan kebudayaan merupakan bagian integral dari kehidupan yang memimpin kita. Jika pembangunan dapat dilihat sebagai peningkatan standar hidup kita, maka usaha-usaha yang diarahkan untuk pembangunan hampir tidak dapat mengabaikan dunia budaya. Kini, pembangunan berarti kebebasan, melebarnya pilihan, menempatkan manusia, anak-anak, laki-laki dan perempuan pada pusat dari masa depan. Budaya akan mendorong dimensi ekonomi, dimensi sosial: dimensi lingkungan, dan nilai-nilai penting untuk pembangunan.

Kepulauan Riau menjadi pusat Kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di



seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Di samping itu peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah.

Untuk memajukan kebudayaan di Kepulauan Riau diperlukan langkah strategis dengan menganalisis permasalahan-permasalahan pada pembangunan kebudayaan. Berdasarkan data yang dirilis BPS (2019), Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kepulauan Riau berada di angka 58,83 atau berada di atas IPK Nasional yang hanya berkisar 53,74. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa dari penilaian 0-100%, IPK Kepulauan Riau sebesar 58,83 persen berarti baru setengah baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan budaya dalam mengembangkan identitas, pengetahuan dan praktik sosial cukup baik, namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kepulauan Riau belum terlalu signifikan. Angka ini masih jauh dibanding daerah lain yang dikenal pula karena kebudayaannya, seperti Yogyakarta (73,79) dan Bali (65,39).

Indeks ini diukur mengacu pada penilaian UNESCO untuk melihat seberapa jauh kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, apakah kebudayaan mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu individu dan masyarakat memperluas pilihan hidup dan bagaimana beradaptasi pada perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau harus lebih serius untuk melakukan pembinaan terhadap potensi budaya karena belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya Melayu di dalam pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan di kebudayaan adalah belum optimalnya kebudayaan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hal, antara lain peninggalan budaya yang belum dibuat dalam bentuk manuskrip dan salinan digital serta alat peraga dalam museum daerah; sarana dan prasarana pemeliharaan dan penyimpanan artefak/cagar budaya yang belum memadai; dukungan SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas; kurangnya karya ilmiah dan kajian pendukung tentang karya budaya; persentase bangunan berciri khas Melayu yang sebesar 14,32% dari 32,33% yang ditargetkan; serta belum dilaksanakan zonasi situs dan kawasan cagar budaya secara maksimal.

Budaya Melayu yang semakin terkikis oleh perubahan zaman. Hal ini ditunjukkan bahasa daerah yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Selain itu, belum optimalnya peran media pendidikan dan museum dalam melestarikan kebudayaan serta optimalisasi Pulau



Penyengat dan pendirian Museum Melayu Center sebagai pusat budaya melayu.

2.3.7. Bidang Infrastruktur

Infrastruktur merupakan syarat dasar yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah daerah lemah, itu hanya berarti bahwa perekonomian daerah itu berjalan dengan cara yang tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi dan sulitnya penduduk untuk mengakses layanan publik adalah beberapa dampak dari buruknya ketersediaan infrastruktur. Hasil akhirnya kesejahteraan menjadi rendah (tidak tumbuh).

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro memiliki hubungan timbal balik. Pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek *multiplier*, sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada.

Hingga saat ini kondisi infrastruktur di Kepulauan Riau secara makro sudah cukup baik, namun terdapat permasalahan pada pemerataan infrastruktur yang tersedia. Ketidakmerataan infrastruktur itu dapat diidentifikasi dari tingginya ketimpangan kesejahteraan antar-kabupaten/kota.

Ketimpangan antarwilayah untuk mengejar perkembangan kebutuhan ekonomi dan sosial berdampak pada kesejahteraan yang rendah. Banyak kajian menyatakan bahwa untuk kasus Indonesia lambatnya pengembangan infrastruktur dihambat oleh sulitnya masalah pembebasan lahan dan tingginya biaya infrastruktur, sementara swasta memiliki keengganan yang tinggi untuk berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, jalan yang baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Jalan berkondisi baik adalah jalan dengan permukaan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan jalan. Kondisi jalan baik pada tahun 2020 menurun menjadi 60,25% yang mana target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun tersebut sebesar 73,24%. Selanjutnya meskipun kondisi jalan dalam kondisi baik pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 66,27%, namun kondisi tersebut dinilai masih rendah.

Secara umum kawasan dengan sektor dominan industri dan perdagangan (Batam, Tanjungpinang, dan Karimun) memiliki infrastruktur



(jalan dan jembatan) yang cukup baik. Pada sisi lain kawasan dominan pertambangan pada urutan berikutnya dan kawasan dominan pertanian berada pada urutan terakhir. Saat ini kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Kepulauan Riau belum semuanya dalam kondisi baik dan perlu menjadi prioritas agar konektivitas pembangunan antar pulau dapat terjalin. Padahal infrastruktur jalan dan jembatan tersebut mendukung penguatan sektor pariwisata, sektor pendidikan, dan sektor lainnya. Pengembangan infrastruktur sering terhambat oleh sulitnya masalah pembebasan lahan dan tingginya biaya infrastruktur. Sebagai daerah berbasis air maka transportasi laut merupakan transportasi utama bagi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, ketersediaan sarana transportasi yang baik merupakan hal yang prioritas.

Selain dari pada itu, Pemenuhan kebutuhan Air baku harus tetap menjadi prioritas pembangunan dan juga perlu koordinasi dengan instansi terkait bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga pembangunan waduk/embung air serta sistem penyediaan air minum (SPAM) sangat diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan air baku.

Kualitas infrastruktur merupakan hal yang harus diperhatikan. Terkait hal tersebut, tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih kurang. Selain itu, penyedia jasa penyelenggaraan konstruksi dan pengembangan jasa konstruksi bagi pengguna jasa juga belum optimal.

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan pada hakikatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni (livable), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai tentram dan sejahtera. Penataan ruang di daerah sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota, keserasian dengan wilayah di sekitarnya, dasar perizinan pembangunan, maupun administrasi pertanahan. Hal ini membutuhkan komitmen terhadap tata ruang termasuk tata ruang laut.

Penataan kawasan kumuh dilaksanakan secara berkelanjutan. Prasarana umum di kawasan kumuh memerlukan penataan yang baik, seperti aksesibilitas jalan, drainase lingkungan, air bersih, sanitasi, persampahan, proteksi kebakaran, dan ruang terbuka hijau. Hal ini untuk



mendukung cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana umum yang memadai.

Sanitasi yang layak dan aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal yang menjadi perhatian adalah sanitasi di kawasan pesisir dan wisata. Sanitasi tersebut harus terintegrasi dengan pengelolaan air limbah dan drainase. Hal-hal tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

Bencana yang terjadi seringkali menyebabkan terganggunya kualitas lingkungan hidup. Sebagai daerah kepulauan, Kepulauan Riau memiliki kawasan rawan bencana yang cukup banyak, mulai dari tanah longsor, ancaman gelombang pasang dan abrasi serta banjir. Hal ini juga merupakan penekanan dalam pembangunan infrastruktur.

2.3.8. Permasalahan Pembangunan Per Urusan

Permasalahan pembangunan daerah diklasifikasikan ke dalam urusan-urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pendidikan sebagai berikut:

a. Menurunnya Persentase Guru yang sudah sertifikasi

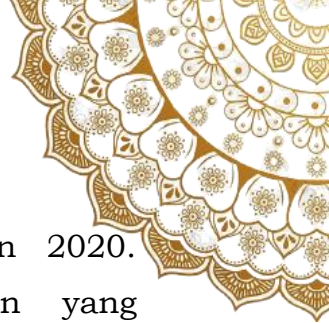
Untuk indikator kedua yaitu kompetensi guru, persentase guru yang sudah sertifikasi setiap tahun memang meningkat, namun peningkatannya sangat kecil. Hal ini dikarenakan hanya sedikit guru yang bisa dilatih untuk mengikuti TPG setiap tahunnya karena program ini dari pusat dan sudah dialokasikan kuotanya untuk masing-masing kabupaten/kota. Tahun 2020 baru sekitar 39,09 persen guru SMA/SMK/SLB yang sudah sertifikasi dan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 38,69 persen.

b. Menurunnya Persentase peserta didik yang memiliki kompetensi non-akademik (minat, bakat dan prestasi)

Persentase Peserta Didik yang memiliki kompetensi non-akademik (minat, bakat dan prestasi) cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 meskipun di tahun 2020 kembali mengalami kenaikan jika dibandingkan untuk tahun 2019 akan tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan.

c. Rendahnya sinkronisasi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja

Lulusan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan banyak yang tidak dapat langsung memasuki dunia kerja karena skill yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan SMK yang



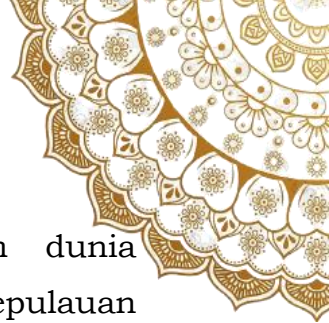
diterima di industri hanya sebesar 60,1% pada tahun 2020. Permasalahan ini disebabkan oleh program keahlian yang diselenggarakan di SMK saat ini di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh tiga program keahlian, yaitu: teknik otomotif (masuk dalam kelompok bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa), Teknik Informatika dan Komputer (bidang keahlian Teknik Informatika dan Komputer), dan program keahlian yang tergabung dalam kelompok bidang keahlian Bisnis dan Manajemen (seperti: keuangan/akuntansi, manajemen pemasaran, dan administrasi perkantoran). Keberadaan program-program keahlian yang lain secara kuantitas jumlahnya sangat kecil, hal ini menyebabkan adanya ketimpangan yang besar dalam hal persebaran program keahlian di SMK. Hal ini menyebabkan adanya mis-match antara supply and demand, baik yang berkaitan dengan kualitas maupun keselarasan antara jumlah lulusan pada bidang keahlian di SMK dengan kebutuhan dunia usaha/industri. Selain itu, kurangnya komitmen yang baik dari pelaku dunia usaha terhadap lulusan SMK menjadi salah satu faktor masih rendahnya lulusan SMK yang di terima di dunia usaha/industri.

d. Belum optimalnya pendidikan berbasis potensi daerah

Penyelenggaraan pendidikan masih lemah dalam menyesuaikan dengan potensi daerah, hal ini juga yang mengakibatkan masih rendahnya kesesuaian lulusan dengan kebutuhan dunia kerja yang menyebabkan daya serap lulusan masih rendah pada dunia usaha dan dunia industri. Penyelenggaraan pendidikan yang belum selaras dengan potensi daerah disebabkan oleh masih belum optimalnya tahap perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap identifikasi belajar, identifikasi potensi, perumusan tujuan penentuan bahan pembelajaran, penggalan sumber dana, metode, alat bantu, dan penentuan waktu. Ketersediaan tenaga pengajar khusus yang terkait dengan potensi daerah yang masih terbatas juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya Pendidikan berbasis potensi daerah.

e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB

Masih terdapat beberapa masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang belum berpartisipasi dalam Pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB. Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam pendidikan menengah sebesar 96,02% pada tahun 2020. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam pendidikan khusus pada tahun 2020 baru sebesar 82,49%.. Apalagi pada masa Pandemi Covid-19, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilaksanakan seperti pada saat kondisi normal



sebelumnya. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan disebabkan karena secara geografis Provinsi Kepulauan Riau adalah wilayah yang didominasi oleh lautan, hal ini tentu saja menjadi permasalahan di dunia pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau karena tidak semua kecamatan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki SMA/SMK/SLB, sehingga menyulitkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia Pendidikan. Walaupun di beberapa daerah sudah dibangun asrama, namun masyarakat masih kesulitan dalam biaya asrama tersebut. Kesadaran Masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA/SMK juga masih kurang, mereka lebih memilih anaknya bekerja atau melaut untuk yang anak laki-laki dan berkeluarga untuk anak perempuan.

Pada jenjang Pendidikan khusus, menyekolahkan anak yang memiliki kebutuhan khusus masih menjadi permasalahan sosial di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat malu dengan kondisi anaknya apabila terekspos dunia luar. Selain itu, untuk masyarakat yang berada di daerah kepulauan, orang tua merasa kesulitan dalam pengawasan dan biaya untuk menyekolahkan anaknya karena sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya.

f. Masih rendahnya angka harapan lama sekolah

Rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 15 tahun sudah mencapai 10,18 tahun pada tahun 2021. Angka ini sudah berada di atas rata-rata lama sekolah Nasional yaitu 8,54 pada tahun 2021. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan angka sebesar 12,98 pada tahun 2021. Angka tersebut sedikit lebih rendah bila dibandingkan Angka Harapan Lama Sekolah secara nasional, yakni 13,08 pada tahun 2021. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh geografis di Provinsi Kepulauan Riau dimana beberapa kabupaten/kota merupakan daerah kepulauan. Selain itu, capaian angka harapan sekolah ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan tinggi masih rendah, daya tampung sekolah yang masih kurang dan belum merata di seluruh wilayah kepulauan, serta biaya sekolah yang tinggi pada wilayah pulau terpencil terutama untuk sekolah kejuruan, masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk praktek lapangan.

g. Adanya kesenjangan mutu dan kualitas Pendidikan

Kesenjangan Pendidikan masih terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ini dapat dilihat dari masih rendahnya SMA/SMK/SLB yang memiliki akreditasi B yang baru sebesar 87,23% pada tahun 2020 dari



seluruh SMA/SMK/SLB yang ada. Kondisi ini akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan Pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah. Kesenjangan pendidikan ini disebabkan karena sekolah belum bisa memenuhi standar yang menjadi syarat dari Akreditasi sekolah. Dengan kata lain masih banyak sekolah yang belum memenuhi syarat Standar Nasional Pendidikan (SNP), terutama masalah sarana-prasarana sekolah dan masalah tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar penilaian khususnya bagi sekolah-sekolah yang baru di bangun 3 tahun terakhir.

- h. Masih rendahnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas para guru di Provinsi Kepulauan Riau masih rendah yaitu pada tahun 2020 hanya sebesar 39,09% guru SMA/SMK/SLB yang sudah tersertifikasi. Selain itu kompetensi tenaga kependidikan pada tahun 2020 hanya sebesar 65,54%. Kompetensi pendidik juga dipengaruhi oleh banyaknya pendidik yang memiliki rangkap tugas di sekolah. Jumlah guru yang tersertifikasi dan kurangnya kompetensi tenaga kependidikan ini disebabkan karena tahun 2020 merupakan masa Pandemi Covid 19 dimana anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan mengalami refocusing anggaran. Pada tahun 2020 Dinas Pendidikan telah menggabungkan kegiatan-kegiatan terkait peningkatan kompetensi untuk pendidik dan tenaga kependidikan akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat di jalankan. Terbatasnya alokasi sertifikasi guru SMA/SMK/SLB dari pusat juga menjadi salah satu kendala yang menyebabkan masih rendahnya guru yang bersertifikasi di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan kompetensinya baik melalui sertifikasi maupun melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.
- i. Berkurangnya jumlah sekolah SMA, SMK, dan MA
Pada periode tahun ajaran 2020/2021 terjadi penurunan jumlah sekolah SMA, SMK, dan MA di Provinsi Kepulauan Riau, jika dibandingkan dengan jumlah tahun ajaran sebelumnya. Berkurangnya jumlah sekolah merupakan dampak dari kebijakan *social distancing* dan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, kondisi perekonomian dan sosial seluruh daerah di Indonesia akibat Covid-19 menyebabkan banyak sekolah swasta yang tutup akibat kesulitan secara ekonomi.



2. Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kesehatan sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19 belum selesai

Pandemi Covid-19 diperkirakan dapat teratasi dengan baik pada tahun 2022. Kondisi ini menjadi angin segar bagi tumbuh kembangnya kegiatan masyarakat dalam kondisi yang normal. Di sisi lain, belum ada kepastian pada tahun tersebut semuanya akan dapat teratasi dengan baik. Sehingga perlu terus dilakukan penanganan yang serius dan terukur terhadap Pandemi Covid-19. Penyebab kondisi pandemi Covid-19 yang belum kunjung selesai adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga masih terus meningkatkan jumlah positif Covid-19. Selain itu, belum terbentuknya herd immunity atas penularan COVID-19 di masyarakat. Merujuk pada rekomendasi World Health Organization (WHO) dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), pembentukan kekebalan kelompok (herd immunity) dapat tercapai melalui pelaksanaan vaksinasi dengan pemenuhan sasaran minimal 70% dari keseluruhan penduduk.

b. Perlunya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga Kesehatan

Rasio dokter per satuan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 hanya sebesar 0,38. Angka ini masih di bawah rasio dokter per satuan penduduk tingkat Nasional yaitu sebesar 0,4. Selain itu, Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 adalah 0,67. Dengan kata lain, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 67 tenaga medis untuk melayani 100.000 penduduk. Rasio tenaga medis ini dari tahun 2019 sebesar 0,88 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga Kesehatan.

Dewasa ini semakin beragam jenis penyakit yang muncul dan menginfeksi manusia. Misalnya Covid-19 yang mengakibatkan Pandemi hingga melumpuhkan roda-roda kehidupan manusia. Oleh karena itu diperlukan sikap tanggap terhadap perubahan tersebut dengan menyediakan SDM medis dan tenaga kesehatan yang siap dalam menangani berbagai penyakit tersebut. Perlunya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan disebabkan karena tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam



melakukan penanganan berbagai kasus Kesehatan termasuk pandemi dari sebuah virus.

Kejadian pandemik COVID-19 membutuhkan peran serta dari semua pihak untuk turut berkontribusi dalam penanganannya. Keberadaan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dan menentukan keberhasilan upaya tersebut. Peran dan kerja nyata tenaga kesehatan dari berbagai jenis profesi sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan COVID-19 sangat krusial dan dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pandemik ini. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah bersinergi dalam upaya penanganan COVID-19 dengan mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk tenaga kesehatan secara terarah, terpadu dan efektif, untuk menangani berbagai kasus COVID-19.

Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Dalam memutus mata rantai penularan COVID-19, tenaga kesehatan tersebut sangat berisiko terpapar COVID-19, sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari Pemerintah yang bersifat finansial maupun non-finansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal dikarenakan terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan. Pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan guna memenuhi asas keadilan. Diharapkan dengan pemberian insentif dan santunan kematian dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19.

- c. Beberapa sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan
Sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 rumah sakit yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSUD Engku Haji Daud. RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) merupakan rumah sakit rujukan provinsi, yang akan ditingkatkan



menjadi rumah sakit Pendidikan dan akan dilakukan pengembangan jejaring layanan jantung di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memenuhi kriteria tersebut, dibutuhkan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang memiliki sertifikasi Catheterization Laboratory (Cath Lab). Untuk saat ini, RSUD RAT belum memiliki SDM tersebut. Sehingga dibutuhkan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dengan sertifikasi Catheterization Laboratory (Cath Lab) dengan status ASN tetap.

Sedangkan RSUD Engku Haji Daud akan ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan regional oleh Kementerian Kesehatan RI dengan rencana pengembangan sebagai RS jiwa. Saat ini RSUD Engku Haji Daud membutuhkan lahan seluas 7,5 ha untuk pengembangan layanan jiwa tersebut. Saat ini SDM khususnya di pelayanan jiwa RSUD Engku Haji Daud, dokter spesialis jiwa berjumlah 2 orang dengan status kepegawaianya pegawai kontrak. Sehingga dibutuhkan dokter spesialis jiwa dengan status ASN tetap.

d. Meningkatnya Angka Kematian Bayi

Secara absolut, jumlah kematian bayi sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 jumlah kematian bayi di Provinsi Kepulauan Riau terus menurun, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga menjadi 15 per 1.000 kelahiran penduduk.

e. Meningkatnya Angka Kematian Ibu

Berdasarkan kematian ibu yang dilaporkan, Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yaitu sebesar 92 per 100.000 KH (38 kematian Ibu/41.292 kelahiran hidup dikali konstanta 100.000). Capaian AKI Tahun 2020 lebih baik jika dibandingkan dengan AKI pada tahun 2019 yang sebesar 98 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan jumlah kasus kematian ibu, juga terdapat penurunan dari 41 kasus kematian ibu ditahun 2019, turun menjadi 38 kasus di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu hingga mencapai 241 per 100.000 kelahiran hidup atau mengalami kenaikan sebesar 149 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020. Penyebab kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 masih didominasi oleh penyebab langsung yaitu pendarahan dan hipertensi dalam kehamilan. Selain itu, persentase penyebab lainnya yang merupakan penyebab tidak langsung juga cukup besar, contohnya kondisi penyakit malaria, HIV, edema paru (suatu kondisi yang ditandai dengan gejala sulit bernapas akibat



terjadinya penumpukan cairan di dalam kantong paru-paru (alveoli), gagal ginjal, batu empedu atau penyakit lain yang diderita ibu.

f. Meningkatkan Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*)

Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,6. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga menjadi 13,4.

g. Masih rendahnya cakupan Neonatus

Cakupan Neonatus dengan Komplikasi di Provinsi Kepulauan Riau yang ditangani menunjukkan angka yang masih rendah yaitu hanya sebesar 32,3% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pencatatan dan pelaporan masih belum optimal khususnya di daerah perkotaan yang memiliki banyak RS dan klinik sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pencatatan dan pelaporan.

h. Belum optimalnya pelayanan kesehatan anak balita

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang masih rendah yaitu sebesar 50,82% pada tahun 2020. Angka ini turun dari awalnya sebesar 69,11% di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu mengenai pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya partisipasi ibu untuk mengikuti kelas ibu balita, kesibukan orangtua terutama ibu pekerja, dan mayoritas balita yang sudah mulai bersekolah (PAUD). Selain itu, kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan posyandu tidak beroperasi selama beberapa bulan dan kegiatan sweeping tidak dilaksanakan khususnya di daerah zona merah.

i. Belum optimalnya penanganan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Berbagai penyakit utama baik yang menular maupun tidak menular masih perlu dioptimalkan dalam penanganannya. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA pada tahun 2020 menurun menjadi 48,87% dari yang awalnya sebesar 68,64% pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan selama pandemi Covid-19 pihak kantor pos yang mengantarkan sampel ke laboratorium TCM tidak mau mengantarkan sampel karena adanya ketakutan tertular Covid-19, masyarakat yang ada keluhan batuk atau terduga TBC selama pandemi Covid-19 tidak



mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut terindikasi dan tertular Covid-19, petugas puskesmas dan kader TB tidak melakukan kegiatan investigasi kontak karena takut tertular Covid-19, serta pengelola program tidak melakukan kegiatan penyisiran kasus TB di RS selama masa pandemi Covid-19.

Di sisi lain penemuan pneumonia mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 67,12% pada tahun 2020 dari awalnya sebesar 36,3% pada tahun 2019. Hal ini karena selama pandemi Covid 19 para petugas di layanan lebih difokuskan pada penanganan kasus Covid 19 dan dengan keluhan serta gejala yang sama sehingga semua pasien yang memiliki gejala pneumonia segera dilakukan tatalaksana COVID 19. Walaupun demikian, data untuk kasus Covid 19 dan data Pneumonia sangat jauh berbeda. Hal ini dikarenakan untuk penemuan kasus dengan gejala pneumonia sebelum ditegakkan diagnosa COVID 19, tidak dimasukkan ke dalam data Pneumonia.

Penanganan terhadap kasus diare juga masih rendah yaitu hanya sebesar 42,4% pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan selama pandemi Covid-19 masyarakat yang ada keluhan infeksi saluran pencernaan atau diare selama pandemi Covid-19 tidak mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut terindikasi dan tertular Covid-19, tidak semua petugas puskesmas sudah terlatih dalam tatalaksana penanganan diare; serta pengelola program tidak melakukan kegiatan investigasi kasus diare di masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

Penangan terhadap penderita ODHA di Provinsi Kepulauan Riau juga belum maksimal, terbukti dari penemuan kasus HIV AIDS baru yang menurun drastis. Pada tahun 2019 penemuan Kasus HIV baru mencapai angka 883, di Tahun 2020 penemuan kasus baru hanya mencapai angka 563. Hal ini dikarenakan masyarakat enggan mengunjungi fasilitas kesehatan akibat pandemi yang terjadi.

- j. Belum optimalnya Universal Child Immunization (UCI)
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2020 turun menjadi 82,10% dari sebelumnya ditahun 2019 mencapai 85,37%. Hal disebabkan karena selama kondisi pandemi Covid-19 sebagian besar posyandu (luar gedung) tidak berjalan. Selain itu, kondisi ini juga disebabkan oleh beban kerja yang tinggi di Puskesmas selama pandemic Covid 19.
- k. Belum optimalnya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Capaian ODGJ berat yang mendapatkan layanan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 81,76% melebihi target Rencana



Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar 45%, akan tetapi masih ada kendala dan hambatan dalam pelayanan pada ODGJ, terutama pada ketersediaan obat-obatan khusus gangguan jiwa di puskesmas. Hal ini dikarenakan obat dimaksud belum masuk ke dalam program obat dari Kemenkes, sehingga penyediaannya hanya berupa *buffer stock* yang disediakan oleh Direktorat Obat Publik Kemenkes. Selain itu tidak tersedianya anggaran pada APBD di daerah untuk pengadaan obat-obat tersebut, hanya mengharapkan bantuan dari Obat Publik Kemenkes. Belum adanya RS Jiwa juga menyebabkan pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ jadi terhambat. Pasien ODGJ harus dirujuk ke RS Jiwa Pekanbaru yang membutuhkan tambahan biaya baik bagi pasien ODGJ maupun bagi keluarga yang mendampingi.

1. Belum optimalnya Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS

Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih perlu ditingkatkan dimana pada tahun 2020 masih sebesar 89,65%. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya data yang valid terkait penerimaan JKN karena belum tersedianya data penduduk yang valid (NIK invalid).

- m. Penanganan limbah medis

Limbah medis yang dihasilkan perlu dilakukan pengelolaan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ke beberapa fasilitas layanan Kesehatan (fasyankes) yang ada di tujuh Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan saat ini belum sesuai dengan standar yang ada dalam aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk pengelolaan limbah medis yang ada di fasyankes, waktu penyimpanan limbah melebihi aturan yang berlaku, masih ada limbah yang disimpan dalam waktu yang lama di fasyankes, belum tersedia sarana/prasarana serta SDM yang menunjang pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai peraturan yang berlaku, belum semua puskesmas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang berizin, belum semua puskesmas yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Incenerator yang dimiliki Rumah Sakit belum memiliki izin operasional, tingginya biaya pengolahan limbah dengan pihak ketiga, belum tersedianya kendaraan pengangkut khusus untuk limbah di wilayah kepulauan, serta belum ada pihak ketiga yang berizin yang



mau mengangkut limbah yang ada di Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Penyediaan Air Baku

Masih terjadinya krisis air baku yakni jumlah air baku yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum curah lintas kabupaten baru tercapai 41,34% dari target 96,79% pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 baru terealisasi sebesar 92,68%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kualitas dan kuantitas air baku yang memadai, serta pengembangannya masih dalam skala kecil. Penanganan air minum juga perlu koordinasi antara instansi terkait Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Perlunya Pembangunan Waduk/Embung Air

Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung baru sangat diperlukan karena kondisi waduk/embung eksisting belum mampu penampung kebutuhan pemenuhan air baku bagi masyarakat dan dunia usaha. Bintan dan Tanjungpinang sangat rentan terhadap banjir saat musim hujan sedangkan saat musim panas sangat rentan dengan kekeringan. Saat ini juga penyediaan air irigasi untuk pertanian belum maksimal. Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung diperlukan karena dapat menjadi salah satu sumber/penyedia air baku dan didukung dengan data Kapasitas Debit/Volume Waduk/Empung Air yang tersedia.

c. Perlunya Optimalisasi Sanitasi yang Layak

Sanitasi yang layak dan aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini kondisi sanitasi masih terbatas, terutama di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.. Pada daerah ibukota, desa wisata, serta daerah pesisir, masalah sanitasi perlu menjadi perhatian. Data yang terintegrasi terkait sanitasi kabupaten/kota juga belum ada. Kondisi sanitasi yang terbatas disebabkan karena infrastruktur pendukung yang ada tidak selaras dengan penambahan penduduk yang ada.

d. Perlunya Komitmen Terhadap Tata Ruang

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan merupakan salah satu hal krusial yang perlu ditangani di Indonesia. Perencanaan Tata Ruang yang tepat dalam rangka



- pencapaian tujuan secara ekonomi, sosial dan lingkungan sangat diperlukan. Penyusunan regulasi terkait Perda membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan juga melibatkan banyak pihak. Perencanaan Tata Ruang yang tepat diperlukan karena dokumen perencanaan merupakan salah satu acuan dalam pembangunan kedepan.
- e. Perlu Peningkatan Infrastruktur Konektivitas antar pulau
- Saat ini kondisi pembangunan di perkotaan dan perdesaan dimana terjadi ketimpangan yang sangat besar, kondisi infrastruktur merupakan salah satu komponen yang dapat dilihat. Pembangunan ekonomi selalu dipusatkan di daerah perkotaan yang lebih maju dan lebih siap infrastrukturnya daripada daerah perdesaan. Kondisi ini dapat diamati di provinsi Kepulauan Riau, Terciptanya konektivitas atau keterhubungan antar wilayah diperlukan untuk membuka ruang-ruang baru untuk menyatukan suatu negara. Ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak akan lagi tercipta karena pembangunan tidak berfokus di wilayah tertentu dan tanpa diskriminasi pada daerah yang dianggap terbelakang. Dengan konsep perspektif regional ini maka pembangunan antar wilayah tidak lagi berdiri sendiri namun ada konektivitas diantaranya. Konektivitas tersebut diwujudkan dalam ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah satu dengan yang lain dan meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah. Pembangunan ini akan meningkatkan dan meratakan pembangunan, minimal pembangunan secara ekonomi, dan memangkas angka kemiskinan.
- f. Perlunya Peningkatan Kompetensi Tenaga Konstruksi
- Tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih kurang. Selain itu, penyedia jasa penyelenggaraan konstruksi dan pengembangan jasa konstruksi bagi pengguna jasa juga belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena minimnya anggaran APBD dalam menyelenggarakan sertifikasi tenaga Ahli Konstruksi dan akibat kebijakan Peraturan dalam Penyelenggaran Jasa Konstruksi yang berubah-ubah dari Kementerian terkait.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai berikut:
- a. Penanganan Bangunan Pasca Bencana Masih Belum Optimal
- Diperlukan peningkatan bagi Desa/Kelurahan Tangguh bencana. Selain itu, personil yang siap siaga dalam penugasan pendataan dan penyediaan perumahan pasca bencana masih terbatas. Hal ini



disebabkan karena belum terbentuknya tim pencari data dan penyediaan perumahan pasca bencana serta minimnya dana untuk sosialisasi tanggap bencana.

b. Belum Optimalnya Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk Mendukung Lingkungan yang Sehat

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman masih memerlukan dukungan peningkatan infrastruktur sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat yang makmur akan tercapai. Hal ini disebabkan pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau, maka kebutuhan akan rumah semakin meningkat. Perumahan yang dibangun baik individu atau yang dikembangkan oleh swasta perlu dukungan peningkatan sarana dan prasarana.

c. Belum Optimalnya Penanganan Permukiman Kumuh dan Permukiman Tidak Layak Huni

Perlu dilakukan revitalisasi Kawasan kumuh dan permukiman tidak layak huni. Pada tahun 2020 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 13%, persentase lingkungan kumuh sebesar 0,05%. Selanjutnya rasio rumah layak huni sebesar 47,25% dan rasio permukiman layak huni sebesar 97% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai terutama dalam penyediaan air bersih serta sanitasi yang layak. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan kualitas lingkungan permukiman melalui program penanganan kumuh dan rumah tidak layak huni.

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah:

a. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur

Potensi konflik yang tinggi dalam penegakan Perda. Penegakan Perda sering kali mendapat berbagai hambatan, terutama dari masyarakat. Kecenderungan masyarakat yang antipati dalam upaya penegakan perda disebabkan karena penegakan perda yang tidak sesuai dengan harapan dan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini juga disebabkan karena penegakan perda yang tidak didukung dengan penyebarluasan informasi yang memadai ke masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang memadai. Selain itu, permasalahan lainnya adalah Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES) adalah sebesar



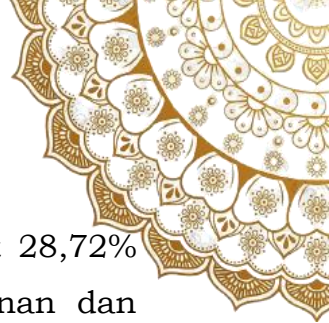
75.40%. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik di masyarakat;

- b. Selain permasalahan di atas, status pandemi COVID-19 sebagai status bencana nasional dan daerah menunjukkan perlunya kesiapsiagaan terhadap kondisi bencana, termasuk bencana Epidemi dan Wabah Penyakit. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pencegahan, mitigasi dan penanganan bencana terhadap bencana Epidemi dan Wabah Penyakit dan potensi bencana yang lainnya;
- c. Masih tingginya Angka Kriminalitas
Kondisi ketentraman dan ketertiban suatu daerah sangat memengaruhi proses pembangunan daerah. Bahkan ini menjadi salah satu prasyarat untuk investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dapat tercermin dari angka kriminalitas yang terjadi di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa angka kriminalitas di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan. Namun kondisinya masih terbilang tinggi yaitu masih mencapai 3.379 kasus di tahun 2021.

6. Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan sosial sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi kepada lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial
Upaya untuk mengoptimalkan pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi kepada lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial masih rendah. Pada tahun 2020 hanya sebesar 51,89% lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi. Hal tersebut di atas disebabkan oleh refocusing anggaran tahun 2020 sehingga anggaran yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi target RPJMD. Target RPJMD sampai tahun 2020 sebanyak 121 lembaga, sedangkan anggaran yg tersedia hanya cukup untuk 96 lembaga.
- b. Belum optimalnya penanganan kepada Pemerlu Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Penanganan terhadap PPKS di Provinsi Kepulauan Riau masih rendah. Penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi



sosial berbasis Lembaga hanya sebesar 27,04% dari target 28,72% pada tahun 2020. PPKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga hanya sebesar 0,61% pada tahun 2020. Masyarakat lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga hanya sebesar 8,05% dari target 9,91% pada tahun 2020. Sedangkan pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga kepada para tuna sosial yakni hanya teralisasi 1,69% dari target 1,96% pada tahun 2020. Rendahnya penanganan PPKS juga disebabkan oleh pendataan PPKS yang belum akurat. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memiliki 6 Pekerja Sosial, terdiri dari 3 peksos tersertifikasi dan 3 peksos belum tersertifikasi. Namun, ketiadaan UPTD panti mengakibatkan peksos belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

- c. Belum optimalnya penanganan kepada keluarga miskin dan keluarga rentan miskin

Penanganan dan pembinaan keluarga miskin dan rentan miskin di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal. Keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP hanya sebesar 1,05% dari target 1,38% pada tahun 2020. Selain itu keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hanya sebesar 0,47% pada tahun 2020. Sedangkan Keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya hanya sebesar 53,97% pada tahun 2020. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran yang menyebabkan bantuan yang diberikan selama ini lebih menitikberatkan pada bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, bukan pada bantuan yang bersifat pemberdayaan seperti UEP dan KUBE. Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*, verifikasi dan validasi (verivali) DTKS merupakan tanggung jawab Menteri Sosial. Selanjutnya, menurut *Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi DTKS*, struktur organisasi pelaksana berada di kab/kota, sedangkan provinsi bertugas memfasilitasi koordinasi perencanaan bersama Kabupaten/Kota.

- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau masih kurang yaitu hanya berjumlah 1 unit, padahal target penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu sebanyak 3 unit. Hal tersebut di atas disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membangun UPTD Panti



- milik Pemerintah dan upaya Pengalihan P3D Lembaga Penyelegaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kota Batam dan Rumah Bahagia Kabupaten Bintan belum dapat dilaksanakan. Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kepri belum memiliki UPTD panti sosial. Oleh karena itu, agar Pemerintah Provinsi Kepri tetap menjalankan kewenangan rehabilitasi sosial di dalam panti dan tetap memenuhi target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, selama ini pelaksanaan rehabilitasi sosial hanya dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada PPKS di dalam panti swasta, bantuan operasional bagi panti swasta, dan perujukan PPKS ke UPTD panti sosial luar daerah.
- e. Belum optimalnya korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang hanya sebesar 25,00% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena lemahnya perhitungan kaji cepat yang dilakukan oleh relawan penanggulangan bencana baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga laporan yang didapat belum didukung data yang valid terhadap jumlah kerugian dari dampak bencana tersebut. Lemahnya perhitungan kaji cepat karena belum adanya pelatihan perhitungan kaji cepat di BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

7. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan tenaga kerja sebagai berikut:

- a. Jumlah pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau masih terbilang tinggi yaitu masih berjumlah 119.595 orang atau 9,91 persen. Disamping itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, TPT pada tahun 2017 mencapai 7,16 persen dan mengalami kenaikan serta penurunan pada tahun berikutnya hingga menjadi 9,91 persen di tahun 2021.
- b. Diperlukan fasilitasi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berkeadilan secara berkala
- Hal ini disebabkan karena kebijakan terkait UMP menjadi salah satu alat yang berfungsi untuk melindungi pekerja maupun pengusaha. Penetapan upah minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
- c. Diperlukan perlindungan sumber daya tenaga kerja daerah.



Hal ini disebabkan adanya permasalahan keselamatan dan perlindungan pekerja yang disebabkan perselisihan dan PHK karena hubungan industrial. Perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap diperlukan meskipun telah terjadi penurunan untuk kasus hubungan industrial pada tahun 2020.

- d. Diperlukan peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis dunia kerja.

Peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis dunia kerja sekaligus sertifikasi tenaga kerja minimal minimal 5.000 tenaga kerja per tahun dapat dilakukan karena besaran calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan yaitu hanya sebesar 40,53% dari target 43,00% pada tahun 2019. Selain, terdapat tenaga kerja yang berasal dari luar Batam tetapi tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri. Faktor lain adalah masih banyaknya jumlah pengangguran dengan tingkat pendidikan formal (SMK) yang belum memiliki kualifikasi kompetensi yang diharapkan oleh pasar tenaga kerja/ dunia usaha serta masih belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait meningkatkan keterampilan pekerja agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.

- e. Diperlukan pelatihan kewirausahaan maupun model pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya ketersediaan anggaran pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan produktivitas. Selain itu, model pelatihannya harus komprehensif yang meliputi a) sistem seleksi peserta, b) materi dan metode pelatihan, c) pemagangan, d) pemodalan. Faktor lain adalah terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja serta belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder

- f. Persentase perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum maksimal atau sebesar 2,74%

Hal ini disebabkan minimnya SDM fungsional pengawas ketenagakerjaan yang jumlahnya tidak berimbang dengan jumlah perusahaan meskipun Rasio Besaran Pemeriksaan Perusahaan telah meningkat dari 28,18% di tahun 2019 menjadi 32,09 % di tahun 2020.

- g. Belum meratanya perluasan kesempatan kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Hal ini disebabkan mekanisme dan sarana informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif serta inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim



sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kurang tertarik di sektor informal. Selain itu, dukungan dana, SDM dan koordinasi antar OPD sangat diperlukan.

h. Balai Latihan Kerja (BLK) yang belum optimal.

Persentase lulusan BLK yang diterima kerja adalah sebesar 70% dari target sebesar 87%. Hal ini disebabkan pelatihan dan uji kompetensi yang diselenggarakan belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja serta terdapat keterbatasan sarana dan prasarana.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pembangunan dan pemberdayaan perempuan

Pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) perempuan hanya sebesar 48,93%, sedangkan laki-laki tercatat sebesar 82,86% pada tahun 2020. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga perlu ditingkatkan dimana pada tahun 2021 baru sebesar 62,02%. Hal ini disebabkan karena dari salah satu Komposite IDG yaitu Prosentase Keterwakilan Perempuan dalam Politik dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2018 sebesar 17% di tahun 2019 turun 6% yaitu sebesar 11%, untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya dengan melakukan berbagai kegiatan melalui OPD yang terkait. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Kegiatan Capacity Building bagi Perempuan Politik Provinsi Kepri yang bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Kepulauan Riau dan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau.

b. Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Kepulauan Riau masih kerap terjadi. Pada tahun 2020 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO mencapai angka 33,42%. Hal ini disebabkan karena masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kepulauan Riau. Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO disebabkan banyak faktor diantaranya faktor individu, sosial budaya dan ekonomi. Faktor individu masih ada perempuan yang belum memahami hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan dan terbebas dari segala macam diskriminasi. Faktor sosial budaya dimana masih terjadi kesenjangan



gender dalam ranah sosial budaya, konsep kesetaraan dalam keluarga merupakan kunci dalam menghentikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian merupakan salah satu indikator terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dimana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Faktor ekonomi, perempuan dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah rentan mengalami kekerasan, pandemi covid-19 menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Selain itu, posisi geografis dan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang strategis menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah transit dan tujuan terjadinya perdagangan orang. Hasil identifikasi Bareskrim Polri, tujuh dari sepuluh rute perdagangan orang di Indonesia melintasi Batam Provinsi Kepulauan Riau.

c. Perlindungan terhadap anak masih perlu ditingkatkan

Kekerasan terhadap anak masih terjadi dengan ditunjukkan Rasio Kekerasan Terhadap Anak sebesar 2,90% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena faktor rendahnya ekonomi, pendidikan, psikologis dan lingkungan sosial. Faktor ekonomi, karena selama masa pandemic Covid-19 ini sangat mempengaruhi ekonomi keluarga, sehingga perhatian terhadap anak berkurang dan keluarga lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Faktor pendidikan, anak-anak tidak bersekolah dan sebagian anak-anak kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua sehingga rentan menjadi korban kekerasan. Faktor psikologi orang tua dalam menghadapi persoalan keluarga, juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak, sehingga mengakibatkan pemenuhan terhadap hak-hak mereka juga menjadi terabaikan.

9. Urusan Pangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pangan sebagai berikut:

a. Mewujudkan swasembada pangan daerah.

Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau berupa kepulauan sehingga pemenuhan kebutuhan pangan berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketergantungan pangan sehingga perlu meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi dan palawija. Pada tahun 2021 produksi padi menurun dari 1.150 ton pada tahun 2019 menjadi 877



ton pada tahun 2021.

- b. Peringkat Provinsi Kepulauan Riau pada Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2019 berada di posisi 28 dari 32 provinsi. Penyebab utamanya adalah rendahnya Indeks Ketersediaan Pangan yang diukur melalui indikator rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita. Hal ini dikarenakan Provinsi Kepulauan Riau bukan merupakan daerah penghasil atau produksi beras sebagai bahan makanan pokok. Kebutuhan bahan pangan sangat tergantung pada *supply* pangan dari wilayah lain
- c. Adanya potensi pengembangan tanaman pangan terbatas yang tidak mencapai target sebesar 300 ha.
Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pemanfaatan dan pengolahan lahan sawah karena keterbatasan modal petani. Pada Tahun 2020, luas lahan panen padi adalah seluas 298,52 ha sehingga masih sekitar 1.095,48 ha yang belum diolah secara maksimal oleh petani berdasarkan Penetapan Luas Baku Lahan Sawah Nasional Tahun 2019 yaitu sebesar 1.394 ha.
- d. Perlunya peningkatan pada Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat.
Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat meningkat dari 57,31% pada tahun 2019 menjadi 67,18% pada tahun 2020. Namun, hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan kembali karena perlindungan terhadap konsumen perlu dimaksimalkan sehingga swasembada pangan yg aman dan sehat semakin terwujud.

10. Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanahan adalah pengembangan infrastruktur terhambat oleh sulitnya masalah pembebasan lahan dan tingginya biaya infrastruktur.

Perlu disadari bersama bahwa akses masyarakat terhadap sumberdaya lahan telah menjadi isu yang sangat penting, karena permasalahan ini tidak saja menyangkut faktor produksi namun menjadi faktor yang menentukan hubungan sosial dan perkembangan pembangunan dan kehidupan masyarakat. Satu hal yang menarik untuk dikaji adalah masalah ketimpangan akses masyarakat terhadap sumberdaya agraria khususnya lahan yang menyangkut masalah penguasaan, kepemilikan dan pengusahaan lahan. Kondisi tersebut telah menyebabkan ketimpangan pada pemanfaatan yang diikuti pada perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat yang mempunyai akses dan yang tidak mempunyai akses terhadap sumber daya lahan.



11. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan lingkungan hidup sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penanganan pencemaran air

Belum optimalnya penanganan pencemaran air yang disebabkan oleh perusahaan, minyak kapal, ataupun pribadi. Hal ini perlu dukungan berupa penegakan regulasi baik berupa pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan maupun peningkatan koordinasi antara pihak perusahaan dan Dinas Lingkungan Hidup terkait (kabupaten/kota/provinsi) dalam mengendalikan pencemaran air oleh industri. Aparat Hukum juga perlu memberikan ketegasan terkait aktifitas Tank Cleaning yang mencemari Perairan Provinsi Kepulauan Riau yang sangat merugikan Dunia Usaha maupun Pariwisata. Data pada Mei 2021 menunjukkan bahwa jumlah limbah sludge oil yang mencemari di Kawasan Resort lagoi yang belum dikelola dan dikemas dalam drum sebanyak 113,5 ton ($\pm$ 440 drum), sedangkan tumpahan minyak yang terjadi di Nongsa Kota Batam yang telah dikelola sebanyak 147,5 Ton dan yang belum dikelola 36 ton.

b. Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah

Dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan, sangat perlu menjaga kebersihan pantai dan laut. Salah satunya yakni dengan pembuatan masterplan penanganan persampahan pada Organisasi Perangkat Daerah Terkait. Hal di atas disebabkan sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 bahwa 0 s/d 12 Mil adalah kewenangan provinsi, dan kondisi data indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2020 terealisasi sebesar 67 dari target yang diharapkan ialah 69,62.

c. Potensi bencana alam dan perubahan iklim

Risiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim menjadi tantangan tersendiri bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai bencana alam dan cuaca ekstrim seperti gelombang yang tinggi. Selain itu, hal di atas disebabkan banyaknya penebangan Pohon Hutan dan Pohon Mangrove untuk pembangunan Pemukiman dan Industri.

d. Kurangnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)

RTH memiliki banyak fungsi antara lain memiliki fungsi ekologi, estetis, dan sebagai ruang bagi masyarakat untuk dapat berekreasi. Untuk itu, kuantitas dan kualitas RTH yang ramah anak, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas sangat diperlukan. Oleh karena itu,



diperlukan koordinasi yang baik antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

- e. Perlunya Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Pelayanan Kesehatan

Pemahaman terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan masih maraknya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil* di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal yang labuh jangkar dan melakukan kegiatan tank cleaning secara ilegal dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang lain adalah Limbah Pelayanan Kesehatan, untuk itu penanganan limbah B3 perlu menjadi perhatian khusus. Selain itu, sumber kedua dari pencemaran air adalah sampah. Produksi sampah berjalan seiring dengan perekonomian yang tumbuh. Hal di atas disebabkan mahalnya biaya yang akan dikeluarkan oleh kapal-kapal maupun perusahaan dalam pengelolaan limbah B3.

- f. Meningkatnya volume sampah yang tidak diiringi dengan penambahan tempat pembuangan sampah.

Selama beberapa tahun terakhir, tidak terdapat penambahan tempat pembuangan sampah maupun peningkatan daya tampung TPS. Sementara disisi lain jumlah penduduk semakin bertambah dan tentu berbanding lurus dengan pertambahan volume sampah.

- g. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga banyak sampah rumah tangga dan sejenisnya yang mencemari laut, khususnya dalam radius 0-12 mil laut yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya pelayanan pindah datang penduduk.

Pelayanan pindah datang penduduk di Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal dikarenakan pelaporan data dari perangkat desa/kelurahan dan kecamatan masih rendah. Hal ini disebabkan karena adanya penduduk yang melakukan kepindahan namun belum melaporkan ke disdukcapil setempat dengan alasan belum mau menetap secara permanen di wilayah/daerah tersebut.



- b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Masyarakat masih banyak yang belum memahami pentingnya pengkinian dalam pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selama ini kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap peristiwa penting terkait dengan cakupan akta pencatatan sipil, pengkinian data dalam Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, serta belum tertibnya penduduk dalam mengisi biodata kependudukan sebagai dasar pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat (penduduk) yang belum menyadari pentingnya identitas kependudukan yang akurat dan valid. Penduduk datang untuk mengurus dokumen kependudukan jika hanya dibutuhkan pada saat tersebut seperti BPJS, masuk sekolah, test penerimaan ASN, TNI/POLRI dan lain sebagainya.

- c. Status perekaman yang belum dicetak

Kondisi ini dikarenakan updating biometrik dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk status Print Ready Ready (PRR) atau status siap cetak. Hal ini disebabkan karena status PRR adalah melalui proses penunggulan biometric secara nasional dengan membandingkan sidik jari, iris mata, dan data pribadi penduduk tersebut dengan data penduduk se-Indonesia yang terdapat dalam database kependudukan secara nasional. Proses tersebut membutuhkan waktu dan komunikasi data yang stabil antar Pusat dan daerah kabupaten/kota sehingga KTP-el penduduk dapat dicetak hanya jika status perekaman datanya sudah Print Ready Record (PRR).

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya pengembangan BUM Desa dan SDM di Desa

Dukungan lintas program atau lintas sektor dalam mendukung pengembangan BUM Desa dan SDM di Desa belum berjalan secara optimal, sehingga kualitas SDM di desa serta pengembangan BUM Desa masih lemah. Hal ini disebabkan karena belum ada program/kegiatan pengembangan BUM Desa yang terintegrasi di Provinsi Kepulauan Riau, dan belum adanya intervensi dalam bentuk rencana aksi lintas OPD di tingkat daerah terhadap pengembangan BUM Desa.



b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Peran lembaga TTG dalam penyebarluasan informasi terkait Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada masyarakat di desa masih kurang, sehingga mengakibatkan Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan TTG. Pada tahun 2018 terdapat 2 TTG yang dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan pada tahun 2021 hanya 1 TTG yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

c. Peran Lembaga kemasyarakatan desa belum optimal

Peran aktif lembaga kemasyarakatan di desa (RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM) masih belum optimal yang disebabkan masih minimnya pembinaan, penguatan kapasitas dan dukungannya sebagai mitra memberdayakan masyarakat. Hal ini disebabkan karena belum seluruh lembaga kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan pelatihan yang memadai. Apalagi pada tahun 2020 terjadi krisis akibat pandemi Covid 19. Sehingga banyak kegiatan pembinaan yang tertunda.

d. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

Beberapa Kabupaten di Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau belum memiliki Perda tentang kelembagaan masyarakat desa, sehingga pembinaan, penguatan kapasitas kelembagaan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belum dilakukan sosialisasi secara komprehensif terkait Perda tentang kelembagaan masyarakat desa oleh kabupaten/kota yang sudah menerbitkan Perda tersebut.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:

a. Pemanfaatan bonus demografi yang belum optimal

Pada tahun 2020 Provinsi Kepulauan Riau berada pada periode bonus demografi, dimana proporsi penduduk usia produktif meningkat sebesar 70,60%. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau memasuki masa transisi menuju Ageing Population (penduduk lansia meningkat) menjadi 5,3 % pada tahun 2020 dari 3,4% pada tahun 2010. Hal ini disebabkan karena Perubahan struktur penduduk menuju pendewasaan usia penduduk. Meningkatnya penduduk usia produktif Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Laporan Potret SP 2020 sebesar 70,60% memperlihatkan terjadi perubahan struktur penduduk Kepulauan Riau. Dengan struktur penduduk demikian, Kepulauan Riau berada pada periode bonus demografi, memiliki jendela



kesempatan (windows of opportunities). Jika dimanfaatkan secara optimal, maka dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi membawa implikasi meningkatnya angkatan kerja (labour supply), memberi peluang untuk meningkatkan tabung (saving) serta meningkatkan kualitas SDM (human capital). Jika Kepri tidak berhasil memanfaatkan melimpahnya penduduk usia produktif pada masa bonus demografi dengan baik, maka akan terjadi kondisi sebaliknya yakni akan menjadi beban.

- b. Menurunnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Provinsi Kepulauan Riau

Penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar 83,10% pertahun dan mengalami penurunan menjadi 42,26% pertahun pada tahun 2021.

- c. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya merencanakan kelahiran

Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau belum optimal dalam kepesertaan ber-KB. Berdasarkan Data BKKBN Tahun 2020, cakupan kepesertaan ber KB Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau masih relative rendah, yakni sebesar 49,01%. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kepesertaan berKB tersebut adalah karena masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya merencanakan kelahiran, serta alat kontrasepsi yang tidak selalu tersedia sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya sosialisasi, edukasi dan pemberian informasi tentang manfaat ber KB, rendahnya pendampingan kepada para akseptor dan calon akseptor, adanya keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia.

- d. Meningkatnya kehamilan pada usia remaja

Kehamilan pada usia remaja di Provinsi Kepulauan Riau masih kerap terjadi. Akibatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurun serta meningkatnya risiko stunting pada balita. Hal ini disebabkan karena angka kelahiran remaja yang tinggi akan mempengaruhi ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatnya angka kematian ibu, bayi dan balita, serta meningkatnya prevalensi stunting. Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, rendahnya ketahanan remaja (youth resiliensi), serta rendahnya ketahanan keluarga juga menjadi faktor meningkatnya kehamilan pada usia remaja. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait



pentingnya merencanakan kelahiran serta meningkatnya kehamilan pada usia remaja. Provinsi Kepulauan Riau diharapkan segera memaksimalkan pengetahuan masyarakat untuk berganti cara ber-KB dengan Metode Konstrasepsi Jangka Panjang.

15. Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perhubungan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu ditingkatkan

Arus orang dan arus barang saat ini masih terhambat. Untuk itu perlu peningkatan dan pembangunan penyediaan transportasi antar pulau seperti pembangunan Pelabuhan. Hal di atas disebabkan Kebutuhan akan prasarana transportasi laut (Pelabuhan) dan sarana (kapal) di Kepulauan Riau belum terpenuhi secara ideal, jumlah pelabuhan yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat yang tersebar di pulau pulau sebanyak minimal 38 Pelabuhan sedangkan jumlah pelabuhan yang ada sebanyak 33 pelabuhan.

- b. Perlunya peningkatan fasilitas keselamatan keamanan transportasi
Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 92,19%, sedangkan realisasinya sebesar 96,16%. Walaupun target telah terealisasi, layanan transportasi, keselamatan dan keamanan transportasi masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan ketersediaan fasilitas keselamatan keamanan transportasi di jalan-jalan provinsi Kepulauan Riau belum memadai jumlahnya. Jumlah fasilitas keselamatan keamanan transportasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 325.594 unit sedangkan yang tersedia sebanyak 300.954 unit atau masih terdapat kekurangan 25.000 uni.

- c. Ketersediaan prasarana lalu lintas masih belum optimal
Hal di atas disebabkan ketersediaan prasarana lalu lintas belum mencukupi jumlahnya dimana kebutuhan akan prasarana lalu lintas berjumlah 65 Unit sedangkan yang tersedia baru 53 unit, selain itu pembangunan prasarana lalu lintas (Pembangunan Halte, Pembangunan Jembatan penyeberangan Orang dan Traffic Light).

- d. Prasarana lalu lintas baru harus ditingkatkan untuk pemenuhan keselamatan.

Hal di atas disebabkan kurangnya perawatan prasarana dan fasilitas keselamatan yang ada, dan juga kondisi prasarana yang tidak dalam kondisi baik (rusak) dari jumlah prasarana yang ada sebanyak



300.954, unit 30% di antaranya Kurang lebih 90.000 unit dalam kondisi perlu perbaikan/penggantian dan perawatan.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan komunikasi dan informatika adalah keterbukaan informasi publik yang belum maksimal. Keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sumber daya dan infrastruktur TIK. Selain itu, aplikasi yang masih disusun secara parsial dan belum terintegrasi dengan baik menjadi salah satu faktor peting penyebab belum optimalnya keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal-hal tersebut berdampak belum optimalnya pencapaian nilai e-Government. Permasalahan yang lain adalah ketersediaan komunikasi secara merata di seluruh wilayah Kepulauan Riau sehingga tidak terjadi “blank spot” karena ketidaktersediaan sarana komunikasi.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai berikut:

- a. Diperlukan fasilitasi dan pengembangan UMKM di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Hal tersebut sebagai wujud pembinaan pemerintah yang saat ini mencapai 0,45% untuk UMKM serta sebagai penguatan untuk usaha skala mikro yang kekurangan modal berupa bantuan modal usaha, digitalisasi pemasaran UMKM serta mengoptimalkan pertumbuhan sektor UMKM yang volume usaha per UMKM menurun dari Rp506.670.000,00 pada tahun 2019 menjadi Rp493.430.000,00 pada tahun 2020.

- b. Koperasi belum jadi kebutuhan masyarakat yang disebabkan masyarakat belum merasakan manfaat dari pembentukan koperasi. Hal ini berakibat pada koperasi aktif yang masih rendah yaitu 40,85% dari 55,80% yang menjadi target serta tingkat kesehatan koperasi yang belum maksimal sebesar 41,86. Selain itu, terjadi penurunan persentase koperasi aktif pada tahun 2021 hingga menjadi 40,18%.
- c. Koperasi belum mampu menjadi pendukung pengembangan ekonomi lokal.

Hal ini disebabkan oleh tidak maksimalnya jumlah koperasi yang dibina tahun 2019 sebanyak 660 koperasi menjadi 316 koperasi pada tahun 2020. Selain itu, penyebab lainnya adalah tidak adanya



modernisasi koperasi, minimnya kegiatan usaha yang dikelola atau hanya di bidang kredit serta manajemen koperasi belum profesional karena anggotanya memiliki tingkat pemahaman kepengurusan yang masih rendah.

18. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

a. Penanganan industri yang terdampak Covid-19

Penanganan industri yang terdampak Covid-19 dapat dilaksanakan dengan pemberian insentif, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah atau fasilitasi peminjaman modal.

b. Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP).

Hal ini ditunjukkan nilai IKM yang menurun dari 82,34% pada tahun 2019 menjadi 81,93% pada tahun 2020. Kemudahan layanan perizinan dengan *one day service* sangat diperlukan agar jumlah dan nilai investasi dapat semakin meningkat dan selaras dengan iklim investasi nasional serta menghindari semakin panjangnya alur birokrasi perizinan.

c. Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.

d. Sebaran investasi yang belum proporsional, secara antar wilayah maupun antar sektor yang saat ini didominasi oleh Batam dan adanya hambatan investasi karena wilayah Kepulauan Riau didominasi oleh laut. Adanya kajian tentang peta potensi antar wilayah dan antar sektor sangat diperlukan

e. Kemanfaatan investasi yang belum maksimal.

Hal ini disebabkan saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM. Selain itu, sebagian besar investasi merupakan sektor industri berskala besar untuk kebutuhan industri nasional yang belum ada keterkaitan dengan sumber daya lokal.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:

a. Pembinaan organisasi kepemudaan belum optimal

Kondisi ini dapat terlihat dari minimnya ruang-ruang publik yang diperuntukkan bagi para pemuda untuk pengembangan minat dan



- bakat mereka. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum adanya pengaturan di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang jelas tentang kepemudaan; belum optimalnya peran dan fungsi wadah kepemudaan seperti Gerakan Pramuka, Karang Taruna, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi di lingkungan Perguruan Tinggi, Organisasi Remaja/Pemuda Masjid atau tempat Ibadah, dan Organisasi Fungsional Pemuda lainnya yang menyebabkan tersendatnya kaderisasi kepemimpinan; belum ada Sentra Pemberdayaan Pemuda yang merupakan Prasarana Kepemudaan sebagai wadah Pelayanan Kepemudaan untuk melaksanakan program penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; serta belum ada Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai implementasi dari Koordinasi Strategis Lintas Sektor sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- b. Rentannya pemuda terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta masalah sosial di kalangan pemuda antara lain kenakalan remaja, pergaulan bebas, kriminalitas, premanisme, narkoba, psikotropika, dan penggunaan zat adiktif masih cukup tinggi dan masih menghantui pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ini disebabkan karena kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam mengatasi dekadensi moral, kenakalan remaja, pergaulan bebas, kriminalitas, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya masih bersifat parsial dan belum menyentuh sasaran kepada Pemuda belum bekerja (menganggur) yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Persebaran Pemuda yang tidak merata, disebabkan karakteristik wilayah kepulauan yang terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten/kota yang rentang kendalanya cukup jauh dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura dan Vietnam yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial di kalangan pemuda.
- c. Rendahnya sarana dan prasarana olahraga
- Sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal. Kondisi ini mengakibatkan kurang maksimalnya peningkatan bakat dan minat masyarakat dalam pengembangan kemampuan berolahraga. Penyebab lainnya adalah tidak tersedianya anggaran pendukung pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan yang



berkesinambungan di Provinsi Kepulauan Riau.

d. Rendahnya prestasi olahraga

Pemerataan pembinaan terhadap cabang olahraga tertentu masih rendah, hal ini mengakibatkan kurang mampunya tim dalam meraih prestasi olahraga dalam berbagai bidang baik pada level lokal, Nasional, maupun internasional. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya SDM pelatih secara kuantitas dan kualitas untuk menyiapkan bibit unggul penyumbang prestasi keolahragaan, belum optimalnya budaya berolahraga di masyarakat, profesi atlet belum menjadi pekerjaan yang dipercaya oleh masyarakat, belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak terutama pihak swasta dalam pembinaan olahraga, anggaran untuk pembinaan olahraga belum menjadi skala prioritas, serta penyelenggaraan pelatihan sertifikasi bagi pelatih sangat minim dilakukan.

20. Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan statistik adalah dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Single Data Statistik (SDS) belum optimal. Hal ini disebabkan produsen data (perangkat daerah) belum maksimal memberikan data sektoral secara terbuka, dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) yang masih terbatas. Penyebab lainnya adalah masih kurangnya kesadaran OPD untuk menyediakan data yang dibutuhkan dan juga disebabkan oleh keterbatasan SDM di bidang Statistik dan Database di Provinsi Kepulauan Riau.

21. Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan persandian adalah infrastruktur persandian dan keamanan informasi masih belum memadai. Salah satu penyebabnya adalah peralatan persandian yang tersedia hanya yang berasal dari BSSN. Penyebab lainnya adalah Kuantitas dan kesempatan pengembangan SDM yang terbatas.

22. Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kebudayaan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kebudayaan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Penyebabnya adalah perlu peningkatan dalam mengoptimalkan



pengelolaan kekayaan budaya daerah sebagai sarana peningkatan ekonomi bagi pelaku budaya dan masyarakat diantaranya penyelenggaraan even tahunan bidang kebudayaan yang berkelanjutan, memaksimalkan kreatifitas masyarakat/pelaku budaya dalam menciptakan produk seni berbasis budaya.

b. Pengelolaan warisan budaya yang belum optimal.

Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hal, antara lain peninggalan budaya yang belum dibuat dalam bentuk manuskrip dan salinan digital serta alat peraga dalam museum daerah; sarana dan prasarana pemeliharaan dan penyimpanan artefak/cagar budaya yang belum memadai; dukungan SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas; kurangnya karya ilmiah dan kajian pendukung tentang karya budaya; persentase bangunan berciri khas Melayu yang sebesar 14,32% dari 32,33% yang ditargetkan; serta belum dilaksanakan zonasi situs dan kawasan cagar budaya secara maksimal. Hal-hal di atas disebabkan sebagaimana besar kabupaten/kota belum menetapkan cagar budaya sehingga belum dapat menetapkan zonasi sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hal tersebut menyebabkan masih belum optimalnya pencapaian indikator Warisan Kebudayaan.

c. Budaya yang semakin terkikis oleh zaman.

Hal ini ditunjukkan bahasa daerah yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Selain itu, belum optimalnya peran media pendidikan dan museum dalam melestarikan kebudayaan. Hal-hal di atas disebabkan belum maksimalnya regulasi terkait penggunaan bahasa daerah di Kepri, juga dikarenakan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang berfokus pada bidang kebudayaan masih belum memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam membentuk suatu lembaga pendidikan yang berfokus kepada bidang kebudayaan, salah satunya masih kurangnya SDM, (Perguruan Tinggi yang berbasis budaya daerah).

d. Optimalisasi Pulau Penyengat dan pendirian Museum Melayu Center sebagai pusat budaya melayu.

Hal ini disebabkan karena belum adanya museum Provinsi Kepulauan Riau, mengingat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Museum “PP 66 Tahun 2015 Tentang: Museum”, pasal (3) ayat 1 Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum.



23. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perpustakaan adalah:

- a. Menurunnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dari yang semula 48,61% ditahun 2018 menurun menjadi hanya 14,45% ditahun 2020;
- b. Menurunnya Persentase pengunjung perpustakaan per tahun menjadi -44,19% pada tahun 2021;
- c. Diperlukan pemajuan budaya dan peningkatan minat baca. Hal ini disebabkan karena penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi Perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat masih belum optimal. Data dari Indeks Pembangunan Kebudayaan menunjukkan bahwa sampai dengan Tahun 2019, baru 13,55% penduduk usia 10 tahun keatas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengunjungi Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat dari skor maksimal seharusnya 25%. Oleh karena itu, hal ini berdampak pada belum optimalnya pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan pada indikator Budaya Literasi.

24. Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kearsipan adalah nilai hasil evaluasi pengawasan yang diukur oleh ANRI terhadap penyelenggara pengelolaan arsip di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan pada tahun 2019 adalah 54,14 atau berkategori “CC”. Beberapa kendala terhadap penyelenggaraan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. masih belum lengkapnya instrument dasar pengelolaan arsip dinamis berupa klasifikasi arsip (KA), jadwal retensi arsip (JRA), dan system klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis (SKKAD);
- b. belum optimalnya pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun;
- c. belum optimalnya pengelolaan arsip statis; dan
- d. belum terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar.

25. Urusan kelautan dan perikanan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kelautan dan perikanan adalah:

- a. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ruang Laut
Pemanfaatan potensi ruang laut memerlukan campur tangan berbagai pihak baik pemerintah pusat, kabupaten maupun kota dalam rangka



- optimalisasi industri perikanan dan kelautan. Selain itu juga memerlukan penyesuaian dengan RTRW terkait pengembangan wilayah ruang laut. Pemanfaatan potensi ruang laut belum optimal disebabkan karena telah disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka penerbitan izin lokasi dan izin lokasi laut sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/Permen-KP/KP tentang izin lokasi, izin pengelolaan dan izin lokasi di laut tidak berlaku lagi.
- b. Terdapat *Illegal fishing, unregulated fishing dan unreported fishing*.
Data menunjukkan kasus *illegal fishing* pada tahun 2016 sebanyak 101 kasus, Tahun 2017 sebanyak 76 kasus, Tahun 2019 sebanyak 89 kasus, serta pada tahun 2020 sebanyak 28 kasus. Hal ini menyebabkan belum optimalnya produksi perikanan tangkap di wilayah provinsi kepulauan riau yang terealisasi sebesar 310.025,08 Ton pada tahun 2021. Selain itu, hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha perikanan untuk melaporkan dan melegalkan aktifitas usaha yang dijalankannya serta diperlukannya pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tentang peraturan terkait kelautan dan perikanan. Kasus illegal fishing pada tahun 2016 sebanyak 101 kasus, Tahun 2017 sebanyak 76 kasus, Tahun 2019 sebanyak 89 kasus, serta pada tahun 2020 sebanyak 28 kasus.
- c. Perlunya dukungan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
Nelayan saat ini masih menangkap ikan dengan armada yang cenderung tradisional. Penggunaan alat tangkap berbahaya yang dapat merusak padang lamun dan terumbu karang juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa peralatan maupun teknologi perikanan dan kelautan, sehingga terjadi peningkatan penguasaan teknologi bagi nelayan dalam rangka optimalisasi penangkapan ikan. Selain itu, hal tersebut disebabkan karena Armada Penangkapan dengan menggunakan KM >30 GT sejumlah 241 unit pada tahun 2020
- d. Kesejahteraan nelayan belum maksimal
Hal ini terkait masih belum optimalnya kualitas dan kemampuan nelayan dalam membudidaya dan mengolah hasil perikanan terutama dalam hal diversifikasi hasil olahan produk perikanan. Selain itu, hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kemampuan



masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap manajemen usaha dan teknologi terkini dalam rangka pengembangan usahanya sehingga diperlukan pelatihan manajemen dan pelatihan peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar hasil perikanan.

- e. Infrastruktur Bidang Kelautan dan Perikanan masih perlu pembenahan

Hal ini memerlukan peningkatan infrastruktur penunjang bidang kelautan dan perikanan. Jalan, air bersih, pelabuhan perikanan, serta pabrik es perlu dibangun serta menghilangkan hambatan rantai pasok. Selain itu, hal tersebut disebabkan karena belum tersedianya tempat pelelangan ikan serta sarana pendukung. Selain itu juga pola monopsoni yang masih berjalan sehingga perlu difasilitasinya nelayan untuk permodalan dalam melaksanakan aktifitasnya.

- f. Tingkat akurasi data oseanografi perlu menjadi perhatian karena menyangkut estimasi peralihan musim yang mempengaruhi kegiatan budidaya dan perikanan.

- g. Status Kawasan Konservasi belum maksimal.

Capaian peningkatan status Kawasan konservasi perairan level 3 saat ini baru tercapai 1 kawasan dari target 4 kawasan pada tahun 2019. Hal ini memerlukan pemanfaatan sumber daya alam secara ekonomis, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, hal tersebut disebabkan karena terjadi Perubahan Peraturan Menteri KKP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Perubahan mengenai level kawasan berdasarkan putusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28 Tahun 2020 tentang Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi sehingga perlu disesuaikan kembali data serta persyaratan yang harus dilengkapi.

- h. Terdapat alih fungsi hutan mangrove sebagai akibat penambangan dan penebangan usaha arang.

Hal tersebut disebabkan karena masih terdapatnya aktifitas yang diakibatkan kearifan lokal di beberapa lokasi dan ini perlu dilakukan sosialisasi sehingga masyarakat lokal tidak lagi menebang hutan mangrove dan mengganti sumber energi alternatif.

- i. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Baik Aspek Permodalan Maupun Pemasaran.

Hal ini menunjukkan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat nelayan perlu dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tingkat pendidikan masyarakat (nelayan) saat ini masih belum mumpuni, sehingga perlu pemberdayaan dari pihak



terkait. Pemberdayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan wilayah geografis kepulauan. Adanya kegiatan pemberdayaan diharapkan pengetahuan masyarakat (terutama nelayan) meningkat, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah industri produk olahan maupun meningkatkan daya saing hasil pemasaran.

- j. Perlunya Pembangunan Industri Pengolahan Rumput Laut Maupun Perikanan.

Hal ini disebabkan karena Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pengembangan rumput laut, sehingga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan nilai tambah maka diperlukan pembangunan industri rumput laut.

26. Urusan Pariwisata

Secara umum, permasalahan di urusan pariwisata tercermin dalam penurunan kunjungan wisatawan, khususnya di wisatawan mancanegara. Hal ini diikuti dengan penurunan rata-rata lama tinggal wisatawan dan rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau. Selain itu, dunia pariwisata sangat terdampak oleh situasi pandemi Covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan di urusan pariwisata sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya destinasi obyek wisata di Provinsi Kepulauan Riau.
Destinasi obyek wisata di Provinsi Kepulauan Riau memerlukan pengembangan obyek-obyek wisata baru. Saat ini telah terdapat 16 (enam belas) Destinasi Pariwisata Unggulan Pariwisata Provinsi (DPUD) dan terdapat 516 objek wisata di Kepulauan Riau. Namun demikian, diperlukan pengembangan obyek wisata baru sebagai daya tarik wisata di Kepulauan Riau. Destinasi obyek wisata yang dapat dikembangkan antara lain adalah wisata budaya (sejarah), religi, alam, bahari, kuliner, geopark dan lainnya. Pengembangan kawasan wisata dapat dilaksanakan di Galang Rempang. Pengembangan wisata alam, olahraga, dan rekreasi dapat dilaksanakan di Kabupaten Bintan. Pengembangan wisata bahari dapat dilaksanakan di Kabupaten Natuna. Pengembangan pusat wisata sejarah dan budaya dapat dilaksanakan di Kabupaten Lingga. Pengembangan wisata bahari dan ekowisata dapat dilaksanakan di Kabupaten Anambas. Selain itu, perlu dikembangkan obyek-obyek wisata baru di Karimun, integrasi pariwisata Tanjungpinang-Bintan serta menjadikan Batam sebagai tujuan utama wisatawan yang menghadiri kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang disebut dengan wisatawan bisnis yang memiliki sebuah tujuan di luar wisata rekreasi di



Indonesia.

- b. Diperlukan fasilitasi wisata unggulan kabupaten dan kota.
Hal ini disebabkan karena belum adanya penetapan daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi selain penetapan 16 (enam belas) Destinasi Pariwisata Unggulan Pariwisata Provinsi (DPUD). Hal ini berimplikasi pada fasilitasi pengembangan obyek wisata unggulan kabupaten/kota hanya terfokus pada lokasi penetapan tersebut.
- c. Pengembangan wisata yang ramah kesehatan sebagai implikasi dari masa pandemi Covid 19.
Sebagai dampak pandemi Covid-19, pengelola destinasi wajib menyiapkan wisata ramah kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan agar wisatawan aman dan nyaman. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memfasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata yang ramah kesehatan.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata.
Kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata sangat berperan dalam urusan pariwisata. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memfasilitasi dalam menyiapkan sarana prasarana pendukung pariwisata. Hal ini didukung data bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memfasilitasi pembangunan homestay di 3 (tiga) lokasi wisata, yaitu 2 unit homestay di Pulau Benan, 2 unit homestay di Pulau Buru Kabupaten Karimun, dan 2 unit homestay di kawasan Pantai Trikora Kabupaten Bintan.
- e. Diperlukan insentif bagi pelaku industri pariwisata.
Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya pemberian insentif kepada pelaku industri pariwisata. Hal ini tercermin pada pelatihan yang bisa diberikan kepada pelaku industri pariwisata berkisar rata-rata 100 pelaku industri pariwisata pertahun. Selain itu dukungan kepada penyelenggara acara pariwisata juga masih sangat terbatas.
- f. Diperlukan peningkatan promosi pariwisata serta *tourism linkage networking* antar kabupaten dan kota untuk menciptakan branding pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.
Hal ini disebabkan karena belum adanya jaringan wisata yang terhubung antar daerah yang akan memudahkan wisatawan untuk mengetahui lebih banyak tentang pariwisata di Kepulauan Riau sehingga wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau tidak hanya terkonsentrasi di Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun.



Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pariwisata dalam kerangka ekonomi kreatif adalah:

- a. Diperlukan pengembangan, pendampingan, dan pemasaran pelaku ekonomi kreatif.

Hal ini disebabkan karena masih minimnya pengembangan, pendampingan, dan pemasaran pelaku ekonomi kreatif di Kepulauan Riau. Hal ini didukung data bahwa rata-rata dilakukan pelatihan pengembangan pelaku ekonomi kreatif terhadap 100 pelaku ekonomi kreatif pertahun. Demikian pula, perlunya perhatian terhadap perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa baik di dalam maupun di luar negeri.

- b. Diperlukan pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah wisata.

Hal ini disebabkan peran ekonomi kreatif sangat diperlukan di daerah wisata, khususnya berkaitan dengan souvenir, pertunjukan, promosi dan lainnya.

- c. Diperlukan perlindungan hukum terhadap industri kreatif.

Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran industri kreatif untuk melindungi karyanya serta membutuhkan waktu untuk mendapatkan perlindungan HAKI.

- d. Belum optimalnya kerjasama dengan pihak perbankan dalam mendukung ekonomi.

Hal ini disebabkan karena belum adanya kerjasama dengan pihak perbankan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif, kurangnya akses permodalan pelaku sektor ekonomi kreatif terhadap perbankan mengakibatkan kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa baik di dalam maupun di luar negeri.

27. Urusan Pertanian

Secara umum permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanian adalah pertumbuhan negatif untuk pertanian dan tanaman pangan sebesar -0,7 untuk pertanian dan -10,31 untuk tanaman pangan pada tahun 2020. Secara khusus, permasalahan pada urusan pertanian adalah:

- a. Diperlukan peningkatan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan.

Hal ini disebabkan karena untuk menunjang peningkatan produksi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) diperlukan jaringan irigasi, jalan usaha tani, bangunan pengolahan hasil.



- b. Diperlukan pendampingan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.

Hal ini diperlukan untuk mempromosikan dan memasarkan hasil-hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) agar komoditas yang dihasilkan dapat ditampung oleh pedagang besar/ pengumpul/pasar dengan harga yang tidak merugikan petani.

- c. Diperlukan peningkatan kapasitas petani dan pelaku perkebunan.

Hal ini disebabkan karena tantangan pembangunan pada urusan pertanian saat ini menuntut SDM yang cakap, sehingga bisa menghasilkan produk-produk pertanian dan perkebunan yang memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan pasar domestik maupun luar. Untuk itu, diperlukan kegiatan untuk peningkatan SDM petani dan pelaku perkebunan seperti diselenggarakannya kegiatan pelatihan, diklat dan rutin.

- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi untuk pertanian, perkebunan dan peternakan.

Pemanfaatan teknologi tersebut antara lain adalah dukungan teknologi agar produk hortikultura bertahan lama.

- e. Belum optimalnya keberlanjutan produksi pertanian dan perikanan.

Keberlanjutan ini harus melibatkan kearifan lokal. Fungsi kearifan lokal antara lain adalah untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan tidak merusak tanah pertanian

- f. Diperlukan pendirian BUMD pertanian.

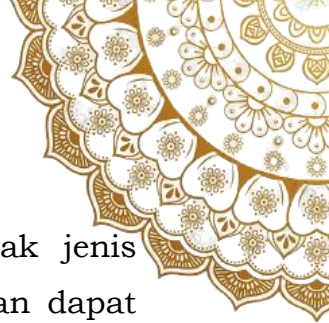
Hal ini disebabkan karena untuk meningkatkan nilai ekonomi produksi pertanian lokal baik melalui penguatan modal pola kemitraan, perbaikan tata niaga pertanian dan stabilisasi harga yang berpihak pada petani maka diperlukan BUMD yang mampu urusan tersebut.

- g. Belum optimalnya penyuluh yang meningkat kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya yaitu masih sebesar 37,28% pada tahun 2019.

Hal ini disebabkan karena peningkatan kapasitas atau kompetensi di bidang keahliannya dengan pemberian pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan sekolah lapang kepada 15 orang dari 41 orang penyuluh pertanian se-Provinsi Kepulauan Riau.

- h. Diperlukan diversifikasi komoditas dan produk pertanian untuk pasar domestik dan ekspor. Hal ini selaras dengan RPJPD 2005-2025 belum tercapai dengan baik.

Hal ini disebabkan karena diversifikasi merupakan upaya



meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Diversifikasi tanaman dapat dilakukan dengan cara diversifikasi tanaman dengan pergantian jenis tanaman.

- i. Belum optimalnya Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar yaitu 0,021 pada tahun 2020.

Hal ini disebabkan terbatasnya ketersediaan obat-obatan hewan serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengendalian penyakit hewan.

28. Urusan Kehutanan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kehutanan antara lain:

- a. Perlunya optimalisasi peran hutan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Saat ini penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan masih ada yang non prosedural. Kontribusi sektor kehutanan PDRB juga belum optimal yakni baru mencapai 0,01% dari 0,03% yang ditargetkan. Hal di atas disebabkan Perhitungan Kontribusi Sektor Kehutanan PDRB tidak hanya dihitung melalui sektor kehutanan tetapi juga dihitung melalui sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing.
- b. Belum adanya persetujuan DPR RI terhadap sebagian kawasan hutan DPCLS menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara kawasan hutan dengan hak-hak pihak ketiga yang menyebabkan konflik tenurial. Dampak negatif yang timbul dari permasalahan di atas antara lain:
 - 1) Perlu adanya kepastian hukum akan pemanfaatan ruang yang akan menyebabkan memperlambatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu ujung tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia;
 - 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah tidak dapat diterapkan secara maksimal;
 - 3) Terjadinya stagnasi pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas



Karimun, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun;

- 4) Terganggunya iklim investasi dan sosial kemasyarakatan;
- 5) Terganggunya pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial dan sarana prasana pemerintahan pada areal yang masih berstatus kawasan hutan.

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah:

a. Perlunya Pemenuhan Kebutuhan Listrik Ke Seluruh Pulau

Kepri terang menjadi hal yang penting dikarenakan kelistrikan belum mencakup ke seluruh pulau. Belum semua daerah mendapatkan pasokan listrik 24 jam. Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik pada tahun 2020 tercapai 91,35% dari target 97,85%. Selain itu, rasio rumah tangga pengguna listrik tercapai sebesar 93,72%. Pengalokasian bantuan pembangkit listrik dalam bentuk genset ke desa terpencil masih mengalami kendala. Hal ini dikarenakan infrastruktur belum memadai bagi pedesaan yang secara geografis berada di pulau-pulau yang sangat jauh dari perkotaan. Hal ini perlu dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangkit dan jaringan baru.

b. Perlunya Mendorong Inovasi Energi Terbarukan (EBT)

Kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi belum optimal yakni baru terealisasi 0,007% dari target 0,008% pada tahun 2019. Potensi alam seperti ombak, angin, air terjun, dan panas perlu dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai sumber EBT. Pemanfaatan ini masih terkendala dengan mahalnya biaya dari sebagian besar teknologi EBT. Penyebab lainnya adalah sebaran jumlah penduduk yang sedikit pada satu pulau berpenghuni sehingga pembangunan pembangkit EBT menjadi tidak ekonomis.

c. Perlunya Optimalisasi Pusat Data Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah serta Pemanfaatannya

- 1) Penyediaan data dan informasi terkait sumber daya mineral, geologi, dan air tanah saat ini masih kurang. Selain itu, pemanfaatan pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan perlu dimonitoring.
- 2) Terkait permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air tanah adalah terbatasnya sumber daya air tanah di alam yang disertai dengan meningkatnya pemanfaatan air tanah. Sering terjadi



pemanfaatan air tanah melampaui batas kemampuan cadangan air tanah itu sendiri. Ditambah dengan keterbatasan pelayanan air bersih yang mendorong pengambilan air tanah secara tidak terkontrol, yang dapat berakibat terjadinya degradasi kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah.

30. Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perdagangan adalah:

a. Penurunan pertumbuhan dan ekspor bersih perdagangan.

Pertumbuhan sektor perdagangan mengalami penurunan -0,030 pada tahun 2020 serta Nilai Ekspor Bersih Perdagangan mengalami penurunan dari USD 1.850,91 juta pada tahun 2019 menjadi USD 742,38 juta pada tahun 2020. Hal ini disebabkan dampak pandemi Covid-19 dan belum optimalnya jumlah ekspor berdasarkan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, serta belum optimalnya sektor non migas dengan nilai ekspor non migas USD 7.793.311 ribu dari target sebesar USD 9.100.000 ribu.

b. Cakupan pasar yang dilakukan pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi mengalami penurunan.

Penurunan cakupan pasar di atas adalah dari 64% pada tahun 2019 menjadi 57,14% pada tahun 2020. Hal ini perlu ditingkatkan karena diperlukan stabilitas harga kebutuhan pokok serta penurunan harga logistik barang, antara lain di Anambas.

c. Diperlukan revitalisasi Pembangunan Pasar Inpres.

Pembangunan pasar inpres diperlukan untuk memperlancar jalur distribusi barang serta untuk mengurangi pasar monopsoni (tengkulak)

d. Adanya jenis barang beredar yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman pelaku usaha serta perhatian masyarakat kepada produk yang bertanda SNI sehingga perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberi perlindungan konsumen. Kualitas produk unggulan daerah akan tidak mampu bersaing dengan produk lain jika tidak memiliki SNI



31. Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perindustrian adalah:

- a. Diperlukan pengembangan dan pembukaan wilayah industri baru.
Kontribusi sektor perindustrian mengalami peningkatan sebesar 42,77% pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 13,84%. Oleh karena itu diperlukan Langkah-langkah untuk meningkat pencapaian tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai penyangga pusat pertumbuhan yang telah berkembang, pengembangan kawasan industri kecil sebagai penunjang kegiatan industri utama, pengembangan industri hilir, pengembangan pusat industri pengolahan bahan makanan di Kabupaten Bintan. Selain itu, diperlukan penguatan pembangunan industri maritim serta mengembangkan kawasan strategis bagi pertumbuhan industri yang berbasis kelautan.
- b. Belum optimalnya pembinaan terhadap industri kecil, menengah, industri kreatif serta peningkatan nilai tambah produk olahan industri.

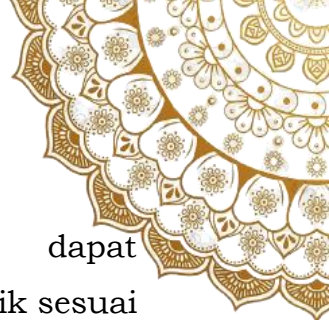
Hal ini ditunjukkan dengan Cakupan IKM yang dibina provinsi menurun dari 338 IKM pada tahun 2019 menjadi 120 IKM pada tahun 2020 serta jumlah IKM yang mendapat bantuan mesin dan peralatan menurun dari 150 orang pada tahun 2019 menjadi 45 orang pada tahun 2020.

32. Urusan Transmigrasi

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan transmigrasi adalah:

- a. Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang baru di Kabupaten Natuna belum sesuai dengan kondisi sebenarnya (RKT dibuat Kementerian) dan juga adanya rencana kawasan transmigrasi di Kabupaten Lingga yang masih dalam proses pengusulan ke Kementerian.

Hal ini disebabkan Rencana Kawasan Transmigrasi yang dibuat belum sesuai sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (RTRW) di Kab. Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, hal ini mengingat pada pulau Bunguran terdapat lahan HPL transmigrasi dengan 5 SK HPL seluas 42.456.956 Ha dan kondisinya yang telah digunakan untuk permukiman transmigrasi 2 SKP (6 UPT) seluas 12.100 Ha sehingga yang belum dimanfaatkan adalah 30.456.956 Ha.



- b. Beberapa bekas kawasan transmigrasi belum dapat dipindahtangankan ke Provinsi untuk diolah dengan lebih baik sesuai kebutuhan Provinsi Kepulauan Riau

Hal ini disebabkan terdapat bekas lahan transmigrasi yang belum terselesaikan sertifikatnya kepemilikannya sesuai dengan hak transmigran dan terdapat aset-aset transmigrasi yang belum diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, terdapat eks transmigran yang meninggalkan lokasi lahan transmigrasi sehingga sulitnya melakukan verifikasi maupun pendataan transmigran terkait pengurusan sertifikat.

33. Urusan Sekretariat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan sekretariat daerah adalah: Reformasi Birokrasi yang belum terlaksana dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah yang belum maksimal dimana untuk tahun 2020 yang mencapai nilai 68,57. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa paling tidak terdapat berbagai hal yang perlu menjadi perhatian, yang antara lain:

- a. Perlunya komitmen yang kuat dalam pelaksanaan manajemen reformasi birokrasi mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi program-program reformasi birokrasi.
- b. Deregulasi kebijakan juga masih belum berjalan secara efektif.
- c. Pengimplementasian e-government masih belum dilaksanakan secara memadai dimana pelaksanaannya masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi.
- d. Peta Proses bisnis yang ada belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- e. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM.
- f. Standar pelayanan formal yang telah dibentuk dan dilaksanakan juga belum sesuai dengan harapan masyarakat.

34. Urusan Sekretariat DPRD

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya capaian indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD Tahun sebelumnya dengan nilai 68 (skor), dimana berdasarkan peraturan menteri PAN dan RB No 14 Tahun 2017 tentang



pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, hasil penilaian survei tersebut masuk kedalam interval mutu pelayanan C (kurang baik) dan didukung data hasil survei indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2020.

35. Urusan Perencanaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perencanaan adalah usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir masih rendah, hal ini disebabkan masih banyaknya ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Musrenbang serta tidak sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi sehingga banyak usulan yang tidak dapat diakomodir. Disamping itu, Musrenbang merupakan mekanisme yang harus dilalui dalam menyusun rencana kegiatan pemerintah yang pelaksanaannya dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional. Di tiap tingkatan musrenbang tersebut masyarakat selalu berperan di dalam mengusulkan program/kegiatan untuk kebutuhan daerahnya masing-masing, termasuk juga melalui hasil Reses oleh anggota DPRD. Hal ini menyebabkan usulan yang disampaikan menjadi sangat besar sedangkan kapasitas keuangan daerah sangat terbatas. Dengan demikian, tidak semua permintaan warga yang terangkum dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dapat diakomodir melainkan harus mempertimbangkan dengan seksama kapasitas kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah tiap tahunnya yang tercantum dalam dokumen RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD.

36. Urusan Keuangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan keuangan adalah:

- a. Diperlukan optimalisasi pengelolaan PAD melalui peningkatan retribusi serta Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
Salah satu potensi PAD yang bisa dioptimalkan adalah penerimaan retribusi daerah khususnya sektor perhubungan laut dan sector kelautan dan perikanan. Pada awal tahun 2021, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil melakukan pemungutan retribusi labuh jangkar yang selama ini memiliki potensi yang sangat besar mengingat lokasi geografis Kepulauan Riau (khususnya Batam) yang merupakan salah satu perairan jalur lintas kapal internasional. Selain itu potensi wisata bahari Kepulauan Riau yang bisa dikembangkan dari kegiatan reklamasi sebagai objek retribusi pemakaian kekayaan daerah



(pemanfaatan ruang laut) sebagai salah satu potensi objek retribusi daerah.

Dalam proyeksi penerimaan retribusi daerah pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 diharapkan pertumbuhan retribusi daerah signifikan berasal dari 2 (dua) objek retribusi yaitu retribusi labuh jangkar dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (pemanfaatan ruang laut).

- b. Masih rendahnya peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum optimal disebabkan manajemen atau tata kelola BUMD yang belum optimal.

- c. Belum optimalnya inovasi pelayanan pengurusan dan pembayaran pajak berbasis elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan belum maksimalnya minat masyarakat dalam memanfaatkan pembayaran melalui e- Samsat yakni 3% yang terealisasi dari target 20% pada tahun 2019

Hal ini disebabkan 1). masyarakat masih terbiasa dengan pelayanan konvensional, 2). banyaknya wajib pajak yang masih gagap terhadap teknologi pembayaran pajak secara elektronik 3). Masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak secara elektronik 4). Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami kemudahan membayar pajak secara elektronik 5). Masih banyaknya masyarakat dengan keterbatasan perangkat ponsel pintar sebagai alat untuk membayar pajak secara elektronik.

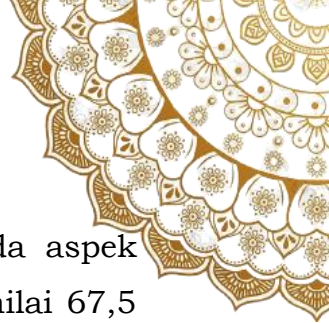
Berdasarkan data tahun 2020, PKB yang diterima melalui e-Samsat sebesar Rp3.547.426.174,00 sedangkan melalui loket sebesar Rp178.045.906.235,00. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah

- d. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kelengkapan bukti legalitas kepemilikan BMD baik bergerak maupun tidak bergerak yang tercapai 70% dari target 74,07% pada tahun 2019. Selain itu, pengamanan BMD yang tidak bergerak 9 yang tercapai 70% dari target 71,11% pada tahun 2019.

37. Urusan Kepegawaian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kepegawaian adalah:

- a. Manajemen ASN yang berkualitas dan profesional belum terlaksana secara optimal.



Sistem Merit telah dilaksanakan dengan baik namun pada aspek penilaian manajemen karir pegawai masih rendah dengan nilai 67,5 dari nilai maksimal 130.

- b. Cenderung menurunnya Tingkat profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Indeks profesionalitas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 baru mencapai angka 53,76. Hal ini berarti tingkat profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih pada kategori rendah. Selanjutnya indeks profesionalitas ASN pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan hingga menjadi 54,02.
- c. Ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan belum tercapai (realisasi 58,02% dari target 60% pada tahun 2019)
Hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melakukan moratorium Penerimaan CPNS sejak 2015 s/d 2018, sehingga pemenuhan kebutuhan sesuai formasi tidak dapat tercapai.
- d. Belum optimalnya penempatan pegawai yang sesuai dengan latar belakang keahliannya. Hal ini disebabkan belum adanya *assesment center* sehingga penempatan pegawai belum seluruhnya optimal

38. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh hasil kerjasama penelitian belum terdokumentasikan dan tersosialisasikan dengan baik kepada kepala daerah dan para pengambil kebijakan yang dapat menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan program/kegiatan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa untuk meletakkan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan masih perlu kerja keras terutama dari aspek penganggaran dan kualitas hasil kerjasama penelitian yang dapat dimanfaatkan.

39. Urusan Pengawasan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pengawasan adalah level kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau masih belum mencapai level 3. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya seluruh indikator penilaian Level 3 Kapabilitas APIP Inspektorat khususnya tahun 2019 pada elemen 2 (Pengelolaan Sumber Daya Manusia) dan elemen 3 (Praktik Profesional). Pada tahun 2020, Inspektorat Daerah telah melakukan perbaikan pada area-area yang diperlukan sesuai dengan



rekomendasi BPKP atas Level kapabilitas APIP tahun 2019 dan memenuhi indikator yang dipersyaratkan untuk level 3, namun belum dievaluasi dan revaluasi oleh BPKP Pusat.

2.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai urusan wajib pemerintahan dengan memperhatikan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya melakukan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan yang salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Ada 6 (enam) urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, adapun penerapan SPM di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 secara rinci akan dijelaskan pada subbab ini.

A. Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

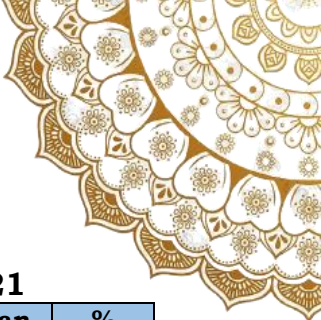
Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan di tingkat provinsi terdiri atas: Pendidikan menengah; dan Pendidikan khusus.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target capaian SPM pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 untuk jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK adalah 82.697 siswa, sedangkan jumlah penduduk usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB adalah 1.485 siswa.

3. Realisasi

Tingkat capaian SPM Bidang Pendidikan pada Tahun 2021 menunjukkan data yang belum optimal yakni berkisar dibawah 90 persen.



Tabel 2.195
Realisasi Capaian Target SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	%
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK	82.697	74.170	89,69
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB	1.485	1.228	82,69

Sumber: LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

4. Alokasi Anggaran

Anggaran pendukung pelayanan dasar pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Rp. 807.712.954.860, terdiri dari:

- a. APBD Provinsi Kepri Rp. 465.388.875.000
- b. BOS Rp. 241.782.714.860
- c. DAK Rp. 100.541.365.000

5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan penerapan SPM bidang pendidikan menengah dan khusus didukung oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari:

- a. Tenaga Pendidik pada Sekolah Menengah berjumlah 5.677 orang yang terdiri dari 2.172 orang PNS dan 3.505 orang Non PNS;
- b. Tenaga Pendidik pada Sekolah Pendidikan Khusus sebanyak 255 orang, terdiri dari 54 orang PNS dan orang 201 orang Non PNS.

6. Permasalahan Dan Solusi

- a. Permasalahan
 - 1) Belum terbentuknya Tim Penerepan SPM Dinas Pendidikan ProvinsiKepulauan Riau yang diharapkan dapat mempercepat penerapan SPM bidang pendidikan;
 - 2) Masih tingginya angka putus sekolah di Sekolah Menengah;
 - 3) Belum tersedianya data Anak Tidak Sekolah yang tervalidasi untuk penetapan sasaran penerima layanan SPM, Program/Kegiatan yang sesuaidengan kebutuhan di lapangan;
 - 4) Siklus penganggaran baru akan dimulai pada Tahun 2021-2024, sehinggapenganggaran kegiatan pendukung SPM secara spesifik belum termuat dalam Dokumen Perencanaan baik RENSTRA maupun RKPD, walaupun sebenarnya sebagian besar kegiatan yang ada sudah berkesesuaian dengan Indikator SPM;
 - 5) Belum adanya Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis



Pelayanan Pendidikan di tingkat Provinsi sebagai turunan dari Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;

- 6) Sebagian kegiatan tidak dapat dijalankan karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi yang masih berlangsung sejak tahun 2021.
- b. Solusi
 - 1) Harus ada kebijakan yang konsisten terkait pemerataan dan pengembangan Pendidikan
 - 2) Menyegerakan pembentukan Tim Penerapan SPM untuk percepatan pelaksanaan tahapan penerapan SPM bidang pendidikan.
 - 3) Mencecah siswa putus sekolah dengan pendekatan Home Visit dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu.
 - 4) Menyegerakan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan di tingkat Provinsi sebagai turunan dari Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
 - 5) Segera melakukan pengintegrasian penerapan Standar Minimal Pelayanan Pendidikan ke dalam Dokumen Perencanaan dan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
 - 6) Menyegerakan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan di tingkat Provinsi sebagai turunan dari Permendikbud Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

B. Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) provinsi.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target capaian SPM bidang kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah 100% dari pencapaian. Jumlah warga negara yang terdampak krisis



kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar (4.880 orang), sedangkan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) provinsi pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar (45.185 orang).

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Provinsi Kepulauan Riau Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.196
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Realisasi
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.	Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (4.880 orang)	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi.	Jumlah warga negara pada kaondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (45.185 orang)	100%

Sumber: LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran 2021 di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagai berikut:

- a. APBD Provinsi Kepri Rp. 1.459.159.200,-
- b. APBD – P Rp. 8.099.050.647,-
- c. APBN Rp. -

5. Dukungan Personil

Jumlah Tenaga Vaksinasi Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebanyak 272 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tim Relawan Vaksinasi Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 223orang.
- b. Tim Vaksinasi Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riausebanyak 49 orang.

6. Permasalahan Dan Solusi

- a. Permasalahan
 - 1) Terbatasnya penganggaran Pemerintah Daerah.
 - 2) Data yang tersedia di tingkat Provinsi tidak bisa mengakomodir semua data yang ada di aplikasi SPM



Kemendagri, ada beberapa permasalahan saat penginputan data SPM pada aplikasi yaitu terdapat pelaporan ganda untuk pelaporan SPM yaitu pelaporan melalui aplikasi SPM Kemendagri dan Pelaporan melalui aplikasi SPM Kemenkes RI. Untuk pelaporan SPM Kemendagri data SPM di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Terdapat dataoutput aplikasi SPM Kemendagri yang tidak tersedia di Provinsi.

- b. Solusi
 - 1) Memprioritaskan percepatan pencapaian target SPM dengan penetapan skala prioritas kegiatan.
 - 2) Pusat untuk dapat melakukan integrasi pelaporan SPM baik bersumber Kementerian Kesehatan RI atau Kementerian Dalam Negeri karena data yang dilaporkan secara umum sama, hanya berbeda format sehingga memudahkan daerah untuk melakukan pelaporan.
 - 3) Adanya pemutakhiran data oleh Kementerian Dalam Negeri terkait data SPM di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - 4) Penambahan kapasitas Tempat Tidur sebanyak 30%.
- c. Rencana Tindak Lanjut
 - 1) Pemetaan Prioritas Kegiatan.
 - 2) Refocusing Program/Kegiatan.
 - 3) Pemetaan Kapasitas Tempat Tidur di Rumah Sakit.
 - 4) Pemetaan Kapasitas Tempat Tidur di Rumah Sakit.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Minimal yang menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM mencakup:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota.



2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2021 merujuk pada target dan indikator pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 yaitu sebesar 100% dan masih dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri yang daerah pelayanannya mencakup kabupaten bintan dan kota tanjungpinang dan didukung dengan pembangunan infrastrukturnya oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Dalam hal penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, sampai saat ini belum teridentifikasi kebutuhan terkait pengelolaan air limbah domestik secara regional. Pengolahan air limbah domestik di kabupaten bintan dan kota tanjngpinang hingga saat ini dilakukan secara individu dan komunal setempat yang kemudian dikelola dan dilakukan pengawasannya oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Sehingga belum teridentifikasi kebutuhan terhadap Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Tabel 2.197
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota. (249.899 jiwa)	100 %	1(satu) tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Yang Dilayani Oleh SPALD Regional Provinsi Dalam Satu Kelurahan/ Desa	100%	1(satu) tahun

Sumber: LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

3. Realisasi

Realisasi pelaksanaan pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota mencapai 53,20 persen. Sedangkan untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota masih belum dilaksanakan. Belum diterapkannya jenis pelayanan dasar tersebut sebab di Kepulauan Riau belum memiliki SPAL regional.



Tabel 2.198
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota. (132.958 jiwa)	53,20 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Yang Dilayani Oleh SPALD Regional Provinsi Dalam Satu Kelurahan/ Desa (0)	0%

Sumber: LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota pada tahun anggaran 2021 sebesar 53,20% dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah penduduk di Wilayah Pelayanan = 249.899

Jiwa Jumlah penduduk terlayani = 132.958 jiwa

Capaian = $\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk di Wilayah Pelayanan}} \times 100\% = 53,20\%$

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pendukung pelayanan dasar Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota bersumber dari APBD Tahun 2021 melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.1.848.077.746,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.199
Alokasi anggaran pendukung pelayanan dasar Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota bersumber dari APBD
Tahun 2021

No	Pekerjaan	Nilai	Keterangan
1.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Tersier di Jalan Ganet Kota Tanjungpinang	Rp.708.657.746,56	Sudah dilaksanakan 100%
2.	Studi Kelayakan Pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan	Rp.519.420.000,00	Sudah dilaksanakan 100%
3.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan di Jalan Kijang Lama, Kelurahan Melayu Kota Piring	Rp.200.000.000,00	Tidak dilaksanakan karena sudah dilakukan pemasangan di lokasi yang sama oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri pada tahun anggaran yang sama
4.	Pengadaan Pompa PDAM Tanjungpinang	Rp.600.000.000,00	Sehubungan dengan pandemi covid-19, maka dilakukan refocusing terhadap kegiatan tersebut.

Sumber: LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



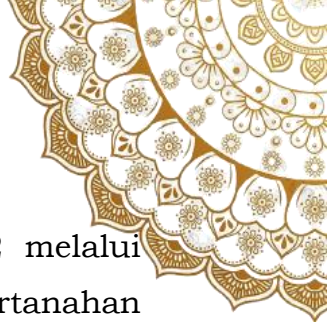
5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai Bidang Cipta Karya pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Jumlah PNS sebanyak 12 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut:
 - 1) S 2 : 1 orang
 - 2) S1 : 9 orang
 - 3) SLTA : 2 orang
- b. Jumlah PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 3 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut:
 - 1) S 1 : 3 orang
- c. Jumlah THL (Tenaga Harian Lepas) sebanyak 8 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut:
 - 1) S1 : 3 orang
 - 2) SLTA : 5 orang

6. Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 - 1) Ketersediaan anggaran pemenuhan kebutuhan air curah kabupaten/kotasangat terbatas pada Bidang Cipta Karya.
 - 2) Terdapat beberapa usulan kegiatan prioritas (mendesak) namun belum dianggarkan yaitu:
 - a) Konsultasi Publik Rencana Induk SPAM Regional Pulau Bintan;
 - b) Penyusunan Dokumen Lingkungan Rencana Pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan;
 - c) Penggantian Pipa JDU PDAM Tirta Kepri di BT.10 - Simpang Perla.
 - 3) Kurangnya SDM dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Lingkungan yang ditempatkan dibawah seksi Pembangunan dan Pengembangan SPAM dan Sanitasi pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Solusi
 - 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah Kepri khususnya untuk Pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan.
 - 2) Penyusunan DED untuk pekerjaan Penggantian Pipa JDU PDAM Tirta Kepri di BT.10 - Simpang Perla akan diusulkan



melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018, tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Jenis Pelayanan Dasar

- Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan rakyat terdiri atas:
- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi KorbanBencana Provinsi.
 - b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yangterkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau merujuk pada target dan indikator pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 yaitu sebesar 100%. Adapun target pada jenis pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi sebanyak 11 Rumah dan pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi sebanyak 0 Rumah.

Tabel 2.200 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021				
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni (11 rumah)	100%	1 (satu) tahun
2	Fasilitasi Penye-Diaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program PemerintahDaerah Provinsi	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi (0 rumah)	0%	1 (satu) tahun

Sumber: LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

3. Realisasi

Realisasi target yang dicapai selama tahun anggaran 2021 pada jenis pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi sebanyak 11 Rumah dan pelayanan dasar fasilitasi



penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi sebanyak 0 Rumah, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diukur dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Adapun realisasi target capaian SPM Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.201
Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni (11 rumah)	100%
2.	Fasilitasi Penye-Diaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi (0 rumah)	0%

Sumber: LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.202
Alokasi Anggaran Pendukung SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
			APBD	APBN
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.	855.399.000	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.	-	-	-

Sumber: LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

5. Dukungan Personil

Untuk mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan pelayanan dasar ini maka dukungan personil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah staf Dinas



Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepri dengan rincian: staf PNS sebanyak 3 orang, dan staf Non PNS 13 orang.

6. Permasalahan Dan Solusi

- a. Permasalahan
 - 1) Tidak adanya SK penetapan Bencana Provinsi
 - 2) Tidak adanya Program Pemerintah yang mengharuskan dilakukannya Relokasi Masyarakat.
- b. Solusi: Melakukan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana berdasarkan Proposal yang masuk dari masyarakat melalui mekanisme belanja Hibah.

E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi.

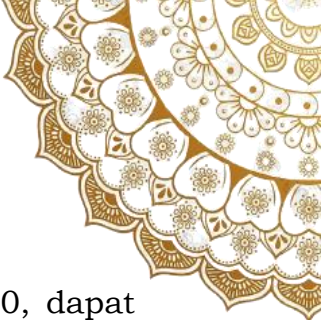
2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Riau Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merujuk pada target dan indikator pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 yaitu sebesar 100%.

Tabel 2.203
Target Pencapaian SPM Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi	100%	1 tahun

Sumber: LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



3. Realisasi

Capaian kinerja indikator SPM bidang trantibum adalah 0, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.204

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi
1	Pelayanan ketenteraman danketertiban umum provinsi.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	0

Sumber: LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran pada tahun 2021 adalah 0, karena belum diakomodir di dalam DPA tahun 2021.

5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Satuan Satpol PP dan Penaggulangan Kebakaran di Provinsi Kepri Tahun 2021 sebanyak 160 orang dengan perinciansebagai berikut:

- a. Berdasarkan Status Pegawai
- 1) Jumlah PNS sebanyak 41 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut:

a) Sarjana (S1/D4) : 7 orang

b) SLTA : 33 orang

c) SMP : 1 orang

2) Jumlah PTT sebanyak 82 orang dengan tingkat pendidikan formalsebagai berikut:

a) Sarjana (S1/D4) : 22 orang

b) SLTA : 60 orang

3) Jumlah THL sebanyak 37 orang dengan tingkat pendidikan formalsebagai berikut:

a) Sarjana (S1/D4) : 1 orang

b) SLTA : 29 orang

c) SMP : 6 orang

d) SD : 1 orang



6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal adalah:

- 1) Anggaran pendukung pencapaian SPM tahun 2021 belum teranggarkan dalam RKPD murni/RKPD Perubahan 2021 dan Renja murni dan Renja Perubahan Satpol 2021
- 2) Belum adanya kebijakan daerah terkait standar teknis pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

b. Solusi

Solusi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan SPM adalah:

- 1) Melakukan pengintegrasian penerapan SPM pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja).
- 2) Menyusun peraturan gubernur terkait standar teknis pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

F. Bidang Urusan Sosial

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (khususnya Gelandangan dan Pengemis) di dalam Panti
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial



2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.205
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	Persentase penyandang Disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. (755 orang)	100%	1 (satu) tahun
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	Persentase anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. (402 orang)	100%	1 (satu) tahun
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. (300 orang)	100%	1 (satu) tahun
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (khususnya Gelandangan dan Pengemis) di dalam Panti	Persentase tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. (13 orang)	100%	1 (satu) tahun
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Persentase korban bencana alam dan korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. (1.541 orang)	100%	1 (satu) tahun

Sumber: LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.206
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar didalam Panti	Persentase penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti. (755 orang)	100 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	Persentase anak telantar yang terpenuhi kebutuhandasarnya di dalam panti. (402 orang)	100 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase lanjut usiatelantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. (300 orang)	100 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (khususnya Gelandangan dan Pengemis) di dalam Panti	Persentase tuna sosial(khususnya gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. (9 orang)	69,23 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Persentase korban bencana alam dan korban bencana sosialyang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. (1.541 orang)	100 %

Sumber: LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2021 di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial berjumlah Rp 3.141.335.131,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. APBD : Rp 2.240.229.131,00
- b. APBN : Rp. 901.106.000,00

5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai pelaksana Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebanyak 16 orang dengan perincian:

- a. PNS/ CPNS : 12 Orang
- b. PTT PROVINSI : 4 Orang

Jumlah tenaga PNS/ CPNS sebanyak 12 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut:

- a. S 2 : 1 Orang
- b. 2 1 : 10 Orang
- c. SLTA : 1 Orang

6. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan SPM:

- 1) Minimnya anggaran
- 2) Keterbatasan personil
- 3) Tidak ada panti milik pemerintah
- 4) Ketidaktercapaian target pada layanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial tersebut disebabkan adanya refocusing anggaran dalam masa pandemi *Covid-19*. Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membayar honorarium Satgas WNIM-KPO.

b. Solusi

- 1) Mengajukan penambahan personil
- 2) Memfasilitasi panti swasta dengan anggaran yang terbatas, yang tentunya tidak sepenuhnya memenuhi kriteria ideal
- 3) Dinas Sosial bekerja sama dengan Badan Amil Zakat (Baznas) agar biaya pemulangan tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) ditanggung oleh Baznas. Pada tahun 2021, dari 13 orang yang seharusnya dipulangkan ke



daerah asal, hanya 9 orang yang berhasil dipulangkan dengan biaya dari Baznas. Adapun 4 orang lainnya tidak dipulangkan karena yang bersangkutan kabur sebelum waktu pemulangan.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan daerah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi makro nasional, dan perkembangan kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 tanggal 24 November 2021 dinyatakan bahwa bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral AS (The Fed).

Pemulihan ekonomi global diperkirakan berlanjut di tengah kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron, tekanan inflasi yang tinggi, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral. Pemulihan tersebut diperkirakan akan berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India. Perbaikan yang terus berlangsung dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Desember 2021 antara lain Purchasing Managers' Index (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global tetap berlanjut hingga mencapai 4,4% pada 2022. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi the Fed sebagai respons tekanan inflasi di AS yang meningkat sejalan dengan gangguan rantai pasok dan kenaikan permintaan, serta tingginya penyebaran Covid-19



varian Omicron. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2022. Perkembangan indikator ekonomi pada Desember 2021 mengindikasikan akselerasi proses pemulihan, antara lain mobilitas masyarakat, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 3,2-4,0%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5% pada 2022, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus Covid-19 perlu terus diwaspadai. Prakiraan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Kinerja lapangan usaha (LU) Utama, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian tumbuh meningkat. Secara spasial, perbaikan ekonomi diperkirakan terjadi di seluruh wilayah terutama Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Balinusra seiring dengan tetap kuatnya kinerja ekspor, perbaikan permintaan domestik, dan kinerja LU Utama.

Inflasi 2021 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy) dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0%±1%, meski meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, nilai tukar yang stabil dan ekspektasi inflasi yang terjaga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan, serta sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Ke depan, inflasi pada tahun 2022 diperkirakan terkendali dalam sasaran 3,0%±1% sejalan dengan masih memadainya penawaran agregat dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran targetnya.

Berdasarkan Buku Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2022 (Kementerian Keuangan); mengacu pada kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di tahun 2021 sebagai dampak pandemi COVID-19, stabilitas



perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami tekanan luar biasa. Namun apabila berbagai upaya *countercyclical* yang ditempuh dapat berjalan efektif maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap dalam periode 2023-2025.

Disamping peran kebijakan fiskal yang *countercyclical*, kebijakan reformasi struktural yang konsisten dijalankan pemerintah juga mendukung perbaikan tingkat konsumsi masyarakat di tahun 2022. Kebijakan reformasi diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas (*decent jobs*) yang menaikkan level pendapatan masyarakat. Penciptaan *decent jobs* merupakan buah dari implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Berbagai aturan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan kemudahan berusaha, dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Secara jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam tren menurun dan stabil sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai upaya mencapai target, Pemerintah melalui strategi penetapan sasaran inflasi dengan tren menurun ditujukan untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang stabil dan rendah. Strategi ini diharapkan secara bertahap dapat menciptakan jangkar baru pada ekspektasi yang mencerminkan kondisi perekonomian domestik yang semakin efisien. Terkendalnya inflasi jangka menengah juga didukung dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi secara nasional, perbaikan sistem distribusi melalui dukungan infrastruktur pertanian dan konektivitas, sehingga sistem logistik yang efisien, serta pengelolaan risiko-risiko gejolak baik dari sisi pangan, maupun harga energi. Dengan begitu, terciptanya stabilitas harga diharapkan mampu dicapai bahkan hingga ke tingkat daerah. Koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diupayakan untuk mendukung tren penurunan laju inflasi nasional pada jangka menengah yang diperkirakan dapat terkendali pada kisaran 1,5-4,0 persen.

Perekonomian domestik yang diperkirakan akan terus membaik berimplikasi pada tingginya kegiatan importasi, sehingga akan mempengaruhi tingkat permintaan valas di dalam negeri. Selain itu, kewajiban pembayaran utang baik dari sektor publik maupun korporasi juga turut menambah kebutuhan valas di dalam negeri. Sementara itu, peningkatan ekonomi global terutama dari mitra dagang utama Indonesia



diharapkan mampu mendorong kegiatan ekspor sehingga pada akhirnya dapat mendukung *supply* valas domestik.

Hal ini selanjutnya akan mendorong persaingan likuiditas di pasar keuangan global dan diperkirakan dapat menurunkan capital inflow ke negara berkembang. Berdasarkan gambaran dan faktor-faktor tersebut di atas, nilai tukar selama tahun 2023 hingga 2025 diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp13.500-15.000 per dollar AS.

Secara umum, pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk *mendorong* pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan countercyclical dengan tetap memelihara berkelanjutan dalam jangka menengah serta lebih fokus untuk mendukung pemulihan sekaligus secara simultan melakukan reformasi untuk penguatan fondasi agar mampu keluar dari *middle income trap* menuju Indonesia Maju di tahun 2045.

Mempertimbangkan kinerja makro fiskal 10 tahun terakhir dan volatilitas di masa pandemi, serta proyeksi makro ekonomi, maka kebijakan makro fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk percepatan pemulihan dan mendukung reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan daya saing. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan dalam jangka menengah pendapatan negara kan kembali meningkat secara bertahap sesuai kapasitas perekonomian, belanja semakin efektif, dan defisit akan kembali dibawah 3 persen PDB di tahun 2023. Secara umum gambaran arah makro fiskal jangka menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kerangka Fiskal Jangka Menengah Tahun 2020-2025 (% PDB)

URAIAN	2020		2021	2022		2023		2024		2025	
	Perpres 72	Real	APBN	batas bawah	batas atas	batas bawah	batas atas	batas bawah	batas atas	batas bawah	batas atas
PENDAPATAN NEGARA	10,37	10,68	9,88	10,18	10,44	10,19	10,89	10,23	11,09	10,38	11,38
Perpajakan	8,57	8,33	8,18	8,37	8,42	8,37	8,67	8,41	8,87	8,46	9,06
PNBP	1,79	2,23	1,69	1,80	2,00	1,80	2,20	1,80	2,20	1,90	2,30
Hibah	0,01	0,12	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
BELANJA NEGARA	16,71	16,80	15,58	14,69	15,30	12,90	13,86	12,92	13,95	12,98	14,12
Belanja Pusat	12,05	11,86	11,10	10,38	10,97	8,62	9,19	8,62	9,19	8,65	9,34
TKDD	4,66	4,94	4,48	4,30	4,32	4,28	4,66	4,29	4,76	4,33	4,78
Primary balance	(4,27)	(4,09)	(3,59)	(2,31)	(2,65)	(0,42)	(0,64)	(0,42)	(0,54)	(0,35)	(0,45)
Defisit	(6,34)	(6,13)	(5,70)	(4,51)	(4,85)	(2,71)	(2,97)	(2,69)	(2,85)	(2,60)	(2,74)
Pembiayaan investasi	(1,57)	(0,68)	(1,04)	(0,30)	(0,95)	(0,20)	(0,50)	(0,20)	(0,50)	(0,20)	(0,50)
Debt Ratio	37,60	39,39	41,05	43,76	44,28	43,21	43,99	42,80	43,59	42,38	43,17
PDB Nominal	16.390,5	15.434,2	17.665,8	17.913,3	18.153,4	19.428,6	19.838,6	20.989,7	21.615,6	22.697,7	23.596,2

Sumber: Buku Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2022, Kementerian Keuangan

Prospek perekonomian nasional tahun 2023 diharapkan semakin membaik. Dari sisi konsumsi rumah tangga, pada tahun 2023, ketika COVID-19 mulai terkendali, tingginya saving masyarakat kelas menengah atas akan menjadi pendorong akselerasi konsumsi RT. Akselerasi terutama akan terjadi pada konsumsi leisure–transportasi dan pariwisata. Konsumsi



masyarakat bawah masih akan tetap dibantu melalui bansos meski menurun jumlahnya. Pada tahun 2023, dorongan investasi akan bersumber dari terkendalnya COVID-19 seiring dengan selesainya vaksinasi dan dampak reform yang dilakukan (implementasi UU ciptaker & SWF).

Dari sisi operasional, belanja pemerintah akan terus melanjutkan pola belanja yang efisien dengan mengedepankan *spending better* dan *refocusing* belanja guna meningkatkan fungsi pelayanan publik yang lebih optimal, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan berbagai faktor tersebut, konsumsi pemerintah diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 3,2- 4,4 persen di 2022.

Dorongan investasi juga didorong oleh tingginya likuiditas di sektor perbankan, yang memungkinkan kredit untuk tumbuh tinggi. Bantuan tetap perlu diberikan kepada dunia usaha untuk bisa mengakselerasi proses pemulihan. Project infrastruktur pemerintah kembali berjalan normal Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan semakin melamban. Namun kinerja ekspor diperkirakan akan mampu terjaga didorong oleh peningkatan ekspor jasa yang mulai akan kembali pulih secara perlahan seiring dengan vaksinasi yang sudah meluas dan terkendalnya COVID-19. Kinerja impor meningkat tajam seiring dengan peningkatan permintaan domestik. Pada tahun 2022, konsumsi pemerintah melambat seiring dengan konsolidasi fiskal. Dorongan belanja stimulus akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

Seiring implementasi kebijakan reformasi struktural yang dilaksanakan secara konsisten, aktivitas investasi di tahun 2022 diprediksi akan meningkat tajam pada kisaran 5,4-6,9 persen. Iklim investasi yang baik menjadikan investor menaruh kepercayaan dalam berinvestasi di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan telaahan terhadap Rancangan RKP Tahun 2023, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan terkait sasaran ekonomi makro. Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4.720–4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*.

Stabilitas makroekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diprakirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00–



Rp15.000,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31–73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107.

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (*herd immunity*) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

- a. Peningkatan Produktivitas Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (*within sectors*) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha,



- pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.
- b. Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
 - c. Pembangunan yang Berkelanjutan Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

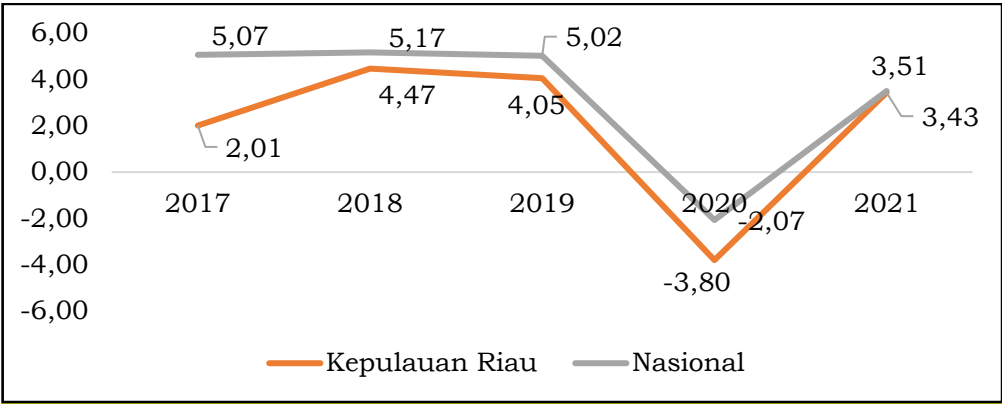
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

3.1.2.1. Perkembangan Kondisi Perekonomian Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan.

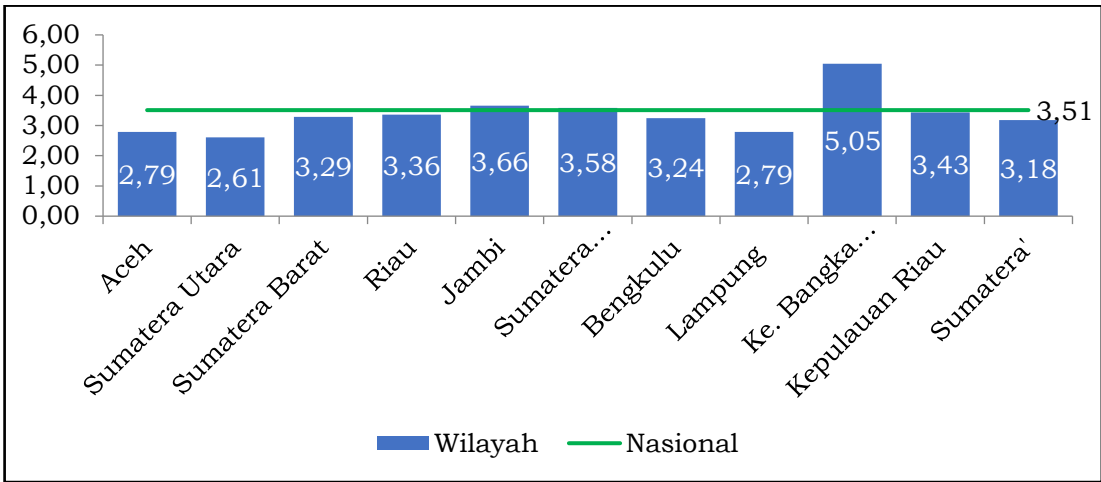
Perekonomian Kepulauan Riau pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,43%, setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,80%. Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mengalami pertumbuhan 3,51% setelah terkontraksi -2,07% dibandingkan tahun 2020.



Gambar 3.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada 2021 tumbuh sebesar 3,18%. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Riau sebesar 23,62% sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan share sebesar 7,5%.

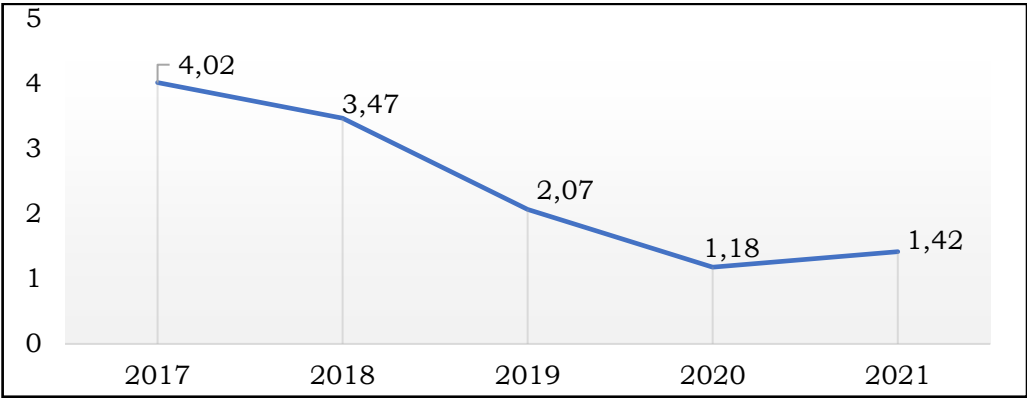


Gambar 3.2
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Di Wilayah
Sumatera Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

b. Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan kegiatan industri. Selama kurun waktu 2017 hingga 2021 laju inflasi tahunan menunjukkan peningkatan dari sebesar 1,42% dan tahun 2020 menjadi sebesar 1,18%, sedangkan di tahun 2021 terjadi deflasi sebesar 1,42%. Perkembangan laju inflasi gabungan dua kota dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 3.3
Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

Pada tahun 2021 sebanyak 10 komoditas yang memberikan andil terbesar sumbangan inflasi adalah minyak goreng, selanjutnya rokok kretek, beras, daging ayam ras, rokok putih, akademi/perguruan tinggi, nasi dengan lauk, ikan laying/ikan benggol, ikan mujair, dan ikan kembung. Perincian perubahan harga dan sumbangan inflasi komoditas tersebut tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Komoditi Penyumbang Inflasi Kumulatif Terbesar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Jenis Komoditas		(%) Perubahan Harga	Sumbangan Inflasi Jan-Des
1.	Minyak Goreng	49,4100	0,5820
2.	Rokok Kretek Filter	7,1700	0,1565
3.	Beras	4,4700	0,1346
4.	Daging Ayam Ras	6,9500	0,1162
5.	Rokok Putih	10,3700	0,0868
6.	Akademi/Perguruan Tinggi	5,3500	0,0865
7.	Nasi dengan Lauk	4,8400	0,0855
8.	Ikan Layang/ Ikan Benggol	31,9900	0,0823
9.	Ikan Mujair	28,3700	0,0723
10.	Ikan Kembung	30,6400	0,0651

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

c. Kemiskinan

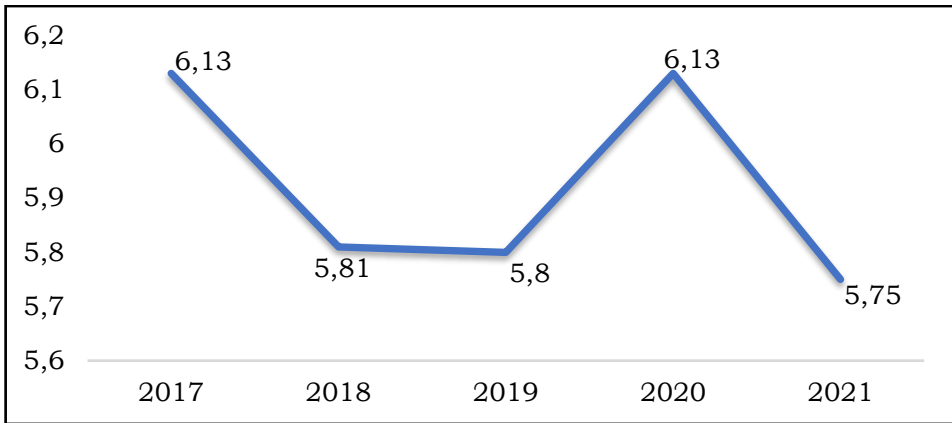
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada September 2021 mencapai 137,75 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 6,71 ribu orang dibandingkan Maret 2021 dan 4,86 ribu orang dibandingkan September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2020-September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan selalu menurun, sedangkan di daerah perkotaan sempat meningkat pada Maret 2021 dan kembali menurun pada September 2021. Meskipun jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan yang cukup besar



pada Maret 2021, namun persentasenya hanya naik 0,03% dibandingkan September 2020.

Pada bulan September 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 137,75 ribu orang (5,7%), berkurang sebanyak 6,71 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 144,46 ribu orang (6,12%). Perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada gambar berikut.

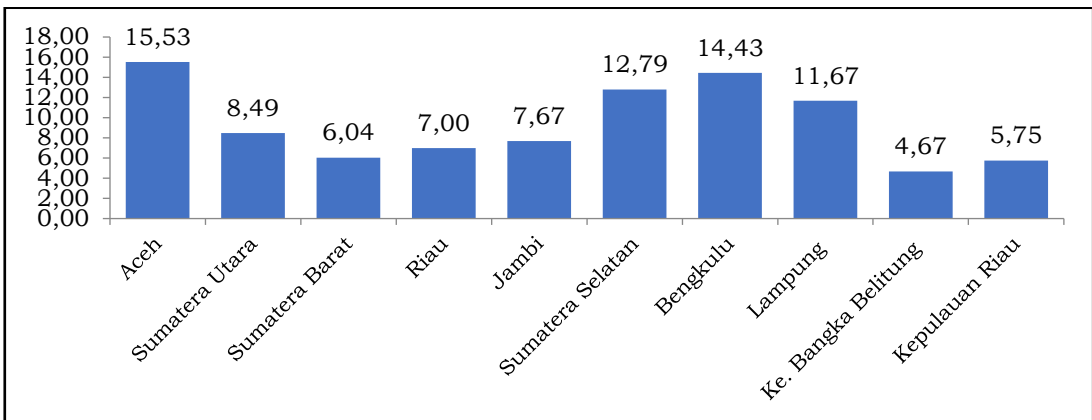


Gambar 3.4

**Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 (%)**

Sumber: Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, BPS, 2022

Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi terendah kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4,67%). Posisi relatif tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dikemukakan pada gambar berikut.



Gambar 3.5

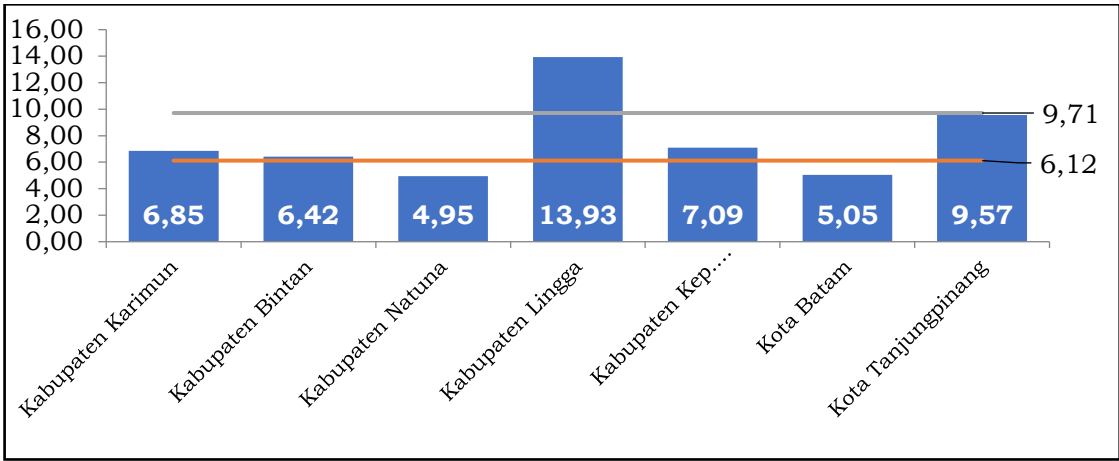
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau
dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2021 September (%)**

Sumber: Berita Resmi Statistik Nasional, BPS, 2022

Berdasarkan data Kemiskinan Maret 2021 persentase penduduk miskin Kepulauan Riau sebesar 6,12%. Persentase penduduk miskin



Kabupaten Lingga menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se-provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 13,93%. Sementara itu tingkat kemiskinan terendah berada di Kabupaten Natuna sebesar 4,95%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



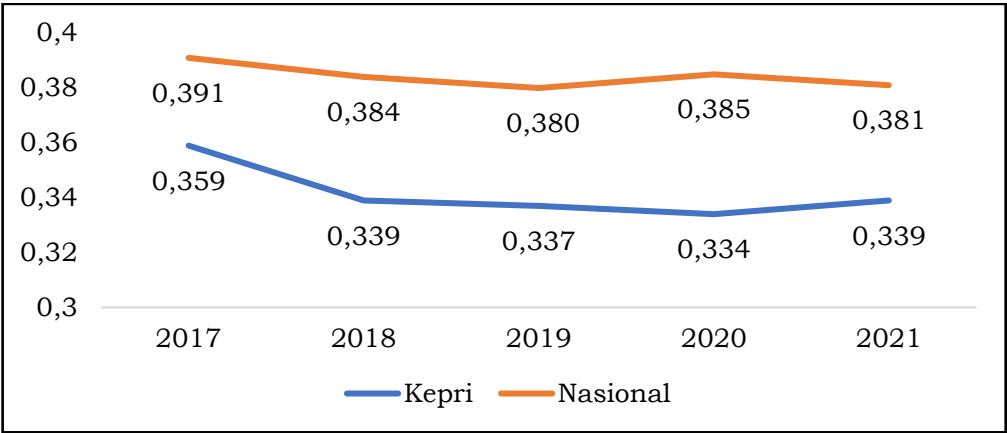
Gambar 3.6

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Maret (%)

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

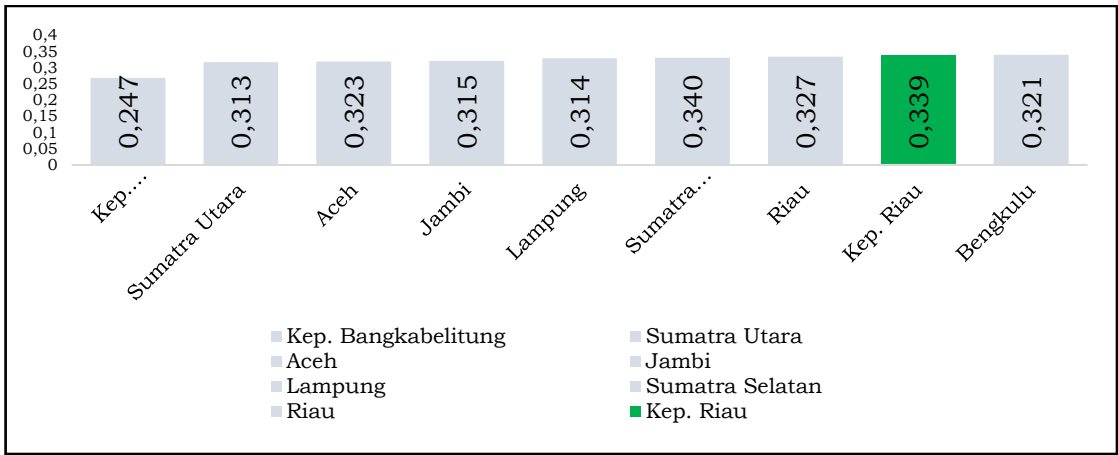
d. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara > 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 0,359 pada tahun 2017 menjadi 0,339 pada tahun 2021 (September). Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang, sehingga kedepan perlu upaya pemerataan pendapatan penduduk agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok berpenghasilan menengah dan rendah. Secara rinci perkembangan indeks gini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.7
Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 (Maret)
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2021, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,343 menempati posisi tertinggi kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara rinci perbandingan Indeks Gini provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada gambar berikut.

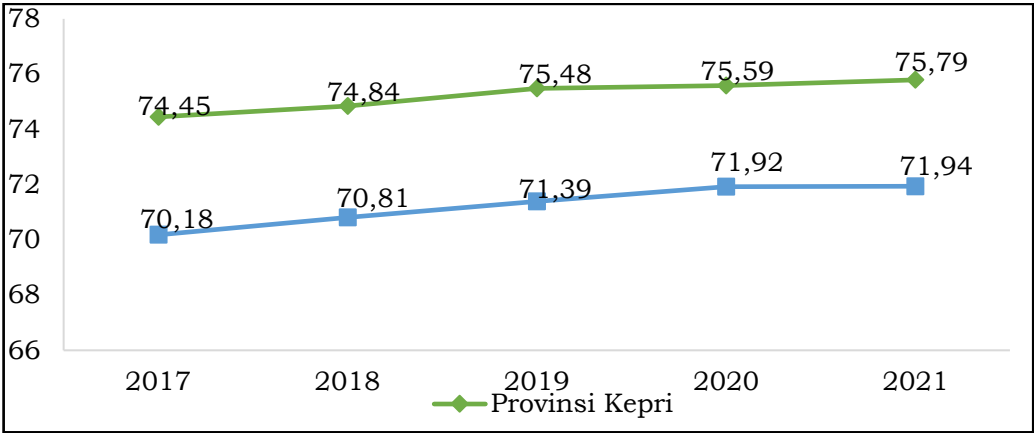


Gambar 3.8
Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2021 September
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

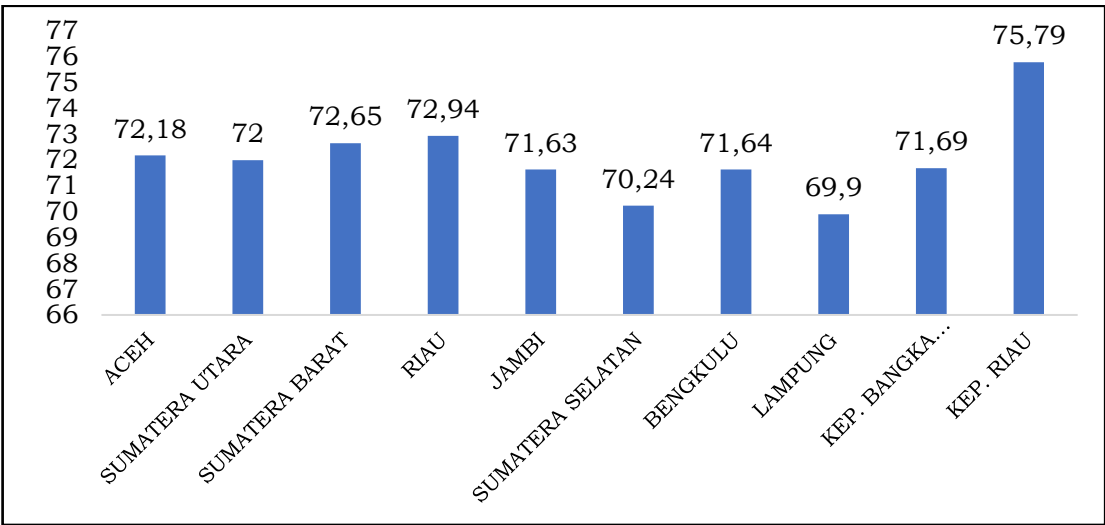
IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 74,45 meningkat menjadi 75,79 pada tahun 2021. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 3.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi Nasional, 2022

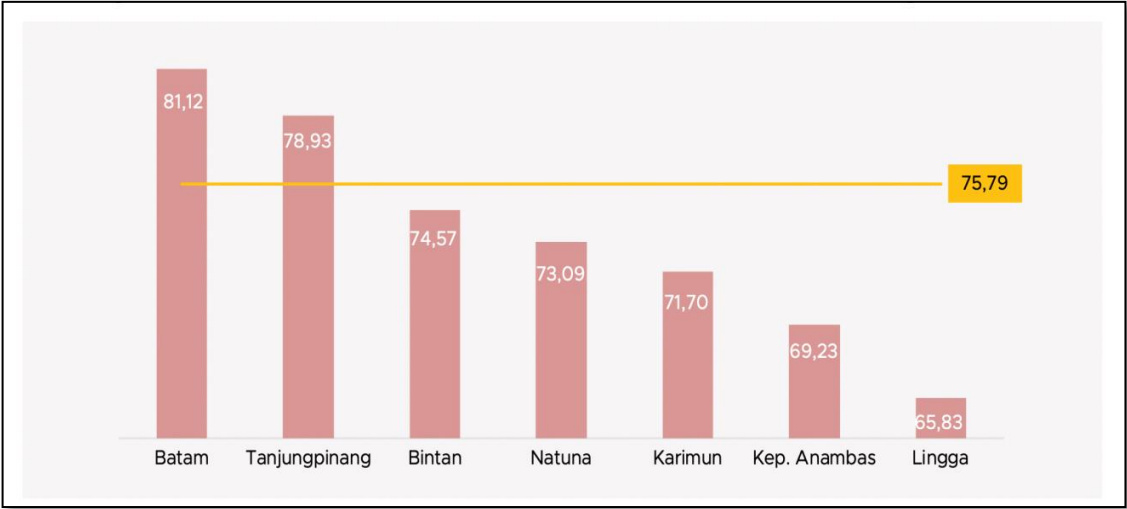
Dibandingkan provinsi lain di wilayah Sumatera, IPM Provinsi Kepri pada tahun 2021 menempati posisi tertinggi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.10
Perbandingan IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2021

Sumber: BPS RI, 2022

Capaian IPM kabupaten/kota tertinggi di Kepulauan Riau tahun 2021 yaitu Kota Batam dengan angka IPM mencapai 81,12 atau berstatus “sangat tinggi”. Sementara itu, capaian IPM terendah yaitu Kabupaten Lingga dengan angka IPM sebesar 65,83 atau berstatus “sedang”. Adapun kabupaten/kota lain yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun berstatus IPM “tinggi”, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas berstatus “sedang”.



Gambar 3.11
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2022

3.1.2.2. Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2023

Perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan masih akan melanjutkan trend pemulihan meski secara terbatas dan masih dibawah level sebelum pandemi COVID-19. Dari sisi eksternal dengan semakin terkendalnya penyebaran COVID-19 di negara maju akan mendorong dilakukannya aktivitas yang akan mendorong permintaan ekspor dari negara lain termasuk indonesia. Kondisi ini menjadi peluang untuk mendorong ekspor termasuk dari Kepri khususnya ekspor elektronik, logam dasar dan alat transportasi. Sementara dari sisi internal berlanjutnya stimulus fiskal pada tahun depan termasuk program bantuan sosial kepada rumah tangga akan mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.

Berdasarkan analisis Bank Indonesia, perekonomian Kepulauan Riau secara keseluruhan tahun 2022 diperkirakan mengalami peningkatan yang didorong oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas pelaku usaha seiring dengan semakin terkendalnya kasus COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tahun ini diperkirakan akan ditopang oleh komponen investasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah dan peningkatan investasi. Kinerja ekspor juga diperkirakan masuk baik ditopang oleh ekspor migas dari Kepulauan Riau. Dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bansos diharapkan akan turut menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan ekonomi diprakirakan didorong oleh kinerja lapangan usaha utama di Kepri. Kinerja lapangan usaha perdagangan diperkirakan tumbuh membaik sejalan dengan perbaikan daya beli dan konsumsi masyarakat. Demikian halnya dengan



lapangan usaha terkait dengan pariwisata lainnya, seperti transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa hiburan yang diperkirakan mengalami perbaikan setelah Pemerintah memutuskan untuk membuka perbatasan (melonggarkan syarat perjalanan) bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia melalui Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Di sisi lain, kinerja lapangan usaha konstruksi juga diperkirakan dapat tumbuh menguat pada tahun 2022 sejalan dengan realisasi proyek infrastruktur pemerintah maupun swasta yang masih terus berjalan yang sebelumnya tertunda pada tahun 2021.

Dari sisi eksternal, semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di berbagai negara dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi akan mendorong mobilitas secara global dan permintaan ekspor dari negara mitra utama terhadap Provinsi Kepri. Adanya peningkatan permintaan produk ekspor dari Kepulauan Riau khususnya produk industri pengolahan akan mendorong terjadinya peningkatan investasi yang diperlukan guna meningkatkan kapasitas produksi maupun *upgrade* teknologi mesin yang digunakan. Selain itu rencana investasi yang tertunda pada tahun 2020 diperkirakan akan mulai direalisasikan pada tahun 2021 dan 2022. Faktor pendorong lainnya yang juga diharapkan berasal dari domestik yakni realisasi belanja pemerintah yang diharapkan dapat dilakukan pada awal tahun. Apabila realisasi belanja dapat dilakukan pada awal tahun, maka dampak terhadap perekonomian yang dihasilkan akan lebih optimal.

Investasi oleh Pemerintah maupun pihak swasta juga diperkirakan meningkat yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kepri. Pengajuan rencana investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di Provinsi Kepri seperti KEK Kesehatan Sekupang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri. Di sisi lain, rencana pengembangan energi hijau dan terbarukan dengan memanfaatkan permukaan waduk Tembesi dan waduk Duriangkang. Hasil liaison Bank Indonesia menunjukkan bahwa realisasi investasi swasta pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dibanding tahun 2021. Berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah dan beberapa proyek apartemen, hotel dan resort di kawasan pariwisata akan menjadi mendorong meningkatnya investasi bangunan. Sementara itu, investasi non bangunan akan bersumber dari sektor swasta pada industri manufaktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi.

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 diperkirakan masih melanjutkan tren pemulihan seiring dengan mobilitas masyarakat yang meningkat didukung oleh semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 dan pembukaan sektor pariwisata. Peningkatan konsumsi juga didorong



oleh berlanjutnya stimulus pemerintah melalui bansos dan kartu pra kerja untuk menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, inflasi diperkirakan masih terkendali sehingga akan turut berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong konsumsi rumah tangga. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia hingga triwulan I 2022 menunjukkan adanya tren kenaikan optimisme masyarakat. Namun demikian, peningkatan harga komoditas pangan global serta kemunculan varian baru COVID-19 tetap perlu diwaspadai. Peningkatan konsumsi rumah tangga tercermin dari optimisme peningkatan penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Optimisme tersebut terindikasi dari Indeks Penghasilan Konsumen dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang menunjukkan peningkatan. Berlanjutnya program bantuan sosial (Bansos) akan turut menopang daya beli dari kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Konsumsi pemerintah juga diperkirakan dapat tumbuh meningkat didorong oleh realisasi belanja modal dan proyek yang tertunda pada tahun lalu. Dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan nasional terkini serta perkembangan kasus COVID-19 yang semakin terkendali, perekonomian Kepri pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh menguat dari tahun lalu.

Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh lapangan usaha utama akan mengalami peningkatan, yaitu industri pengolahan, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian. Peningkatan kinerja industri pengolahan terjadi seiring dengan pelonggaran aktivitas di negara mitra dagang Kepri yang akan mendorong peningkatan ekspor produk elektronik yang didukung kelancaran supply bahan baku industri di Kepri. Realisasi investasi sektor swasta dan belanja pemerintah juga akan mendorong perbaikan kinerja pada lapangan usaha konstruksi. Sejalan dengan pemulihan ekonomi secara global, permintaan minyak dan gas juga diperkirakan akan mengalami peningkatan dan mendorong kenaikan harga minyak dunia. Sementara itu jumlah wisatawan yang masuk ke wilayah Kepri diperkirakan masih terbatas jika belum ada kesepakatan untuk membuka akses kunjungan wisatawan asing.

Dari sisi pengeluaran perbaikan ekonomi pada tahun 2022 dan 2023 akan terjadi pada semua komponen PDRB, terutama konsumsi rumah tangga, investasi serta kinerja net ekspor yang meningkat seiring dengan optimisme pemulihan kesehatan dan kondisi ekonomi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat yang didukung optimisme pemulihan kinerja dunia usaha yang mendorong permintaan tenaga kerja. Optimisme tersebut terindikasi dari indeks penghasilan konsumen dan indeks ketersediaan lapangan kerja pada survey konsumen Bank Indonesia yang



menunjukkan peningkatan. Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2022 dan 2023 akan mendorong daya beli masyarakat khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tingkat inflasi yang rendah dan terkendali diharapkan dapat mendukung terjaganya daya beli masyarakat sehingga mendorong konsumsi.

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dunia dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5,1– 5,6%, dan inflasi dijaga pada kisaran angka 3,50±1, Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan sebesar 8,03– 8,75%, Persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar 4,35– 5,00%, dan Indeks Gini diproyeksikan sebesar 0,335–0,329, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,70–76,99%. Target indikator makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023

No.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET	
			2020	2021	RKPD 2022	RKPD 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-3,8	3,53	4,8–5,6	5,1– 5,6
2	Laju Inflasi	%	1,18	3,50±1	3,50±1	3,50±1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,34	10,2	10,10	8,03– 8,75
4	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,33	0,332	0,335 – 0,329
5	Persentase penduduk miskin	%	5,92	6,07	6,01	4,35– 5,00
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,59	76,26	76,70	76,70 – 76,99

Sumber: Hasil Analisis, 2022

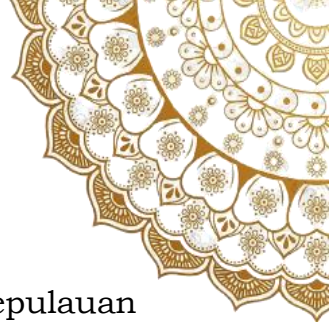
3.1.2.3. Strategi dan Arah kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka mendorong ekonomi daerah, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui:
- 1) Mendorong pemulihan aspek kesehatan masyarakat dari penyebaran Covid-19 yang seimbang dengan upaya mendorong pemulihan ekonomi.
 - 2) Melakukan realisasi belanja pemerintah lebih awal terutama belanja modal infrastruktur untuk menghasilkan dampak lebih optimal bagi perekonomian daerah.
 - 3) Mendorong kelancaran implementasi program pemulihan ekonomi nasional di daerah.



- 4) Mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus Nongsa *digital park* dan KEK *maintenance, repair and overhoul (MRO) Batam Aero Technic* dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
 - 5) Mendorong pemulihan pariwisata dengan mendorong kesiapan penerapan protokol kesehatan CHSE pada daerah tujuan wisata tertentu, mendorong pembukaan wisata secara bertahap dan mendorong penggunaan transaksi elektronik non tunai, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata.
 - 6) Mendorong perekonomian dan keuangan yang inklusif dengan cara: mendorong industri eksisting untuk meningkatkan pangsa penggunaan bahan baku berbasis potensi sumberdaya lokal; memprioritaskan investasi dalam pengembangan agroindustri berbasis potensi SDA di Kepri seperti hasil pertanian dan perikanan; mendorong penguatan dan kemitraan serta menjaga daya saing dan kinerja UMKM melalui digitalisasi UMKM, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung (transportasi jalan, jembatan, bandara, pelabuhan) untuk menekan biaya logistik dan konektivitas.
- b. Pengendalian Inflasi agar tetap terjaga, melalui:
- 1) Mendorong peningkatan kapasitas produksi pangan daerah untuk membangun kemandirian pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian antara lain melalui perluasan lahan, penguatan teknik budidaya, penerapan urban framing, integrated farming dan digital farming.
 - 2) Mendorong pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan efisiensi tata niaga komoditas bahan pangan dari produsen, distributor hingga tingkat konsumen.
 - 3) Melakukan kerjasama antar daerah untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan barang karena kapasitas produksi yang masih lebih rendah dari kebutuhan sekaligus untuk melindungi harga jual di tingkat produsen pada saat terjadi kelebihan pasokan (over supply).
 - 4) Mendorong tersedianya Neraca Bahan Pangan dan informasi harga komoditas sebagai dasar perumusan kebijakan stabilisasi harga serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan turunannya. Arah kebijakan keuangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 memperhatikan kinerja dan kebijakan APBD tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi keuangan daerah tahun 2023 beserta kebijakannya diuraikan pada subbab ini.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Landasan hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan landasan hukum tersebut, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini khususnya kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia serta analisa pertumbuhan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terus diupayakan mengalami tren peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mengupayakan optimalisasi Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yaitu meliputi:

1. Untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditujukan untuk meningkatkan PAD melalui modernisasi pelayanan Kantor Samsat dan peningkatan jumlah OPD yang terlibat aktif melakukan pemungutan retribusi daerah;
2. Untuk Sektor Dana Perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;



3. Untuk sektor Dana Alokasi Umum (DAU) akan diperjuangkan agar dalam memperhitungkan besaran DAU juga memperhatikan beberapa karakteristik khusus Provinsi Kepulauan Riau selain wilayah kelautan yaitu antara lain sebagai daerah perbatasan, pengembangan ekonomi FTZ yang kiranya juga dapat diperhitungkan secara optimal sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal; dan
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan sebagai indikator dalam penerimaan Dana Insentif Daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan program-program kerja yang disusun untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien dengan rincian sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:

- a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem komputerisasi/database pada tiap unit kantor pelaksana teknis pemungutan;
- b. Penyempurnaan legalisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Penerimaan Daerah khususnya terhadap UPT;
- e. Pengembangan sistem informasi online Pendapatan Daerah.
- f. Mengupayakan peningkatan jumlah OPD yang melakukan kegiatan pemungutan retribusi daerah
- g. Pemprov bersama-sama dengan DPRD akan mempercepat pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda tersebut nantinya sebagai payung hukum dalam pemungutan retribusi pemanfaatan ruang laut yang bisa menjadi andalan penerimaan retribusi daerah ke depan
- h. Pemprov sudah mengalokasikan OPD Penghasil retribusi dengan memberikan anggaran dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus untuk pemenuhan sarana prasarana baik kelengkapan laboratorium pengujian pertanian, PUPR, kesehatan hewan dan pengadaan kelengkapan sarana balai bibit perikanan serta peningkatan sertifikasi SDM laboratorium.



- i. Melakukan inventarisasi aset pemerintah provinsi yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan komersil sehingga bisa mendapatkan retribusi atas pemakaian kekayaan aset daerah.
- j. Melakukan perbaikan kinerja dan tata kelola perusahaan BUMD.
- k. Memperkuat struktur permodalan sebagai upaya mendorong BUMD melakukan perluasan usaha dan memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak swasta lainnya.
1. Penataan manajemen BLUD dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah provinsi kepulauan riau yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjunguban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang).

2. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah khususnya dengan melakukan Pengkajian terhadap jenis objek Retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah.

3. Peningkatan Dana Perimbangan

- a. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi departemen terkait Pemerintah Pusat;
- b. Koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pajak (Kanwil Pajak, KPP dan KPPBB) yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau; dan
- c. Pengkajian dan verifikasi data realisasi DBH Pajak dan Bukan Pajak antara lain dengan instansi Pemerintah Pusat dan kontraktor pertambangan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 merupakan proyeksi target penerimaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan didasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Asumsi-asumsi dalam menghitung proyeksi pendapatan tidak hanya dengan cara menganalisa tren pertumbuhan realisasi 5 (lima) tahun sebelumnya, tapi yang lebih penting adalah memperhatikan kondisi objektif yang terjadi saat ini dimana bangsa indonesia dimulai pada awal tahun 2020 mengalami kemerosotan ekonomi secara nasional akibat adanya wabah/pandemi COVID-19 yang dialami oleh seluruh negara-negara di dunia termasuk indonesia.



Kondisi wabah/pandemi COVID-19 sangat memengaruhi terjadinya perubahan yang sangat besar dalam seluruh sektor perekonomian baik berdampak bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menghitung proyeksi pendapatan tahun 2022-2024 digunakan sebagai data awal (baseline) adalah target pendapatan daerah pada tahun 2021 dimana baik sektor penerimaan PAD maupun Dana Perimbangan mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun sebelumnya. Hingga tahun 2022 belum ada kepastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir dan kapan titik balik perekonomian akan pulih kembali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih mengandalkan penerimaan dari pajak daerah. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan penerimaan yang sangat drastis akibat adanya pandemi COVID-19. Dengan kondisi tersebut, dengan memperhatikan data dan informasi yang ada, maka dilakukan penyesuaian pertumbuhan baru dalam menentukan proyeksi target pajak daerah tahun 2022 sampai dengan 2024.

Retribusi daerah merupakan salah satu yang mengalami dampak akibat terjadinya pandemi COVID-19. Saat ini terdapat 8 (delapan) perangkat daerah dan 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis penghasil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berasal dari antara lain:

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
8. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
9. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam;
10. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten karimun;
11. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan;
12. UPT P3 Antang;
13. UPT Laboratorium dan Klinik Hewan;
14. UPT Balai Benih Induk Pertanian;
15. UPT Laboratorium Pengujian Kontruksi;
16. UPT Balai Benih Ikan Pengujian; dan
17. UPTD BPMP2KP.

Proyeksi penerimaan akan diupayakan Penerimaan dari bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan



Kepulauan Riau yang rencananya akan melakukan pengelolaan Pelabuhan Dompok dan Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Moco.

Proyeksi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penerimaan BLUD berasal dari 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjung Uban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang). Selebihnya penerimaan lain-lain PAD yang sah berasal dari penerimaan Jasa Giro Kas Daerah dan Denda Pajak Daerah.

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan penerimaan Lain-lain PAD yang sah antara lain melalui Peningkatan jasa layanan kesehatan oleh 2 (dua) RSUD yang dimiliki oleh Pemprov Kepulauan Riau. Walaupun sudah berstatus BLUD namun bisa ditingkatkan penerimaannya dengan menaikkan kapasitas pelayanan rumah sakit. Anggaran terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan RSUD akan terus ditingkatkan selain sebagai pemenuhan hak masyarakat akan kesehatan juga diharapkan dapat meningkatkan PAD Kepulauan Riau.

Untuk sektor penerimaan Dana Perimbangan berasal dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Penerimaan Dana Perimbangan sangat tergantung dari realisasi penerimaan keuangan negara dan arah kebijakan pemerintah pusat dalam menyusun pos anggaran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada APBN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan, tata cara penyesuaian rencana alokasi dengan realisasi DBH, tata cara penyaluran, pedoman umum, petunjuk teknis pelaksanaan DBH, pemantauan dan evaluasi, dan tata cara pemotongan atas sanksi administrasi DBH diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan.

Diasumsikan pandemi COVID-19 sudah mulai membaik di tahun 2021, namun diproyeksikan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan akan hanya meningkat dengan persentase yang tidak signifikan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau optimis pada tahun 2022 keuangan negara segera membaik seiring dengan teratasinya pandemi COVID-19. Namun demikian peningkatan pertumbuhan realisasi penerimaan Dana Perimbangan akan tetap diupayakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dengan tujuan agar penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dicapai secara optimal.

Proyeksi penerimaan lain-lain pendapatan daerah diperoleh dari Dana Insentif Daerah dan hibah pihak ketiga yang berasal dari PT. Jasa



Raharja (Persero) dimana peningkatannya sebanding dengan tingkat realisasi penerimaan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLAJ).

Penyusunan proyeksi pendapatan daerah telah memperhitungkan dan mempertimbangkan pemulihan ekonomi dampak Pandemi Covid-19. Secara rinci proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 s.d 2024

No.	URAIAN	Realisasi APBD	Realisasi APBD	APBD Tahun Berjalan	Proyeksi/Target RKPD	Proyeksi/Target
		TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.195.637.693.103	1.436.072.735.262	1.348.493.617.641	1.424.646.400.254	1.379.722.106.355
4.1.01	Pajak Daerah	1.033.430.812.844	1.074.270.326.530	1.150.224.138.161	1.269.353.569.000	1.225.458.189.063
4.1.02	Retribusi Daerah	5.734.867.917	207.569.617.500	69.994.479.480	21.590.331.254	18.900.042.292
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.064.418.255	53.035.620.811	9.150.000.000	10.500.000.000	12.400.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	154.407.594.087	101.197.170.421	119.125.000.000	123.202.500.000	122.963.875.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.317.188.590.222	2.390.535.697.158	2.130.568.412.868	2.045.897.295.717	2.481.714.117.930
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.317.188.590.222	2.390.535.697.158	2.130.568.412.868	2.045.897.295.717	2.481.714.117.930
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.282.262.140.222	2.346.098.375.158	2.109.830.933.868	2.020.897.295.717	2.428.793.266.787
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	34.926.450.000	44.437.322.000	20.737.479.000	25.000.000.000	52.920.851.143
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.483.900.000	27.573.618.209	1.261.050.000	1.324.102.500	1.390.307.625
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.483.900.000,00	1.201.000.000	1.261.050.000	1.324.102.500	1.390.307.625
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		26.372.618.209			
	Jumlah Pendapatan	3.514.310.183.325	3.854.182.050.629	3.480.323.080.509	3.471.867.798.471	3.862.826.531.910

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 2022



3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja pegawai terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

- 1) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
- 2) Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan pertumbuhan Zero Growth.
- 3) Gaji DPRD Provinsi Kepri.
- 4) Tambahan Penghasilan PNS.
- 5) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

b. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- 1) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- 3) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.
- 4) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

c. Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah, ditambah bunga rencana pinjaman daerah Tahun 2023.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.



e. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah guna mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.

f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 2) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada perangkat daerah bersangkutan.



2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan infrastruktur dasar dan perkotaan yang mengarah pada:

- a. Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b. Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- c. Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.
- d. Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak /bukan pajak dari pemerintah pusat.

Secara rinci proyeksi belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.5
Realiasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020 s.d 2024

No.	URAIAN	Realisasi APBD	Realisasi APBD	APBD Tahun Berjalan	Proyeksi RKPD	Proyeksi
		TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	2.721.582.440.515	2.940.216.706.381	2.728.906.850.386	2.099.708.760.830	2.515.228.106.799
5.1.01	Belanja Pegawai	1.004.932.687.935	974.785.005.540	1.117.494.319.870	1.021.442.725.440	1.352.399.181.066
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.082.661.190.360	1.444.382.422.048	1.387.535.678.679	615.370.842.695	695.366.715.438
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	5.200.000.000		
5.1.05	Belanja Hibah	607.947.459.750	519.604.760.476	215.926.272.179	458.479.685.549	462.779.692.964
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.041.102.470	1.444.518.317	2.750.579.658	4.415.507.146	4.682.517.331
5.2	BELANJA MODAL	586.608.798.243	377.456.745.376	539.947.333.410	943.367.942.505	846.517.027.718
5.2.01	Belanja Modal Tanah		49.100.000.000	8.981.000.000		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.686.505.598	152.756.458.532	122.092.458.195		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.399.837.109	73.348.419.053	185.696.836.116		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	345.331.139.944	100.439.987.801	220.247.280.681		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.191.315.592	1.581.879.990	2.929.758.418		
	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		230.000.000			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.297.329.972	28.454.560.448	30.000.000.000	57.191.840.887	2.697.700.376
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.297.329.972	28.454.560.448	30.000.000.000	57.191.840.887	2.697.700.376
5.4	BELANJA TRANSFER	544.714.483.152	572.568.004.567	571.468.896.713	556.365.883.143	581.608.351.585
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	518.464.483.152	553.868.004.567	546.268.896.713	545.935.229.643	572.439.807.158
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	26.250.000.000	18.700.000.000	25.200.000.000	10.430.653.500	9.168.544.427
	Jumlah Belanja	3.855.203.051.882	3.918.696.016.772	3.870.323.080.509	3.656.634.427.365	3.946.051.186.478

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 2022



3.2.3.Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari: Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi, Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir dan Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari: Penyertaan Modal Pemerintah, Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan. Kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 yaitu: Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya.

Proyeksi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020 s.d 2024

No.	URAIAN	Realisasi APBD	Realisasi APBD	APBD Tahun Berjalan	Proyeksi RKPD	Proyeksi
		TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	405.406.834.700	64.513.966.143	280.000.000.000	282.397.378.894	83.224.654.568
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	405.406.834.699,57	64.513.966.143	100.000.000.000	282.397.378.894	83.224.654.568
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	180.000.000.000		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	405.406.834.700	64.513.966.143	280.000.000.000	282.397.378.894	83.224.654.568
6.1	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	97.630.750.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				97.630.750.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	97.630.750.000	0
	Pembiayaan Netto	405.406.834.700	64.513.966.143	280.000.000.000	184.766.628.894	83.224.654.568

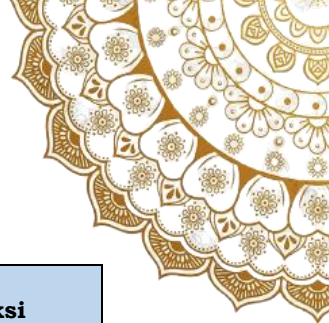
Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 2022

Berdasarkan Kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yang telah diuraikan di atas maka secara lengkap proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

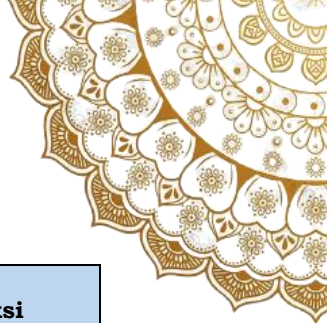


Tabel 3.7
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	URAIAN	Realisasi APBD	Realisasi APBD	APBD Tahun Berjalan	Proyeksi RKPD	Proyeksi
		TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.195.637.693.103	1.436.072.735.262	1.348.493.617.641	1.424.646.400.254	1.379.722.106.355
4.1.01	Pajak Daerah	1.033.430.812.844	1.074.270.326.530	1.150.224.138.161	1.269.353.569.000	1.225.458.189.063
4.1.02	Retribusi Daerah	5.734.867.917	207.569.617.500	69.994.479.480	21.590.331.254	18.900.042.292
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.064.418.255	53.035.620.811	9.150.000.000	10.500.000.000	12.400.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	154.407.594.087	101.197.170.421	119.125.000.000	123.202.500.000	122.963.875.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.317.188.590.222	2.390.535.697.158	2.130.568.412.868	2.045.897.295.717	2.481.714.117.930
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.317.188.590.222	2.390.535.697.158	2.130.568.412.868	2.045.897.295.717	2.481.714.117.930
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.282.262.140.222	2.346.098.375.158	2.109.830.933.868	2.020.897.295.717	2.428.793.266.787
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	34.926.450.000	44.437.322.000	20.737.479.000	25.000.000.000	52.920.851.143
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.483.900.000	27.573.618.209	1.261.050.000	1.324.102.500	1.390.307.625
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.483.900.000,00	1.201.000.000	1.261.050.000	1.324.102.500	1.390.307.625
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		26.372.618.209			
	Jumlah Pendapatan	3.514.310.183.325	3.854.182.050.629	3.480.323.080.509	3.471.867.798.471	3.862.826.531.910



No.	URAIAN	Realisasi APBD	Realisasi APBD	APBD Tahun Berjalan	Proyeksi RKPD	Proyeksi
		TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	2.721.582.440.515	2.940.216.706.381	2.728.906.850.386	2.099.708.760.830	2.515.228.106.799
5.1.01	Belanja Pegawai	1.004.932.687.935	974.785.005.540	1.117.494.319.870	1.021.442.725.440	1.352.399.181.066
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.082.661.190.360	1.444.382.422.048	1.387.535.678.679	615.370.842.695	695.366.715.438
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	5.200.000.000		
5.1.05	Belanja Hibah	607.947.459.750	519.604.760.476	215.926.272.179	458.479.685.549	462.779.692.964
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.041.102.470	1.444.518.317	2.750.579.658	4.415.507.146	4.682.517.331
5.2	BELANJA MODAL	586.608.798.243	377.456.745.376	539.947.333.410	943.367.942.505	846.517.027.718
5.2.01	Belanja Modal Tanah		49.100.000.000	8.981.000.000		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.686.505.598	152.756.458.532	122.092.458.195		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.399.837.109	73.348.419.053	185.696.836.116		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	345.331.139.944	100.439.987.801	220.247.280.681		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.191.315.592	1.581.879.990	2.929.758.418		
	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		230.000.000			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.297.329.972	28.454.560.448	30.000.000.000	57.191.840.887	2.697.700.376
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.297.329.972	28.454.560.448	30.000.000.000	57.191.840.887	2.697.700.376
5.4	BELANJA TRANSFER	544.714.483.152	572.568.004.567	571.468.896.713	556.365.883.143	581.608.351.585



No.	URAIAN	Realisasi APBD	Realisasi APBD	APBD Tahun Berjalan	Proyeksi RKPD	Proyeksi
		TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	518.464.483.152	553.868.004.567	546.268.896.713	545.935.229.643	572.439.807.158
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	26.250.000.000	18.700.000.000	25.200.000.000	10.430.653.500	9.168.544.427
	Jumlah Belanja	3.855.203.051.882	3.918.696.016.772	3.870.323.080.509	3.656.634.427.365	3.946.051.186.478
	Total Surplus/(Defisit)	(340.892.868.556)	(64.513.966.143)	(390.000.000.000)	(184.766.628.894)	(83.224.654.568)
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	405.406.834.700	64.513.966.143	390.000.000.000	282.397.378.894	83.224.654.568
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	405.406.834.699,57	64.513.966.143	210.000.000.000	282.397.378.894	83.224.654.568
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	180.000.000.000		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	405.406.834.700	64.513.966.143	390.000.000.000	282.397.378.894	83.224.654.568
6.1	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	97.630.750.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				97.630.750.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	97.630.750.000	0
	Pembiayaan Netto	405.406.834.700	64.513.966.143	390.000.000.000	184.766.628.894	83.224.654.568
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	64.513.966.143	0	0	0	0

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 2022



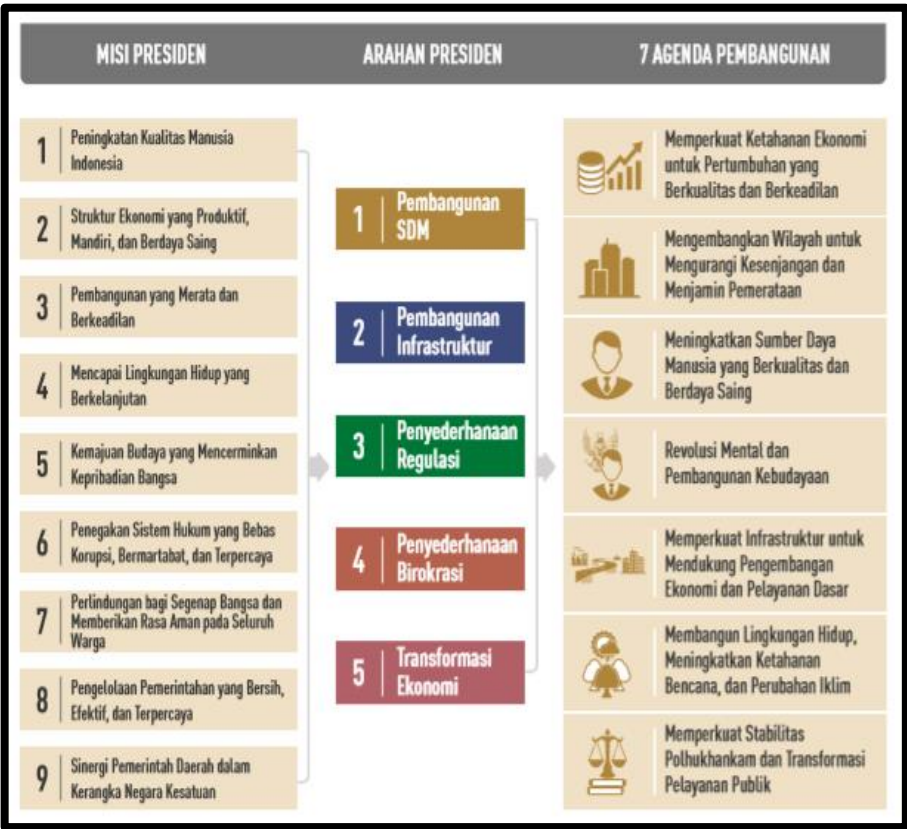
BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tinjauan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Visi dan misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 misi dan 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah.



Gambar 4.1

Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Sasaran pembangunan tahun 2023 meliputi:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; dan



2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 4.1
Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2023

No.	Sasaran dan Indikator Pembangunan	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,375 – 0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,31 – 73,49
6	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	103 – 105
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	106 - 107

Sumber: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan dalam RKP 2023 diuraikan sebagai berikut:

- a. **Peningkatan kualitas SDM:** kesehatan dan Pendidikan, dengan indikator: Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% → 14% (2024); Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk; Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%; Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43%; Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17,48%; Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 9,24 tahun; dan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 Persen.
- b. **Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job,** dengan indikator: Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43%; Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%; Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang; Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%.
- c. **Mendorong pemulihan dunia usaha,** dengan indikator: Pertumbuhan Wirausaha 3,50%; Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9-4,2%; Nilai Devisa



Pariwisata US\$ 1,76-6,08 Miliar; Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%; dan Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun.

- d. **Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan**, dengan indikator: Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,4-5,9%; Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6%; Produk Inovasi dan Produk Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan 10; Peringkat Global Innovation Index 75-80; Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 5,55-6,08%; dan Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80%.
- e. **Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)**, dengan indikator: Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02%; Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif 1.778,2 GW; Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan; dan Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%.
- f. **Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem**, dengan indikator: Penghapusan kemiskinan ekstrem 1,5-2,0% (2023) → 0-1% (2024); Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 91%; dan Nilai Tukar Petani /Nelayan 103-105/105-107.
- g. **Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi**, dengan indikator: Volume tampungan air per kapita 54,50m³/det; Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman); Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5%; Masyarakat Pengguna Internet 80,7%; Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif 50%.
- h. **Pembangunan Ibu Kota Nusantara**, dengan indikator: Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A; dan Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha.

Delapan arah kebijakan pembangunan diatas dilaksanakan dengan beberapa strategi pembangunan, sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi (a) penguatan sistem jaminan sosial, (b) percepatan modernisasi pertanian, dan (c) peningkatan pemerataan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan, dilaksanakan melalui strategi (a) penguatan sistem kesehatan nasional, dan (b) peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter);



3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, dilaksanakan melalui strategi perluasan penyediaan lapangan usaha;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha, dilaksanakan melalui strategi (a) percepatan revitalisasi pariwisata, dan (b) memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi (a) percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri, dan (b) penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), dilaksanakan melalui strategi (a) mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon, dan (b) percepatan transisi energi dengan pengembangan energi ramah lingkungan;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dilaksanakan melalui strategi (a) peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi, (b) percepatan pemerataan infrastruktur digital, dan (c) percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi percepatan penyediaan fasilitas dasar di IKN.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya menjadi visi daerah sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Adapun visi RPJMD adalah:

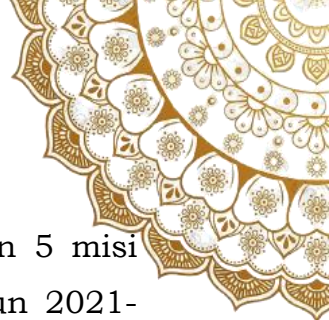
“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

Makmur : Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.

Berdaya Saing : Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

Berbudaya : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.



Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, yaitu:

1. **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. **Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. **Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan



kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Keselarasan antara RPJMN dan RJPMD dimaksudkan untuk meningkatkan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional.



Adapun keselarasan antara misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 dan RPJMN Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Keselarasan Misi RPJMD 2021–2026 dan RPJMN 2020-2024

MISI RPJMN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021 - 2026	PEMBAHASAN
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	Misi 1 RPJMD sesuai dengan Misi 2 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan, pemerataan dan penguatan di Bidang Ekonomi
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	Misi 2 RPJMD sesuai dengan Misi 8 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Iman dan Taqwa	Misi 3 RPJMD sesuai dengan Misi 1 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Misi 4 RPJMD sesuai dengan Misi 5 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam pengembangan dan pelestarian budaya dalam pembangunan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan	Misi 5 RPJMD sesuai dengan Misi 3 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan pembangunan infrastruktur
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya		
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Roau Tahun 2021-2026

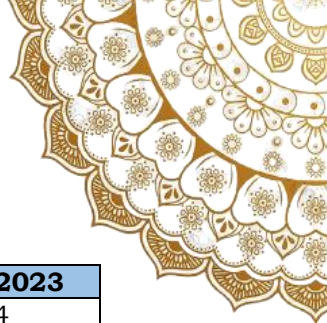


Pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, setiap misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah:

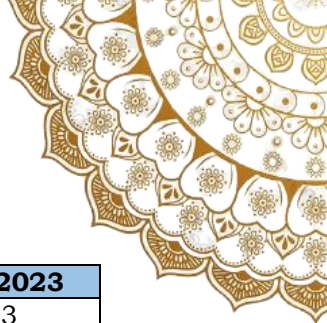


Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target 2022	Target 2023
VISI: TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA”					
Misi 1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat					
Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.297	3.305
	Optimalisasi Sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.297	3.305
	Peningkatan Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2.387	2,626
	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	69,73	69,95
	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	27,10	27,20
Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		PDRB per Kapita ADHK	Juta Rupiah	80,07	81,91
		Indeks Gini	Indeks	0,332	0,335-0,329
		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,8 - 5,6	5,1– 5,6
	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	55.744	59.334
		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	Persen	39,77	40,20
		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	Persen	8,54	8,56
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Persen	5,80	6,00
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	3,00	3,40
		Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	52,04	53,04
		Persentase UMKM yang Naik Kelas	Persen	30,21	30,55
		Nilai Realisasi Investasi PMA	Miliar Rupiah	22.500	23.000
		Nilai Realisasi Investasi PMDN	Miliar Rupiah	12.500	13.500



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target 2022	Target 2023
	Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	Persen	5,59	5,24
	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2.177	2.181
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	62,80	62,81
Misi 2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan					
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,77	70,37
	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks SPBE	Indeks	2,85	2,90
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB	BB
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B	B
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
	Managemen ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Indeks	Baik (286)	Baik (294)
	Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,37	0,46
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks	1,13	1,25
Misi 3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa					
Penguatan Jaringan Pengaman Sosial		Angka Kemiskinan	%	6,01	4,35- 5,00
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	6,01	4,35- 5,00
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,10	8,03- 8,75
	Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6779 (Desa Berkembang)	0.6861 (Desa Berkembang)
Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,7	76,70-76,99
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,27	70,41
		Prevalensi Stunting	%	15,80	15,30
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,93
	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10,14	10,15
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100	100
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.20	93.30
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65,50	66,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target 2022	Target 2023
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	75,05	76,03
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	Indeks	0,504	0,58
		SDI (<i>Sport Development Index</i>)	Indeks	6,84	20,29
Misi 4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan					
Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	62,9	63,9
	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekonomi Budaya	Nilai	28,11	28,16
		Nilai Warisan Budaya	Nilai	48,84	49,64
		Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	1,49	1,55
		Nilai Budaya Literasi	Nilai	72,25	72,50
	Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	74,46	75,95
		Indeks Ketahanan Nasional	Skor	2,81	2,83
Misi 5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan					
Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau		Rasio Konektivitas	Rasio	41,33	44,25
	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	Rasio	95,50	96,00
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	96,15	97,03
		Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	91,32	93,06
		Cakupan Pelayanan Drainase	%	48,1	51,3
		Cakupan Pelayanan Persampahan	%	67,80	68,90
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Ha	145,27	123,73
		Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase jalan kondisi baik	%	63,25
	Rasio Konektivitas Angkutan Darat		Rasio	18	18
	Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan		Rasio	23,33	26,25
	Rasio Konektivitas Angkutan Laut		Rasio	31,82	36,36

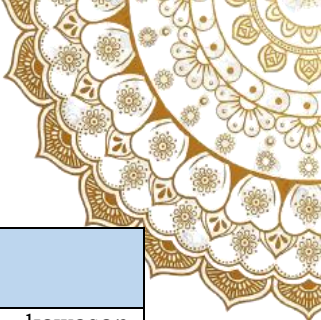
Sumber: - RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023



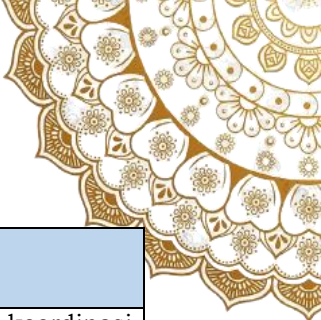
Dalam mencapai target sasaran pembangunan, dipilih beberapa strategi. Strategi dimaksudkan sebagai gambaran umum upaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program perencanaan pembangunan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam upaya untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan strategi untuk setiap sasaran pembangunan tahunan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.4
Strategi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

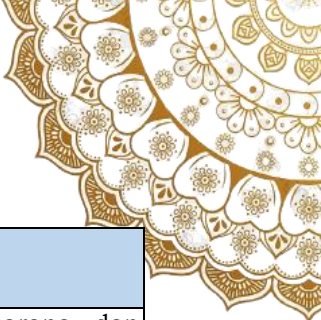
Tujuan	Sasaran	Strategi
Visi: Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya		
Misi 1: Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat		
1.1. Optimalisasi potensi kemaritiman, keunggulan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan	1.1.1. Optimalisasi Sektor Perikanan	1.1.1.1. Pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan. 1.1.1.2. Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan. 1.1.1.3. Pengembangan perikanan tangkap 1.1.1.4. Pengembangan perikanan budidaya 1.1.1.5. Pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor 1.1.1.6. Pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan. 1.1.1.7. Pengembangan industri galangan kapal. 1.1.1.8. Peningkatan tatalaksana konsesi tata ruang laut untuk perkapalan. 1.1.1.9. Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga. 1.1.1.10. Peningkatan tatalaksana konsesi migas bawah laut. 1.1.1.11. Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan sektor kelautan. 1.1.1.12. Pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan.
	1.1.2. Peningkatan Sektor Pariwisata	1.1.2.1. Pengembangan <i>tourism linkage networking</i> antar kabupaten dan kota. 1.1.2.2. Divesifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan. 1.1.2.3. Meningkatkan promosi wisata melalui berbagai event dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi. 1.1.2.4. Pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis kemaritiman. 1.1.2.5. Pengembangan pariwisata maritim. 1.1.2.6. Pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi). 1.1.2.7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan. 1.1.2.8. Peningkatan kualitas destinasi pariwisata
	1.1.3. Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	1.1.3.1. Pemanfaatan jasa lingkungan dan perhutanan sosial. 1.1.3.2. Pemulihan kawasan-kawasan tercemar serta berpotensi mengalami kerusakan lingkungan.



Tujuan	Sasaran	Strategi
	1.1.4. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	1.1.4.1. Mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemari. 1.1.4.2. Penyediaan fasilitas pendukung dalam upaya hutan lestari.
1.2. Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi	1.2.1. Peningkatan PDRB pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan.	1.2.1.1. Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi.
		1.2.1.2. Meningkatkan kapasitas permodalan bagi UMKM
		1.2.1.3. Pemberian insentif dan akses permodalan bagi para industri yang mengalami kesulitan ekonomi.
		1.2.1.4. Mendorong pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah.
		1.2.1.5. Peningkatan investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.
		1.2.1.6. Penyederhanaan layanan perizinan investasi untuk memberikan kemudahan bagi para investor.
		1.2.1.7. Meningkatkan daya saing UMKM.
		1.2.1.8. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi.
		1.2.1.9. Kemudahan layanan perizinan dengan <i>one day service</i> .
		1.2.1.10. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan
		1.2.1.11. Pemetaan potensi investasi.
		1.2.1.12. Meningkatkan kontribusi seKtor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku.
		1.2.1.13. Meningkatkan kontribusi seKtor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku.
		1.2.1.14. Penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM).
	1.2.2. Peningkatan PAD	1.2.2.1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
		1.2.2.2. Optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD.
		1.2.2.3. Optimalisasi penerapatan <i>Free Trade Zone</i> secara menyeluruh.
		1.2.2.4. Optimalisasi pengelolaan potensi PAD.
	1.2.3. Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	1.2.3.1. Pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah.
		1.2.3.2. Bantuan permodalan bagi para pelaku usaha sektor pertanian.
		1.2.3.3. Ketersediaan BUMD pertanian.
		1.2.3.4. Penguatan sektor pertanian berbasis komoditas daerah.
Misi 2: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan		
2.1. Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat, dan antisipatif	2.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	2.1.1.1. Mengintensifkan penyebaran informasi publik secara <i>up to date</i> melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
		2.1.1.2. Memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan.
		2.1.1.3. Meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik).
		2.1.1.4. Mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk.
	2.1.2. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	2.1.2.1. Peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel.



Tujuan	Sasaran	Strategi
		2.1.2.2. Meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal.
	2.1.3. Manajemen ASN yang Profesional	2.1.3.1. Mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas. 2.1.3.2. Jaminan pengembangan karir bagi apra ASN berprestasi. 2.1.3.3. Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan.
	2.1.4. Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam Menghadapi Bencana	2.1.4.1. Mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat. 2.1.4.2. Pengembangan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi. 2.1.4.3. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana.
	2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.1.5.1. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa		
3.1. Penguatan jaring pengaman sosial	3.1.1. Menurunnya Angka Kemiskinan	3.1.1.1. Meningkatkan kapasitas dan perlindungan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 3.1.1.2. Meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan sosial. 3.1.1.3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja. 3.1.1.4. Perluasan kesempatan kerja. 3.1.1.5. Pembinaan hubungan industrial. 3.1.1.6. Perlindungan ketenagakerjaan.
	3.1.2. Masyarakat Desa yang Tangguh dan Adaptif	3.1.2.1. Mendorong eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penopang ekonomi desa. 3.1.2.2. Peningkatan upaya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. 3.1.2.3. Peningkatan penataan desa dan Kerjasama desa.
3.2. Pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter	3.2.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.2.1.1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat. 3.2.1.2. Percepatan penyediaan sarana dan prasaran pemulihan Kesehatan. 3.2.1.3. Digitalisasi layanan kesehatan melalui layanan berbasis IT. 3.2.1.4. Pemerataan layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan sampai ke desa dan dusun. 3.2.1.5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif. 3.2.1.6. Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi dan anak. 3.2.1.7. Peningkatan sanitasi lingkungan. 3.2.1.8. Penambahan tenaga medis di pulau-pulau seperti Dokter Keluarga, bidan keluarga dan perawat.
	3.2.2. Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	3.2.2.1. Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan industri. 3.2.2.2. Meningkatkan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif. 3.2.2.3. Mengembangkan layanan Pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata. 3.2.2.4. Mendorong keberlanjutan sekolah dari dasar hingga perguruan tinggi.



Tujuan	Sasaran	Strategi
		3.2.2.5. Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
		3.2.2.6. Peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan.
		3.2.2.7. Internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu.
	3.2.3. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	3.2.3.1. Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga.
	3.2.3.2. Menjamin pemenuhan hak anak (PHA).	
	3.2.3.3. Menjamin perlindungan perempuan dan anak bebas dari kekerasan dan TPPPO.	
	3.2.3.4. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pendekatan kesejahteraan keluarga.	
	3.2.4. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda	3.2.4.1. Menumbuhkan jiwa entrepreneur muda yang peka terhadap pengembangan potensi regional.
	3.2.4.2. Mengembangkan minat dan bakat pemuda agar terhindar dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).	
Misi 4: Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan		
4.1. Pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan harmoni masyarakat	4.1.1. Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	4.1.1.1. Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal.
		4.1.1.2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu.
	4.1.2. Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	4.1.2.1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat.
		4.1.2.2. Pemberdayaan dan pembinaan Ormas/LSM yang sesuai dengan peraturan perundangan.
		4.1.2.3. Menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama.
		4.1.2.4. Menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku.
Misi 5: Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan		
5.1. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau	5.1.1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	5.1.1.1. Percepatan pemerataan layanan kelistrikan untuk setiap wilayah.
		5.1.1.2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.
		5.1.1.3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Air Baku serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
		5.1.1.4. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Sanitasi dan Air Minum.
		5.1.1.5. Meningkatkan Akses terhadap Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Permukiman Kumuh.
		5.1.1.6. Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
	5.1.2. Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	5.1.2.1. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.
		5.1.2.2. Menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan.

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026



4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

4.2.1. Telaahan Tema dan Prioritas Nasional Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah 2023 memiliki tema pembangunan **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Tema pembangunan tersebut mendukung pelaksanaan prioritas nasional (PN). Tujuh PN tahun 2023 yang merupakan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Sasaran PN 1 sebagai berikut: 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran PN 2 sebagai berikut: 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI); dan 2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran dari prioritas Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, meliputi:

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
- b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk



- c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan
- d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
- e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan
- f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing

3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Prioritas nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki sasaran sebagai berikut:

- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
- b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
- d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
- e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
- f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif

4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran pembangunan dari prioritas ini, yaitu:

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
- b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar
- c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan
- d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan
- e. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK

5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Prioritas nasional keenam ini memiliki beberapa sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- b. Berkurangnya kerugian akibat bencana dan bahaya iklim
- c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline

6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran dari prioritas Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik, yaitu:



- a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal
- b. Optimalnya kebijakan luar negeri
- c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- a. Terjaganya keutuhan wilayah NKRI

Pencapaian tujuh PN di atas didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) sebagai leverage point yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan *Major Project dapat* dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Lebih lanjut mengenai pembangunan kewilayahan untuk Sumatera terdapat beberapa arahan pengembangan tahun 2023. Sebagaimana dari kebijakan tersebut berada di wilayah atau terkait dengan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera, kawasan yang diprioritaskan



untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sumatera. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe dan KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; KI/KEK Sei Mangkei dan DPP Danau Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, KPBPB Batam-BintanKarimun, KEK Nongsa, serta KEK Batam Aero Technic yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau; KI Sadai dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; KI Tenayan yang berlokasi di Provinsi Riau serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat;
2. Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas kakao, karet, kelapa, kopi, lada, pala, serta perikanan budidaya. Pengembangan sektor unggulan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan calon induk unggul ikan air tawar, serta benih ikan air tawar, udang, ikan air payau dan ikan air laut yang akan diberikan kepada masyarakat;
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah metropolitan (WM Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, Pangkalpinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);
4. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranai, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Sabang dan PKSN Bengkalis; penanganan terhadap 36 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sumatera; revitalisasi 12 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Aceh (Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat (Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan (Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, dan Kawasan



- Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Jambi (Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu (Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung (Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji); pembangunan 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang pada tahun 2023 difokuskan pada 4 KPPN yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Samosir, KPPN Bintan dan KPPN Bangka Selatan; pengentasan 3.097 desa tertinggal dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.6; dan
5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-rata penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan pekerjaan umum) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota dan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

4.2.2. Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Isu-isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada periode 2021-2026 yang menjadi isu strategis pembangunan 2023, meliputi:



1. Potensi Maritim

Sebagai wilayah kepulauan, potensi maritim sangat mendukung didalam pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, namun hingga saat ini belum banyak yang dapat dikembangkan secara optimal, padahal kekayaan ini akan membuka peluang bagi daerah yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat. Kurangnya perhatian dan komitmen kita membangun sektor maritim, sehingga fokus pengembangan sektor ini belum optimal termasuk kebijakan fiskal dan moneter.

Sektor maritim merupakan hal penting di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini selaras dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas laut sebesar 417.012,97 km² dan terdiri dari 1.796 pulau dan berada posisi yang strategis dan potensial layak menjadi poros maritime.

Provinsi Kepulauan Riau menyimpan potensi sumber daya maritim antara lain; perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut dan energi laut. Propinsi Kepri memiliki garis pantai yang cukup panjang dan menyediakan banyak lokasi objek wisata bahari dengan pemandangan alami, indah dan bagus, tinggal bagaimana mengembangkannya sebagai sektor pariwisata bahari bagian dari ekonomi maritim, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kemakmuran masyarakat.

Pada urusan perikanan, khususnya perikanan tangkap yang memiliki potensi untuk ditingkatkan. Jumlah produksi perikanan tangkap menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2017 sebesar 304.039 ton, tahun 2018 sebesar 304.975 ton, tahun 2019 sebesar 309.287 ton, dan tahun 2020 sebesar 319.197 ton. Selain itu, terdapat potensi ragam perikanan tangkap antara lain ikan kecil (pelagis) sebesar 513.000 ton, ikan demersal sebesar 656.000 ton, lobster sebesar 400 ton, cumi-cumi sebesar 2.700 ton, ikan karang sebesar 27.600 ton dan ikan hias sebesar 293.600 ton.

Selanjutnya, produksi perikanan budidaya mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 21.421 ton dari tahun 2019 sebesar 33.003 ton. Namun potensi produksi perikanan budidaya dapat ditingkatkan mengingat potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, dan tambak seluas lebih kurang 4.948 ha. Oleh karena itu, upaya peningkatan ini harus didukung pemerintah daerah dengan tersedianya pakan, benih serta sarana dan prasana yang cukup, terutama untuk pelaku UMKM.



Volume produk olahan hasil perikanan menjadi perhatian selanjutnya. Hal ini disebabkan produk olahan hasil perikanan akan memberikan nilai tambah bagi urusan perikanan. Penjualan dalam bentuk segar hingga saat ini memang masih cukup menguntungkan bagi nelayan, namun demikian ikan segar memiliki dua kelemahan yakni cepat rusak dan nilai tambah yang dihasilkan kecil. Dari data yang disajikan produk olahan perikanan Provinsi Kepulauan Riau masih belum tampak signifikan dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan. Namun produk olahan perikanan Provinsi Kepulauan Riau meningkat signifikan pada tahun 2020 sebesar 6.206 ton dari tahun 2019 sebesar 1.804 ton. Peningkatan volume produk olahan sangat ditentukan oleh berkembangnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau industri perikanan, baik skala UMKM maupun skala besar. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah terhadap industri pengolahan ikan sangat diperlukan yang berupa tempat pengolahan, akses untuk melakukan ekspor, serta sarana dan prasarana lainnya.

Sebagai negara dengan jumlah laut yang dominan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki arus barang dan orang yang cukup tinggi. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang melalui angkutan penyeberangan naik menjadi 304.628 kendaraan dari sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 276.935. Tingginya arus barang maupun arus orang pada mode armada angkutan umum perairan, menjadikan retribusi yang tinggi bagi jasa kepelabuhan yakni pada tahun 2020 sebesar Rp429.718.867,00. Selain itu retribusi izin bidang perhubungan juga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 yakni menjadi sebesar Rp689.760.000,00. Hal ini merupakan potensi untuk ditingkatkan dengan dukungan pelabuhan serta sarana dan prasarana lainnya.

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki ciri khas dan potensi wisata masing-masing. Salah satu wisata yang dapat dioptimalkan adalah wisata bahari. Kawasan-kawasan wisata bahari akan menjadi salah satu daya tarik wisatawan domestik, nasional, dan internasional. Hal tersebut telah diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang mengoptimalkan wisata bahari. Arah kebijakan pengembangan pariwisata kemaritiman/bahari untuk dibawa pada pariwisata yang berbasis kemaritiman pada masyarakat lokal. Upaya ini menjadi penting agar supaya kunjungan wisata yang tinggi dapat menciptakan *multiplier effect* bagi masyarakat lokal. Dengan demikian maka ekonomi lokal akan tumbuh yang selanjutnya diharapkan akan mempersempit kesenjangan antara sektor ekonomi nasional dan sektor ekonomi lokal yang pada gilirannya tentu mempersempit kesenjangan antar wilayah



Pada sisi lain, dukungan terhadap potensi kemaritiman diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap sumber-sumber potensi. Perlindungan tersebut antara lain perlindungan terhadap *illegal fishing*, *unregulated fishing*, *unreported fishing* dan *overfishing*. Pencemaran laut dari limbah B3 dari kapal yang labuh jangkar, alih fungsi hutan mangrove dan lainnya merupakan hal yang perlu ditangani agar selaras dengan peningkatan potensi kemaritiman. Selain itu, dukungan regulasi untuk kawasan industri kemaritiman mutlak diperlukan.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah produktif yang merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dengan satuan luasan hektar. Luasannya adalah 226.451 ha. Hal ini merupakan salah satu keunggulan wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau yang dapat menunjang sektor perekonomian. Keunggulan wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan industri dan memiliki iklim investasi serta dukungan regulasi diharapkan mampu untuk menarik investasi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah perizinan yang telah diterbitkan naik dari 1.348 izin pada tahun 2019 menjadi 2.505 izin pada tahun 2020. Upaya-upaya perlu dilaksanakan secara konsisten agar realisasi PMA naik sebagaimana tahun 2019 sebesar 20.450 milyar rupiah menjadi 23.751 milyar rupiah pada tahun 2020.

Kenaikan investasi diharapkan berpengaruh terhadap industri dan perdagangan. Hal ini didukung dengan kawasan industri dengan jumlah semakin meningkat dari sejumlah 22 unit pada tahun 2011 menjadi 32 unit pada tahun 2020. Selanjutnya, pertumbuhan sektor perindustrian juga meningkat dari 5,61% pada tahun 2015 menjadi 13,84% pada tahun 2020.

Perhatian terhadap UMKM dan koperasi mutlak diperlukan agar dapat berpartisipasi dalam peningkatan kinerja perekonomian. Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2020 adalah sebesar 40,85% yang meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 39,93%. Keaktifan koperasi dan UMKM ini harus bersinergi atau menjadi bagian dalam pengoptimalan sektor kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, industri kecil, kontruksi, perdagangan dan lainnya dalam peningkatan penerimaan PAD Provinsi Kepulauan Riau.

2. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk keselarasan dengan SDG's/TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Selanjutnya,



tujuan ini diterjemahkan dalam sasaran global berupa mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Lembaga tersebut termasuk pemerintah daerah.

Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan diterjemahkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020 secara konsisten menunjukkan peningkatan. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2019 sebesar 67,98 menjadi pada tahun 2020 adalah sebesar 68,57. Selain itu, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang direpresentasikan dengan nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan predikat BB dengan nilai 75,63 yang meningkat dari 75,28 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan ada peningkatan pada sisi akuntabilitas kinerja pemerintah. Selaras dengan sasaran nasional, berdasarkan hasil penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dari tahun 2017 sampai dengan 2020 Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil mendapatkan opini BPK dengan predikat WTP. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif dan perlu untuk dipertahankan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menjaga komitmen yang kuat untuk meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan termasuk kinerja keuangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemenuhan SPM yang merupakan menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab tersebut adalah untuk menyediakan anggaran pendapatan dan belanja untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Pencapaian pelaksanaan SPM di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum seluruhnya maksimal. Antara lain capaian SPM pada tahun 2020 di Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah dengan indikator Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK adalah 96,01% dari target 100% dan Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus dengan indikator Jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB adalah 82,48% dari target 100%. Selanjutnya, capaian



Pelayanan Dasar Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota adalah 92,68% dari target 100%. Berdasarkan hal-hal tersebut maka mempertahankan pemenuhan pelayanan dasar yang berupa SPM harus menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang

Selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung dengan perencanaan, pengawasan serta aparatur yang baik. Pada sisi perencanaan diperlukan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan yang lain dan dokumen penganggaran. Konsistensi tersebut antara lain pada dokumen RPJMD, RKPD, RTRW dan APBD. Pada sisi pengawasan, level APIP didorong untuk ditingkatkan karena masih berada pada nilai level APIP 2+. Profesionalitas aparatur ditunjukkan indeks profesionalitas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2020, indeks profesionalitas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencapai angka 53,76. Hal ini menunjukkan profesionalitas aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu ditingkatkan. Selain itu, profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana yang timbul serta mampu menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3. Sumber Daya Manusia

RPJMN Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. SDM berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari kualitas pendidikan. Hal ini selaras dengan SDG's/TPB khususnya pada tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Sasaran-sasaran pada tujuan ke-4 tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- b. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.



- c. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

Selaras dengan hal tersebut, pencapaian pelaksanaan SPM di bidang pendidikan belum seluruhnya maksimal. Capaian SPM pada tahun 2020 di Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah dengan indikator Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK adalah 84,62% dari target 100% dan Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus dengan indikator Jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB adalah 82,48% dari target 100%. Hal ini memerlukan upaya-upaya yang konsisten untuk pencapaian amanah tersebut.

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus diharapkan dapat menjadi jembatan untuk Pendidikan yang lebih tinggi dan selaras dengan kebutuhan tenaga kerja atau industri. Pada tahun 2020, persentase lulusan SMA/MA yang diterima di perguruan tinggi adalah sebesar 58,50% dan persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha sebesar 60,10%. Meskipun kedua indikator tersebut meningkat dari tahun ke tahun, diperlukan upaya-upaya yang konsisten untuk pencapaian yang lebih baik.

Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pada era Revolusi Industri Keempat (4.0), layanan Pendidikan harus dapat menyelaraskan dengan kondisi tersebut. Pada tahun 2020, persentase SMA/SMK yang memiliki sistem informasi manajemen berbasis IT sebesar 78%. Kondisi ini harus ditingkatkan hingga mencapai 100% untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dengan siswa. Pembelajaran jarak jauh ini disebabkan kondisi pandemi COVID-19 yang belum diketahui berakhirnya sehingga pembelajaran jarak jauh dengan siswa masih diperlukan untuk beberapa tahun mendatang. Pembelajaran jarak jauh dengan siswa ini harus didukung dengan infrastruktur komunikasi yang baik dan merata, sehingga tidak ada *blank spot* di lingkungan siswa berada. Oleh karena itu, dukungan sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh dengan siswa mutlak diperlukan.

Dukungan pembelajaran jarak jauh harus diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pada tahun 2020, persentase guru yang sudah sertifikasi adalah sebesar 39,09% serta persentase kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 65,54%. Berdasarkan data tersebut, kualitas tenaga pendidik harus ditingkatkan sesuai kompetensi dan kondisi yang ada. Salah satu kualitas yang ditingkatkan adalah mengenai metode dan penyampaian pembelajaran jarak jauh.



Aspek lainnya yang perlu ditingkatkan adalah kurikulum yang mengadopsi muatan lokal. Muatan lokal tersebut mempertimbangkan kondisi Kepulauan Riau yang memiliki potensi antara lain potensi kemaritiman, industri dan wisata. Pendidikan yang memiliki “*link and match*” dengan kebutuhan kemaritiman, industri dan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha yang sebesar 60,10% pada tahun 2020. Selain itu, peningkatan SDM dapat dilakukan melalui jalur non formal, antara lain melalui Balai Latihan Kerja atau sarana non formal lainnya. Oleh karena itu, sinergitas antara Perangkat Daerah pengampu dengan *stakeholders* mutlak diperlukan. Muatan lokal yang mempertimbangkan kondisi Kepulauan Riau lainnya adalah budaya Melayu. Karakteristik budaya Melayu akan membentuk SDM yang memiliki karakter sesuai dengan kondisi yang diperlukan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada sisi lain, SDM yang berkarakter tidak dapat lepas dari pertumbuhan dari anak sampai menjadi pemuda serta dewasa. Oleh karena itu, perlindungan anak mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas pemuda sebagai sumber daya manusia.

4. Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung tujuan pertama SDGs/TPB di mana tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Sasarannya adalah pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 adalah sebesar 114.830 orang dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 142.610 orang. Persentase penduduk miskin pada tahun 2015 adalah sebesar 5,78% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 6,13%.

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (*poverty gap index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan tren peningkatan yaitu pada tahun 2018 adalah 0,59, pada tahun 2019 sebesar 0,90 dan pada September tahun 2020 mencapai 1,21. Pada dimensi Indeks Keparahan Kemiskinan, Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Indeks Keparahan Kemiskinan



adalah sebesar 0,23. Pada September tahun 2020, indeks ini mengalami peningkatan yang mencapai 0,42.

Tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mengurangi kemiskinan. Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut harus efektif dan efisien untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.

Penurunan tingkat kemiskinan dapat dimulai dari desa. Pengoptimalan lembaga desa yang pada tahun 2020 berjumlah 667 lembaga dan PKK yang berjumlah 501 diharapkan menimbulkan inovasi-inovasi baru dalam membangun desa. Adanya desa Makmur di Kepulauan Riau akan berimplikasi penurunan kemiskinan di wilayah tersebut. Pada sisi lain, pertumbuhan industri diharapkan menciptakan lapangan kerja baru sehingga berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran.

5. Kesehatan

Wabah pandemi COVID-19 telah melanda 213 negara di dunia sejak merebak pertama kali di Wuhan (China) pada akhir tahun 2019. Di Indonesia, sejak temuan penderita penyakit akibat COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020 hingga 16 Agustus 2021 telah terkonfirmasi 3.871.738 kasus positif COVID-19 dengan 3.381.884 kasus sembuh, dan 118.833 kasus meninggal yang tersebar pada 34 provinsi dan 387 kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu di Provinsi Kepulauan Riau, sejak temuan kasus pertama pada tanggal 16 Maret 2020, hingga 16 Agustus 2021 telah terkonfirmasi 50.049 kasus positif COVID-19 dengan 46.079 kasus sembuh, dan 1.466 kasus meninggal.

Peningkatan kasus COVID-19 dari hari ke hari harus diikuti dengan langkah-langkah untuk antisipasinya. Hal-hal tersebut terutama terkait ketersediaan sumber daya kesehatan dalam penanganan COVID-19 antara lain tenaga kesehatan, alat kesehatan, tempat tidur di rumah sakit, obat-obatan, tabung oksigen dan fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu, berdasarkan Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024, kondisi Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi luas bahaya pandemi COVID-19 sebesar 789.558,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Implikasinya, antisipasi penanganan COVID-19 meliputi sumber daya kesehatan dan cakupan layanan kesehatan.

Sumber daya kesehatan berupa sarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan rumah sakit berjumlah 31 unit, puskesmas berjumlah 87 unit, klinik kesehatan berjumlah 99 unit dan posyandu berjumlah 1.407 unit. Pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau



tersebut didukung oleh ketersediaan tenaga medis, yaitu dokter meliputi 647 orang dokter, 3.604 orang perawat, dan 1.775 orang bidan. Selanjutnya, jumlah rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 adalah sejumlah 4 rumah sakit dari seluruh sarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau. Rumah sakit rujukan tersebut terdiri 2 rumah sakit berada di Batam, 1 rumah sakit berada di Karimun dan 1 rumah sakit berada di Tanjung Pinang. Oleh karena itu, penambahan rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 harus dilaksanakan bagi daerah yang belum terdapat rumah sakit tersebut, antara lain di Bintan, Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas. Selain itu, diperlukan pengoptimalan dan penambahan penanganan COVID-19 meliputi antara lain ketersediaan tempat tidur, tenaga kesehatan, alat kesehatan dan pendukung lainnya.

Penanganan COVID-19 selaras untuk mendukung pencapaian SPM di bidang kesehatan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, terdapat dua jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diwajibkan bagi provinsi yaitu (1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan (2) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) provinsi. Pencapaian Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2020 menunjukkan capaian 100%. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya mengoptimalkan layanan kesehatan oleh di masa mendatang.

Upaya-upaya mengoptimalkan layanan kesehatan ditujukan untuk mengoptimalkan cakupan layanan kesehatan. Cakup layanan kesehatan antara lain layanan kesehatan untuk bayi, balita, ibu, gizi, serta dukungan fasilitas kesehatan, tenaga medis dan penanganan penyakit. Layanan kesehatan tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Dengan cakupan layanan kesehatan yang optimal diharapkan meningkatkan kualitas kesehatan yang ditunjukkan Usia Harapan Hidup. Indikator tersebut merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat. Usia Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 adalah 69,96 tahun. Nilai tersebut berada di bawah level nasional yaitu sebesar 71,47 tahun meskipun nilai Usia Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya.

Secara khusus, kualitas kesehatan pada anak dicerminkan pada prevalensi *stunting*. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya oleh gizi anak. Pemerintah telah menetapkan gizi menjadi salah satu tujuan utama dalam RPJMN 2015-2020, khususnya gizi ibu dan balita. Dalam rencana



pembangunan tersebut, pemerintah memonitor perkembangan kualitas gizi melalui dua indikator yaitu prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita dan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (baduta). Prevalensi *stunting* di Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan penurunan dalam 5 tahun terakhir dan yang pada tahun 2020 tercatat 7,2. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten untuk semakin meminimalkan prevalensi *stunting* di Provinsi Kepulauan Riau.

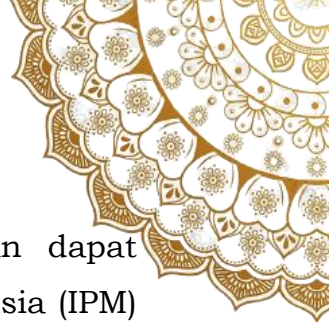
6. Disparitas antar wilayah

Disparitas atau ketimpangan wilayah merupakan hal yang menjadi perhatian dalam SDGs/TPB. Pada tujuan ke-10 dinyatakan salah satu tujuan SDGs/TPB adalah mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. Ketimpangan wilayah ini merupakan salah satu fokus pembangunan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Sasaran dalam tujuan TPB dalam hal ini antara lain meningkatnya PDRB, menurunnya koefisien gini dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Pada sisi PDRB, Kota Batam adalah wilayah dengan kontribusi PDRB tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 60,80 persen atau 120.945,74 milyar rupiah pada tahun 2015 dan meningkat 63,97 persen atau 161.364,18 milyar rupiah pada tahun 2020. Selanjutnya kontribusi terendah adalah Kabupaten Lingga yaitu pada tahun 2015 hanya sebesar 1,53 persen atau 3.043,43 milyar rupiah dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 1,70 persen atau 4.292,43 milyar rupiah.

Kondisi Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 berada dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu 0,334. Nilai ini selaras dan di bawah target RPJMN dalam SDGs/TPB yaitu sebesar 0,41. Jika melihat tren Indeks Gini untuk Kabupaten/Kota maka Kota Tanjungpinang memiliki indeks tertinggi di tahun 2020 sebesar 0,35 dan terendah berada di Kabupaten Lingga sebesar 0,28.

Berkaitan dengan tingkat kemiskinan, sebaran data penduduk miskin yang berada di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk miskin berada di Kota Batam yaitu 67,06 ribu jiwa dan Kota Tanjungpinang yaitu 19,98 ribu jiwa pada tahun 2020. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna memiliki jumlah penduduk miskin yang paling rendah dibandingkan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,80 ribu jiwa dan Kabupaten Natuna sebesar 3,47 ribu jiwa dengan total jumlah penduduk miskin sebesar 131,97 ribu jiwa di Provinsi Kepulauan Riau.



Dalam sektor pembangunan bidang sosial, ketimpangan dapat dicerminkan dari perbandingan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari masing-masing kabupaten/kota. Secara umum, dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2015-2020), IPM di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2015 nilai IPM adalah sebesar 73,75 dan pada tahun 2020 adalah sebesar 74,68. IPM untuk kabupaten/kota, Pada tahun 2020, nilai tertinggi terdapat di Kota Batam dan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada tahun 2015 nilai IPM Kota Batam adalah sebesar 79,34 dan pada tahun 2020 adalah sebesar 80,36. Pada tahun 2015 nilai IPM Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar 65,86 dan pada tahun 2020 adalah sebesar 66,84.

Pada sisi infrastruktur, ketimpangan wilayah dapat dicermati dari kondisi pembangunan infrastruktur ditiap kabupaten/kota. Kondisi geografis yang dihadapi oleh Kepri menjadikan sebuah tantangan bagaimana pembangunan infrastruktur dapat seimbang antar kabupaten/kotanya. Kebutuhan infrastruktur Jalan, Jembatan, Air Minum, drainase, sanitasi, perhubungan dan lainnya perlu menjadi perhatian oleh pemerintah agar karakteristik kepulauan dengan tujuan percepatan pembangunan dapat menjangkau diseluruh wilayah provinsi Kepulauan Riau.

7. Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur akan mendorong pembangunan kota, permukiman dan/atau wilayah yang lebih inklusif, nondiskriminatif, serta berkelanjutan. Secara umum, kawasan kumuh merupakan implikasi dari pembangunan. Penanganan kawasan kumuh setidaknya meliputi aspek air minum, pengelolaan sampah dan akses jalan. Sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum yang berupa pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota, Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai nilai 92,68% dari target SPM sebesar 100%. Pada sisi air baku, persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk telah meningkat dari tahun ke tahun dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 73,64%. Hal-hal tersebut memerlukan upaya untuk dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota sesuai SPM dan tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang lebih baik lagi.

Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan ekonomi, penduduk, urbanisasi, pencemaran air. Hal tersebut mengakibatkan



kebutuhan air Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Kabupaten/Kota yang cepat tumbuh dengan angka urbanisasi yang cukup tinggi, seperti Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan, serta Kabupaten Karimun memerlukan strategi tersendiri untuk pemenuhan kebutuhan airnya baik domestik (rumah tangga), perkotaan, maupun industri. Ketahanan air menjadi isu utama, karena tanpa ketersediaan air yang mencukupi maka pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah akan terganggu. Ketahanan air dikaitkan dengan target penyediaan air bersih, mengacu pada target ke-6 *Sustainable Development Goals* (SDG's) yaitu terpenuhinya kebutuhan air minum pada 2030.

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota merupakan hal vital. Hal ini sesuai dengan amanat SPM. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus menyediakan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota di masa mendatang. Penanganan sampah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2020. Jumlah sampah yang ditangani (ton) pada tahun 2020 sebesar 314.192,80 ton yang menurun dari tahun 2019 sebesar 359.838,29 ton. Secara persentase, sampah yang ditangani pada tahun 2020 sebesar 68% yang menurun dari tahun 2019 sebesar 76%. Penyediaan prasarana umum ini menjadi perhatian dalam penanganan kawasan kumuh dan pemukiman di masa mendatang.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan dengan kondisi baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Jalan yang berkondisi baik di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 adalah 660,7 km dan menurun pada tahun 2020 yaitu sepanjang 540,11 km. Selanjutnya, kondisi jalan dan jembatan yang baik akan berpengaruh terhadap konektivitas antar wilayah. Persentase jembatan berkondisi baik tahun 2020 dapat digambarkan panjang jembatan berkondisi baik yakni 3.621,12 m dibagi dengan panjang jembatan provinsi yakni 4.145.70 m dengan persentase 87.34%. Kondisi jembatan di Provinsi Kepulauan Riau telah meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi bagian untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km) di Provinsi Kepulauan Riau telah meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tingkat konektivitas antar wilayah strategis sebesar 25,96 km yang meningkat menjadi 32,34 km di tahun 2020.

Sebagai provinsi kepulauan yang sebagian wilayahnya adalah perairan, sektor perhubungan perlu menjadi perhatian. Ketersediaan



pelabuhan sebagai sarana transportasi utama sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran konektivitas transportasi antarsatu daerah ke daerah lainnya. Jumlah ketersediaan pelabuhan laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 adalah sebanyak 33 pelabuhan. Penambahan pelabuhan baru telah diusulkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Review Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dalam usulan tersebut terdapat 6 (enam) pelabuhan yang diusulkan.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur di Wilayah Perbatasan. Selain itu, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan kepulauan menyebabkan masih banyak daerah yang belum merasakan aliran listrik dari PLN. Banyak daerah-daerah terpencil di Provinsi Kepulauan Riau yang belum teraliri listrik. Penyebab utamanya dikarenakan infrastruktur ketenagalistrikan belum tersedia. Hal ini disebabkan rata-rata wilayah yang belum mendapat pasokan listrik merupakan wilayah pedesaan yang secara geografis berada di pulau-pulau yang sangat jauh dari perkotaan atau merupakan wilayah perbatasan. Kondisi Rasio Elektrifikasi (RE) pada tahun 2020 adalah 93,72 yang harus ditingkatkan di masa mendatang.

Selain daripada itu, didalam pembangunan infrastruktur perlu juga memperhatikan *Global Climate Change*. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi, maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis. Perubahan yang disebabkannya antara lain peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi,

8. Budaya Melayu dan Nasional

Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia (masyarakat) serta mampu membentuk suatu peradaban manusia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan khasanah budaya baik yang bersifat *tangible* (aset budaya yang kasat mata) maupun *intangible* (aset budaya yang tidak kasat mata). Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keberagaman kebudayaan Melayu di Kepulauan Riau merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.



Pada sisi lain, kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau yang terbuka dan membentang dari perairan di Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas hingga Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain akan berakibat rentannya pengaruh budaya asing terhadap kebudayaan Melayu di Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut ditambah dengan terbukanya akses teknologi seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang membuat berkurangnya batas-batas suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian budaya Melayu.

Pelestarian budaya Melayu di Kepulauan Riau tercermin pada Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK). Pada tahun 2019, Provinsi Kepulauan Riau mencapai skor 60.90 dan menduduki peringkat ke-6 secara nasional. Skor tersebut di atas skor IPK secara nasional yaitu sebesar 55.91. Pencapaian ini harus ditingkatkan di masa mendatang dengan diikuti upaya-upaya yang konsisten. Pada aspek Ekonomi Budaya, aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan harus didorong dengan keterlibatan penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan.

Pelestarian kebudayaan didukung dengan pendidikan budaya. Pendidikan budaya merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang Seni, Budaya, dan Bahasa khususnya budaya Melayu. Pencapaian pendidikan kebudayaan melibatkan unsur pendidikan yang ditunjukkan dengan Rata-rata Lama Sekolah 25 tahun ke atas, Harapan Lama Sekolah, Angka Kesiapan Sekolah, serta melibatkan peran guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya. Selain itu, budaya Melayu harus dapat dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat sesuai konteks ketahanan sosial budaya.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak warisan budaya. Hal ini memerlukan upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian obyek dan cagar budaya. Pelestarian ini meliputi warisan budaya *tangible* berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya serta warisan budaya *intangible*. Warisan budaya *intangible* termasuk penggunaan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu, partisipasi pelestarian warisan budaya Melayu ditunjukkan dengan masyarakat yang menonton secara langsung



pertunjukkan seni Melayu, mengunjungi peninggalan sejarah/warisan Melayu serta masyarakat yang menggunakan produk tradisional Melayu.

Ekspresi Budaya Melayu merupakan segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya Melayu yang dihasilkan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Melayu. Selanjutnya Budaya Literasi merupakan aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat. Budaya literasi ini harus dikembangkan pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

Budaya Melayu yang terpelihara dengan baik akan berimplikasi pada budaya secara nasional. Salah satunya adalah budaya menghargai dan menghormati orang lain. Hal ini termasuk dalam kehidupan beragama. Implikasinya adalah terwujudnya harmonisasi antar umat beragama dan antar masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

4.2.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 adalah **“Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional.”**

Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD, diharapkan Pandemi Covid-19 sudah tertangani dengan baik sehingga aktivitas ekonomi masyarakat sudah berjalan dengan normal kembali. Oleh karena itu, pada tahun kedua ini fokus pembangunan akan diarahkan pada akselerasi untuk meningkatkan ekonomi yang sudah pulih kembali. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun kedua ini yaitu peningkatan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi, jaminan pengembangan karir bagi ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi, percepatan pemerataan layanan kelistrikan untuk setiap wilayah, peningkatan penataan desa dan kerjasama desa, peningkatan upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, optimalisasi penerapatan *Free Trade Zone* secara menyeluruh, pengembangan *tourism linkage networking* antar kabupaten dan kota, pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa



pandemi), diversifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan daya saing UMKM, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan potensi PAD, kemudahan layanan perizinan dengan *one day service*, pemetaan potensi investasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan Industri, peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengembangkan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi, peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah, meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara *up to date* melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan *e-government* guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga



dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.

Dalam melaksanakan fokus pembangunan dan target pembangunan tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan **prioritas pembangunan** Provinsi Kepulauan Riau untuk RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.

b. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.

c. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.

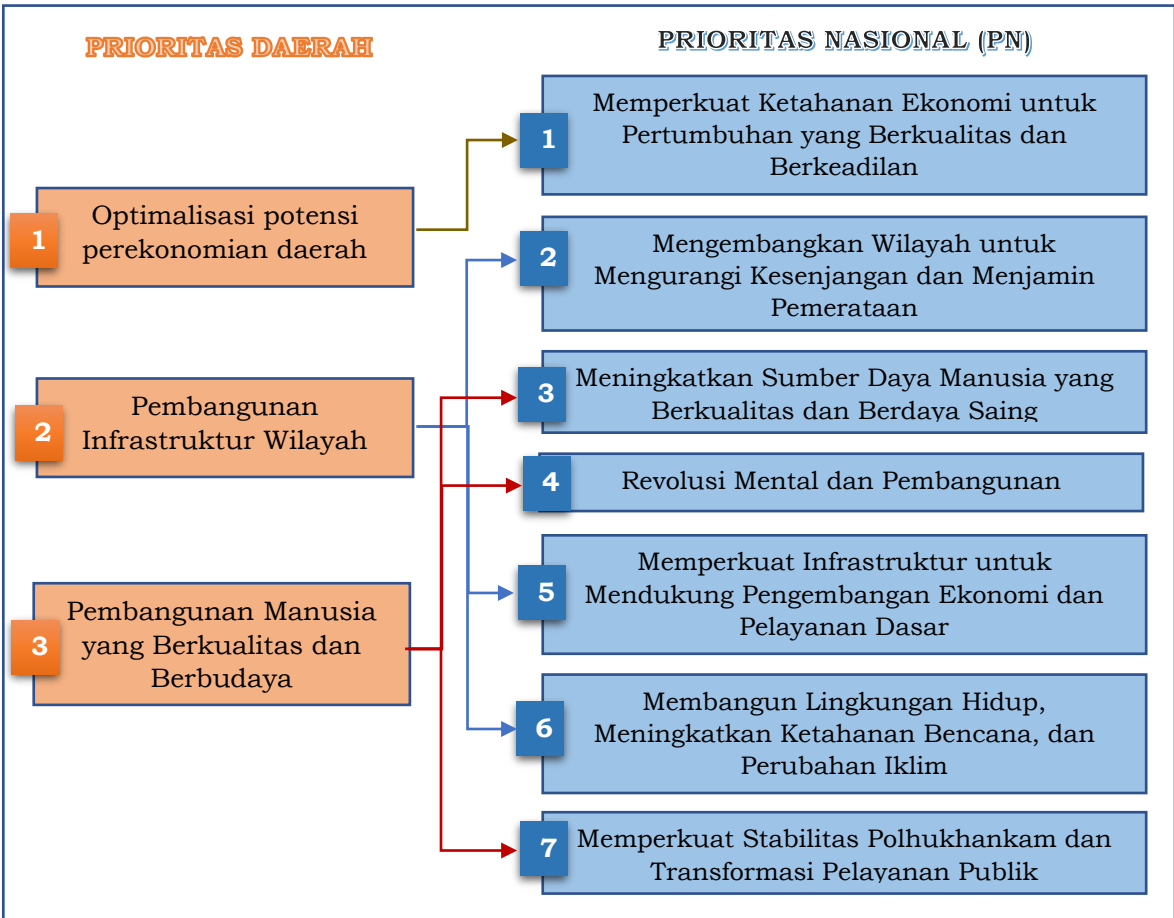
Ketiga prioritas pembangunan tersebut merupakan fokus pembangunan tahun 2023, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Keterkaitan antara sasaran pembangunan dengan prioritas pembangunan provinsi tahun 2023, dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Prioritas pembangunan Optimalisasi potensi perekonomian daerah** mendukung **sasaran pembangunan**: (S1) Optimalisasi Sektor Perikanan; (S2) Peningkatan Sektor Pariwisata; (S3) Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup; (S4) Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari; (S5) Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan; (S6) Peningkatan PAD; dan (S7) Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan).
- b. **Prioritas pembangunan Pembangunan Infrastruktur Wilayah** mendukung **sasaran pembangunan**: (S21) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar; dan (S22) Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir.
- c. **Prioritas pembangunan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya** mendukung **sasaran pembangunan**: (S8) Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi; (S9) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; (S10) Manajemen ASN yang Profesional; (S11) Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana; (S12) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; (S13) Menurunnya Angka Kemiskinan; (S14) Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif; (S15) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; (S16) Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan;



(S17) Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak; (S18) Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda; (S19) Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu; dan (S20) Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama.

Prioritas pembangunan daerah 2023 merupakan pelaksanaan tema pembangunan guna mewujudkan visi dan misi RPJMD secara bertahap. Penetapan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2023 juga disinergikan dengan prioritas nasional (PN) 2023 sebagaimana disajikan pada gambar di bawah.



Gambar 4.2
Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2023
Sumber: hasil analisis, 2022

4.2.4. Telaahan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan

Untuk menjamin sinergi program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Adapun arah kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah untuk RKPD Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022.

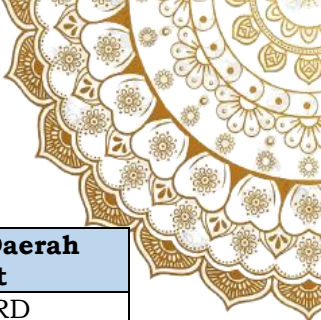


4.2.5. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

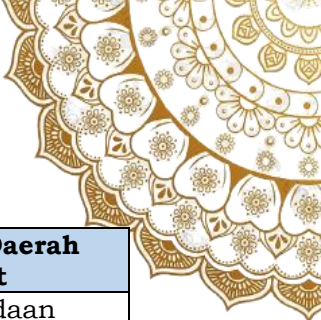
Dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran untuk perencanaan pembangunan tahun 2023. Pokok-pokok pikiran tersebut menjadi masukan bagi penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2023. Adapun pengelompokan permasalahan dan/atau usulan pokok-pokok pikiran DPRD disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Permasalahan/Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Pada RKPD Tahun 2023

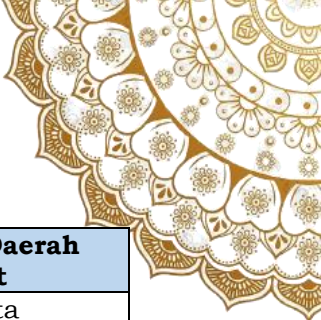
No.	Pengelompokan Permasalahan/Usulan	Urusan	Perangkat Daerah Terkait
1	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pemberdayaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Optimalisasi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
5	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keuangan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
6	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Pembinaan	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7	Permasalahan Pengelolaan Ketenagalistrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Permasalahan Pengelolaan Energi Terbarukan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Permasalahan terhadap Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Komunikasi dan Informatika



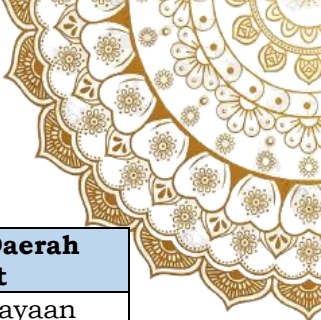
No.	Pengelompokan Permasalahan/Usulan	Urusan	Perangkat Daerah Terkait
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sekretariat DPRD
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perhubungan
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sekretariat Daerah
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
10	Optimalisasi pengembangan perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pendidikan
11	Permasalahan dalam pengembangan permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pendidikan
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perhubungan
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Permasalahan terkait kawasan permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Kesehatan
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pendidikan
13	Pelestarian Kesenian, Pembinaan Lembaga Adat dan Pengelolaan Kebudayaan	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
14	Pelestarian, Pengelolaan dan Perizinan Cagar Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
15	Pembinaan Kesenian	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
16	Optimalisasi dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
17	Optimalisasi dalam Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
18	Permasalahan dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
19	Permasalahan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
20	Permasalahan terkait Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan



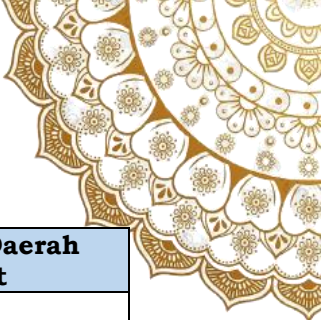
No.	Pengelompokan Permasalahan/Usulan	Urusan	Perangkat Daerah Terkait
21	Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
22	Pengembangan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
23	Pembinaan dan Peningkatan SDM Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
24	Pengelolaan Pelayanan, Pengembangan, Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
25	Pemberdayaan, Kemitraan dan Promosi Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
26	Permasalahan dalam Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
27	Permasalahan dalam Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
28	Permasalahan terhadap Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
29	Permasalahan dalam Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
30	Optimalisasi Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
31	Permasalahan terhadap Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
32	Optimalisasi dalam Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
33	Optimalisasi Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
34	Permasalahan Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
35	Permasalahan terkait Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
36	Permasalahan dalam Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
37	Permasalahan dalam upaya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
38	Permasalahan terhadap Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
39	Permasalahan terkait Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
40	Permasalahan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
41	Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	Dinas Pariwisata
42	Permasalahan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata



No.	Pengelompokan Permasalahan/Usulan	Urusan	Perangkat Daerah Terkait
43	Permasalahan terkait Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata
44	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
45	Permasalahan dalam penataan bangunan gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
46	Permasalahan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
47	Permasalahan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pendidikan
48	Pengelolaan Sarana Prasarana Spiritual, Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
49	Permasalahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
50	Permasalahan terhadap penataan bangunan dan lingkungannya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perhubungan
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
51	Permasalahan terkait penyelenggaraan jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
52	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
53	Fasilitasi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
54	Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
55	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
56	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
57	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No.	Pengelompokan Permasalahan/Usulan	Urusan	Perangkat Daerah Terkait
58	Penguatan dan Pengembangan Lembaga serta Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
59	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
60	Optimalisasi dalam upaya Promosi Penanaman Modal	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
61	Kurikulum Muatan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Pendidikan	Dinas Sosial
62	Pengelolaan Sarana Prasarana Spiritual, Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan
63	Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
64	Penilaian, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
65	Sarana Prasarana dan Dana Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
66	Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
67	Permasalahan dalam Pengelolaan Pelayaran	Perhubungan	Dinas Perhubungan
68	Permasalahan terhadap Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
69	Permasalahan dalam Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
70	Permasalahan terkait Pengendalian Izin Usaha Industri	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
71	Permasalahan dalam Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
72	Permasalahan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
73	Permasalahan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
74	Pelestarian Naskah, Pengembangan Koleksi Budaya	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
75	Pengelolaan Sarana Prasarana Spiritual, Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
76	Permasalahan dalam penanggulangan bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
77	Permasalahan dalam Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
78	Fasilitasi dan Bantuan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
79	Pemberdayaan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial



No.	Pengelompokan Permasalahan/Usulan	Urusan	Perangkat Daerah Terkait
80	Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
81	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Sosial	Dinas Sosial
82	Optimalisasi dalam Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
83	Optimalisasi dalam Pengawasan Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
84	Permasalahan terkait Perencanaan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
85	Permasalahan dalam penanggulangan bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Sosial
86	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur, Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembinaan Penyidik PNS	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
87	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
88	Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitas Keprotokolan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
89	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
90	Fasilitas Kerja Sama Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
91	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan, Pemeliharaan barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
92	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan SDM dan Lembaga Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
93	Layanan Administrasi DPRD, Administrasi Umum Prerangkat Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
94	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

Sumber: SIPD, 2022, diolah



BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Arah Kebijakan Indikator Sasaran Pembangunan

Pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat bersinergi dengan pembangunan provinsi. Target indikator makro pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 didukung oleh target kabupaten/kota. Penentuan target indikator tersebut mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan target yang akan dicapai dalam RPJMD masing-masing kabupaten/kota. Adapun target indikator makro pembangunan mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.1
Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)		Tingkat Kemiskinan (%)		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Kota Tanjungpinang	3.66	4.7	9.43	8.97	9,18	6,57
2	Kabupaten Bintan	3±3	4±2	6.25	6.24	8,81	7,94
3	Kota Batam	5.05	5.91	4.74	4.69	10,00	9,75
4	Kabupaten Karimun	3,00	3,00	6.00	5.50	8,00	7,60
5	Kabupaten Lingga	3.06	4.5	13,52	13,44	4,31	3,88
6	Kabupaten Natuna	0.47-2.27	3.22	4.16	4.04	3,82	2,99
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	3.73-4.73	3.85-4.85	6.15	6,00	3,46	3,13
	Provinsi Kepulauan Riau	4,8 - 5,6	4,9 – 5,8	6.01	5,74	10,1	7,76

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2016

Target sasaran pembangunan kabupaten/kota tahun 2023 sebagaimana dimuat pada tabel di atas ditetapkan dengan memperhatikan capaian dan target tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini diuraikan capaian dan target 3 (tiga) indikator sasaran pada tahun 2021 dan 2022 di masing-masing kabupaten/kota.



Tabel 5.2
Realisasi Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)		Tingkat Kemiskinan (%)		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Kota Tanjungpinang	-3.45	0,59	9,37	9,57	9,30	6,31
Kab. Bintan	-4.28	0,23	6,36	6,42	8,86	8,62
Kota Batam	-2.55	4,75	4,75	5,05	11,79	11,64
Kab. Karimun	-3.59	2,37	6,83	6,85	8,36	7,20
Kab. Lingga	-0.68	1,95	13,85	13,93	4,41	4,23
Kab. Natuna	-4.29	0,02	4,43	4,95	4,10	5,15
Kab. Kepulauan Anambas	-7.83	0,04	6,56	7,09	3,44	1,27
Provinsi Kepulauan Riau	-3,80	3,43	5,92	6,12	10,34	9,91

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022, diolah



Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga yakni mencapai 13,93 persen pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 13,85 persen. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Lingga masuk kedalam kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022 di tingkat nasional. Hal ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024.

Selain itu, masalah pengangguran di Kota Batam yang selama beberapa tahun terakhir berada diatas 10 persen menjadi isu yang penting. Berdasarkan data tahun 2021, TPT di Kota Batam mencapai 11,64 persen, yang berarti mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang terpadu.

Beberapa strategi yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2023 antara lain dengan strategi a. Meningkatkan kapasitas dan perlindungan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); b. Meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan sosial; c. Peningkatan kompetensi tenaga kerja; d. Perluasan kesempatan kerja; e. Pembinaan hubungan industrial; dan e. Perlindungan ketenagakerjaan.

5.2. Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten/Kota

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Prioritas (PP) Pembangunan Wilayah Sumatera, dalam Rancangan RKP Tahun 2023 ditetapkan kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sumatera. Upaya untuk pembangunan wilayah Sumatera yang berada pada Provinsi Kepulauan Riau akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KEK Nongsa, serta KEK Batam Aero Technic yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas kakao, karet, kelapa, kopi, lada, pala, serta perikanan budidaya. Pengembangan sektor unggulan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan calon induk unggul ikan air tawar, serta benih ikan air tawar, udang, ikan air payau dan ikan air laut yang akan diberikan kepada masyarakat;



3. Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di kota sedang Tanjungpinang;
4. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN Ranai; penanganan terhadap 36 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sumatera; revitalisasi 12 kawasan transmigrasi yang terdiri atas pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang pada tahun 2023 difokuskan pada KPPN Bintan; dan pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri;
5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-rata penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan pekerjaan umum) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota dan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota sebagaimana telah diarahkan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

a. Kota Tanjungpinang

1) Gambaran Umum Wilayah Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di sekitar permukiman pinggiran kota masih ada menjadi peluang untuk peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian hortikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota arah Kijang,



Senggarang dan pulau Dompak yang belum optimal, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan produktif di perkotaan.

Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin.

2) Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang

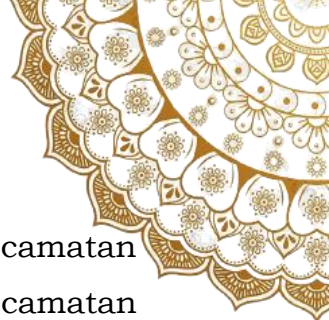
Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata Budaya Melayu dan industri halal.

b. Kabupaten Bintan

1) Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam, Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan.

Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan



tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang.

Pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut pada umumnya terdapat disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu dan ikan kakap mengalami permintaan yang terus meningkat baik untuk lokal maupun international. Hal ini mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus* spp), kakap (*Lutjanus* spp), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (*coastal fisheries*) dan perikanan lepas pantai (*offshore fisheries*) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km². Penangkapan ikan di areal penangkapan (*fishing ground*) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.

2) Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (*maintenance, repair, dan overhaul*) dan industri pengolahan makanan.

c. Kota Batam

1) Gambaran Umum Wilayah Kota Batam

Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan di Kota Batam. Lebih



dari 100 industri perkapalan beroperasi di Kota Batam yang tersebar di Tanjung Uncang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil.

Kota Batam merupakan 3 besar pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. Setiap tahun lebih kurang 1,9 juta wisatawan asing berkunjung ke Batam. Pulau-pulau kecil di wilayah Utara Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya seperti Pulau Lengkana, Pulau Air Asam, Pulau Air Manis, Pulau Leroy, Pulau Sekila (Kec. Belakang Padang), Pulau Puteri (Kec. Nongsa). Pulau-pulau kecil di wilayah Selatan Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya. Memiliki lokasi untuk Rekreasi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan Pulau Abang dan Pulau Petong.

2) Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Batam

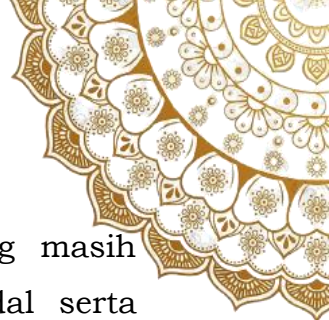
Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, Pariwisata, Industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, *international trade and finance center*.

d. Kabupaten Karimun

1) Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun.

Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil produk pertanian padi sawah, hortikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang (contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum berkembangnya budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten Karimun Pulau Moro dan



sekitarnya), serta skala produksi olahan perikanan yang masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal serta kontinuitas bahan produksi.

Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan.

2) Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun

Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan.

e. Kabupaten Lingga

1) Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumber daya air yang melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut antara lain untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga sangat besar untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan masih rendah.

Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lingga dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada peri-peri Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut.

Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut, dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata



berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan antara lain: Pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, Perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya. Potensi wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan Fasilitas rekreasi dan hiburan.

2) Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten

Lingga

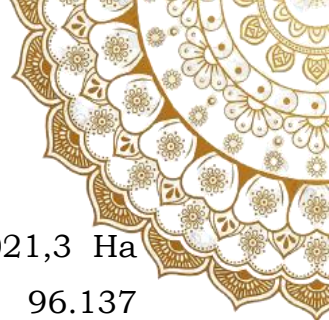
Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata.

f. Kabupaten Natuna

1) Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia dikelilingi Laut Cina Selatan merupakan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka-Singapura-Phillip) karena jalur pelayaran internasional ini berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Untuk menangkap dan menjawab permasalahan di jalur internasional terpadat pada Selat Malaka-Singapura-Filipina yang sempit, dangkal, berbelok-belok, ramai, dan terbatas, maka jalur pelayaran ALKI I-A di Laut Cina Selatan menjadi alternatif. Hal ini dikarenakan Laut Cina Selatan merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hingga gugus Pulau Bunguran yang dilewati kapal-kapal internasional.

Kabupaten Natuna sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Laut Cina Selatan memiliki potensi yang sangat strategis dan memiliki peluang bagi aktivitas pelayaran internasional, dimana Ranai menjadi lokasi Pengembangan Pemantapan Pelabuhan Nasional. Kabupaten Natuna mempunyai potensi yang sangat besar dalam sub sektor perikanan. Potensi ikan meliputi kerapu napoleon, kakap merah dan kerap turis dengan sentra produksi berada di Pulau Tiga. Potensi perikanan yang dimiliki sangat besar namun daya tangkap yang diperoleh masih rendah.



Budidaya ikan laut di Kabupaten Natuna seluas 6.021,3 Ha memiliki potensi produksi yang sangat sebesar yaitu 96.137 ton/tahun (ikan kerapu dan ikan bawal). Budidaya ikan air tawar yang dimiliki seluas 22 Ha juga memiliki potensi yang sangat besar yaitu 2.807 ton/tahun (ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan mujair dan ikan gurame). Budidaya ikan air payau seluas 507 Ha juga tidak kalah besar potensinya, yaitu 11.851 ton/tahun (udang vanname, udang windu, ikan bandeng dan ikan kakap putih). Sedangkan potensi rumput laut seluas 4000Ha ialah sebesar 920.881 ton/tahun.

Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Produk pertanian padi tadah hujan dan sawah terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Utara dan selasar Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha. Untuk hortikultura (durian, rambutan dan mangga) produksinya cukup tinggi, dengan produk olahan berupa lempok (dodol) yang sudah dipasarkan ke Batam. Untuk perkebunan, produk unggulan lokal yang dimiliki berupa cengkeh, kelapa, dan karet. Untuk cengkeh sudah dipasarkan ke Jawa Timur oleh penampung lokal, sedangkan karet sudah dipasarkan sampai Kalimantan. Produk unggulan yang ada yaitu tikar pandan yang terdapat di Kecamatan Serasan dengan pemasaran sampai ke luar negeri. Pemasaran rotan sudah sampai di Kota Batam. Potensi perkebunan lainnya adalah kembang semangkok yang terdapat di Gunung Ranai.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna antara lain Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiap, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu seduyung, dan Batu catur.

2) Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna

Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan serta wisata.

g. Kabupaten Kepulauan Anambas

1) Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan dan kelautan dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang bersifat



pulih, sehingga ketersediaan potensi perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perikanan tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan.

Kabupaten Kepulauan Anambas juga kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja; Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air Terjun Temurun Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja; Wisata bahari dan minat khusus seperti di Pulau Kelong. Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, Pulau Punjong, Pulau Bawah, Pulau Tukong, Pulau Semut, Pulau Berhala, Pulau Rengek, Pulau Langok, Pulau Tukong Berlayar, Pantai Melang, Pantai Kusik, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan Pulau Pahat.

2) Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata.



BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pelaksanaan pembangunan tahun 2023 didukung oleh berbagai program perangkat daerah yang dijabarkan ke kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2023 berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian dilakukan antara lain disebabkan: 1) perubahan perangkat daerah dan/atau SOTK setelah penetapan RPJMD dan Renstra PD; dan 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

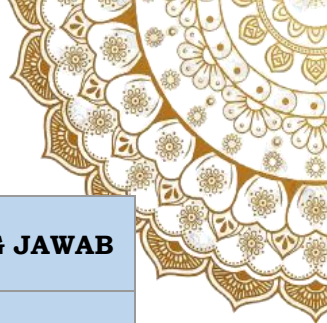
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam RKPD tahun 2023 direncanakan 309 program, 921 kegiatan dan 3416 sub kegiatan, sebagaimana dimuat dalam SIPD. Jumlah tersebut termasuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan oleh UPTD di beberapa perangkat daerah. Rekapitulasi jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 berdasarkan urusan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada tabel di bawah. Sementara itu, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023 secara rinci dimuat pada Lampiran yang dicetak dari SIPD.

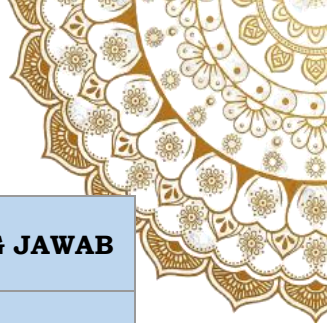


Tabel 6.1
Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pagu RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023
Berdasarkan Perangkat Daerah

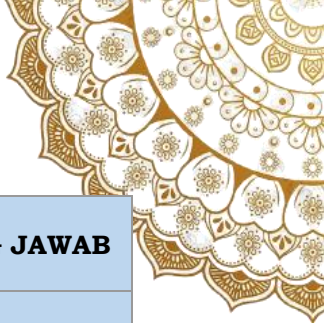
NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUBKEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5	16	188	904.985.873.080,00	Dinas Pendidikan
2		1	4	12	18.000.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	19	113	146.709.552.975,00	Dinas Kesehatan
4		3	16	67	132.594.896.983,00	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
5		3	14	38	96.580.105.936,00	Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	25	122	1.499.423.951.758,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	16	77	558.457.279.356,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	13	92	25.059.875.879,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
9		2	11	49	13.202.841.398,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	17	47	27.413.302.416,00	Dinas Sosial
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6	21	66	48.992.616.220,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
12		2	6	22	2.904.535.415,00	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
13		2	5	16	232.059.144,90	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun



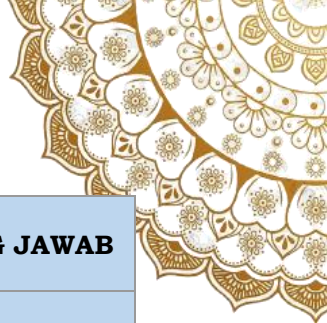
NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUBKEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14		2	5	16	630.712.000,00	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	21	58	21.823.244.471,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
16		3	8	21	1.225.374.500,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	15	52	26.951.984.925,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	1	2.350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	20	71	39.982.872.409,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20		2	4	13	649.500.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	6	8	2.701.041.035,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	11	41	37.240.106.417,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	6	15	1.600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	32	90	584.969.791.935,00	Dinas Perhubungan
25		2	2	2	402.100.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam
26		2	2	2	488.500.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun
27		2	2	2	963.000.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan



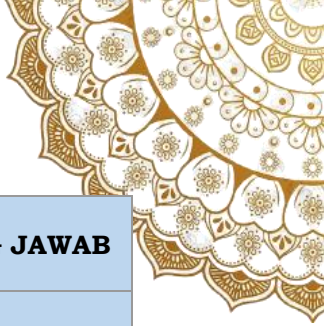
NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUBKEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28		2	2	2	540.500.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas
29		2	2	2	340.500.000,00	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	10	39	50.472.688.030,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	18	48	40.725.382.257,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	15	46	22.067.028.566,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	15	53	73.920.970.254,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	3	256.212.351,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	2	4	426.131.331,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6	16	61	29.381.011.920,00	Dinas Kebudayaan
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	14	47	21.595.173.507,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
38		1	5	13	320.000.000,00	UPT PERPUSTAKAAN
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	7	15	875.000.000,00	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	29	69	146.194.662.576,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
41		5	9	22	1.392.500.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
42		5	9	24	2.005.500.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA



NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUBKEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43		5	10	26	1.742.824.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
44		5	9	23	2.407.500.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
45		5	9	21	1.837.500.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
46		2	6	19	4,543,704,681,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
47		2	5	17	1.057.500.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
48		2	6	18	2.997.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
49	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	17	54	70.295.355.655,00	Dinas Pariwisata
50	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	19	60	35.714.269.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
51		3	8	28	1.948.442.009,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
52		4	7	27	3.341.668.879,00	UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN
53	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	4	11	54	2.300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
54		3	7	17	163.750.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
55		3	7	17	163.750.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
56		3	7	17	153.750.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
57		3	7	17	238.750.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
58		3	7	17	240.494.855,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
59		3	7	17	153.750.000,00	UPTD KPHL UNIT II BATAM
60	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4	15	42	40.102.501.575,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUBKEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6	14	25	19.372.967.695,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
62	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4	10	34	27.254.304.434,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
63	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3	3	5	355.035.091,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
64	SEKRETARIAT DAERAH	2	9	23	334.211.532.047,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
65		2	8	21	548.654.063,00	Biro Administrasi Perekonomian
66		2	9	30	2.834.418.578,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa
67		2	7	20	2.746.540.101,00	Biro Hukum
68		1	2	2	3.739.793.514,00	Sekretariat Daerah
69		2	9	31	2.412.253.341,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
70		4	12	35	4.223.842.542,00	Biro Perekonomian dan Pembangunan
71		2	8	23	2.822.737.061,00	Biro Organisasi
72		1	8	30	25.987.517.649,00	Biro Administrasi Pimpinan
73		1	11	48	179.569.182.941,00	Biro Umum
74	SEKRETARIAT DPRD	2	14	54	161.198.334.848,00	Sekretariat DPRD
75	PERENCANAAN	3	15	96	44.084.457.875,95	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
76	KEUANGAN	3	15	139	760.159.051.760,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
77		2	5	14	2.144.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
78		2	5	13	850.999.999,00	UPT DANA BERGULIR
79		3	14	52	116.621.380.211,00	Badan Pendapatan Daerah
80		2	5	18	3.938.700.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
81		2	5	19	2.036.500.000,00	UPT PPD Tanjungpinang
82		2	5	19	1.404.900.000,00	UPT PPD BINTAN
83		2	5	19	1.899.400.000,00	UPT PPD KARIMUN
84		2	5	19	1.448.400.000,00	UPT PPD LINGGA



NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUBKEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
85		2	5	19	1.507.400.000,00	UPT PPD NATUNA
86		2	5	19	910.006.000,00	UPT PPD ANAMBAS
87		2	5	19	1.540.600.000,00	UPT PPD BATU AJI
88		2	5	19	1.008.300.000,00	UPT PPD KIJANG
89		2	5	19	921.400.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
90	KEPEGAWAIAN	2	12	80	20.044.694.331,00	Badan Kepegawaian dan Korpri
91	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	11	84	21.695.379.849,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
92	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	4	44	1.800.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
93	PENGELOLAAN PERBATASAN	2	10	29	15.686.810.804,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
94	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	2	8	22	10.553.854.552,00	Badan Penghubung Daerah
95	INSPEKTORAT DAERAH	3	12	45	35.101.098.909,00	Inspektorat
96	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	47	34.545.205.147,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH		197	653	2670	6.603.630.553.045	

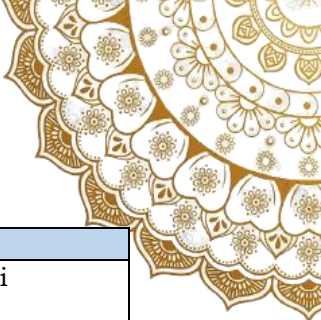
Sumber: Form 2 Fasilitasi RKPD Tahun 2023, SIPD, 2022



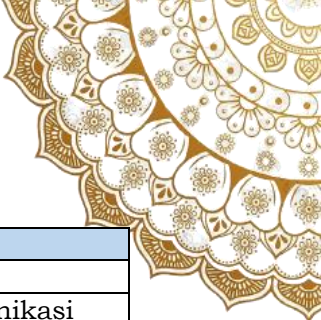
Program perangkat daerah dalam RKPD Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung 3 (tiga) prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Dukungan program perangkat daerah untuk masing-masing prioritas daerah tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 6.2
Program RKPD yang Mendukung Prioritas Daerah Tahun 2023

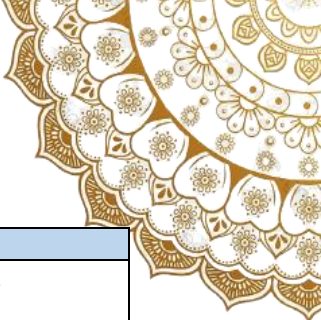
No.	Prioritas Daerah	Program Tahun 2023
1	Optimalisasi potensi perekonomian daerah	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Pemberdayaan UMKM 3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 5. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 7. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 11. Program Pengembangan Ekspor 12. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 13. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 14. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 15. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 16. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 18. Program Pelayanan Penanaman Modal 19. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 20. Program Promosi Penanaman Modal 21. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 22. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 23. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 24. Program Perekonomian dan Pembangunan 25. Program Pengelolaan Pelayaran 26. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 27. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 28. Program Penyuluhan Pertanian 29. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 30. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 31. Program Penanganan Kerawanan Pangan 32. Program Pengawasan Keamanan Pangan 33. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 34. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 35. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 36. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 37. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 38. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 39. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 40. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 41. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 42. Program Pemasaran Pariwisata



No.	Prioritas Daerah	Program Tahun 2023
		43. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 44. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 45. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 46. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan 3. Program Kawasan Permukiman 4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Program Pengembangan Perumahan 6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 9. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 11. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 13. Program Penataan Bangunan Gedung 14. Program Pengembangan Permukiman 15. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 16. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 17. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 18. Program Penyelenggaraan Jalan 19. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 20. Program Pengembangan Jasa Konstruksi. 21. Program Pengembangan UMKM 22. Program Pemberdayaan UMKM 23. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 24. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 25. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 26. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 27. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 28. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 29. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 30. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 31. Program Pengembangan Ekspor 32. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 33. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 34. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 35. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 36. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 37. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 38. Program Pelayanan Penanaman Modal 39. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 40. Program Promosi Penanaman Modal 41. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 42. Program Penanggulangan Bencana 43. Program Penanganan Bencana



No.	Prioritas Daerah	Program Tahun 2023
3	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 5. Program Pendaftaran Penduduk 6. Program Pencatatan Sipil 7. Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 9. Program Penataan Organisasi 10. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 11. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 12. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 13. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 14. Program Pengelolaan Perbatasan 15. Program Pelayanan Penghubung 16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 17. Program Pengelolaan Arsip 18. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 19. Program Perizinan Penggunaan Arsip 20. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 21. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 22. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 23. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 24. Program Kepegawaian Daerah 25. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 26. Program Pengelolaan Pendidikan 27. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 28. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 29. Program Pemasaran Pariwisata 30. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 31. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 32. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI 33. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 34. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 35. Program Perlindungan Perempuan 36. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 37. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 38. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 39. Program Perlindungan Khusus Anak 40. Program Pengendalian Penduduk 41. Program Pembinaan Keluarga Berencana 42. Program Pemberdayaan Sosial 43. Program Rehabilitasi Sosial 44. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 45. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 46. Program Penempatan Tenaga Kerja 47. Program Hubungan Industrial 48. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 49. Program Perencanaan Tenaga kerja 50. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 51. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 52. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 53. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 54. Program Kesejahteraan Rakyat



No.	Prioritas Daerah	Program Tahun 2023
		55. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 56. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 57. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 58. Program Pengelolaan Permuseuman 59. Program Pengembangan Kebudayaan 60. Program Pembinaan Sejarah 61. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 62. Program Pembinaan Perpustakaan 63. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Sumber: hasil analisis, 2022

6.2. Sinergi Program RKPD Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023

Dalam rangka efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui RKPD. Bentuk sinergi perencanaan untuk pembangunan tahun 2023 antara pusat dan daerah dilakukan melalui berbagai media antara lain rapat koordinasi gubernur, rapat koordinasi teknis, dan desk musrenbangnas.

Untuk perencanaan tahun 2023, Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan beberapa kegiatan ke Pemerintah. Jumlah seluruh usulan daerah adalah 28 usulan, baik yang berupa prioritas nasional (*Major Project*), bukan prioritas nasional, dan *Major Project*. Usulan pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau yang diakomodir sebanyak 11 dari 28 yang diusulkan. Ringkasan rekapitulasi keseluruhan usulan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional tahun 2023 yang dibahas dalam desk Musrenbangnas Tahun 2022 untuk Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nasional tahun 2023 disajikan pada Tabel 6.3. Sementara itu hasil kesepakatan terhadap daftar usulan daerah yang dibahas dalam Musrenbangnas 2022 untuk Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki status diakomodir disajikan pada Tabel 6.4.



Tabel 6.3
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Desk Musrenbangnas Tahun 2022 untuk Pembangunan Tahun 2023
Provinsi Kepulauan Riau

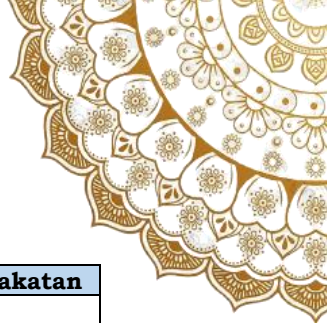
No	Kriteria Kesepakatan Terhadap Usulan	Usulan Daerah							Total Usulan Berdasarkan Jenis Kesepakatan
		Prioritas Nasional (Bukan MP)			Major Project (MP)			Bukan PN	
		Rakorgub	Rakortek	Rakorgub & Rakortek	Rakorgub	Rakortek	Rakorgub & Rakortek		
1.	Diakomodir	0	4	0	3	2	2	0	11
2.	Ditolak	0	1	0	5	2	0	0	8
3.	Tidak dibahas	0	3	0	0	6	0	0	9
Total Usulan Daerah		0	8	0	8	10	2	0	28

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Riau

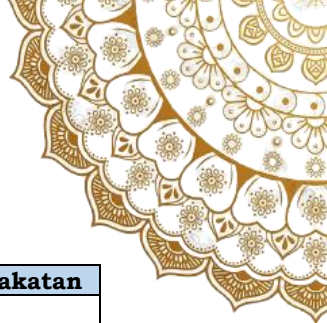


Tabel 6.4
Hasil Kesepakatan Terhadap Daftar Usulan Daerah Yang Dibahas Dalam Musrenbangnas 2022
Provinsi Kepulauan Riau

No.	Usulan	Volume Usulan	Volume Kesepakatan	Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
1.	Jembatan Batam – Bintan	1	1	Paket	2102 - Kab. Bintan, 2171 - Kota Batam	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir
	Prioritas Nasional	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
	Program Prioritas	02 - Infrastruktur Ekonomi					
	Kegiatan Prioritas	01 - Konektivitas Jalan					
	Proyek Prioritas	01 - Pembangunan Jalan Strategis					
	Major Project	08 - Pembangunan Wilayah Batam-Bintan					
	Program	GA - Program Infrastruktur Konektivitas					
	Kegiatan	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional					
	KRO	RBF - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)					
	RO	002 - Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)					
	Jenis Status	Rakorgub & Rakortek					
	Kesiapan Daerah	1. Dokumen DED; 2. Dokumen Amdal; 3. Dokumen Pengadaaan Tanah; 4. Dokumen Andalalin; 5. Dokumen Penyelidikan Tanah (SBP/Batam - Tj. Sauh).					
	Kegiatan Daerah (APBD)						
	Catatan Kesepakatan	Kesepakatan: Diakomodir dengan memperhatikan keuangan negara dan readiness criteria (lahan). PUPR Kepri: 1) PUPR bertugas untuk membebaskan lahan. Semua lahan sudah dibebaskan, termasuk di kawasan hutan sudah dialih fungsi. Untuk ganti rugi sudah ditipkan ke pengadilan sisa dari 11,54 Ha. Dit. Transportasi Bappenas: 1) Untuk pembangunan jembatan batam bintan, saat ini telah diusulkan dalam Green Book 2022. Namun masih menunggu kesiapan readiness criteria, ada terkendala DED. 2) Pemprov sudah menyelesaikan 8 titik untuk penyelesaian soil investigation seperti yang disyaratkan oleh Lender (AIIB). Syaratnya 24 titik harus diselesaikan. 3) Terkait lahan, yang berada di Pulau Batam masih terkendala pengalihan aset dari BP Batam ke PUPR. Perlu konfirmasi progress pelaksanaannya. Kemen PUPR-BM: 1) Sedang dilakukan kajian oleh DJPI PUPR untuk porsi KPBU. 2) Per Maret 2022 masih ada serah terima aset di Pulau Batam yang perlu diperjelas lagi untuk penyerahan lahan untuk mempercepat penyelesaian readiness criteria. 3) Sudah dialokasikan di 2023 untuk cantolan pelaksanaan loan-nya. 4) Kegiatan fisik akan merefer ke penyelesaian readiness criteria (lahan di Pulau Batam, kajian KPBU termasuk desain). Akan dilihat perkembangannya di akhir tahun 2022. 5) Informasi lahan agar disampaikan ke DJPI PUPR. 6) Terkait proses serah terima aset di Batam sedang berproses. Kemen PUPR sudah menindaklanjuti. 7) Selain lahan di Batam, terdapat catatan di lahan Tanjung Sauh milik investor. Diharapkan Pemprov berkoordinasi dengan investor/pengelola kawasan Tanjung Sauh. 8) Skema pembiayaan KPBU dan loan. Masih proses pengkajian di DJPI untuk proporsi. 9) Pihak DJPI akan mengkonfirmasi terkait penyelesaian 16 titik soil investigation untuk porsi loan dan KPBU. Bappeda: 1) Informasi dari Dinas PUPR lahan sudah clear 100%. 2) Sudah ada kesepakatan dengan pihak BP Batam untuk menuntaskan syarat administratif untuk lahan di Batam. 3) Untuk lahan Tanjung Sauh, proses pelepasan konsorsium ke Pemprov Kepri sudah dilaksanakan. 4) Soil investigation 16 titik agar dilakukan oleh Kemen PUPR.					
2.	Pembangunan Jalan Lintas Barat Lanjutan	1	1	Paket	2102 - Kab. Bintan	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir
	Prioritas Nasional	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
	Program Prioritas	02 - Infrastruktur Ekonomi					



No.	Usulan	Volume Usulan	Volume Kesepakatan	Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
	Kegiatan Prioritas	01 - Konektivitas Jalan					
	Proyek Prioritas	01 - Pembangunan Jalan Strategis					
	Major Project	08 - Pembangunan Wilayah Batam-Bintan					
	Program	GA - Program Infrastruktur Konektivitas					
	Kegiatan	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional					
	KRO	RBC - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)					
	RO	003 - Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)					
	Jenis Status	Rakorgub					
	Kesiapan Daerah	1. FS Tahun 2016 (Dinas PU Kabupaten Bintan) 2. DED Tahun 2007 (Telah direview oleh Dinas PU Kab. Bintan tahun 2015) 3. Dokumen Lingkungan Tahun 2009 (Disusun oleh Dinas PU Kab. Bintan) 4. Lahan telah tersedia Tahun 2017 (Pengadaan oleh Dinas PU Kab. Bintan)					
	Kegiatan Daerah (APBD)						
	Catatan Kesepakatan	Kesepakatan: Diakomodir, dengan catatan diprioritaskan pada 2 titik blackspot yang rawan kecelakaan. Readiness criteria disiapkan dan disampaikan kepada PUPR. PUPR Kepri: 1) Readiness criteria sudah clear, yaitu lahan, DED. 2) Yang dimaksud adalah jalur kedua yang menghubungkan Ubang - Tanjungpinang - Kijang. Penambahan jalur disamping jalan eksisting. Merupakan peningkatan kapasitas dari jalan yang sudah ada. Sebagai antisipasi pembangunan Jembatan Babin, Lagoi, KEK Galang Batang, pariwisata di daerah Trikora, KI Lobam. 3) Tantangan terhadap kondisi eksisting yang ada, perlu menyediakan jalan yang aman dan nyaman karena Bintan merupakan kawasan industri dan pariwisata. Perlu dimulai jalur keduanya. KEK dan pariwisata sudah mulai berjalan. Perlu menyediakan infrastruktur jalan yang nyaman bagi wisatawan. 4) Ada 2 titik blankspot yang difokuskan untuk penanganan lebih cepat. akan ditindaklanjuti terhadap segmen-segmen tersebut. DED sudah siap dan akan disampaikan. Dit. Transportasi Bappenas: 1) Status jalan sudah menjadi jalan nasional. Saat ini untuk penanganan, menunggu pembangunan jembatan batam bintan. Bisa dipercepat dengan melibatkan penugasan dari Menteri PUPR (diskresi). 2) Mohon konfirmasi pemprov, untuk lintas barat apakah terkait ke Simpang Gesek arah Tanjung Uban? Jika dilihat dari kondisi, dari sisi standar, lebarnya belum mencapai standar. Di satu sisi VCR masih relatif rendah. Akan jadi prioritas seiring perkembangan. Ke depannya akan dikawal untuk menuju standar. 3) Alokasi PUPR sangat terbatas, akan menyusun skala prioritas dengan mendahulukan kegiatan preservasi. Kemen PUPR-BM: 1) Butuh konfirmasi ruas. Tanjung Uban-Tanjung Pinang sudah eksisting. 2) Untuk peningkatan kapasitas, akan disesuaikan dengan pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Berdasarkan kajian analisis, jalan eksisting masih bisa menampung. Ke depannya setelah Jembatan terbangun, kapasitas jalan akan ditingkatkan. 3) Status sudah jalan nasional. 4) LHR eksisting masih tertampung. 5) Kebijakan Menteri PUPR yaitu OPOR, penanganan jalan yang prioritas akan didahulukan. Contoh di Pulau Natuna perbatasan. 6) Jika ada segmen tertentu yang menjadi blackspot, pemprov agar koordinasi dengan balai untuk menjadi prioritas. Bappeda: 1) Bentuk komitmen pemda, sudah ada pembebasan lahan.					
3.	Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum Regional Pulau Bintan (SPAM Regional Pulau Bintan)	1	1	Paket	2102 - Kab. Bintan	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir
	Prioritas Nasional	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
	Program Prioritas	01 - Infrastruktur Pelayanan Dasar					
	Kegiatan Prioritas	02 - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman					
	Proyek Prioritas	01 - Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman					
	Major Project	08 - Pembangunan Wilayah Batam-Bintan					



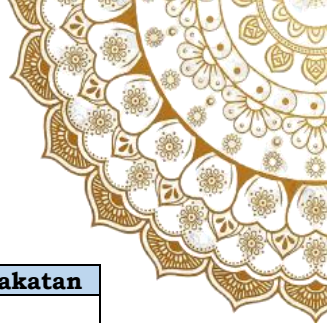
No.	Usulan	Volume Usulan	Volume Kesepakatan	Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
	Program	IA - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	Kegiatan	4973 - Penyelenggaraan Air Minum yang Layak					
	KRO	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman					
	RO	003 - Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota					
	Jenis Status	Rakorgub					
	Kesiapan Daerah	1. FS Tahun 2021 (Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Riau) 2. DED Tahun 2019 (Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Riau) 3. Lahan telah tersedia Tahun 2018 (Sertifikat Hak Milik Pemprov Kepri) 4. MOU pembangunan jaringan distribusi dan SR dengan Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan Tahun 2022.					
	Kegiatan Daerah (APBD)						
	Catatan Kesepakatan	Kesepakatan: Diakomodir, dengan memperhatikan kesiapan readiness criteria, terutama PKS dan daftar tunggu pelanggan, serta memperhatikan kemampuan keuangan negara. PUPR Kepri: 1) Kondisi pulau Bintan, masalah air belum tuntas. Untuk mengatasinya, ada beberapa waduk ingin disambungkan untuk bisa dimanfaatkan optimal pada daerah-daerah krisis air. 2) Readiness criteria sudah dipenuhi, termasuk AMDAL (sedang berjalan). Lahan sudah clear dan hak milik provinsi. 3) Pemprov dan Pemkab Bintan dan Pemkot Tanjungpinang sudah menandatangani MoU sharing pendanaan. Selanjutnya akan menyepakati MoU 5 pihak yang melibatkan Kemen PUPR. 4) Daftar antrian pelanggan akan disampaikan dalam waktu dekat. 5) MoU antar Pemda Prov/Kab/Kota sudah ada. Dalam waktu dekat akan membahas PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan melibatkan 5 pihak (pemda, balai, pusat) Bappeda: 1) PKS dan daftar antrian pelanggan akan disiapkan. Gubernur sudah berkoordinasi dengan Walikota Tanjungpinang dan Bupati Bintan. Dit. Perkim Bappenas: 1) Sudah pernah melakukan pembahasan. Salah satu prioritas yang diperlukan adalah daftar antrian pelanggan (real demand survey). Diperlukan untuk penyerapan air curah. 2) Perlu pendampingan Kemen PUPR dan Bappenas. Sepakat menjadi prioritas namun akan melihat kembali readiness criterianya. Kemen PUPR-CK: 1) Kesiapan RC sudah cukup, namun yang masih menjadi permasalahan adalah MoU antar kota/kab dan pembagian tarif. 2) Diskresi Menteri PUPR, tidak ada pembangunan baru (MYC).					
4.	Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Batam-Bintan	5	2	Paket	2102 - Kab. Bintan, 2171 - Kota Batam	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir
	Prioritas Nasional	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
	Program Prioritas	01 - Infrastruktur Pelayanan Dasar					
	Kegiatan Prioritas	05 - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur					
	Proyek Prioritas	02 - Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Ketahanan Bencana					
	Major Project	08 - Pembangunan Wilayah Batam-Bintan					
	Program	FC - Program Ketahanan Sumber Daya Air					
	Kegiatan	5037 - Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai					
	KRO	RBH - Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana					
	RO	014 - Pengendalian banjir Kota Tanjung Pinang yang dibangun					
	Jenis Status	Rakorgub & Rakortek					
	Kesiapan Daerah	Dokumen DED, Album Gambar, RAB, Dokumen Teknis					
	Kegiatan Daerah (APBD)	1.03.02.2.01.10 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing - (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan) 1.03.02.2.01.46 - Normalisasi/Restorasi Sungai - (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)					



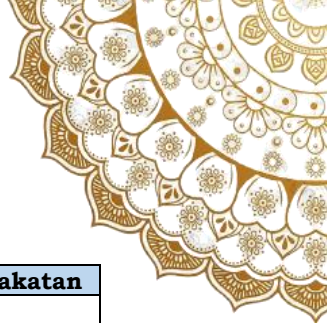
No.	Usulan	Volume Usulan	Volume Kesepakatan	Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
	Catatan Kesepakatan	Kesepakatan: Diakomodir pada 2 lokasi yaitu Kampung Pisang dan Kuala Lumpur di Kab. Bintan, dan Desa Pulau Pinang, dengan memperhatikan readiness criteria terutama dokumen lingkungan yang harus diserahkan sebelum Kuartal IV 2022. PUPR Kepri: 1) Ada beberapa lokasi yang harus ditangani, yaitu Pulau Bintan, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Semua lokasi yang diusulkan sudah memiliki DED. Readiness criteria sudah lengkap. 2) Beberapa lokasi di Kab Bintan (Kampung Pisang) dan Kota Tanjungpinang (Kampung Kolam), Kota Batam (Kawasan Tanjung Sengkuang, Batam Center). 3) Untuk di Pulau Pinang sudah ada DED. Termasuk prioritas karena ada banjir rob. Namun lokasi di Kampung Kolam, Kuala Lumpur, Kawasan Melcem dan Duta Plamo juga penting. 4) Pembebasan lahan di Kampung Kolam akan diakomodir dalam anggaran perubahan. DIPI Bappenas: 1) Perlu konfirmasi PUPR apakah sudah masuk konreg dan masuk prioritas. SDA PUPR: 1) Sudah menjadi prioritas PUPR dan masuk MP Babin. 2) Sudah dibahas di konreg dan disepakati untuk pembangunan dinding pengaman pantai Desa Pulau Pinang, Kabupaten Bintan. Masih ada catatan jika Dokling bisa dipenuhi di 2022, dapat diakomodir. 3) Dalam pembahasan konreg, Kampung Pisang dan Kuala Lumpur memang sudah siap DED, tinggal menunggu dokling. Namun untuk Melcem dll, disampaikan bahwa ada lahan yang belum siap. Dokling agar disampaikan sebelum kuartal IV 2022. 4) Untuk Kampung Kolam, dalam konreg disampaikan bahwa lahan belum siap.					
5.	Pembangunan Pelabuhan Samudera Teluk Buton Natuna	1	1	Paket	2103 - Kab. Natuna	022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Diakomodir
	Prioritas Nasional	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
	Program Prioritas	02 - Infrastruktur Ekonomi					
	Kegiatan Prioritas	05 - Konektivitas Darat					
	Proyek Prioritas	01 - Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru					
	Major Project	22 - Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu					
	Program	GA - Program Infrastruktur Konektivitas					
	Kegiatan	4637 - Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat					
	KRO	RBP - Prasarana Bidang Konektivitas Darat					
	RO	022 - Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)					
	Jenis Status	Rakorgub					
	Kesiapan Daerah	1. Survey Investigation Design (SID) Tahun 2012 2. Lahan tersedia seluas 1,7 Ha					
	Kegiatan Daerah (APBD)						
	Catatan Kesepakatan	Kesepakatan: Diakomodir dengan catatan penyiapan reviu FS, dokumen lingkungan, dokumen RIP, DED/SID, dan ketersediaan jalan akses selesai semua di bulan Agustus 2022. Jika tidak terpenuhi, diskresi diberikan kepada Dit. Transportasi Bappenas di dalam TM dengan Kemenhub. Dishub Kepri: 1) Dalam rangka mendukung pengembangan industri migas di Natuna, dan untuk kepentingan masyarakat natuna 2) Sudah pra FS oleh Pemda Natuna dan Kemenhub di 2012 dan 2016. Sudah FS 2021. Tahun 2022 sudah terkontrak dengan UGM untuk penyusunan DED, masterplan, dan analisis dampak lingkungan. Lahan sudah tersedia dan diserahkan. Pembahasan FS sudah beberapa kali dibahas dengan Kemenhub. 3) rencana lokasi pelabuhan sudah ada dalam RIPN. FS ini merupakan dokumen yang dijadikan dasar penetapan lokasi. 9 catatan sudah ditindaklanjuti langsung, akan diselesaikan di Semester I 2022. 4) Gubernur sudah menyerahkan lahan secara simbolis ke Menhub untuk area darat seluas 1,7 Ha. 5) Desember 2021 sudah bersurat permintaan perubahan hierarki pelabuhan dalam RIPN. Amdal dilakukan 2022 dengan UGM dan ditargetkan selesai Agustus 2022. Dit. Transportasi Bappenas: 1) Perlu dipastikan: (i) kewenangan pelabuhan milik siapa, (ii) apakah sudah masuk ke RIPN, (iii) aspek strategis, menangani wilayah apa saja, (iv) readiness criteria, DED 2022 perlu dipastikan selesai atau tidak, kemudian lahan apakah milih kabupaten atau provinsi, jalan akses perlu dipastikan, penlok, RIP bagaimana? sumber pendanaannya bagaimana? 2) Proses penyiapan agar diteruskan. Jika sampai PAA semua RC sudah siap, akan dikawal. Kemenhub: 1) Hal yang akan menjadi pertimbangan: - Readiness criteria. 4 April sudah mengundang daerah untuk membahas FS. dari hasil rapat, ada 9					



No.	Usulan	Volume Usulan	Volume Kesepakatan	Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		catatan yang masih menjadi PR. catatan sudah dituangkan dalam surat Dit. Kepelabuhanan pada tanggal 11 april. 9 catatan tersebut: (i) data kuantitatif; (ii) pelabuhan eksisting yang beroperasi di sekitar lokasi pelabuhan; (iii) analisa dasar pemilihan alternatif lokasi; (iv) ada asumsi teknis yang dilakukan pada rencana lokasi; (v) lokasi lahan; (vi) rencana alternatif lokasi belum ada; (vii) fungsi pelabuhan belum disampaikan; (viii) ; (ix) ada temuan-temuan yang belum mampu dijelaskan dalam FS. - Terkait RIPN. Tahapan sebelum RIPN, perlu fix dulu FSnya baru masuk RIPN. Baru kesiapan dokling, DED. 2) Sudah tercantum di RIPN tapi merupakan pelabuhan rencana. prosesnya masih panjang. perlu mencermati terkait UU 23/2014 bahwa pengumpan regional merupakan kewenangan pemprov. Kita harus memperhatikan rencana P3D untuk menyerahkan kewenagan ini pada pemprov. Sehingga belum bisa dilaksanakan di tahun 2023. 3) Perlu memperhatikan RC terutama mengenai 9 poin perbaikan teknis harus dibahas kembali di direktorat teknis. Penlok didasari pada FS yang sudah standar juknis Dit. Kepelabuhanan. RIP perlu ditetapkan oleh Gubernur. DED dan pembangunan tidak dalam 1 tahun. Perlu memperhatikan tahapan-tahapan ini. Bappeda: 1) Agustus/Sept 2021 rapat menkomarves dengan 7 menteri termasuk Menhub, usulan ini sudah disampaikan oleh Gubernur. Sebagai tindak lanjut, anggaran perubahan 2021 sudah dimasukkan FS sehubungan persetujuan Menko Marves dan Menhub dalam pertemuan tersebut. 2) Pelabuhan ini juga berkaitan dengan pertahanan dan keamanan di kawasan Natuna.					
6.	Penyediaan Air Baku DAS Kawal Tahap 2 (Pipa Transmisi)	22.7	22.7	Km	2102 - Kab. Bintan	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir
	Prioritas Nasional	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
	Program Prioritas	01 - Infrastruktur Pelayanan Dasar					
	Kegiatan Prioritas	03 - Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan					
	Proyek Prioritas	01 - Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah					
	Major Project	08 - Pembangunan Wilayah Batam-Bintan					
	Program	FC - Program Ketahanan Sumber Daya Air					
	Kegiatan	5040 - Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku					
	KRO	RBG - Prasarana Bidang SDA dan Irigasi					
	RO	005 - Embung Air Baku DAS Kawal yang dibangun					
	Jenis Status	Rakortek					
	Kesiapan Daerah	Dokumen DED					
	Kegiatan Daerah (APBD)	1.03.02.2.01.06 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya - (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)					
	Catatan Kesepakatan	Diakomodir sesuai pembahasan dalam rakortekrenbang					
7.	Pemberdayaan dan pembinaan kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata	90	90	Usaha Pariwisata	2102 - Kab. Bintan, 2171 - Kota Batam	040 - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Diakomodir
	Prioritas Nasional	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan					
	Program Prioritas	06 - Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi					
	Kegiatan Prioritas	03 - Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok					
	Proyek Prioritas	03 - Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk Melalui Desa Wisata					
	Major Project	00 - Bukan Major Project					



No.	Usulan	Volume Usulan	Volume Kesepakatan	Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
	Program	EA - Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	Kegiatan	4308 - Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata					
	KRO	QDC - Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat					
	RO	001 - Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan Usaha Sebagai Pemasok Industri Pariwisata					
	Jenis Status	Rakortek					
	Kesiapan Daerah	Tahun 2023 Dinas Pariwisata Provinsi Kepri mengalokasikan sebesar Rp. 400,000,000 (Empat Ratus Juta Rupiah) untuk sub kegiatan Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata					
	Kegiatan Daerah (APBD)						
	Catatan Kesepakatan	Diakomodir sesuai pembahasan dalam rakortekrenbang					
8.	Fly Over Simpang Kabil	557	557	M	2171 - Kota Batam	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir
	Prioritas Nasional	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
	Program Prioritas	02 - Infrastruktur Ekonomi					
	Kegiatan Prioritas	01 - Konektivitas Jalan					
	Proyek Prioritas	01 - Pembangunan Jalan Strategis					
	Major Project	08 - Pembangunan Wilayah Batam-Bintan					
	Program	GA - Program Infrastruktur Konektivitas					
	Kegiatan	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional					
	KRO	RBF - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)					
	RO	002 - Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)					
	Jenis Status	Rakortek					
	Kesiapan Daerah	1. Dokumen FS 2. Dokumen Lingkungan					
	Kegiatan Daerah (APBD)						
	Catatan Kesepakatan	Diakomodir sesuai pembahasan dalam rakortekrenbang					
9.	Jumlah Siswa SMK yang Tersertifikasi	10961	10961	Siswa	21 - Provinsi Kepulauan Riau	023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	Diakomodir
	Prioritas Nasional	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
	Program Prioritas	07 - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing					
	Kegiatan Prioritas	01 - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri					
	Proyek Prioritas	02 - Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					
	Major Project	00 - Bukan Major Project					
	Program	DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					
	Kegiatan	4262 - Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan					
	KRO	RAA - Sarana Bidang Pendidikan					
	RO	020 - SMK yang Mendapatkan Peningkatan Peralatan Pendidikan Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja					
	Jenis Status	Rakortek					



No.	Usulan	Volume Usulan	Volume Kesepakatan	Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
	Kesiapan Daerah	Data Pendukung					
	Kegiatan Daerah (APBD)						
	Catatan Kesepakatan	Diakomodir sesuai pembahasan dalam rakortekrenbang					
10.	Jumlah Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kopetensinya	283	283	Guru	21 - Provinsi Kepulauan Riau	023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	Diakomodir
	Prioritas Nasional	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
	Program Prioritas	07 - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing					
	Kegiatan Prioritas	01 - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri					
	Proyek Prioritas	03 - Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi					
	Major Project	00 - Bukan Major Project					
	Program	DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					
	Kegiatan	4468 - Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi					
	KRO	SCI - Pelatihan Bidang Pendidikan					
	RO	001 - Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja					
	Jenis Status	Rakortek					
	Kesiapan Daerah	Data Pendukung					
	Kegiatan Daerah (APBD)						
	Catatan Kesepakatan	Diakomodir sesuai pembahasan dalam rakortekrenbang					
11.	Tenaga kerja industri yang mendapatkan sertifikasi kompetensi	627	627	Orang	21 - Provinsi Kepulauan Riau	019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Diakomodir
	Prioritas Nasional	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
	Program Prioritas	07 - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing					
	Kegiatan Prioritas	01 - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industr					
	Proyek Prioritas	05 - Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi					
	Major Project	00 - Bukan Major Project					
	Program	DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					
	Kegiatan	4957 - Pelatihan Vokasi Industri					
	KRO	PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM					
	RO	001 - Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi					
	Jenis Status	Rakortek					
	Kesiapan Daerah	Usulan kebutuhan Pelatihan dari Pelaku Usaha Industri, sarana dan Prasaran pelatihan melalui kerjasama dengan BLK, LPK dan Politeknik					
	Kegiatan Daerah (APBD)						
	Catatan Kesepakatan	Diakomodir sesuai pembahasan dalam rakortekrenbang					

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Riau



6.3. Dukungan Program RKPD Tahun 2023 Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar untuk daerah provinsi terdiri atas: a. pendidikan menengah; b. pendidikan khusus; c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi; d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi; e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota; f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota; g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi; h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi; i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi; j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Berdasarkan jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan provinsi, maka ditetapkan beberapa program perangkat daerah yang mendukung penerapan SPM. Adapun rekapitulasi program RKPD tahun 2023 pendukung penerapan SPM disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 6.5
Rekapitulasi Program RKPD Tahun 2023 Pendukung Penerapan SPM

No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program & Kegiatan RKPD 2023	Indikator Program RKPD	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
I.	BIDANG PENDIDIKAN				
1	Pendidikan menengah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100,00	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan khusus		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	98,50	
			Angka partisipasi kasar (APK) SLB	85,00	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MA K	79,00	
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,37	
			Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	96,11	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	99,08	
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	33,80	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase siswa SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	
		Persentase Ruang kelas SMA dalam kondisi baik		96%	
		Persentase Angka Putus Sekolah SMA		0,39%	
		Jumlah USB SMA yang dibangun		1	
		Jumlah Ruang kelas SMA yang dibangun		10	
		Jumlah utilitas SMA yang tersedia		2	
		Jumlah utilitas SMA yang tersedia		47	
		Persentase siswa SMK Negeri yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri		65%	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ruang kelas SMK dalam kondisi baik	92%	
			Persentase Angka Putus Sekolah SMK	0,37%	
			Jumlah USB SMK yang dibangun	2	
			Jumlah Ruang kelas SMK yang dibangun	1	
Jumlah Utilitas SMK yang tersedia	5				
Persentase Tenaga Pendidik SMK yang Bersertifikas	37%				
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus		98,80%		
	Persentase Angka Putus Sekolah SLB		0,53%		



No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program & Kegiatan RKPD 2023	Indikator Program RKPD	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase Angka Putus Sekolah SLB	2%	
			Jumlah Ruang kelas SLB yang dibangun	3	
			Jumlah Utilitas SLB yang tersedia	4	
			Persentase Tenaga Pendidik SLB yang Bersertifikasi	23%	
			Persentase siswa SLB Negeri yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri	20,20%	
II	BIDANG KESEHATAN				
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	124	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	13	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,3%	
			Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
			Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
			Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	5 kab/kota	
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	92,00	
			Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	68,00	
			Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	43,00	
			Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	94,10	
Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di	71,00				



No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program & Kegiatan RKPD 2023	Indikator Program RKPD	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			atas >= 80% Puskesmas		
			Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	90,00	
			Persentase Puskesmas terakreditasi	97,00	
			Persentase Rumah Sakit terakreditasi	90,00	
			Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	94,00	
			Status Akreditasi RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib	Paripurna	
			Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Satelit	
			Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Paripurna	
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	79,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Engku Haji Daud	82	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
III	BIDANG PEKERJAAN UMUM				
1	Pemenuhan kebutuhan Air MInum Curah lintas kabupaten/kot a	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97,03%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	97.03%		
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	93,06%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program & Kegiatan RKPD 2023	Indikator Program RKPD	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	kabupaten/kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Cakupan pelayanan air limbah	93.06%	
IV	BIDANG PERUMAHAN				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	4	
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provins	1	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	20	
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2	
V	BIDANG TRANTIBUMLINMAS				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	53,33	Satpol PP
			Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	50	
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	
			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	50%	



No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program & Kegiatan RKPD 2023	Indikator Program RKPD	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
VI	BIDANG SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00	Dinas Sosial	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti		Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00		
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti		Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	25,00		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti		Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00		
			Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00		
			Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti		100
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti		25
				Jumlah sarana prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak terlantar yang tersedia		1
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti		120
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosail di dalam panti		10



No	Bidang SPM/Jenis Pelayanan Dasar	Program & Kegiatan RKPD 2023	Indikator Program RKPD	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100	Dinas Sosial
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	170	

Sumber: hasil analisis, 2022



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Indikator kinerja ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwujudkan dalam pembangunan daerah diukur dengan beberapa indikator makro. Indikator kinerja makro daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 disertai dengan realisasi 2021 dan target tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Makro Daerah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Realisasi	Target	
			2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,79	76,7	76,70-76,99
2	Angka Kemiskinan	%	5,75	6.01	4,35– 5,00
3	Angka Pengangguran	%	9,91	10,10	8,03– 8,75
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,43	4,8 - 5,6	5,1– 5,6
5	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	n.a	80,07	81,91
6	Indeks Gini	Indeks	0,339	0,332	0,335-0,329

Sumber: - RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur yang dimuat dalam RPJMD ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Adapun target 16 IKU Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 7.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,43	4,8 - 5,6	5,1– 5,6
2	Angka Pengangguran	%	9,91	10,10	8,03– 8,75
3	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	n.a	80,07	81,91
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	73,19	69,73	69,95
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	n.a	69,77	70,37
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,79	76.7	76,70 – 76,99
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,40	100	100
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,49	93,20	93,30
9	Angka Kemiskinan	%	5,75	6.01	4,35– 5,00
10	Prevalensi Stunting	%		15,80	15,30
11	Indeks Gini	Indeks	0,339	0,332	0,335- 0,329
12	Rasio Elektrifikasi	Rasio	94,50	95,5	96
13	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Ha	n.a	145,27	123,73
14	Rasio Konektivitas	Rasio	n.a	41,33	44,25
15	Persentase Jalan Kondisi Baik	%	66,36	67,75	69,25
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	n.a	62,9	63,9

Sumber: - RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
- BPS Kepulauan Riau, 2022, diolah

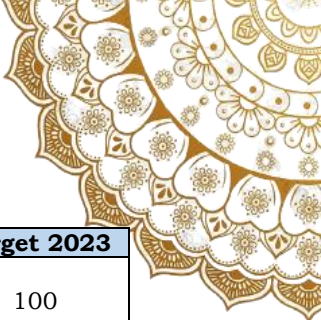
Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, angka miskin, indeks gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 7.3.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2022	Target 2023
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,8 – 5,6	5,1– 5,6
2	Laju Inflasi	%	3,14+1	3,13±1
3	Indeks Gini	Indeks	0.332	0,335-0,329
4	Angka Kemiskinan	%	6.01	4,35– 5,00
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76.7	76,70-76,99
6	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	10,10	8,03– 8,75
B	Aspek Pelayanan Umum			
	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar			
	Urusan Pendidikan			
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	98,00	98,50
3	Angka partisipasi kasar (APK) SLB	%	84,00	85,00
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	%	78,00	79,00
5	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,38	0,37
6	Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	95,94	96,11
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	97,43	99,08
8	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	33,75	33,80
9	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	60,00	60,50
10	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	30,00	30,50
11	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	%	24,32	27,03
12	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	724,76	726,42
13	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100,00	100,00
	Urusan Kesehatan			
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kematian	125	124
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1.000 Kematian	14	13
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,8	15,3
4	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100
5	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100
7	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	90,00	92,00
6	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	89,00	90,00
7	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	96,00	97,00
8	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	85,00	90,00
9	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Paripurna	Paripurna
10	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	52	54
11	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	71,43	71,43
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Jumlah Titik Rawan Banjir	titik	15	12
2	Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada	%	13,53	19,51
3	Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk	%	53,69	56,09
4	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	96,15	97,03
5	Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	91,32	93,06
6	Cakupan Pelayanan Drainase	%	48,1	51,3



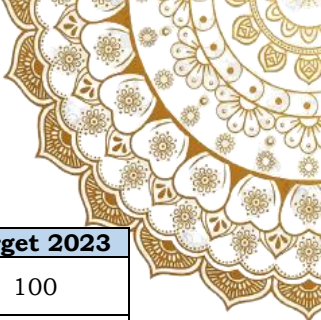
No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2022	Target 2023
7	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	%	100	100
8	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%	100	100
9	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	28	30
10	Cakupan Pelayanan Persampahan	%	67,80	68,90
11	Persentase jalan kondisi baik	%	67,75	69,25
12	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%	9,00	10,00
13	Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi Dan Ditetapkan/Perda	%	70	78
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
3	Persentase RTLH yang dibenahi	%	10	15,00
4	Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	15	27,00
5	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Unit	12.000	13.000
6	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	Usaha	5	10
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat				
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	%	50	53,33
2	Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	%	41,67	50
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
4	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	%	60,00	70,00
5	Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	Skor	1,99	2,66
6	Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Skor	0,32	0,32
7	Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor	0,46	0,48
8	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100
Urusan Sosial				
1	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	2,98	3,27
2	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	52,00	46,00
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00
4	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00
5	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	25,00	25,00
6	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00
8	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00
9	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,17	0,15



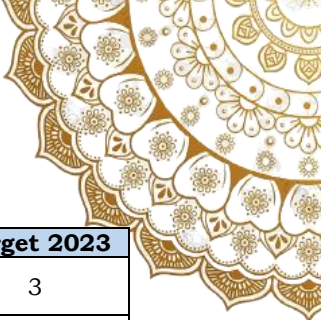
No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2022	Target 2023
10	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	0,79	0,71
11	Persentase PPKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63	31,63
12	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00	100,00
	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
	Urusan Tenaga kerja			
1	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	51,28	56,41
2	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	%	6	8
3	Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	40,00	45,45
4	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	61,00	62,00
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,55	67,57
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,10	9,50-8,03
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	35	40
8	Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	%	100	100
9	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	11,8	12,8
10	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	95,25	95,5
11	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	75,5	76
12	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%	100	100
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak			
1	Persentase Pencapaian Angaran Responsif Gender (ARG)	%	5,4	5,5
2	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	%	11,10	11,10
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	%	44,07	43,88
4	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,75	28,90
5	Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	%	46,15	51,28
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	73,60	74,60
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	86,64	86,94
	Urusan Pangan			
1	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	113	114
2	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	≤11	≤11
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	86,90	87,70
4	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%	≤10	≤10
5	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	81	82
	Pertanahan			
	Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%)	%	100	100
	Lingkungan Hidup			
1	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	20	20
2	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	76,75	77,39
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,70	56,80
4	Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	88,25	88,35
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,08	59,09
6	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	14,28	14,28



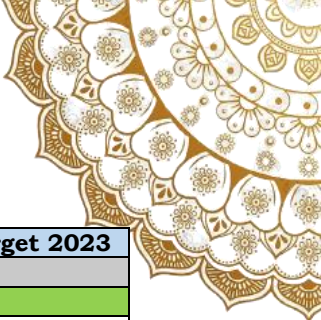
No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2022	Target 2023
7	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	33,33	33,33
8	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100	100
9	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	42,85	57,14
10	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100	100
11	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	57,14	71,43
12	Persentase Pengurangan Sampah	%	26	27
13	Persentase Penanganan Sampah	%	73	72
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	%	100	100
2	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	%	100	100
3	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	%	75	100
4	Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	%	100	100
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	25,68	34,74
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas	%	44,64	52,64
3	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	100	100
4	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	%	1,45	2,91
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Prevalence Rate	%	49,01	49,50
2	Unmetneed	%	9,50	9,25
3	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	59,30	59,70
Perhubungan				
1	Rasio Konektivitas Provinsi	%	41,33	44,25
2	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%	20,00	40,00
3	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Lintas	16	18
Komunikasi dan Informatika				
1	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	78	80
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	20	30
3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	20	25
4	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	82,93	100,00
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
1	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	11.34	16.34
2	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	31.18	33.18
3	Rasio Wirausaha Baru	%	28.02	28.52
4	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	25.86	29.36
5	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	13.8	18.8
6	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	%	0.44	0.64
7	Persentase Koperasi yang diawasi	%	2,53	3,53
8	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	%	5,77	7,87
Penanaman Modal				
1	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	0	95
2	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%	100	100
3	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	7	8
4	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	80	90
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	83,15	84,2



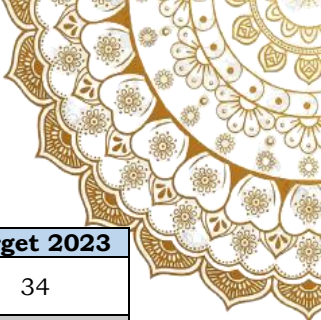
No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2022	Target 2023
6	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	100
7	Persentase ketersediaan data/informasi perkempangan investasi di Kepulauan Riau	%	100	100
Kepemudaan dan Olahraga				
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,56	0,6
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	4,8	5,05
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	0	5
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	0,64	0,73
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	19,23	21,15
6	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	38,09	40,98
7	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	%	8,43 (7 Kwartir)	9,63 (8 Kwartir)
Statistik				
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
Persandian				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks	68,13	70,33
Kebudayaan				
1	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	16,75	17,94
2	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	%	1,49	1,55
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	%	51,01	54,99
4	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	%	28,11	28,16
5	Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi	%	20,00	40,00
6	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	31,75	37,21
7	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	%	12,76	13,48
Perpustakaan				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	62,47	62,50
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	14,95	15,20
Kearsipan				
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	13,98	17,24
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Skor	27,5	60,83
3	Izin Penggunaan Arsip	Skor	5	5
Urusan Pilihan Dasar				
Kelautan dan Perikanan				
1	Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan	3	4
2	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	307076,60	307690,60
3	Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)	%	115,00	115,50
4	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	26491,92	28473,50
5	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%)	%	109,55	110,65
6	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90,00	90,00
7	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	1334,88	1337,88
Pariwisata				
1	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,3	2,4
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,75	1,8
3	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau.	%	22,70	23,80
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	370.500	474.240
5	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	1.988.600	2.426.092
6	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rp	3.996,8	5.142,1



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2022	Target 2023
7	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	3	3
8	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	2	2
Pertanian				
1	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%	1,20	1,25
2	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	59,49	62,08
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1,35	1,42
4	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	0,74	0,77
5	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	2,8	3,0
6	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	%	62,00	63,00
7	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	58,50	59,00
8	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	%	38,0	39,5
9	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	%	72,50	73,60
10	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	%	20	20
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	99,88	99,91
12	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	42	45
Kehutanan				
1	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Miliar Rp	27,10	27,2
2	Rehabilitasi Lahan Kritis	ha	5 ha	10 ha
3	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	500	500
4	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2	2
Energi dan Sumber Daya Mineral				
1	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	36,36	54,55
2	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	13	14,00
3	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	100,00
4	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	98	99
Perdagangan				
1	Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan	%	50	55
2	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	70	70
3	Nilai Inflasi	%	3,14+1	3,13+1
4	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	3,5	3,5
5	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%	<20	<20
6	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	80	80
Perindustrian				
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Miliar Rp	38,5	39
2	Persentase Izin Usaha Industri	%	60	70
3	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	1	1
Transmigrasi				
1	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	%	33,3	33,3
2	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	25,8	28,7
3	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%	6,25	12,5



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2022	Target 2023
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
	Sekretariat Daerah			
1	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100	100
2	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor	38,60	40,1
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	20	40
4	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	90	92
5	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	90	92
6	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	8,2	8,3
7	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	3,03	3,04
8	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	86	87
9	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	%	35	45
10	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	86	87
	Sekretariat DPRD			
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	72	74
2	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100
3	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Perencanaan			
1	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	%	82	84
2	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	%	100	100
3	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	%	95	95
4	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100
	Penelitian dan Pemngembangan			
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	75	80
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	35	40
	Keuangan			
1	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	91	91
2	Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	100	100
3	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	%	100	100
4	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	4,89	4,99
5	Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Pelayanan	1	1
6	Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi	15.300	15.606
7	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	22	24
8	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	%	81%	88
9	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	%	11,91	7,31
10	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100
	Kepegawaian			
1	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%	44,63	45,90
2	Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	%	73	77
3	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	%	95	96
4	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100
	Pendidikan dan Pelatihan			



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2022	Target 2023
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	%	32	34
	Unsur Pengawasan			
	Inspektorat Daerah			
1	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %	%	100	100
2	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	%	100	100
3	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Skor	Hijau	Hijau
4	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	%	7	14
5	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	<10	<9
6	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	80	82
7	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%	75	80
8	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas	%	78	81
9	Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban	%	78	80
10	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	%	60	70
11	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	80	81
12	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	%	100	100
	Unsur Pemerintahan Umum			
	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0	0
2	Persentase Konflik antar Agama	%	0	0
3	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100	100
4	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%	100	100
5	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	83	85
6	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100
C	Aspek Daya Saing			
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	83,15	84,2

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional”.

Dengan ditetapkannya RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dengan peraturan gubernur, maka perlu diperhatikan beberapa hal untuk pelaksanaan rencana secara baik. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

- a. Seluruh kepala perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada peraturan gubernur tentang RKPD Tahun 2023.
- b. Kepala Bappeda Litbang melakukan evaluasi terhadap hasil RKPD yang berasal dari evaluasi hasil terhadap Renja Perangkat Daerah secara periodik.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyempurnakan RKPD kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan gubernur tentang RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.
- d. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 antara pemerintah provinsi dengan pusat dan kabupaten/kota diharapkan dapat mencapai target-target pembangunan guna **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

ANSAR AHMAD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						27,413,302,416		16,304,751,274						
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						12,207,306,096							13,700,819,953	
1	06	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						625,000,000							625,000,000	
1	06	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dok	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 dok	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dok	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 dok	250,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 lap	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		2 lap	150,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 lap	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 lap	200,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,952,500,000							9,937,068,000	
1	06	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				468 org/bln	8,372,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		468 org/bln	9,215,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 dok	580,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 dok	721,568,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						58,440,000							58,440,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 dok	58,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 dok	58,440,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						64,072,000							64,072,000	
1	06	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				54 Paket	44,072,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		54 Paket	44,072,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 org	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		5 org	20,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						948,500,000							978,190,630	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 pkt	16,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 pkt	16,800,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 pkt	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 pkt	18,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 pkt	72,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 pkt	72,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 pkt	98,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 pkt	98,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 dok	32,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 dok	32,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 lap	11,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 lap	11,200,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 lap	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 lap	729,690,630	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						250,400,000						428,444,885		
1	06	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 unit	80,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		2 unit	117,294,885	Dinas Sosial
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 pkt	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 pkt	126,650,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		2 unit	184,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						850,394,096							862,000,000	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 lap	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 lap	18,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 lap	56,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 lap	56,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 lap	776,394,096		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 lap	788,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						458,000,000							747,604,438	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 unit	184,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		3 unit	184,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 unit	74,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		2 unit	74,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 unit	489,604,438	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						3,400,300,000							514,958,980	
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						3,400,300,000							514,958,980	
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				80 org	160,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		80 org	54,358,980	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				75 org	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		75 org	152,800,000	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				48 lbg	3,015,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		48 lbg	307,800,000	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						4,235,950,000							588,301,622	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						1,617,100,000							125,100,000	
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 org	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		50 org	0	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				889 org	767,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		889 org	125,100,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						1,627,250,000							230,101,622	
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				25 org	834,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		25 org	155,851,622	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				680 org	793,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		680 org	74,250,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						574,400,000							89,400,000	
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				25 org	340,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 org	0	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				270 org	234,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		270 org	89,400,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti						245,000,000							31,500,000	
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				25 org	170,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 org	0	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				25 org	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		25 org	31,500,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti						172,200,000							112,200,000	
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				40 org	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		40 org	97,200,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				500 org	97,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		500 org	15,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						5,791,746,320						922,356,181		
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						5,791,746,320						922,356,181		
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				48916 KK	2,589,037,048		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		48916 KK	230,037,048	Dinas Sosial
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				49366 KK	482,709,272		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		49366 KK	237,319,133	Dinas Sosial
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				450 KK	2,720,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		450 KK	455,000,000	Dinas Sosial
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA						1,105,000,000							382,362,615	
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						1,105,000,000							382,362,615	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				340 org	385,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		340 org	133,900,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				340 org	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		340 org	45,900,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				340 org	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		340 org	42,662,615	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				340 org	520,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		340 org	159,900,000	Dinas Sosial	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						673,000,000							195,951,923		
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						673,000,000							195,951,923		
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 dok	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 dok	25,000,000	Dinas Sosial	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				5 makam	648,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		5 makam	170,951,923	Dinas Sosial	
TOTAL											27,413,302,416							16,304,751,274		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						558,457,279,356								147,629,069,256		
1	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	20,125,832,950						100 %	14,000,000,000			
1	04	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,605,393,640							780,000,000			
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun					3 Dokumen 3 Dokumen	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen 3 Dokumen	50,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen 4 Bulan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen 4 Bulan	30,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen 8 Bulan	77,762,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen 8 Bulan	30,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					2 Dokumen 12 Bulan	530,999,320		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen 12 Bulan	250,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					2 Dokumen 6 Bulan	101,253,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen 6 Bulan	30,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan 3 Dokumen	49,724,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan 3 Dokumen	30,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun				3 Laporan 3 Dokumen	595,655,320		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan 3 Dokumen	360,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9,485,628,781							8,434,082,563	
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				518 Orang/ Bulan 14 Bulan	8,548,428,781	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				518 Orang/ Bulan 14 Bulan	7,634,082,563	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pemenuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen 12 Bulan	937,200,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen 12 Bulan	800,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						623,546,144							343,457,651	
1	04	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pemenuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen 12 Bulan	163,200,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen 12 Bulan	343,457,651	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	281,147,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	79,488,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	99,711,144	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1,056,069,568							732,081,624	
1	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pemenuhan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket 5 Paket 12 Bulan	217,452,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket 5 Paket 12 Bulan	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pemenuhan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen 12 Bulan	531,792,768	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen 12 Bulan	632,081,624	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				37 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37 Orang	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				50 Orang	75,554,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				50 Orang	81,270,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2,769,883,122							1,067,999,970	
1	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	210,437,500	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket 12 Bulan	399,954,200	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket 12 Bulan	80,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1 Paket 12 Bulan	71,198,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket 12 Bulan	5,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Paket 12 Bulan	311,558,600	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket 12 Bulan	120,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket 12 Bulan	80,194,800	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket 12 Bulan	15,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Dokumen 12 Bulan	44,160,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen 12 Bulan	30,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan 12 Bulan	62,732,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan 12 Bulan	10,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan 12 Bulan	1,054,965,350	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan 12 Bulan	407,999,970	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pemenuhan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen 12 Bulan	169,075,144	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen 12 Bulan	150,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen 12 Bulan	365,607,528	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen 12 Bulan	250,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						903,742,800							800,000,000	
1	04	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	115,866,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pemenuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25 Unit 12 Bulan	567,776,700	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Unit 12 Bulan	150,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Pemenuhan Pengadaan Aset Tetap Lainnya				15 Unit 12 Bulan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit 12 Bulan	150,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10 Unit 12 Bulan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit 12 Bulan	250,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10 Unit 12 Bulan	120,100,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit 12 Bulan	250,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,236,950,000							1,125,498,192	
1	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 12 Bulan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan 12 Bulan	20,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan 12 Bulan	170,700,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan 12 Bulan	240,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Laporan 12 Bulan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan 12 Bulan	80,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan 12 Bulan	1,056,250,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan 12 Bulan	785,498,192	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,444,618,895							716,880,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			3 Unit	83,560,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3 Unit 12 Bulan	89,760,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit 12 Bulan	400,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4 Unit 12 Bulan	50,800,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit 12 Bulan	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4 Unit 12 Bulan	165,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit 12 Bulan	216,880,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	2,055,498,895	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	% %		% %	100 % 100 %	8,200,000,000					100 % 100 %	10,000,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						1,000,000,000						800,000,000		
1		04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi Teridentifikasinya Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi				2 Dokumen 2 Jumlah Dokumen	325,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen 2 Jumlah Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1		04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Teridentifikasinya Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				2 Dokumen 2 Jumlah Dokumen	325,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen 2 Jumlah Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1		04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Teridentifikasinya Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				2 Dokumen 2 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen 2 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1		04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Teridentifikasinya data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				2 Dokumen 2 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen 2 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						1,125,000,000						800,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah kegiatan Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				2 Kegiatan 100 Orang	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Kegiatan 100 Orang	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan				2 Kegiatan 2 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Kegiatan 2 Orang	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP				2 Kegiatan 100 Orang	425,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Kegiatan 100 Orang	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Kegiatan Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				2 Kegiatan 100 Orang	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Kegiatan 100 Orang	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						6,075,000,000							8,000,000,000	
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi Jumlah rumah yang direhabilitasi				10 Unit Rumah 10 rumah	2,000,000,000	Kab. Bintan, Telok Sebong, Berakit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit Rumah 10 rumah	250,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi				20 Dokumen 20 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Dokumen 20 Dokumen	750,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	02	1.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu) Luas pengadaan lahan				1.5 Ha 15000 M2	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.5 Ha 15000 M2	3,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun Jumlah rumah terbangun				5 Unit Rumah 5 rumah	640,000,000	Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota Kab. Bintan, Telok Sebong, Berakit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit Rumah 5 rumah	750,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun Jumlah rumah khusus yang terbangun				20 Unit Rumah 20 rumah khusus	3,435,000,000	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit Rumah 20 rumah khusus	3,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah kegiatan Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				2 Kegiatan 20 Unit Rumah	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Kegiatan 20 Unit Rumah	250,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						0							400,000,000	
1	04	02	1.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi				2 Kegiatan 2 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Kegiatan 2 Laporan	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi Jumlah kegiatan				2 Dokumen 2 Kegiatan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen 2 Kegiatan	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	% %		% %	15 % 27 %	48,009,000,000					15 % 27 %	30,000,000,000		
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						3,800,000,000						1,800,000,000		
1	04	03	1.01	01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Terselenggaranya pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh				1 Laporan 2 Jumlah kelompok	900,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan 2 Jumlah kelompok	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Terselenggaranya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh				1 Laporan 2 Jumlah rapat	300,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan 2 Jumlah rapat	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali				1 Laporan 2 Jumlah rapat	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan 2 Jumlah rapat	500,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi Terselenggaranya Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				2 Dokumen 2 Jumlah Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen 2 Jumlah Dokumen	500,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1		04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Laporan 2 Jumlah rapat	1,800,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan 2 Jumlah rapat	500,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1		04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						44,209,000,000							28,200,000,000	
1		04	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terselenggaranya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				4 Dokumen 4 Jumlah Dokumen	1,800,000,000	Kab. Bintan, Teluk Bintan, Penaga Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen 4 Jumlah Dokumen	1,200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			1 Laporan 2 Jumlah rapat	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan 2 Jumlah rapat	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki Terselenggaranya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			2500 Unit Rumah 2500 Jumlah KK RTLH	28,475,000,000	Kab. Bintan, Bintan Timur, Semua Kelurahan Kab. Bintan, Toapaya, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Penyengat Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Lingga Utara, Linau Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2500 Unit Rumah 2500 Jumlah KK RTLH	14,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	1.02	04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terselenggaranya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			1 Dokumen 2 Jumlah kerja sama	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 2 Jumlah kerja sama	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			1 Laporan 2 Jumlah rapat	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan 2 Jumlah rapat	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	1.02	06	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terselenggaranya Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Dokumen 4 Jumlah KK penerima	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 4 Jumlah KK penerima	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)				0 Ha 46.81 Ha 46.81 Ha	13,934,000,000	Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Meral, Semua Kelurahan Kota Batam, Sekupang, Semua Kelurahan Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Senggarang Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Singkep Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Ha 46.81 Ha 46.81 Ha	12,200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Unit		Unit	13,000 Unit	481,822,446,406					13,000 Unit	93,329,069,256		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						481,822,446,406						93,329,069,256		
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Terselenggaranya Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				55 Dokumen 55 Jumlah Dokumen	1,699,999,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55 Dokumen 55 Jumlah Dokumen	1,500,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman Penyelenggaraan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				7 Lokasi 13000 Jumlah KK terlayani	479,822,446,806	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7 Lokasi 13000 Jumlah KK terlayani	91,129,069,256	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1		04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				1 Laporan 3 Jumlah rapat	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan 3 Jumlah rapat	300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1		04	05	1.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang				1 Laporan 2 Pertemuan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan 2 Pertemuan	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1		04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman				1 Dokumen 3 Jumlah kerjasama	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 3 Jumlah kerjasama	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1		04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Usaha		Usaha	10 Usaha	300,000,000						10 Usaha	300,000,000	
1		04	06	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah					300,000,000							300,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	06	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah			1 Laporan 4 Jumlah rapat	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan 4 Jumlah rapat	300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
TOTAL											558,457,279,356							147,629,069,256	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						96,580,105,936								82,121,378,673		
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						66,890,000,000							65,175,187,978			
1	02	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150,000,000							150,000,000			
1	02	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	100,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		6 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	50,000,000	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						39,730,000,000							39,670,187,978			
1	02	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2940 Orang/ Bulan	39,000,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2940 Orang/ Bulan	38,820,187,978	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	630,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	700,000,000	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	100,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						450,000,000							50,000,000			
1	02	01	1.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	400,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	0	Dinas Kesehatan		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,450,000,000							1,015,000,000	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				792 Dokumen	50,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		792 Dokumen	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	200,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Laporan	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	750,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Laporan	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						400,000,000							400,000,000	
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	400,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,400,000,000							1,500,000,000	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1,400,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5,310,000,000							3,890,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	60,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		20 Unit	140,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	200,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		20 Unit	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				5 Unit	1,000,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		50 Unit	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	500,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		50 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	1,000,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		10 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	100,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1,800,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5 Unit	1,400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	600,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		50 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						18,000,000,000							18,500,000,000	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				41 Unit Kerja	18,000,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		41 Unit Kerja	18,500,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02			PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						15,838,840,936						9,172,378,823		
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						13,488,840,936						6,352,378,823		
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	4,350,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	2,065,894,300	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		10 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	1,856,503,200	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		10 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan				15 Paket	2,000,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		15 Paket	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				15 Paket	3,216,443,436	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		15 Paket	1,852,378,823	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						1,850,000,000							2,020,000,000	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				25 Orang	650,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	200,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Dokumen	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	920,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						200,000,000							500,000,000	
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						300,000,000							300,000,000	
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	300,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						13,851,265,000							7,773,811,872	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						12,251,265,000							6,923,811,872	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				175 Orang	12,251,265,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		175 Orang	6,923,811,872	Dinas Kesehatan
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						1,600,000,000							850,000,000	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				115 Orang	1,500,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		115 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				375 Dokumen	100,000,000	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		375 Dokumen	350,000,000	Dinas Kesehatan
TOTAL											96,580,105,936							82,121,378,673	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	07					PENGELOLAAN PENGHUBUNG						10,553,854,552								9,703,651,896			
5	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						7,317,298,611							6,466,651,896				
5	07	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						75,000,000							75,000,000				
5	07	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	25,000,000	Badan Penghubung Daerah			
5	07	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	25,000,000	Badan Penghubung Daerah			
5	07	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	25,000,000	Badan Penghubung Daerah			
5	07	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,537,990,696							2,537,990,696				
5	07	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				196 Orang/ Bulan	2,331,910,696	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		196 Orang/ Bulan	2,331,910,696	Badan Penghubung Daerah			
5	07	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	181,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	181,080,000	Badan Penghubung Daerah			
5	07	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	25,000,000	Badan Penghubung Daerah			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						186,234,000						251,234,000		
5	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				134 Paket	86,234,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		134 Paket	86,234,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				33 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		33 Orang	165,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						196,371,915							225,827,700	
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	196,371,915	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Paket	225,827,700	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,019,300,000							1,016,599,500	
5	07	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	779,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Unit	1,016,599,500	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	240,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Unit	0	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,102,402,000							1,060,000,000	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan	20,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	850,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan	850,000,000	Badan Penghubung Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	190,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan	190,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,050,402,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,200,000,000							1,300,000,000	
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 50 Unit	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Unit 50 Unit	500,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Unit	50,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Unit	750,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						3,236,555,941							3,237,000,000	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						3,236,555,941							3,237,000,000	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				12 Laporan	1,400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan	1,400,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				12 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan	500,000,000	Badan Penghubung Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				12 Laporan	586,555,941	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan	587,000,000	Badan Penghubung Daerah	
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				12 Laporan	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan	750,000,000	Badan Penghubung Daerah	
TOTAL											10,553,854,552							9,703,651,896		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	06					PENGELOLAAN PERBATASAN						15,686,810,804								15,721,810,804		
5	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	%		%	100 %	10,211,872,204						100 %	10,211,872,204			
5	06	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	120,000,000						5 Laporan	120,000,000			
5	06	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		
5	06	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	5 Laporan	20,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		
5	06	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	7,356,217,204						100 %	7,356,217,204			
5	06	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				462 Orang/ Bulan	7,006,217,204	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	462 Orang/ Bulan	7,006,217,204	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		
5	06	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Dokumen	350,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		
5	06	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	80,000,000						100 %	80,000,000			
5	06	01	1.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	4 Paket	50,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		
5	06	01	1.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	3 Orang	30,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi Pemenuhan Administasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	569,655,000					12 Bulan	569,655,000		
5	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Paket	25,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	49,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Paket	49,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Paket	30,520,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	20,135,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	20,135,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	430,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	50 Laporan	430,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	1,078,814,760						100 %	1,078,814,760	
5	06	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	635,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	2 Unit	635,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	2 Paket	60,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	383,814,760	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	17 Unit	383,814,760	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	901,185,240						12 Bulan	901,185,240	
5	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	2,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	37,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	2 Laporan	37,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	862,185,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	862,185,240	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	Frekuensi Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	Bulan		Bulan	12 Bulan	106,000,000						12 Bulan	106,000,000	
5	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	96,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Unit	96,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	10 Unit	10,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	%		%	45 %	5,474,938,600					45 %	5,509,938,600		
5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Jumlah Dokumen pengawasan pengembangan/pembangunan batas antar Negara dan Kawasan Perbatasan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	2,835,000,000					4 Dokumen	3,585,000,000		
5	06	02	1.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				2 Dokumen	1,046,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Provinsi Kepulauan Riau	2 Dokumen	296,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				2 Dokumen	1,789,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Provinsi Kepulauan Riau	2 Dokumen	3,289,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan						1,569,938,600						1,254,938,600		
5	06	02	1.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan				1 Dokumen	490,938,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	344,938,600	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	1.02	02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	328,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	250,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	1.02	03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara				1 Dokumen	370,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	300,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	1.02	04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	381,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	360,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	1.03		Monitoring dan Evaluasi						1,070,000,000						670,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	02	1.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	570,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	270,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	1.03	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				5 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Laporan	200,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	1.03	03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Laporan	200,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
TOTAL											15,686,810,804							15,721,810,804	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01					PERENCANAAN						44,084,457,879							43,114,702,956				
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	31,349,300,327						100 %	31,235,438,394				
5	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						520,000,000							795,000,000				
5	01	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	200,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	271,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	01	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	01	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	01	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	01	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	01	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	100,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	162,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	01	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	100,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Laporan	162,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	01	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20,263,320,326							18,554,691,593				

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/ Bulan	19,004,862,326		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				83 Orang/ Bulan	17,399,840,552	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	858,458,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	724,851,041	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	80,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	110,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	80,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Laporan	55,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						350,000,000							500,000,000	
5	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	125,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPД)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	125,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1,400,000,000							1,770,000,000	
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	270,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Orang	450,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				85 Orang	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85 Orang	550,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				85 Orang	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85 Orang	500,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						3,500,000,000							4,105,000,000	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	55,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	55,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	280,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	424,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	160,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	371,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	110,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	450,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	1,650,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	125,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	425,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,150,000,000							875,000,000		
5	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				132 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				132 Unit	275,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,101,980,001							3,310,746,801	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	25,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	188,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	210,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	255,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	280,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,632,780,001		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	2,790,746,801	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,064,000,000							1,325,000,000	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Unit	165,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	314,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22 Unit	360,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				677 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				677 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				428 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				428 Unit	200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						5,000,000,000							3,679,495,038	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						3,125,000,000							1,689,495,038	
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	420,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	260,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Berita Acara	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Berita Acara	109,495,038	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Berita Acara	510,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	1,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	340,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						700,000,000							720,000,000	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	310,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				80 Orang	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80 Orang	180,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				50 Orang	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	130,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Buku	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						950,000,000							820,000,000	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				5 Laporan	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	280,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kerja Sama	110,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	170,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				14 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Dokumen	260,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						225,000,000							450,000,000	
5	01	02	1.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	% %		% %	100 % 95 %	7,735,157,552						100 % 95 %	8,199,769,524	
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						2,521,719,186							2,733,256,508	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	393,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	230,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	263,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	393,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	283,359,592		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	317,628,254	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	393,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	230,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	263,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	393,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	338,359,595		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	317,628,254	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						2,746,719,183							2,733,256,508	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	393,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	330,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	263,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	540,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	393,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	283,359,592		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	317,628,254	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	393,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	230,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	263,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	393,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	283,359,592		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	317,628,254	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						2,466,719,183						2,733,256,508		
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	393,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	230,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	263,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	393,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	283,359,592		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	317,628,254	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	393,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	230,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	263,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	393,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	283,359,592		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	317,628,254	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1,800,000,000							2,543,740,744	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	% %		% %	40 % 80 %	1,800,000,000						40 % 80 %	2,543,740,744	
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						300,000,000							830,000,000	
5	05	02	1.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				2 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	02	1.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa				2 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				0 Dokumen 1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan				1 Rekomendasi	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Rekomendasi	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				2 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Rekomendasi	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						0							613,740,744	
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	02	1.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	63,740,744	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						600,000,000							760,000,000	
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	70,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				4 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi						900,000,000							340,000,000	
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
TOTAL											45,884,457,879							45,658,443,700	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	02					KEUANGAN						116,621,380,211								116,138,775,425		
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						105,484,346,286							105,051,741,500			
5	02	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						380,000,000							380,000,000			
5	02	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	100,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah		
5	02	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	70,000,000	Badan Pendapatan Daerah		
5	02	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	210,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	210,000,000	Badan Pendapatan Daerah		
5	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						67,777,000,000							66,975,000,000			
5	02	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				177 Orang/ Bulan	35,104,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				177 Orang/ Bulan	34,302,580,000	Badan Pendapatan Daerah		
5	02	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	32,597,420,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	32,597,420,000	Badan Pendapatan Daerah		
5	02	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	75,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	75,000,000	Badan Pendapatan Daerah		
5	02	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						83,000,000							85,000,000			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	83,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	85,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1,570,000,000							1,570,000,000	
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	750,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	320,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	320,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	250,000,000		Pajak Daerah				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						582,000,000							582,000,000	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	275,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Orang	275,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				60 Orang	157,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Orang	157,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						6,725,000,000							6,725,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	80,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	80,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,850,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	2,850,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	85,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	85,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	350,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	350,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,950,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	1,950,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	250,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	950,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	950,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	60,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	60,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7,954,241,500						8,004,241,500		
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 unit	800,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 unit	800,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1,250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	1,300,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	5,904,241,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Unit	5,904,241,500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13,320,494,786							13,630,500,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,500,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	10,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2,810,437,450	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	3,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	120,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	120,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10,379,557,336	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	10,500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7,092,610,000							7,100,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	1,250,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17 Unit	1,250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	842,610,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	850,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,000,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	5,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						1,938,878,300							1,938,878,300	
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						293,878,300							293,878,300	
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 dokumen	293,878,300	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen	293,878,300	Badan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						700,000,000							700,000,000	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				2 dokumen	700,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 dokumen	700,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						225,000,000							225,000,000	
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	225,000,000		Pendapatan Pajak Daerah				1 Dokumen	225,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						720,000,000							720,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	720,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	720,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						9,198,155,625							9,148,155,625	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						9,198,155,625							9,148,155,625	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	1,407,184,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	1,407,184,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Junlah dokumen analisa pengembangan pajak dan kebijakan pajak daerah				1 Dokumen 1 dokumen	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 1 dokumen	850,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1,700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	1,700,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 sarana prasarana	899,663,200	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 sarana prasarana	1,049,663,200	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	300,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	300,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 laporan	773,786,100	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 laporan	773,786,100	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen Ketetapan	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	100,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				1 Dokumen	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	450,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	580,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen SSPD	580,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumn/target penyelesaian keberatan Pajak daerah				1 dokumen	312,990,150	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen	312,990,150	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 dokumen LHP 1 Laporan	550,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen LHP 1 Laporan	350,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	924,532,175		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	924,532,175	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	250,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						3,938,700,000						3,953,500,000		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,313,700,000							1,318,500,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						46,200,000							46,000,000	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	46,200,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	46,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						807,000,000							812,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	25,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	180,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	180,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	180,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	180,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	290,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	290,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	37,000,000	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	37,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						215,500,000							215,500,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8,500,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	8,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	107,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	107,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						245,000,000						245,000,000		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	185,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Unit	185,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	60,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	60,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						2,625,000,000							2,635,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2,625,000,000							2,635,000,000	
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 sarana prasarana	1,400,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					5 sarana prasarana	1,400,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	250,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	575,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen SSPD	585,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 dokumen LHP 1 Laporan	400,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 dokumen LHP 1 Laporan	400,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						2,036,500,000							2,051,500,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,111,500,000							1,111,500,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						43,400,000							43,400,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	43,400,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	43,400,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						431,100,000							431,100,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	16,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	25,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	78,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	78,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	78,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	78,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	52,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	52,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6,100,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	6,100,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	26,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	26,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						294,000,000							294,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	4,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	250,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						343,000,000							343,000,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	190,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Unit	190,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	20,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	133,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	133,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						925,000,000							940,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						925,000,000						940,000,000		
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 sarana prasarana	250,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 sarana prasarana	255,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	250,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	200,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen SSPD	210,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 dokumen LHP 1 Laporan	225,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen LHP 1 Laporan	225,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						1,404,900,000							1,409,900,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						589,900,000							589,900,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						14,700,000							14,700,000	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	14,700,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	14,700,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						194,200,000							194,200,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,200,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	7,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	20,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	15,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	43,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	43,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	16,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	5,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	12,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	76,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	76,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						164,000,000							164,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	4,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	120,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	120,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						217,000,000							217,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	81,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Unit	81,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	12,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	12,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	124,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	124,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						815,000,000							820,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						815,000,000							820,000,000	
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 sarana prasaran	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 sarana prasaran	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	250,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	165,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen SSPD	170,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 dokumen LHP 1 Laporan	200,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen LHP 1 Laporan	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						1,899,400,000							1,899,400,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						994,400,000							994,400,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25,900,000							25,900,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	25,900,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	25,900,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						374,500,000							374,500,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23,000,000	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	23,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	21,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	21,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	75,000,000	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	75,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	42,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	42,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7,500,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	7,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	21,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	21,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	175,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	175,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						344,000,000							344,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	4,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	300,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	300,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40,000,000	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						250,000,000							250,000,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	82,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	82,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	38,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	38,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	130,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	130,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						905,000,000							905,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						905,000,000						905,000,000		
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Sarana dan Prasarana	240,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Sarana dan Prasarana	240,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	250,000,000	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	190,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen SSPD	190,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 dokumen LHP 1 Laporan	225,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen LHP 1 Laporan	225,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						1,448,400,000							1,448,400,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						618,400,000							618,400,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						16,100,000							16,100,000	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	16,100,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	16,100,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						300,300,000							300,300,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	8,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	15,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6,800,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	6,800,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	15,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,500,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	5,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	190,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	190,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						132,000,000							132,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	4,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	88,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	88,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40,000,000	Kab. Lingga, Singkep, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						170,000,000							170,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 Unit	68,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	68,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	35,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	35,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	67,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	67,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					830,000,000							830,000,000		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					830,000,000							830,000,000		
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			3 Sarana dan Prasarana	195,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Sarana dan Prasarana	195,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			1 Laporan	250,000,000	Kab. Lingga, Singkep, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			1 Dokumen SSPD	160,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen SSPD	160,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah"			1 dokumen LHP 1 Laporan	225,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen LHP 1 Laporan	225,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						1,507,400,000							1,516,700,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						687,400,000						696,700,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11,200,000						11,200,000		
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket 1 Paket	11,200,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket 1 Paket	11,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						333,200,000						335,500,000		
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	12,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	22,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	13,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	35,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	41,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	42,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4,200,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	4,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	11,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	12,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	195,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	195,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						139,000,000						143,000,000		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	95,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	98,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40,000,000	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						204,000,000							207,000,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	103,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	105,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	26,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	27,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	75,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						820,000,000							820,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						820,000,000							820,000,000	
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Sarana dan Prasarana	160,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Sarana dan Prasarana	160,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	250,000,000	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	185,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen SSPD	185,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 dokumen LHP 1 Laporan	225,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen LHP 1 Laporan	225,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						910,006,000						924,400,000		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						430,006,000							439,400,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9,100,000							10,000,000	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	9,100,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						248,600,000							252,000,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,700,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	5,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	15,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	13,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	27,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	28,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	33,500,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	33,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,400,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	2,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	145,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	145,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						104,836,000							105,500,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	4,500,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	60,836,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	61,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67,470,000							71,900,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	17,160,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	17,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9,310,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	9,400,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	41,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						480,000,000							485,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						480,000,000							485,000,000	
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Sarana dan Prasarana	50,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Sarana dan Prasarana	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	250,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	80,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen SSPD	85,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 dokumen LHP 1 Laporan	100,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen LHP 1 Laporan	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						1,540,600,000							1,540,600,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						775,600,000							775,600,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						16,100,000							16,100,000	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	16,100,000	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	16,100,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						200,500,000							200,500,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,000,000	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	9,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	57,000,000	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	57,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	60,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22,000,000	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	22,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	8,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	8,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9,000,000	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	9,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	25,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						177,000,000							177,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	2,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	135,000,000						1 Laporan	135,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40,000,000	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						382,000,000							382,000,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	165,000,000	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	165,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	17,000,000	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	17,000,000	Badan Pendapatan Daerah		
5		02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5		02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						765,000,000							765,000,000		
5		02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						765,000,000							765,000,000		
5		02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Sarana dan Prasarana	200,000,000	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Sarana dan Prasarana	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5		02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	250,000,000	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5		02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	95,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen SSPD	95,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5		02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 dokumen LHP 1 Laporan	220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen LHP 1 Laporan	220,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5		02				KEUANGAN						1,008,300,000							1,010,300,000		
5		02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						467,800,000							467,800,000		
5		02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						17,500,000							17,500,000		
5		02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	17,500,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	17,500,000	Badan Pendapatan Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						148,200,000						148,200,000		
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,700,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	4,700,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	6,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	35,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	19,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12 Bulan	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	1,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	9,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	63,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	63,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						107,000,000							107,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	2,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	65,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						195,100,000							195,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	85,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	85,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	43,100,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	43,100,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	67,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	67,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						540,500,000							542,500,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						540,500,000							542,500,000	
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Sarana dan Prasarana	75,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Sarana dan Prasarana	77,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	250,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	77,500,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen SSPD	77,500,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 dokumen LHP 1 Laporan	138,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen LHP 1 Laporan	138,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						921,400,000							921,400,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						396,400,000							396,400,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11,200,000							11,200,000	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	11,200,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	11,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						182,200,000							182,200,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	5,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,200,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	5,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan					1 Paket	30,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	20,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12 Bulan	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	3,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9,000,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	9,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100,000,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						71,000,000							71,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	2,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	29,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	29,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40,000,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						132,000,000							132,000,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	36,500,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	36,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10,500,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	10,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	85,000,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	85,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						525,000,000							525,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						525,000,000						525,000,000				
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Sarana dan Prasarana	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Sarana dan Prasarana	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah		
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	250,000,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah		
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	75,000,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen SSPD	75,000,000	Badan Pendapatan Daerah		
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 dokumen LHP 1 Laporan	100,000,000	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen LHP 1 Laporan	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah		
TOTAL											133,236,986,211								132,814,875,425		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	02					KEUANGAN						760,159,051,760								81,915,830,926		
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						69,178,216,660							76,552,134,375			
5	02	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						825,000,000							851,114,707			
5	02	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	150,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	253,432,318	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	200,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	122,769,253	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	150,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	143,318,426	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	98,215,403	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	98,215,403	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	125,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	63,358,080	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	200,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		4 Laporan	71,805,824	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52,459,321,076								63,670,831,397		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/ Bulan	34,651,454,859		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		95 Orang/ Bulan	50,126,436,677	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	17,082,866,217		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	12,850,469,368	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	98,215,403	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	117,858,483	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	63,358,080	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	98,215,403	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	168,954,879	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	147,323,104	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						200,000,000							805,366,301	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	122,769,253	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	117,858,483	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
5	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	98,215,403	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	73,661,552	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	122,769,253	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	200,000,000							1 Laporan	122,769,253	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	147,323,104	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1,150,000,000								1,537,467,522	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		3 Unit	147,323,104	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	142,412,334	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	235,215,088	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	98,215,403	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	147,323,104	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				23 Orang	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		23 Orang	423,224,580	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				218 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		218 Orang	147,323,104	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				218 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		218 Orang	196,430,805	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						3,240,896,384							1,892,691,355	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	25,343,232	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	85,510,599	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	24,553,851	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	108,664,158	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	69,014,689	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	21,389,688	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	24,553,851	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	139,255,146	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1,765,896,384		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	649,684,933	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	499,182,701	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	245,538,507	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3,525,000,000							1,595,359,090	
5	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	201,615,627	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Unit	487,865,278	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				8 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		8 Unit	40,655,440	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	180,848,631	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		21 Unit	351,932,656	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		10 Unit	60,983,160	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	65,048,704	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	34,147,957	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		10 Unit	131,606,197	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	40,655,440	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6,477,999,200							4,950,792,137	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	116,535,100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	224,941,538	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	227,999,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	202,745,855	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	4,406,569,644	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,300,000,000							1,248,511,866	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	98,215,403	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32 Unit	527,098,673	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	98,215,402	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		10 Unit	54,018,471	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				230 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		230 Unit	106,526,051	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	49,107,701	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit 1 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit 1 Unit	44,196,931	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				47 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		47 Unit	63,898,735	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		10 Unit	117,858,483	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		10 Unit	55,000,625	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilit asi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				5 Ha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Ha	34,375,391	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						688,423,835,100							3,628,844,052	
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						4,553,356,520							1,186,572,095	
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	132,130,224	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	475,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	118,221,780	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		43 Dokumen	83,450,668	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	435,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		43 Dokumen	69,542,223	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		43 Dokumen	37,634,693	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		43 Dokumen	50,574,554	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	475,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	132,130,224	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	425,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	118,221,780	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	375,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	97,359,113	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	39,037,679	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	450,000,000						1 Dokumen	97,359,113	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	45,237,779	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				88 Orang	408,356,520		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		88 Orang	165,672,265	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						1,244,660,681							635,825,087	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				7 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		7 Laporan	34,700,159	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5		02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				7 Laporan	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		7 Laporan	64,195,817	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5			02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				7 Laporan	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		7 Laporan	70,654,899	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5			02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				7 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		7 Laporan	81,127,062	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				7 Dokumen	84,660,681		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		7 Dokumen	81,127,062	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				1 Laporan	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	30,422,648	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi				1 Lembaga	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Lembaga	43,375,199	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.02	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				7 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		7 Dokumen	32,863,034	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				7 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		7 Dokumen	60,725,278	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				100 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		100 Orang	81,127,062	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	55,506,867	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						1,270,000,000							542,034,646	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	78,712,949	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	26,025,119	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				4 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		4 Dokumen	29,576,730	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	27,816,889	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	55,633,779	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	300,000,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	69,542,223	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	24,695,648	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	21,687,599	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	20,579,707	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	132,130,224	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	55,633,779	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						2,450,000,000							730,645,990	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	41,725,334	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	8,635,443	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	86,750,397	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	740,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	186,373,158	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	125,176,002	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	30,891,251	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	31,548,512	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	36,149,337	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	28,919,469	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	41,725,334	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				88 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		88 Orang	90,404,890	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				2 Lembaga	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Lembaga	22,346,863	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						678,205,817,899							230,024,952	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.05	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	26,025,119	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	6,321,797	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	7,887,128	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	97,630,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	11,173,431	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	9,858,910	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	5,779,334	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	7,229,867	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	13,985,286,424		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	6,583,028	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	20,254,551,832		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	7,836,938	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	545,935,229,643		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	141,329,400	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						700,000,000							303,741,282	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.06	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	43,375,199	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	139,084,446	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.06	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				88 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		88 Orang	121,281,637	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						2,557,000,000							1,734,852,499	
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah						2,557,000,000							1,734,852,499	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	42,583,217	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	253,006,457	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	56,278,940	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	73,014,085	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	38,712,015	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	38,712,015	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	38,712,015	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPД)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	854,112,017	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	159,238,924	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Dokumen	34,840,814	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	0				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Dokumen	267,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	38,712,015	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		50 Orang	106,929,985	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						2,144,000,000							1,230,291,052	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,944,000,000							1,152,867,022	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100,000,000							98,215,403	
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		100 Orang	98,215,403	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						335,000,000							310,164,471	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	25,343,232	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	28,202,431	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	38,447,372	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	16,895,488	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	8,363,267	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	192,912,681	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,230,000,000							432,178,278	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	380,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	235,747,473	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	196,430,805	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						279,000,000							312,308,870	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	3,121,441	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	168,954,879	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	39,704,397	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	100,528,153	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						200,000,000							77,424,030	
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah						200,000,000							77,424,030	
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	77,424,030	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						850,999,999							704,594,538	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						306,000,000							673,999,054	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						306,000,000							278,824,693	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	29,373,120	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	34,457,334	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	3,885,962	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	139,255,146	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	266,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	71,853,131	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0						196,430,805		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	196,430,805	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0							198,743,556	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	98,215,403	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	100,528,153	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						544,999,999							30,595,484	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						100,000,000							8,635,443	
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	8,635,443	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						444,999,999							21,960,041	
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	6,321,797	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	44,999,999		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	02	02	1.05	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	9,858,910	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	1.05	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				1 Laporan	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	5,779,334	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
TOTAL										763,154,051,759								83,850,716,516		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03					KEPEGAWAIAN						20,044,694,331								19,650,419,694			
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17,142,732,369								16,838,364,160			
5	03	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350,000,000								317,750,000			
5	03	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri			
5	03	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	16,750,000	Badan Kepegawaian dan Korpri			
5	03	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	134,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri			
5	03	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	67,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri			
5	03	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14,139,142,999								14,246,542,999			
5	03	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				92 Orang/ Bulan	13,564,714,149		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		92 Orang/ Bulan	13,564,714,149	Badan Kepegawaian dan Korpri			
5	03	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	534,428,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	534,428,850	Badan Kepegawaian dan Korpri			
5	03	01	1.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	67,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	40,000,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	80,400,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0								80,400,000	
5	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	33,500,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	13,400,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	33,500,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						205,090,000								418,750,000	
5	03	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit	33,500,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				51 Paket	55,090,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		51 Paket	33,500,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	50,250,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	67,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	33,500,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 5 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang 5 Orang	33,500,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang	67,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang	100,500,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						975,499,370							590,360,000	
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	9,380,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	14,740,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	72,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	48,240,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	16,750,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		50 Laporan	46,900,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	448,499,370		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		50 Laporan	194,300,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	10,050,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0								100,500,000	
5	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit	67,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	33,500,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						973,000,000								728,960,000	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	17,420,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	22,780,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	48,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	32,160,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	870,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	656,600,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						500,000,000								355,101,161	
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	430,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		10 Unit	249,701,161	Badan Kepegawaian dan Korpri	
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Unit	13,400,000	Badan Kepegawaian dan Korpri	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit	13,400,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit	20,100,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	33,500,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	25,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						2,901,961,962							2,812,055,534	
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						657,255,300							699,838,540	
5	03	02	1.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	36,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	144,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	36,600,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	36,600,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				120 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		120 Dokumen	44,400,000	Badan Kepegawaian dan Korpri

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	30,238,540	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Lembaga	53,300,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	42,030,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		3 Dokumen	138,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	57,255,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	68,670,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN						669,999,650							780,000,000	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				550 Dokumen	219,999,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		550 Dokumen	240,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1100 Laporan	205,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1100 Laporan	246,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				30 Dokumen	245,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		30 Dokumen	294,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN						864,707,012							1,036,649,376	
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	337,322,362		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	70,809,376	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				7 Dokumen	283,744,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		7 Dokumen	252,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	66,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN				0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang	66,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang	36,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	144,840,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang	48,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	36,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				126 Orang	243,640,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		126 Orang	36,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPД)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	96,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						710,000,000							295,567,618	
5	03	02	1.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	20,400,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	84,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				370 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		370 Orang	72,000,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				0 Orang	0				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang	0	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang	0	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				12 Laporan	160,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Laporan	50,400,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
5	03	02	1.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	37,567,618	Badan Kepegawaian dan Korpri

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	31,200,000	Badan Kepegawaian dan Korpri
TOTAL											20,044,694,331							19,650,419,694	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						13,202,841,398								11,148,144,434		
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	%		%	100 %	8,392,841,398						100 %	9,004,077,910			
1	05	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	300,000,000						100 %	430,000,000			
1	05	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	120,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Dokumen	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	0	80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	75,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	105,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	5,607,000,000						1 Tahun	5,637,000,000			
1	05	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/ Bulan	5,162,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	OPD	26 Orang/ Bulan	5,162,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	370,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	OPD	1 Dokumen	400,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	75,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	OPD	1 Laporan	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket		Paket	3 Paket	138,400,000							3 Paket	138,400,000	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	78,400,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	2 Paket	78,400,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	30,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	5 Orang	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	30,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	5 Orang	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	795,153,000							12 Bulan	1,151,579,600	
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Paket	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Paket	15,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	102,573,400	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Paket	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	65,603,600	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Paket	65,603,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Paket	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	20,976,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	20,976,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	510,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	840,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	150,000,000						12 Bulan	150,000,000	
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	2 Unit	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1,109,086,000						1 Tahun	1,137,098,310	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPД)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	27,720,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	27,720,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	119,496,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	130,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	47,508,310	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	931,870,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	931,870,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	293,202,398						12 Bulan	360,000,000	
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				32 Unit	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	OPD	32 Unit	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	OPD	0	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	30,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	OPD	25 Unit	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	30,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	OPD	10 Unit	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	83,202,398	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	OPD	4 Unit	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks Indeks Indeks		Indeks Indeks Indeks	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 Indeks	4,810,000,000						2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 Indeks	2,144,066,524	
1	05	03	1.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Terlaksananya penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	%	33.33 %	700,000,000						33.33 %	486,000,000	
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	600,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	1 Dokumen	400,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota				50 Orang	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	50 Orang	86,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	%		%	45.45 %	2,385,000,000						45.45 %	1,018,066,524	
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				50 Orang	250,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	50 Orang	95,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPД)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1 Dokumen	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	1 Dokumen	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana				50 Unit	450,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	50 Unit	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana				1 Dokumen	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	1 Dokumen	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				5 Kawasan	450,000,000	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Kepulauan Posek, Busung Panjang Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Temburun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	5 Kawasan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Terlaksananya Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana Tersusunnya Dokumen Pemulihan Pasca Bencana				2 Kegiatan 1 Dokumen	400,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	2 Kegiatan 1 Dokumen	185,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana				20 Orang	135,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	20 Orang	148,066,524	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi				1 Dokumen	300,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	1 Dokumen	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi				0 0	0	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	0 0	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi				1 Dokumen	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	1 Dokumen	130,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%		%	41.94 %	1,225,000,000						41.94 %	465,000,000	
1	05	03	1.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				0	0	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	0	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	525,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	1 Laporan	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			1 Laporan	100,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masyarakat	1 Laporan	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			350 Orang	500,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	350 Orang	165,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	1.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			0	0	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	0	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	05	03	1.03	06	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			1 Laporan	100,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	1 Laporan	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%		%	66.67 %	500,000,000					66.67 %	175,000,000		
1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
1	05	03	1.04	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	200,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	1 Dokumen	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan				1 Dokumen	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	1 Dokumen	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi				1 Laporan	100,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masarakat	1 Laporan	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
TOTAL												13,202,841,398								11,148,144,434		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
															Nasional	Daerah					
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						21,695,379,849		20,828,273,414							
5	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						13,977,379,849							12,303,273,414		
5	04	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						370,000,000							370,000,000		
5	04	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Rakor Kediklatan BPSDM Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan BPSDM yang disusun				1 Dokumen 2 Dokumen	310,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 2 Dokumen	310,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA BPSDM yang disusun				1 Dokumen	10,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA BPSDM yang disusun				1 Dokumen	10,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen DPA BPSDM yang disusun				1 Dokumen	10,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA BPSDM yang disusun				1 Dokumen	10,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPSDM yang disusun				1 Laporan	10,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Publik BPSDM				1 Laporan	10,000,000					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,814,123,414								8,814,123,414	
5	04	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan				45 Orang	8,564,123,414			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		45 Orang	8,564,123,414	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Pejabat Pengadaan				19 orang	210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		19 orang	210,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BPSDM yang disusun				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi BPSDM yang disusun				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BPSDM yang disusun				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran BPSDM yang disusun				3 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		3 Laporan	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						35,000,000							35,000,000	
5	04	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah BPSDM yang disusun				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah BPSDM yang disusun				1 Dokumen	5,000,000						1 Dokumen	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah BPSDM yang disusun				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada BPSDM				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada BPSDM				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BPSDM				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPSDM				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						120,000,000							130,000,000	
5	04	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	10,000,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Terselenggaranya PPK BLUD BPSDM				1 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 1 Dokumen	70,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						140,000,000							240,000,000	
5	04	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan				1 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan				1 Paket	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	80,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banyaknya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Orang	15,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Banyaknya Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				0 Orang 40 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang 40 Orang	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Banyaknya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				5 Orang	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Orang	15,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,071,006,435							985,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 Paket	386,006,435		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Paket	300,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	20,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dari Penggandaan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material				1 Paket	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	15,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang difasilitasi				1 Laporan	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	60,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPSDM				1 Laporan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	500,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis BPSDM				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada BPSDM yang dioperasikan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2,418,100,000							720,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
5	04	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan				5 Unit	1,378,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Unit	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Unit	200,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				1 Paket	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	45,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	65,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya				1 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	20,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit	350,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	20,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	20,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						824,150,000							824,150,000	
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik				1 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	15,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	20,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL yang dibayarkan Honorarium Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20 Orang	784,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		20 Orang	784,150,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						185,000,000							185,000,000	
5	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Perorangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pajak				1 Unit	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	45,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pajak dan Perizinan				1 Unit	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	35,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	15,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	15,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	30,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang mendapatkan				1 Ha	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Ha	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						7,718,000,000							8,525,000,000	
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis						2,335,000,000							2,949,000,000	
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Banyaknya Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Banyaknya Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Banyaknya Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Perangkat Daerah Penunjang				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	85,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5		04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Banyaknya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Banyaknya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Banyaknya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Perangkat Daerah Penunjang				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	165,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	165,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
5		04	02	1.01	03	Banyaknya ASN Kabupaten/kota yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Banyaknya ASN Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Banyaknya ASN Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Banyaknya ASN Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Banyaknya Non ASN Provinsi dan Kabupateen/Kota yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis																
										654 Orang							654 Orang					
										1095 Orang							1095 Orang					
										60 Orang	2,045,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Orang	2,659,000,000				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
										220 Orang							220 Orang					
										2060 Orang							2060 Orang					

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Banyaknya Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Banyaknya Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Banyaknya Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Perangkat Daerah Penunjang				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	40,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						5,383,000,000						5,576,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
5	04	02	1.02	01		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Kerjasama Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Pengelolaan Kelembagaan Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan (Manajerial & Sosiokultural) bagi Jabatan Administrasi Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Prajabatan Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sumber Belajar Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Tenaga Pengembang Kompetensi				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	200,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	150,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Jumlah ASN Provinsi yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi				393 Orang 4026 Orang	1,386,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		393 Orang 4026 Orang	1,626,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Dokumen Fasilitasi Publikasi Ilmiah Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Jumlah Penyediaan Sumber Belajar Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Mengikuti Kompetensi				1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 21 Orang	848,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 21 Orang	368,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Banyaknya MoU Berkaitan dengan Kerjasama dalam Pengembangan Diklat seperti Magang, Studi Banding, Lembaga Diklat lain (baik Milik Pemerintah dan Swasta)				2 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	30,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Banyaknya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Jabatan Fungsional Banyaknya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi				1 Dokumen 1 Dokumen	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 1 Dokumen	95,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5		04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Banyaknya ASN Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Prajabatan Banyaknya ASN Kabupaten / Kota yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Banyaknya ASN Kabupaten / Kota yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan (Manajerial & Sosiokultural) bagibagi Jabatan Administrasi Banyaknya ASN Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Banyaknya ASN Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Prajabatan Banyaknya ASN Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan (Manajerial & Sosiokultural) bagi Jabatan Administrasi			89 Orang 25 Orang 279 Orang 470 Orang 40 Orang 80 Orang	2,465,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		89 Orang 25 Orang 279 Orang 470 Orang 40 Orang 80 Orang	2,898,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5		04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Banyaknya Dokumen Pembinaan, Pengoordinasian, Pemantauan, Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Banyaknya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Banyaknya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Banyaknya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan			1 Dokumen 2 Orang 0 Orang 3 Orang 3 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	209,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 2 Orang 0 Orang 3 Orang 3 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	209,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

7/1/22, 4:36 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD

										Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023									
			Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan	Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
						(Manajerial & Sosiokultural) bagi Jabatan Fungsional Banyaknya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan (Manajerial & Sosiokultural) bagi Jabatan Administrasi Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengoordinasian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerjasama Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengoordinasian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengoordinasian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Kelembagaan dan Pelaporan Pengelolaan Sumber Belajar Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengoordinasian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi													
TOTAL										21,695,379,849								20,828,273,414	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						146,709,552,975								130,678,552,975		
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	40,009,210,554						100 %	40,026,210,554			
1	02	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,647,000,000							1,647,000,000			
1	02	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	75,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	75,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	200,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	150,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	412,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	412,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	150,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				54 Laporan	235,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		54 Laporan	235,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	425,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		20 Laporan	425,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22,653,187,000								22,653,187,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPД)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1428 Orang/ Bulan	20,559,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1428 Orang/ Bulan	20,559,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1,045,187,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	1,045,187,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	185,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	185,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	275,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	214,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	214,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,157,000,000							1,157,000,000	
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	225,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	97,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	97,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1,630,000,000							1,647,000,000	
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	467,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Dokumen	220,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	560,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		50 Orang	560,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				200 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		200 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		10 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,805,450,670							1,805,450,670	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	46,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	46,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	195,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	195,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	90,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	145,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	145,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	65,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	95,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	89,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	89,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	680,450,670		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	680,450,670	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3,341,420,000						3,341,420,000		
1	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	430,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	430,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	544,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Unit	544,320,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	350,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	350,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	567,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		4 Unit	567,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3 Unit	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3 Unit	450,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	650,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,643,400,500							3,643,400,500	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	253,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan	253,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	120,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3,200,200,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Laporan	3,200,200,500	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4,131,752,384							4,131,752,384	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		15 Unit	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		15 Unit	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				100 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		100 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 400 Unit	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Unit 400 Unit	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2,111,752,384		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	2,111,752,384	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu	% per 1.000 kematian per 100.000 Kematian % % %		% per 1.000 kematian per 100.000 Kematian % %	92 % 13 per 1.000 kematian 124 per 100.000 Kematian 68 % 43 %	82,548,319,266						92 % 13 per 1.000 kematian 124 per 100.000 Kematian 68 % 43 %	73,010,319,266	

									Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023												
		Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana			Prioritas			Target	Pagu Indikatif
																	Nasional	Daerah			
						Daud Status Akreditas RSUD Raja Ahmad Tabib															
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						50,049,076,566						44,401,076,566				
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	13,265,619,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	13,265,619,400	Dinas Kesehatan		
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	11,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	11,500,000,000	Dinas Kesehatan		
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	1,548,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan		
1	02	02	1.01	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dilakukan Pengembangan				1 Unit	758,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	758,160,000	Dinas Kesehatan		
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Layanan	800,000,000	Dinas Kesehatan		
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan				1 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				0 Unit 1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Unit 1 Unit	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1 Unit	3,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				16 Unit	12,927,297,166		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		16 Unit	9,427,297,166	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	1,600,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Unit	700,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara				2 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara				2 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Dokumen	950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		4 Dokumen	950,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				2 Paket	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Paket	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						26,787,042,700							22,897,042,700	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				4000 Orang	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		4000 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	2,700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1000 Orang	2,700,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				24 Dokumen	2,256,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		24 Dokumen	1,906,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				12 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Dokumen	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	3,457,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Dokumen	2,577,840,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				24 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		24 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				21 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		21 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 2 Dokumen	1,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Dokumen 2 Dokumen	800,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				3 Dokumen	550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3 Dokumen	550,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				17 Dokumen	3,750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		17 Dokumen	3,290,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				5 Dokumen	210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5 Dokumen	210,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis				45 Orang	217,102,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		45 Orang	217,102,700	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 Dokumen	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	6,919,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Dokumen	6,019,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				2 Dokumen	535,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Dokumen	535,600,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				2 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	206,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	206,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan				1 Dokumen	185,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	185,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						4,703,000,000							4,703,000,000	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				21 Dokumen	728,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		21 Dokumen	728,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia				7 Unit	3,875,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		7 Unit	3,875,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						1,009,200,000							1,009,200,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				2 Unit	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Unit	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				36 Unit	659,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		36 Unit	659,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib											70 %	16,475,784,605	
						Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	%	%	70 %	18,875,784,605							35 %		
						Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	%	35 %								54 %		
									54 %										
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						17,575,000,000							15,475,000,000	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				233 Orang	17,475,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		233 Orang	15,375,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				233 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		233 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						1,300,784,605							1,000,784,605	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				150 Orang	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		150 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	500,784,605		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	500,784,605	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%		%	87.00 %	250,000,000						87.00 %	250,000,000	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						150,000,000							150,000,000	
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan				29 Sarana	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		29 Sarana	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik				5 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						100,000,000							100,000,000	
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				1 Sarana	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Sarana	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%		%	71,43 %	5,026,238,550						71,43 %	916,238,550	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						3,226,238,550						566,238,550		
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				4 Dokumen	3,226,238,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		4 Dokumen	566,238,550	Dinas Kesehatan
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi						1,650,000,000							200,000,000	
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1,650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi						150,000,000							150,000,000	
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
TOTAL											146,709,552,975							130,678,552,975	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						904,985,873,080								701,056,640,355		
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	%		%	100 %	594,866,673,141							100 %	617,480,373,140		
1	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3,000,000,000								3,750,000,000		
1	01	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	750,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		4 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	750,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	750,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	750,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	750,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	750,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	750,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						429,426,227,188								429,676,227,188		
1	01	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3000 Orang/ Bulan	425,000,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3000 Orang/ Bulan	425,000,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	2,926,227,188			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	2,926,227,188	Dinas Pendidikan	
1	01	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	750,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pendidikan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	750,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	750,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,500,000,000							1,500,000,000	
1	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	500,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2,200,000,000							6,250,000,000	
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				315 Paket	950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		315 Paket	1,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				2 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Orang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		20 Orang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				25 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Orang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					15,400,000,000						25,000,000,000			
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		20 Paket	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	3,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		24 Paket	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Paket	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Paket	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				55 Paket	1,900,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		55 Paket	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Dokumen	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Paket	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10,700,000,001							19,500,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Paket	2,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		20 Paket	5,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	2,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		20 Unit	4,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		10 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	2,500,000,001		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		6 Unit	4,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				35 Unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		35 Unit	3,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		15 Unit	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						129,640,445,952							124,304,145,952	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	1,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	124,140,445,952		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	120,304,145,952	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,000,000,000						7,500,000,000			
1		01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		15 Unit	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1		01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3 Unit	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1		01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1,000,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3 Unit	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1		01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK													
							Angka partisipasi kasar (APK) SLB													
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%		%	99,08 %							99,08 %		
							Angka Partisipasi Murni (APM)	%		%	85,00 %							85,00 %		
							SMA/SMK/MA/MAK	%		%	98,50 %							98,50 %		
							Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%		%	79,00 %							79,00 %		
							SMA/SMK	%		%	100,00 %							100,00 %		
							Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%		%	0,37 %							0,37 %		
							Angka Putus Sekolah SMA/SMK	rasio		rasio	33,80 rasio							33,80 rasio		
							Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%		%	96,11 %							96,11 %		
						Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik														
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							174,555,423,772							35,186,448,706	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	28,000,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		3 Unit	6,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	31,490,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		10 Ruang	4,460,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun				1 Ruang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun				1 Ruang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun				2 Ruang	730,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun				1 Ruang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun				1 Ruang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun				1 Ruang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				9 Unit	10,446,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		9 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	16	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun				2 Ruang	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Parkir Sekolah di Provinsi Kepri				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				100 Paket	4,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		100 Paket	2,880,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlat Perlengkapan Sekolah di Provinsi Kepri				0 Paket 1 Paket	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Paket 1 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2500 Paket	7,900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2500 Paket	1,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				29 Unit	13,736,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		29 Unit	750,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5 Paket	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3000 Peserta didik	55,900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3000 Peserta didik	1,106,448,706	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				199 Satuan Pendidikan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		199 Satuan Pendidikan	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		500 Peserta Didik	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2991 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2991 Orang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	700,000,000						30 Orang	450,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				95 Satuan Pendidikan	4,778,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		95 Satuan Pendidikan	290,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				199 Satuan Pendidikan	6,375,123,772		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		199 Satuan Pendidikan	8,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				25 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Orang	50,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						105,622,400,000							29,449,600,000	
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				4 Unit	27,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		4 Unit	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	3,050,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				1 Ruang	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	3,505,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		4 Unit	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	1,000,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	10,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun				1 Ruang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	150,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	650,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5000 Paket	10,150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5000 Paket	5,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				8 Unit	2,646,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		8 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				8262 Peserta didik	40,900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		8262 Peserta didik	9,839,600,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	150,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	01	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Satuan Pendidikan	450,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				25 Satuan Pendidikan	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Satuan Pendidikan	450,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		500 Peserta Didik	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				150 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		150 Orang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Orang	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun				1 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	3,871,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5 Satuan Pendidikan	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				118 Satuan Pendidikan	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		118 Satuan Pendidikan	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				25 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Orang	50,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	01	02	1.02	53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus						27,682,080,000							16,958,000,000	
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	8,078,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Unit	6,078,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	803,880,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	09	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	01	02	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun				1 Ruang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	250,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	2,650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah kebutuhan Alat Praktik dan Peraga Peserta yang diadakan				1 Paket 1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket 1 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				625 Peserta Didik	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		625 Peserta Didik	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang terlayani dalam proses belajar, ujian dan Peserta Didik Baru (PPDB) PK se- Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				100 Orang 20 Satuan Pendidikan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		100 Orang 20 Satuan Pendidikan	200,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta didik yang mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pendidikan khusus se-provinsi kepri Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Orang 100 Peserta Didik	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		100 Orang 100 Peserta Didik	150,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				100 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		100 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah sekolah tersedia Dana Pelaksanaan Rutinitas Sekolah se-Provinsi Kepri dan UPT Pelayanan Disabilitas/PLA Batam di Provinsi Kepulauan Riau				8 Satuan Pendidikan 8 Sekolah	5,150,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		8 Satuan Pendidikan 8 Sekolah	280,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				10 Satuan Pendidikan	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		10 Satuan Pendidikan	5,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				25 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Orang	50,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
1	01	02	1.03	59	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan	
1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah SMK yang Terevitalisasi												27,03 %	368,376,891	
						Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%		%	27,03 %	419,869,200							60,50 %		
						Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%		%	30,50 %								30,50 %		
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						195,938,974								174,446,665	
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				1 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia				1 Buku	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Buku	30,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya				55 Orang	135,938,974		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		55 Orang	114,446,665	Dinas Pendidikan	
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						223,930,226								193,930,226	
1	01	03	1.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				1 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	03	1.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				1 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pendidikan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	03	1.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia				15 Buku	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		15 Buku	30,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya				25 Orang	133,930,226		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Orang	103,930,226	Dinas Pendidikan
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	rasio		rasio	726,42 rasio	1,639,489,253						726,42 rasio	1,438,424,051	
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi						1,639,489,253							1,438,424,051	
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	808,679,929		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	808,679,929	Dinas Pendidikan
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	830,809,324		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	629,744,122	Dinas Pendidikan
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%		%	100 %	199,937,714						100 %	175,417,567	
1	01	05	1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						80,937,714							80,000,000	
1	01	05	1.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	01	05	1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	40,937,714		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	05	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						119,000,000							95,417,567		
1	01	05	1.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	05	1.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 Dokumen	25,417,567	Dinas Pendidikan	
1	01	05	1.02	03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	39,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pendidikan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						18,000,000,000								25,542,922,517	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100,00 %	18,000,000,000						100,00 %	25,542,922,517		
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1,500,000,000							2,500,000,000		
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	2,500,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						7,000,000,000							12,500,000,000		
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5 Paket	500,000,000	Dinas Pendidikan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan				5 Paket	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5 Paket	2,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		15 Paket	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		15 Paket	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Paket	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 Paket	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		15 Paket	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8,000,000,000							8,000,000,000	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	3,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,500,000,000							2,542,922,517	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3 Unit	2,542,922,517	Dinas Pendidikan
TOTAL											922,985,873,080							726,599,562,872	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						50,472,688,030								41,205,656,409		
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	%		%	100 %	14,407,010,575						100 %	14,345,228,351			
2	16	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	150,000,000						100 %	102,201,600			
2	16	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	75,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	2 Dokumen	96,036,400	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	5 Laporan	6,165,200	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	9,785,091,885						100 %	9,264,872,085			
2	16	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/ Bulan	9,051,891,885	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	45 Orang/ Bulan	8,501,672,085	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan ASN yang menerima Administrasi Pelaksanaan tugas Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan 12 Dokumen	733,200,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	12 Bulan 12 Dokumen	763,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	152,551,790					100 %	152,551,790		
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket 230 Paket	112,531,790	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	0 Paket 230 Paket	112,531,790	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 3 Orang	40,020,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	0 Orang 3 Orang	40,020,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	623,966,900					100 %	602,247,600		
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	9,736,100	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	50 Paket	9,736,100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	10,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	3 Paket	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	29,812,100	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	20 Paket	30,966,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	110,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	300 Paket	73,732,800	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1200 Paket	46,232,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1200 Paket	48,090,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	31,465,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	23,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	386,721,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	406,721,700	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30,000,000							64,000,000	
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	30,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Unit	64,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	2,530,400,000						100 %	2,484,250,000	
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,380,400,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	2,334,250,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1,135,000,000						100 %	1,675,105,276	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			3 Unit	200,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	3 Unit	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 Unit 100 Unit	610,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	0 Unit 100 Unit	610,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Unit	815,105,276	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	275,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Unit	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	nilai %		nilai %	80 nilai 25 %	30,525,281,777					80 nilai 25 %	24,180,713,709		
2	16	02	1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai		Nilai	80 Nilai	30,525,281,777					80 Nilai	24,180,713,709		
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			12 Dokumen	525,400,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	12 Dokumen	225,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			12 Dokumen	1,867,831,071	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	12 Dokumen	1,867,831,071	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	3,843,152,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Dokumen	1,643,152,240	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				0 Dokumen 1 Dokumen	354,200,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	0 Dokumen 1 Dokumen	233,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				2 Layanan	16,948,220,548	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	2 Layanan	14,598,220,548	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	4,087,251,414	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Dokumen	3,837,251,414	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				75 Orang	1,225,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	75 Orang	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	984,350,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Dokumen	984,350,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	684,876,504	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Dokumen	761,308,436	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1 Unit	5,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Unit	5,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	% %		% %	25 % 100 %	5,540,395,678					25 % 100 %	2,679,714,349		
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi yang diselenggarakan secara daring denga memanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara	%		%	72 %	2,922,195,678					72 %	1,086,514,349		
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				4 Dokumen	36,400,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	4 Dokumen	36,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				41 Unit	2,885,795,678	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	41 Unit	1,050,114,349	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%		%	100 %	2,618,200,000					100 %	1,593,200,000		
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	25,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				3 Dokumen	350,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	3 Dokumen	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				41 Unit	490,200,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	41 Unit	490,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				2 Perangkat Daerah	102,550,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	2 Perangkat Daerah	102,550,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				13 Unit	1,500,450,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	13 Unit	850,450,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Layanan	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						256,212,351							179,897,951		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%		%	100 %	256,212,351							100 %	179,897,951	
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%		%	100 %								100 %		
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	%		%	100 %	256,212,351						100 %	179,897,951		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	119,547,951	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Dokumen	119,547,951	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	97,064,400	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Dokumen	23,750,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				10 Orang	39,600,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	10 Orang	36,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						426,131,331	215,114,135							
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	indeks KAMI		indeks KAMI	70.33 indeks KAMI	426,131,331						70.33 indeks KAMI	215,114,135	
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasia dan atau aplikasi persandian	%		%	94.74 %	344,731,331						94.74 %	122,416,931	
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	25,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	22,416,931	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	1 Laporan	22,416,931	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				41 Perangkat Daerah	297,314,400	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	41 Perangkat Daerah	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase titik yang diamankan berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%		%	100 %	81,400,000					100 %	92,697,204		
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				41 Perangkat Daerah	81,400,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	0	41 Perangkat Daerah	92,697,204	Dinas Komunikasi dan Informatika
TOTAL											51,155,031,712							41,600,668,495	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						48,992,616,220								37,884,958,357		
2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administarsi Kantor	%		%	100 %	28,609,544,675							100 %	27,755,002,703		
2	07	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						125,000,000								125,000,000		
2	07	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25,000,000							1 Dokumen	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	75,000,000							1 Laporan	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	25,000,000							1 Laporan	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22,560,308,074								23,811,171,447		
2	07	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ Bulan	21,602,908,074							105 Orang/ Bulan	22,954,531,447	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				31 Dokumen	857,400,000							31 Dokumen	756,640,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	25,000,000							1 Dokumen	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	25,000,000							1 Dokumen	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	25,000,000							1 Dokumen	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	25,000,000					1 Dokumen	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						160,000,000						250,000,000		
2	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	60,000,000					125 Paket	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 30 Orang	50,000,000					0 Orang 30 Orang	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50,000,000					50 Orang	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						821,979,001						924,927,151		
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	34,500,000					9 Paket	38,800,250	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,500,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	1 Paket	10,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	48,599,500				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	1 Paket	54,159,450	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	154,020,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	1 Paket	178,372,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	88,669,301				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	1 Paket	100,686,231	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	25,254,600				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	12 Dokumen	28,630,060	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83 Laporan	465,435,600				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		83 Laporan	513,779,160	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2,759,000,000							410,000,000	
2	07	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	180,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Paket	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	155,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		18 Unit	255,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2,374,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	80,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,726,259,800							1,861,581,525	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,250,000						1 Laporan	1,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	295,612,700				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	335,273,970	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	149,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	169,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,280,397,100				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	1,355,807,555	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						456,997,800							372,322,580	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	170,000,000					5 Unit	178,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	48,247,800				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Unit	53,822,580	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	120,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	118,750,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%		%	100 %	273,280,295						100 %	300,316,684	
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						273,280,295							300,316,684	
2	07	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro				100 Orang	273,280,295						100 Orang	300,316,684	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	% % %		% % %	56,41 % 8 % 45,45 %	15,200,000,000						56,41 % 8 % 45,45 %	5,850,034,727	
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						14,600,000,000							5,000,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				540 Orang	14,600,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		540 Orang	5,000,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja						200,000,000							200,000,000	
2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				40 LPK	200,000,000						40 LPK	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah						200,000,000							400,000,000	
2	07	03	1.03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				50 Perusahaan	200,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		50 Perusahaan	400,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi						200,000,000							250,034,727	
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				100 Dokumen	200,000,000						100 Dokumen	250,034,727	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	% %		% %	62,00 % 67,57 %	2,077,000,000						62,00 % 67,57 %	1,982,058,448	
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota						868,000,000							1,205,004,532	
2	07	04	1.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya				30 Orang	109,000,000						30 Orang	69,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				500 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		500 Orang	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				500 Orang	350,000,000						500 Orang	568,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	04	1.01	04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				30 Orang	109,000,000					30 Orang	69,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				80 Orang	200,000,000					80 Orang	399,004,532	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						309,000,000						279,000,000		
2	07	04	1.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi				10 Lembaga	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	10 Lembaga	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	04	1.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku				10 Lembaga	109,000,000					10 Lembaga	79,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						250,000,000						228,969,286		
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				500 Orang	150,000,000					500 Orang	75,969,286	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1250 Orang	100,000,000					1250 Orang	153,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi						450,000,000						110,542,315		
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				20 Orang	150,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	20 Orang	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	07	04	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online				10 Perusahaan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		10 Perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA				0 Orang 100 Orang	150,000,000							0 Orang 100 Orang	110,542,315	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200,000,000							158,542,315		
2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				50 Orang	200,000,000							50 Orang	158,542,315	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	% %		% %	40 % 100 %	1,143,034,602							40 % 100 %	986,852,603	
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota						100,000,000							100,000,000		
2	07	05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online				50 Perusahaan	25,000,000							50 Perusahaan	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	05	1.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online				50 Perusahaan 50 Perusahaan	25,000,000					50 Perusahaan 50 Perusahaan	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				5 Laporan	50,000,000					5 Laporan	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						537,967,897						501,785,898		
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				3 Perkara	120,000,000					3 Perkara	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	10,000,000					10 Perkara	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				8 Lembaga	307,967,897					8 Lembaga	306,785,898	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	05	1.02	05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				50 Perusahaan	100,000,000					50 Perusahaan	85,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)						505,066,705						385,066,705			
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	224,138,204						1 Surat Keputusan	164,138,204	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	05	1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK				7 Surat Keputusan	265,928,501						7 Surat Keputusan	205,928,501	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	05	1.03	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				50 Orang	15,000,000						50 Orang	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani														
						Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%		%	76 %								76 %		
						Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%		%	95,5 %	1,689,756,648							95,5 %	1,010,693,192	
							%		%	12,8 %								12,8 %		
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						1,689,756,648							1,010,693,192		
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				200 Perusahaan	647,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		200 Perusahaan	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				25 Kasus	492,756,648				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Kasus	310,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				65 Perusahaan	550,000,000				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		65 Perusahaan	350,693,192	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						355,035,091						393,787,248			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	%		%	33,3 %	98,853,531					33,3 %	116,877,790		
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						98,853,531						116,877,790		
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	51,853,531					1 Dokumen	60,877,790	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				1 Kawasan Transmigrasi	47,000,000					1 Kawasan Transmigrasi	56,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%		%	28,7 %	74,426,765					28,7 %	83,438,895		
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						74,426,765						83,438,895		
3	32	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	74,426,765					1 Laporan	83,438,895	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%		%	12,5 %	181,754,795					12,5 %	193,470,563		
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan						181,754,795						193,470,563		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				20 Kepala Keluarga	51,000,000					20 Kepala Keluarga	53,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				2 Satuan Permukiman	130,754,795					2 Satuan Permukiman	140,470,563	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						2,904,535,415						2,679,785,415		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administراس Kantor	%		%	100 %	344,050,000						100 %	919,300,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						39,500,000							39,500,000	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3,500,000						3 Paket	3,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000						1 Paket	2,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,000,000						1 Paket	3,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,000,000						1 Paket	6,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,500,000						1 Paket	6,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,500,000						1 Dokumen	3,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	15,000,000						3 Laporan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60,000,000							210,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10,000,000					2 Unit	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0					0 Unit	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50,000,000					1 Unit	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						146,050,000						146,300,000		
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	250,000					1 Laporan	500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	35,000,000					1 Laporan	35,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10,000,000					1 Laporan	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100,800,000					1 Laporan	100,800,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						98,500,000						523,500,000		
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 1 Unit	3,500,000					0 Unit 1 Unit	3,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000					1 Unit	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 1 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Unit 1 Unit	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	% % %		% % %	56,41 % 8 % 45,45 %	2,560,485,415						56,41 % 8 % 45,45 %	1,760,485,415	
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						2,410,485,415							1,610,485,415	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				192 Orang	1,760,485,415				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		192 Orang	960,485,415	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				4 Lembaga	150,000,000						4 Lembaga	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03	1.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				3 Unit	500,000,000						3 Unit	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah						150,000,000							150,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	07	03	1.03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				50 Perusahaan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		50 Perusahaan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						232,059,145								197,059,145		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	92,302,497						100 %	92,302,497			
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						38,002,497							38,002,497			
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2,002,497						2 Paket	2,002,497	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000						1 Paket	1,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,500,000						1 Paket	1,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,500,000						1 Paket	3,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000						1 Paket	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,000,000						1 Dokumen	2,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	18,000,000						4 Laporan	18,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10,000,000							10,000,000			
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10,000,000						2 Unit	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42,800,000							42,800,000			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500,000					1 Laporan	500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	11,000,000					1 Laporan	11,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6,000,000					1 Laporan	6,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	25,300,000					1 Laporan	25,300,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,500,000						1,500,000		
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara				1 Unit 0 Unit	1,500,000					1 Unit 0 Unit	1,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	% % %		% % %	76 % 95,5 % 12,8 %	139,756,648					76 % 95,5 % 12,8 %	104,756,648		
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						139,756,648						104,756,648		
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				100 Perusahaan	47,000,000					100 Perusahaan	22,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				5 Kasus	42,756,648					5 Kasus	42,756,648	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				30 Perusahaan	50,000,000					30 Perusahaan	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						630,712,000							459,712,000	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	254,712,000						100 %	254,712,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						55,000,000							55,000,000	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3,000,000						4 Paket	3,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000						1 Paket	1,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,500,000						1 Paket	2,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000						1 Paket	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,000,000						1 Paket	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,000,000						1 Dokumen	3,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	25,000,000						5 Laporan	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25,000,000							25,000,000	
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	25,000,000						3 Unit	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						172,212,000							172,212,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500,000					1 Laporan	500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	55,000,000					1 Laporan	55,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15,000,000					1 Laporan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	101,712,000					1 Laporan	101,712,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,500,000						2,500,000		
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 1 Unit	2,500,000					0 Unit 1 Unit	2,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	% % %		% % %	76 % 95,5 % 12,8 %	376,000,000					76 % 95,5 % 12,8 %	205,000,000		
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						376,000,000						205,000,000		
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				250 Perusahaan	226,000,000					250 Perusahaan	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				20 Kasus	50,000,000					20 Kasus	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				70 Perusahaan	100,000,000					70 Perusahaan	80,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
TOTAL											53,114,957,871								41,615,302,165	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						19,372,967,695								15,141,643,990		
3	30	02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						461,441,260							450,950,053			
3	30	02	1.01			Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor						250,000,000							250,000,000			
3	30	02	1.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	250,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	02	1.03			Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar						100,000,000							100,000,000			
3	30	02	1.03	03		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	02	1.04			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						111,441,260							100,950,053			
3	30	02	1.04	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				4 Dokumen	111,441,260		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	100,950,053	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						5,142,383,004							8,944,904,353			
3	30	03	1.01			Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						5,142,383,004							8,944,904,353			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3		30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1 Laporan 0 Unit	4,192,382,997		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan 0 Unit	7,994,904,353	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3		30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 Laporan	950,000,007		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	950,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3		30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						1,655,685,495							1,237,239,107	
3		30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						400,000,000							360,000,000	
3		30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Rekapitulasi Laporan Ketersediaan Bapok Tingkat Provinsi Kepri				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	180,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3		30	04	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Rekapitulasi Laporan Ketersediaan Banting Tingkat Provinsi Kepri				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	180,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3		30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						1,000,000,010							680,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	180,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				3 Laporan	800,000,010		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	500,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya						255,685,485							197,239,107	
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	255,685,485		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	197,239,107	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						9,111,768,746							1,805,700,318	
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						9,111,768,746							1,805,700,318	
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				4 Pelaku Usaha	7,150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Pelaku Usaha	300,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal				6 Pelaku Usaha	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Pelaku Usaha	300,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				88 Pelaku Usaha	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				88 Pelaku Usaha	300,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				8 Produk	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Produk	500,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				33 Pelaku Usaha	661,768,746		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33 Pelaku Usaha	405,700,318	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						2,012,405,188							1,800,000,000	
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						930,000,000							600,000,000	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				2 BPSK	680,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 BPSK	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				100 Pengaduan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Pengaduan	400,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						582,405,188							800,000,000	
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau				5 Komoditi	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Komoditi	400,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	400,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				0 Sertifikat	82,405,188		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Sertifikat	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						500,000,000							400,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				1 Laporan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	400,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						989,284,002							902,850,159		
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri						200,000,000							200,000,000		
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri				2 UMKM	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 UMKM	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri						200,000,000							200,000,000		
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				3 UMKM	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 UMKM	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						589,284,002							502,850,159		
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	302,850,159	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				1 Dokumen	389,284,002		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						27,254,304,434							17,673,429,055		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPД)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14,844,975,092						15,366,462,000		
3	31	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,000,000,000						1,000,000,000		
3	31	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	350,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	75,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	75,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	500,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,379,975,092							9,201,462,000	
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/ Bulan	7,179,975,092		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42 Orang/ Bulan	8,001,462,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						450,000,000							450,000,000	
3	31	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Peserta Atribut Kelengkapan				170 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				170 Paket	150,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	150,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				5 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Orang	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,705,000,000							1,405,000,000	
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	300,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	30,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	900,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						250,000,000							250,000,000	
3	31	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,760,000,000							2,760,000,000	
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	10,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	2,600,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						300,000,000							300,000,000	
3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	150,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 70 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit 70 Unit	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						11,652,848,304							1,972,894,792	
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						11,652,848,304							1,972,894,792	
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	9,350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	750,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	951,000,003		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	501,848,301		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	422,894,792	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						656,481,038							234,072,263	
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						656,481,038							234,072,263	
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Industri yang terfasilitasi				1 Industri	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Industri	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	306,481,038		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	134,072,263	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						100,000,000							100,000,000		
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						100,000,000							100,000,000		
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
TOTAL											46,627,272,129								32,815,073,045	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						73,920,970,254								56,753,668,816		
2	19	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	27,400,098,634						100 %	36,187,528,228			
2	19	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200,000,000							345,000,000			
2	19	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen 1 Laporan	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen 1 Laporan	95,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
2	19	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya survei, verifikasi dan monitoring SKPD				1 Laporan 1 Dokumen	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan 1 Dokumen	250,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
2	19	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14,756,150,244							22,549,775,133			
2	19	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN				41 Orang/ Bulan 14 Bulan	13,640,332,244	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		41 Orang/ Bulan 14 Bulan	21,256,911,133	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
2	19	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersusun Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan 1 Dokumen	1,066,776,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Bulan 1 Dokumen	1,197,864,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD umlah laporam keuangan yang tersusun				1 Laporan 1 Dokumen	49,042,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan 1 Dokumen	95,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						270,000,000							388,800,000	
2	19	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah pembayaran gaji pengamanan barang milik daerah				1 Dokumen 12 Bulan	270,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 12 Bulan	388,800,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1,092,383,000							758,500,000	
2	19	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah pemenuhan kebutuhan pakaian Dinas ASN				0 Paket 5 Paket 269 Stel	543,501,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Paket 5 Paket 269 Stel	508,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal ASN				0 Orang 41 Orang 12 Bulan	548,882,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Orang 41 Orang 12 Bulan	250,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						3,352,279,450							3,445,000,000	
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah pemenuhan kebutuhan fasilitas kantor				7 Paket 12 Bulan	809,702,900	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Paket 12 Bulan	500,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga				7 Paket 12 Bulan	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		7 Paket 12 Bulan	130,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah pemenuhan kebutuhan logistik kantor				4 Paket 12 Bulan	200,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		4 Paket 12 Bulan	170,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan				2 Paket 12 Bulan	301,307,500	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket 12 Bulan	650,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1 Dokumen 12 Bulan	44,940,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen 12 Bulan	45,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah pemenuhan kebutuhan tamu				12 Laporan 12 Bulan	201,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan 12 Bulan	1,000,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				12 Laporan 12 Bulan	1,645,329,050	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan 12 Bulan	800,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tersedianya sistem informasi berbasis elektronik				1 Dokumen 12 Bulan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen 12 Bulan	150,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3,280,301,940						3,170,299,095		
2	19	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	800,443,100					2 Unit	800,443,100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah pemenuhan kebutuhan fasilitas kantor				2 Paket 6 Unit	810,002,845	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Paket 6 Unit	700,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	280,691,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	280,691,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1,389,164,995	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5 Unit	1,389,164,995	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,016,130,000						4,097,300,000		
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat				12 Laporan 12 Bulan	310,180,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan 12 Bulan	172,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				1 Laporan 12 Bulan	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan 12 Bulan	900,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 Laporan 12 Bulan	190,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan 12 Bulan	190,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya gaji PTT				12 Laporan 13 Bulan	1,665,950,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Laporan 13 Bulan	2,835,300,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,432,854,000							1,432,854,000	
2	19	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Bulan 18 Unit	448,190,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Bulan 18 Unit	448,190,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah aset yang dipelihara				0 Unit 1 Unit 12 Bulan	984,664,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Unit 1 Unit 12 Bulan	984,664,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	% %		% %	0,31 % 5,05 %	5,364,701,500						0,31 % 5,05 %	3,587,907,231	
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						5,214,701,500							3,237,907,231	
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				120 Orang	600,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		120 Orang	650,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				60 Orang	350,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		60 Orang	517,581,446	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				210 Orang	1,550,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		210 Orang	517,581,446	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Jumlah peserta pasukan pengibar bendera tingkat provinsi dan pasukan pengibar bendera yang dikirim ke tingkat nasional				75 Orang 40 Orang	1,900,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		75 Orang 40 Orang	752,744,339	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi Jumlah tenaga kepemudaan tingkat provinsi, kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pembahasan rumusan rencana aksi daerah pelayanan kepemudaan				2 Dokumen 30 Orang	464,703,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Dokumen 30 Orang	400,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	19	02	1.01	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota				30 Orang 30 Orang	299,998,400	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		30 Orang 30 Orang	400,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi						150,000,000							350,000,000	
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	350,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	% % % Medali		% % % Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	40,406,170,120						0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	16,901,272,261	
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						23,705,000,000							6,101,272,261	
2	19	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				3 Unit	3,110,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3 Unit	3,000,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				1 Dokumen	2,210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia				3 Unit 3 Unit	18,385,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3 Unit 3 Unit	3,101,272,261	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga						5,865,000,000							7,200,000,000	
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi				2 Dokumen	3,565,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Dokumen	3,500,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi				1 Dokumen	900,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah peroleh medali Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event				5 Medali 132 Orang	1,400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5 Medali 132 Orang	3,200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional						1,400,000,000							1,800,000,000	
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				9 Pelatda	800,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		9 Pelatda	800,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	jumlah atlet berprestasi provinsi yang menerima penghargaan Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan				25 Orang 5 Orang	400,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		25 Orang 5 Orang	500,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	200,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						9,436,170,120							1,800,000,000	
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan				1 Dokumen	888,000,120		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Peserta Senam Sehat dan Bersepeda Bersama				2 Dokumen 2000 Orang	8,548,170,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Dokumen 2000 Orang	600,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	%		%	9,63 %	750,000,000						9,63 %	76,961,096	
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						750,000,000							76,961,096	
2	19	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Dokumen	9,620,137	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Organisasi	9,620,137	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	19	04	1.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	9,620,137	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	04	1.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				60 Orang	250,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		60 Orang	9,620,137	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah kwartir yang difasilitasi dalam pengembangan kapasitas kepramukaan Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi				15 Kwartir 0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		15 Kwartir 0 Laporan	9,620,137	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	04	1.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	9,620,137	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	04	1.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	9,620,137	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	04	1.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				7 Organisasi	350,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		7 Organisasi	9,620,137	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
TOTAL											73,920,970,254							56,753,668,816		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						146,194,662,576								60,182,202,737		
3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI						28,914,698,001							30,020,858,848			
3	25	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						482,208,000							479,000,000			
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun					1 Dokumen 1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja serta Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Dokumen 1 Laporan	97,208,000				Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 1 Laporan	99,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Dokumen 1 Laporan	185,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 1 Laporan	180,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							22,791,490,001							23,221,858,848			
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangang ASN					1372 Orang/ Bulan 14 Bulan	21,276,490,001		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1372 Orang/ Bulan 14 Bulan	21,701,858,848	Dinas Kelautan dan Perikanan		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pemenuhan Adm.Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen 12 Bulan	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 12 Bulan	1,500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan 1 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan 1 Laporan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						25,000,000							25,000,000	
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD				1 Dokumen 1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 1 Laporan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1,000,000,000							300,000,000	
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang dididik dan di latih Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang 0 Orang 18 Orang	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		18 Orang 0 Orang 18 Orang	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						321,000,000							375,000,000	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Unit/Barang /Paket 1 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		8 Unit/Barang /Paket 1 Paket	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor				1 Paket 10 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket 10 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Paket 12 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket 12 Unit	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				0 Paket 12 Eksemplar	11,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 Paket 12 Eksemplar	60,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Kunjungan 1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Kunjungan 1 Laporan	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah				1 Laporan 12 Rapat/ Konsultasi	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan 12 Rapat/ Konsultasi	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						320,000,000							495,000,000	
3	25	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan				1 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit 1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit 1 Unit	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket/Unit 1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Paket/Unit 1 Paket	80,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Paket/Unit 4 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Paket/Unit 4 Unit	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,860,000,000							5,065,000,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat				1 Laporan 12 Bulan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan 12 Bulan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Laporan 12 Bulan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan 12 Bulan	45,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Laporan 12 Bulan	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan 12 Bulan	1,500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)				1 Laporan 12 Bulan	3,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan 12 Bulan	3,500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115,000,000							60,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				8 Unit 8 Unit	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		8 Unit 8 Unit	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan				12 Unit 12 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit 12 Unit	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan				3 Unit 12 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Unit 12 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi				2 Unit 12 Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Unit 12 Unit	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						5,393,705,868							6,342,054,194	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						2,450,000,000							3,092,054,194	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K Jumlah Dokumen Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut				1 Dokumen 1 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 1 Dokumen	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Koservasi Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				5 Kawasan 1211362.95 Ha	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Kawasan 1211362.95 Ha	750,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan konservasi yang dikelola Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				1 Kawasan 363408.89 Ha	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Kawasan 363408.89 Ha	1,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Pemetaan Kawasan Rawan Bencana di WP3K Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				5 Dokumen 50 Orang	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Dokumen 50 Orang	842,054,194	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						1,000,000,000							1,000,000,000	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut				100 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		100 Dokumen	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan Reklamasi				50 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		50 Dokumen	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.02	05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Data dan Informasi Izin Lokasi Perairan dalam sistem Kadaster				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						1,943,705,868							2,250,000,000	
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				150 Orang 0 Orang	1,343,705,868		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		150 Orang 0 Orang	2,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil				1 Paket	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersosialisasinya Peraturan terkait Pemanfaatan Ruang Laut				1 Paket	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						76,364,801,284							13,305,523,749	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						34,774,801,284							8,778,200,000	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tangkap				1 Dokumen 19 Dokumen	730,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 19 Dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang menguasai teknologi penangkapan Ikan Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Rekomendasi BBM bersubsidi/SPDN, Pelaku usaha perikanan tangkap terbina				50 Orang 1 Unit 400 Dokumen, Kelompok	4,825,301,284		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		50 Orang 1 Unit 400 Dokumen, Kelompok	400,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan Jumlah Sarana peningkatan usaha perikanan tangkap skala kecil (bot pancung, mesin tempel, mesin ketinting, sampan bahan fibre glass, sampan dayung kayu dan peralatan pendukung lainnya Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Unit Kapal (Perahu Penangkapan Ikan)				11.53 Unit/Paket 1.656 Unit/Paket 9000 Unit 97 Unit/Paket	29,219,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		11.53 Unit/Paket 1.656 Unit/Paket 9000 Unit 97 Unit/Paket	8,178,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						300,000,000							127,323,749	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Petugas Cek Fisik Kapal yang dilatih Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				4 Orang 350 Dokumen 350 Rekomendasi	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		4 Orang 350 Dokumen 350 Rekomendasi	127,323,749	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil						150,000,000						150,000,000		
3	25	03	1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap yang diterbitkan Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				120 Dokumen 120 Rekomendasi	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		120 Dokumen 120 Rekomendasi	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						750,000,000						550,000,000		
3	25	03	1.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Peraturan, Pergub dan Juknis, SOP Pelaksanaan yang ditetapkan Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1200 Dokumen 2 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1200 Dokumen 2 Dokumen	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dokumen TDKP yang diterbitkan Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				750 Dokumen 750 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		750 Dokumen 750 Dokumen	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						39,490,000,000						2,800,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah dokumen Master Plan -Surat Penetapan Lokasi-Revieu DED,UKL-UPL yang dikeluarkan Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				3 Dokumen 2 Pelabuhan Perikanan	1,190,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Dokumen 2 Pelabuhan Perikanan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				5 Paket 2 Unit	38,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Paket 2 Unit	2,500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terbina dan terlayani				1 Layanan 3 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Layanan 3 Unit	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						150,000,000							150,000,000	
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah PPKP dan TDKP yang diterbitkan Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan				75 Dokumen 75 Rekomendasi	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		75 Dokumen 75 Rekomendasi	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						750,000,000							750,000,000	
3	25	03	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan dan Pembuatan Buku Kapal Perikanan Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				800 Dokumen 800 Rekomendasi	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		800 Dokumen 800 Rekomendasi	750,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						25,423,719,819							9,200,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						400,000,000						0		
3	25	04	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				2 Rekomendasi	200,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Rekomendasi	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				20 Rekomendasi	200,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Rekomendasi	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						0							200,000,000	
3	25	04	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pergub SOP/Juknis Prosedur Penetapan Izin Usaha Bidang Perikanan Budidaya Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				1 Dokumen 0 Rekomendasi	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 0 Rekomendasi	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah izin atau rekomendasi teknis di bidang pembudidayaan ikan untuk unit usaha pembudidayaan ikan yang memenuhi persyaratan Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				20 Dokumen 0 Rekomendasi	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Dokumen 0 Rekomendasi	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						400,000,000						400,000,000		
3	25	04	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Pergub SOP/Juknis Prosedur Penetapan Izin Usaha Bidang Perikanan Budidaya Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				1 Dokumen 2 Rekomendasi	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 2 Rekomendasi	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi izin kapal angkut hasil perikanan budidaya laik operasi yang diterbitkan Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				20 Dokumen 2 Rekomendasi	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Dokumen 2 Rekomendasi	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						200,000,000						200,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3		25	04	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) / pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan penertiban Tanda Daftar Pembudiaya Ikan Kecil Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen 2 Rekomendasi	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 2 Rekomendasi	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					24,423,719,819						8,400,000,000		
3		25	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen yang berisi data dan informasi tentang keragaan perikanan budidaya (luasan pemanfaatan lahan dan sarana prasarana perikanan budidaya, produksi, dll)				1 Dokumen 2 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 2 Dokumen	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah unit prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha komoditas baru perikanan budidaya yang tersedia Jumlah unit prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha komoditas baru perikanan budidaya yang tersedia				20 Unit 37 Unit 100 Unit	12,630,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Unit 37 Unit 100 Unit	4,500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah paket sarana perikanan budidaya guna menjamin pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				7 Paket 100 Unit	8,544,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		7 Paket 100 Unit	1,900,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat jumlah kawasan perairan/ lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan (2) Jumlah unit usaha budidaya perikanan yang terkendali hama penyakit ikan dan obat-obatan jumlah kawasan perairan/ lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan (2) Jumlah unit usaha budidaya perikanan yang terkendali hama penyakit ikan dan obat-obatan				1 Dokumen 3 Klaster 5 Kawasan	1,205,971,319		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 3 Klaster 5 Kawasan	1,500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
															Nasional	Daerah					
3		25	04	1.05	08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok yang terbina melalui peningkatan kualitas dan manajemen usaha kelompok Jumlah unit budidaya yang mendapat penerapan teknologi perikanan budidaya Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi				100 kelompok 17 unit 0 Ha 5 Ha	1,543,748,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		100 kelompok 17 unit 0 Ha 5 Ha	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3		25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						770,357,327							801,697,527		
3		25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						770,357,327							801,697,527		
3		25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				30 Kawasan (%) 1 Dokumen	620,357,327		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (%) 1 Dokumen	626,697,527		Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil				1 Dokumen 30 Kawasan (%)	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 30 Kawasan (%)	75,000,000		Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil				1 Dokumen 30 Kawasan (%)	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 30 Kawasan (%)	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS				100 Kelompok 100 Kelompok	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		100 Kelompok 100 Kelompok	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						9,327,380,277							512,068,419	
3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						307,725,277							277,725,277	
3	25	06	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan perikanan (SIPPHP) yang diterbitkan Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				80 SIPPHP 80 Rekomendasi	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		80 SIPPHP 80 Rekomendasi	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan perikanan (SKP) yang diterbitkan				0 Dokumen 2 Dokumen 45 GMP	157,725,277		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 Dokumen 2 Dokumen 45 GMP	127,725,277	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						225,000,000							125,000,000	
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah produk usaha yang memperoleh pembinaan mutu dan keamanan Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				2 Event/Kegiatan 21 Unit Usaha	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Event/Kegiatan 21 Unit Usaha	125,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					8,794,655,000						109,343,142			
3	25	06	1.03	01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tersedianya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Pengolahan dan Distribusi Ikan				1 Dokumen 1 Dokumen	7,700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang memperoleh bahan baku industri pengolahan ikan Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				236 Kelompok 5 Unit Usaha	1,094,655,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		236 Kelompok 5 Unit Usaha	109,343,142	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1,392,500,000							1,742,500,000	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						442,500,000						657,500,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						64,000,000						84,000,000		
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3 Unit/Barang /Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Unit/Barang /Paket	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor				5 Unit	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Unit	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				1 Paket 12 Eksemplar	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket 12 Eksemplar	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				12 Kunjungan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Kunjungan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah				12 Rapat/ Konsultasi	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Rapat/ Konsultasi	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60,000,000							95,000,000	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor				1 Paket/Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket/Unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				3 Paket/Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Paket/Unit	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Paket	20,000,000				Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						306,000,000							466,000,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat				12 Bulan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)				12 Bulan	290,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	450,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12,500,000							12,500,000	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan				2 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan				12 Unit	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	2,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						200,000,000							200,000,000	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						200,000,000							200,000,000	
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Orang	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						350,000,000							400,000,000	
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						200,000,000							200,000,000	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dokumen TDKP yang diterbitkan				500 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		500 Dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						150,000,000						200,000,000		
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah unit kapal perikanan yang dilakukan pelayanan cek fisik kapal perikanan untuk perizinan usaha perikanan				150 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		150 Dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						100,000,000						100,000,000		
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						100,000,000						100,000,000		
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah TDPIK yang diterbitkan				10 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Dokumen	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						300,000,000						385,000,000		
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						300,000,000						385,000,000		
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil				30 Kawasan (persen)	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	185,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil				30 kawasan (persen)	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 kawasan (persen)	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil				30 Kawasan (persen)	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS				20 Kelompok	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Kelompok	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2,005,500,000						2,180,500,000		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						855,500,000							930,500,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						64,000,000							84,000,000	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3 Unit/Barang /Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit/Barang /Paket	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor				5 Unit	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Unit	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Unit	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Eksemplar	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Eksemplar	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				12 Kunjungan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Kunjungan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah				12 Rapat/ Konsultasi	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Rapat/ Konsultasi	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100,000,000							105,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor				1 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor				1 Paket/Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket/Unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				3 Paket/Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Paket/Unit	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Pendukung Kantor dan Bangunan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Paket 1 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket 1 Unit	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						669,000,000							719,000,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat				12 Bulan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	17,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	17,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)				12 Bulan	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	700,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22,500,000							22,500,000	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan				2 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan				12 Unit	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	2,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi				2 Unit 12 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Unit 12 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						200,000,000							200,000,000	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						200,000,000							200,000,000	
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Orang	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						400,000,000							450,000,000	
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						250,000,000							250,000,000	
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dokumen TDKP dan TDPIK yang diterbitkan				500 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500 Dokumen	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						150,000,000						200,000,000			
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah unit kapal perikanan yang dilakukan pelayanan cek fisik kapal perikanan untuk perizinan usaha perikanan				150 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		150 Dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						200,000,000							200,000,000		
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						200,000,000							200,000,000		
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah TDPIK yang diterbitkan					20 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						350,000,000							400,000,000		
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						350,000,000							400,000,000		
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil					30 Kawasan (persen)	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil				30 Kawasan (persen)	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil				30 Kawasan (persen)	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS				20 Kelompok	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Kelompok	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1,742,824,000							1,912,824,000	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						692,824,000							767,824,000	
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10,000,000							10,000,000	
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						64,000,000							84,000,000	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3 Unit/Barang /Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Unit/Barang /Paket	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor				5 Unit	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Unit	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Eksemplar	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Eksemplar	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas				12 Kunjungan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Kunjungan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah				12 Rapat/ Konsultasi	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Rapat/ Konsultasi	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						95,000,000							100,000,000	
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor				1 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor				1 Paket/Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket/Unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				1 Paket/Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket/Unit	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Pendukung Kantor dan Banguna				1 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						491,324,000							541,324,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat				12 Bulan	1,324,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	1,324,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	90,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)				12 Bulan	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	450,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32,500,000							32,500,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaiki sedang/berat dan dibayar pajak tahunannya				3 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan				2 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan				12 Unit	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	2,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi				12 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						200,000,000							200,000,000	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						200,000,000							200,000,000	
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Orang	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						400,000,000							425,000,000	
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						250,000,000							250,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dokumen TDKP yang diterbitkan				1500 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1500 Dokumen	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						150,000,000							175,000,000	
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah unit kapal perikanan yang dilakukan pelayanan cek fisik kapal perikanan untuk perizinan usaha perikanan				150 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		150 Dokumen	175,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						100,000,000							100,000,000	
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						100,000,000							100,000,000	
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah TDPIK yang diterbitkan				10 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		10 Dokumen	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						350,000,000							420,000,000	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						350,000,000							420,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil				30 Kawasan (persen)	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil				30 Kawasan (persen)	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil				30 Kawasan (persen)	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS				20 Kelompok	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Kelompok	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2,407,500,000							2,587,500,000		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,207,500,000							1,272,500,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						64,000,000							84,000,000		
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3 Unit/Barang /Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Unit/Barang /Paket	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor				5 Unit	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Unit	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 Eksemplar	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Eksemplar	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				12 Kunjungan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Kunjungan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah				12 Rapat/ Konsultasi	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Rapat/ Konsultasi	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						70,000,000							75,000,000	
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit 0 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit 0 Unit	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor				1 Paket/Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket/Unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				3 Paket/Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Paket/Unit	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,051,000,000							1,091,000,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat				12 Bulan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)				12 Bulan	1,010,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	1,050,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22,500,000							22,500,000	
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaiki sedang/berat dan dibayar pajak tahunannya				3 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan				12 Unit	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	2,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi				12 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						200,000,000							200,000,000	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						200,000,000							200,000,000	
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Orang	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						500,000,000							525,000,000	
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						350,000,000							350,000,000	
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dokumen TDKP dan TDPIK yang diterbitkan				2500 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2500 Dokumen	350,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						150,000,000						175,000,000		
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah unit kapal perikanan yang dilakukan pelayanan cek fisik kapal perikanan untuk perizinan usaha perikanan				150 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		150 Dokumen	175,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						150,000,000							150,000,000	
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						150,000,000							150,000,000	
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah TDPIK yang diterbitkan				10 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		10 Dokumen	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						350,000,000							440,000,000	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						350,000,000							440,000,000	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil				30 Kawasan (persen)	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil				30 Kawasan (persen)	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil				30 Kawasan (persen)	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS				20 Kelompok	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Kelompok	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1,837,500,000							2,042,500,000	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						927,500,000							982,500,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						64,000,000							84,000,000	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3 Unit/Barang /Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Unit/Barang /Paket	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor				5 Unit	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Unit	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Eksemplar	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Eksemplar	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				12 Kunjungan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Kunjungan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah				12 Rapat/ Konsultasi	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Rapat/ Konsultasi	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40,000,000						75,000,000		
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor				1 Paket/Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket/Unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				3 Paket/Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Paket/Unit	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						811,000,000							811,000,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat				12 Bulan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	60,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)				12 Bulan	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	750,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12,500,000							12,500,000	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan				2 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan				12 Unit	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	2,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						200,000,000							200,000,000	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						200,000,000							200,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Orang	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						250,000,000							250,000,000	
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						100,000,000							100,000,000	
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dokumen TDKP dan TDPIK yang diterbitkan				75 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		75 Dokumen	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						150,000,000							150,000,000	
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah unit kapal perikanan yang dilakukan pelayanan cek fisik kapal perikanan untuk perizinan usaha perikanan				150 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		150 Dokumen	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						110,000,000							110,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						110,000,000						110,000,000		
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah TDPIK yang diterbitkan				10 Dokumen	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		10 Dokumen	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						350,000,000						500,000,000		
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						350,000,000						500,000,000		
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil				30 Kawasan (persen)	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil				30 Kawasan (persen)	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil				30 Kawasan (persen)	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		30 Kawasan (persen)	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS				20 Kelompok	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20 Kelompok	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						4,543,704,681							5,550,502,291	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,449,900,000						1,462,500,000		
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10,000,000						10,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						64,000,000							89,000,000	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3 Unit/Barang /Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Unit/Barang /Paket	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor				5 Unit	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Unit	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Eksemplar	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Eksemplar	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				10 Kunjungan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		10 Kunjungan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah				12 Rapat/ Konsultasi	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Rapat/ Konsultasi	75,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						155,000,000							120,000,000	
3	25	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit 0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit 0 Unit	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor				1 Paket/Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket/Unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				5 Paket/Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Paket/Unit	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Pendukung Kantor dan Bangunan				1 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,208,400,000							1,231,000,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat				12 Bulan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	230,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	230,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)				12 Bulan	977,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	1,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12,500,000							12,500,000	
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaiki sedang/berat dan dibayar pajak tahunannya				3 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan				12 Unit	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	2,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						3,093,804,681							4,088,002,291	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						3,093,804,681							4,088,002,291	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah unit prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha komoditas baru perikanan budidaya yang tersedia				0 Unit 10 Paket	1,543,804,681		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 Unit 10 Paket	2,238,002,291	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah paket sarana perikanan budidaya guna menjamin pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Paket 0 Unit	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket 0 Unit	1,500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kawasan perairan/ lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan (2) Jumlah unit usaha budidaya perikanan yang terkendali hama penyakit ikan dan obat- obatan				1 Kawasan	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Kawasan	350,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1,057,500,000							1,142,500,000	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						857,500,000							892,500,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						64,000,000							64,000,000	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3 Unit/Barang /Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Unit/Barang /Paket	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor				5 Unit	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Unit	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Eksemplar	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Eksemplar	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				12 Kunjungan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Kunjungan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				12 Kunjungan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Kunjungan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						70,000,000							75,000,000	
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraaan operasional Kantor Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit 0 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit 0 Unit	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor				1 Paket/Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket/Unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				3 Paket/Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Paket/Unit	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						701,000,000							731,000,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat				12 Bulan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	120,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)				12 Bulan	580,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	610,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22,500,000						22,500,000		
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan				2 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan				12 Unit	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	2,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi				12 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						200,000,000							250,000,000	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						200,000,000							250,000,000	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengujian Standar Mutu Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang terlaksana Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				110 Sample 100 Unit Usaha	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		110 Sample 100 Unit Usaha	125,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Bimbingan dan Fasilitasi Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang terlaksana			21 Pelaku Usaha	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		21 Pelaku Usaha	125,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2,997,000,000						2,452,500,000				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1,247,000,000							1,202,500,000				
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10,000,000							10,000,000				
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD			1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					64,000,000							89,000,000				
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			3 Unit/Barang /Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Unit/Barang /Paket	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan			
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor			0 Paket 5 Unit	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 Paket 5 Unit	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan			
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan			
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 Eksemplar	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Eksemplar	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				12 Kunjungan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Kunjungan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah				12 Rapat/ Konsultasi	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Rapat/ Konsultasi	75,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175,000,000							90,000,000	
3	25	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit 1 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit 1 Unit	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor				1 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor				1 Paket/Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket/Unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				5 Paket/Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Paket/Unit	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						985,500,000							1,001,000,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat				12 Bulan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)				12 Bulan	484,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Bulan	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12,500,000							12,500,000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan				12 Unit	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	2,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi				12 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						1,750,000,000							1,250,000,000	
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						1,750,000,000							1,250,000,000	
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan				1 Paket	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	1,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terbina dan terlayani				55 Kapal	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		55 Kapal	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
TOTAL											164,178,691,257							79,793,529,028	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						26,951,984,925						26,717,689,044		
2	09	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	%		%	100 %	23,771,171,925						100 %	25,483,730,491	
2	09	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						275,168,148							330,398,896	
2	09	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	126,750,448	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	129,711,796	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	25,825,700	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	26,972,100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	122,592,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	173,715,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18,925,624,617							20,432,504,035	
2	09	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/ Bulan	17,987,626,617	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		77 Orang/ Bulan	19,414,346,095	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	917,998,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	998,157,940	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	20,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50,391,000							98,651,000	
2	09	01	1.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10,500,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	21,950,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	09	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30,641,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	66,951,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	9,250,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		2 Laporan	9,750,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						2,400,000							2,400,000	
2	09	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	2,400,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	2,400,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						65,650,000							35,974,000	
2	09	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	65,650,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Orang	35,974,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,001,809,500							1,061,107,000	
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	31,429,200	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		3 Paket	33,151,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	194,266,300	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	201,661,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	29,755,400	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	31,856,400	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	126,896,600	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	139,195,600	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	38,399,050	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	41,980,450	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	43,792,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	46,803,900	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	73,727,450	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	78,344,550	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	62,187,300	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	65,943,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	401,356,200	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	422,170,200	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						395,460,700							361,701,100	
2	09	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	143,157,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	97,219,400	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	146,153,900	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		5 Unit	158,270,900	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	106,149,800	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	106,210,800	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,177,239,569							2,324,367,360	
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	11,889,600	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	11,909,600	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	142,087,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	147,826,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	98,824,900	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	100,741,900	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,924,438,069	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	2,063,889,860	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						877,428,391							836,627,100	
2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	300,040,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		8 Unit	302,167,900	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	84,554,500	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		3 Unit	92,937,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	61,006,100	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		6 Unit	61,627,100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	97,329,800	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		10 Unit	98,872,800	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	145,938,700	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	81,054,700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	111,881,300	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	112,781,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	76,677,991	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	87,185,800	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	% % %		% % %	114 % <=11 % 87,70 %	2,450,130,000					114 % <=11 % 87,70 %	741,228,834		
2	09	03	1.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						1,546,216,000						301,575,834		
2	09	03	1.01	01		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	202,650,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	106,036,934	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	03	1.01	02		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1,050,551,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	95,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	03	1.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	20,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	03	1.01	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	52,515,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	20,038,900	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	03	1.01	05		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				1 Unit	20,500,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	20,500,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	03	1.01	06		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	40,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					687,493,000						253,232,000					
	2		09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi				1 Laporan	351,781,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	157,571,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2		09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara				1.5 Ton	335,712,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1.5 Ton	95,661,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi							216,421,000							186,421,000		
	2		09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	45,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	2		09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	171,421,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	141,421,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%		%		<=10 %	366,457,000						<=10 %	234,072,263		
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi							86,385,000							71,976,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				0 Dokumen 1 Dokumen	86,385,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		0 Dokumen 1 Dokumen	71,976,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						280,072,000							162,096,263	
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi				1 Dokumen	65,421,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	66,421,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	214,651,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	95,675,263	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%		%	82 %	364,226,000						82 %	258,657,456	
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						364,226,000							258,657,456	
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina				1 Dokumen	75,265,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	44,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Sertifikat	61,572,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		2 Sertifikat	30,763,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	36,456,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	33,895,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	85,657,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	81,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
2	09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan				1 Dokumen	105,276,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	68,999,456	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						35,714,269,000							5,742,730,118		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	% %		% %	1,25 % 62,08 %	21,298,367,000							1,25 % 62,08 %	1,548,738,300	
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						15,745,146,000								765,646,300	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	15,745,146,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		2 Laporan	765,646,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					150,683,000						117,351,000			
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	21,500,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Laporan	75,159,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	13,565,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				7 Orang	55,524,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		7 Orang	82,286,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						5,067,538,000							565,741,000	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi				1 Laporan	5,067,538,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	565,741,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						335,000,000							100,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				50 Ekor	335,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Ekor	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura				0,77 %	10,308,813,000						0,77 %	2,714,734,583	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan		%		%	1,42 %							1,42 %			
				Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan		%		%	3,0 %							3,0 %			
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian						10,308,813,000							2,714,734,583	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	690,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	135,456,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				3 Dokumen	9,135,491,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		3 Dokumen	2,056,125,583	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	102,564,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	112,564,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	100,727,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	110,727,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				4 Unit	155,531,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		4 Unit	165,531,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	123,750,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	134,331,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	% %		% %	63 % 59,00 %	1,008,866,000						63 % 59,00 %	460,259,834	
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						632,210,000							214,808,834	
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				1 Laporan	505,718,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	214,808,834	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	126,492,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						93,156,000							75,451,000	
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan				1 Laporan	93,156,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	75,451,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						150,000,000							35,000,000	
3	27	04	1.04	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan				8 Sertifikat	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Sertifikat	35,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan						133,500,000							135,000,000	
3	27	04	1.05	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				2 Sertifikat	65,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		2 Sertifikat	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani				1 Kasus	68,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Kasus	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)												39,5 %	466,477,316	
						Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	% % %		% % %	39,5 % 73,60 % 20 %	542,238,000							73,60 % 20 %		
						Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)														
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						542,238,000								466,477,316	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				175 Ha	308,653,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		175 Ha	227,206,316	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				25 Ha	120,655,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		25 Ha	110,626,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50 Ha	112,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		50 Ha	128,645,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Rasio %		Rasio %	99,91 Rasio 45 %	2,555,985,000							99,91 Rasio 45 %	552,520,085	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						7,000,000						14,000,000		
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	7,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Orang	14,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						2,123,456,000							372,500,000	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	60,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				12 Kelompok	2,063,456,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		12 Kelompok	322,500,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan						425,529,000							166,020,085	
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi				1 Unit	135,781,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani				1 Laporan	73,966,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	61,269,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	215,782,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	54,751,085	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,948,442,009		1,449,468,500						
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	%		%	100 %	1,137,003,409						100 %	903,324,500	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						271,545,700							285,545,700	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,756,500	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	9,756,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27,528,300	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	28,528,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,123,100	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	5,123,100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	42,526,300	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	46,526,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,561,300	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	6,561,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4,672,100	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	4,672,100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	71,875,200	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	75,875,200	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9,251,400	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	9,251,400	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	95,251,500	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	99,251,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						357,181,300							125,530,300	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	19,765,100	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	20,765,100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	232,651,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	104,765,200	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	104,765,200	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						223,766,500							225,766,500	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,075,400	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	3,075,400	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	102,657,500	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	102,657,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	52,176,900	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	54,176,900	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	65,856,700	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	65,856,700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						284,509,909							266,482,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	31,256,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		7 Unit	34,345,100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	23,567,500	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		4 Unit	24,567,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	23,765,900	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		2 Unit	23,165,900	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	45,755,200	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		5 Unit	48,755,200	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35,675,100	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	68,675,100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	64,973,200	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	66,973,200	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	59,517,009	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura												0,77 %	230,175,000	
						Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%		%									1,42 %		
						Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%		%									3,0 %		
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian						365,541,000								230,175,000	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				2 Unit	365,541,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		2 Unit	230,175,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	% %		% %	63 % 59,00 %	445,897,600					63 % 59,00 %	315,969,000		
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						50,000,000						50,000,000		
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				1 Laporan	50,000,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						170,106,600						165,969,000		
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	78,751,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	75,654,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi				1 Laporan	91,355,600	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	90,315,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						225,791,000						100,000,000		
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	225,791,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3,341,668,879						2,026,229,876		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	%		%	100 %	1,922,849,800					100 %	1,105,738,500		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						230,767,400						242,167,400		
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,565,300	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	8,965,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24,561,400	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	25,561,400	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12,976,500	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	12,976,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	41,252,100	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	44,252,100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,415,250	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Paket	6,415,250	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4,521,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	4,521,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	34,761,250	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		3 Paket	37,761,250	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12,561,300	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	12,561,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85,153,300	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri			Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	89,153,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,113,113,000							234,100,700	
3	27	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	880,000,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	19,535,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	20,535,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	213,578,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	213,565,700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						376,524,700							382,924,700	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	98,867,500	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	100,267,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	31,657,200	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	36,657,200	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	246,000,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	246,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						202,444,700							246,545,700	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	29,155,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		8 Unit	31,256,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	15,671,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		8 Unit	17,671,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 2 Unit	21,193,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		0 Unit 2 Unit	22,193,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 4 Unit	38,156,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		0 Unit 4 Unit	39,156,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	34,145,200	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	69,145,200	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	64,124,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	67,124,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	% %		% %	1,25 % 62,08 %	648,099,079						1,25 % 62,08 %	497,405,376	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						648,099,079							497,405,376	
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih				800 Sertifikat	63,575,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		800 Sertifikat	55,500,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				1 Laporan	356,173,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	247,546,800	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				1 Dokumen	30,100,079	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	23,572,576	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				1 Laporan	198,251,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Laporan	170,786,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	% % %		% % %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	715,175,000						0,77 % 1,42 % 3,0 %	365,541,000	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian						715,175,000							365,541,000	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	715,175,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Unit	365,541,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	%		%	39,5 %	55,545,000					39,5 %	57,545,000				
						Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)													%	%	73,60 %
						Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)													%	%	20 %
						Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)															
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						55,545,000					57,545,000					
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				25 Ha	55,545,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	25 Ha	57,545,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan			
TOTAL											67,956,364,813							35,936,117,538			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						39,982,872,409								33,282,071,424			
2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						32,700,872,409							33,282,071,424				
2	11	01		1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						275,000,000							75,000,000				
2	11	01		1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Dokumen	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
2	11	01		1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
2	11	01		1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
2	11	01		1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						28,315,627,009							29,916,826,024				
2	11	01		1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				141 Orang/ Bulan	27,123,667,009		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		141 Orang/ Bulan	28,724,866,024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
2	11	01		1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1,191,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	1,191,960,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
2	11	01		1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50,000,000							50,000,000				
2	11	01		1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
2	11	01		1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150,000,000							0				

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		15 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						954,193,600							684,193,600	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	63,428,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	63,428,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	26,253,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	26,253,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	44,928,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	144,928,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	24,584,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	24,584,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100,000,000							0	
2	11	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,331,051,800							2,281,051,800	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	65,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	44,551,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	94,551,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,186,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	2,086,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						525,000,000						275,000,000		
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP						500,000,000							0	
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi						250,000,000							0	
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi						250,000,000							0	
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun yang Disusun				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	02	1.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						775,000,000							0	
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup						275,000,000							0	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						300,000,000							0	
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				3 Lokasi	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Lokasi	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPД)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Titik	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						200,000,000							0	
2	11	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						250,000,000							0	
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi						250,000,000							0	
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	04	1.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Ha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	04	1.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi				1 Ha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	04	1.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Ha	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	04	1.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Ha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	04	1.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				10 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		10 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	04	1.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						450,000,000							0	
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						450,000,000							0	
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							400,000,000							0	
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi							400,000,000							0	
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan					1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD					1 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi					1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						550,000,000							0	
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi						550,000,000							0	
2	11	08	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH				2 Lembaga	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Lembaga	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	08	1.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				1 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						150,000,000							0	
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi						150,000,000							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				10 Entitas	150,000,000			Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		10 Entitas	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						100,000,000							0		
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi						100,000,000							0		
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani				3 Dokumen	100,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				1 Dokumen	0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						4,107,000,000							0		
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						4,107,000,000							0		
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional				1 Ton	0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Ton	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				1 Unit	0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	1.01	06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan				1 Ton	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Ton	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	1.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				1 paket	4,107,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2,300,000,000							0	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						1,550,000,000							0	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						250,000,000							0	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						200,000,000						0		
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.03	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengembangan Pemanfaatan hasil Hutan kayu				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						400,000,000							0	
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0.25 Ha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0.25 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0.25 Ha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0.25 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				1 Ha	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit yang dihasilkan untuk Rehabilitasi Lahan				500 Batang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		500 Batang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				1 Ha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						150,000,000							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				1 Ha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan				1 Operasi	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Operasi	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)						250,000,000							0	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Laporan pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani				1 Unit Managemen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit Managemen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit Managemen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH				1 Unit Managemen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit Managemen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						300,000,000							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah				1 Unit Managemen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit Managemen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani				1 Unit Managemen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit Managemen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						300,000,000							0	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						300,000,000							0	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				15 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				4 Ha	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						450,000,000							0	
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						450,000,000							0	
3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah lokasi yang dikonservasi				1 Lokasi	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Lokasi	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				1 Orang	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				1 Lembaga	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Lembaga	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengelolaan DAS				2 Kali	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Kali	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						649,500,000							400,000,000	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						429,500,000							100,000,000	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30,000,000							100,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Orang	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						303,500,000							0	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	250,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						96,000,000							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	75,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						220,000,000							300,000,000	
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup						220,000,000							300,000,000	
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						163,750,000							75,000,000	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						103,750,000							0	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						57,750,000							0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,250,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						46,000,000							0	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						50,000,000							45,000,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						30,000,000							35,000,000	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH				12 Unit 12 Bulan	30,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit 12 Bulan	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						5,000,000							0	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						5,000,000							0	
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH				1 Paket	5,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						10,000,000							10,000,000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				4 Kali 4 Ha	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		4 Kali 4 Ha	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						10,000,000						30,000,000		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						10,000,000						30,000,000		
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok 5 Kelompok Tani Hutan	5,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kelompok 5 Kelompok Tani Hutan	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit I Karimun) Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5 Kali 5 Ha	5,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kali 5 Ha	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						163,750,000						75,000,000		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI						103,750,000							0	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						57,750,000							0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,250,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						46,000,000							0	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						50,000,000							45,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						30,000,000						35,000,000		
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH				12 Unit 12 Bulan	30,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit 12 Bulan	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						5,000,000						0		
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						5,000,000						0		
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH				0 1 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						10,000,000							10,000,000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				4 Kali 4 Ha	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		4 Kali 4 Ha	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						10,000,000							30,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						10,000,000						30,000,000		
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				2 Kelompok 2 Kelompok Tani Hutan	5,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Kelompok 2 Kelompok Tani Hutan	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit III Lingga) Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5 Kali 5 Ha	5,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kali 5 Ha	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						153,750,000							75,000,000	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						93,750,000							0	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						47,750,000							0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,250,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	15,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						46,000,000							0	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						50,000,000							45,000,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						30,000,000							35,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH				12 Unit 12 Bulan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit 12 Bulan	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						5,000,000							0	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						5,000,000							0	
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah laporan pelaksanaan pemanfaatan Hutan di KPH				0 1 Laporan	5,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						10,000,000							10,000,000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				4 Kali 4 Ha	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		4 Kali 4 Ha	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						10,000,000							30,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						10,000,000						30,000,000		
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok 8 Kelompok Tani Hutan	5,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kelompok 8 Kelompok Tani Hutan	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang) Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5 Kali 5 Ha	5,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kali 5 Ha	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						238,750,000							85,000,000	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						173,750,000							0	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						67,750,000							0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,250,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106,000,000							0	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	80,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						55,000,000							55,000,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						35,000,000							45,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH				12 Unit 12 Bulan	35,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit 12 Bulan	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						5,000,000							0	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						5,000,000							0	
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH				0 1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						10,000,000							10,000,000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				4 Kali 4 Ha	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		4 Kali 4 Ha	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						10,000,000							30,000,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						10,000,000							30,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok 6 Kelompok Tani Hutan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kelompok 6 Kelompok Tani Hutan	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit V Natuna) Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5 Kali 5 Ha	5,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kali 5 Ha	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						240,494,855						85,000,000		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						173,750,000							0	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						67,750,000							0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,250,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106,000,000							0	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	80,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						56,744,855							55,000,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						36,744,855							45,000,000	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH				12 Unit 12 Bulan	36,744,855	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit 12 Bulan	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						5,000,000							0	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						5,000,000							0	
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH				0 1 Laporan	5,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						10,000,000							10,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				4 Kali 4 Ha	10,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		4 Kali 4 Ha	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						10,000,000							30,000,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						10,000,000							30,000,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok 1 Kelompok Tani Hutan	5,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kelompok 1 Kelompok Tani Hutan	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas) Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5 Kali 5 Ha	5,000,000	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kali 5 Ha	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						153,750,000							75,000,000	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						103,750,000							0	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						57,750,000							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,250,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						46,000,000							0	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						40,000,000							45,000,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						20,000,000							35,000,000	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH				12 Unit 12 Bulan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Unit 12 Bulan	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						5,000,000							0	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						5,000,000							0	
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH				0 1 Laporan	5,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						10,000,000							10,000,000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				4 Kali 4 Ha	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Kali 4 Ha	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						10,000,000						30,000,000		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						10,000,000						30,000,000		
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok 5 Kelompok Tani Hutan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Kelompok 5 Kelompok Tani Hutan	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5 Ha	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Ha	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TOTAL											44,046,617,264							34,152,071,424	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						21,823,244,471								17,017,345,238			
2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI						14,603,244,471							15,874,784,927				
2	08	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200,000,000							100,000,000				
2	08	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
2	08	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
2	08	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
2	08	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11,494,621,749							12,639,020,831				
2	08	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	10,768,621,749	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				14 Orang/ Bulan	11,788,020,831	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
2	08	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	711,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	811,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
2	08	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
2	08	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						58,440,000							58,440,000				

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	58,440,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	58,440,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						60,000,000							270,000,000	
2	08	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket 1 Paket	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket 1 Paket	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 41 Orang	10,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang 41 Orang	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,247,182,722							1,011,000,000	
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	155,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	95,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	96,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	120,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	852,182,722	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	475,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							510,000,000	
2	08	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,293,000,000							1,056,324,096	
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	120,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	105,100,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,023,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	911,224,096	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						250,000,000							230,000,000	
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	200,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	125,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						2,830,000,000							548,958,976	
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						100,000,000							175,000,000	
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi				43 Perangkat Daerah	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				43 Perangkat Daerah	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)				0 Perangkat Daerah 43 Perangkat Daerah	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Perangkat Daerah 43 Perangkat Daerah	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi						420,000,000							60,000,000	
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota				0 Organisasi 20 Organisasi	210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Organisasi 20 Organisasi	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						2,310,000,000							313,958,976	
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Lembaga	153,958,976	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				0 Orang 150 Orang	2,110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang 150 Orang	160,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						950,000,000							196,474,291	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						100,000,000						60,000,000		
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				6 Perangkat Daerah	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Perangkat Daerah	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						850,000,000							136,474,291	
2	08	03	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	675,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Orang	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				250 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250 Orang	61,474,291	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						1,950,000,000							226,777,641	
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						1,650,000,000							135,000,000	
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				20 Perangkat Daerah	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Perangkat Daerah	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1,610,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						300,000,000							91,777,641	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	04	1.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				0 Lembaga 1 Lembaga	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Lembaga 1 Lembaga	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				0 Orang 120 Orang	0						0 Orang 120 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	71,777,641	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						20,000,000							15,970,257	
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi						20,000,000							15,970,257	
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	15,970,257	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						1,200,000,000							101,144,958	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						1,200,000,000						101,144,958		
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				5 Organisasi	950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Organisasi	76,144,958	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						270,000,000							53,234,188	
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						220,000,000							53,234,188	
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1 Organisasi	210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Organisasi	33,234,188	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						50,000,000						0		
2	08	07	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						0							0	
2	08	07	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						1,600,000,000							299,284,718	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						150,000,000							80,915,966	
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						0							0	
2	14	02	1.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	02	1.01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi						150,000,000							80,915,966	
2	14	02	1.02	03	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	02	1.02	06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		1 Dokumen	40,915,966	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						550,000,000							73,368,752	
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal						475,000,000							28,368,752	
2	14	03	1.01	04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				1 Dokumen	475,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	03	1.01	08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	28,368,752	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						75,000,000							45,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	03	1.02	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				40 Organisasi	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Organisasi	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	03	1.02	03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				41 Organisasi	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				41 Organisasi	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						900,000,000							145,000,000	
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						750,000,000							105,000,000	
2	14	04	1.01	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	04	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R)				25 Organisasi	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Organisasi	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	04	1.01	09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)				1 Dokumen	0						1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	04	1.01	12	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	14	04	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2		14	04		1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					150,000,000							40,000,000			
2	14	04		1.02	02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2		14	04		1.02	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1,225,374,500						692,775,904			
2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI						1,150,374,500							632,775,904		
2	08	01		1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							0		
2	08	01		1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok					0 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2	08	01		1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						124,000,000							99,000,000		
2	08	01		1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	24,000,000	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	24,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok					1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20,000,000							20,000,000	
2	08	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,000,000	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0					1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						831,374,500						468,775,904		
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	90,374,500	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10,000,000	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	731,000,000	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	388,775,904	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						175,000,000						45,000,000		
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	90,000,000	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 1 Unit	10,000,000	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Unit 1 Unit	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75,000,000	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					75,000,000							50,000,000		
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					75,000,000							50,000,000		
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				100 Orang	75,000,000	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				6 Layanan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Layanan	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						0							10,000,000	
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						0							10,000,000	
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan				100 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						0							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	07	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
TOTAL											24,648,618,971							18,009,405,860	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2,701,041,035								200,000,000		
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							440,220,030							200,000,000		
2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan							120,220,000							0		
2	12	02	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan		120,220,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan							320,000,030							200,000,000		
2	12	02	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan		320,000,030		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							454,023,920							0		
2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi							350,000,000							0		
2	12	03	1.02	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan		200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	03	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil							150,000,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							104,023,920							0		
2	12	03	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan		104,023,920		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							1,771,597,085							0		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						1,771,597,085						0		
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1,688,326,880		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1.02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				1 Dokumen	83,270,205		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						35,200,000							0	
2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan						35,200,000							0	
2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen penyediaan data Kependudukan Provinsi				2 Dokumen	35,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						37,240,106,417							0	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						11,329,799,373							0	
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						159,674,800							0	
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen 0 Dokumen	35,256,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		4 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	58,843,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	65,575,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9,013,736,673						0		
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang 0 Orang/ Bulan	8,400,110,673		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		42 Orang 0 Orang/ Bulan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	598,626,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		0 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30,000,000							0	
2	13	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 10 Orang	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Orang 10 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						704,640,000							0	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		8 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	28,140,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	420,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						120,000,000							0	
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		10 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,151,747,900							0	
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Laporan 1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor				1 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,096,747,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150,000,000							0	
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		8 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Unit 5 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA						517,709,060							0	
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat						517,709,060							0	
2	13	02	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat				0 Dokumen	390,526,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				1 Dokumen 0 Dokumen	51,142,260		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	02	1.01	04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa				1 Unit	76,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						176,600,000							0	
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi						176,600,000							0	
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan				1 Dokumen	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	91,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						1,813,776,884							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						1,813,776,884						0		
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	76,698,754		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	495,650,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina				0 Orang	664,737,230		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				52 Orang 0 Orang	65,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		52 Orang 0 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04	1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				1 Dokumen	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	300,690,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	35,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						23,402,221,100							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota						23,402,221,100						0		
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	19,581,148,030		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				60 Lembaga	280,000,030		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		60 Lembaga	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Unit	500,000,540		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	138,672,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	506,730,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan 0 Laporan	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan 0 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0 Keluarga	330,240,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Keluarga	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah				0 Keluarga	35,430,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Keluarga	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL											39,941,147,452						200,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	29					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						40,102,501,575		29,199,067,781						
3	29	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	% %		% %	100 % 100 %	14,440,054,652						100 % 100 %	14,409,110,277	
3	29	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300,000,000							350,000,000	
3	29	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen 0 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 0 Laporan	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen 0 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 0 Laporan	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10,264,029,722							9,928,693,657	
3	29	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan 14 Bulan	9,628,829,722		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		0 Orang/ Bulan 14 Bulan	9,367,993,657	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terpenuhinya Penyediaan Administrasi ASN				0 Dokumen 12 Bulan	480,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		0 Dokumen 12 Bulan	410,700,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun				0 Laporan 0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan 0 Dokumen	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD yang tersusun				0 Laporan 1 Dokumen	154,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan 1 Dokumen	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250,000,000							370,000,000	
3	29	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket 86 Stel	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Paket 86 Stel	70,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Kapasitas Organisasi				85 Orang	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		85 Orang	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0 Orang 48 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		0 Orang 48 Orang	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,544,163,935							1,526,544,332	
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 12 Bulan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Paket 12 Bulan	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor				0 Paket 12 Bulan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Paket 12 Bulan	120,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 12 Bulan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Paket 12 Bulan	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 450 Rapat	1,244,163,935		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		0 Laporan 450 Rapat	1,056,544,332	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100,000,000							120,000,000	
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pemenuhan kebutuhan Meubel kantor				0 Paket 12 Bulan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Paket 12 Bulan	120,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,611,860,995							1,688,872,288	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				0 Laporan 12 Bulan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan 12 Bulan	40,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 13 Bulan	1,571,860,995		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		0 Laporan 13 Bulan	1,648,872,288	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						370,000,000							425,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		9 Unit	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				0 Unit 12 Bulan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit 12 Bulan	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemenuhan pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				0 Unit 12 Bulan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit 12 Bulan	25,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 Unit 12 Bulan	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit 12 Bulan	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	%		%	54,55 %	3,050,000,000						54,55 %	133,240,519	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						2,350,000,000							70,000,000	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	2,350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	70,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						700,000,000							63,240,519	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				1 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	28,240,519	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	35,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%		%	14 %	7,425,345,123						14 %	10,242,466,190	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						7,425,345,123							10,242,466,190	
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dokumen Kebijakan Strategi dan Program terkait konservasi energi di Provinsi Kepulauan Riau				0 1 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah		0 1 Dokumen	17,558,095	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Sumber Daya Manusia terlatih dalam pelaksanaan konservasi energi				0 0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		0 0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Sosialisasi kepada Pengguna Energi dalam menerapkan konservasi energi				4 Kegiatan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		4 Kegiatan	33,452,388	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah aset EBT di Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara Jumlah FS dan DED pelaksanaan pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Kepulauan Riau Jumlah retrofit alat yang berteknologi ramah energi.				0 60 KWP 1 Dokumen 300 Unit	6,675,345,123		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah		0 60 KWP 1 Dokumen 300 Unit	10,089,844,078	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis konservasi energi				70 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		70 Orang	51,433,047	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau				1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah		1 Laporan	50,178,582	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKA N	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	% %		% %	100 % 99 %	15,187,101,800						100 % 99 %	4,414,250,795	
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi						165,000,000							200,000,000	
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik				0 Dokumen 2 Rekomendasi	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		0 Dokumen 2 Rekomendasi	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				2 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		2 Laporan	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						229,999,999							300,000,000	
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi				0 18 Rekomendasi	129,999,999		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah		0 18 Rekomendasi	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah		1 Laporan	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1.04		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi						140,000,000							220,000,000	
3	29	06	1.04	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Terkait Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		0 Dokumen	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.04	02	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1.04	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi				1 Laporan	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		1 Laporan	170,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri						292,961,801							380,000,000	
3	29	06	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		1 Dokumen	180,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				1 Laporan	142,961,801		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		1 Laporan	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						14,359,140,000						3,314,250,795			
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				300 Keluarga	7,831,140,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		300 Keluarga	2,259,236,100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				7 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		7 Dokumen	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				3 Unit	6,128,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		3 Unit	596,832,117	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangkit Listrik Desa yang dipelihara				6 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		6 Unit	258,182,578	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
TOTAL											40,102,501,575								29,199,067,781	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01					INSPEKTORAT DAERAH						35,101,098,909								35,132,351,976			
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						28,612,732,903							32,903,092,324				
6	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150,000,000							173,092,324				
6	01	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Dokumen	50,000,000	Inspektorat			
6	01	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		7 Laporan	123,092,324	Inspektorat			
6	01	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19,862,732,903							23,405,000,000				
6	01	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/ Bulan	19,362,732,903		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		78 Orang/ Bulan	22,855,000,000	Inspektorat			
6	01	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Dokumen	500,000,000	Inspektorat			
6	01	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	50,000,000	Inspektorat			
6	01	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100,000,000							100,000,000				
6	01	01	1.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	50,000,000	Inspektorat			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		8 Laporan	50,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						995,000,000							1,315,000,000	
6	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		90 Paket	90,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	50,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 40 Orang 68 Orang	750,000,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang 40 Orang 68 Orang	1,100,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				100 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		100 Orang	75,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						4,555,000,000							4,585,000,000	
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		100 Paket	55,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Paket	450,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		100 Paket	65,000,000	Inspektorat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		100 Paket	850,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		100 Paket	350,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		30 Dokumen	15,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	2,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		50 Laporan	2,350,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	100,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		4 Dokumen	350,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						500,000,000							845,000,000	
6	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Unit	250,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Paket	395,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Unit	200,000,000	Inspektorat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,000,000,000						750,000,000		
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Laporan	100,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Laporan	50,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		13 Laporan	600,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,450,000,000							1,730,000,000	
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		6 Unit	900,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		10 Unit	500,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		30 Unit	100,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	230,000,000	Inspektorat
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						5,172,596,200							1,560,481,756	
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal						3,637,546,200							1,262,546,200	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				50 Laporan	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		50 Laporan	375,000,000	Inspektorat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60 Laporan	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		60 Laporan	375,000,000	Inspektorat	
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	37,546,200				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	37,546,200	Inspektorat	
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	75,000,000	Inspektorat	
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				3 Laporan	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		3 Laporan	75,000,000	Inspektorat	
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1,250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Kesepakatan	200,000,000	Inspektorat	
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		4 Dokumen	125,000,000	Inspektorat	
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						1,535,050,000							297,935,556		
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	35,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Laporan	35,050,000	Inspektorat	
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				75 Laporan	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		75 Laporan	262,885,556	Inspektorat	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1,315,769,806							668,777,896		
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						550,000,000							275,000,000		
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Rekomendasi	100,000,000	Inspektorat	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Rekomendasi	175,000,000	Inspektorat	
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi						765,769,806							393,777,896		
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				4 Perangkat Daerah	240,769,806		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		4 Perangkat Daerah	133,777,896	Inspektorat	
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				31 Perangkat Daerah	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		31 Perangkat Daerah	75,000,000	Inspektorat	
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Kegiatan	100,000,000	Inspektorat	
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				20 Perangkat Daerah	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		20 Perangkat Daerah	85,000,000	Inspektorat	
TOTAL											35,101,098,909								35,132,351,976	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						29,381,011,920								19,403,051,550			
2	22	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100,00 %	15,015,871,480						100,00 %	17,270,076,303				
2	22	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						375,000,000							415,000,000				
2	22	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Dokumen	25,000,000	Dinas Kebudayaan			
2	22	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	10,000,000	Dinas Kebudayaan			
2	22	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	10,000,000	Dinas Kebudayaan			
2	22	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1 Dokumen	10,000,000	Dinas Kebudayaan			
2	22	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	10,000,000	Dinas Kebudayaan			
2	22	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1 Laporan	250,000,000	Dinas Kebudayaan			
2	22	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	100,000,000	Dinas Kebudayaan			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,954,493,043						8,765,326,766		
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/ Bulan	8,401,533,043		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			53 Orang/ Bulan	8,212,366,766	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	552,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1 Dokumen	552,960,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						360,433,025							400,000,000	
2	22	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		75 Paket	50,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 10 Orang	310,433,025		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang 10 Orang	350,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,546,194,700							2,515,400,000	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1 Paket	40,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1 Paket	30,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1 Paket	50,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	751,194,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			2 Paket	1,250,000,000	Dinas Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPД)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		1 Paket	75,000,000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		12 Dokumen	40,000,000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	450,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		12 Laporan	1,000,000,000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		12 Dokumen	30,400,000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,861,910,712						2,327,060,385		
2	22	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	484,095,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	0	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	50,000,000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	565,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	700,000,000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	827,060,385	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	462,415,712		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	500,000,000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	250,000,000	Dinas Kebudayaan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,540,000,000						2,182,289,152		
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			12 Laporan	85,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			12 Laporan	350,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1 Laporan	30,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			12 Laporan	1,717,289,152	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						377,840,000							665,000,000	
2	22	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	85,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	45,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	135,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	135,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	250,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	117,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	150,000,000	Dinas Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	% %		% %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	5,771,750,001					54,99% % 1,55% % 17,94 %	934,431,876					
2	22	02										950,000,000							311,467,197			
2	22	02	1.01	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan					2 Objek	650,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Objek	155,733,598	Dinas Kebudayaan
2	22	02	1.01	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					102 Orang	300,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				102 Orang	155,733,599	Dinas Kebudayaan
2	22	02			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						4,221,750,001							311,467,199				

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			3 Objek	4,021,750,001	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		3 Objek	103,822,399	Dinas Kebudayaan		
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1 Laporan	103,822,400	Dinas Kebudayaan		
2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			51 Sertifikat	200,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		51 Sertifikat	103,822,400	Dinas Kebudayaan		
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					600,000,000						311,497,480			
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			3 Objek	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3 Objek	103,852,680	Dinas Kebudayaan	
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina			102 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		102 Orang	103,822,400	Dinas Kebudayaan		
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi			1 Unit	600,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1 Unit	103,822,400	Dinas Kebudayaan		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	%		%	28,16 %	5,443,545,000					28,16 %	314,739,159		
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						5,443,545,000						314,739,159		
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				364 Orang	300,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	364 Orang	102,525,964	Dinas Kebudayaan	
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				8 Sertifikat	250,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	8 Sertifikat	52,384,812	Dinas Kebudayaan	
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	4,893,545,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		10 Lembaga	159,828,383	Dinas Kebudayaan	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	%		%	40,00 %	448,465,096					40,00 %	150,904,111		
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi						448,465,096						150,904,111		
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				11 Orang	147,997,148	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				11 Orang	50,000,000	Dinas Kebudayaan	
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	20,000,000	Dinas Kebudayaan	
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				1 Dokumen	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	25,000,000	Dinas Kebudayaan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal				0 Dokumen 4 Dokumen	150,467,948					0 Dokumen 4 Dokumen	55,904,111	Dinas Kebudayaan	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%		%	37,21 %	1,675,000,000					37,21 %	332,480,107		
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						325,000,000						82,480,107		
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				12 Objek	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		12 Objek	57,480,107	Dinas Kebudayaan
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				9 Objek	175,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Objek	25,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						1,350,000,000						242,500,000		
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				2 Objek	550,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2 Objek	97,500,000	Dinas Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				4 Objek	250,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Objek	105,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				1 Objek	0	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Objek	5,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang 20 Orang	550,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Orang 20 Orang	35,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	05	1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi						0							7,500,000	
2	22	05	1.03	01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				0 Objek 1 Objek	0						0 Objek 1 Objek	2,500,000	Dinas Kebudayaan
2	22	05	1.03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				1 Laporan	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	5,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	%		%	13,48 %	1,026,380,343						13,48 %	400,419,994	
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi						1,026,380,343							400,419,994	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				1 Unit	159,906,247	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Unit	100,000,000	Dinas Kebudayaan	
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseum	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseum yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				3047 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		3047 Orang	30,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	70,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				1 Unit	866,474,096		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Unit	200,419,994	Dinas Kebudayaan
TOTAL											29,381,011,920							19,403,051,550	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						34,545,205,147		38,366,899,392						
8	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15,476,444,245							18,005,000,000	
8	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						575,000,000							700,000,000	
8	01	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	375,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,260,729,900							7,380,000,000	
8	01	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/ Bulan	6,590,729,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		26 Orang/ Bulan	6,700,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	670,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	680,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						470,000,000							585,000,000	
8	01	01	1.05	01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket 1 Paket	170,000,000						0 Paket 1 Paket	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
8	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 3 Orang	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang 3 Orang	300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2,835,000,000							3,260,000,000	
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	135,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	140,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1,800,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	2,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	120,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	500,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	600,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2,085,932,721							3,500,000,000	
8	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	1,600,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		6 Unit	3,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	485,932,721		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Unit	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,749,781,624							1,950,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,509,781,624		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	1,550,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						500,000,000							630,000,000	
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	300,000,000						8 Unit	380,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		20 Unit	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						1,619,899,359							1,640,937,335	
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1,619,899,359							1,640,937,335	
8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	155,326,623		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	160,830,286	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	173,768,832		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	180,107,049	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	458,844,160						50 Orang	400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				45 Orang	476,633,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		45 Orang	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	355,326,624		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						6,318,146,906							8,595,865,284	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						6,318,146,906						8,595,865,284		
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	271,814,690		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	345,423,782	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	195,752,921		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	345,423,783	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			50 Orang	2,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		50 Orang	3,177,898,804	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			124 Orang	2,878,764,604		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		124 Orang	3,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1 Laporan	471,814,691		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	1,727,118,915	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					3,373,525,332							2,058,942,663		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						3,373,525,332						2,058,942,663		
8	01	04	1.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	155,560,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	160,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	115,760,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	165,004,470	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	2,448,914,032		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		100 Orang	1,163,938,193	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	345,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		100 Orang	260,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	307,540,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	310,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						1,957,230,103						2,659,000,000		
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						1,957,230,103						2,659,000,000		
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	219,840,000					1 Dokumen	230,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	173,280,296					3 Dokumen	180,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	951,048,807		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya		50 Orang	1,619,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				40 Orang	283,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Orang	290,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				5 Laporan	329,761,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5 Laporan	340,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						5,799,959,202							5,407,154,110	
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						5,799,959,202							5,407,154,110	
8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	298,488,718		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	310,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	196,696,112		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	378,295,728		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	100 Orang	400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				120 Orang	2,622,154,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	120 Orang	1,997,154,110	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	447,733,078		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Laporan	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				4 Dokumen	1,856,591,456		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		4 Dokumen	2,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
TOTAL											34,545,205,147								38,366,899,392	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						70,295,355,655		40,294,746,334						
3	26	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	15,617,520,924						100 %	14,509,583,806	
3	26	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	339,000,000						3 Dokumen	123,467,113	
3	26	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	110,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	109,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	33,467,113	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	120,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	%		%	100 %	10,897,013,642						100 %	11,517,707,734	
3	26	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				644 Orang/ Bulan	10,023,640,102	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				644 Orang/ Bulan	10,646,608,591	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	848,373,540	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	861,099,143	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	10,000,000	Dinas Pariwisata

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Stel		Stel	100 Stel	104,720,000					100 Stel	0		
3	26	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	104,720,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	0	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,752,864,200					100 %	363,707,488		
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	213,425,200	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Paket	50,578,000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	157,173,800	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Paket	70,278,000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1,382,265,200	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	242,851,488	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit		Unit	10 Unit	87,807,500					10 Unit	70,000,000		
3	26	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	87,807,500	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		10 Unit	70,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	2,187,539,582					100 %	2,310,025,471		
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,500,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	4,500,000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	96,120,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	60,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,086,919,582	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	2,245,525,471	Dinas Pariwisata	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	%		%	100 %	248,576,000					100 %	124,676,000		
3	26	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	83,560,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Unit	73,886,000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	114,226,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Unit	0	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	50,790,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40 Unit	50,790,000	Dinas Pariwisata	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Hari Hari %		Hari Hari %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	20,108,925,503					2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	15,444,589,525		
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	Daya Tarik		Daya Tarik	3 Daya Tarik	2,100,000,000					3 Daya Tarik	3,500,000,000		
3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pariwisata	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			3 Lokasi	1,600,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Gunung Kijang Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX Kab. Lingga, Singkep, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		3 Lokasi	3,000,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi			1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kawasan		Kawasan	6 Kawasan	9,930,000,000					6 Kawasan	7,421,429,414		
3	26	02	1.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			1 Dokumen	200,000,000	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	02	1.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan			3 Kawasan	2,325,000,000	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kab. Lingga, Lingga, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Katang Bidare, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		3 Kawasan	1,400,000,000	Dinas Pariwisata	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	1.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				12 Unit	3,955,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Malang Rapat Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota Kota Batam, Belakang Padang, Pemping Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok Kab. Lingga, Lingga, Daik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		12 Unit	2,000,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Laporan	3,200,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Gunung Kijang Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kab. Lingga, Lingga, Daik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Laporan	3,521,429,414	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Destinasi		Destinasi	4 Destinasi	7,078,925,503						4 Destinasi	3,300,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	1.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan				1 Lokasi	1,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Lokasi	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Selatan Kab. Karimun, Moro, Keban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	1,600,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Malang Rapat Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Selatan Kab. Karimun, Moro, Keban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		3 Lokasi	1,000,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemelihara an/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	1,750,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Malang Rapat Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		2 Unit	1,000,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				2 Dokumen	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		2 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			1 Laporan	1,528,925,503	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Malang Rapat Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Laporan	800,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Industri		Industri	10 Industri	1,000,000,000					10 Industri	1,223,160,111		
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			1 Laporan	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Laporan	773,160,111	Dinas Pariwisata	
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi			500 Unit Usaha	400,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Gunung Kijang Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		500 Unit Usaha	450,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Orang Orang Milyar Rp		Orang Orang Milyar Rp	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	27,668,506,980					474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	6,253,073,323		
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan	DT/Destinas		DT/Destinas	40 DT/Destinas	27,400,506,980					40 DT/Destinas	6,000,073,323		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	12,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				27 Laporan	7,800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		27 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	6,200,506,980	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	1,000,073,323	Dinas Pariwisata
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	03									268,000,000							253,000,000	
3	26	03		05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	268,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	253,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%		%	2 %	2,906,410,747						2 %	2,474,478,214	
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Usaha Kreatif yang dikembangkan dan disediakan sarana dan prasarananya	Usaha Kreatif		Usaha Kreatif	10 Usaha Kreatif	1,150,000,000						10 Usaha Kreatif	1,300,000,000	
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				1 Laporan	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Laporan	500,000,000	Dinas Pariwisata

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				1 Laporan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Laporan	400,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				1 Laporan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Laporan	400,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Ekosistem		Ekosistem	1 Ekosistem	1,756,410,747						1 Ekosistem	1,174,478,214	
3	26	04	1.02	04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia				1 Unit	600,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Gunung Kijang Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Unit	450,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pariwisata

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	400,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kab. Lingga, Lingga, Daik Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota Kab. Lingga, Lingga, Daik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	256,410,747	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	224,478,214	Dinas Pariwisata
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%		%	3 %	3,993,991,501						3 %	1,613,021,466	
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang		Orang	1703 Orang	3,823,991,501						1703 Orang	1,613,021,466	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya				200 Orang	470,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Malang Rapat Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	200 Orang	550,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				100 Orang	200,000,000	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	100 Orang	200,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan				250 Orang	750,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Malang Rapat Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kab. Lingga, Lingga, Daik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	250 Orang	250,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				100 Orang	330,000,000	Kab. Lingga, Singkep, Dabo Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	100 Orang	250,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)				13 Orang	83,991,501	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	13 Orang	63,021,466	Dinas Pariwisata

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				1040 Orang	1,690,000,000	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Malang Rapat Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Pinang Timur, Batu IX Kab. Lingga, Lingga, Daik Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	1040 Orang	100,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	05	1.01	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Kapasitasnya	Orang		Orang	50 Orang	170,000,000						50 Orang	0		
3	26	05	1.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif				50 Orang	170,000,000	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	0	Dinas Pariwisata	
TOTAL											70,295,355,655								40,294,746,334	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						584,969,791,935								620,702,043,041			
2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Persentase		Persentase	100 Persentase	36,625,708,256							100 Persentase	38,236,002,041			
2	15	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,500,000,000							100 %	1,500,000,000			
2	15	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	300,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	200,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	200,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	200,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	200,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	200,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	3 Laporan	200,000,000	Dinas Perhubungan		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Laporan	200,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	14,500,000,000							100 %	15,700,000,000	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang/ Bulan	12,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	840 Orang/ Bulan	13,500,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	12 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	2 Laporan	500,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	19 Laporan	500,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	400,000,000							100 %	600,000,000	
2	15	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	2 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		Laporan	13 Laporan	200,000,000					13 Laporan	200,000,000		
2	15	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	12 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	%		%	55 %	2,400,000,000					55 %	2,200,000,000		
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	0	3 Paket	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	0	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 57 Orang	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	0	0 Orang 57 Orang	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				57 Orang	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	0	57 Orang	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				57 Orang	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	0	57 Orang	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	6,317,900,000					100 %	7,117,900,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	2 Paket	400,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	417,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	5 Paket	417,900,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	2 Paket	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	5 Paket	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Paket	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	12 Dokumen	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	12 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	12 Laporan	4,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah`	%		%	100 %	2,797,500,000						100 %	1,500,000,000	
2	15	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	2 Unit	0	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	2 Paket	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	3 Unit	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	3 Unit	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	197,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	2 Unit	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	4,510,308,256						100 %	4,218,102,041	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	12 Laporan	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	12 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	12 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3,760,308,256		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	12 Laporan	3,418,102,041	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	4,000,000,000						100 %	5,200,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	1,800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	15 Unit	1,800,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	2 Unit	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	5 Unit	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	6 Unit	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	2 Unit	1,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				0.01 Ha	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	0.01 Ha	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						90,766,478,750							89,165,306,000	
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi						500,000,000							500,000,000	
2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						55,573,372,750							55,400,000,000	
2	15	02	1.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun				2 Unit	400,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	2 Unit	400,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
														Nasional		Daerah		
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia			25 Unit	50,173,372,750	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	25 Unit	50,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara			5 Unit	3,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	5 Unit	3,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara			15 Unit	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	15 Unit	2,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan		Laporan	2 Laporan	29,342,800,000					2 Laporan	30,315,000,000	
2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan			0 Unit 24 Unit	29,027,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	0 Unit 24 Unit	30,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	215,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	1 Laporan	215,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	ersetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi dikeluarkan	Laporan		Laporan	2 Laporan	200,000,000						2 Laporan	200,000,000	
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi	Laporan		Laporan	1 Laporan	4,850,306,000						1 Laporan	2,450,306,000	
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1,850,306,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Laporan	1,850,306,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				1 Laporan	2,900,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Penyengat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Laporan	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				0 Laporan 1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	0 Laporan 1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan		Laporan	1 Laporan	100,000,000					1 Laporan	100,000,000		
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%		%	60 %	100,000,000						60 %	100,000,000	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan		Laporan	1 Laporan	100,000,000						1 Laporan	100,000,000	
2	15	02	1.15	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					457,577,604,929							493,300,735,000		
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi					200,000,000							200,000,000		
2	15	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan			0 Unit 3 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		0 Unit 3 Unit	100,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi			1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional					380,000,000							200,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	15	03	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan				7 Unit	280,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		7 Unit	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan						200,000,000							200,000,000	
2	15	03	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan				2 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		2 Unit	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%		%	75 %	58,807,210,000					75 %	60,100,000,000		
2	15	03	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Tersedianya Kapal Roro				0 Dokumen 1 Dokumen 2 Unit	58,707,210,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	0 Dokumen 1 Dokumen 2 Unit	60,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						200,000,000							200,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				27 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	27 Dokumen	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.07		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya	Laporan		Laporan	2 Laporan	100,000,000						2 Laporan	100,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Pengendalian Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan		Laporan	2 Laporan	100,000,000						2 Laporan	100,000,000	
2	15	03	1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan Komersial/Niaga terbangun/meningkat kapasitasnya	%		%	40 %	385,690,394,929						40 %	420,300,735,000	
2	15	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian				2 Unit	2,550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	2 Unit	2,000,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun			30 Unit	352,189,659,929	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	30 Unit	400,000,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara			7 Unit	30,900,735,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	7 Unit	18,250,735,000	Dinas Perhubungan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				5 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	5 Laporan	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi beroperasi dan terpelihara	%		%	100 %	11,100,000,000						100 %	11,100,000,000	
2	15	03	1.10	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun				1 Unit	10,500,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Unit	10,500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.10	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan				0 Unit 2 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	0 Unit 2 Unit	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.10	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	DISHUB	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.11		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan		Laporan	4 Laporan	200,000,000						4 Laporan	200,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.11	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	0 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.11	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.12		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional						100,000,000							100,000,000	
2	15	03	1.12	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional						100,000,000							100,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional				3 Laporan	100,000,000			Pembangunan Infrastruktur Wilayah		3 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	03		1.14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan		Laporan	2 Laporan	100,000,000					2 Laporan	100,000,000		
2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	03		1.15	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional						100,000,000						100,000,000		
2	15	03		1.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03		1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan		Laporan	4 Laporan	200,000,000					4 Laporan	200,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	15	03	1.16	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	0 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						402,100,000							600,000,000		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						202,100,000							300,000,000		
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						202,100,000							300,000,000		
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	202,100,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		12 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	%		%	100 %	200,000,000						100 %	300,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Unit		Unit	1 Unit	200,000,000					1 Unit	300,000,000		
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				1 Unit	200,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	1 Unit	300,000,000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						488,500,000							500,000,000	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						288,500,000							300,000,000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						288,500,000							300,000,000	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	288,500,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		12 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	%		%	100 %	200,000,000						100 %	200,000,000	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Unit		Unit	1 Unit	200,000,000						1 Unit	200,000,000	
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				1 Unit	200,000,000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	1 Unit	200,000,000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						963,000,000							1,000,000,000	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						663,000,000							700,000,000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						663,000,000							700,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	663,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		12 Laporan	700,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	%		%	100 %	300,000,000					100 %	300,000,000		
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Unit		Unit	1 Unit	300,000,000					1 Unit	300,000,000		
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				3 Unit	300,000,000	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	3 Unit	300,000,000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						540,500,000							600,000,000	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						240,500,000						300,000,000		
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						240,500,000						300,000,000		
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	240,500,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		12 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	%		%	100 %	300,000,000					100 %	300,000,000		
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Unit		Unit	1 Unit	300,000,000					1 Unit	300,000,000		
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				1 Unit	300,000,000	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	1 Unit	300,000,000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						340,500,000							400,000,000	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						90,500,000						150,000,000		
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90,500,000						150,000,000		
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90,500,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		12 Laporan	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	%		%	100 %	250,000,000					100 %	250,000,000		
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Unit		Unit	1 Unit	250,000,000					1 Unit	250,000,000		
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				1 Unit	250,000,000	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0	1 Unit	250,000,000	Dinas Perhubungan
TOTAL											587,704,391,935							623,802,043,041	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						21,595,173,507								20,076,080,486			
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI						18,509,660,009							19,515,165,610				
2	23	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						280,000,000							125,000,000				
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunya Dokumen Renja dan Renja Perubahan					1 Dokumen 0 Dokumen	130,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 0 Dokumen	50,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan			
2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunya Dokumen Capaian Kinerja serta Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun					1 Laporan 0 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan 0 Dokumen	75,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan			
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12,343,661,677							12,994,229,233				
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					63 Orang/ Bulan 0 Orang	11,907,661,677		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		63 Orang/ Bulan 0 Orang	12,504,229,233	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan			
2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah pembayaran Tunjangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)					15 Dokumen 0 Orang	436,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		15 Dokumen 0 Orang	475,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun			1 Laporan 0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan 0 Laporan	15,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	
2	23	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						20,000,000						25,000,000		
2	23	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0 Laporan 1 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan 1 Laporan	25,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,000,000						140,000,000		
2	23	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			0 Stel 65 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Stel 65 Paket	0	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	
2	23	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan se- Provinsi Kepri			1 Dokumen 0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 0 Laporan	75,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	
2	23	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			6 Orang 0 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		6 Orang 0 Orang	65,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						850,998,332						853,936,377		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Paket 0 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Paket 0 Unit	25,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				4 Paket 0 Unit	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		4 Paket 0 Unit	35,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2 Paket 0 Paket	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Paket 0 Paket	300,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				1 Paket 0 Paket	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket 0 Paket	70,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan perundang-undangan				5 Dokumen 0 Eksemplar	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Dokumen 0 Eksemplar	50,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Kunjungan 5 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Kunjungan 5 Laporan	14,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				15 Laporan 0 Rapat	360,998,332		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		15 Laporan 0 Rapat	359,936,377	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30,000,000							50,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah pengadaan mebel				5 Paket 0 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Paket 0 Unit	50,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4,625,000,000							4,711,000,000	
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 0 Bulan	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Laporan 0 Bulan	10,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan 0 Bulan	845,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Laporan 0 Bulan	925,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan 0 Tahun	3,776,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan 0 Tahun	3,776,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						310,000,000							616,000,000	
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit 5 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit 5 Unit	16,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitas				1 Unit 0 Tahun	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit 0 Tahun	350,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi				30 Unit 0 Unit	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		30 Unit 0 Unit	250,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						2,300,000,000							468,389,485	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						1,575,000,000							312,259,660	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengembangan, Updating dan penambahan buku digital pada Aplikasi digital library Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service				0 Paket 1 Perpustakaan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Paket 1 Perpustakaan	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpustakaan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Perpustakaan	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	02	1.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang diadakan Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				0 Judul Buku 20 Eksemplar	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Judul Buku 20 Eksemplar	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah perpustakaan yang telah terakreditasi (Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan)				5 Perpustakaan 0 Perpustakaan	200,000,000					5 Perpustakaan 0 Perpustakaan	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	
2	23	02	1.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah perpustakaan khusus tingkat provinsi yang dibina Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				0 Perpustakaan 10 Perpustakaan	0						0 Perpustakaan 10 Perpustakaan	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi yang dilatih Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				0 Orang 4 Orang	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang 4 Orang	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan perpustakaan berjalan baik Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				0 Layanan 1 Layanan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Layanan 1 Layanan	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah layanan perpustakaan berjalan baik Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				0 Layanan 1 Perpustakaan	0						0 Layanan 1 Perpustakaan	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah koleksi bahan pustaka Perpustakaan daerah yang dikelola				30 Eksemplar 0 Judul Buku	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Eksemplar 0 Judul Buku	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	02	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan				1 Dokumen 0 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 0 Dokumen	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi						725,000,000							156,129,825	
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota memperoleh sosialisasi budaya baca dan literasi Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				0 Kab/Kota 3 Lokus	625,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Kab/Kota 3 Lokus	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang terpelihara				1 Perpustakaan 0 Unit	0				Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Perpustakaan 0 Unit	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca yang diberikan				2 Orang 0 Penghargaan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Orang 0 Penghargaan	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan Jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang menjadi replikasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial				1 Perpustakaan 0 Perpustakaan	100,000,000						1 Perpustakaan 0 Perpustakaan	31,225,966	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	02	1.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya Jumlah duta baca tingkat provinsi yang terpilih				1 Orang 0 Orang	0						1 Orang 0 Orang	31,225,961	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						785,513,498							92,525,391	
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi						100,000,000							23,131,353	
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah karya cetak karya rekam yang dikelola Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				0 KCKR 3 Eksemplar	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 KCKR 3 Eksemplar	11,565,673	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	03	1.01	02	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang memperoleh penghargaan Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				0 Penghargaan 3 Penerbit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Penghargaan 3 Penerbit	11,565,680	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah						200,000,000						23,131,346		
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan Jumlah Katalog Induk Daerah yang disusun				1 Entry 0 KID	100,000,000					1 Entry 0 KID	11,565,673	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan Jumlah BID				2 Naskah 0 BID	100,000,000			Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		2 Naskah 0 BID	11,565,673	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi						450,000,000						23,131,346		
2	23	03	1.03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Naskah Kuno yang dipelihara				5 Orang 0 Naskah	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		5 Orang 0 Naskah	11,565,673	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				0 Naskah 3 Eksemplar	200,000,000					0 Naskah 3 Eksemplar	11,565,673	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	
2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						35,513,498						23,131,346		
2	23	03	1.04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan diadakan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				0 Koleksi 1 Eksemplar	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		0 Koleksi 1 Eksemplar	11,565,673	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	03	1.04	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilakukan pengolahan dan penyiangan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				0 Koleksi 1 Eksemplar	35,513,498					0 Koleksi 1 Eksemplar	11,565,673	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						875,000,000							879,920,453	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						805,000,000						577,824,102		
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						420,000,000						320,277,802		
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis				5 Berkas 0 OPD	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Berkas 0 OPD	82,546,302	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis				5 Berkas 0 OPD	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Berkas 0 OPD	82,546,300	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	24	02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi Jumlah lembaga kearsipan daerah yang dibina pengelolaan arsip dinamis Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan pengelolaan arsip dinamis				1 Laporan 0 Kab/Kota 0 OPD	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan 0 Kab/Kota 0 OPD	155,185,200	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						150,000,000						100,000,000		
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Jumlah arsip yang di akuisisi				10 Arsip 0 Arsip	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		10 Arsip 0 Arsip	100,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					235,000,000						157,546,300			
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah penyediaan informasi kearsipan				8 Pengguna 0 Arsip	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		8 Pengguna 0 Arsip	72,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jumlah pengelola arsip pada Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang diberdayakan				1 Laporan 0 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan 0 Orang	85,546,300	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					70,000,000							157,194,474		
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					0							90,000,000		
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Peraturan Gubernur tentang jadwal retensi arsip Provinsi Kepulauan Riau				1 Arsip 0 Dokumen	0				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Arsip 0 Dokumen	45,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	03	1.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun Jumlah Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Jumlah Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun				1 Berkas 0 Kali	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Berkas 0 Kali	45,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota						70,000,000							37,346,475	
2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen pendataan Arsip Penggabungan Perangkat Daerah				1 Daftar 0 Dokumen	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Daftar 0 Dokumen	10,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	24	03	1.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen Pendataan, Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi				1 Arsip 0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Arsip 0 Dokumen	13,673,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	24	03	1.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penyelamatan arsip pemekaran Kabupaten/Kota				1 Arsip 0 Arsip	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Arsip 0 Arsip	13,673,475	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi					0							29,847,999		
2	24	03	1.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah dokumen Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1 Arsip 0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Arsip 0 Dokumen	9,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah dokumen Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1 Arsip 0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Arsip 0 Dokumen	20,847,999	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						0							144,901,877	
2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi						0							144,901,877	
2	24	04	1.01	01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang tersusun dan diterapkan				1 SOP 0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 SOP 0 Dokumen	72,450,939	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	24	04	1.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Daftar dan Penetapan Izin				1 Arsip 0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Arsip 0 Dokumen	72,450,938	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						320,000,000								280,000,000		
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						320,000,000								280,000,000		
2	23	01		1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5,000,000								5,000,000		
2	23	01		1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				1 Orang 0 Orang	5,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Orang 0 Orang	5,000,000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01		1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						163,250,000								145,750,000		
2	23	01		1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Paket 0 Bulan	5,000,000							12 Paket 0 Bulan	5,000,000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01		1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				4 Paket 0 Unit	65,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		4 Paket 0 Unit	40,000,000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01		1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2 Paket 0 Bulan	23,250,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Paket 0 Bulan	25,000,000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01		1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				1 Paket 0 Bulan	6,500,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket 0 Bulan	6,500,000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang- undangan				5 Dokumen 0 Bulan	3,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Dokumen 0 Bulan	4,250,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				15 Laporan 0 Tahun	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		15 Laporan 0 Tahun	65,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2,500,000							0	
2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit 5 Unit	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit 5 Unit	0	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						80,750,000							90,750,000	
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 0 Bulan	750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Laporan 0 Bulan	750,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan 0 Bulan	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Laporan 0 Bulan	90,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68,500,000							38,500,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Tahun 5 Unit	3,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Tahun 5 Unit	3,500,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi				1 Unit 0 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit 0 Unit	20,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2	23	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi				30 Unit 0 Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		30 Unit 0 Unit	15,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
TOTAL										22,790,173,507								21,236,000,939	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						22,067,028,566								21,360,085,363			
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	14,476,036,843						100 %	14,488,392,486				
2	18	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						237,650,000							237,650,000				
2	18	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	107,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	57,650,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
2	18	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	70,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
2	18	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
2	18	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
2	18	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10,759,135,030							11,270,967,032				
2	18	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/ Bulan	10,236,640,030	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		46 Orang/ Bulan	10,748,472,032	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
2	18	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	492,495,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	492,495,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						44,220,000							44,220,000	
2	18	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	29,220,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	29,220,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	15,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						200,000,000							200,000,000	
2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		7 Orang	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						481,426,572							481,426,572	
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	20,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		3 Dokumen	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	30,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	251,426,572	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	251,426,572	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,050,000,000							700,523,641	
2	18	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	600,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		4 Unit	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		0 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	400,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		3 Unit	350,523,641	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,518,850,241							1,368,850,241	
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	132,948,192	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	132,948,192	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	270,554,809	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	120,554,809	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	82,340,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	82,340,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,033,007,240	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	1,033,007,240	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						184,755,000							184,755,000	
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	126,679,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Unit	126,679,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	8,076,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		22 Unit	8,076,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	% %		% %	100 % 95 %	1,025,924,151						100 % 95 %	652,058,448	
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahan berusah Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahan berusaha Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahan berusaha Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahan berusaha	Perusahaan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen		Perusahaan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	150 Perusahaan 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	490,000,000						150 Perusahaan 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	452,058,448	
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	0	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah				150 Kegiatan usaha	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	0	150 Kegiatan usaha	252,058,448	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi						535,924,151							200,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi				2 Dokumen	460,924,151	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		2 Dokumen	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%		%	8 %	1,698,408,894						8 %	2,006,333,687	
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						1,698,408,894							2,006,333,687	
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	800,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				2 Dokumen	1,398,408,894	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		2 Dokumen	1,206,333,687	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	indeks %		indeks %	84,2 indeks 90 %	3,720,893,638						84,2 indeks 90 %	3,076,378,320	
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						870,893,638							776,378,320	
2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1000 Pelaku Usaha	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1000 Pelaku Usaha	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha				1000 Kegiatan usaha	420,893,638	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1000 Kegiatan usaha	376,378,320	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						2,850,000,000							2,300,000,000	
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi				600 Pelaku Usaha	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		600 Pelaku Usaha	1,100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi				600 Kegiatan Usaha	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		600 Kegiatan Usaha	500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi				50 Orang	850,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		50 Orang	500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi				60 Kegiatan usaha	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		60 Kegiatan usaha	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%		%	100 %	716,003,706					100 %	835,972,369		
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						716,003,706						835,972,369		
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				9 Kegiatan usaha	196,003,706	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	9 Kegiatan usaha	195,972,369	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				304 Pelaku Usaha	210,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	304 Pelaku Usaha	425,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				70 Kegiatan usaha	310,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	70 Kegiatan usaha	215,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	%		%	100 %	429,761,334					100 %	300,950,053		
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi						429,761,334						300,950,053		
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	429,761,334	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	1 Dokumen	300,950,053	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
TOTAL											22,067,028,566							21,360,085,363	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1,499,423,951,758								348,647,401,061			
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	31,330,731,365						100 %	30,937,742,165				
1	03	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						473,884,600							255,478,000				
1	03	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	165,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	64,722,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1	03	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	2,205,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1	03	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	9,545,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1	03	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30,301,600	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	30,301,600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1	03	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	260,800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1	03	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	123,583,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	98,583,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1	03	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	125,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	49,860,600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23,204,313,103						23,329,730,503		
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	20,290,673,103	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		80 Orang/ Bulan	20,460,449,503	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	2,813,640,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	2,815,128,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	54,153,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50,000,000							50,000,000	
1	03	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,000,000							50,000,000	
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 4 Orang	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 Orang 4 Orang	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,558,031,250							1,558,031,250	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	306,018,400	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	306,018,400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	38,194,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	38,194,800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	173,789,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	173,789,100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	51,674,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	51,674,900	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	92,156,550	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	92,156,550	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Paket	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	29,955,500	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Laporan	29,955,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	716,242,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	716,242,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,978,000,000							1,678,000,000	
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	728,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	428,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1,000,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Unit	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,668,521,212							3,668,521,212	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12,280,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	12,280,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	489,820,500	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	489,820,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3,046,420,712		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	3,046,420,712	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						347,981,200							347,981,200	
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	117,208,200	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	117,208,200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	210,839,400	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	210,839,400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 1 Unit	15,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 Unit 1 Unit	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,933,600	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	4,933,600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Titik Rawan Banjir											12 titik		17,413,101,133	
						Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%)	titik %		titik %	56.09 %	160,197,492,002						56.09 %			
						Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	%		%	19.51 %								19.51 %		
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						158,197,492,002								16,413,101,133	
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				10 Dokumen	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		10 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai				10 Dokumen	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		10 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				5 Unit	40,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Unit	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				4 KM	46,900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		4 KM	3,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.5 KM	51,997,492,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0.5 KM	3,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.85 KM	12,850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0.85 KM	4,613,101,133	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang normalisasi/ restorasi sungai/ saluran utama perkotaan Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				666.67 Meter 0 KM	3,950,000,002		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		666.67 Meter 0 KM	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		8 Lembaga	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2,000,000,000							1,000,000,000	
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.1 KM	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0.1 KM	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	%		%	97.03 %	28,289,450,000						97.03 %	18,778,938,141	
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						28,289,450,000							18,778,938,141	
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM				3 Dokumen	4,936,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional				1 Dokumen	978,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional				1.37 Liter/Detik	3,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1.37 Liter/Detik	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	03	1.01	04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional				2.8 Liter/Detik	16,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2.8 Liter/Detik	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional				1000 SR	2,225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1000 SR	9,278,938,141	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	03	1.01	06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional				1000 SR	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1000 SR	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	03	1.01	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM				7 Kab/Kota	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		7 Kab/Kota	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara				4 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		4 Unit	900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	03	1.01	10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	%		%	68.90 %	2,153,137,213						68.90 %	2,488,254,099	
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						2,153,137,213							2,488,254,099	
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun				2 Dokumen	468,137,213		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	04	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	03	04	1.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi				1 Rumah Tangga	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Rumah Tangga	688,254,099	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	04	1.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi				2 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Unit	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	04	1.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan				3 Rumah Tangga	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Rumah Tangga	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	04	1.01	06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan				1 Unit	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	04	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	04	1.01	08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				1 Kelompok Masyarakat	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Kelompok Masyarakat	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	%		%	93.06 %	2,735,050,953						93.06 %	2,881,483,899	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						2,735,050,953							2,881,483,899	
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun				2 Dokumen	903,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	05	1.01	02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan				2 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Unit	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	03	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat				1 Rumah Tangga	1,477,050,953		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Rumah Tangga	1,581,483,899	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	05	1.01	04	Rehabilitasi/Peningkata n/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat				1 Rumah Tangga	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Rumah Tangga	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	05	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabili tasi/Peningkatan/Perlu asan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat				2 Dokumen	105,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	05	1.01	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik				7 Kelompok Masyarakat	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		7 Kelompok Masyarakat	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	%		%	51.3 %	40,875,000,000						51.3 %	6,695,813,942	
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi						40,875,000,000							6,695,813,942	
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				1 Dokumen	1,345,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	06	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningk atan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				1 Dokumen	330,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan				10 Unit	37,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		10 Unit	5,545,813,942	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	06	1.01	06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara				5 Unit	2,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Unit	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	%		%	100 %	17,020,443,987						100 %	5,588,270,466	
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						17,020,443,987							5,588,270,466	
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				5 Sistem Jaringan	15,720,443,987		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		5 Sistem Jaringan	4,588,270,466	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	07	1.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara				2 Sistem Jaringan	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Sistem Jaringan	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian				3 Sistem Jaringan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Sistem Jaringan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	07	1.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				1 Orang	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Orang	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	%		%	100 %	238,697,500,000						100 %	3,950,848,085	
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						238,697,500,000							3,950,848,085	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				10 Dokumen	10,897,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		10 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai				1 Unit	5,800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	08	1.01	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	08	1.01	09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Unit	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	08	1.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara				0 Dokumen 10 Dokumen	221,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 Dokumen 10 Dokumen	2,350,848,085	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	%		%	30 %	121,957,825,873						30 %	35,166,187,904	
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						121,957,825,873							35,166,187,904	
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				3 Dokumen	2,575,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3 Dokumen	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaa n Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				1 Kawasan	500,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Kawasan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				8 Kawasan	117,282,825,873			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		8 Kawasan	32,266,187,904	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	09	1.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				4 Kawasan	1,600,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		4 Kawasan	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kondisi baik (%)	%		%	64.75 %	849,946,520,365						64.75 %	222,396,761,227	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						849,946,520,365							222,396,761,227	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				21 Dokumen	21,358,143,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		21 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				20000 M²	5,300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		20000 M²	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen				2 Dokumen	347,265,600				Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				4 Dokumen	4,144,380,000				Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		4 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan terbangun Panjang Jalan yang Dibangun				3.46 KM 0 KM	334,050,947,365				Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		3.46 KM 0 KM	26,996,761,227	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar				0 KM 4 KM	33,800,000,000				Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 KM 4 KM	20,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur Panjang jalan yang dilebarkan menambah lajur				0 KM 4 km	74,077,095,000				Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 KM 4 km	20,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang direkonstruksi				0 KM 4 KM	27,350,000,000				Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 KM 4 KM	30,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM 0 KM	35,350,000,000				Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 KM 0 KM	15,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang jalan yang dipelihara				0 KM 1.4 KM	71,662,000,000				Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 KM 1.4 KM	7,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin Panjang jalan yang dipelihara				0 KM 35 KM	7,623,000,000				Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 KM 35 KM	7,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan terbangun Panjang Jembatan yang Dibangun				6 unit 0 M	167,286,688,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		6 unit 0 M	35,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	03	10	1.01	13	Pembangunan Flyover	Panjang Flyover yang Dibangun				2 M	20,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 M	30,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				2 M	3,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 M	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				2 M	12,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 M	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				2 M	3,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 M	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				2 M	3,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 M	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana				2 KM	8,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 KM	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				7 Dokumen	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		7 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				10 Dokumen	13,097,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		10 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%		%	10.00 %	3,280,800,000						10.00 %	1,150,000,000	
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						2,530,800,000							650,000,000	
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan				110 Orang	1,252,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		110 Orang	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi				120 Orang	708,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		120 Orang	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				100 Orang	570,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		100 Orang	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi						450,000,000							250,000,000	
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Laporan	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI				0 Orang	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						300,000,000							250,000,000	
1	03	11	1.03	01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang- Undangan				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi				6 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		6 Laporan	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	%		%	78 %	2,940,000,000					78 %	1,200,000,000		
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi						500,000,000						300,000,000		
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				10 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		10 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				4 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		4 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang						200,000,000							200,000,000	
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						1,500,000,000							300,000,000	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dam pembangunan daerah				1 laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 laporan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				2 Dokumen	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						740,000,000							400,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Agenda Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 kegiatan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 kegiatan	40,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	340,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	340,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						2,350,000,000							150,000,000	
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)	%		%	100 %	2,350,000,000						100 %	150,000,000	
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi						2,350,000,000							150,000,000	
2	10	03	1.01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				1 Dokumen	2,350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
TOTAL											1,501,773,951,758							348,797,401,061	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						132,594,896,983								119,461,989,724		
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						120,725,673,166								98,389,996,814		
1	02	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20,000,000								2,950,824		
1	02	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	1,967,216	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10,000,000							1 Laporan	983,608	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						63,781,249,436								39,722,519,814		
1	02	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4186 Orang/ Bulan	62,085,369,436			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		4186 Orang/ Bulan	38,708,653,693	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1,650,880,000							1 Dokumen	1,007,964,473	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	10,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	983,608	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	983,608	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	15,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	2,950,824	Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	10,000,000		Pelampauan Penerimaan PAD		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		4 Laporan	983,608	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10,000,000								98,360,789	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	98,360,789	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0								2,950,824	
1	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0							1 Dokumen	1,967,216	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	983,608	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150,000,000								189,740,752	
1	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0						1 Unit	9,836,079	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket 1 Paket	0						0 Paket 1 Paket	121,967,378	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0						1 Dokumen	9,836,079	Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 25 Orang	150,000,000					0 Orang 25 Orang	38,265,137	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				50 Orang	0					50 Orang	9,836,079	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2,475,000,000						1,198,087,377		
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	75,000,000					1 Paket	75,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	400,000,000					1 Paket	121,967,378	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	150,000,000					1 Paket	61,056,193	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	800,000,000					1 Paket	366,337,156	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	200,000,000					1 Paket	90,491,926	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	983,608	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	100,000,000					1 Laporan	30,528,096	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	750,000,000					1 Laporan	451,723,020	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,275,000,000						344,262,760		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPД)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		196,721,577	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	9,836,078	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	9,836,079	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	29,508,237	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	98,360,789	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18,481,420,000							11,284,157,512	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	30,528,096	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	4,197,275,114	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	170,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	32,459,060	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10,761,420,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	7,023,895,242	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6,660,000,000							301,003,241	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	60,000,000					10 Unit	35,750,721	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	700,000,000					26 Unit	183,168,578	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	5,900,000,000					4 Unit	82,083,942	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						27,873,003,730						45,245,962,921		
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	27,873,003,730		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit Kerja	45,245,962,921	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						11,569,223,817						16,973,863,297		
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						10,565,284,705						9,296,863,297		
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
														Nasional	Daerah					
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				0 Unit 1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit 1 Unit	850,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				5 Unit	1,240,748,843		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Unit	1,500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	4,300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		3 Unit	1,000,200,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			0	Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan				1 Paket	473,256,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				50 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		50 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				90 Unit	2,650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		90 Unit	2,390,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				1 Paket	1,876,279,062		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	2,146,663,297	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						1,003,939,112							6,527,000,000	
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	878,939,112		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	1,502,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen 1 Dokumen	170,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	65,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	4,750,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						0							700,000,000	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						0							450,000,000	
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				0 Unit 1 Unit	0				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit 1 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						300,000,000							4,098,129,613	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						0							3,248,129,613	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang 490 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang 490 Orang	3,248,129,613	Dinas Kesehatan
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						300,000,000							850,000,000	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan				100 Orang	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		100 Orang	700,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
TOTAL										132,594,896,983								119,461,989,724	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						25,059,875,879								22,321,097,905			
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19,893,069,651							21,358,191,757				
1	05	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150,001,735							80,000,000				
1	05	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	75,001,735	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2 Dokumen	31,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran			
1	05	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran			
1	05	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran			
1	05	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran			
1	05	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran			
1	05	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	75,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12,195,779,879							14,355,956,668	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/ Bulan	11,724,371,879	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				71 Orang/ Bulan	13,900,956,668	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	451,408,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	439,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	12,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0						7,000,000		
1	05	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						207,551,000							140,000,000	
1	05	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	207,551,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Orang	28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						526,243,942							225,000,000	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,995,600	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	74,942,200	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15,000,870	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	39,993,400	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25,000,100	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	9,360,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	331,946,772	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	25,005,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							573,201,100						115,000,000	
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	484,095,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	89,106,100	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5,810,499,495							6,291,835,089	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	264,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	143,999,495	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	140,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	14,400,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	12,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,652,100,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	5,875,835,089	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						429,792,500							143,400,000	
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	99,960,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9 Unit	100,692,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Unit	52,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	29,140,500	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
1	05	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	0	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	31,400,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	200,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
1	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	4,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				0 Ha	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Ha	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							3,977,699,700						936,289,054	
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							2,967,900,000						470,450,000	
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				96 Kasus	654,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				96 Kasus	97,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				24 Kasus	364,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24 Kasus	194,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	33,950,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	33,950,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				40 Orang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Orang	33,950,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	02	1.01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	49,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	33,950,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				3 Unit	400,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	31,950,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	02	1.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	340,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	9,700,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur						459,799,700							324,950,000	
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	99,999,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	97,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	284,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	33,950,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				1 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	194,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi						550,000,000						140,889,054		
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				1 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	63,289,054	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	77,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						1,189,106,528							26,617,094	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran						1,089,106,528							20,000,000	
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	4,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	04	1.01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	190,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1		05	04		1.01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			1 Dokumen	129,131,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1		05	04		1.01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait			0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1		05	04		1.01	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1		05	04		1.01	07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1		05	04		1.01	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1		05	04		1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)			0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	04	1.01	10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	04	1.01	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIKIP)				7 Kabupaten/Kota	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Kabupaten/Kota	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	04	1.01	12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan				1 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	04	1.01	13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				40 Keluarga	199,975,328	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Keluarga	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						100,000,000							6,617,094	
1	05	04	1.02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	4,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	04	1.02	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	2,617,094	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
TOTAL										25,059,875,879								22,321,097,905	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
															Nasional	Daerah						
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	02					SEKRETARIAT DPRD						161,198,334,848								160,608,491,519		
4	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	88,337,930,210						100 %	90,633,523,800			
4	02	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						900,000,000							900,000,000			
4	02	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD		
4	02	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD		
4	02	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD		
4	02	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	100,000,000	Sekretariat DPRD		
4	02	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	200,000,000	Sekretariat DPRD		
4	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						50,656,896,237							54,185,030,697			
4	02	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	49,206,896,237					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		14 Orang/ Bulan	52,735,030,697	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	850,000,000	Sekretariat DPRD		
4	02	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1,100,000,000							1,100,000,000	
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		60 Orang	300,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		60 Orang	150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		60 Orang	150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						18,339,103,763							17,453,887,315	
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,050,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,689,103,763		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	9,153,887,315	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	6,300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	7,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	300,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3,600,000,000							3,000,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	400,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		15 Unit	70,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1,280,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	680,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		6 Unit	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		6 Unit	850,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6,891,005,787							7,891,005,788	
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	2,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4,891,005,787		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	5,891,005,788	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5,100,000,000							4,100,000,000	
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				60 Unit	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		60 Unit	80,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		60 Unit	20,000,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				5 Unit	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Unit	80,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		8 Unit	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				500 Unit	2,020,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		500 Unit	2,020,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		4 Unit	300,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		4 Unit	300,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		8 Unit	300,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						1,300,000,000							1,300,000,000	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				13 Orang/Bulan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		13 Orang/Bulan	200,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	650,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		45 Orang	450,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD						450,924,423							703,600,000	
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	450,924,423		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	703,600,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	% %		% %	74 % 100 %	72,860,404,638					74 % 100 %	69,974,967,719		
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD						1,000,000,000						1,000,000,000		
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	300,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	300,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran						500,000,000							500,000,000	
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD						9,550,000,000							6,400,000,000	
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	3,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				1 Dokumen	1,350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	350,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				36 Orang	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		36 Orang	750,000,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				36 Orang	1,950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		36 Orang	1,800,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	2,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	2,500,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						30,452,675,576							30,676,774,757		
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	1,252,675,576		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	1,476,774,757	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				1 Dokumen	29,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	29,000,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD						31,357,729,062							31,398,192,962		
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	30,707,729,062		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	30,748,192,962	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	200,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	250,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD	
TOTAL											161,198,334,848								160,608,491,519	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
															Nasional	Daerah					
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01					SEKRETARIAT DAERAH						337,725,835,562								62,303,139,231	
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	87 %	3,514,303,515						87 %	1,904,212,513		
4	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						130,000,000							110,000,000		
4	01	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	80,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		1 Dokumen	80,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	30,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						230,000,000							150,000,000		
4	01	01	1.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	80,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				28 Orang	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				28 Orang	150,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						829,117,355							835,212,513		
4	01	01	1.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	45,000,000	Sekretariat Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	179,117,355	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	80,212,513	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	660,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						850,000,000							80,000,000	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	200,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	650,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Unit	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,223,040,960							600,000,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,073,040,960	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						252,145,200							129,000,000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	202,145,200	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	129,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%		%	40 %	334,211,532,047						40 %	60,398,926,718	
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual						324,310,758,126							52,395,671,621	
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1 Unit	279,698,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	26,701,227,748	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				6 Lembaga	44,612,758,126	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Lembaga	25,694,443,873	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						8,653,729,228							7,251,042,616	
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Dokumen	7,767,378,881	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	6,659,980,556	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen	536,106,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	340,324,566	Sekretariat Daerah		
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	350,244,347	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	250,737,494	Sekretariat Daerah		
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar						1,247,044,693							752,212,481			
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	350,244,347	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	250,737,494	Sekretariat Daerah		
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	546,556,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	250,737,494	Sekretariat Daerah		
4	01	04	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				1 Dokumen	350,244,346	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	250,737,494	Sekretariat Daerah		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						548,654,063								604,153,370		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						548,654,063						604,153,370		
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0						0		
4		01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0 Laporan	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						478,094,063						533,593,370		
4		01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	0 Paket	0	Sekretariat Daerah	
4		01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					64,121,370		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		74,121,370	Sekretariat Daerah	
4		01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 Bulan	10,432,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	12 Bulan	10,432,000	Sekretariat Daerah	
4		01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Bulan	403,540,693		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	12 Bulan	449,040,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
4		01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	1 Paket	0	Sekretariat Daerah	
4		01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit 0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	2 Unit 0 Unit	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0						0		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		0 Laporan	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		0 Laporan	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70,560,000							70,560,000		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	70,560,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		12 Bulan	70,560,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Unit	0	Sekretariat Daerah	
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						0							0		
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						0							0		
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						0							0		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						0							0		
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						2,834,418,578							2,678,425,187		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administراس Kantor	%		%	87 %	2,379,347,937							87 %	2,245,140,708	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,000,000						15,000,000			
4		01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		3 Laporan	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,000,000							0		
4		01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Orang	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						228,583,521							387,000,000		
4		01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 2 Paket	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Bulan 2 Paket	5,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	50,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	41,583,521		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Paket	50,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	15,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Bulan 3 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Bulan 3 Paket	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan 1 Laporan	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Bulan 1 Laporan	7,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan 1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Bulan 1 Laporan	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30,000,000							30,000,000	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit 1 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Unit 1 Paket	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit 2 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Unit 2 Unit	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit 2 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Unit 2 Unit	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,728,090,000							1,728,090,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan 1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Bulan 1 Laporan	5,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 2 Laporan	35,590,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Bulan 2 Laporan	35,590,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 1 Laporan	28,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Bulan 1 Laporan	28,800,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan 1 Laporan	1,658,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Bulan 1 Laporan	1,658,700,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						332,674,416							85,050,708	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Bulan 1 Unit	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Bulan 1 Unit	40,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 3 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Bulan 3 Unit	10,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan 1 Unit	292,674,416		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		12 Bulan 1 Unit	35,050,708	Sekretariat Daerah
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%		%	8,3 %	455,070,641					8,3 %	433,284,479		
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						124,070,641						111,284,479		
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen 1 Laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 1 Laporan	37,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Proses Pemilihannya Diselesaikan Sesuai Perencanaan				1 Laporan 92 %	44,070,641		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan 92 %	37,284,479	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen 1 Laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 1 Laporan	37,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						211,000,000						205,000,000		
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan Secara Elektronik				1 Laporan 93 %	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan 93 %	37,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Sistem Informasi berbasis web yang dikembangkan dan/atau dikelola oleh Biro PBJ				2 Laporan 2 Sistem	131,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Laporan 2 Sistem	131,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen yang Disusun Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen 1 Laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 1 Laporan	37,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						120,000,000							117,000,000	
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah SDM PBJ yang Mengikuti Pembinaan				20 Orang 20 Orang	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		20 Orang 20 Orang	37,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Kelembagaan PBJ Kab/Kota yang Mengikuti Pembinaan				1 Dokumen 7 Kab/Kota	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 7 Kab/Kota	40,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen yang Disusun				1 Dokumen 1 Dokumen	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 1 Dokumen	40,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						2,746,540,100							2,763,752,238	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,461,803,498							1,461,803,498	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15,000,000							15,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
4		01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Laporan	15,000,000	Sekretariat Daerah	
4		01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						155,000,000								155,000,000	
4		01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	30,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 orang 5 Orang	50,000,000							5 orang 5 Orang	50,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan				0 Orang 2 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0 Orang 2 Dokumen	75,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						504,000,000								504,000,000	
4		01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	80,000,000							1 Paket	80,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	20,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	34,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	25,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	345,000,000							1 Laporan	345,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						662,036,000								662,036,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15,506,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	15,506,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	631,530,000						1 Laporan	631,530,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						125,767,498							125,767,498	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Unit	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	25,767,498		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit	25,767,498	Sekretariat Daerah
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						1,284,736,602							1,301,948,740	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan						795,051,138							812,263,276	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun Persentase Produk Hukum Pengaturan yang difasilitasi				1 Dokumen 100 Persen	235,239,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 100 Persen	235,239,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun Persentase Produk Hukum Penetapan yang difasilitasi				1 Dokumen 100 Persen	150,912,138		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 100 Persen	150,912,138	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Persentase Produk Hukum yang didokumentasikan				1 Dokumen 100 Persen	133,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 100 Persen	150,912,138	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Persentase Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi				1 Dokumen 100 persen	275,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 100 persen	275,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum						489,685,464							489,685,464	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan Jumlah Penyelesaian masalah hukum yang difasilitasi				0 Kasus 10 Kasus 10 kasus	265,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Kasus 10 Kasus 10 kasus	265,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan Jumlah sengketa yang difasilitasi				5 Sengketa 5 Sengketa	224,685,464		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Sengketa 5 Sengketa	224,685,464	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						225,500,000							0	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						225,500,000							0	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						225,000,000							0	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	225,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Sei Jang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						500,000							0	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						2,412,253,341							2,485,840,686	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,473,109,129						1,517,800,000			
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,000,000						5,000,000			
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	5,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30,000,000						25,000,000			
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket 1 Paket	5,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Paket 1 Paket	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Orang	25,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						258,499,129						314,500,000			
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	2,500,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	2,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	11,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	66,000,000	Sekretariat Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	31,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	20,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	22,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	103,999,129	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24,000,000							20,000,000	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	20,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		6 Unit	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						954,100,000							955,200,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	1,100,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	5,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	74,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	75,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	874,100,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	874,100,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						201,510,000							198,100,000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	180,510,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Unit	181,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	15,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		6 Unit	16,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	1,100,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						939,144,212							968,040,686	
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						270,000,000							270,000,000	
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	75,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	75,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah						349,144,212							378,040,686	
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1 Dokumen	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	75,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	123,040,686	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 laporan	199,144,212		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 laporan	180,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah						320,000,000							320,000,000	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	170,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak					1 Dokumen	170,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				1 Dokumen	75,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	75,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 laporan	75,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 laporan	75,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						4,223,842,542							4,401,186,030	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2,290,135,703							2,488,626,017	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100,455,800							110,455,800	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	40,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	25,455,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Laporan	30,455,800	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Laporan	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						85,000,000							76,556,000	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	16,140,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		3 Orang	35,416,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				30 Orang	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		30 Orang	25,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						880,650,903							1,058,305,306	
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12,474,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			15,474,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	89,204,210						1 Paket	113,359,306	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25,432,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	35,432,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	733,540,693		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	874,040,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						41,519,000							50,056,000	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	9,856,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	9,856,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	31,663,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		3 Unit	40,200,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,052,350,000							1,057,900,000		
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	3,550,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	14,500,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	96,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	96,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	943,850,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	943,850,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						130,160,000							135,352,911		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	125,560,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		15 Unit	130,560,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	4,600,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	4,792,911	Sekretariat Daerah	
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						0							15,000		
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						0							15,000		
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah		0 Dokumen	15,000	Sekretariat Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						1,304,727,628						1,316,218,056		
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						389,786,762						389,786,762		
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	204,198,867				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	204,198,867	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Dokumen	185,587,895				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	185,587,895	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						305,718,289							400,528,850	
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1 Dokumen	101,304,530				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	133,214,400	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	104,105,559				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	134,101,600	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				2 Dokumen	100,308,200				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	133,212,850	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						609,222,577							525,902,444	
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	274,609,118				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	263,485,235	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	230,309,459				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	130,017,109	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	104,304,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	132,400,100	Sekretariat Daerah
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						628,979,211							596,326,957	
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						370,989,211							354,326,957	
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				2 Laporan	123,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Laporan	120,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	89,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				1 Laporan	152,989,211		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	145,326,957	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						257,990,000							242,000,000	
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				2 Dokumen	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Dokumen	62,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	64,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	60,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPД)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	128,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Daerah	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						2,822,737,061							2,548,739,932		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,697,737,061								1,271,374,151	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						101,984,460								70,372,000	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				1 Laporan	101,984,460		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	70,372,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						89,186,000								89,186,000	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	88,686,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	88,686,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Orang	500,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						735,631,881								602,368,739	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,520,881		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	50,520,881	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14,981,045		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	14,981,045	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	17,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	17,400,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	500,000	Sekretariat Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	652,229,955	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	518,966,813	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15,600,000							2,500,000	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	15,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Unit	2,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						616,300,000							445,543,012	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	1,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	35,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	579,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	409,043,012	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						139,034,720							61,404,400	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	139,034,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	61,404,400	Sekretariat Daerah
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1,125,000,000							1,277,365,781	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						410,000,000						592,365,781				
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	110,000,000					1 Dokumen	290,000,000	Sekretariat Daerah			
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	155,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				1 Dokumen	190,000,000						1 Dokumen	147,365,781	Sekretariat Daerah		
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						715,000,000							685,000,000			
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	205,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	290,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	75,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	70,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	75,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	175,000,000	Sekretariat Daerah		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						25,987,517,649							0			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						25,987,517,649							0			
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						925,000,000							0			
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	250,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Dokumen	0	Sekretariat Daerah		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	85,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	290,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1,150,000,000							0	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket 1 Paket	350,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Paket 1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Sei Jang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 100 Orang	650,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang 100 Orang	0	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				0 Orang	0	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Orang	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						4,157,000,262							0	
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	225,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	606,400,262	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	375,600,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1,800,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2,250,000,000							0	
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	1,500,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		4 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	750,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		25 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6,085,375,500							0	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	70,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	529,341,500	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	250,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,236,034,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						750,000,000							0	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	200,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		15 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	200,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit 10 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	350,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.13		Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan						4,081,925,887							0	
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				573 Dokumen	450,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		573 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	2,481,925,887	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1 Laporan	1,150,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan						6,588,216,000							0	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1 Laporan	2,487,142,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Laporan	2,432,882,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1 Laporan	1,668,192,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						179,569,182,941								154,625,201,892		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						179,569,182,941								154,625,201,892		
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						71,375,000								71,375,000		
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	71,375,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Laporan	71,375,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74,519,955,920								74,519,955,920		
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				320 Orang/ Bulan	67,508,850,455	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		320 Orang/ Bulan	67,508,850,455	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	6,309,644,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	6,309,644,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	243,978,465	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	243,978,465	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	259,483,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	259,483,000	Sekretariat Daerah		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	45,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	45,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						45,000,000							45,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						108,000,000							108,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,401,959,280							1,401,959,280	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	52,887,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	52,887,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	480,582,280	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	480,582,280	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	170,274,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	170,274,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	45,439,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	45,439,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	652,777,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	652,777,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						447,995,414							447,995,414	
4	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				6 Unit	42,687,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		6 Unit	42,687,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	158,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	158,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	36,479,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	36,479,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	41,475,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		15 Orang	41,475,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				20 Orang	84,677,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		20 Orang	84,677,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				20 Orang	84,677,414	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		20 Orang	84,677,414	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						19,618,159,442							20,118,159,442	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,201,515,687	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	1,701,515,687	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	92,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	92,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,320,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	8,320,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	226,847,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	226,847,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	78,658,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	78,658,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	7,863,716,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	7,863,716,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1,553,976,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	1,553,976,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	248,284,755	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	248,284,755	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	33,162,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen	33,162,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						31,344,882,505							3,299,338,505	
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	31,045,544,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Unit	3,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	299,338,505	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	299,338,505	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27,047,084,287							29,047,084,287	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	527,811,008	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	527,811,008	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,811,355,799	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	7,811,355,799	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,680,917,480	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	4,680,917,480	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	16,027,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		0 Laporan	16,027,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13,250,816,093							13,852,379,044	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				39 Unit	493,685,931	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		39 Unit	493,685,931	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				210 Unit	5,800,504,273	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		210 Unit	5,800,504,273	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				400 Unit	154,011,290	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		400 Unit	154,011,290	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2,974,042,781	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		5 Unit	3,575,605,732	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	586,662,947	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		3 Unit	586,662,947	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	3,241,908,871	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		18 Unit	3,241,908,871	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						3,631,955,000							3,631,955,000	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	315,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Orang/Bulan	315,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	176,250,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	176,250,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	140,705,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Orang	140,705,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	3,000,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		2 Orang/Bulan	3,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						7,268,000,000							7,268,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	3,100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	3,100,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	2,433,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	2,433,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1,735,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Paket	1,735,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.13		Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan						967,000,000							967,000,000		
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	967,000,000	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Laporan	967,000,000	Sekretariat Daerah	
TOTAL											559,096,481,837							232,410,438,566		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						40,725,382,257								28,482,702,449			
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	15,283,127,483						100 %	14,389,747,374				
2	17	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						585,000,000							435,000,000				
2	17	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			2 Dokumen	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2	17	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Dokumen	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2	17	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Laporan	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2	17	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	260,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Laporan	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2	17	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,576,235,365							8,568,247,374				
2	17	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	7,730,975,365	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			12 Orang/ Bulan	7,580,975,365	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2	17	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	620,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			12 Dokumen	657,272,009	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Laporan	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			6 Laporan	280,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						275,000,000							275,000,000	
2	17	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Dokumen	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			2 Laporan	125,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						243,400,000							125,000,000	
2	17	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				72 Paket	68,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			72 Paket	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				72 Orang	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			72 Orang	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,918,000,000							1,470,000,000	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Paket	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	310,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			4 Paket	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			10 Paket	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			2 Paket	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	38,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Paket	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Laporan	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Laporan	600,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Dokumen	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Dokumen	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						803,992,118							810,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		2 Unit	600,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		2 Unit	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	143,992,118	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		3 Unit	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,541,500,000						2,206,500,000		
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	435,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		1 Laporan	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		1 Laporan	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		1 Laporan	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,856,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		1 Laporan	1,856,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						340,000,000						500,000,000		
2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	160,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		8 Unit	175,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		8 Unit	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		1 Unit	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%		%	16.34 %	1,146,162,818					16.34 %	635,339,001		
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						646,162,817						420,000,000		
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				14 Unit Usaha	646,162,817	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14 Unit Usaha	420,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						500,000,001						215,339,001		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				5 Unit Usaha	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		5 Unit Usaha	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	02	1.02	02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah koperasi yang terakomodir pada Sistem Pelayanan Perizinin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 laporan	150,000,001	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		1 laporan	115,339,001	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi	%		%	3,53 %	274,801,112					3,53 %	250,791,711		
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						185,000,000						160,000,000		
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat				25 Dokumen	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		25 Dokumen	80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel				25 Unit Usaha	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		25 Unit Usaha	80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					89,801,112						90,791,711			
2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat				30 Unit Usaha	89,801,112	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		30 Unit Usaha	90,791,711	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	%		%	7,87 %	183,200,741					7,87 %	167,194,474		
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						183,200,741						167,194,474		
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi				8 Unit Usaha	92,200,741	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		8 Unit Usaha	84,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan				8 Unit Usaha	91,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		8 Unit Usaha	83,194,474	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	% %		% %	18.8 % 0.64 %	4,092,412,220					18.8 % 0.64 %	951,336,556		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						2,592,412,217						476,336,556		
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				107 Orang	2,592,412,217	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			107 Orang	476,336,556	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05	1.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1,500,000,003						475,000,000		
2	17	05	1.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM				0 293 Orang	1,500,000,003	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			0 293 Orang	475,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan	%		%	33.18 %	3,915,748,478						33.18 %	2,152,153,911	
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						3,915,748,478							2,152,153,911	
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha				27 Unit Usaha	1,400,748,478	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			27 Unit Usaha	850,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				15 Unit Usaha	1,915,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		15 Unit Usaha	702,153,911	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	06	1.01	03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				200 Keluarga	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200 Keluarga	600,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Wirausaha Baru	%		%	28.52 %	3,654,613,886					28.52 %	1,627,524,123		
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						3,654,613,886						1,627,524,123		
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				450 Unit Usaha	2,954,613,886	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		450 Unit Usaha	1,327,524,123	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	07	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				100 Orang	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 Orang	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	%		%	29.36 %	12,175,315,519					29.36 %	8,308,615,299			
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						12,175,315,519						8,308,615,299			
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				5220 Unit Usaha	11,875,315,519	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		5220 Unit Usaha	8,008,615,299	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
2	17	08	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				100 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 Orang	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
TOTAL											40,725,382,257							28,482,702,449		